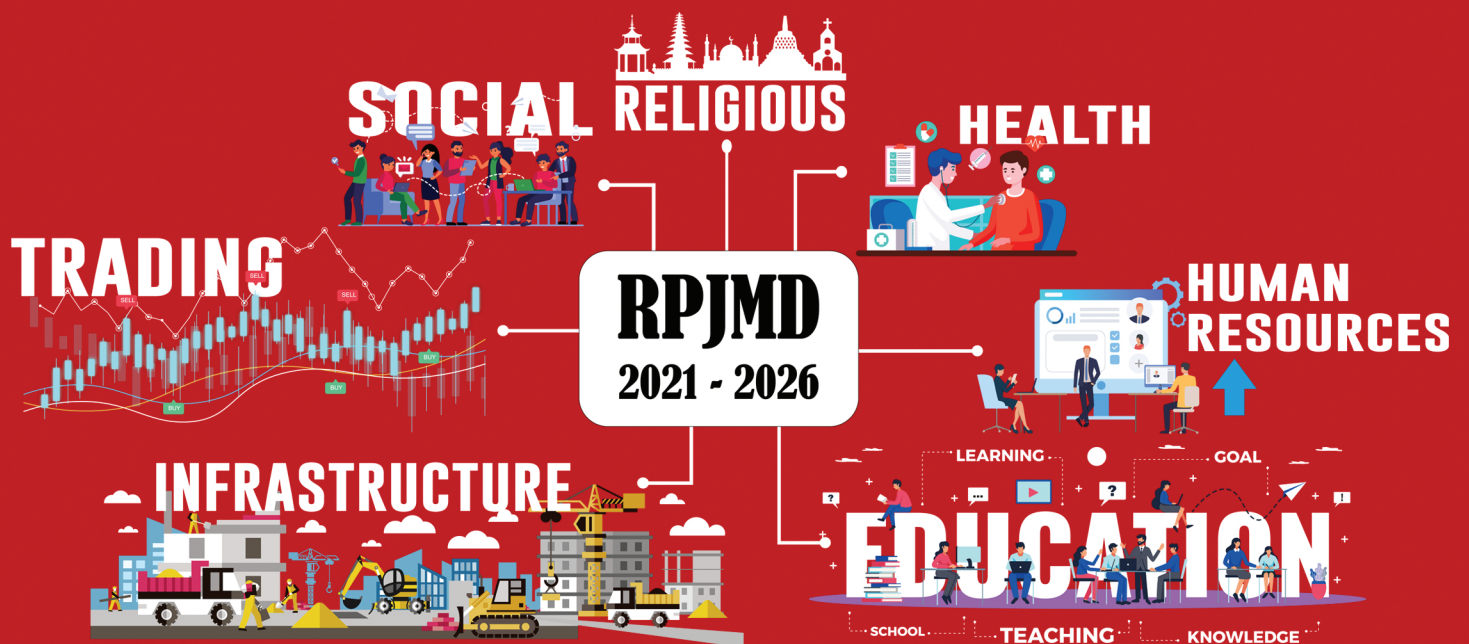




RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026





WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021- 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung Menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
21. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
31. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12);
32. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13);

33. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 03 Seri E Nomor 01);
34. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2011 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2011 Nomor 10);
35. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2016 Nomor 07).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG
dan
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan Fungsi Urusan Penunjang Pemerintahan yaitu Bidang Urusan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II KEDUDUKAN RPJMD

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Walikota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RTRW Provinsi Lampung, RPJPD Provinsi Lampung, RPJMD Provinsi Lampung, RTRW Kota Bandar Lampung, RPJPD Kota Bandar Lampung, RPJPN, dan RPJMN.

- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam Penyusunan RKPD, Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB III SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 3

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - BAB I : Pendahuluan
 - BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - BAB III : Gambaran Umum Keuangan Daerah
 - BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah
 - BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
 - BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah
 - BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
 - BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - BAB IX : Penutup
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPJMD

Pasal 4

- (1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD mencakup pelaksanaan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan Daerah dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah untuk perencanaan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

BAB V PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 25 Agustus 2021
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,



EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 25 Agustus 2021
Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,



TOLE DAILAMI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021 NOMOR 01
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG 01/1183/BL/2021

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 01 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026

I. UMUM

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 260 ayat (1) bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional disegala bidang kehidupan yang berlandaskan pada riset dan inovasi nasional yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila dan Pasal 263 ayat (3) RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 (dua puluh) tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk pembangunan 5 (lima) tahun.

Tahapan perencanaan pembangunan dalam setiap periode RPJMD merupakan tahapan pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan arahan dari dokumen RPJPD, guna menjaga kesinambungan dari setiap periode 5 (lima) tahun pemerintahan ke periode 5 (lima) tahun berikutnya. Tahapan RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan tahapan ke-4 dari RPJPD Tahun 2005-2025 atau tahapan RPJMD terakhir periode jangka panjang dari tiga periode RPJMD sebelumnya (2005-

2010, 2011-2015, dan 2016-2021). Memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 640/16/SJ Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, maka untuk periodisasi RPJMD Tahun 2021-2026. Penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Selanjutnya dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 akan menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, pedoman bagi pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD serta menjadi instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja Kepala Daerah dan Kinerja Kepala Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
DAFTAR DIAGRAM	v
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-8
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-12
1.3.1 Hubungan RPJMD dan Sustainable Development Goal's (SDGs).....	I-14
1.3.2 Hubungan RPJMD Kota Bandar Lampung dan RPJM Nasional.....	I-15
1.3.3 Hubungan RPJMD Kota Bandar Lampung dan RPJMD Provinsi Lampung.....	I-17
1.3.4 Hubungan RPJMD Kota Bandar Lampung dengan RPJPD Kota Bandar Lampung, RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.....	I-22
1.3.5 Hubungan RPJMD Kota Bandar Lampung dan RTRW Nasional dan RTRW Provinsi Lampung, dan RTRW Kota Bandar Lampung	I-23
1.4 Maksud dan Tujuan	I-41
1.5 Sistematika Penulisan.....	I-42

BAB II	GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH	II-1
2.1	Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.2.1	Letak dan Kondisi Geografi Daerah.....	II-1
2.2.2	Potensi Pengembangan Wilayah	II-15
2.2.3	Wilayah Rawan Bencana	II-20
2.2.4	Demografi.....	II-25
2.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-27
2.2.1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-27
2.2.2	Fokus Kesejahteraan Sosial.....	II-38
2.2.3	Fokus Seni Budaya dan Olahraga.....	II-50
2.2.4	Fokus Reformasi Birokrasi.....	II-52
2.3	Aspek Pelayanan Umum	II-57
2.3.1	Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib ...	II-57
2.3.1.1	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II-57
2.3.1.2	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II-81
2.3.2	Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan	II-107
2.4	Aspek Daya Saing Daerah	II-114
2.4.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.....	II-114
2.4.2	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II-121
2.4.3	Fokus Iklim Berinvestasi	II-132
2.4.4	Fokus Sumber Daya Manusia	II-111
2.5	Capaian Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM).....	II-154
2.6	Capaian Kinerja Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2016-2020 ...	II-166
2.7	Capaian Kinerja Pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2020	II-206
BAB III	GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH.....	III-1
3.1	Kinerja Keuangan Masa Lalu.....	III-2
3.1.1	Kinerja Pelaksanaan APBD	III-2

3.1.2 Neraca Daerah	III-11
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu.....	III-19
3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran	III-19
3.2.1.1. Kebijakan Umum Pendapatan	III-19
3.2.1.2. Kebijakan Umum Belanja	III-23
3.2.2 Analisis Pembiayaan	III-28
3.3 Kerangka Pendanaan	III-33
3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja	III-33
3.3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan.....	III-41
3.3.3 Rencana Alokasi Penerapan SPM	III-49

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH IV-1

4.1 Permasalahan Pembangunan	IV-1
4.1.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	IV-1
4.1.2 Identifikasi Permasalahan Terkait Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.....	IV-3
4.1.2.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib	IV-3
4.1.2.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar ..	IV-3
4.1.2.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	IV-18
4.1.2.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan	IV-17
4.2 Isu Strategis.....	IV-20
4.2.1 Isu Strategis Berdasarkan Isu Pembangunan Nasional Dan Global	IV-20
4.2.2 Isu Strategis Berdasarkan RPJPD Kota Bandar Lampung.....	IV-24
4.2.3 Isu Strategis Berdasarkan RTRW Kota Bandar Lampung.....	IV-25

4.2.4 Isu Strategis Berdasarkan Analissis Permasalahan Kota Bandar Lampung	IV-27
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	V-1
5.1. Visi.....	V-6
5.2. Misi	V-9
5.3. Tujuan dan Sasaran.....	V-12
5.4. Telaah Keselarasan Pembangunan	V-18
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VI-1
6.1 Strategi	VI-1
6.2 Arah Kebijakan Pembangunan	VI-6
6.3 Program Pembangunan Daerah.....	VI-29
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VII-1
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH	VIII-1
BAB IX PENUTUP	IX-1
9.1 Pedoman Transisi.....	IX-1
9.2 Kaidah Pelaksanaan.....	IX-2



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Agenda Kerja Utama RPJMD Provinsi Lampung Berdasarkan Sektor Prioritas Pembangunan.....	I-18
Tabel 2.1	Luas dan Wilayah Administrasi Kota Bandar Lampung.....	II-2
Tabel 2.2	Gunung/Bukit/Lereng di Kota Bandar Lampung.....	II-6
Tabel 2.3	Banyaknya Kelurahan menurut Kecamatan, Letak Geografi, dan Topografi Tahun 2020.....	II-7
Tabel 2.4	Gambaran Data Sungai di Kota Bandar Lampung.....	II-8
Tabel 2.5	Titik Banjir Kota Bandar Lampung Tahun 2020	II-24
Tabel 2.6	Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2020	II-25
Tabel 2.7	Kepadatan Penduduk Tahun 2016-2020	II-26
Tabel 2.8	Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2020 berdasarkan Data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung.....	II-27
Tabel 2.9	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (Miliar Rupiah)	II-28
Tabel 2.10	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2016-2020 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)	II-29
Tabel 2.11	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran (Miliar Rupiah) Tahun 2015-2019	II-30
Tabel 2.12	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2015-2019 (Miliar Rupiah)	II-30
Tabel 2.13	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016-2020 (Persen).....	II-31

Tabel 2.14	PDRB Per Kapita Tahun 2016–2020 (Rupiah)	II-33
Tabel 2.15	Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (Persen)	II-34
Tabel 2.16	Kontribusi Kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB Tahun 2016-2020 (Persen)	II-35
Tabel 2.17	Kontribusi Kategori Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2016-2020 (Persen)	II-36
Tabel 2.18	Kontribusi Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Bidang Pariwisata) terhadap PDRB Tahun 2016-2020 (Persen)	II-37
Tabel 2.19	Kontribusi Kategori Sektor Jasa terhadap PDRB Tahun 2016-2020 (Persen)	II-37
Tabel 2.20	Rasio Gini Tahun 2016-2020	II-38
Tabel 2.21	Peningkatan Pengunjung Perpustakaan Tahun 2016-2020	II-41
Tabel 2.22	Prevalensi Kekurangan Gizi (<i>Underweight</i>) pada Anak Balita Tahun 2016-2020	II-43
Tabel 2.23	Prevalensi <i>Stunting</i> (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun) di Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2020	II-44
Tabel 2.24	Prevalensi <i>Stunting</i> (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak Balita (Bawah Lima Tahun) Tahun 2016-2020	II-44
Tabel 2.25	Penduduk Miskin Tahun 2016-2020	II-44
Tabel 2.26	Luas Kawasan Kumuh Tahun 2016-2020	II-45
Tabel 2.27	Penanganan untuk Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Tahun 2017-2020	II-47
Tabel 2.28	Indeks Pembangunan Gender Tahun 2016-2020	II-48
Tabel 2.29	Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Tahun 2016-2020	II-49
Tabel 2.30	Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2016-2020	II-50
Tabel 2.31	Pemuda Pelopor Tahun 2016-2020	II-51
Tabel 2.32	Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2017-2020	II-53
Tabel 2.33	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016-2020	II-53

Tabel 2.34	Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2016 – 2020	II-55
Tabel 2.35	Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2016 – 2020	II-56
Tabel 2.36	Angka Partisipasi Murni SD/MI Tahun 2016-2020 ...	II-57
Tabel 2.37	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs Tahun 2016-2020	II-58
Tabel 2.38	Angka Partisipasi Kasar PAUD Tahun 2016-2020	II-58
Tabel 2.39	Angka Partisipasi Kasar SD/MI Tahun 2016-2020	II-59
Tabel 2.40	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs Tahun 2016-2020	II-59
Tabel 2.41	Persentase Satuan PAUD Berakreditasi Tahun 2016-2020	II-59
Tabel 2.42	Persentase Satuan Pendidikan Dasar SD/MI yang Berakreditasi A Tahun 2016-2020.....	II-60
Tabel 2.43	Persentase Satuan Pendidikan Dasar SD yang Berakreditasi B Tahun 2016-2020.....	II-60
Tabel 2.44	Persentase Satuan Pendidikan Dasar SMP Berakredetasi A Tahun 2016-2020	II-60
Tabel 2.45	Persentase Satuan Pendidikan Dasar SMP Berakredetasi B Tahun 2016-2020.....	II-61
Tabel 2.46	Data Keadaan Guru PAUD, SD, dan SMP sampai dengan Tahun 2020	II-61
Tabel 2.47	Kualifikasi dan Sertifikasi Tenaga Pendidik	II-61
Tabel 2.48	Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	II-62
Tabel 2.49	Jumah Siswa PAUD, SD, dan SMP Tahun 2020	II-62
Tabel 2.50	Rasio Guru terhadap Siswa.....	II-62
Tabel 2.51	Perbandingan Kondisi Ruang Kelas dengan Rombongan Belajar Tahun 2020	II-63
Tabel 2.52	Jumlah Tenaga Kesehatan Tahun 2016-2020	II-63
Tabel 2.53	Rasio Dokter dan Bidan per 100.000 penduduk Tahun 2016-2020.....	II-64
Tabel 2.54	Jumlah Tenaga Kesehatan Lainnya Tahun 2016-2020	II-64
Tabel 2.55	Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu Tahun 2016-2020	II-65
Tabel 2.56	Jumlah Rumah Sakit Tahun 2016-2020.....	II-65
Tabel 2.57	Rasio Pos Pelayanan Terpadu Tahun 2016-2020	II-66

Tabel 2.58	Pencapaian 80 Persen Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi Tahun 2016-2020 (persen).....	II-67
Tabel 2.59	Angka Kematian Ibu, Bayi dan Kasus Gizi Buruk Tahun 2016-2020.....	II-67
Tabel 2.60	Jumlah Kasus Demam Berdarah dan Malaria Tahun 2016-2020	II-70
Tabel 2.61	Cakupan penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Tahun 2016-2020 (persen)	II-70
Tabel 2.62	Jumlah Kasus Penyakit Tuberculosis Tahun 2016-2020	II-71
Tabel 2.63	Prevalensi Tuberculosis (TB) per 100.000 penduduk (CNR) Tahun 2016-2020	II-71
Tabel 2.64	Jumlah Kasus Prevalensi Kasus HIV Tahun 2016-2020	II-71
Tabel 2.65	Rasio Panjang Jalan Dibandingkan Luas Wilayah Tahun 2016-2020.....	II-72
Tabel 2.66	Rasio Panjang Jalan Dibandingkan Jumlah Penduduk Tahun 2016-2020.....	II-73
Tabel 2.67	Rumah Tinggal Bersanitasi Tahun 2016-2020.....	II-73
Tabel 2.68	Persentase Rumah Tinggal yang memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak Tahun 2016-2020	II-73
Tabel 2.69	Persentase Cakupan Layanan SPAM Perkotaan Tahun 2016-2020.....	II-74
Tabel 2.70	Bangunan ber-IMB Tahun 2016-2020	II-76
Tabel 2.71	Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Tahun 2018-2020	II-77
Tabel 2.72	Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2016-2020.....	II-77
Tabel 2.73	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Tahun 2016-2020	II-78
Tabel 2.74	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2016-2020	II-79
Tabel 2.75	Persentase PMKS yang Tertangani Tahun 2016-2020	II-79
Tabel 2.76	Jumlah Tempat Pemakaman Penduduk sampai dengan Tahun 2020.....	II-80
Tabel 2.77	Luasan Areal Pemakaman Milik Pemerintah Kota Bandar Lampung	II-80
Tabel 2.78	Jumlah Angkatan Kerja Tahun 2016-2020.....	II-81

Tabel 2.79	Jumlah Tenaga Kerja yang Terkena Dampak Pandemi Covid-19	II-81
Tabel 2.80	Cadangan Pangan Pemerintah Tahun 2016-2020 ...	II-84
Tabel 2.81	Ketersediaan Energi dan Protein Tahun 2016-2020 ..	II-84
Tabel 2.82	Pengawasan Keamanan Pangan Tahun 2016-2020..	II-85
Tabel 2.83	Penyelesaian Konflik Pertanahan Tahun 2016-2019	II-85
Tabel 2.84	Sertifikasi Tanah bagi Warga Tidak Mampu Tahun 2016-2020	II-86
Tabel 2.85	Penanganan Sampah Tahun 2017-2020	II-87
Tabel 2.86	UPT Pengelolaan Sampah dan Lokasi TPS	II-88
Tabel 2.87	Penduduk Kota Bandar Lampung yang Telah Melakukan Perekaman e-KTP dan Memiliki e-KTP Tahun 2016-2020	II-91
Tabel 2.88	Persentase Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016-2020 (Persen)	II-91
Tabel 2.89	Persentase Kelompok Binaan LPM Tahun 2016-2020	II-92
Tabel 2.90	Jumlah LSM Tahun 2016-2020	II-92
Tabel 2.91	Cakupan Pasangan Usia Subur yang Istrinya di Bawah Usia 20 (Dua Puluh) Tahun.....	II-93
Tabel 2.92	Cakupan Pasangan Usia Subur yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (<i>Unmeet Need</i>) Tahun 2016-2020...	II-94
Tabel 2.93	Pelayanan Parkir Tahun 2016-2020	II-97
Tabel 2.94	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun 2016-2020	II-97
Tabel 2.95	Peningkatan Produktivitas Koperasi Tahun 2016-2020	II-98
Tabel 2.96	Jumlah UKM non BPR/LKMUKM Tahun 2016-2020	II-99
Tabel 2.97	Pertumbuhan Penanaman Modal Asing Tahun 2016-2020	II-99
Tabel 2.98	Pertumbuhan Penanaman Modal Dalam Negeri Tahun 2016-2020	II-100
Tabel 2.99	Organisasi Pemuda yang Aktif di Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2020.....	II-102
Tabel 2.100	Sarana Prasarana Olahraga sampai dengan Tahun 2020	II-103

Tabel 2.101	Objek Wisata Seni Budaya di Kota Bandar Lampung.....	II-105
Tabel 2.102	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2016-2020	II-106
Tabel 2.103	Jumlah Perpustakaan di Kota Bandar Lampung	II-106
Tabel 2.104	Jumlah Data Arsip Terpilah Tahun 2016-2020	II-107
Tabel 2.105	Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya Tahun 2016-2020 (Ton)	II-108
Tabel 2.106	Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2020.....	II-109
Tabel 2.107	Produksi Tanaman Pangan Tahun 2016–2020	II-110
Tabel 2.108	Produktivitas Tanaman Sayuran Tahun 2016–2020	II-110
Tabel 2.109	Populasi Ternak Besar, Kecil dan Unggas Tahun 2016–2020	II-111
Tabel 2.110	Persentase Kontribusi Kategori Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB Tahun 2016-2020.....	II-112
Tabel 2.111	Jumlah Pasar Tradisional dan Modern Tahun 2016-2020	II-112
Tabel 2.112	Persentase Pertumbuhan Kategori Perdagangan Tahun 2016-2020	II-113
Tabel 2.113	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah Tahun 2016-2020	II-113
Tabel 2.114	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan Tahun 2016-2020	II-113
Tabel 2.115	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2016-2020	II-115
Tabel 2.116	Opini Penilaian BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2016-2020	II-115
Tabel 2.117	Kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016-2020	II-117
Tabel 2.118	Perkembangan Koperasi Tahun 2016-2020	II-117
Tabel 2.119	Perkembangan Koperasi Sehat Tahun 2016-2020....	II-118
Tabel 2.120	Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat Tahun 2016-2020	II-118
Tabel 2.121	Perkembangan UMKM Tahun 2016-2020	II-119
Tabel 2.122	Persentase UKM yang Memiliki Laba Tahun 2016-2020	II-119

Tabel 2.123	Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2016-2020.....	II-121
Tabel 2.124	Persentase Kondisi Jalan Kota dalam Kondisi Mantap Tahun 2016-2020.....	II-121
Tabel 2.125	Infrastruktur Jalan Tahun 2016-2017	II-122
Tabel 2.126	Jumlah <i>Fly Over</i> dan <i>Underpass</i>	II-123
Tabel 2.127	Bus Rapi Transit Bandar Lampung Tahun 2016-2020	II-126
Tabel 2.128	Pelayanan Bus Rapi Trans Bandar Lampung Tahun 2017-2020	II-126
Tabel 2.129	Angkutan Perkotaan Bandar Lampung Tahun 2016-2020	II-127
Tabel 2.130	Jurusan, Warna dan Jumlah Trayek Angkutan Tahun 2016-2020	II-127
Tabel 2.131	Marka Jalan yang dikerjakan Tahun 2016-2020	II-129
Tabel 2.132	Jumlah Rambu Lalu Lintas Tahun 2016-2020.....	II-129
Tabel 2.133	Jumlah Persimpangan Tahun 2016-2020.....	II-129
Tabel 2.134	Kasus/Kejadian Kecelakaan Tahun 2016-2020.....	II-130
Tabel 2.135	Jumlah Jaringan Komunikasi Tahun 2016-2020.....	II-130
Tabel 2.136	Pelanggaran Peraturan Daerah Penataan Ruang Tahun 2016-2020	II-131
Tabel 2.137	Indeks Resiko Bencana Tahun 2016-2020.....	II-131
Tabel 2.138	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2016-2020	II-132
Tabel 2.139	Jumlah Tindak Kriminalitas Tahun 2016-2020.....	II-132
Tabel 2.140	Jenis dan Standar Waktu dalam Penyelesaian Izin...	II-133
Tabel 2.141	Jumlah dan Macam Pajak serta Retribusi Daerah....	II-135
Tabel 2.142	Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2016-2020 ..	II-135
Tabel 2.143	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2016-2020	II-136
Tabel 2.144	Jumlah Aparatur Sipil Negara Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2020 (orang)	II-136
Tabel 2.145	Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Bandar Lampung.....	II-137
Tabel 2.146	Pencapaian SPM Kota Bandar Lampung	II-155
Tabel 2.147	Capaian Indikator SDGs di Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2020	II-166

Tabel 2.148	Evaluasi Hasil Capaian RPJMD Tahun 2016-2020....	II-207
Tabel 3.1	Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2016 s.d. 2020 Kota Bandar Lampung.....	III-4
Tabel 3.2	Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Bandar Lampung	III-12
Tabel 3.3	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Bandar Lampung.....	III-24
Tabel 3.4	Realisasi Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Kota Bandar Lampung.....	III-27
Tabel 3.5	Defisit Riil Anggaran Kota Bandar Lampung	III-28
Tabel 3.6	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Bandar Lampung	III-30
Tabel 3.7	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan Kota Bandar Lampung.....	III-30
Tabel 3.8	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Bandar Lampung	III-32
Tabel 3.9	Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021 s.d 2026 Kota Bandar Lampung.....	III-38
Tabel 3.10	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung	III-43
Tabel 3.11	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah	III-46
Tabel 3.12	Rencana Alokasi Penerapan SPM Tahun 2021 s.d 2026 Kota Bandar Lampung	III-50
Tabel 5.1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Bandar Lampung.....	V-15
Tabel 5.2	Kesesuaian Misi antara RPJMD Tahun 2021 – 2026 dengan Tujuan Global SDGs 2030.....	V-30
Tabel 5.3	Integrasi Indikator SDGs/TPB Dengan Indikator Dalam RPJMD Tahun 2021-2026.....	V-33
Tabel 5.4	Rencana Indikasi Program Perwujudan Struktur Ruang, Pola Ruang, dan Program Perwujudan Kawasan Dalam RTRW Kota Bandar Lampung Untuk Tahun 2021-2026.....	V-44
Tabel 5.5	Keselarasan antara RTRW dan RPJMD	V-72
Tabel 5.6	Integrasi KLHS dalam RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026.....	V-76

Tabel 5.7	Rekomendasi Integrasi KLHS kedalam RPJMD Tahun 2021-2026	V-82
Tabel 5.8	Hasil Penyelarasan Target Indikator Makro RPJMD Tahun 2021-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024	V-99
Tabel 5.9	Hasil penyelarasan Program Prioritas Tahun 2021-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024	V-99
Tabel 6.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kota Bandar Lampung	VI-3
Tabel 6.2	Arah Kebijakan Pembangunan Kota Bandar Lampung.....	VI-6
Tabel 6.3	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kota Bandar Lampung	VI-15
Tabel 6.4	Fokus dan Arah Kebijakan Tahunan Kota Bandar Lampung.....	VI-29
Tabel 6.5	Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kota Bandar Lampung.....	VI-30
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021 – 2026 Kota Bandar Lampung	VII-5
Tabel 7.2	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Bandar Lampung.....	VII-6
Tabel 8.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Bandar Lampung	VIII-3
Tabel 8.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Bandar Lampung.....	VIII-5



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tahapan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (2021-2026)	I-3
Gambar 1.2	Proses Penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026	I-7
Gambar 1.3	Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-13
Gambar 1.4	<i>Sustainable of Development Goals</i> (SDGs)	I-15
Gambar 1.5	Misi RPJMN Tahun 2020 – 2024	I-16
Gambar 1.6	Arahan Presiden dalam RPJMN Tahun 2020-2024 ..	I-17
Gambar 1.7	Tahapan Pembangunan Kota Bandar Lampung	I-22
Gambar 2.1	Peta Administratif Kota Bandar Lampung	II-2
Gambar 2.2	Peta Topografi Kota Bandar Lampung	II-6
Gambar 2.3	Peta Hidrologi Kota Bandar Lampung	II-10
Gambar 2.4	Peta Klimatogi Kota Bandar Lampung	II-11
Gambar 2.5	Peta Tutupan Lahan Kota Bandar Lampung	II-12
Gambar 2.6	Peta Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi	II-21
Gambar 2.7	Peta Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah	II-22
Gambar 2.8	Peta Kawasan Rawan Bencana Tsunami	II-23
Gambar 2.9	Peta Sungai dan Jaringan Drainase	II-125
Gambar 4.1	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	IV-23
Gambar 5.1	Integrasi Subtansi KLHS-RPJMD	V-75
Gambar 7.1	Indikasi Rencana Program Prioritas RPJMD	VII-3



DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Laju Inflasi Tahun 2016-2020 (Persen)	II-34
Grafik 2.2	Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2016-2020..	II-40
Grafik 2.3	Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2016-2020	II-40
Grafik 2.4	Persentase Luas Kawasan Kumuh Tahun 2016-2020	II-46
Grafik 2.5	Persentase Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Tahun 2017-2020.....	II-47
Grafik 2.6	Persentase Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak yang terselesaikan Tahun 2016-2020	II-49
Grafik 2.7	Kasus Kematian Ibu Maternal Tahun 2016-2020.....	II-68
Grafik 2.8	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Tahun 2016-2020	II-68
Grafik 2.9	Kasus Kematian Bayi dan Balita Tahun 2016-2020 .	II-69
Grafik 2.10	Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup Tahun 2016-2020	II-69
Grafik 2.11	Rasio Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum terhadap Panjang Jalan Kota Tahun 2016-2020 (titik/km).....	II-125
Grafik 2.12	Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Peruntukkannya Tahun 2016-2020	II-131
Grafik 3.1	Perkembangan Rasio Cair Tahun 2016-2020 (Persen)	III-16
Grafik 3.2	Perkembangan Rasio Kewajiban Terhadap Total Aset Pemerintah Tahun 2016-2020 (Persen)	III-17
Grafik 3.3	Perkembangan <i>Debt Service Ratio</i> Tahun 2016-2020 (Persen)	III-19



DAFTAR DIAGRAM

Diagram 2.1	Luas Daerah Menurut Kecamatan berdasarkan Data BPS dalam BLDA Tahun 2021 (Persen)	II-3
Diagram 2.2	Luas Daerah Menurut Kecamatan berdasarkan data pada Ranperda RTRW Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2041 (Persen)	II-3
Diagram 2.3	Suhu dan Pengendapan Rata-Rata di Bandar Lampung.....	II-10
Diagram 2.4	Kawasan Lindung	II-13
Diagram 2.5	Kawasan Budidaya	II-14
Diagram 2.6	Jumlah Penduduk 2016-2020 (jiwa).....	II-26
Diagram 2.7	Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2016-2020 (Persen)	II-32
Diagram 2.8	PDRB Per Kapita Tahun 2016-2020	II-33
Diagram 2.9	Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2016-2020...	II-39
Diagram 2.10	Indeks Pembangunan Manusia Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2016-2020	II-39
Diagram 2.11	Angka Harapan Hidup Tahun 2016-2020	II-42
Diagram 2.12	Persentase Penduduk Miskin Tahun 2016-2020	II-45
Diagram 2.13	Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2016-2020.....	II-48
Diagram 2.14	Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2016-2020 (Skor).....	II-56
Diagram 2.15	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sumber Air Minum Layak Tahun 2016-2020	II-74

Diagram 2.16	Cakupan Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB Aktif Tahun 2016-2020	II-93
Diagram 2.17	Penanaman Modal Asing (PMA) Tahun 2016-2020 (Dolar)	II-100
Diagram 2.18	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Tahun 2016-2020 (Rupiah)	II-100
Diagram 2.19	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan Tahun 2016-2020	II-101
Diagram 2.20	Persentase Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap Tahun 2016-2020.....	II-121
Diagram 2.21	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik Tahun 2016-2020	II-124
Diagram 3.1	Kontribusi Pos Pendapatan Transfer-Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah dan Lain-lain Pendapatan yang sah Tahun 2016-2020	III-8
Diagram 3.2	Proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Pemerintah Kota Bandar Lampung 2016-2020 (Persen)	III-10



LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 01 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH TAHUN 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengamanatkan kepada seluruh pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Sejak Otonomi Daerah digulirkan pada tahun 1999, maka daerah diberikan hak, wewenang dan kewajiban sebagai daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada perjalanannya Otonomi Daerah hingga saat ini berlandaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan di Daerah yang berpijak pada azas otonomi. Amanah pasal 260 Undang-Undang 23 Tahun 2014 menyebutkan : ayat (1) Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); ayat (2) dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.

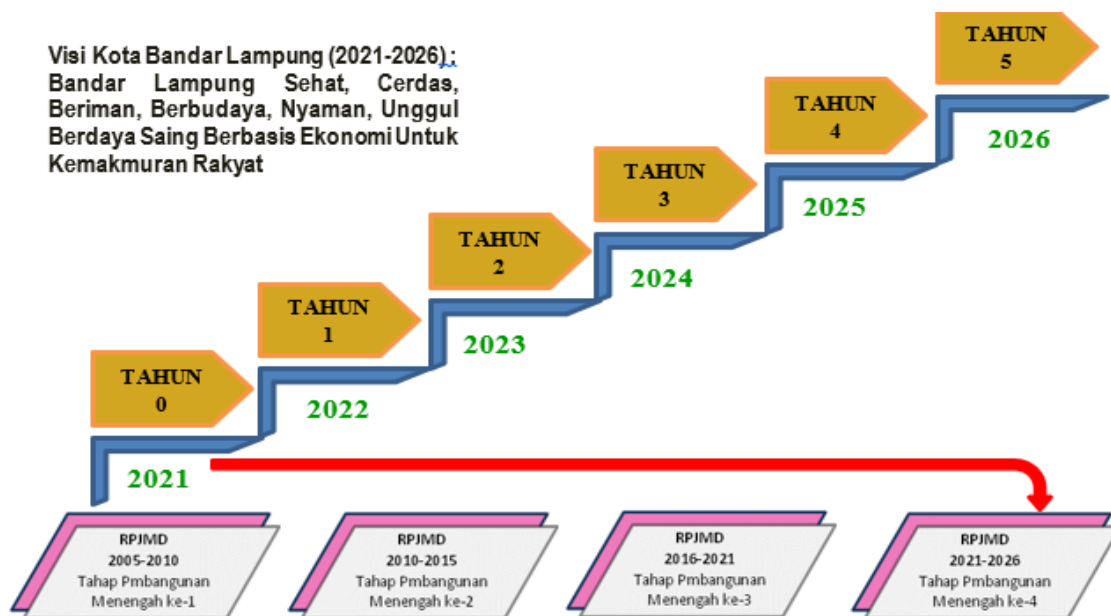
Kewenangan Daerah merupakan kewenangan dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Pelaksanaan dari Otonomi Daerah harus terencana dan bersinergi dengan perencanaan pembangunan baik dengan pemerintah pusat dan daerah dengan tidak menghilangkan karakteristik daerahnya. Oleh sebab itu pemerintah daerah kemudian menyusun dan menetapkan RPJPD untuk 20 (dua puluh) tahun, RPJMD untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan RKPD untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perUndang-Undangan.

Sebagai pelaksanaan amanat tersebut, Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menetapkan RPJPD Tahun 2005-2025 di dalam Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2007, disusun dengan maksud untuk memberikan arahan yang sekaligus acuan bagi seluruh komponen masyarakat (pemerintah dan *stakeholders*) dalam mewujudkan cita-cita yang sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan akan lebih sinergis,

koordinatif dan saling melengkapi dengan tetap memperhatikan kebijakan dan program strategis nasional dan Provinsi Lampung.

Tahapan perencanaan pembangunan dalam setiap periode RPJMD merupakan tahapan pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan arahan dari dokumen RPJPD, guna menjaga kesinambungan dari setiap periode 5 (lima) tahun pemerintahan ke periode 5 (lima) tahun berikutnya. Pada RPJPD Tahun 2005-2025 dilaksanakan dalam empat tahapan rencana pembangunan jangka menengah :

Gambar 1.1 Tahapan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (2021-2026)



Tahapan RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan tahapan ke-4 dari RPJPD Tahun 2005-2025 atau tahapan RPJMD terakhir periode jangka panjang dari tiga periode RPJMD sebelumnya (2005-2010, 2011-2015, dan 2016-2021). Memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 640/16/SJ Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, maka untuk perodesasi RPJMD Kota Bandar Lampung adalah Tahun 2021-2026.

Dengan terpilihnya Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung masa bakti periode 2021-2026 yang dilantik pada tanggal 26 Februari 2021, maka melekat kewajiban untuk menyusun RPJMD Tahun 2021-2026 sebagai pedoman perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun serta perwujudan amanat regulasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 akan difokuskan pada upaya pencapaian Visi Kota Bandar Lampung yaitu “**Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Untuk Kemakmuran Rakyat**”. Dimana visi tersebut merupakan perwujudan janji politik Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung pada kampanyenya. Dilain hal penyusunan RPJMD tahun 2021-2026 juga mempertimbangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD, untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang termuat di dalam RPJMD Tahun 2021-2026 telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Penyusunan RPJMD juga disesuaikan dengan kondisi 5 (lima) tahun kedepan, sehingga memerlukan pembaharuan dan penyegaran metode dalam rangka menjaga konsistensi keberlanjutan pembangunan jangka panjang periode selanjutnya. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan selama kurun waktu lima tahun kedepan, RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan capaian pembangunan

pada periode sebelumnya serta mempertimbangkan permasalahan dan tantangan dimasa yang akan datang termasuk memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Mengingat RPJMD memuat tentang arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program perangkat daerah, lintas perangkat daerah, dan program kewilayahan, maka RPJMD memiliki nilai strategis sebagai pedoman bagi dokumen perencanaan di Kota Bandar Lampung dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Dengan demikian, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 harus disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Selain itu, penyusunan RKPD sebagai rencana kerja tahunan daerah yang menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam kurun waktu 5 tahun kedepan juga wajib mengacu dan berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, bahwa sebagai tahapan persiapan penyusunan RPJMD, Pemerintah Daerah telah menyusun rancangan teknokratik RPJMD yang merupakan rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah. Rancangan Teknokratik RPJMD tersebut menjadi salah satu input bagi penyusunan Rancangan Awal RPJMD, dimana janji politik dari calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih setelah dilantik dan dituangkan pada dokumen rancangan awal RPJMD sebagai bukti konkrit pelaksanaan janji politik tersebut.

Tahapan penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 41 s.d 72 adalah sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan meliputi: (a) Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD; (b) Orientasi mengenai RPJMD; (c) penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD; (d) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD; dan (e) Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD;
2. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD meliputi: (a) Penyusunan rancangan awal RPJMD; (b) Pelaksanaan forum konsultasi publik; (c) Pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran; (d) Konsultasi ke Gubernur (Provinsi); (e) Penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD; (f) Surat Edaran Kepala Daerah - Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah; (g) OPD menyusun rancangan awal Renstra Perangkat Daerah; (h) Pembahasan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dalam Forum Perangkat Daerah; (i) Penyampaian rancangan awal Renstra Perangkat Daerah kepada Bappeda; (j) Verifikasi rancangan awal Renstra Perangkat Daerah oleh Bappeda.
3. Penyusunan Rancangan RPJMD, meliputi: (a) Penyempurnaan rancangan RPJMD berdasarkan verifikasi Renstra Perangkat Daerah; (b) Penyampaian rancangan RPJMD kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dalam rangka memperoleh persetujuan pelaksanaan Musrenbang RPJMD.
4. Pelaksanaan Musrenbang RPJMD.
5. Perumusan Rancangan Akhir RPJMD, meliputi: (a) Penyempurnaan rancangan RPJMD berdasarkan hasil Musrenbang; (b) Bappeda menyampaikan rancangan akhir RPJMD yang dimuat dalam rancangan Perda tentang RPJMD kepada Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum; (c) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD oleh



6. Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2021-2026.

```

graph TD
    subgraph Stage1 [1. Persiapan Penyusunan RPJMD]
        A[Pengolahan data dan informasi] --> B[Penelaahan RTRW Kab/kota & RTRW daerah lainnya]
        A --> C[Penelaahan RPJMD Provinsi dan kab/kota lainnya]
        A --> D[Penelaahan RPJPD Kab/Kota]
        A --> E[Analisis Gambaran umum kondisi daerah dan pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan]
        B --> F[VISI, MISI dan Program KDH]
        C --> F
        D --> F
        F --> G[Perumusan Penjelasan visi dan misi serta tujuan dan sasaran]
        G --> H[Perumusan Strategi dan arah kebijakan]
        G --> I[Perumusan Kebijakan umum dan program pembangunan daerah]
        G --> J[Perumusan Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan]
        G --> K[Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik]
        G --> L[Pembahasan dengan DPRD]
        G --> M[Penyelarasan program prioritas dan pendanaan]
        G --> N[Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah]
        G --> O[Analisis isu-isu strategis]
        O --> P[Perumusan RTRW Kab/kota & RTRW daerah lainnya]
        O --> Q[Perumusan RPJMD Provinsi dan kab/kota lainnya]
        O --> R[Perumusan RPJPD Kab/Kota]
        O --> S[Perumusan Strategi dan arah kebijakan]
        O --> T[Perumusan Kebijakan umum dan program pembangunan daerah]
        O --> U[Perumusan Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan]
        O --> V[Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik]
        O --> W[Pembahasan dengan DPRD]
        O --> X[Penyelarasan program prioritas dan pendanaan]
        O --> Y[Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah]
        O --> Z[Analisis Gambaran umum kondisi daerah dan pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan]
    end

    subgraph Stage2 [2. Rancangan Awal RPJMD]
        H --> A1[Rancangan RPJMD]
        I --> A1
        J --> A1
        K --> A1
        L --> A1
        M --> A1
    end

    subgraph Stage3 [3. Musrenbang RPJMD]
        A1 --> B1[Musrenbang RPJMD]
    end

    subgraph Stage4 [4. Rancangan Akhir RPJMD]
        B1 --> C1[Rancangan Akhir RPJMD]
    end

    subgraph Stage5 [5. Pembahasan dan penetapan Perda RPJMD]
        C1 --> D1[Konsultasi rancangan akhir RPJMD dengan GUBERNUR]
        D1 --> E1[Pembahasan dan penetapan Perda RPJMD]
    end

    E1 --> A

```

1. RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan media untuk mengimplementasikan janji Kepala Daerah terpilih yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat;

2. RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun;
3. RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan bagian dari satu kesatuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
4. RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan pedoman penyusunan RKPD;
5. RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan alat atau instrument pengendalian bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Bappeda;
6. RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan pedoman bagi daerah dalam penyusunan rencana pembangunan daerah yang selaras dengan provinsi;
7. RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan pedoman penilaian keberhasilan Pemerintah Daerah.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan Penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung Menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);



17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
21. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);



25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
30. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12);
31. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13);
32. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 03 Seri E Nomor 01);

33. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2011 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2011 Nomor 10);
34. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2016 Nomor 07).

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan, RPJMD Tahun 2021-2026 mempunyai hubungan dan konsistensi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan pasal 5 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004. Sebagai bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Lampung, RPJMD Tahun 2021-2026 mengacu pada RPJM Nasional Tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dan RPJPD Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025. RPJMD Tahun 2021-2026 juga mengacu terhadap dokumen KLHS yang menunjukkan capaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Kota Bandar Lampung.

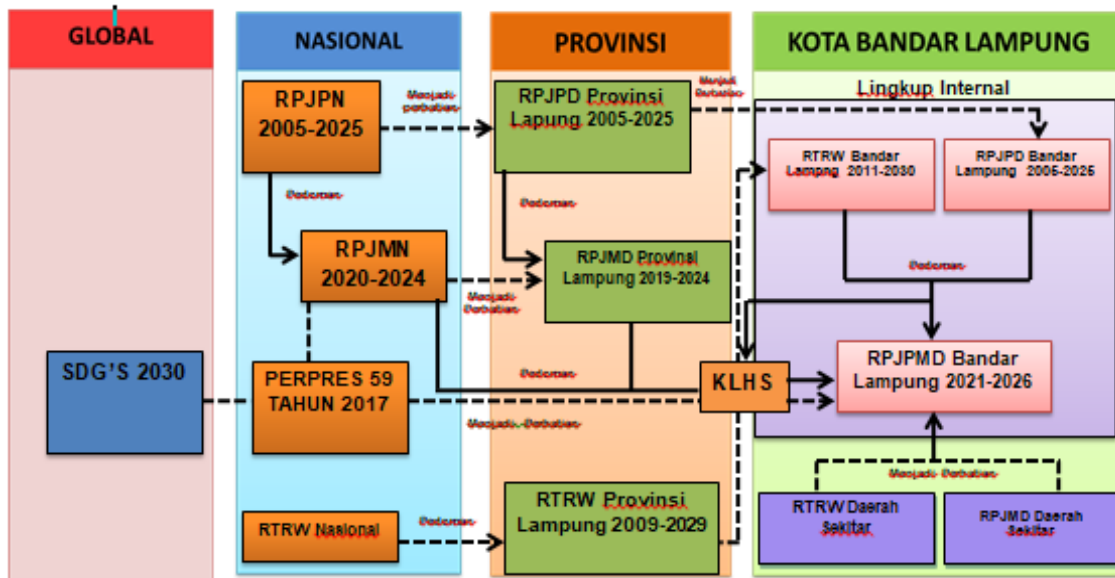
Terkait kebijakan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan indikasi program pemanfaatan ruang, RPJMD Tahun 2021-2026 memperhatikan RTRW Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota sekitar agar tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar kabupaten dan dalam kesatuan wilayah pembangunan provinsi yang berkelanjutan (*sustainable*).

Oleh karena itu, RPJMD yang merupakan bagian terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Untuk itu RPJMD harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi

pemerintah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Adapun hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya dapat dilihat dari gambar di bawah ini.

Gambar 1.3 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.3.1 Hubungan RPJMD dan *Sustainable Development Goal's* (SDGs)

Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030 telah diadopsi oleh Negara-negara di dunia sejak dideklarasikan di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pembangunan Berkelanjutan PBB tanggal 25 September 2015. Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs tersebut secara resmi menggantikan *Millenium Development Goals* (MDGs).

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen dalam pencapaian TPB/SDGs dengan disahkannya kerangka dan konsep TPB melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Perpres tersebut menyebutkan bahwa TPB/SDGs adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030, yang mencakup 17 aspek kehidupan 169 target

dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian MDGs yang berakhir akhir pada Tahun 2015.

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 kemudian didetailkan dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Pelaksanaan SDGs. Keterkaitan pencapaian tujuan dari SDGs terhadap dokumen RPJMD adalah untuk menerapkan seluruh prinsip dari tujuan pembangunan berkelanjutan kedalam dokumen perencanaan pembangunan, termasuk dalam RPJMD Tahun 2021-2026.

TPB/SDGs mencakup empat pilar yaitu: pilar sosial, pilar ekonomi, pilar lingkungan, dan pilar hukum dan tata kelola. 17 tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut yaitu: 1) Tanpa Kemiskinan (*No Poverty*); 2) Tanpa Kelaparan (*Zero Hunger*); 3) Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan (*Good Health and Well-being*); 4) Pendidikan Berkualitas (*Quality Education*); 5) Kesetaraan Gender (*Gender Equality*); 6) Air Bersih dan Sanitasi (*Clean Water and Sanitation*); 7) Energi Bersih dan Terjangkau (*Affordable and Clean Energy*); 8) Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak (*Decent Work and Economic Growth*); 9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur (*Industry, Innovation and Infrastructure*); 10) Mengurangi Kesenjangan (*Reduced Inequalities*); 11) Keberlanjutan Kota dan Komunitas (*Sustainable Cities and Communities*); 12) Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab (*Responsible Consumption and Production*); 13) Aksi Terhadap Iklim (*Climate Action*); 14) Kehidupan Bawah Laut (*Life Below Water*); 15) Kehidupan di Darat (*Life on Land*); 16) Institusi Keadilan yang Kuat dan Kedamaian (*Peace, Justice and Strong Institutions*); 17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (*Partnership for the Goals*).

Gambar 1.4 *Sustainable of Development Goals (SDGs)*



Sumber : GTP, 2016.

1.3.2 Hubungan RPJMD Kota Bandar Lampung dan RPJM Nasional

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pada pasal 5 ayat (2), disebutkan bahwa RPJMD yang merupakan penjabaran dari Visi Misi dan Program Kepala Daerah, penyusunannya berpedoman dan memperhatikan RPJM Nasional. Penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 memperhatikan RPJMN artinya dalam perumusan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program diselaraskan dengan prioritas pembangunan RPJMN 2020-2024 yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

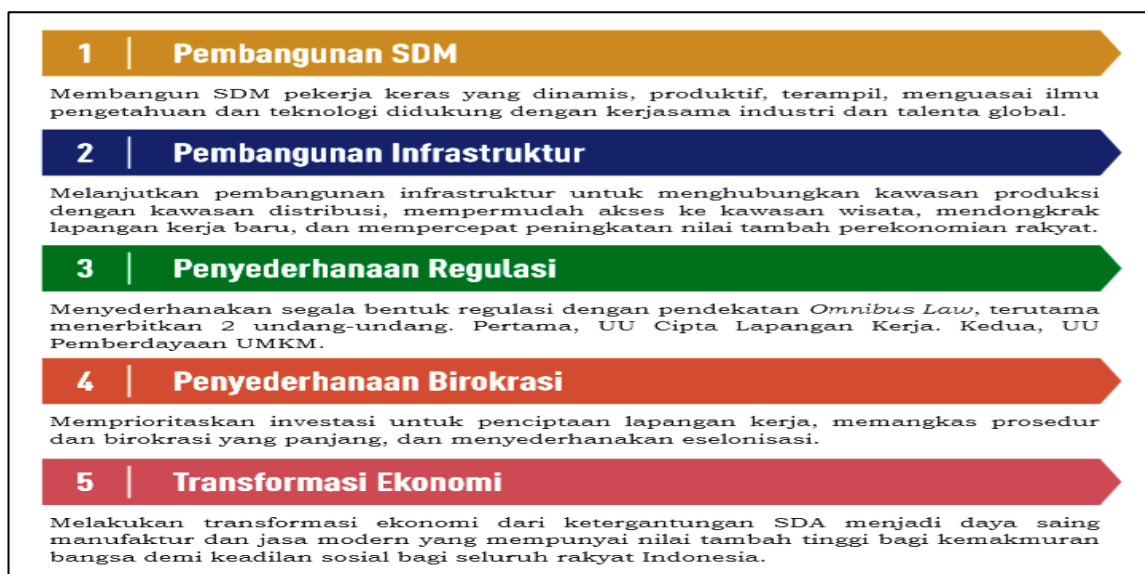
Visi Misi Presiden Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN Tahun 2020-2025. RPJMN Tahun 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu :

Gambar 1.5 Misi RPJMN Tahun 2020 - 2024



Selanjutnya Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Gambar 1.6 Arahan Presiden dalam RPJMN Tahun 2020-2024



1.3.3 Hubungan RPJMD Kota Bandar Lampung dan RPJMD Provinsi Lampung

RPJMD Tahun 2021-2026 sebagai satu kesatuan dokumen perencanaan pembangunan dan wilayah juga memperhatikan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Sebagai ibukota Provinsi Lampung, kebijakan-kebijakan yang disusun dalam RPJMD Tahun 2021-2026 diselaraskan dengan prioritas pembangunan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

Visi pembangunan Provinsi Lampung periode 2019-2024 sesuai dengan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih adalah **“Rakyat Lampung Berjaya”**. Memperhatikan Visi pembangunan tersebut, diharapkan Masyarakat Lampung menjadi "subyek utama" dalam pembangunan daerah dan dalam membangun kesejahteraannya. Pembangunan dapat terwujud jika didukung adanya rasa aman dan tentram bagi masyarakat dan investor, didukung oleh sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata. Melalui prasyarat tersebut, maka Lampung dapat tumbuh menjadi daerah yang maju dengan masyarakatnya yang cerdas (berbudaya) dan berdaya saing sehingga kesejahteraan dan kemakmuran bersama dapat tercapai.

Dalam rangka mencapai visi "Rakyat Lampung Berjaya" tersebut, maka misi pembangunan daerah Tahun 2019 – 2024 ditetapkan sebagai berikut :

1. Misi-1: Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai.
2. Misi-2: Mewujudkan "*good govemance*" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
3. Misi-3: Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas.
4. Misi-4: Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.

5. Misi-5: Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.
6. Misi-6: Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Adapun Agenda Kerja Utama yang disandingkan dengan Misi Pembangunan dan Sektor Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung dengan misi Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 1.1 Agenda Kerja Utama RPJMD Provinsi Lampung Berdasarkan Sektor Prioritas Pembangunan dan Misi Kota Bandar Lampung

MISI PROVINSI LAMPUNG	SEKTOR PRIORITAS PEMBANGUNAN	AGENDA KERJA UTAMA	MISI KOTA BANDAR LAMPUNG
MISI 1 : Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai.	Pembangunan Bidang Pariwisata dan Budaya	Lampung Merawat Indonesia: memperkuat kerukunan hidup antar umat beragama dan menjadikan rumah ibadah dan pondok pesantren sebagai pusat informasi dan pendidikan publik untuk menangkal radikalisme serta mengembangkan sikap kebangsaan	Misi 5 : Mengembangkan Masyarakat Agamis, Berbudaya dan Mengembangkan Budaya Daerah Tujuan : Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat dan bernegara yang Aman, Tentram dan Damai Berlandaskan Nilai-Nilai Budaya
		Memberikan insentif khusus kepada Guru Honorer, Guru PAUD, Guru Ngaji, Guru Sekolah Minggu, Ustad dan Ustadzah Pondok Pesantren, Penjaga Masjid dan Rumah Ibadah lainnya, Muazin, Khatib, Imam Masjid, pendeta dan para	
		pemimpin berbagai agama, serta P3NTR, bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota	
		Lampung Mengaji: memfasilitasi pengembangan pemahaman dan penghafalan Al-Quran dan mendirikan Pusat Studi Al-Quran	
		Lampung Kaya Festival : menjadikan budaya dan kekayaan alam Lampung sebagai daya Tarik festival untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pengembangan ekonomi kreatif, merawat kebudayaan lokal dan mengembangkan kesenian serta mendukung meningkatnya kunjungan wisatawan Lampung Menuju Bebas Narkoba	

MISI PROVINSI LAMPUNG	SEKTOR PRIORITAS PEMBANGUNAN	AGENDA KERJA UTAMA	MISI KOTA BANDAR LAMPUNG
MISI 2 : Mewujudkan "good governance" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik	Reformasi Birokrasi	Meningkatkan efektifitas pemerintahan, melalui sistem penjenjangan karir berbasis kinerja dan kompetensi (job fit assessment) dan meningkatkan kualitas pelayanan public	Misi 6 : Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi Tujuan : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel, Transparan dan Inovatif
		APBD Rakyat Berjaya, melalui peningkatan PAD dan mendayagunakan APBD untuk program pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat	
		Smart Village : meningkatkan literasi internet dan layanan perpustakaan desa, digitalisasi, administrasi desa dan e-participation	
		Pendampingan Program Pembangunan Desa	
MISI 3 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Perempuan Berjaya: memandirikan perempuan secara ekonomi, pengarusutamaan gender dan pendampingan hukum perempuan	Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Misi 2 : Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Pendidikan Masyarakat Tujuan : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia
		Lampung Ramah Perempuan dan Anak: mengembangkan fasilitas dan ruang publik ramah perempuan dan anak, menurunkan tingkat kematian ibu dan anak (bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota)	
		Anak Muda Berjaya: mendorong kompetensi dan festival seni/olahraga, gerakan malu menganggur, mencetak wirausaha muda, pendirian gelanggang remaja	
		Mengembalikan Kejayaan Lampung dalam Dunia Olahraga, memperbaiki dan memperbanyak fasilitas-fasilitas olahraga, meningkatkan kualitas pembinaan atlet dan memberikan insentif bagi atlet berprestasi serta memperbaiki tata kelola organisasi olahraga	
	Pembangunan Bidang Kesehatan	Lampung Sehat : Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS), perbaikan kualitas layanan kesehatan, Puskesmas dan Rumah Sakit (bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota)	
	Pembangunan Bidang Pendidikan	Smart School : pemanfaatan IT untuk meningkatkan kualitas pendidikan	
		Revitalisasi SMK mengintegrasikan SMK ke dunia kerja (kurikulum magang)	

MISI PROVINSI LAMPUNG	SEKTOR PRIORITAS PEMBANGUNAN	AGENDA KERJA UTAMA	MISI KOTA BANDAR LAMPUNG
MISI 4 : Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.	Pembangunan Bidang Infrastruktur	Infrastruktur Lampung Berjaya : konektivitas antar kabupaten/ kota untuk mengembangkan pusat pertumbuhan baru, infrastruktur untuk kawasan wisata, infrastruktur pertanian, pelabuhan dan infrastruktur telekomunikasi	Misi 3 : Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial Tujuan : Terwujudnya Infrastruktur Perkotaan yang berkualitas
		Unit Reaksi Cepat (URC) Perbaikan Infrastruktur: berbasis peran serta warga dan pemanfaatan IT	
		Lampung Terang Berjaya: swasembada sumber energi listrik	
MISI 5 : Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.	Pembangunan Bidang Pertanian Dan Perdesaan	Kartu Petani Berjaya (KPB): memberikan jaminan kepada para petani untuk mendapatkan bibit, pupuk, pasar, modal dan beasiswa bagi anak petani (pertanian secara luas)	Misi 4 : Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. Tujuan : Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui ekonomi kerakyatan
		Beasiswa Mahasiswa Pertanian : mendorong minat generasi muda pada pertanian	
		Mencegah dan memberantas peredaran pupuk palsu	
		Revitalisasi Lada (Lampung Black Pepper)	
		Meningkatkan daya saing Kopi, Kakao dan komoditas unggulan lainnya (jagung, singkong, udang) serta mewujudkan Lampung sebagai Lumbung Ternak Nasional melalui penerapan teknologi produksi, pengembangan industri hilir serta perluasan pasar dalam negeri	
		Nelayan Berjaya : untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, mendorong tumbuhnya usaha budidaya perikanan, memberikan pendampingan pemasaran, pengembangan industri pengolahan perikanan, jaminan sosial, beasiswa pendidikan tinggi bagi anak-anak nelayan, SPBU untuk nelayan Lampung sebagai salah satu tujuan utama wisata (mengembangkan destinasi wisata unggulan, pusat agrowisata dan ekowisata, infrastruktur mendukung pariwisata, percepatan Bandara Taufik Kiemas)	

MISI PROVINSI LAMPUNG	SEKTOR PRIORITAS PEMBANGUNAN	AGENDA KERJA UTAMA	MISI KOTA BANDAR LAMPUNG
	Pembangunan Bidang Industri	Memfungsikan BUMD untuk menangani komoditi strategis bidang pertanian (bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota)	
		Mengembangkan industri pengolahan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru	
		Mengembangkan ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi	
		Lampung Ramah usaha : menata regulasi dan kebijakan pengembangan dunia usaha	
		Memfasilitasi percepatan terwujudnya Lampung sebagai Pusat Industri Pertahanan Indonesia (bersinergi dengan Kementerian Pertahanan)	
MISI 6 : Mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.	Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup	Mengelola Lingkungan Hidup untuk kesejahteraan rakyat	Misi 7 : Mempertahankan dan Meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan. Tujuan : Terwujudnya keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan

1.3.4 Hubungan RPJMD Kota Bandar Lampung dengan RPJPD Kota Bandar Lampung, RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah

RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Tahap IV (keempat) pelaksanaan RPJPD Tahun 2005 – 2025, dari sebelumnya Tahap I (pertama) yakni RPJMD Tahun 2005-2010, Tahap II (kedua) yakni RPJMD Tahun 2010-2016 dan Tahap III (ketiga) yakni RPJMD 2016-2021). Oleh karena itu, mengingat RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan tahap akhir dari rangkaian periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandar Lampung maka proses Penyusunan dokumen RPJMD Tahun



2021-2026 harus mengacu pada dokumen RPJPD Tahun 2005-2025. Berikut skema tahapan pembangunan Kota Bandar Lampung :

Gambar 1.7 Tahapan Pembangunan Kota Bandar Lampung



Dokumen RPJMD ini selanjutnya juga akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dimana penetapan sasaran, indikator sasaran dan target haruslah mengacu pada sasaran, indikator dan target yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD serta menjadi indikator kinerja utama Kepala Daerah. Sasaran dan indikator pada dokumen Renstra Perangkat Daerah akan menjadi indikator kinerja Kepala Perangkat Daerah, yang akan dijabarkan pada Program, Outcome Program, Kegiatan dan Output Kegiatan beserta targetnya yang menjadi indikator kinerja Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas. Oleh karena itu dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah ini mutlak untuk dilakukannya proses *cascading* dari Tujuan, sasaran, indikator, target, dan program dalam dokumen RPJMD kedalam sasaran, indikator sasaran, target, program, outcome program, kegiatan dan output kegiatan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah.

Selanjutnya, RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan dijabarkan dalam RKPD sebagai perencanaan tahunan daerah. RKPD menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaannya di tahunan, RPJMD melalui RKPD menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

1.3.5 Hubungan RPJMD Kota Bandar Lampung dan RTRW Nasional dan RTRW Provinsi Lampung, dan RTRW Kota Bandar Lampung

Penyusunan RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 juga berpedoman pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah Nasional (RTRW) Nasional, RTRW Provinsi Lampung serta RTRW Kota Bandar Lampung. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Kota Bandar Lampung dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang. Lebih lanjut, informasi dalam RTRW Nasional, RTRW Provinsi Lampung dan RTRW Kota Bandar Lampung digunakan sebagai acuan dalam penataan ruang dalam rangka mewujudkan target pembangunan jangka menengah periode 2021-2026.

Arahan dalam RTRWN, RTRW Provinsi Lampung dan RTRW Kota Bandar Lampung yang dapat dijadikan pedoman/acuan dalam penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

(1) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana tata Ruang Wilayah nasional ;

RTRWN disusun dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang berkembang, antara lain tantangan globalisasi, otonomi dan aspirasi daerah, keseimbangan perkembangan antara kawasan barat Indonesia dengan kawasan timur Indonesia, kondisi fisik wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana, dampak pemanasan global, pengembangan potensi kelautan dan pesisir, pemanfaatan ruang kota pantai, penanganan kawasan perbatasan negara, serta peran teknologi dalam memanfaatkan ruang.

Sesuai amanah Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana tata Ruang Wilayah nasional, RTRWN merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional, perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah provinsi, keserasian antarsektor, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi, penataan ruang kawasan strategis nasional, serta penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

Tata Ruang Wilayah Nasional memadukan dan menyerasikan tata guna tanah, tata guna udara, tata guna air, dan tata guna sumber daya alam lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis serta ditunjang oleh pengelolaan perkembangan kependudukan yang serasi dan disusun melalui pendekatan wilayah dengan memperhatikan sifat lingkungan alam dan lingkungan sosial. Untuk itu, penyusunan RTRW Nasional didasarkan pada upaya untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah nasional, antara lain, meliputi perwujudan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, serta perwujudan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah yang diterjemahkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah nasional.

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional meliputi kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang.



Dimana kebijakan pengembangan struktur ruang asional meliputi (a). Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki; (b). Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah nasional. Sedangkan Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang nasional meliputi, (a). Kebijakan dan strategi pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan kawasan lindung; (b). kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budi daya; (c). kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategi nasional.

Selain rencana pengembangan struktur ruang dan pola ruang, RTRW Nasional ini juga menetapkan kriteria penetapan struktur ruang, pola ruang, kawasan andalan, kawasan strategis nasional, arahan pemanfaatan ruang yang merupakan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan, serta arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Berdasarkan aspek penataan ruang wilayah nasional, arahan kebijakan yang berkaitan dengan penataan ruang wilayah Kota Bandar Lampung meliputi fungsi Kota Bandar Lampung sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan arahan pengembangan revitalisasi fungsi Kota Bandar Lampung. Revitalisasi ini berarti pengembangan Kota Bandar Lampung yang begitu pesat maka fungsi kawasan lindung dan ruang terbuka hijau yang begitu penting harus bisa dikendalikan dan dikembalikan fungsinya sejalan dengan perkembangan Kota Bandar Lampung dimasa yang akan datang.



(2) RTRW Provinsi Lampung sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009-2029;

RTRW Provinsi Lampung, menempatkan Provinsi Lampung berada pada posisi strategis di ujung Selatan Pulau Sumatera bila dilihat dari aspek geografisnya, sehingga Provinsi Lampung sering disebut sebagai pintu gerbangnya Pulau Sumatera dari arah Pulau Jawa, dimana antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera terdapat Selat Sunda sebagai penghubung kedua pulau tersebut. Pada posisi yang strategis tersebut diharapkan kedepannya membawa dampak kesejahteraan bagi masyarakat di Provinsi Lampung.

Memperhatikan Peraturan Daerah RTRW Provinsi Lampung Nomor 12 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 Sampai Dengan Tahun 2029, bahwa Tujuan penataan ruang wilayah provinsi adalah terwujudnya pembangunan wilayah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan berbasis pengembangan industri, ketahanan pangan dan pariwisata menuju Provinsi Lampung Berjaya.

Untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah Provinsi Lampung maka dilaksanakan Kebijakan dan strategi meliputi :

- a. Meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan sosial ekonomi dan budaya ke seluruh wilayah provinsi, melalui :
 - 1) pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan kualitas jaringan transportasi ke seluruh bagian wilayah provinsi;
 - 2) pengembangan pembangkit tenaga listrik dan memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan yang tersedia serta memperluas jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik;



- 3) penyediaan fasilitas pelayanan sosial ekonomi yang dapat meliputi sektor-sektor kesehatan, pendidikan, air bersih, olahraga, pemerintahan, dan sektor-sektor lain sesuai kebutuhan masyarakat;
 - 4) percepatan peningkatan infrastruktur dengan membuka keterisolan wilayah yang memiliki potensi unggulan;
 - 5) peningkatan aksesibilitas antara pusat pertumbuhan dengan wilayah perkotaan untuk meningkatkan kapasitas pemasaran produksi hasil pertanian;
 - 6) menjaga dan mewujudkan keterkaitan antara kawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah sekitarnya;
 - 7) mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah disekitarnya; dan
 - 8) mengembangkan pelayanan kawasan perkotaan yang mendukung sektor unggulan sebagai kawasan industri, wisata, dan maritime secara berkelanjutan.
- b. Memelihara dan mewujudkan kelestarian lingkungan hidup, serta mengurangi resiko bencana alam, melalui :
- 1) penetapan luasan kawasan peruntukan lindung di provinsi paling sedikit 30%;
 - 2) pengembalian dan peningkatan fungsi kawasan lindung yang telah menurun kualitasnya;
 - 3) pencegahan kerusakan lingkungan hidup lebih lanjut melalui penerapan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang secara sistematis;
 - 4) pengoptimalan pemanfaatan sumber daya alam untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup serta mengurangi resiko bencana;
 - 5) pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan kritis, melakukan reboisasi, mengkonservasi tanah dan lahan kritis lainnya, guna

- memelihara daya dukung sumber daya alam dan menjaga kelestarian hutan; dan
- 6) pengkonservasian dan perlindungan kawasan hutan lindung, dan hutan mangrove disekitar pantai sebagai fungsi lindung dan pertahanan terhadap bencana tsunami.
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang kawasan budi daya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, melalui :
- 1) pembatasan konversi lahan pertanian irigasi teknis untuk kegiatan budidaya lainnya;
 - 2) pengoptimalan pemanfaatan lahan tidur untuk kegiatan produktif;
 - 3) pengembangan kawasan budi daya pertanian sesuai dengan kemampuan dan kesesuaian lahannya;
 - 4) pengoptimalan pemanfaatan kawasan budi daya pulau-pulau kecil untuk meningkatkan daya saing dan perekonomian masyarakat; dan
 - 5) pengembangan keterkaitan kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan melalui pengembangan pusat pertumbuhan dan pengembangan agropolitan yang akan berfungsi sebagai pusat pemasaran produk pertanian, pusat pengembangan teknologi dan informasi di bidang pertanian.
- d. Meningkatkan produktifitas sektor-sektor unggulan sesuai dengan daya dukung lahan, melalui:
- 1) perluasan jaringan irigasi dan mempertahankan pertanian irigasi teknis;
 - 2) diversifikasi komoditi pertanian untuk mendukung pengembangan sektor sekunder;
 - 3) peningkatan produktivitas subsektor peternakan;
 - 4) peningkatan produktivitas subsektor perikanan;
 - 5) pengembangan kawasan agropolitan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat;

- 6) pengembangan kegiatan pertanian, yang meliputi upaya ekstensifikasi, intensifikasi, diversifikasi horisontal dan vertikal serta menerapkan teknologi tepat guna yang akan berujung pada peningkatan produksi dan peningkatan pendapatan; dan
 - 7) penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- e. Membuka peluang investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian wilayah, melalui :
- 1) peningkatan akses masyarakat ke sumber pembiayaan; dan
 - 2) pengembangan kawasan-kawasan.
- f. Mendukung fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan, melalui pengintegrasian kawasan fungsi khusus pertahanan dan keamanan dengan kawasan sekitarnya.

Memperhatikan juga Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP-3-K), dimana Ruang lingkup pengaturan RZWP-3-K Provinsi meliputi : (a) ke arah darat mencakup wilayah administrasi Kecamatan di wilayah pesisir; dan (b). ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai pada saat pasang tertinggi ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau Rencana Detail Tata Ruang yang berlaku. Rencana Alokasi Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terdiri dari : (a). kawasan Pemanfaatan kawasan pemanfaatan umum; (b). kawasan konservasi; (c). kawasan strategis nasional tertentu; dan (d). alur laut. Sedangkan fungsi RZWP-3-K Provinsi adalah : (a). bahan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; (b). acuan dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Rencana Aksi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; (c). instrumen penataan ruang di perairan laut wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; (d). kekuatan hukum terhadap alokasi ruang di perairan laut wilayah



pesisir dan pulau-pulau kecil; (e). dasar pemberian izin lokasi dalam melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil. Sebagaimana disusunnya Rzwp-3-K Provinsi Lampung adalah untuk memfokuskan tujuan pembangunan lingkungan, tujuan pembangunan sosial, tujuan pembangunan ekonomi, dan tujuan pembangunan administrasi.

Untuk menjadi perhatian selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan bahwa Kota Bandar Lampung dan sekitarnya sebagai kawasan perkotaan akan menjadi pengembangan kawasan strategis di Provinsi Lampung (Metropolitan Bandar Lampung), bila dilihat dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman akan menjadi kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Hal lain yang juga menjadi perhatian adalah bahwa Kota Bandar Lampung juga sebagai wilayah irisan dari pembangunan jalan tol trans Sumatera yang berada di wilayah Provinsi Lampung. Rencana proyek strategis pembangunan Jalan Tol Lematang – Pelabuhan Panjang dan jembatan tiang pancang merupakan simpul konektivitas Jalan Tol ke Pelabuhan Ekspor Panjang serta bagian rencana pengembangan Kawasan Pesisir Lampung untuk mendukung Kawasan Perkotaan Bandar Lampung dan sekitarnya (Metropolitan) serta akses menuju Kawasan Wisata di Teluk Lampung dan Teluk Kiluan, Kawasan Strategis Pertahanan Maritim Indonesia Barat, hingga Kawasan Industri Tanggamus. Penamaan Kawasan Industri Tanggamus sesuai dengan Peraturan Presiden 109 tahun 2020 tentang Proyek Strategis Nasional huruf E, nomor 94 menyatakan bahwa proyek strategis nasional adalah proyek dan/atau program daerah dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, dinamakan Kawasan Industri Tanggamus (KIT).



Selain itu juga rencana pembangunan ruas jalan sepanjang jalan RE. Martadinata Kota Bandar Lampung sampai dengan Teluk Kiluan juga menjadi wilayah pengembangan Akses strategis menuju Destinasi Wisata di Kawasan Wisata Terpadu Teluk Lampung hingga Teluk Kiluan, dan Kawasan Strategis Pertahanan Laut. Selanjutnya rencana pelebaran jalan nasional Sp. Imam Bonjol – Sp. Kurungan Nyawa – Gedong Tataan – Sp. Rantau Tijing – Sp. Kota Agung, merupakan jalan nasional eksisting yang menjadi akses utama menuju Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Tanggamus hingga Kawasan Industri Maritim Tanggamus. Untuk peningkatan status dan penanganan jalan exit tol Kota baru (ITERA) –jalan lintas tengah guna terlayannya kendaraan pengguna jalan exit tol Kota Baru (ITERA) ke dan dari arah Kota Bandar Lampung, hal tersebut terlihat dari Volume kendaraan yang melintasi ruas jalan ini semakin banyak dan ramai. Tidak hanya didominasi oleh kendaraan pribadi, akan tetapi juga kendaraan bertonase besar. Hal ini berdampak pada kemacetan dan kerusakan jalan akibat beban jalan yang berat sehingga perlu peningkatan kualitas dan kapasitas jalan yaitu dengan peningkatan ruas jalan dari Sp. Gerbang Tol Kota Baru - Sp. Korpri –Ruas Ryacudu yang menjadi akses utama dari dan menuju Kota Bandar Lampung, akses menuju Institut Teknologi Sumatera, serta menghubungkan Jalan Tol dengan Jalan Nasional Lintas Tengah Sumatera.

RTRW Provinsi Lampung terhadap rencana struktur ruang di wilayah Kota Bandar Lampung bahwa secara sistem perkotaan merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) ditetapkan di Kota Bandar Lampung, ditujukan untuk melayani wilayah Provinsi dan atau wilayah sekitarnya di Sumatera Bagian Selatan, Nasional maupun Internasional. Penetapan PKN di Kota Bandar Lampung memiliki fungsi utama yaitu :

- a. pusat pemerintahan provinsi;
- b. pusat perdagangan dan jasa;



- c. pusat distribusi dan koleksi;
 - d. pusat pendukung jasa pariwisata; dan
 - e. pusat pendidikan tinggi Internasional.
- A. Untuk rencana sistem transportasi di Kota Bandar Lampung meliputi :
- (1) Rencana jaringan jalan
- Jaringan jalan arteri primer lintas tengah meliputi:
 1. Sp. Tj. Karang- Sp. Tiga Teluk Ambon (Jln. Soekarno Hatta) (Bandar Lampung);
 2. Sp. Tiga Teluk Ambon-Km.10 (Panjang) (Bandar Lampung);
 3. Km.10 (Panjang)-Bts. Kota (Sukamaju) (Bandar Lampung);
 4. Jln. Malahayati (Bandar Lampung);
 5. Jln. Tengiri (Bandar Lampung);
 6. Sp. Teluk Betung-Sp. Pelabuhan Panjang (Bandar Lampung);
 7. Sp. Pelabuhan Panjang-Km. 10;
 8. Jln. Teluk Ambon (Bandar Lampung);
 9. Jln. Kartini (Bandar Lampung); dan
 10. Jln. Monginsidi (Bandar Lampung).
 - Peningkatan jalan kolektor primer satu (JKP-1) nasional, meliputi ruas jalan:
 1. Jalan Imam Bonjol;
 2. Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami; dan
 3. Jalan Zainal Abidin Pagar Alam.
 - Rencana pembangunan jalan tol, meliputi:
 1. Ruas exit toll Lematang - Pelabuhan Panjang;
 2. Ruas Pelabuhan Panjang - Padang Cermin - Sp. Kota Agung
 - Pembangunan Flyover Pelabuhan Panjang.



- Jalan kolektor primer dua (JKP-2) terdiri dari:
 1. Jalan Mayjen. H.M. Ryacudu (Bandar Lampung);
 2. Jalan Tenggiri (Bandar Lampung); dan
 3. Jalan R.E. Martadinata (Bandar Lampung);
- Jaringan jalan strategis provinsi meliputi:
 1. Lingkar Barat Bandar Lampung; dan
 2. Lingkar Utara Bandar Lampung;

(2) Rencana Terminal

Rencana pengembangan terminal di Kota Bandar Lampung berupa pengembangan terminal penumpang tipe A yaitu Terminal Rajabasa di Kota Bandar Lampung;

(3) Sistem Jaringan Kereta Api

Sistem jaringan kereta api, meliputi:

1. Jaringan jalur kereta api meliputi jalur Perkotaan Bandar Lampung dan jalur menuju pelabuhan Panjang.
2. Stasiun kereta api, meliputi
 - Stasiun Tarahan di Kota Bandar Lampung;
 - Stasiun Sukamenanti di Kota Bandar Lampung;
 - Stasiun Garuntang di Kota Bandar Lampung;
 - Stasiun Km. 3 di Kota Bandar Lampung;
 - Stasiun Tanjung Karang di Kota Bandar Lampung;
 - Stasiun Labuanratu di Kota Bandar Lampung;

(4) Rencana Pelabuhan

Rencana pengembangan pelabuhan di Kota Bandar Lampung meliputi:

1. Pelabuhan utama yaitu Pelabuhan Panjang di Kota Bandar Lampung; dan
2. Pelabuhan pengumpul meliputi Pelabuhan Teluk Betung di Kota Bandar Lampung;

- B. Untuk Sistem Jaringan Energi di Kota Bandar Lampung meliputi :
- a. Jaringan infrastruktur gas bumi meliputi jaringan distribusi yang melalui:
 - 1) Kota Metro, Kota Bandar Lampung, dan Kabupaten Lampung Selatan; dan
 - 2) Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, dan Kabupaten Lampung Timur.
 - b. Infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukungnya terdiri dari:
 - 1) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang ditetapkan PLTD Teluk Betung di Kota Bandar Lampung
 - 2) Pengembangan pusat-pusat distribusi tegangan berupa gardu-gardu induk meliputi:
 - Pengembangan jaringan transmisi baru yang meliputi: Jaringan transmisi Garuntang-Inc. 2 Pi (New Tarahan-Teluk Betung) dan Jaringan transmisi GIS Rajabasa/Kedaton-Inc. 2 Pi (Natar- Sukarama);
 - Pengembangan pusat-pusat distribusi tegangan berupa gardu-gardu induk yang meliputi:
 1. Peningkatan jaringan Gardu Induk (GI) eksisting yang meliputi GI Langkapura di Kota Bandar Lampung;
 2. Peningkatan jaringan Gardu Induk (GI) eksisting yang meliputi: GIS Garuntang di Kota Bandar Lampung;
 3. Sistem Jaringan TelekomunikasiSistem jaringan telekomunikasi yang dikembangkan di Kota Bandar Lampung yaitu Pengembangan jaringan mikro digital berupa jaringan kabel bawah laut yang melalui Kabupaten Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pesisir Barat.

4. Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Berdasarkan RTRWP Lampung, Kota Bandar Lampung termasuk ke dalam Sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota yaitu Wilayah Sungai Seputih-Sekampung.

5. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Sistem jaringan prasarana lainnya terdiri dari:

- a. Sistem penyediaan air minum (SPAM) regional lintas kabupaten/kota meliputi SPAM Regional Bandar Lampung;
- b. Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) lintas kabupaten/kota di kawasan permukiman pada kawasan Perkotaan Bandar Lampung;

C. Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang terdiri dari Kawasan peruntukan lindung dan Kawasan peruntukan budidaya. Rencana Kawasan peruntukan lindung di Kota Bandar Lampung berdasarkan RTRW Povinsi Lampung meliputi:

- a. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya berupa kawasan hutan lindung dan Kawasan resapan air;
- b. Kawasan Konservasi berupa Kawasan taman hutan raya adalah Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman;
- c. Kawasan perlindungan setempat berupa Kawasan sempadan pantai dan Kawasan sempadan sungai; dan
- d. Kawasan Rawan Bencana Rawan bencana longsor, Rawan bencana kebakaran hutan dan lahan.

Sedangkan untuk kawasan peruntukan budidaya meliputi:

- a. Kawasan Pertanian berupa Kawasan tanaman pangan dan Kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B).



- b. Kawasan Peruntukkan Industri berupa Kawasan Industri Bandar Lampung di Kota Bandar Lampung.
- c. Kawasan pariwisata: Kota Bandar Lampung sebagai ibukota Provinsi Lampung memiliki fungsi utama sebagai pusat pendukung jasa pariwisata, meliputi kawasan wisata di jalur lintas barat yang mencakup Gedungtataan-Rantau Kijang, Kota Agung – Wonosobo – Sanggi – Bengkuntat – Biha – Krui - Simpang Gunung Kemala - Pugung Tampak sampai dengan perbatasan Provinsi Bengkulu.
- d. Kawasan permukiman
- e. Kawasan Peruntukan Pertahanan Keamanan berupa Wilayah pertahanan darat yang meliputi: KOREM-043 di Kota Bandar Lampung; dan b. KODIM-0410 di Kota Bandar Lampung;

D. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung

Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2018 tentang RZWP3K Provinsi Lampung Tahun 2018-2038, Kawasan pemanfaatan umum di Kota Bandar Lampung meliputi:

1. Zona Pariwisata

Sub zona wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil yang berada di Kota Bandar Lampung meliputi Pantai Duta Wisata (KPU-W-P3K-2), Pantai Tirtayasa (KPU-W-P3K-3), Pantai Duta Wisata (KPU-W-P3K-4).

2. Zona permukiman

Sub zona permukiman meliputi perairan Kota Bandar Lampung yaitu Kecamatan Telukbetung Timur terdiri dari Kota Karang dengan kode sub zona (KPU-PM-N-1), Cungkeng Kota Karang (KPU-PMK-PN-2), Umbul Asem Keteguhan (KPU-PM-N-3); Kecamatan Telukbetung Selatan yaitu Gudang Agen Pesawahan (KPU-PM-N-4); Kecamatan Bumi Waras yaitu



Gudang Lelang (KPU-PM-N-5), Kangkung (KPU-PM-N-6), dan Bumi Waras (KPU-PM-N-7).

3. Zona Pelabuhan

Zona pelabuhan berupa Sub zona Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp), meliputi:

- a. perairan disekitar Pelabuhan Panjang dengan kode sub zona KPU-PL- DLK-1; dan
- b. perairan disekitar Rencana Pengembangan Pelabuhan Panjang dengan kode sub zona KPU-PL-DLK-4;

4. Zona Perikanan Budi Daya

Zona perikanan budi daya adalah sub zona budi daya laut berupa perairan sekitar Kota Bandar Lampung, meliputi Teluk Betung Barat yaitu Harnas-Lempasing dengan kode sub zona (KPU-BDl-BL-56); Kecamatan Teluk Betung Timur yaitu Kota Karang (KPU-BD-BL-57,KPU-BD-BL-58); Kecamatan Bumi Waras (KPU-BD-BL-59 sampai dengan KPU-BD-BL-63);

5. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil di Kota Bandar Lampung meliputi:

- a. Kota Bandar Lampung yaitu Pulau Kubur dengan kode KKP3K-TP-11;
- b. Kawasan KKP3K pada ekosistem mangrove untuk jenis Taman Pesisir, meliputi: Kota Karang Teluk Betung Timur dengan kode (KKP3K-TP) dan Gudang Agen Penengahan Teluk Betung Selatan (KKP3K-TPM-2).

(3) Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung;

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2030, namun didalam pelaksanaannya RTRW Kota Bandar Lampung telah mengalami dinamika pembangunan yang sangat besar



dan beragam. Hal ini tidak terlepas dari lokasi kota yang secara geografis menjadi pintu gerbang Pulau Sumatera yang memiliki peran sebagai ibukota provinsi. Untuk itu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang mengamanahkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Saat ini RTRW Kota Bandar Lampung sedang dalam proses peninjauan kembali/revisi. Peninjauan kembali ini dimaksudkan untuk melihat kesesuaian antara Rencana Tata Ruang Wilayah dengan kebutuhan pembangunan dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang setelah ditetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang bersangkutan.

Proses revisi sudah sampai tahap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2041, selanjutnya akan menjadi bahan untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Kota Bandar Lampung juga merupakan acuan dalam penyusunan rencana Tata Ruang Yang Lebih rinci. Oleh Karena itu, dalam proses perencanaan pembangunan jangka menengah Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026, selain mempertimbangkan tata ruang dan kewilayahan berdasarkan dokumen RTRW Kota Bandar Lampung 2011-2030 yang masih berlaku, juga bersinergi dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung Tahun 2021 - 2041.

Perumusan tujuan Penataan Ruang wilayah Kota Bandar Lampung untuk 20 tahun ke depan setidaknya akan mempertimbangkan 3 (tiga) aspek yang mempengaruhi perkembangan penataan ruang di wilayah kota Bandar Lampung, yakni : (a) Visi dan Misi pembangunan jangka

panjang kota (b) Karakteristik wilayah kota dan (c) Tujuan penataan ruang wilayah nasional.

Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam RPJPD Tahun 2005 – 2025 telah menetapkan visi pembangunan Kota Bandar Lampung, yaitu: ***“Bandar Lampung Pusat Perdagangan dan Jasa Sumatera Bagian Selatan 2025”***. Berdasarkan visi dan misi serta karakteristik wilayah Kota Bandar Lampung, potensi Kota Bandar Lampung sebagai Kota jasa, perdagangan, pemukiman serta pengembangan industri merupakan salah satu pertimbangan dalam merumuskan arah penataan ruang kota Bandar Lampung. Selain potensi tersebut, permasalahan daya tampung dan daya dukung lingkungan Kota Bandar Lampung baik secara internal maupun secara eksternal merupakan salah satu faktor penting dalam pertimbangan tujuan penataan ruang wilayah Kota Bandar Lampung ini, oleh karena itu maka tujuan penataan ruang wilayah Kota Bandar Lampung sebagaimana yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2041 adalah ***“Terwujudnya Kota Bandar Lampung yang dinamis, cerdas, dan berkelanjutan sebagai kota perdagangan dan jasa”***.

1.3.6 Hubungan RPJMD Kota Bandar Lampung dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD, serta peraturan terkait lainnya, bahwa pemerintah wajib menyusun KLHS untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah, dan kebijakan, rencana

dan program (KRP), termasuk dalam penyusunan perencanaan program pembangunan daerah dalam RPJMD.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan kebijakan, rencana serta program. Selaras dengan telaahan rencana tata ruang wilayah Kota Bandar Lampung, KLHS memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan kebijakan, rencana serta program dimana berisi perkiraan dampak-dampak lingkungan akibat dari pembangunan.

Secara Umum, maksud dan tujuan dari penerapan KLHS dalam penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 adalah untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang termuat di dalam RPJMD Tahun 2021-2026 telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan: (a) saling ketergantungan (*interdependency*), yaitu meliputi saling ketergantungan antar wilayah, antar sektor, antar pemangku kepentingan dan antar kesatuan ekosistem; (b) prinsip keseimbangan (*equilibrium*), yaitu keselarasan proporsional antara kepentingan ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan hidup/ekologi; dan (c) prinsip keadilan (*justice*) yaitu keadilan dalam memperoleh manfaat pembangunan baik antar generasi maupun antar kelompok masyarakat dalam satu generasi di daerah. Maksud dan tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan kualitas RPJMD 2021-2026 sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Selain itu, KLHS juga menjadi dokumen yang terintegrasi ke dalam rencana pembangunan dan salah satu syarat penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang RPJMD sebagai salah satu instrumen yang mengintegrasikan pertimbangan lingkungan pada tingkatan pengambilan keputusan yang bersifat strategis, yakni pada arah kebijakan, rencana dan program pembangunan. Penyusunan KLHS dalam setiap penyusunan RPJMD

menggunakan pendekatan penilaian pencapaian TPB daerah untuk mendukung capaian TPB nasional.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD

RPJMD Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud untuk menjabarkan visi, misi Walikota dan Wakil Walikota yang telah dihantarkan pada pidato Walikota Bandar Lampung didepan Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kota Bandar Lampung pada tanggal 26 Februari 2021, yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi seluruh pihak, baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026. Selain itu, RPJMD Tahun 2021-2026 dimaksudkan dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang untuk mencapai sasaran Pembangunan Daerah.

TUJUAN

Tujuan dari disusunnya RPJMD Tahun 2021-2026, yaitu :

1. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah yang lebih terukur ke dalam tujuan, sasaran pembangunan tahun 2021-2026, dengan berpedoman pada dokumen perencanaan jangka panjang dan Rencana Tata Ruang Wilayah;
2. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai rancangan dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 (lima) tahun ke depan;
3. Sebagai instrumen untuk memudahkan seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mencapai tujuan dan sasaran

dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;

4. Sebagai instrumen untuk mengukur tingkat keberhasilan, melalui penetapan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah di Kota Bandar Lampung dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan;
5. Sebagai instrumen untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47 ayat (5) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026, dan sistematika penulisan.

II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bagian ini menjelaskan dan menyajikan gambaran kondisi umum Kota Bandar Lampung dalam tinjauan Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, dan Aspek Daya Saing Daerah; yang dikombinasikan dengan Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Bandar Lampung, hasil penyelenggaraan layanan dasar yang terkait dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2021 dan Capaian Kinerja Pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2020.

III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Menjelaskan gambaran capaian kinerja keuangan daerah masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, serta kerangka pendanaan

daerah, guna dasar untuk memproyeksikan kemampuan keuangan Kota Bandar Lampung dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

IV. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini menjelaskan berbagai rumusan permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis daerah yang masih dan akan menjadi pokok perhatian dalam penentuan kebijakan dan strategi pembangunan pemerintah daerah pada periode lima tahun ke depan, yang diselaraskan dengan tugas dan kewenangan pemerintah Kota Bandar Lampung.

V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat visi dan misi pembangunan jangka menengah Kota Bandar Lampung dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, yang selanjutnya akan dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran serta indikator kinerja tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah. Selain itu pada bab ini juga dijelaskan keselarasan Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya.

VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menyajikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan pembangunan untuk RPJMD Tahun 2021-2026. Selanjutnya ditetapkan program pembangunan daerah yang akan menunjang pencapaian sasaran pembangunann sesuai dengan strategi yang telah dipilih.

VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH.

Bab ini memuat program perangkat daerah beserta indikator kinerja dan pagu indikatif yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun pembangunan sesuai urusan pemerintahan yang dilaksanakan, dalam rangka pencapaian visi dan misi RPJMD.



VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini memuat penetapan indikator kinerja daerah, guna memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang disajikan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) beserta target setiap tahun sampai dengan Tahun 2026.

IX. PENUTUP

Bab penutup ini merupakan ikhtisar keseluruhan pembahasan pada seluruh bab yang ada, dilengkapi dengan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.





BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

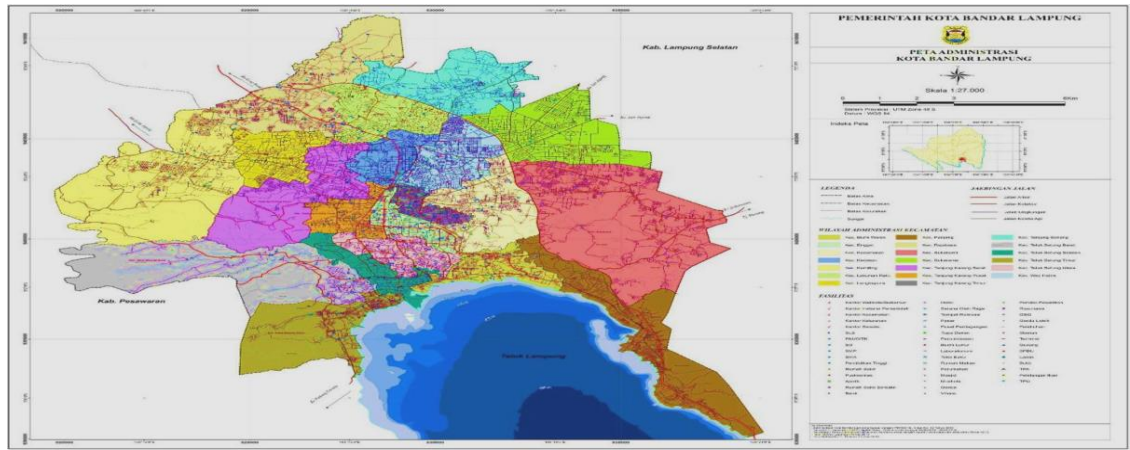
2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1 Letak dan Kondisi Geografi Daerah

Kota Bandar Lampung merupakan Ibu Kota Provinsi Lampung yang secara geografis terletak pada koordinat 5°20' sampai dengan 5°30' Lintang Selatan dan 105°28' sampai dengan 105°37' Bujur Timur. Ibukota Bandar Lampung berada di Teluk Betung yang terletak di ujung Selatan Pulau Sumatera. Secara Administrasi, Kota Bandar Lampung berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten di Provinsi Lampung, yaitu :

- Di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan,
- Di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran dan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan serta Teluk Lampung,
- Di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Gedong Tataan dan Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran,
- Di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

Gambar 2.1 Peta Administratif Kota Bandar Lampung



Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung, 2021

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar Lampung yang tersaji dalam Kota Bandar Lampung Dalam Angka (BLDA) Tahun 2021, Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah daratan ± 19.722 Ha ($197,22$ Km²). Namun berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2041, Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah daratan ± 18.374 Ha ($183,74$ Km²) dengan panjang garis pantai sepanjang 35,6 Km dan luas perairan $\pm 11,56$ Ha yang terdiri atas Pulau Kubur (0,96 Ha) dan Pulau Pasaran (10,6 Ha). Secara administratif Kota Bandar Lampung terdiri dari 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan. Berikut adalah data yang menunjukkan luas dan wilayah administrasi Kota Bandar Lampung:

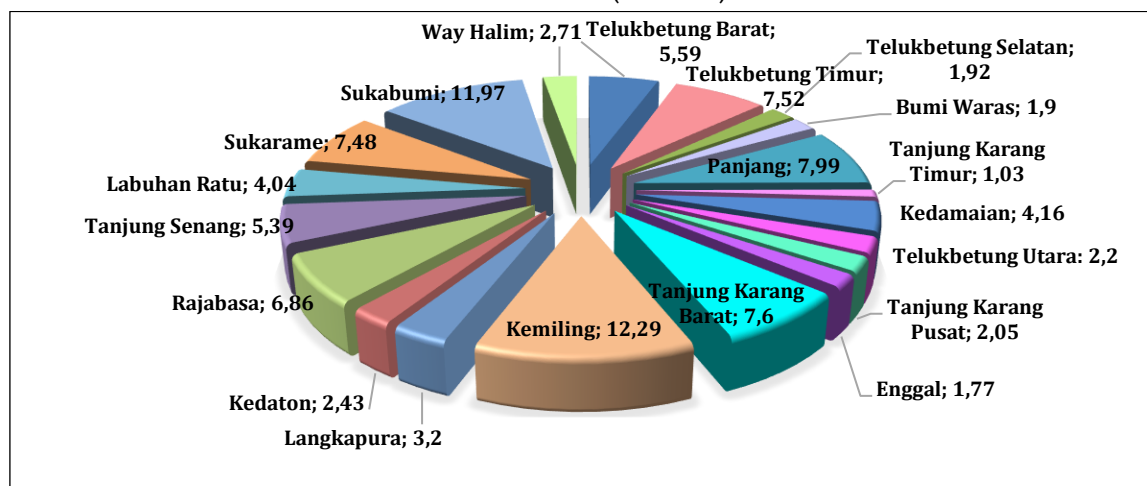
Tabel 2.1 Luas dan Wilayah Administrasi Kota Bandar Lampung

Kecamatan	Luas Wilayah berdasarkan data BPS dalam BLDA Tahun 2021 (Km ²)	Luas Wilayah Berdasarkan Ranperda RTRW Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2041 (Km ²)
Telukbetung Barat	11,02	18,26
Telukbetung Timur	14,83	10,39
Telukbetung Selatan	3,79	3,49
Bumi Waras	3,75	4,52
Panjang	15,75	13,64
Tanjung Karang Timur	2,03	2,07
Kedamaian	8,21	8,34
Telukbetung Utara	4,33	4,38
Tanjung Karang Pusat	4,05	3,45
Enggal	3,49	2,78
Tanjung Karang Barat	14,99	11,54
Kemiling	24,24	21,33
Langkapura	6,12	5,30
Kedaton	4,97	3,77

Kecamatan	Luas Wilayah berdasarkan data BPS dalam BLDA Tahun 2021 (Km ²)	Luas Wilayah Berdasarkan Ranperda RTRW Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2041 (Km ²)
Rajabasa	13,53	12,93
Tanjung Senang	10,63	9,24
Labuhan Ratu	7,97	6,10
Sukarame	14,75	10,92
Sukabumi	23,60	25,04
Way Halim	5,35	6,25
Jumlah	197,22	183,74

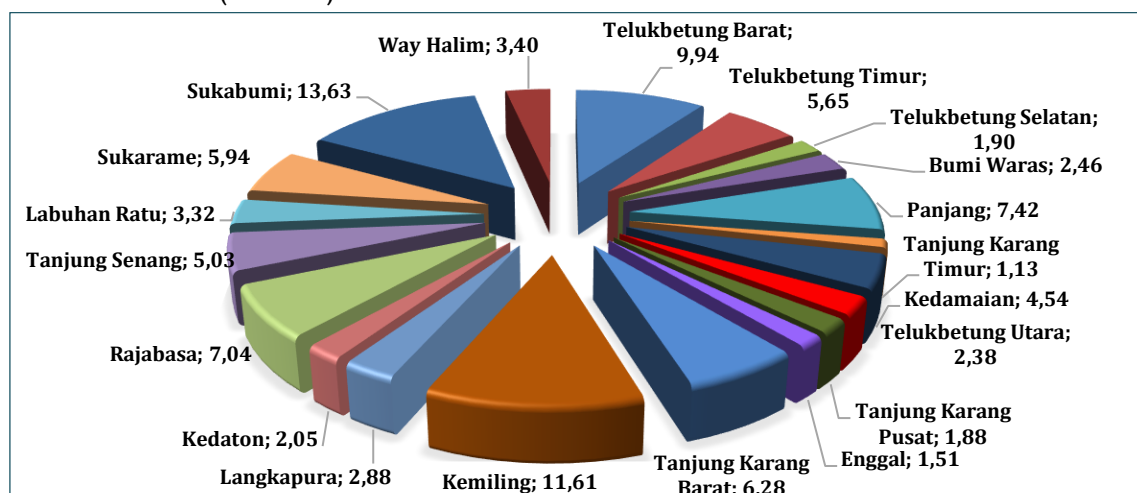
Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka, Badan Pusat Statistik, 2021; Ranperda RTRW Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2041, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung, 2021

Diagram 2.1 Luas Daerah Menurut Kecamatan berdasarkan Data BPS dalam BLDA Tahun 2021 (Persen)



Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka, Badan Pusat Statistik, 2021

Diagram 2.2 Luas Daerah Menurut Kecamatan berdasarkan data pada Ranperda RTRW Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2041 (Persen)



Sumber : Ranperda RTRW Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2041, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung, 2021

a) Posisi Geostrategis

Kota Bandar Lampung memiliki andil yang sangat vital dalam jalur transportasi darat dan aktivitas pendistribusian logistik dari Jawa menuju Sumatera maupun sebaliknya serta memiliki Pelabuhan Panjang untuk kegiatan ekspor impor dan Pelabuhan Srengsem yang melayani distribusi batubara dari Sumatera ke Jawa, sehingga secara langsung Kota Bandar Lampung berkontribusi dalam mendukung pergerakan ekonomi nasional.

Kota Bandar Lampung berpotensi untuk menjadi Kota Metropolitan. Seiring dengan program pada Tahun 2015, Kota Bandar Lampung dan Kota Metro merupakan kawasan yang dipetakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) berpotensi sebagai Area Metropolitan, terkhusus dalam cetak biru Wilayah Pengembangan Strategis Merak-Bakauheni-Bandar Lampung-Palembang-Tanjung Api-Api. Keunggulan Kota Metropolitan ini adalah menjadi pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan dan jasa, industri, pariwisata serta pendidikan. Dengan posisi penting tersebut, Kota Bandar Lampung harus lebih unggul dan maju dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain yang ada di Provinsi Lampung.

Pembangunan jalur tol laut akan berperan dalam kemudahan akses jalur laut yang menghubungkan Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan pulau-pulau lainnya. Tol Laut akan memunculkan pusat-pusat pertumbuhan baru sebagai sebuah *multiplier effecter* masuk Kota Bandar Lampung. Kota Bandar Lampung sebagai salah satu pusat jaringan pergerakan nasional melengkapinya dengan pembangunan Pelabuhan Panjang yang diarahkan sebagai pelabuhan ekspor-impor dan antarpulau. Kondisi fisik perairan pelabuhan memungkinkan pengembangan Kota Bandar Lampung sebagai gerbang internasional.

Pembangunan jalur tol trans Sumatera, jaringan jalan arteri primer, dan jalur Kereta Api Trans Sumatera yang terintegrasi dengan wilayah Kota Bandar Lampung akan sangat berperan dalam yang menghubungkan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, dan pulau-pulau lain melalui jalur darat. Jalan

tol trans Sumatera dibangun di Timur Bandar Lampung ke arah Palembang sebagai kelanjutan jalur Jawa-Sumatera. Arteri primer sebagai bagian trans Sumatera dilengkapi jalur Lintas Barat dan Lintas Timur ke Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera Selatan. Gagasan pembangunan jalur Kereta Api trans Sumatera hingga Sumatera Utara akan berada pada sisi pantai Timur.

Kota Bandar Lampung memiliki berbagai fasilitas dan tempat yang lengkap yang terbagi atas pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat wisata dan pusat pendidikan. Aspek strategis lainnya adalah memiliki pantai yang indah yang berpotensi sebagai tempat wisata maupun Kota Pesisir yang dikenal dengan “Bandar Lampung Kota Marina”. Kota Bandar Lampung memiliki luas area pesisir sebesar 0,05% yang merupakan aset yang harus dioptimalkan.

b) Kondisi Kawasan

Secara umum, Kawasan Kota Bandar Lampung merupakan wilayah perkotaan padat penduduk yang terdiri atas daratan dan perairan (lautan) dengan beberapa dataran tinggi dan pegunungan yang terbentang di wilayah Kota Bandar Lampung. Secara letak posisi Kota Bandar Lampung dikelilingi oleh beberapa Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung.

c) Topografi

Kota Bandar Lampung terletak pada ketinggian 0 sampai 700 meter diatas permukaan laut dengan topografi yang terdiri dari :

- 1) Daerah pantai yaitu sekitar Teluk Betung bagian selatan dan Panjang
- 2) Daerah perbukitan yaitu sekitar Teluk Betung bagian utara
- 3) Daerah dataran tinggi serta sedikit bergelombang terdapat di sekitar Tanjung Karang bagian Barat yang dipengaruhi oleh gunung Balau serta perbukitan Batu Serampok dibagian Timur Selatan.
- 4) Teluk Lampung dan pulau-pulau kecil bagian Selatan.

Gambar 2.2 Peta Topografi Kota Bandar Lampung



Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung, 2021

Sebagian wilayah Kota Bandar Lampung merupakan perbukitan. Berikut ini adalah data yang menunjukkan Gunung/Bukit/Lereng di Kota Bandar Lampung sampai dengan Tahun 2020.

Tabel 2.2 Gunung/Bukit/Lereng di Kota Bandar Lampung

Nomor	Nama Gunung/Bukit/Lereng	Lokasi
1	Gunung Kunyit	Bumi Waras
2	Gunung Mastur	Kel. Perwata (Teluk Betung Timur)
3	Gunung Bakung	Kel. Sukamaju (Teluk Betung Timur)
4	Gunung Sulah	Kel. Gunung Sulah (Way Halim)
5	Gunung Celegi	Sukarame II (Teluk Betung Barat)
6	Gunung Perahu	Kel. Sidodadi
7	Gunung Cerepung	Kel. Olok Gading (Teluk Betung Barat)
8	Gunung Cerepoh	Kel. Olok Gading (Teluk Betung Barat)
9	Gunung Sari	Kel. Gunung Sari (Enggal)
10	Gunung Palu	Kel. Olok Gading (Teluk Betung Barat)
11	Gunung Depok	Kel. Keteguhan (Teluk Betung Barat)
12	Gunung Kucing	Kel. Segala Mider (Langkapura)
13	Gunung Banten	Kel. Sidodadi (Kedaton)
14	Gunung Sukajawa	Kel. Sukajawa (Tanjung Karang Barat)
15	Gunung Serampok	Kel. Srengsem (Panjang)
16	Bukit Asam	Ke. Way Lunik (Panjang)
17	Bukit Pidada	Kel. Way Gubak Campang Raya
18	Bukit Balau	Kel. Way Gubak Campang Raya
19	Gugusan Bukit Hatta	Kel. Sukamaju (Teluk Betung Timur)
20	Bukit Cepagoh	Kel. Olok Gading (Teluk Betung Barat)
21	Bukit Kaliawi	Kel. Kaliawi (Tanjung Karang Pusat)
22	Bukit Palapa I	Kel. Durian Payung (Tanjung Karang Pusat)
23	Bukit Palapa II	Kel. Durian Payung (Tanjung Karang Pusat)
24	Bukit Pasir Gintung	Kec. Tanjung Karang Pusat
25	Bukit Kaki Gunung Betung	Kel. Beringin (Kemiling)
26	Bukit Sukadana Ham	Kec. Tanjung Karang Barat
27	Bukit Susunan Baru	Kec. Tanjung Karang Barat
28	Bukit Sukamenanti	Kec. Kedaton
29	Bukit Kelurum	Kec. Tanjung Karang Timur

Nomor	Nama Gunung/Bukit/Lereng	Lokasi
30	Bukit Randu	Kec. Tanjung Karang Timur
31	Bukit Langgar	Kel. Campang Raya
32	Bukit Camang Timur	Kec. Kedamaian
33	Bukit Camang Barat	Kec. Kedamaian

Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka, Badan Pusat Statistik, 2021

Berikut letak geografi dan topografi Kota Bandar Lampung yang dipilih menurut kecamatan.

Tabel 2.3 Banyaknya Kelurahan menurut Kecamatan, Letak Geografi, dan Topografi Tahun 2020

Kecamatan	Letak Geografi		Topografi	
	Pantai	Bukan Pantai	Datar	Berbukit
Telukbetung Barat	-	5	1	4
Telukbetung Timur	6	-	6	-
Telukbetung Selatan	-	6	2	4
Bumi Waras	5	-	5	-
Panjang	6	2	6	2
Tanjung Karang Timur	-	5	5	-
Kedamaian	-	7	6	1
Telukbetung Utara	-	6	6	-
Tanjung Karang Pusat	-	7	3	4
Enggal	-	6	6	-
Tanjung Karang Barat	-	7	2	5
Kemiling	-	9	4	5
Langkapura	-	5	1	4
Kedaton	-	7	6	1
Raja Basa	-	7	6	1
Tanjung Senang	-	5	5	-
Labuhan Ratu	-	6	6	-
Sukarame	-	6	6	-
Sukabumi	-	7	3	4
Way Halim	-	6	5	1
Jumlah	17	109	90	36

Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka, Badan Pusat Statistik, 2021

d) Hidrologi

Secara hidrologi Kota Bandar Lampung mempunyai 2 sungai besar yaitu Way Kuripan dan Way Kuala, dan 23 sungai-sungai kecil. Semua sungai tersebut merupakan DAS (Daerah Aliran Sungai) yang berada di wilayah Kota Bandar Lampung dan sebagian besar bermuara di Teluk Lampung. Berdasarkan inventarisasi dan penyusunan Database Sungai di Kota Bandar Lampung yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, berikut ini adalah data yang menunjukkan Gambaran Data sungai di Kota Bandar Lampung.

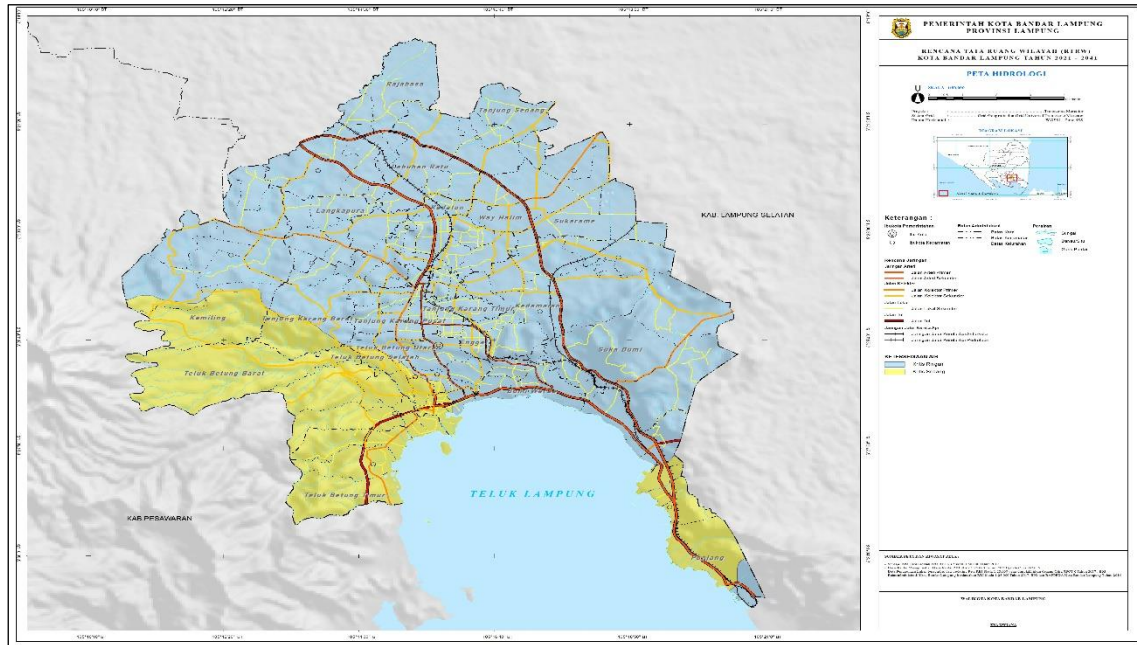
Tabel 2.4 Gambaran Data Sungai di Kota Bandar Lampung

Nama Sungai	Lokasi Hulu		Lokasi Hilir		Dimensi					Debit					Muara ke	Potensi Banjir/ Bebas Banjir
	Kelurahan	Kecamatan	Kelurahan	Kecamatan	B1 (m) Bawah	B2 (m) Atas	H (m) Tinggi	Panjang (m)	Q (5)	Q (10)	Q (25)	Q (50)	Q (100)			
Way Kuala	Garuntang	Bumi Waras	Ketapang	Panjang	6	8	4	4.066	17,5737	20,5404	242517	26,9988	29,7252	Laut	Banjir	
Anak Way Kuala	Garuntang	Bumi Waras	Ketapang	Panjang	4	6	2	1.029	0,8551	0,9995	1,18	1,3137	1,4464	Laut	Banjir	
Way Balau	Jl. Imam Bonjol, Langkapura	Kemiling	Jl. Gatot Subroto, Garuntang, Kp. Balok	Teluk Betung Selatan	5	4	3	14.380						Way Kuala	Banjir	
Way Galih	Sukarame	Sukarame	Sabah Balau	Tanjung Bintang	2	1,5	1	2.223	2,0471	2,3926	2,825	3,1449	3,4625	Sungai Way Galih Besar (Lampung Timur)	Banjir	
Way Halim	Segala Mider	Tanjung Karang Barat	Surabaya	Kedaton	3	3	2	5.040	2,3684	2,7682	3,2684	3,6386	4,006	Ke Kuala	Banjir	
Way Kupang	Jl. Wolter Monginsidi, Pengajaran	Teluk Betung Utara	Bumi Waras	Panjang	3	3	3	2.363	0,8681	1,0114	1,1979	1,3336	1,4683	Laut	Banjir	
Way Awi	Jl. Singsing-maharaja	Tanjung Karang Pusat	Jl. Antasari, Kedamaian	Tanjung Karang Timur	4	5	3	4.683	2,9825	34860	4,1159	4,5821	5,0448	Way Kedamaian	Banjir	
Way Kuripan	Jl. Wan Abdurrahman, Sukarame II	Telu Betung Barat	Jl. Ikan Kembang, Pesawahan	Panjang	18	18	3	6.024	22,5385	26,3433	31,1031	34,4626	38,1229	Laut	Bebas Banjir	
Way Betung	Batu Putu	Teluk Betung Utara	Jl. Wan Abdurrahman, Sukarame II	Teluk Betung Barat	3	5	2	1.089	9,0434	10,5700	12,4799	13,8935	15,2965	Way Kuripan	Banjir	
Way Penengahan	Jaga Baya	Way Halim	Jagabaya II	Sukabumi	1,2	1,3	1,2	1.679	0,3628	0,424	0,5006	0,5573	0,6136	Way Awi	Banjir	
Anak Way Awi	Jl. Raden Intan Tanjung Karang	Tanjung Karang Pusat	Jl. Beo	Tanjung Karang Timur	2,5	3	3,5	1.075						Way Kedamaian	Banjir	
Way Simpuri	Durian Payung	Enggal	Enggal	Tanjung Karang Pusat	2,5	3	2,5	2.084	1,0909	1,2751	1,5055	1,6776	1,8452	Anak Way Awi	Banjir	
Way Langkapura	Langkapura	Langkapura	Jl. Mangkubumi, Segala Mider	Tanjung Karang Barat	2	2,5	1,5	1.028	1,0184	1,1903	1,4053	1,5645	1,7225	Laut	Banjir	

Nama Sungai	Lokasi Hulu		Lokasi Hilir		Dimensi					Debit				Muara ke	Potensi Banjir/ Bebas Banjir
	Kelurahan	Kecamatan	Kelurahan	Kecamatan	B1 (m) Bawah	B2 (m) Atas	H (m) Tinggi	Panjang (m)	Q (5)	Q (10)	Q (25)	Q (50)	Q (100)		
Way Sukamaju	Sukajaya Lempasing, Padang Cermin	Kabupaten Pesawaran	Jl. Laks. Martadinata	Teluk Betung Barat	10	12	2,5	4.062	4,4828	5,2396	6,1863	6,887	7,5825	Laut	Bebas Banjir
Way Keteguhan	Sawah Raya	Teluk Betung Selatan	Jl. RE. Martadinata	Panjang	1,2	2	1	2,013	0,7255	0,848	1,0013	1,1147	1,2272	Laut	Banjir
Way Lunik	Jl. Soekarno Hatta, Way Lunik	Teluk Betung Selatan	Jl, Yos Sudarso, Way Lunik	Panjang	3	6	4	1.700	2,2673	2,6501	3,1289	3,4833	3,8351	Laut	Banjir
Way Kedamaian	Antasari	Tanjung Karang Timur	Kampung Balok	Kedamaian	6	7	4	4.072	0,8732	1,0207	1,2051	1,3416	1,4771	Way Kuala	Banjir
Way Kunyit	Jl. Kh. Ahmad Dahlan	Teluk Betung Utara	Bumi Waras	Bumi Waras	3,4	3,4	2	1.087	1,1635	1,3599	1,6056	1,7874	1,9679	Laut	Banjir
Way Langka	Sumberejo	Kemiling	Sumber Rejo	Kemiling	4	3	2	2.155						Way Balau	Banjir
Way Simpang Kanan	Kp. Peninjauan	Teluk Betung Barat	Batu Putu	Teluk Betung Utara	4	7	2	1.695	43,921	5,1336	6,0611	6,7477	7,4291	Way Betung	Banjir
Way Simpang Kiri	Kp. Peninjauan	Teluk Betung Barat	Sukarame II	Teluk Betung Barat	7	10	3	9.500	38.609	45127	5,3281	5,9136	6,5306	Way Betung	Banjir

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, 2021

Gambar 2.3 Peta Hidrologi Kota Bandar Lampung

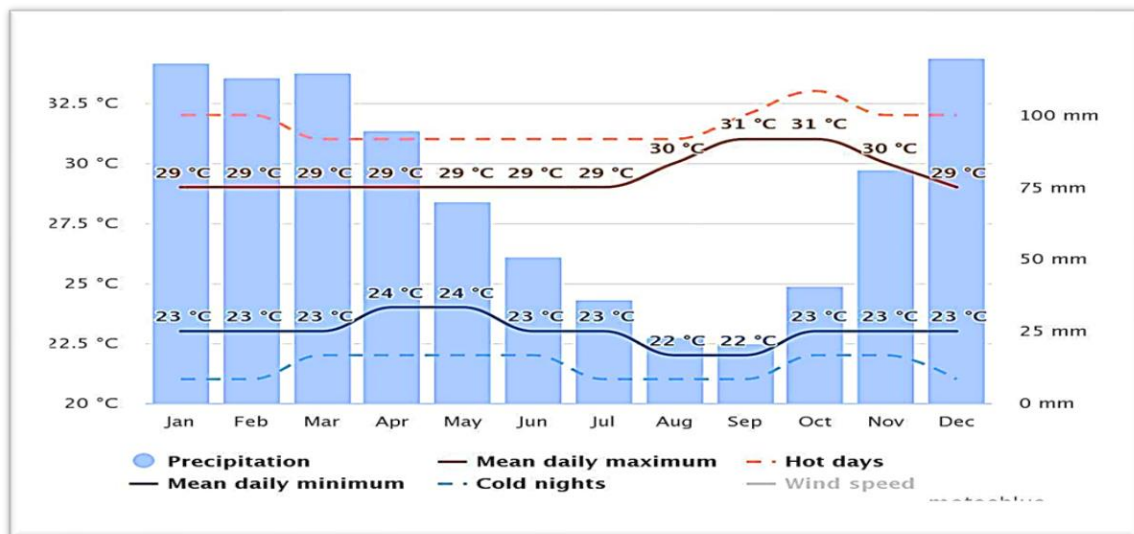


Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung, 2021

e) Klimatologi

Berdasarkan kajian kerentanan iklim yang telah dilakukan bahwa kondisi iklim di Kota Bandar Lampung sama dengan iklim kota yang berada di garis khatulistiwa dengan kondisi panas dan lembab sepanjang tahun dan suhu di darat konstan. Gambar berikut ini mewakili suhu dan pengendapan rata-rata setiap bulan di Bandar Lampung.

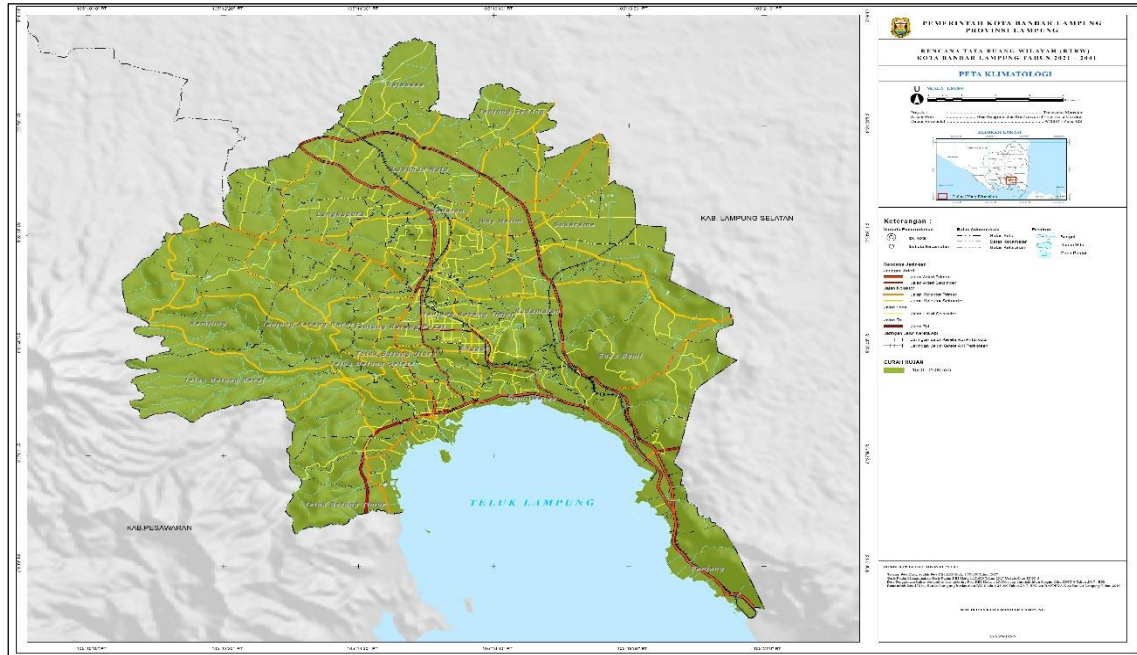
Diagram 2.3 Suhu dan Pengendapan Rata-Rata di Bandar Lampung



Sumber : www.meteoblue.com

Data tersebut menunjukkan bahwa curah hujan sedang terjadi di tiga bulan pertama setiap tahun dan di akhir tahun, karenanya rata-rata harian suhu maksimum akan terjadi sekitar bulan September-Oktober.

Gambar 2.4 Peta Klimatogi Kota Bandar Lampung



Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung, 2021

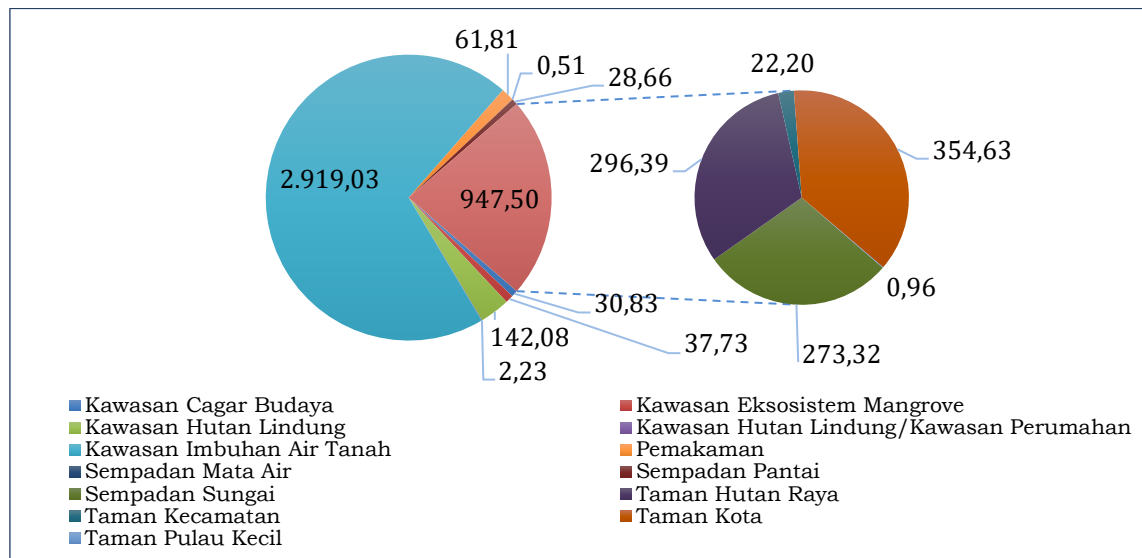
f) Tutupan Lahan

Tutupan lahan di Kota Bandar Lampung secara eksisting sampai saat ini secara garis besar terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Berdasarkan data Ranperda RTRW 2021-2041 dari Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung, saat ini luas Kota Bandar Lampung sekitar 18,374 Ha. Secara umum lahan terbangun sampai saat ini dengan luas sekitar $\pm 9.983,34$ Ha atau sekitar 54,33 persen dari luas Kota Bandar Lampung, sedangkan lahan yang belum terbangun saat ini sekitar $\pm 8.390,66$ Ha atau sekitar 45,67 persen dari luas Kota Bandar Lampung.

a. Kawasan Lindung

 **RPJMD** Tahun 2021-2026 

Diagram 2.4 Kawasan Lindung



Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung, 2021

RTH publik terdiri dari taman kecamatan, taman kota, pemakaman, sempadan sungai dan sempadan pantai, sempadan mata air dan kawasan ekosistem mangrove yang tersebar diseluruh kecamatan wilayah Kota Bandar Lampung. Sedangkan RTH *private* tersebar pada lahan dengan fungsi permukiman di seluruh bagian wilayah kota. Selain itu RTH *private* juga tersebar pada kawasan industri yang banyak tersebar di wilayah Kecamatan Panjang, Sukabumi dan Kecamatan Bumi Waras.

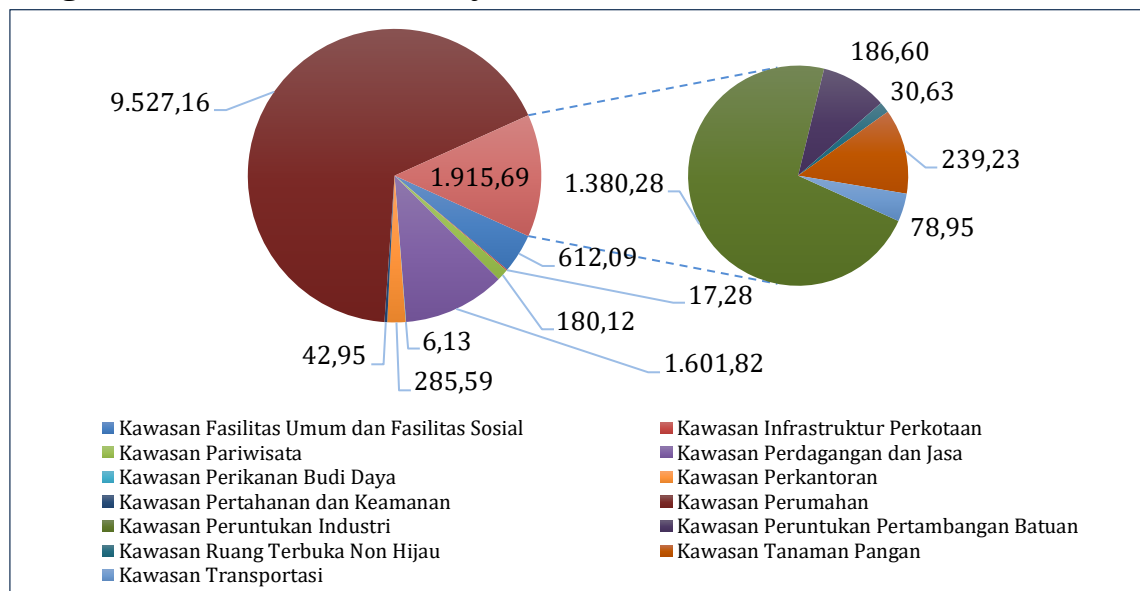
RTH dimaksudkan untuk menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air, menciptakan aspek planologis perkotaan, serta meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanahkan ketersediaan RTH sebesar 30% yang terdiri dari RTH *public* sebesar 20% dan RTH *private* sebesar 10% dari luas wilayah terbangun kota. Kondisi eksisting di Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa ketersediaan RTH saat ini jika dilihat dari luasannya belum dapat memenuhi ketentuan tersebut, dan RTH yang sudah ada perlu direvitalisasi fungsinya kembali. Luas ruang terbuka hijau (RTH) publik di Kota Bandar Lampung saat ini berjumlah 658,57 Ha atau sekitar 4,37% dari total luas lahan terbangun Kota Bandar Lampung yang terdiri dari taman kota sebesar 355 Ha, taman kecamatan sebesar 22 Ha, pemakaman

sebesar 62 Ha, sempadan sungai dan sempadan pantai sebesar 181,2 Ha, sempadan mata air 0,37 Ha dan kawasan ekosistem mangrove sebesar 38 Ha.

b. Kawasan Budidaya

Kawasan peruntukan budi daya kota adalah kawasan di wilayah kota yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Adapun pembagian kawasan budidaya adalah sebagai berikut:

Diagram 2.5 Kawasan Budidaya



Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung, 2021

Berdasarkan Permen ATR Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kota, kawasan budidaya dibagi menjadi kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan pertambangan dan energi, kawasan perikanan, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, kawasan hutan rakyat, dan kawasan pertahanan dan keamanan. Kawasan peruntukan budidaya Kota Bandar Lampung ditetapkan seluas 14.188,81 hektar.

c. Proporsi Penggunaan Lahan

Berdasarkan Data dari Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung, luasan pertanian tanaman pangan berdasarkan hasil *updating* terhadap luasan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan (LP2B) yaitu seluas 204,82 Ha dengan dukungan saluran irigasi seluas 2,13 Ha. Dan berdasarkan data pola ruang tersebut diatas, menunjukkan bahwa luas areal terluas adalah luas lahan non pertanian. Hal ini berarti Kota Bandar Lampung telah menjadi Kota Metropolitan yang ditunjukkan dengan luas lahan pertanian yang semakin berkurang dan luas lahan non pertanian yang cenderung meningkat. Terjadi peningkatan areal untuk pemukiman dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini terjadi sebagai dampak alami ketika jumlah penduduk meningkat. Hal yang perlu dibenahi adalah bagaimana mengatur perijinan tata ruang.

Untuk luas areal perusahaan menunjukkan terjadi peningkatan areal lahan untuk perusahaan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini terjadi sebagai dampak positif dari munculnya badan usaha baru yang berinvestasi di Kota Bandar Lampung. Untuk areal industri terjadi peningkatan jumlah areal industri dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut sebagai dampak meningkatnya investasi sektor industri di Kota Bandar Lampung. Untuk luas areal jasa terjadi peningkatan luas areal yang digunakan untuk sektor jasa. Hal tersebut sebagai akibat tumbuhnya sektor industri jasa di Kota Bandar Lampung.

Penurunan areal yang digunakan untuk areal lainnya dikarenakan areal digunakan untuk penggunaan sektor lainnya yang lebih produktif seperti untuk industri pabrik dan perusahaan sektor jasa. Area tanah kosong juga mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena tanah kosong yang sebelumnya kurang produktif telah digunakan untuk sektor yang lebih produktif seperti sektor industri, jasa, dan pemukiman.

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

1) Kota yang Prospektif

Kota Bandar Lampung memiliki prospek yang kuat untuk berkembang menjadi kota besar dalam skala regional, nasional, bahkan internasional.

Potensi Kota Bandar Lampung yang mendukung antara lain adalah:

- a. Lokasi geografis yang sangat strategis.
- b. Kedudukan yang dituju dalam kebijaksanaan tingkat nasional dan regional.
- c. Pemandangan alam yang indah yang dapat dimanfaatkan untuk menarik wisatawan.
- d. Keanekaragaman suku bangsa (*multi ethnic*).
- e. Dukungan wilayah sekitarnya (*hinterland*) yang menunjang pertumbuhan dan perkembangan Kota Bandar Lampung.

Dalam RTRW Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2030 dijelaskan bahwa dengan potensi serta kecenderungan perkembangan yang ada, ditunjang dengan lokasi yang strategis, potensi alam, penduduk, dan potensi wilayah belakangnya, Kota Bandar Lampung terlihat menuju perkembangan yang prospektif. Dengan kedudukan potensi tersebut, Kota Bandar Lampung dapat berperan sebagai pusat pertumbuhan bagi Sumatera bagian Selatan, serta pendukung Provinsi Lampung sebagai pusat produksi pertanian nasional (perdagangan dan jasa). Sektor yang tengah difokuskan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung adalah pariwisata, baik dalam rangka menunjang pembangunan pariwisata di Sumatera bagian Selatan maupun mendayagunakan potensi keindahan alam Kota Bandar Lampung. Pengembangan obyek wisata pantai dan laut serta perbukitan dalam Kota Bandar Lampung menciptakan daya tarik bagi wisatawan mancanegara maupun nusantara. Kelengkapan yang dapat dipersiapkan oleh Kota Bandar Lampung adalah penyediaan prasarana dan jasa pariwisata seperti perhotelan, restoran, agen perjalanan, perbankan, dan infrastruktur pendukung lain.

Berbagai peluang perkembangan yang prospektif juga membawa prasyarat agar kehidupan kota yang diharapkan dapat tercapai. Pertama adalah restrukturisasi *trend* perkembangan fisik dan kedua adalah penciptaan iklim yang kondusif bagi perkembangan Kota Bandar Lampung. Selain prasarana dan sarana pendukung kegiatan ekonomi, penyiapan kebijaksanaan, peraturan, dan program pembangunan menuju pemantapan Kota Bandar Lampung dalam memanfaatkan peluang ekonomi yang ada, dan perlu disiapkan pula sumber daya manusia yang menunjang.

2) Lokasi yang Strategis

Kota Bandar Lampung menempati posisi geografis yang sangat strategis, baik dalam konstelasi internasional, nasional, maupun regional. Posisinya terhadap Singapura dan Jakarta merupakan potensi bagi pengambilan peran dalam kerjasama ekonomi regional IMS-AFTA. Aspek yang menjadikan Kota Bandar Lampung strategis adalah:

- a. Aspek Ekonomi: Kawasan Perdagangan Jasa Pusat Kota, Kawasan pusat perdagangan dan jasa, Aktivitas campuran komersial dengan rumah tinggal (ruko), pemukiman, kawasan perdagangan (super blok perdagangan dan jasa) di Jalan R.A. Kartini–Jalan Radin Intan–Jalan Ahmad Yani berikut beberapa kawasan yang berada di sekitarnya.
- b. Aspek SDA dan teknologi: Kawasan Pendidikan Tinggi dan munculnya aktivitas pendidikan tinggi di sepanjang Jalan ZA Pagar Alam (Kedaton, Gedong Meneng, Rajabasa) dan sekitarnya (fungsi sosial budaya) dan wilayah Sukarame.
- c. Aspek Lingkungan Hidup: Kawasan Taman Hutan Rakyat (TAHURA) Wan Abdurahman (Reg 19), Kawasan Hutan Serampok, sebagian Kawasan Batu Putu, dan sebagian Sukadanaham. Kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan lindung. Kawasan ini merupakan daerah tangkapan air serta hulu beberapa sungai besar di Kota Bandar Lampung. Menjaga kelestarian air permukaan sebagai alternatif utama dalam pemenuhan sumber air baku Kota Bandar Lampung.

- d. Aspek Sosial Budaya: Kawasan bersejarah situs budaya di wilayah Kedamaian merupakan kawasan cagar budaya yang harus dilindungi dan dilestarikan.

3) Potensi Alam

Selain memiliki wilayah yang cukup luas, Kota Bandar Lampung juga memiliki potensi alam yang indah, terutama laut dan perbukitannya. Kekhasan morfologinya mulai dari pegunungan, perbukitan, daratan, hingga pantai yang terletak di bagian dalam Teluk Lampung, menjadikan Kota Bandar Lampung sangat potensial untuk dikunjungi wisatawan. Citra endogenik “Laut dan Gunung” tersebut merupakan potensi keindahan dan daya tarik alam di Kota Bandar Lampung.

Pantai yang berada di wilayah Kota Bandar Lampung memiliki pemandangan yang mempesona. Pantai ini memiliki keistimewaan tersendiri yaitu terletak di suatu teluk yang nyaman, dengan keindahan panorama laut dan beberapa gugusan pulau kecil di tengah teluk, yang potensial dikembangkan untuk wisata rekreasi bahari. Hal ini juga ditunjang oleh letaknya yang tidak jauh dari pusat kota. Perbukitan yang terletak di Pusat Kota dan bagian kota lainnya, juga merupakan potensi alam yang secara khas dimiliki oleh Kota Bandar Lampung. Selain berfungsi lindung bagi pelestarian tata air dan konservasi tanah, perbukitan dengan tanaman hijaunya akan berfungsi pula sebagai paru-paru Kota. Pemanfaatan yang terbatas dapat diselaraskan dengan pengembangan Wisata Hutan Raya.

4) Keanekaragaman Suku Bangsa

Salah satu ciri khas Kota Bandar Lampung adalah keanekaragaman suku bangsanya. Sejak dimulainya program transmigrasi dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera khususnya ke Provinsi Lampung, penduduk Provinsi Lampung terdiri dari berbagai suku bangsa. Dengan keanekaragaman suku bangsa, Provinsi Lampung dikenal sebagai negeri “Ruwa Jurai” (dua unsur) karena dihuni oleh masyarakat asli dan pendatang. Keanekaragaman suku bangsa ini harus dipandang sebagai potensi atau kekuatan untuk

membangun Kota Bandar Lampung, dalam arti Kota Bandar Lampung menjadi semakin mudah beradaptasi dan menerima pendatang baru, sehingga juga semakin terbuka menerima pengaruh pembangunan wilayahnya.

5) Dukungan Wilayah Belakang (*Hinterland*)

Kota Bandar Lampung didukung oleh *Hinterland* yang merupakan wilayah penghasil perikanan, perkebunan, dan lokasi berbagai industri. Dengan wilayah seluas 35.376,50 Km², Provinsi Lampung dijuluki wilayah unggulan, sentra pertumbuhan industri baru dan pintu gerbang lintas Pulau Jawa-Pulau Sumatera. Provinsi Lampung tumbuh menjadi wilayah penyangga bagi kegiatan pertanian dan industri pengolah hasil pertanian.

6) Pusat Pertumbuhan

Sebagai pusat kegiatan Provinsi Lampung, sekitar 12,45 persen penduduk Provinsi Lampung berada di Kota Bandar Lampung (berdasarkan data BPS tahun 2019). Berbagai pelayanan bagi wilayah yang lebih luas disediakan oleh Kota Bandar Lampung, baik di bidang pemerintahan, niaga, jasa keuangan, pendidikan, dan sebagainya.

Peran sebagai pusat pertumbuhan ditunjang oleh rencana peningkatan aksesibilitas dari dan ke Kota Bandar Lampung. Kota Bandar Lampung siap berfungsi sebagai *transshipment point* dari berbagai moda angkutan.

7) Pusat Koleksi dan Distribusi

Perkembangan sektor ekonomi, khususnya pertanian di wilayah Provinsi Lampung maupun Sumatera bagian Selatan, mendorong fungsi Kota Bandar Lampung sebagai pusat koleksi dan distribusi berbagai komoditi yang dihasilkan oleh wilayah belakangnya. Fungsi sebagai pusat koleksi dan distribusi berbagai komoditi yang dihasilkan oleh Sumatera Bagian Selatan dilangsungkan oleh rencana pengembangan jaringan jalan tol dan kereta api, jaringan jalan Trans Sumatera, serta rencana pengembangan Pelabuhan Panjang. Kelengkapan fasilitas yang tersedia di Kota Bandar

Lampung juga mendukungnya sebagai pusat koleksi dan distribusi barang dan jasa pada berbagai skala pelayanan.

8) Aksesibilitas yang Semakin Baik

Kota Bandar Lampung sebagai pusat pertumbuhan akan memperoleh pengaruh yang signifikan dari pergerakan tersebut melalui kemungkinan peningkatan investasi di sektor regional, nasional, dan internasional. Kota Bandar Lampung menjadi salah satu alternatif pilihan setelah Jakarta, Banten dan Jawa Barat. Rencana dan ketersediaan sarana-prasarana pendukung aksesibilitas seperti rencana jalan tol, jalan (nasional, provinsi dan kabupaten/kota), terminal, pelabuhan menjadi akses pendukung pembangunan perekonomian khususnya di Kota Bandar Lampung.

9) Pengembangan *Transshipment Point* Akibat Perkembangan Akses

Peran Kota Bandar Lampung sebagai pusat koleksi dan distribusi barang dan jasa didukung oleh Pelabuhan Panjang yang telah diminati oleh berbagai pihak untuk dikembangkan sebagai pelabuhan antarnegara, terutama dalam konteks region Sumatera bagian Selatan. Peranan yang dituju oleh pelabuhan ini adalah sebagai pelabuhan ekspor bagi komoditi dan produk yang dihasilkan oleh Sumatera Bagian Selatan. Pilihan ini mempertimbangkan posisi strategis Pelabuhan Panjang sebagai gerbang lintas dua kawasan ekonomi penting yaitu Sijori (Singapura-Johor-Riau) dan pusat pasar nasional Jakarta dan Jawa Barat bagian Barat, terutama dalam mengisi kerjasama ekonomi regional IMS-GT.

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan Ranperda RTRW Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2041 dan studi mitigasi bencana Kota Bandar Lampung, wilayah Kota Bandar Lampung saat ini memiliki beberapa kawasan yang diidentifikasi sebagai kawasan rawan bencana, seperti gempa bumi, gerakan tanah, tsunami, dan banjir.

Pengamatan lapangan dan penelitian menjelaskan bahwa Kota Bandar Lampung memiliki potensi bahaya alam guncangan gempa bumi, pergeseran tanah (*ground-faulting*) bahaya pelulukan/likuifaksi akibat dari bahaya ikutan “*colateral hazard*” gempa bumi, tumbuh-tumbuhan yang semakin gundul, kondisi batuan yang sebagian sudah lapuk, pola drainase, kandungan cairan dalam batuan dan tanah lapukan dan tanah di beberapa tempat menunjukkan kondisi yang rentan terhadap gempa bumi. Kawasan yang terpetakan sebagai kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat menengah sampai tinggi adalah Kecamatan Panjang, Sukabumi, dan Teluk Betung Timur.

Berikut peta Kawasan rawan bencana gempa bumi di Kota Bandar Lampung:

Gambar 2.6 Peta Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi

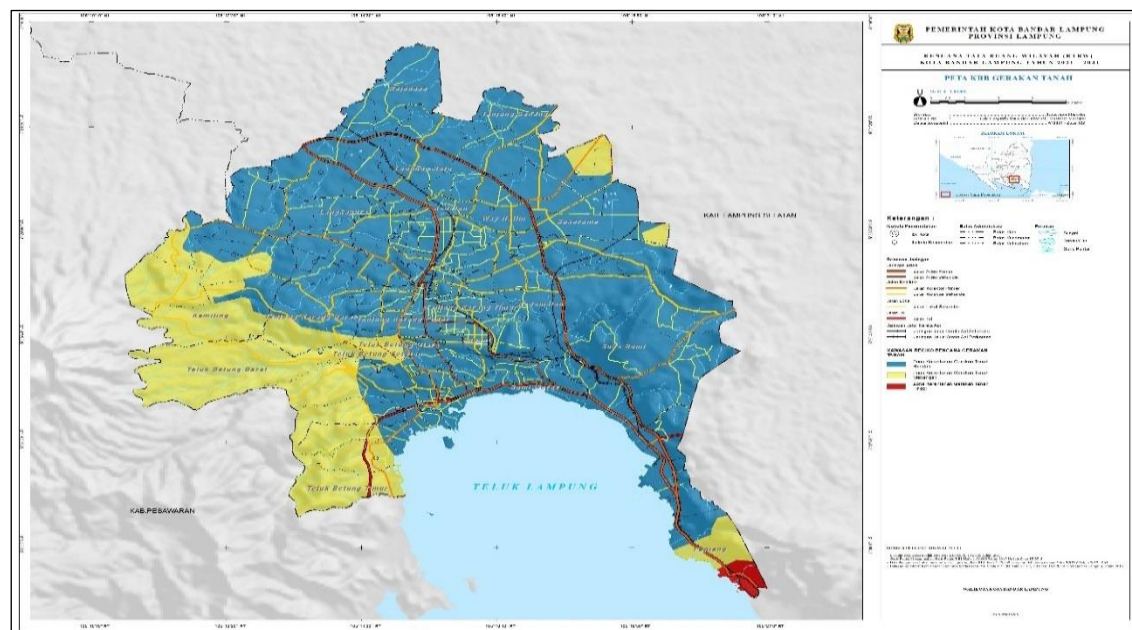


Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung, 2021

Sementara itu secara eksisting kawasan rawan bencana Gerakan tanah tingkat menengah sampai tinggi di Kota Bandar Lampung terdapat di 10 (sepuluh) Kecamatan yaitu di Kecamatan Panjang, Kemiling, Sukabumi, Tanjung Karang Barat, Tanjung Karang Pusat, Tanjung Karang Selatan, Teluk Betung Barat, Teluk Betung Selatan, Teluk Betung Timur, dan Teluk Betung Utara.

Barat, Telukbetung Selatan, Telukbetung Timur, Telukbetung Utara. Berikut peta Kawasan rawan bencana Gerakan tanah di Kota Bandar Lampung :

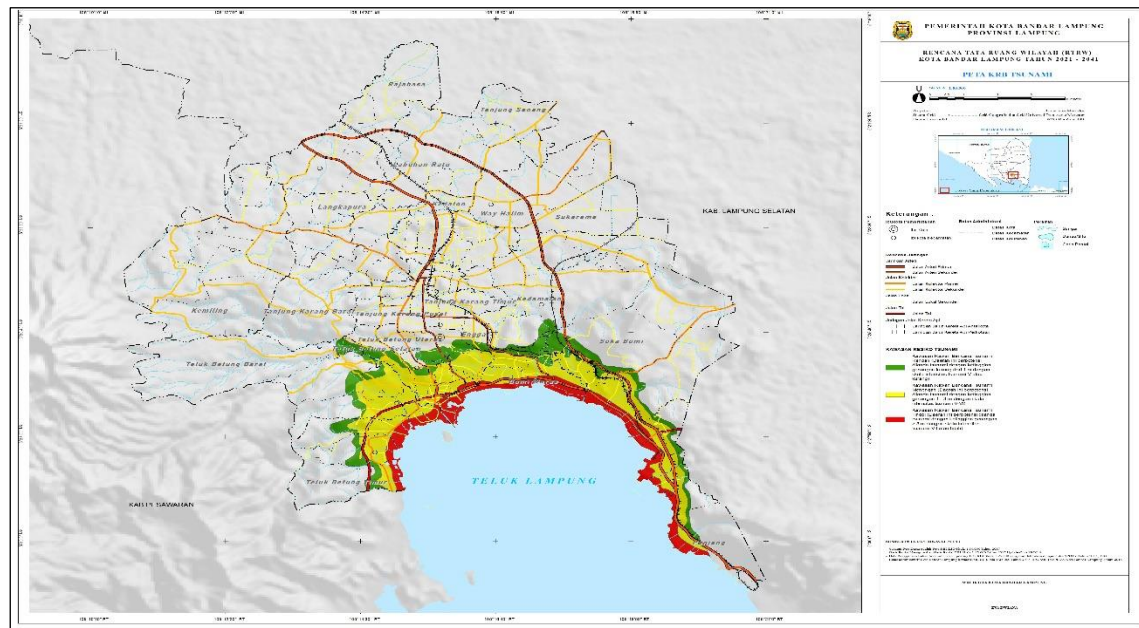
Gambar 2.7 Peta Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah



Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung, 2021

Berdasarkan analisis tektonik kawasan rawan bencana tsunami di Kota Bandar Lampung terletak di bagian Utara Komplek Hunjaman Sunda dan di Barat-Utara Gunung Krakatau yang berpotensi menimbulkan gelombang tsunami. Kondisi eksisting menunjukkan beberapa kawasan di Telukbetung Timur dan Bumi Waras berbatasan langsung dengan Teluk Lampung dan beberapa Kawasan memiliki topografi landai, yaitu wilayah Kecamatan Telukbetung Selatan, Telukbetung Utara, dan Panjang dimana daerah ini teridentifikasi sebagai kawasan rawan bencana tsunami tingkat menengah sampai tinggi. Berikut peta Kawasan rawan bencana tsunami di Kota Bandar Lampung :

Gambar 2.8 Peta Kawasan Rawan Bencana Tsunami



Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung, 2021

Kawasan rawan banjir adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi terjadi banjir. Kawasan rawan banjir terjadi disebabkan oleh tersumbatnya sungai maupun karena penggundulan hutan disepanjang sungai, bencana banjir terjadi hampir disetiap musim penghujan dan dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam berupa curah hujan yang diatas normal dan adanya pasang naik air laut. Disamping itu faktor lainnya adalah ulah manusia juga seperti penggunaan lahan yang tidak tepat (permukiman bantaran sungai, daerah resapan, penggundulan hutan dan sebagainya), pembuangan sampah ke dalam sungai, dan permukiman di daerah dataran banjir dan sebagainya. Berdasarkan data BPBD Kota Bandar Lampung, pada Tahun 2018 bencana banjir yang terjadi di Kota Bandar Lampung sebanyak 19 kali, menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 30 kali. Pada Tahun 2019 terjadi banjir di 24 titik di 19 kelurahan pada 12 kecamatan, sedangkan pada Tahun 2020 banjir terjadi di 35 titik di 25 kelurahan pada 14 kecamatan. Berikut adalah data yang menunjukkan titik banjir Kota Bandar Lampung Tahun 2020.

Tabel 2.5 Titik Banjir Kota Bandar Lampung Tahun 2020

Kecamatan	Kelurahan	Lokasi	Luas (m ²)	Keterangan
Tanjung Karang Pusat	Pasir Gintung	Jl. Teuku Umar RT 01 RW 02	2.800	Ketinggian Air 60 cm
		Gang Garuda RT 05 LK 1	2.000	Ketinggian Air 60 cm
		Jl. Pisang gang Garuda 3	1.800	Ketinggian Air 60 cm
	Penengahan	Gang Ultra (depan Abdoel Moeloek)	2.200	Ketinggian Air 30 cm
	Kelapa tiga	Jl. Agus Salim gang Raya Muda (depan SMP Swadaya)	2.500	Ketinggian Air 30 cm
Kedaton	Penengahan Raya	Jl. Sam Ratulangi Gang Satria 2 (Depan PMI) RT 06 LK II	1.900	Ketinggian Air 35 cm
		Gang Suci Kedaton	2.150	Ketinggian Air 35 cm
	Kedaton	Jl. Tupai gang Manggis RT 02	2.000	Ketinggian Air 60 cm
	Sidodadi	Jl. Teratai gang Mawar 1 RT 32	2.300	Ketinggian Air 1 M
Kedamaian	Tanjung Gading	Jl. Yasirhadi-bromo (Belakang Indomaret)	1.800	Ketinggian Air 70 cm
		Jl. Bakau gang Hebras RT 02 LK II	3.200	Ketinggian Air 70 cm
		Jl. Pulau Kelagian	2.100	Ketinggian Air 70 cm
		Jl. Haji Sarip	2.300	Ketinggian Air 70 cm
	Kali Balau Kencana	Jl. P. Antasari gang Persada RT 003 RW 01 LK I	1.900	Ketinggian Air 1 M
Raja Basa	Raja Basa Jaya	Gang Thoyib	5.500	Ketinggian Air 70 cm
	Rajabasa Nyunyai	Jl. Nunyai	4.200	Ketinggian Air 60 cm
	Gedong Meneng	Jl. Lada 3 No. 10	3.600	Ketinggian Air 45 cm
Sukarame	Sukarame	Jl. Pulau Sebesi Permata Biru	5.600	Ketinggian Air 80 cm
		Jl. Prof. Dr. Hamka (SMPN 24 Bandar Lampung)	5.200	Ketinggian Air 80 cm
		Korpri Jaya	Jl. Ryacudu Perum Korpri Blok A.18 RT.02 LK.I	1.900
	Way Dadi Baru	Jl. Durian I Gang Durian 3	1.600	Ketinggian Air 70 cm
Sukabumi	Sukabumi	Perum Kurnia Indah RT 14 LK III	2.600	Ketinggian Air 60 cm
	Way laga	Jl. Soekarno Hatta	2.300	Ketinggian Air 90 cm
	Tanjung Seneng	Tanjung Seneng	Jl. Damai Raya RT.02	3.400
Labuhan Ratu	Labuhan Ratu	Jl. Bumi	3.600	Ketinggian Air 30 cm
		Jl. Untung Suropati gang Rukun 2	2.450	Ketinggian Air 1 m
	Kampung Baru	Jl. Bumi Menanti	3.800	Ketinggian Air 70 cm
Way Halim	Jagabaya I	Jl. Hanoman Gang Abimayu RT 07	2.650	Ketinggian Air 40 cm
Teluk Betung Selatan	Pesawahan	Jembatan Beton	30.070	67 rumah Tergenang Air setinggi 1 m
		Jembatan Merah	25.175	32 rumah Tergenang Air setinggi 1 m
Teluk Betung Timur	Keteguhan	Jl. RE Martadinata RT 05 LK II	5.200	Ketinggian Air 70 cm
		Jl. H. Sulaiman Kampung Sukamaju gang Jainudin rt 04	4.950	Ketinggian Air 60 cm
Panjang	Way lunik	Jl. Yos Sudarso	4.850	Ketinggian Air 60 cm
Langkapura	Gunung Terang	Perumahan Griya Sejahtera	4.100	Ketinggian Air 1 m
Teluk Betung Utara	Pengajaran	Jl. Wolter Monginsidi (belakang sate bontet)	3.850	Ketinggian Air 1 m

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung, 2021

2.1.4 Demografi

1) Jumlah Penduduk

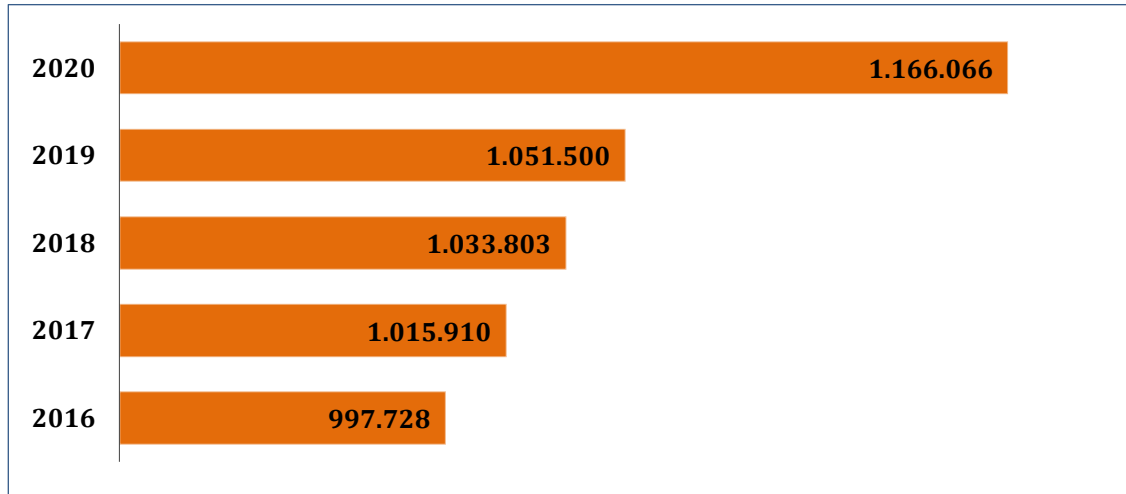
Pada Tahun 2020, penduduk Bandar Lampung berjumlah 1.166.066 jiwa dengan sex ratio 103,9, yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada penduduk perempuan. Kepadatan penduduk paling besar terdapat di Kecamatan Tanjung Karang Timur yakni 21.220 jiwa/km², sedangkan kecamatan yang paling kecil kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Sukabumi yaitu 3.215 jiwa/km². Berikut adalah data yang menunjukkan jumlah penduduk berdasarkan kecamatan dan jenis kelamin Tahun 2020:

Tabel 2.6 Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2020

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)			
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
Telukbetung Barat	21.224	19.872	41.096	106,8
Telukbetung Timur	27.852	26.022	53.874	107,0
Telukbetung Selatan	21.866	21.004	42.870	104,1
Bumi Waras	32.627	30.539	63.166	106,8
Panjang	41.257	39.554	80.811	104,3
Tanjung Karang Timur	21.946	21.130	43.076	103,9
Kedamaian	29.435	28.470	57.905	103,4
Telukbetung Utara	27.258	26.294	53.552	103,7
Tanjung Karang Pusat	28.534	27.391	55.925	104,2
Enggal	14.416	14.233	28.649	101,3
Tanjung Karang Barat	33.464	32.090	65.554	104,3
Kemiling	45.065	43.509	88.574	103,6
Langkapura	22.205	21.364	43.569	103,9
Kedaton	29.027	28.309	57.336	102,5
Raja Basa	29.495	28.094	57.589	105,0
Tanjung Senang	31.458	30.710	62.168	102,4
Labuhan Ratu	26.415	25.978	52.393	101,7
Sukarame	34.345	33.380	67.725	102,9
Sukabumi	38.822	37.048	75.870	104,8
Way Halim	37.581	36.783	74.364	102,2
2020	594.292	571.774	1.166.066	103,9
2019	528.804	522.696	1.051.500	101
2018	520.078	513.725	1.033.803	101
2017	511.371	504.539	1.015.910	101
2016	502.418	495.310	997.728	101

Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka, Badan Pusat Statistik, 2021

Diagram 2.6 Jumlah Penduduk 2016-2020 (jiwa)



Sumber: Kota Bandar Lampung Dalam Angka, Badan Pusat Statistik, 2021

Berikut adalah data kepadatan penduduk per Kecamatan Tahun 2020:

Tabel 2.7 Kepadatan Penduduk Tahun 2016-2020

Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)	
		2019	2020	2019	2020
Telukbetung Barat	11.02	32.002	41.096	2.904	3.279
Telukbetung Timur	14.83	44.727	53.874	3.016	3.633
Telukbetung Selatan	3.79	42.262	42.870	11.151	11.311
Bumi Waras	3.75	60.939	63.166	16.250	16.844
Panjang	15.75	79.800	80.811	5.067	5.131
Tanjung Karang Timur	2.03	39.855	43.076	19.633	21.220
Kedamaian	8.21	56.482	57.905	6.880	7.053
Telukbetung Utara	4.33	54.337	53.552	12.549	12.368
Tanjung Karang Pusat	4.05	54.906	55.925	13.557	13.809
Enggal	3.49	30.164	28.649	8.643	8.209
Tanjung Karang Barat	14.99	58.754	65.554	3.920	4.373
Kemiling	24.24	70.491	88.574	2.908	3.654
Langkapura	6.12	36.454	43.569	5.957	7.119
Kedaton	4.79	52.685	57.336	10.999	11.970
Rajabasa	13.53	51.578	57.589	3.812	4.256
Tanjung Senang	10.63	49.160	62.168	4.625	5.848
Labuhan Ratu	7.97	48.159	52.393	6.043	6.574
Sukarame	14.75	61.130	67.725	4.144	4.592
Sukabumi	23.6	61.574	75.870	2.609	3.215
Way Halim	5.35	66.041	74.364	12.344	13.900
		1.051.500	1.166.066	5.332	5.913
2018	197,22	1.033.803		5.242	
2017	197,22	1.015.910		5.151	
2016	197,22	997.728		5.059	

Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka, Badan Pusat Statistik, 2021

Data tersebut menunjukkan dalam beberapa tahun terakhir terjadi kecenderungan peningkatan angka kepadatan penduduk yang mendiami wilayah administratif Kota Bandar Lampung. Hal tersebut terjadi sebagai akibat bertambahnya jumlah penduduk di Kota Bandar Lampung serta perpindahan penduduk baik antarwilayah di dalam Kota Bandar Lampung maupun dari luar Kota Bandar Lampung yang masuk ke Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, jumlah penduduk Kota Bandar Lampung Tahun 2020 berjumlah 1.189.297 jiwa. Berikut jumlah penduduk Kota Bandar Lampung berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2020 :

Tabel 2.8 Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2020 berdasarkan Data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)
2016	1.169.286
2017	1.176.612
2018	1.179.627
2019	1.183.251
2020	1.189.297

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, 2021

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi perekonomian Kota Bandar Lampung menunjukkan tanda pemulihan, bangkit dari masa krisis yang melanda ekonomi dunia. Perlahan namun pasti, ekonomi Bandar Lampung merangkak naik. Hal ini terlihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukan arah positif.

Nilai PDRB Kota Bandar Lampung menurut lapangan usaha atas dasar dasar harga berlaku pada tahun 2020 mencapai 59.078,74 miliar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami penurunan sebesar 299,18 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2019 yang bernilai 59.377,92 miliar rupiah. Turunnya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh penurunan produksi di beberapa kategori dan adanya inflasi di tahun berjalan.

Tabel 2.9 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (Miliar Rupiah)

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun				
		2016	2017	2018	2019*	2020**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.931,54	2.044,98	2.102,51	2.197,53	2.228,23
B	Pertambangan dan Penggalian	1.452,60	1.698,31	1.837,43	1.976,42	2.087,76
C	Industri Pengolahan	9.448,05	10.648,79	11.567,14	12.699,17	12.390,09
D	Pengadaan Listrik dan Gas	48,72	55,40	60,15	65,47	68,53
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	132,26	143,40	150,19	158,99	168,09
F	Konstruksi	4.657,72	5.356,49	6.038,85	6.482,85	6.466,41
G	Perdagangan Besar dan Eceran : Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.568,56	7.104,71	7.729,91	8.527,72	7.858,53
H	Transportasi dan Pergudangan	6.181,26	6.873,09	7.452,01	8.027,44	7.880,46
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.259,06	1.412,87	1.556,06	1.724,75	1.515,58
J	Informasi dan Komunikasi	2.453,80	2.859,29	3.205,69	3.491,19	3.791,95
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.342,47	2.643,66	2.802,23	2.941,03	3.009,58
L	Real Estate	2.466,61	2.819,24	3.170,49	3.515,48	3.550,98
M,N	Jasa Perusahaan	165,73	181,32	198,93	212,82	209,98
O	Adm.Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.617,69	2.881,85	3.091,13	3.272,27	3.482,25
P	Jasa Pendidikan	1.428,78	1.571,93	1.709,71	1.968,96	2.156,16
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	836,48	946,54	1.016,22	1.101,78	1.247,02
R,S,T,U	Jasa Lainnya	750,58	840,96	920,52	1.014,04	967,14
Produk Domestik Regional Bruto		44.741,90	50.082,84	54.609,16	59.377,92	59.078,74

Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka, Badan Pusat Statistik 2021

Berdasarkan harga konstan Tahun 2010, angka PDRB juga mengalami penurunan, dari 39.385,65 miliar rupiah pada Tahun 2019 menjadi 38.656,70 miliar rupiah pada Tahun 2020. Hal ini menunjukkan Tahun 2020 Bandar Lampung mengalami pertumbuhan ekonomi terkontraksi

sebesar 1,85 persen. Penurunan PDRB ini murni disebabkan oleh penurunan produksi pada beberapa kategori dan tidak dipengaruhi inflasi.

Tabel 2.10 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2016-2020 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun				
		2016	2017	2018	2019*	2020**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.493,43	1.488,18	1.489,25	1.524,16	1.518,75
B	Pertambangan dan Penggalian	898,54	966,69	1.026,88	1.083,46	1.130,89
C	Industri Pengolahan	6.675,10	7.076,98	7.509,76	8.024,86	7.682,01
D	Pengadaan Listrik dan Gas	50,30	53,16	56,06	59,71	62,83
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	94,40	96,73	98,40	103,74	109,23
F	Konstruksi	3.489,92	3.809,57	4.187,16	4.419,90	4.420,18
G	Perdagangan Besar dan Eceran : Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.169,32	5.373,79	5.598,84	5.939,61	5.345,72
H	Transportasi dan Pergudangan	4.361,30	4.636,13	4.936,32	5.278,98	5.054,29
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	820,13	861,36	927,45	1.006,81	882,20
J	Informasi dan Komunikasi	2.208,43	2.427,21	2.669,05	2.882,79	3.135,21
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.606,11	1.716,11	1.752,97	1.809,59	1.848,43
L	Real Estate	1.992,94	2.158,63	2.313,10	2.447,96	2.416,13
M,N	Jasa Perusahaan	118,13	124,33	130,04	135,77	131,75
O	Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.710,66	1.807,47	1.904,10	1.995,38	2.099,07
P	Jasa Pendidikan	983,14	1.051,44	1.125,32	1.212,33	1.303,22
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	619,88	666,31	705,57	755,09	839,86
R,S,T,U	Jasa Lainnya	567,29	606,97	654,21	705,50	676,94
Produk Domestik Regional Bruto		32.859,03	34.921,08	37.084,49	39.385,65	38.656,70

Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka, Badan Pusat Statistik, 2021

Nilai PDRB dari sisi Pengeluaran Kota Bandar Lampung (ADHB) juga menunjukkan angka perbaikan yang cukup signifikan selama 5 tahun terakhir. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume. Pada tahun 2019 nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bandar Lampung mencapai 59.507,48 miliar rupiah. Kondisi tersebut relatif meningkat bila dibandingkan tahun 2018 sebesar 54.794,61 miliar rupiah.

Tabel 2.11 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran (Miliar Rupiah) Tahun 2015-2019

Jenis Pengeluaran	Tahun				
	2015	2016	2017	2018*	2019**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	24.084,38	26.897,31	29.959,36	32.865,32	36.056,93
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	544,10	626,28	737,34	920,28	1.028,76
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	9.227,92	9.890,20	10.298,89	10.712,87	11.208,55
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	12.110,39	13.713,11	15.560,51	17.380,45	19.215,81
Perubahan Inventori	-1.374,31	122,77	48,05	61,92	12,95
Net Ekspor Barang dan Jasa	-5.163,55	-6.507,77	-6.521,32	-7.146,23	-8.015,52
Produk Domestik Regional Bruto	39.428,92	44.741,90	50.082,84	54.794,61	59.507,48

Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka, Badan Pusat Statistik, 2021

Selain dinilai atas dasar harga berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai atas dasar konstan 2010 atau atas dasar harga berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan atas dasar harga konstan, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau hanya secara kuantitas (tanpa ada pengaruh perubahan harga). Gambaran tentang perkembangan ekonomi berdasarkan PDRB atas dasar harga Konstan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.12 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2015-2019 (Miliar Rupiah)

Jenis Pengeluaran	Tahun				
	2015	2016	2017	2018*	2019**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	18.864,23	20.048,10	21.352,14	22.811,39	24.086,57
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	394,91	421,54	468,37	548,57	604,00
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6.531,28	6.754,13	6.852,17	6.971,44	7.148,29
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	9.677,80	10.456,91	11.284,26	12.320,11	12.953,95
Perubahan Inventori	-1.114,18	-759,48	-91,84	-93,20	-74,01
Net Ekspor Barang dan Jasa	-3.480,49	-4.062,17	-4.944,03	-5.468,82	-5.313,52
Produk Domestik Regional Bruto	30.873,56	32.859,03	34.921,08	37.089,49	39.405,27

Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka, Badan Pusat Statistik, 2021

Angka pertumbuhan ekonomi dihitung dengan menggunakan data laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menurut lapangan usaha. Untuk menghitung laju pertumbuhan riil dalam satu kurun waktu,

lazimnya digunakan tahun dasar yang sama dan menggunakan penghitungan tanpa migas. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun pertumbuhan sektor lapangan usaha pembentuk PDRB Kota Bandar Lampung tumbuh cukup bervariasi. Berikut adalah data yang menunjukkan laju pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016-2020:

Tabel 2.13 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016-2020 (Persen)

Lapangan Usaha	Tahun				
	2016	2017	2018	2019*	2020**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,28	-0,35	0,07	2,34	-0,36
Pertambangan dan Penggalian	6,47	7,58	6,23	5,51	4,38
Industri Pengolahan	6,25	6,02	6,12	6,86	-4,27
Pengadaan Listrik dan Gas	5,82	5,69	5,45	6,51	5,23
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,13	2,47	1,73	5,43	5,29
Konstruksi	10,09	9,16	9,91	5,56	0,01
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,60	3,96	4,19	6,09	-10,00
Transportasi dan Pergudangan	7,84	6,30	6,48	6,94	-4,26
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,89	5,03	7,67	8,56	-12,38
Informasi dan Komunikasi	9,95	9,91	9,96	8,01	8,76
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,74	6,85	2,15	3,23	2,15
Real Estat	5,71	8,31	7,16	5,83	-1,30
Jasa Perusahaan	2,85	5,25	4,59	4,41	-2,96
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,46	5,66	5,35	4,79	5,20
Jasa Pendidikan	6,46	6,95	7,03	7,73	7,50
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,93	7,49	5,89	7,02	11,23
Jasa lainnya	7,05	7,00	7,78	7,84	-4,05
Produk Domestik Regional Bruto	6,43	6,28	6,20	6,21	-1,85

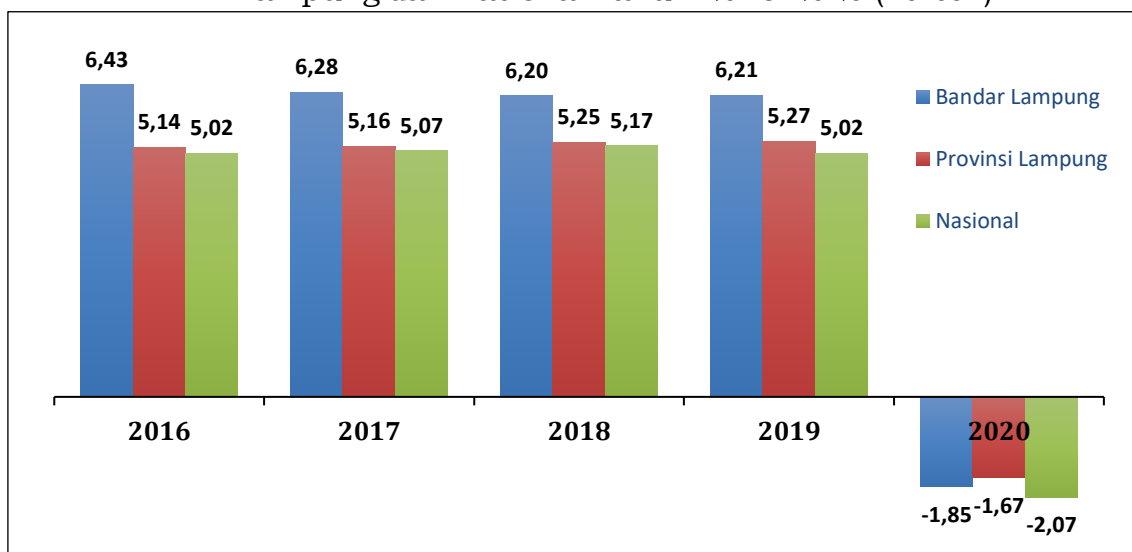
Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka, Badan Pusat Statistik, 2021

Pada Tahun 2020, pertumbuhan ekonomi berkontraksi sebesar 1,85 persen dibandingkan Tahun 2019 sebesar 6,21 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial yaitu sebesar 11,23 persen. Dari 17 (tujuh belas) kategori lapangan usaha ekonomi yang ada, terdapat sembilan kategori lapangan usaha dengan nilai pertumbuhan positif (ekspansi) sedangkan delapan kategori lapangan usaha lainnya mengalami pertumbuhan negatif (kontraksi); Enam kategori lapangan usaha dengan nilai pertumbuhan diatas lima persen sedangkan

sebelas kategori lapangan usaha lainnya mengalami pertumbuhan dibawah lima persen.

Selama kurun waktu Tahun 2015 – 2019 perekonomian Bandar Lampung mampu tumbuh stabil di kisaran 6 persen. Angka pertumbuhan ekonomi Bandar Lampung tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung dan Nasional. Sedangkan Tahun 2020, perekonomian Bandar Lampung berkontraksi sebesar 1,85% (yoy) yang dipengaruhi oleh kontraksi pertumbuhan hampir di semua kategori lapangan usaha. Pertumbuhan ekonomi Bandar Lampung, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2015-2020 ditunjukkan pada diagram berikut ini:

Diagram 2.7 Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2016-2020 (Persen)



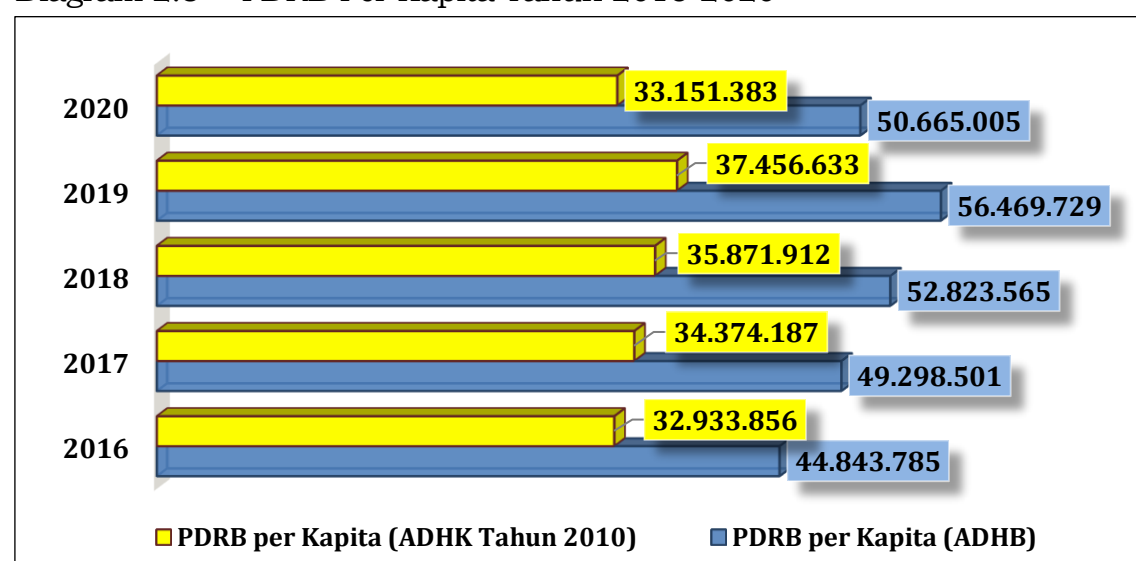
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

2. PDRB per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan

faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pada tahun 2016 PDRB per kapita tercatat sebesar 44,844 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 56,470 juta rupiah. Pada Tahun 2020 terjadi penurunan PDRB perkapita dibandingkan Tahun 2019 yaitu menjadi sebesar 50,665 juta rupiah. Berikut adalah data yang menunjukkan PDRB Per Kapita (ADHB maupun ADHK 2010) Tahun 2016-2020 :

Diagram 2.8 PDRB Per Kapita Tahun 2016-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Tabel 2.14 PDRB Per Kapita Tahun 2016–2020 (Rupiah)

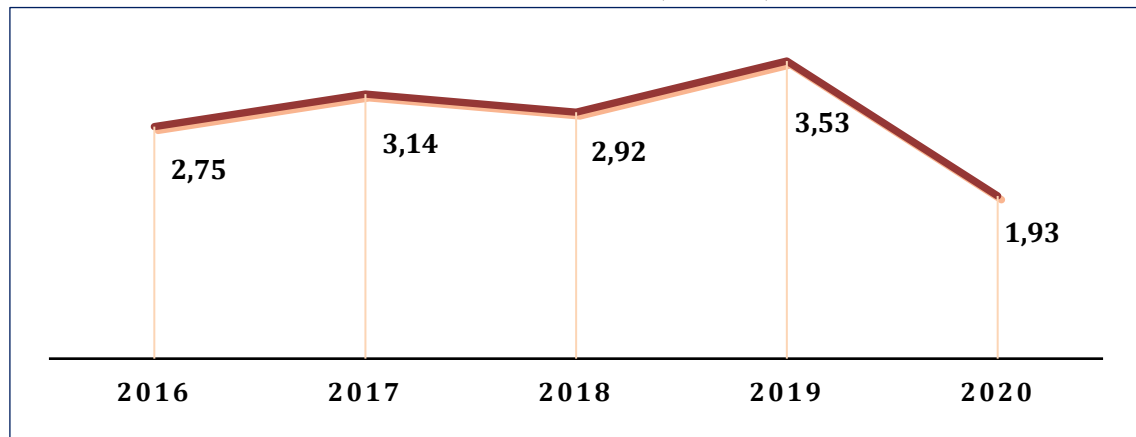
Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai PDRB (Miliar Rupiah)					
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	44.742	50.083	54.609	59.378	59.079
Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	32.859	34.921	37.084	39.386	38.657
PDRB Perkapita (Juta Rupiah)					
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	44,844	49,299	52,824	56,470	50,665
Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	32,934	34,374	35,872	37,457	33,151

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

3. Laju Inflasi

Berikut adalah data yang menunjukkan laju inflasi Tahun 2016 –2020:

Grafik 2.1 Laju Inflasi Tahun 2016-2020 (Persen)



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Perkembangan inflasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun cukup fluktuatif dengan nilai inflasi tertinggi terjadi pada Tahun 2019 yaitu sebesar 3,53 persen dan inflasi terendah terjadi pada Tahun 2020 yaitu sebesar 1,93 persen. Pergerakan inflasi yang fluktuatif perlu dikendalikan untuk meningkatkan dan menjaga daya beli masyarakat tetap stabil melalui upaya-upaya yang dapat menjaga stabilitas harga terutama bahan pokok.

4. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Berikut adalah data Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020:

Tabel 2.15 Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (Persen)

Lapangan Usaha	Tahun				
	2016	2017	2018	2019*	2020**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,32	4,08	3,85	3,70	3,77
Pertambangan dan Penggalian	3,25	3,39	3,36	3,33	3,53
Industri Pengolahan	21,12	21,26	21,18	21,39	20,97
Pengadaan Listrik dan Gas	0,11	0,11	0,11	0,11	0,12
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,30	0,29	0,28	0,27	0,28
Konstruksi	10,41	10,70	11,06	10,92	10,95
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,68	14,19	14,15	14,36	13,30
Transportasi dan Pergudangan	13,82	13,72	13,65	13,52	13,34
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,81	2,82	2,85	2,90	2,57

Lapangan Usaha	Tahun				
	2016	2017	2018	2019*	2020**
Informasi dan Komunikasi	5,48	5,71	5,87	5,88	6,42
Jasa Keuangan dan Asuransi	5,24	5,28	5,13	4,95	5,09
Real Estat	5,51	5,63	5,81	5,92	6,01
Jasa Perusahaan	0,37	0,36	0,36	0,36	0,36
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,85	5,75	5,66	5,51	5,89
Jasa Pendidikan	3,19	3,14	3,13	3,32	3,65
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,87	1,89	1,86	1,86	2,11
Jasa lainnya	1,68	1,68	1,69	1,71	1,64
Produk Domestik Regional Bruto	100	100	100	100	100

Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka, Badan Pusat Statistik, 2021

Industri pengolahan merupakan kategori dengan kontribusi terbesar dalam PDRB Kota Bandar Lampung. Terbukti selama tahun 2016-2020 kategori ini mendominasi perekonomian Kota Bandar Lampung dengan kontribusi diatas 20 persen. Sedangkan untuk kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor kontribusi serta kategori Transportasi dan Pergudangan menduduki urutan kedua dan ketiga dalam dominasi kontribusi PDRB Kota Bandar Lampung dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dengan kontribusi diatas 13 persen.

a) Kontribusi Kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB

Berikut adalah data Kontribusi Kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB Tahun 2016-2020:

Tabel 2.16 Kontribusi Kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB Tahun 2016-2020 (Persen)

Lapangan Usaha	Tahun				
	2016	2017	2018	2019*	2020**
Industri Pengolahan	21,12	21,26	21,18	21,39	20,97

Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka, Badan Pusat Statistik, 2021

Walaupun masih relatif berfluktuatif, kontribusi Industri Pengolahan cenderung meningkat. Pada Tahun 2019 dominasi industri pengolahan dalam PDRB Kota Bandar Lampung telah mencapai 21,39 persen. Walaupun terjadi penurunan pada Tahun 2020 yaitu menjadi sebesar 20,97 persen, namun demikian, kategori industri pengolahan memberikan

kontribusi paling besar dalam PDRB Kota Bandar Lampung pada Tahun 2020.

b) Kontribusi Kategori Perdagangan terhadap PDRB

Berikut adalah data Kontribusi Kategori Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2016-2020:

Tabel 2.17 Kontribusi Kategori Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2016-2020 (Persen)

Lapangan Usaha	Tahun				
	2016	2017	2018	2019*	2020**
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,68	14,19	14,15	14,36	13,30

Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka, Badan Pusat Statistik, 2021

Selama kurun waktu Tahun 2016-2019, Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menyumbang lebih dari 14 persen terhadap PDRB Kota Bandar Lampung. Pada tahun 2019, kontribusi kategori ini mencapai 14,36 persen. Terjadi penurunan pada Tahun 2020 menjadi 13,30 persen. Namun demikian Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tetap sebagai penyumbang PDRB terbesar urutan ketiga setelah Kategori Industri Pengolahan (20,97 persen) dan Kategori Transportasi dan Pergudangan (13,34 persen).

c) Kontribusi Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Bidang Pariwisata) terhadap PDRB

Dalam kurun waktu tahun 2016-2020, kontribusi Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB Kota Bandar Lampung terus mengalami kenaikan. Pada Tahun 2019, kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum berkontribusi terhadap PDRB Kota Bandar Lampung sebesar 2,90 persen. Terjadi penurunan kontribusi Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada Tahun 2020 menjadi sebesar 2,57 sebagai dampak dari pandemi *Covid-19*.

Kedepan Pariwisata Bandar Lampung perlu menjadi perhatian mengingat banyak potensi pariwisata yang bisa digali dan dikembangkan, sehingga kedepan kategori pariwisata menjadi unggulan daerah yang akan mendorong sektor lainnya untuk berkembang. Berikut adalah data Kontribusi Kategori penyediaan akomodasi dan makan minum (bidang pariwisata) terhadap PDRB Tahun 2016-2020:

Tabel 2.18 Kontribusi Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Bidang Pariwisata) terhadap PDRB Tahun 2016-2020 (Persen)

Lapangan Usaha	Tahun				
	2016	2017	2018	2019*	2020**
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Bidang Pariwisata)	2,81	2,82	2,85	2,90	2,57

Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka, Badan Pusat Statistik, 2021

d) Kontribusi Kategori Sektor Jasa terhadap PDRB

Kontribusi Sektor Jasa terhadap PDRB merupakan penjumlahan dari kontribusi Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi, Kategori Jasa Perusahaan, Kategori Jasa Pendidikan, Kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, serta Kategori Jasa Lainnya terhadap PDRB Kota Bandar Lampung. Pada kurun waktu Tahun 2016-2020, Kontribusi Sektor Jasa berada pada diatas 12 persen. Pada Tahun 2020, terjadi peningkatan kontribusi Sektor Jasa menjadi sebesar 12,85 persen dibandingkan Tahun 2019 sebesar 12,20 persen. Berikut adalah data Kontribusi Kategori Sektor Jasa terhadap PDRB Tahun 2016-2020:

Tabel 2.19 Kontribusi Kategori Sektor Jasa terhadap PDRB Tahun 2016-2020 (Persen)

Lapangan Usaha	Tahun				
	2016	2017	2018	2019*	2020**
Jasa Keuangan dan Asuransi	5,24	5,28	5,13	4,95	5,09
Jasa Perusahaan	0,37	0,36	0,36	0,36	0,36
Jasa Pendidikan	3,19	3,14	3,13	3,32	3,65
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,87	1,89	1,86	1,86	2,11
Jasa lainnya	1,68	1,68	1,69	1,71	1,64
Produk Domestik Regional Bruto Kategori Jasa	12,35	12,35	12,17	12,20	12,85

Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka, Badan Pusat Statistik, 2021

5. Rasio Gini

Rasio gini merupakan merupakan salah satu ukuran untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai rasio gini berkisar antara 0 hingga 1. Rasio gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Berikut adalah data yang menunjukkan Rasio Gini Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2020 :

Tabel 2.20 Rasio Gini Tahun 2016-2020

Tahun	Rasio Gini
2016	0,369
2017	0,342
2018	0,342
2019	0,316
2020	0,359

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

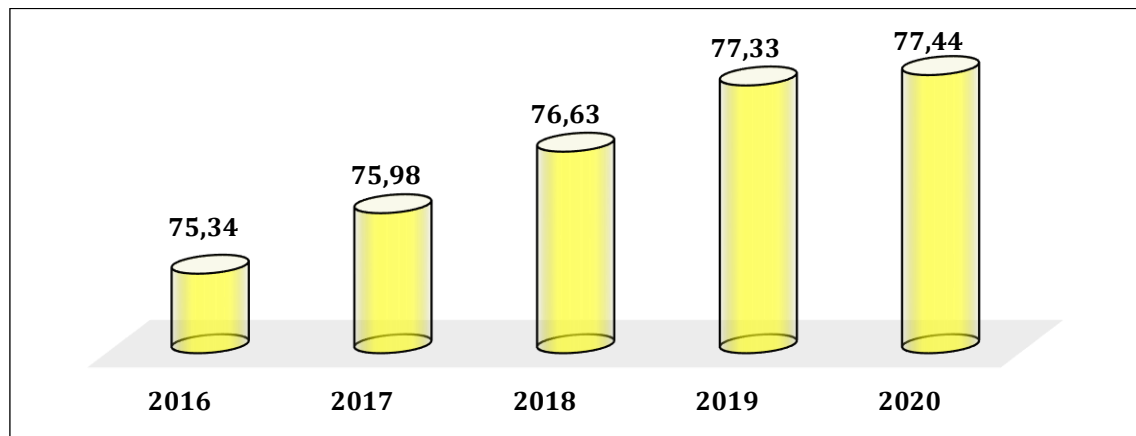
Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir (Tahun 2017-2020), terjadi penurunan rasio gini dibandingkan dengan rasio gini Tahun 2016. Penurunan Angka rasio gini ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di Kota Bandar Lampung berada pada tingkat ketimpangan yang semakin rendah.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan sebuah negara menjadi negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang, serta untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. Berikut adalah data yang menunjukkan IPM Tahun 2016–2020:

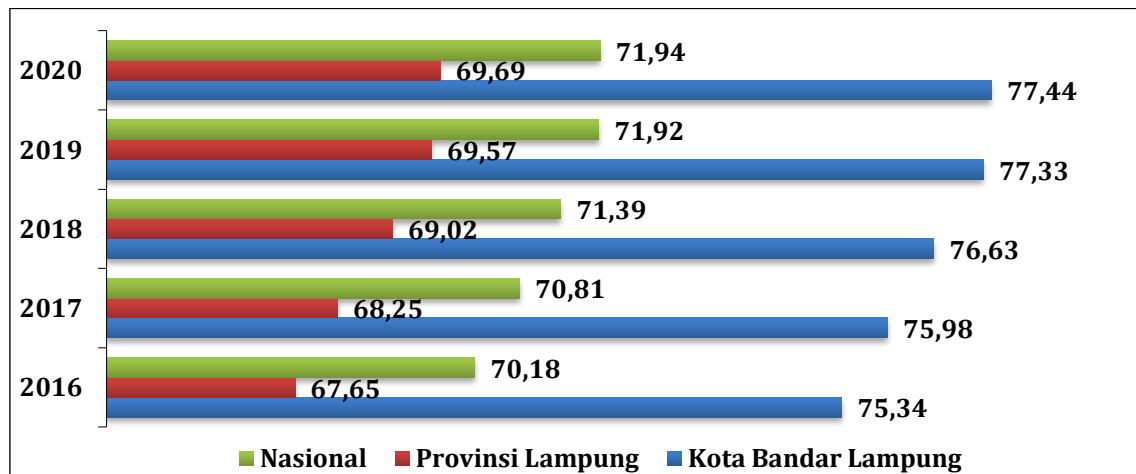
Diagram 2.9 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2016-2020



Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka, Badan Pusat Statistik, 2021

Selama 5 (lima) tahun terakhir, IPM Kota Bandar Lampung selalu mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. IPM Kota Bandar Lampung lebih tinggi jika dibandingkan dengan IPM Provinsi Lampung dan Nasional, sebagaimana yang ditunjukkan pada diagram berikut ini :

Diagram 2.10 Indeks Pembangunan Manusia Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2016-2020

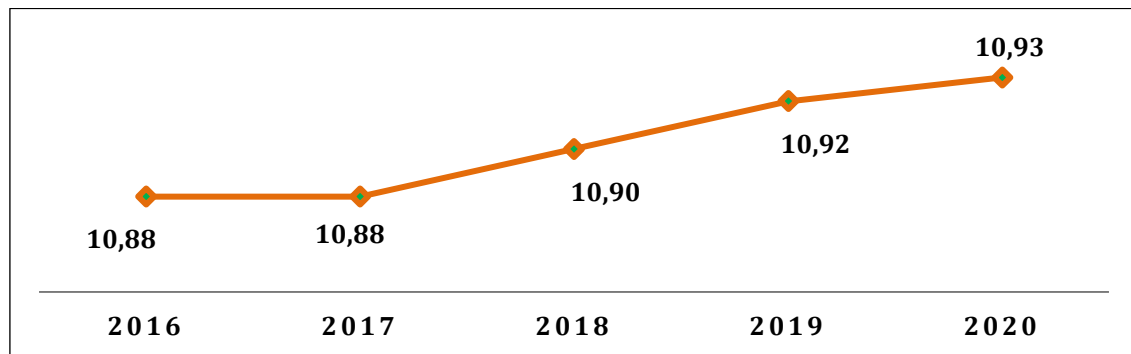


Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka, Badan Pusat Statistik, 2021

2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Berikut adalah data yang menunjukkan angka rata-rata lama sekolah Tahun 2016-2020:

Grafik 2.2 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2016-2020



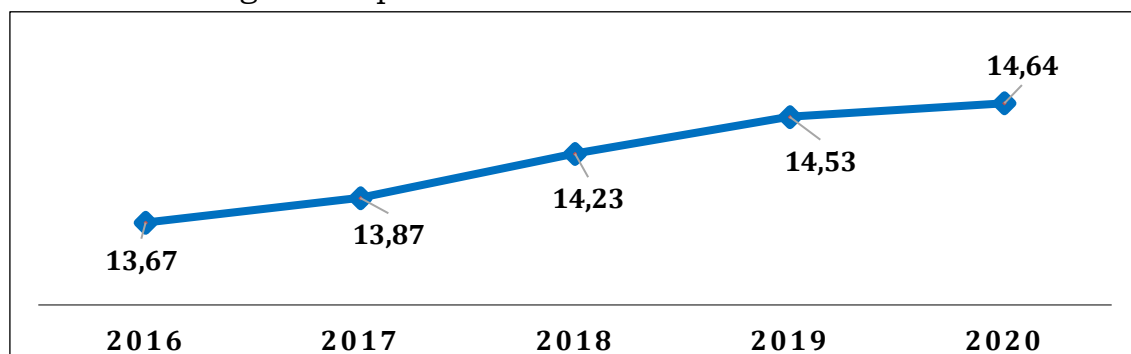
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Berdasarkan data tersebut, terjadi perkembangan yang positif dimana terjadi peningkatan angka rata-rata lama sekolah dibanding tahun sebelumnya. Kesadaran akan pentingnya pendidikan, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, serta program dan kebijakan pemerintah yang mempermudah akses pendidikan menjadi pendorong utama semakin baiknya nilai angka rata-rata lama sekolah.

3. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan diitung pada usia 7 (tujuh) tahun keatas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Berikut adalah data yang menunjukkan Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2016-2020:

Grafik 2.3 Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2016-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa terjadi peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah setiap tahunnya.

4. Peningkatan Pengunjung Perpustakaan

Peningkatan jumlah koleksi buku perpustakaan mutlak diperlukan dalam rangka meningkatkan jumlah pengunjung perpustakaan. Pemerintah Kota Bandar Lampung berupaya memajukan perpustakaan daerah dengan cara meningkatkan kualitas perpustakaan baik dari segi koleksi buku maupun sarana penunjang lainnya. Berikut adalah data yang menunjukkan Peningkatan Pengunjung Perpustakaan Daerah Tahun 2016-2020:

Tabel 2.21 Peningkatan Pengunjung Perpustakaan Tahun 2016-2020

Tahun	Peningkatan Pengunjung (Persen)
2016	7,69
2017	-20,66
2018	10,39
2019	-35
2020	-53

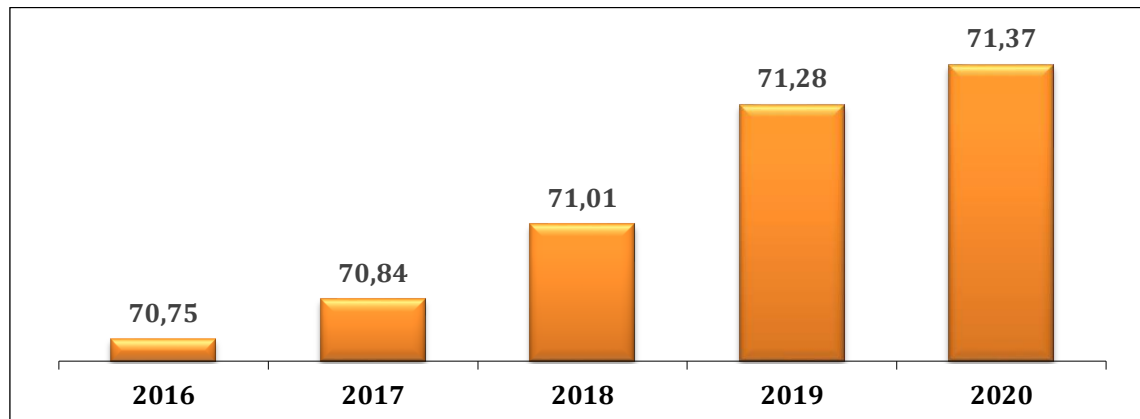
Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandar Lampung, 2021

Penurunan pengunjung perpustakaan sebesar 20,66 persen di Tahun 2017 disebabkan penerapan *full day school* yang berdampak pada terbatas nya waktu siswa untuk mengunjungi perpustakaan. Sejumlah perbaikan pelayanan dan peningkatan sarana prasarana perpustakaan yang telah dilakukan pada prinsipnya bertujuan untuk memberikan kenyamanan kepada para pengunjung yang datang, sehingga pada Tahun 2018 pengunjung perpustakaan kembali meningkat sebesar 10,39 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Tahun 2019 terjadi penurunan kembali jumlah pengunjung perpustakaan yang disebabkan karena pelaksanaan pembangunan rehab kantor sehingga menyebabkan operasional perpustakaan terganggu. Sedangkan pada Tahun 2020 terjadi penurunan jumlah pengunjung perpustakaan secara drastis dikarenakan Pandemi *Covid-19* yang menyebabkan pembatasan sosial dimasyarakat dan berdampak pula kepada kunjungan masyarakat ke perpustakaan.

5. Angka Harapan Hidup

Berikut adalah data yang menunjukkan Angka Harapan Hidup Tahun 2016-2020:

Diagram 2.11 Angka Harapan Hidup Tahun 2016-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Data tersebut menunjukkan terjadi peningkatan persentase angka usia harapan hidup dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut berarti terjadi peningkatan dari faktor pendukung angka usia harapan hidup seperti kesadaran hidup sehat, ketersediaan tenaga dan sarana prasarana pendukung kesehatan seperti rumah sakit dan apotek.

6. Prevalensi Kekurangan Gizi (*Underweight*) pada Anak Balita

Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. *Underweight*/Berat Badan Kurang/Gizi Kurang adalah gabungan dari gizi buruk. Anak Balita rentan untuk menjadi gizi buruk karena balita merupakan anak yang dalam masa tumbuh Kembang, sehingga masa balita merupakan masa kehidupan yang sangat penting dan perlu mendapat perhatian yang serius. Oleh karena itu, masalah kekurangan gizi pada anak balita masih memerlukan perhatian untuk penanganannya.

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesda) Kementerian Kesehatan Bulan Maret Tahun 2019, data Prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita pada level Nasional, Provinsi dan di Kota Bandar Lampung pada Tahun 2016-2018 ditunjukkan pada Tabel berikut ini.

Sedangkan untuk Tahun 2019–2020 data prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita diperoleh Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung berdasarkan data penimbangan langsung di Posyandu :

Tabel 2.22 Prevalensi Kekurangan Gizi (*Underweight*) pada Anak Balita Tahun 2016-2020

Prevalensi Kekurangan Gizi pada Anak Balita	2016	2017	2018	2019	2020
Bandar Lampung	17,40	21,80	16,09	3,08	5,77
Provinsi Lampung	14	18,50	27,38		
Nasional	17,8	17,80	17,70		

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, 2021

7. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun)

Masa baduta (bawah dua tahun) merupakan “*Window of Opportunity*”. Pada masa ini, seorang anak memerlukan asupan zat gizi yang seimbang baik dari segi jumlah maupun proporsinya untuk mencapai berat dan tinggi badan yang optimal.

Masalah baduta pendek dan sangat pendek (*stunting*) menggambarkan adanya masalah gizi kronis, dipengaruhi dari kondisi ibu/calon ibu, masa janin, dan masa bayi/baduta, termasuk penyakit yang diderita selama masa baduta. Seperti masalah gizi lainnya, tidak hanya terkait masalah kesehatan, namun juga dipengaruhi berbagai kondisi lain yang secara tidak langsung mempengaruhi kesehatan.

Tabel dibawah ini menunjukkan prevalensi *stunting* (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun) di Kota Bandar Lampung. Data Tahun 2016-2018 diperoleh berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesda) Kementerian Kesehatan Bulan Maret Tahun 2019, sedangkan untuk Tahun 2019-2020 data diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung berdasarkan data penimbangan langsung di Posyandu.

Tabel 2.23 Prevalensi *Stunting* (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun) di Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2020

Prevalensi Stunting pada Anak Baduta	2016	2017	2018	2019	2020
Bandar Lampung	21,20	23,80	26,38	6,1	6,60

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, 2021

Target menurunkan *prevalensi* stunting di Kota Bandar Lampung juga selaras dengan kebijakan Provinsi Lampung dan Nasional yang sangat fokus dalam menurunkan angka *stunting* yang ada, hal ini sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Lampung dan RPJMN. Berikut data Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak Balita (Bawah Lima Tahun) pada level Provinsi dan Nasional. Data Tahun 2016-2018 diperoleh berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesda) Kementerian Kesehatan RI Bulan Maret Tahun 2019, sedangkan data Tahun 2019 berdasarkan data hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI).

Tabel 2.24 Prevalensi *Stunting* (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak Balita (Bawah Lima Tahun) Tahun 2016-2020

Prevalensi Stunting pada Anak Balita	2016	2017	2018	2019
Provinsi Lampung	18,90	23,00	27,33	26,26
Nasional	21,70	20,10	30,88	27,67

Sumber : Kementerian Kesehatan RI, 2020

8. Persentase Penduduk Miskin

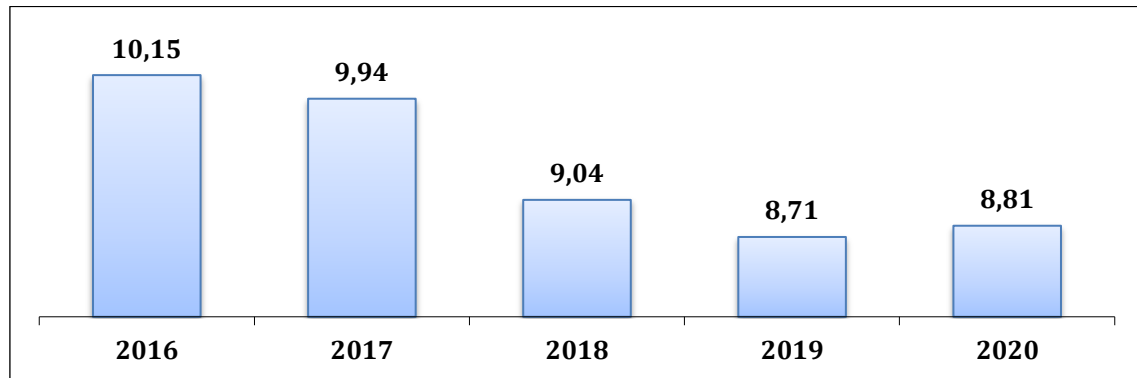
Berikut adalah data yang menunjukkan persentase penduduk miskin Tahun 2016-2020:

Tabel 2.25 Penduduk Miskin Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
2016	997.728	100.540	10,15
2017	1.015.910	100.500	9,94
2018	1.033.803	93.040	9,04
2019	1.051.500	91.240	8,71
2020	1.166.066	93.740	8,81

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Diagram 2.12 Persentase Penduduk Miskin Tahun 2016-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa jumlah persentase penduduk miskin cenderung terjadi penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini berarti terdapat peningkatan kesejahteraan penduduk dari sisi pendapatan. Ketersediaan lapangan pekerjaan dan stabilitas kepastian usaha akan mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk sekaligus mengurangi jumlah penduduk kategori miskin di Kota Bandar Lampung.

9. Luas Kawasan Kumuh

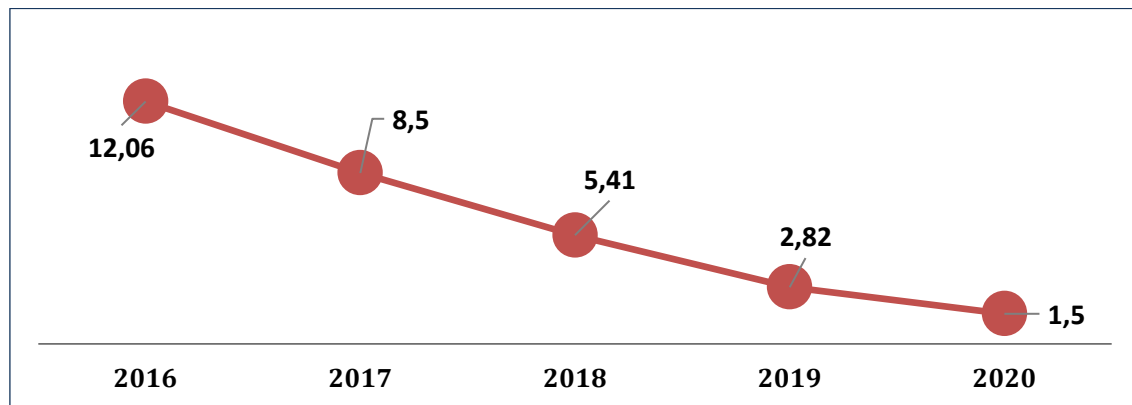
Berikut adalah data yang menunjukkan luas kawasan kumuh berdasarkan data dokumen pengurangan luasan kumuh pokja PKP Kota Bandar Lampung:

Tabel 2.26 Luas Kawasan Kumuh Tahun 2016-2020

Tahun	Luas (Ha)	Jumlah Kelurahan
2016	4.365,25	67
2017	1.676,97	43
2018	1.065,42	18
2019	589,80	18
2020	297,25	30

Sumber : Pokja PKP Kota Bandar Lampung, 2021

Grafik 2.4 Persentase Luas Kawasan Kumuh Tahun 2016-2020



Sumber : Pokja PKP Kota Bandar Lampung, 2021

10. Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kesehatan penghuninya serta kecukupan minimum luas bangunan. Pada dasarnya rumah layak huni memiliki manfaat yang besar untuk masyarakat itu sendiri. Manfaat terbesar dengan memiliki rumah layak huni yakni datangnya kenyamanan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dengan adanya kenyamanan, tentunya kehidupan dalam berkeluarga menjadi tentram, rukun, aman, dan bahagia.

Manfaat lainnya dengan memiliki rumah layak huni adalah, terselenggaranya kesehatan dari setiap masing-masing individu dalam keluarga. Sebab rumah yang layak huni, senantiasa bersih. Selain itu juga sebagai penunjang dalam pendidikan anak-anak. Karena rumah layak huni juga membuat anak memiliki konsentrasi penuh dalam belajar, sehingga prestasi akademik anak lebih meningkat.

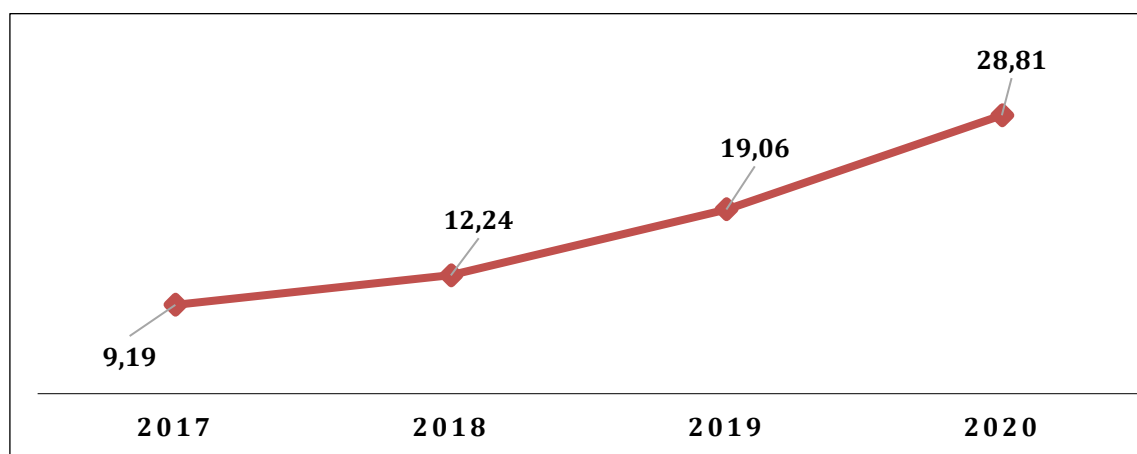
Rumah layak huni merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui stakeholder terkait berkomitmen untuk memberikan akses kepada masyarakat agar dapat memperoleh permukiman yang layak huni, sejahtera, berbudaya, dan berkeadilan sosial. Sampai dengan Tahun 2020, penanganan untuk Rumah Layak Huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Bandar Lampung mencapai 819 unit yang rincian sebagai berikut :

Tabel 2.27 Penanganan untuk Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Tahun 2017-2020

Tahun	Unit Rumah Layak Huni
2017	201
2018	163
2019	178
2020	277
Jumlah	819

Sumber : Pokja PKP Kota Bandar Lampung, 2021

Grafik 2.5 Persentase Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Tahun 2017-2020



Sumber : Pokja PKP Kota Bandar Lampung, 2021

11. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG. Berikut adalah data yang menunjukkan IPG Tahun 2016-2020:

Tabel 2.28 Indeks Pembangunan Gender Tahun 2016-2020

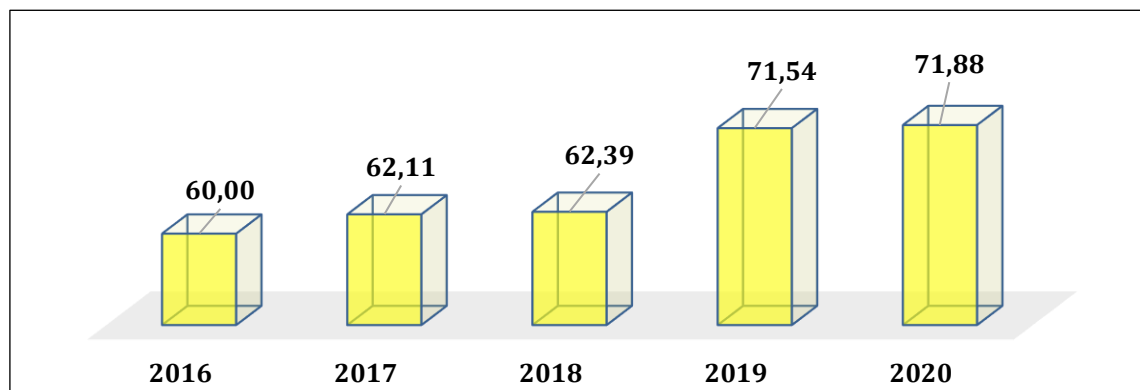
Tahun	IPG
2016	93,94
2017	93,53
2018	93,55
2019	93,96
2020	93,86

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021

12. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indikator ini menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Berikut adalah data yang menunjukkan IDG Tahun 2016-2020:

Diagram 2.13 Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021

Data tersebut menunjukkan bahwa Indeks Pemberdayaan Gender Kota Bandar Lampung mengalami peningkatan setiap tahun.

13. Kota Layak Anak

Pemerintah Kota Bandar berupaya mewujudkan pembangunan berbasis hak anak dengan mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Pada Tahun 2018 Kota Bandar Lampung merupakan Kota Layak Anak dengan predikat Pratama dan meningkat pada tahun 2019 dengan predikat Madya. Pada

Tahun 2020 penilaian Lomba Kota Layak Anak tidak dilaksanakan dikarenakan *Pandemi Covid-19*.

14. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

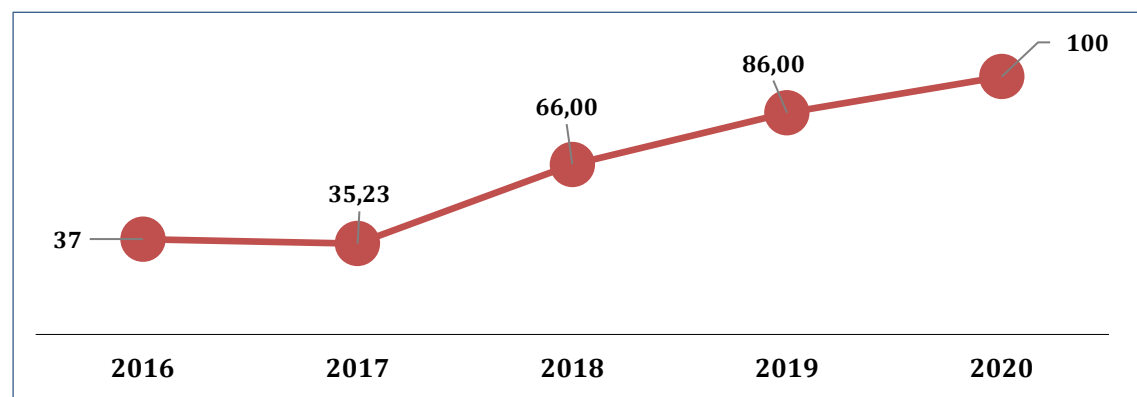
Berikut adalah data yang menunjukkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Bandar Lampung yang tercatat melalui Unit Perlindungan Anak dan Perempuan (PPA) Polresta Bandar Lampung:

Tabel 2.29 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Tahun 2016-2020

Tahun	Kekerasan pada Perempuan (kasus)	Kekerasan pada Anak (kasus)
2016	58	76
2017	38	50
2018	86	122
2019	83	33
2020	105	43

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021

Grafik 2.6 Persentase Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak yang terselesaikan Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021

Trend kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak di Kota Bandar Lampung 5 (lima) tahun terakhir cenderung fluktuatif. Kemungkinan masih banyak kasus kekerasan yang tidak terungkap dengan alasan berbagai faktor, salah satunya karena masih kental budaya malu, takut, dan tidak ingin melaporkan kasus tersebut. Masyarakat menganggap bahwa kasus kekerasan yang menimpa keluarga mereka itu dinilai sebagai aib keluarga.

Maraknya kasus kekerasan pada perempuan dan anak menuntut Pemerintah Kota Bandar Lampung bersama stakeholder terkait untuk dapat

menekan/meminimalisir jumlah kasus melalui upaya pencegahan dan sosialisasi, serta memfasilitasi lembaga yang melakukan pendampingan korban tindak kekerasan.

15. Laju Pertumbuhan Penduduk

Berikut data yang menunjukkan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2016-2020:

Tabel 2.30 Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2016-2020

Tahun	Pertumbuhan Penduduk (Persen)
2016	1,019
2017	1,018
2018	1,018
2019	1,017
2020	1,109

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Data tersebut menunjukkan bahwa selama 5 (lima) tahun terakhir, pertumbuhan penduduk Kota Bandar Lampung cenderung stabil yaitu dibawah 2 persen.

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

a. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Lestari

Pemerintah daerah memiliki peran yang cukup strategis dalam melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat. Dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi serta globalisasi yang sedikit banyak menimbulkan efek negatif bagi perkembangan budaya lokal, pemerintah berkewajiban membuat kebijakan-kebijakan yang mengarah pada upaya pelestarian daerah.

Warisan budaya bendawi atau cagar budaya (sumber daya arkeologi) mempunyai sifat yang rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak dapat diperbaharui. Oleh karenanya perlu ada langkah-langkah untuk penyelamatan dan melestarikan cagar budaya daerah. Sampai dengan Tahun 2020, Kota Bandar Lampung belum memiliki benda, situs dan

kawasan cagar budaya yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

b. Pemuda Pelopor

Pemuda Pelopor adalah pemuda yang memiliki semangat dalam mengembangkan potensi diri guna merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah yang dilandasi sikap dan jiwa kesukarelaan, tanggung jawab dan keberdualian untuk menciptakan sesuatu dan atau mengubah gagasan pemikiran, tindakan dan perilaku menjadi suatu karya nyata yang berkualitas dan dilaksanakan secara konsisten dan gigih yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat serta diakui oleh berbagai pihak dan pemerintah.

Guna mendorong munculnya para pemuda yang memiliki jiwa kepeloporan di Kota Bandar Lampung, maka pemerintah melalui Dinas Pemuda dan Olahraga menetapkan predikat pemuda pelopor kepada para pemuda yang telah menunjukkan semangat dalam mengembangkan potensi diri, merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah yang dihadapi masyarakat, yang kemudian menjadi perwakilan Pemuda Pelopor Kota Bandar Lampung untuk mengikuti seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi. Berikut adalah data yang menunjukkan jumlah pemuda pelopor Tahun 2016-2020:

Tabel 2.31 Pemuda Pelopor Tahun 2016-2020

Tahun	Pemuda Pelopor (orang)
2016	7
2017	8
2018	8
2019	8
2020	8

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandar Lampung, 2021

Sampai dengan Tahun 2020, pemuda pelopor Kota Bandar Lampung berjumlah 8 (delapan) orang.

c. Cabang Olahraga yang Berprestasi

Olahraga tidak hanya sebagai kebutuhan untuk menjaga kebugaran tubuh, akan tetapi olahraga telah merasuk dalam semua sektor kehidupan. Lebih jauh lagi, prestasi olahraga dapat mengangkat harkat dan martabat manusia baik secara individu, kelompok, masyarakat, bangsa, dan negara. Suatu prestasi olahraga tidak serta merta datang dengan sendirinya, hasil kompetisi atau kejuaraan yang di tandai dengan perolehan medali harus memperhatikan proses dari pembinaan yang dimulai dari usia dini sehingga diharapkan akan memunculkan bibit-bibit atlit. Sebagai langkah berikutnya perlu melakukan kerja sama antara Pemerintah dengan induk organisasi keolahragaan seperti Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Berdasarkan data yang tercatat pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandar Lampung Tahun 2016, 2017 dan 2018, dari 24 (dua puluh empat) cabang olah raga yang diikuti oleh atlet Kota Bandar Lampung, sebanyak 22 (dua puluh dua) cabang olah raga yang berprestasi atau mendapatkan mendali, sedangkan untuk Tahun 2019 hanya 11 (sebelas) cabang olah raga yang diikuti dan kesebelasnya cabang olahraga tersebut merupakan cabang olah raga yang berprestasi atau mendapatkan mendali. Pada tahun 2020, Kota Bandar Lampung tidak mengadakan event olahraga dikarenakan *Pandemi Covid-19*. Event olahraga (POPWIL dan PON) direncanakan akan dilaksanakan pada Tahun 2021.

2.2.4 Fokus Reformasi Birokrasi

1. Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi (RB) sekarang ini telah menjadi suatu keharusan bagi setiap Kementerian/Lembaga (K/L), dan Pemerintah Daerah dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintah yang baik, dengan menerapkan prinsip-prinsip *clean governance* dan *good governance*. Dengan dorongan penuh dari Presiden RI, seluruh K/L dan Pemda ditargetkan telah memiliki komitmen dalam melaksanakan RB. Dari tahun ke tahun setiap instansi berlomba

untuk meningkatkan Indeks RB-nya, mengingat setiap tahunnya dilaksanakan evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Republik Indonesia terhadap setiap K/L dan Pemda.

Hasil penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi terhadap 8 (delapan) area perubahan yang diperoleh Pemerintah Kota Bandar Lampung oleh KemenPAN-RB pada Tahun 2017-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.32 Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2017-2020

Tahun	Skor	Predikat
2017	56,04	CC
2018	55,55	CC
2019	60,01	B
2020	59,98	CC

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kota Bandar Lampung, 2021

2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kementerian PAN-RB melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kota Bandar Lampung dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.33 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016-2020

Tahun	Skor	Predikat
2016	45,29	C
2017	48,90	C
2018	53,03	CC

Tahun	Skor	Predikat
2019	55,14	CC
2020	57,09	CC

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Bandar Lampung, 2021

Berdasarkan hasil evaluasi KemenPAN RB, nilai AKIP Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2016 sampai Tahun 2017 masih berada pada level predikat C, meskipun secara bobot hasil penilaian AKIP meningkat dari skor 45,29 pada Tahun 2016 menjadi 48,90 di Tahun 2017. Selanjutnya pada Tahun 2018 nilai AKIP Pemerintah Kota Bandar Lampung menjadi 53,03 atau berada pada level predikat CC dan skor meningkat kembali pada tahun 2019 menjadi 55,14 dan tahun 2020 menjadi sebesar 57,09, walaupun masih berada pada level predikat CC. Hal tersebut tentu saja menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung kedepan, untuk terus memperbaiki akuntabilitas kinerja daerah.

3. Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Didalam pelaksanaan Otonomi Daerah oleh Pemerintahan Daerah, monitoring dan evaluasi perlu dilakukan utk melihat kinerja Pemda dalam konteks desentralisasi. Dalam rangka monitoring dan evaluasi tersebut, Pemda membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk disampaikan kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kewajiban melaporkan penyelenggaraan pemda oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah melalui Kemendagri dalam bentuk LPPD digunakan sebagai dasar Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) dan bahan pembinaan lebih lanjut. Pelaksanaan EPPD ditetapkan dengan PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diubah dengan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Pemerintah Kota Bandar Lampung tahun 2016 dan 2017 mendapat penghargaan Pemerintah Daerah yang berkinerja Tinggi (T). Pada Tahun 2018, hasil EKPPD LPPD Pemerintah Kota Bandar Lampung meningkat dengan mendapat penghargaan Pemerintah Daerah yang berkinerja Sangat Tinggi (ST). Pencapaian ini tentu saja akan terus ditingkatkan. Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.34 Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2016 - 2020

Tahun	Skor	Predikat
2016	3,0379	Tinggi (T)
2017	2,8870	Tinggi (T)
2018	3,0679	Sangat Tinggi (ST)
2019	Dalam Proses Penilaian Kementerian Dalam Negeri	
2020	Belum dilakukan Proses Evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri	

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kota Bandar Lampung, 2021

4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik semakin meningkat bentuk respon tuntutan tersebut adalah munculnya aspirasi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberikan perlindungan bagi setiap warganegara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat.

IKM wajib dilaksanakan oleh seluruh unit penyelenggara pelayanan publik sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan didukung oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN&RB)

Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN&RB) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

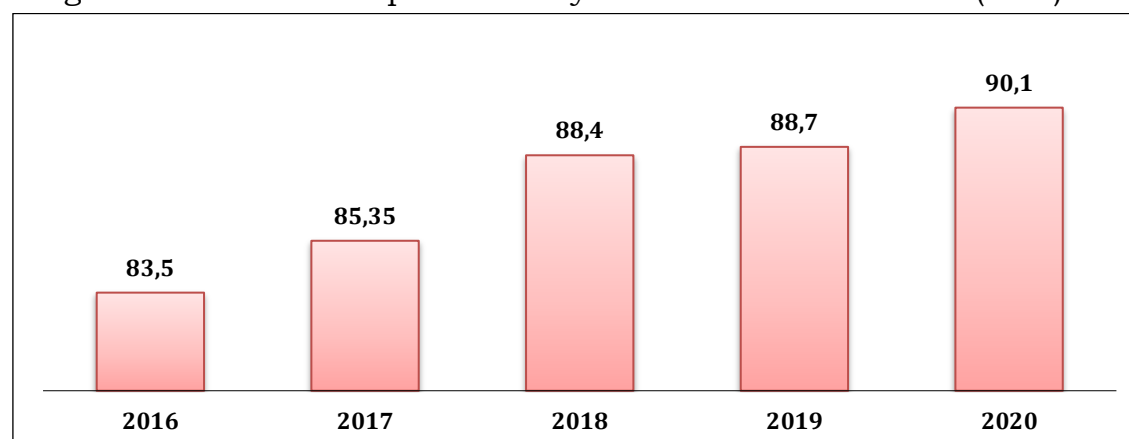
Atas dasar tersebut, sebagaimana hasil penilaian kualitas pelayanan publik Pemerintah Daerah oleh Kementerian Penadayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, (KemenPAN&RB), Pemerintah Kota Bandar Lampung memperoleh predikat Sangat Baik (A) dalam 3 (tiga) tahun terakhir (Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020). Berikut adalah data yang menunjukkan IKM Tahun 2016-2020:

Tabel 2.35 Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2016 - 2020

Tahun	Skor	Predikat
2016	83,50	Baik (B)
2017	85,35	Baik (B)
2018	88,40	Sangat Baik (A)
2019	88,70	Sangat Baik (A)
2020	90,10	Sangat Baik (A)

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kota Bandar Lampung, 2021

Diagram 2.14 Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2016-2020 (Skor)



Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Bandar Lampung, 2021

2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib

2.3.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Urusan pendidikan berkaitan dengan peran Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam memberikan pelayanan dan menyelenggarakan pendidikan. Peran Pemerintah Kota Bandar Lampung adalah melaksanakan pendidikan yang sesuai standar serta penyediaan sarana dan prasana yang memadai untuk kemudian menindaklanjuti dengan program-program peningkatan kualitas Pendidikan.

a. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI

Berikut adalah data yang menunjukkan APM SD/MI Tahun 2016-2020:

Tabel 2.36 Angka Partisipasi Murni SD/MI Tahun 2016-2020

Tahun	APM SD/MI
2016	83,29
2017	81,84
2018	98,19
2019	96,20
2020	91,32

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Data tersebut menunjukkan jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang SD/MI berfluktuasi setiap tahunnya. Hal tersebut berpengaruh terhadap kenaikan APM untuk SD/MI di Kota Bandar Lampung.

b. APM SMP/MTs

Berikut adalah data yang menunjukkan APM SMP/MTs Tahun 2016-2020:

Tabel 2.37 Angka Partisipasi Murni SMP/MTs Tahun 2016-2020

Tahun	APM SMP/MTs
2016	65,14
2017	65,49
2018	86,95
2019	89,63
2020	80,17

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang SMP/MTs pada Tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut berpengaruh terhadap nilai APM untuk SMP/MTs di Kota Bandar Lampung.

c. Angka Partisipasi Kasar PAUD

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Berikut adalah data yang menunjukkan APK PAUD Tahun 2016-2020:

Tabel 2.38 Angka Partisipasi Kasar PAUD Tahun 2016-2020

Tahun	APK PAUD
2016	82,01
2017	85,59
2018	48,87
2019	49,46
2020	49,36

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Penurunan APK PAUD yang signifikan pada Tahun 2018 dibandingkan Tahun 2017 disebabkan karena terjadinya data ganda pada setiap lembaga sekolah pada saat pendataan Tahun 2017. Setelah dilakukan verifikasi ulang melalui data DAPODIK dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maka data tersebut menjadi berkurang.

d. Angka Partisipasi Kasar SD/MI

Berikut adalah data angka partisipasi kasar (APK) SD/MI Tahun 2016-2020:

Tabel 2.39 Angka Partisipasi Kasar SD/MI Tahun 2016-2020

Tahun	APK SD/MI
2016	97,08
2017	93,58
2018	111,47
2019	109,23
2020	108,14

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

e. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs

Berikut adalah data yang menunjukkan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Tahun 2016-2020:

Tabel 2.40 Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs Tahun 2016-2020

Tahun	APK SMP/MTs
2016	89,99
2017	89,50
2018	109,32
2019	107,16
2020	96,37

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

f. Persentase Satuan PAUD Berakreditasi

Berikut adalah data yang menunjukkan Persentase Satuan PAUD Berakreditasi Tahun 2016-2020:

Tabel 2.41 Persentase Satuan PAUD Berakreditasi Tahun 2016-2020

Tahun	Persentase
2016	39,03
2017	39,03
2018	25,28
2019	40,84
2020	54,00

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, 2021

g. Persentase Satuan Pendidikan Dasar SD/MI yang Berakreditasi A

Berikut adalah data yang menunjukkan Persentase Satuan Pendidikan Dasar SD/MI yang Berakreditasi A Tahun 2016-2020:

Tabel 2.42 Persentase Satuan Pendidikan Dasar SD/MI yang Berakreditasi A Tahun 2016-2020

Tahun	Persentase
2016	19,49
2017	28,03
2018	28,03
2019	30,00
2020	30,00

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, 2021

h. Persentase Satuan Pendidikan Dasar SD yang Berakreditasi B

Berikut adalah data yang menunjukkan Persentase Satuan Pendidikan Dasar SD yang Berakreditasi B Tahun 2016-2020:

Tabel 2.43 Persentase Satuan Pendidikan Dasar SD yang Berakreditasi B Tahun 2016-2020

Tahun	Persentase
2016	61,02
2017	66,12
2018	61,74
2019	60,00
2020	60,00

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, 2021

i. Persentase Satuan Pendidikan Dasar SMP yang Berakreditasi A

Berikut adalah data yang menunjukkan Persentase Satuan Pendidikan dasar SMP Berakredetasi A Tahun 2016-2020:

Tabel 2.44 Persentase Satuan Pendidikan Dasar SMP Berakredetasi A Tahun 2016-2020

Tahun	Persentase
2016	26,45
2017	35,93
2018	39,52
2019	41,00
2020	41,00

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, 2021

j. Persentase Satuan Pendidikan Dasar SMP yang Berakreditasi B

Berikut adalah data yang menunjukkan Persentase Satuan Pendidikan dasar SMP Berakredetasi B Tahun 2016-2020:

Tabel 2.45 Persentase Satuan Pendidikan Dasar SMP Berakreditasi B Tahun 2016-2020

Tahun	Persentase
2016	32,90
2017	36,71
2018	35,48
2019	42,00
2020	42,00

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, 2021

k. Jumlah Tenaga Pendidik (Guru)

Berikut adalah data yang menunjukkan jumlah guru PAUD, SD dan SMP berdasarkan Jenis Kelamin dan status kepegawaian (PNS atau Non PNS) sampai dengan Tahun 2020:

Tabel 2.46 Data Keadaan Guru PAUD, SD, dan SMP sampai dengan Tahun 2020

Jenjang	PNS		Jumlah	Non PNS		Jumlah	Guru PNS dan Non PNS
	Laki	Perempuan		Laki	Perempuan		
PAUD	12	178	190	65	1.475	1.540	1.730
SD	303	1.517	1.820	764	2.211	2.975	4.795
SMP	345	1.096	1.441	681	1.087	1.768	3.209
Jumlah	660	2.791	3.451	1.510	4.773	6.283	9.734

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, 2021

l. Kualifikasi Tenaga Pendidik

Berikut adalah data yang menunjukkan kualifikasi guru PAUD, SD dan SMP Tahun 2020:

Tabel 2.47 Kualifikasi dan Sertifikasi Tenaga Pendidik

Jenjang	Jumlah Guru	Kualifikasi		Sertifikasi	
		< S1/D-IV	≥S1/D-IV	Sudah	Belum
TK	1.730	624	1.106	577	1.153
SD	4.795	460	4.335	1.715	3.080
SMP	3.209	156	3.053	1.601	1.608
Total	9.734	1.240	8.494	3.893	5.841

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, 2021

Tabel 2.48 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Jenjang	Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV
PAUD	63,93
SD	90,41
SMP	95,14

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, 2021

m. Jumlah Siswa PAUD, SD dan SMP

Berikut adalah data yang menunjukkan jumlah Siswa PAUD, SD, dan SMP berdasarkan status sekolah negeri/swasta di Kota Bandar Lampung Tahun 2020:

Tabel 2.49 Jumlah Siswa PAUD, SD, dan SMP Tahun 2020

Jenjang	Negeri			Swasta			Jmlah Siswa
	Laki	Perempuan	Total	Laki	Perempuan	Total	
PAUD	140	130	270	11.433	10.955	22.388	22.658
SD	35.796	33.682	69.478	12.041	10.973	23.014	92.492
SMP	15.782	16.438	32.220	7.545	6.336	13.881	46.101
Jumlah	51.718	50.250	101.968	31.019	28.264	59.283	161.251

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, 2021

n. Rasio Guru terhadap Siswa PAUD, SD dan SMP

Rasio guru terhadap siswa dihitung berdasarkan jumlah guru secara keseluruhan baik yang berstatus PNS dan Non PNS. Berikut adalah data yang menunjukkan Rasio Guru terhadap Siswa PAUD, SD, dan SMP Tahun 2020:

Tabel 2.50 Rasio Guru terhadap Siswa

Jenjang	Rasio
PAUD	14,71
SD	19,29
SMP	14,36

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, 2021

Dari rasio diatas terlihat bahwa secara keseluruhan rasio guru terhadap murid/siswa sudah mencukupi, hal ini karena dipenuhi dari tenaga guru berstatus Non PNS yang jumlahnya cukup banyak di Kota Bandar Lampung.

Berikut adalah data yang menunjukkan kondisi ruang kelas PAUD, SD dan SMP Tahun 2020:

Tabel 2.51 Perbandingan Kondisi Ruang Kelas dengan Rombongan Belajar Tahun 2020

Jenjang	Ruang Kelas			Jumlah Ruang Kelas	Rombongan Belajar
	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang/Berat		
PAUD	718	596	2 / 0	1.316	1.142
SD	1.512	1.075	15 / 12	2.614	3.492
SMP	1.036	710	10 / 4	1.760	1.594
Total	3.266	2.381	27 / 16	5.690	6.228

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, 2021

2. Kesehatan

Urusan kesehatan berkaitan dengan peran Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dalam urusan kesehatan, Pemerintah Kota Bandar Lampung telah melaksanakan program kesehatan untuk masyarakat seperti Jamkeskot (Jaminan Kesehatan Kota), Jampersal (Jaminan Persalinan) dan menyediakan fasilitas Ambulance gratis bagi masyarakat. Hal tersebut sebagai pendukung atas peran untuk menyediakan sarana dan prasarana kesehatan seperti tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, alat kesehatan dan bentuk lainnya.

a. Tenaga Kesehatan

Berikut ini adalah data yang menunjukkan jumlah tenaga kesehatan berdasarkan jenisnya Tahun 2016-2021:

Tabel 2.52 Jumlah Tenaga Kesehatan Tahun 2016-2020

Jenis Tenaga Kesehatan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Dokter Ahli/Spesialis	203	205	215	241	332
Dokter Umum	639	645	745	847	501
Dokter Gigi	226	220	254	279	289
Bidan	644	680	680	697	1.045

Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka, Badan Pusat Statistik, 2021

Berdasarkan data jumlah dokter dan bidan secara keseluruhan di Kota Bandar Lampung baik yang berstatus PNS Kota Bandar Lampung maupun lainnya, berikut adalah data yang menunjukkan Rasio Dokter dan Bidan per 100.000 penduduk Tahun 2016-2020:

Tabel 2.53 Rasio Dokter dan Bidan per 100.000 penduduk Tahun 2016-2020

Tahun	Rasio	
	Dokter	Bidan
2016	84,39	64,55
2017	83,67	66,94
2018	92,86	65,78
2019	103,47	66,29
2020	71,44	89,62

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, 2021

Berdasarkan Rasio Indonesia Sehat, rasio ideal dokter per 100.000 penduduk adalah 40, dan berdasarkan tabel diatas Rasio Dokter di Kota Bandar Lampung Tahun 2020 sebesar 71,44 orang, artinya setiap 100.000 penduduk Kota Bandar Lampung dilayani oleh 71 orang dokter.

Sedangkan untuk Bidan, berdasarkan Rasio Indonesia Sehat, rasio ideal bidan per 100.000 penduduk adalah 100, artinya setiap 100.000 penduduk dilayani oleh 100 orang bidan. Sedangkan kondisi yang ada saat ini pada Tahun 2020 setiap 100.000 penduduk Kota Bandar Lampung dilayani oleh 89 orang bidan sehingga diperlukan penambahan bidan.

Sementara itu, berdasarkan data Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, berikut ini adalah data yang menunjukkan jumlah tenaga kesehatan di Kota Bandar Lampung yang berstatus PNS Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2021:

Tabel 2.54 Jumlah Tenaga Kesehatan Lainnya Tahun 2016-2020

Jenis Tenaga Kesehatan Lainnya	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Dokter Umum	70	79	113	143	147
Dokter Gigi	42	45	48	51	58
Perawat	310	306	317	329	340
Bidan	200	212	310	330	335

Jenis Tenaga Kesehatan Lainnya	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kesehatan Masyarakat	30	35	37	40	41
Kesehatan Lingkungan	29	32	35	40	41
ATML	27	37	39	41	45
Farmasi	30	32	31	32	41
Gizi	30	30	43	44	42
JUMLAH	770	808	973	1.050	1.090

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, 2021

b. Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu

Berikut adalah data yang menunjukkan data jumlah puskesmas, poliklinik, dan puskesmas pembantu Tahun 2016-2020:

Tabel 2.55 Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Puskesmas	30	30	30	30	31
Jumlah Poliklinik	51	71	71	80	79
Jumlah Pustu	50	50	50	50	50
Jumlah Penduduk	997.728	1.015.910	1.033.803	1.051.500	1.166.066
Rasio Puskesmas Persatuan Penduduk	33.258	33.863	34.460	35.050	37.615
Rasio Puskesmas persatuan Penduduk (Nasional)	1 Puskesmas Melayani 20.000 penduduk (Indonesia sehat)				
Rasio Poliklinik persatuan Penduduk	19.563	14.308	14.561	13.144	14.760

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, 2021

Pada Tahun 2020, rasio puskesmas persatuan penduduk di Kota Bandar Lampung adalah sebesar 34.483 (1 puskesmas melayani 34.483 penduduk) sedangkan menurut Indonesia Sehat 1 puskesmas melayani 20.000 penduduk. Sejak Tahun 2018 jumlah puskesmas yang telah terakreditasi mencapai 100 persen, demikian juga untuk Tahun 2020.

c. Rumah Sakit

Berikut data yang menunjukkan jumlah rumah sakit Tahun 2016-2020:

Tabel 2.56 Jumlah Rumah Sakit Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	1	1	1	1	1

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan Penyakit Khusus Lainnya milik pemerintah	1	1	1	1	1
Jumlah Rumah Sakit AD/AU/AL/ POLRI	2	2	2	2	2
Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah	1	1	1	1	1
Jumlah seluruh Rumah Sakit	19	20	20	20	21
Jumlah Penduduk	997.728	1.015.910	1.033.803	1.051.500	1.166.066
Rasio	52.512	50.796	51.690	52.575	50.904

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, 2021

Data tersebut menunjukkan bahwa terjadi penurunan rasio ketersediaan rumah sakit terhadap jumlah penduduk pada tahun 2020. Namun demikian ketersediaan sarana dan prasarana serta kualitas layanan rumah sakit mengalami peningkatan dalam hal melayani kebutuhan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh penduduk misalnya melalui ketersediaan jumlah ruangan, obat-obatan, dan tenaga kesehatan.

Pemerintah Kota Bandar Lampung saat ini telah memiliki 1 (satu) Rumah sakit yang terakreditasi, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah A. Dadi Tjokrodipo, dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan RSUD 90 persen di Tahun 2016 dan 90,91 persen di Tahun 2017-2019. Pada Tahun 2020 terjadi peningkatan pencapaian SPM Pelayanan RSUD mencapai angka 95,45 persen.

d. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)

Berikut data yang menunjukkan data jumlah pos pelayanan terpadu (posyandu) per satuan balita Tahun 2016-2020:

Tabel 2.57 Rasio Pos Pelayanan Terpadu Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Posyandu	694	700	704	704	704
Jumlah Balita	92.417	91.981	91.502	90.994	90.461
Rasio	133	131	130	129	129

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, 2021

Data di atas menunjukkan Jika dibandingkan dengan rasio ideal secara nasional dimana 1 posyandu melayani 50 balita, menunjukkan Kota Bandar Lampung masih kekurangan Posyandu guna melayani balita yang ada.

Tabel 2.58 Pencapaian 80 Persen Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi Tahun 2016-2020 (persen)

Tahun	Pencapaian 80 Persen Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi
2016	92,00
2017	98,80
2018	90,00
2019	96,90
2020	89,16

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, 2021

e. Angka Kematian Ibu, Bayi dan Kasus Gizi Buruk

Berikut adalah data yang menunjukkan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Kasus Gizi Buruk Tahun 2016-2020:

Tabel 2.59 Angka Kematian Ibu, Bayi dan Kasus Gizi Buruk Tahun 2016-2020

Kasus	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Angka kematian Ibu melahirkan (Kasus)	19	15	14	14	10
Angka kematian bayi dan balita (Kasus)	65	51	47	36	34
Gizi buruk (Kasus)	4	2	0	0	0

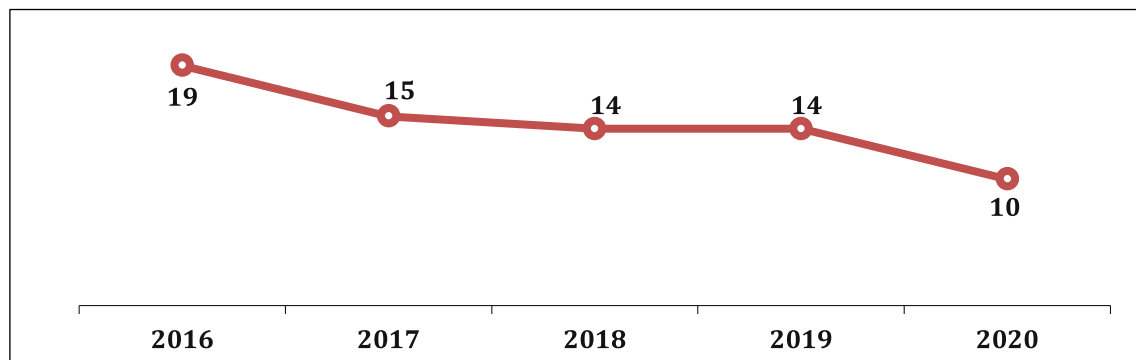
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, 2021

Angka kematian ibu melahirkan Tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2019 yaitu dari 14 kasus menjadi 10 kasus. Demikian juga hal nya dengan Angka kematian bayi dan balita, pada Tahun 2020 menurun menjadi 34 kasus dibandingkan Tahun 2019 dengan 36 kasus. Sementara untuk kasus gizi buruk di Kota Bandar Lampung cenderung menurun, pada tahun 2016 terdapat 4 kasus dan Tahun 2017 menjadi 2 kasus. Pada Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 di Kota Bandar Lampung tidak terdapat kasus gizi buruk, hal ini disebabkan karena semua balita yang mengalami gizi buruk dilakukan pemantauan, pengobatan jika ada penyakit penyerta dan pemberian makanan tambahan

oleh Puskesmas setempat. Pemantauan dilakukan terhadap status gizi anak sehingga apabila ada kecenderungan anak mengalami kekurangan gizi dapat segera diatasi dan tidak sampai menimbulkan gizi buruk. Kriteria gizi buruk ini didasarkan pada grafik pertumbuhan anak dari Kementerian Kesehatan dengan indikator berat badan menurut tinggi badan. Seorang anak dikatakan gizi buruk apabila kondisi berat badan menurut tinggi badan berada pada posisi garis/kurva dibawah -3 standar deviasi (SD).

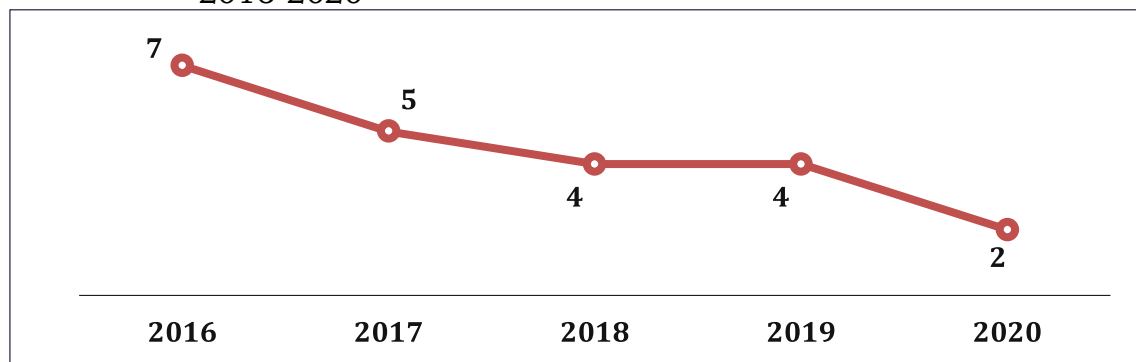
Pada tahun 2020 kasus kematian ibu maternal di Kota Bandar Lampung yakni sebanyak 10 kasus. Kasus ini disebabkan karena terjadinya pendarahan sebanyak 7 kasus (70%), Hipertensi 2 kasus (20%), penyebab lain-lain (decom cordis dll) sebanyak 1 kasus (10%). Sedangkan penyebab tidak langsung kematian ibu yang sering diabaikan oleh masyarakat seperti kondisi si ibu yang terlalu tua atau terlalu muda, terlalu banyak anak dan terlalu dekat jarak kehamilannya.

Grafik 2.7 Kasus Kematian Ibu Maternal Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, 2021

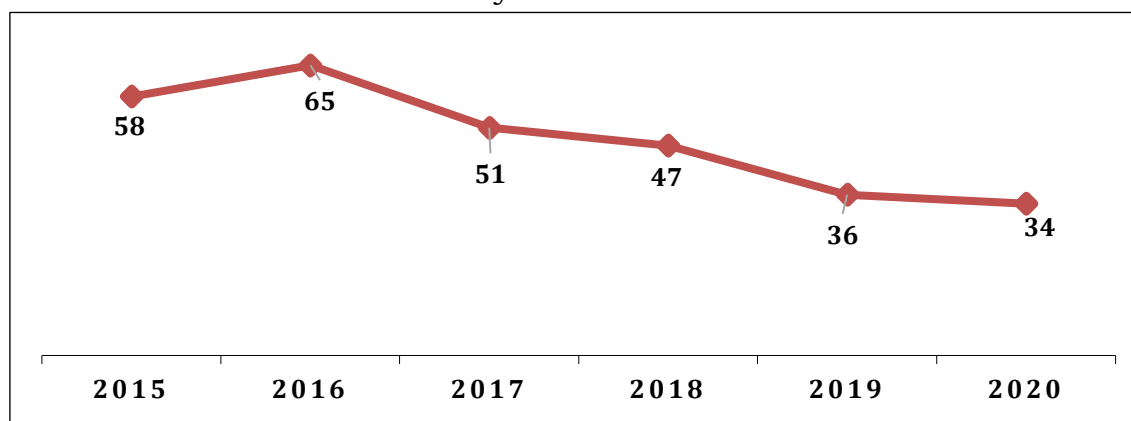
Grafik 2.8 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, 2021

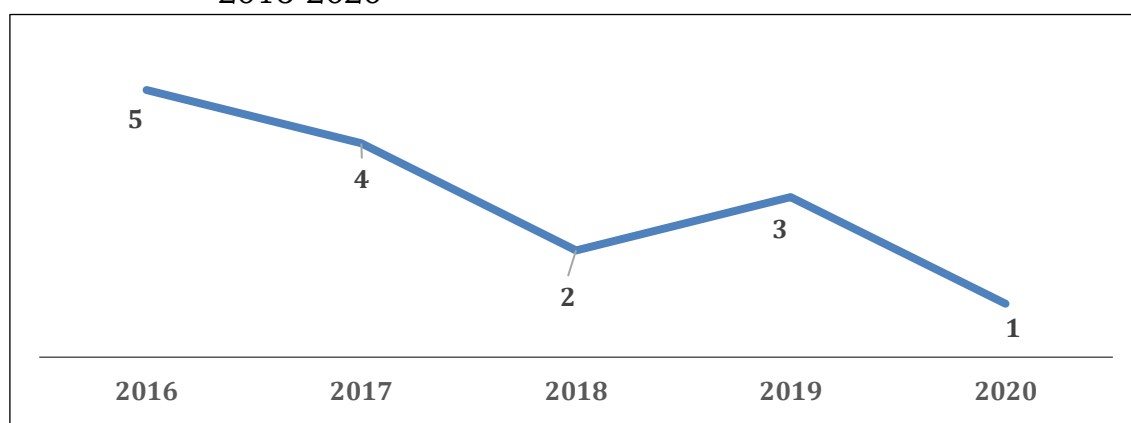
Pada tahun 2020, jumlah kasus kematian bayi dan balita di Kota Bandar Lampung yakni sebanyak 34 kasus. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yakni masih rendahnya status gizi ibu hamil, masih rendahnya pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif, buruknya kondisi kesehatan lingkungan, seperti rendahnya cakupan air bersih dan sanitasi serta kondisi perumahan yang tidak sehat, belum optimalnya pemanfaatan Posyandu di samping determinan sosial budaya lainnya.

Grafik 2.9 Kasus Kematian Bayi dan Balita Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, 2021

Grafik 2.10 Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, 2021

f. Cakupan Pelayanan Demam Berdarah dan Malaria

Berikut adalah data yang menunjukkan jumlah kasus demam berdarah dan malaria Tahun 2016-2020:

Tabel 2.60 Jumlah Kasus Demam Berdarah dan Malaria Tahun 2016-2020

Tahun	Kasus Demam Berdarah	Kasus Malaria
2016	1.172	1.465
2017	932	829
2018	926	733
2019	1.190	379
2020	1.048	80

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, 2021

Untuk penyakit DBD jumlah kasus demam berdarah di Kota Bandar Lampung masih cukup tinggi, per tahunnya jumlah kasusnya lebih dari 500 kasus. Upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan pencegahan terhadap sumber penyakit yaitu nyamuk *Aedes Aegypti*. Pelaksanaan Fogging atau pemberian pencegahan petumbuhan jentik nyamuk kepada masyarakat lebih ditingkatkan. Sosialisasi perilaku Hidup Bersih dan sehat pun harus lebih digalakan.

Pengendalian Penyakit Menular yang termasuk dalam komitmen global seperti malaria juga telah menunjukkan pencapaian program yang cukup baik. *Annual Parasite Incidence* (API) yang menjadi indikator keberhasilan upaya penanggulangan malaria cenderung menurun dari tahun ke tahun.

Tabel 2.61 Cakupan penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Tahun 2016-2020 (persen)

Tahun	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
2016	80
2017	97
2018	85
2019	97
2020	95

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, 2021

g. Cakupan Pelayanan Tuberculosis

Berikut adalah data yang menunjukkan jumlah kasus penyakit Tuberculosis Tahun 2016-2020:

Tabel 2.62 Jumlah Kasus Penyakit Tuberculosis Tahun 2016-2020

Tahun	Kasus Tuberkulosis
2016	2.160
2017	2.622
2018	3.480
2019	3.349
2020	2.240

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, 2021

Data tersebut menunjukkan terjadinya penurunan kasus penyakit Tuberculosis pada Tahun 2020 yaitu sebesar 2.240 kasus dibandingkan dengan Tahun 2019 dengan 3.349 kasus. Kedepannya diperlukan peningkatan upaya pencegahan dengan sosialisasi pentingnya melakukan vaksinasi Tuberculosis untuk meningkatkan imun tubuh sehingga meminimalisir tertularnya penyakit Tuberculosis dan menghindari kontak fisik langsung dengan penderita Tuberculosis.

Tabel 2.63 Prevalensi Tuberculosis (TB) per 100.000 penduduk (CNR) Tahun 2016-2020

Tahun	Prevalensi Tuberculosis (TB) per 100.000 penduduk (CNR)
2016	220
2017	232
2018	231
2019	331
2020	211

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, 2021

h. Cakupan Pelayanan Pengendalian HIV dan AIDS

Berikut adalah data yang menunjukkan prevalensi kasus HIV Tahun 2016-2020:

Tabel 2.64 Jumlah Kasus Prevalensi Kasus HIV Tahun 2016-2020

Tahun	Prevalensi Kasus HIV pada Penduduk Usia 15-49
2016	267
2017	280
2018	340
2019	283
2020	257

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, 2021

Data tersebut menunjukkan jumlah prevalensi penyakit HIV dan AIDS di Kota Bandar Lampung masih cukup tinggi. Kedepannya diperlukan upaya untuk melakukan pencegahan dengan sosialisasi perilaku seks yang bersih dan sehat. Sosialisasi tentang bahaya seks bebas dan penyalahgunaan narkoba harus terus digalakkan. Potensi yang dimiliki Kota Bandar Lampung dalam pengendalian HIV-AIDS diantaranya adalah telah memiliki persiapan yang cukup baik, mencakup tata laksana penanganan pasien, tenaga kesehatan, pelayanan kesehatan, dan laboratorium kesehatan.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

3.1. Pekerjaan Umum

a. Rasio Panjang Jalan Dibanding dengan Luas Wilayah

Berikut adalah data yang menunjukkan rasio panjang jalan dibandingkan luas wilayah Tahun 2016-2020:

Tabel 2.65 Rasio Panjang Jalan Dibandingkan Luas Wilayah Tahun 2016-2020

Tahun	Rasio
2016	6,98
2017	6,86
2018	6,86
2019	6,86
2020	7,89

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, 2021

Data tersebut menunjukkan terjadi peningkatan rasio panjang jalan dibandingkan luas wilayah di Kota Bandar Lampung pada Tahun 2020.

b. Rasio Panjang Jalan Dibanding dengan Jumlah Penduduk

Berikut adalah data yang menunjukkan rasio panjang jalan dibandingkan jumlah penduduk Tahun 2016-2020:

Tabel 2.66 Rasio Panjang Jalan Dibandingkan Jumlah Penduduk Tahun 2016-2020

Tahun	Rasio
2016	1.38
2017	1.16
2018	1.31
2019	1.29
2020	1,46

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, 2021

Berdasarkan data tersebut menunjukkan terjadi peningkatan rasio panjang jalan dibandingkan jumlah penduduk di Kota Bandar Lampung pada Tahun 2020.

c. Rumah Tinggal Bersanitasi

Berikut adalah persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Tahun 2016-2020:

Tabel 2.67 Rumah Tinggal Bersanitasi Tahun 2016-2020

Tahun	Rumah Tinggal Bersanitasi (persen)
2016	98,07
2017	98,98
2018	97,27
2019	95,63
2020	95,70

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, 2021

Adapun Persentase Rumah Tinggal yang memiliki akses terhadap sanitasi layak Tahun 2016-2020 ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2.68 Persentase Rumah Tinggal yang memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak Tahun 2016-2020

Tahun	Rumah Tinggal yang memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak (persen)
2016	33,26
2017	36,49
2018	35,99
2019	35,96
2020	35,61

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, 2021

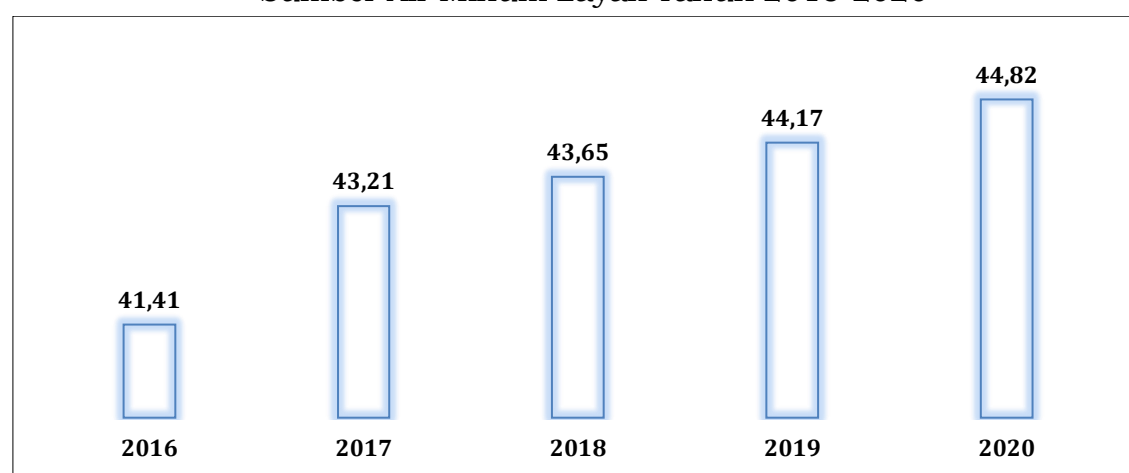
Dari data tersebut menunjukkan bahwa Akses masyarakat terhadap sanitasi layak masih perlu untuk menjadi perhatian daerah, disisi lain,

kesadaran masyarakat akan kesehatan dengan memiliki dan menjaga rumah dengan sanitasi yang sehat juga perlu untuk ditingkatkan.

d. Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sumber Air Minum Layak

Berikut adalah data yang menunjukkan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak Tahun 2016-2020:

Diagram 2.15 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sumber Air Minum Layak Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, 2021

Berdasarkan data tersebut diatas menunjukkan bahwa upaya penyehatan lingkungan masih perlu untuk ditingkatkan.

e. Cakupan Layanan SPAM Perkotaan

Berikut adalah data yang menunjukkan cakupan layanan SPAM Perkotaan Tahun 2016-2020:

Tabel 2.69 Persentase Cakupan Layanan SPAM Perkotaan Tahun 2016-2020

Tahun	Cakupan
2016	31,98
2017	32,14
2018	32,14
2019	32,14
2020	33,25

Sumber : PDAM Kota Bandar Lampung, 2021

3.2. Penataan Ruang

a. Tersedianya Informasi Mengenai RTRW

Pada Tahun 2016, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung 2011-2030 telah dilakukan peninjauan kembali dan direkomendasikan untuk dilakukan revisi pada Tahun 2017. Pada Tahun 2018 dilakukan *updating* terhadap materi teknis dan peta dengan melakukan penyesuaian sesuai Peraturan Menteri ATR Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi, Kabupaten, dan Kota. Pada tahun 2019 Rekomendasi Peta RTRW didapatkan dari Badan Informasi Geospasial (BIG), sebagai salah satu prasyarat mendapatkan rekomendasi Gubernur. Sampai sejauh ini, *progress* RTRW telah dilakukan evaluasi terhadap materi teknis serta peta dan penyusunan telah menyesuaikan Peraturan Menteri ATR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Peta RTRW Propinsi, Kabupaten/Kota dan Peta RDTR Kabupaten/Kota, yang kemudian ditindaklanjuti kembali terhadap penyesuaian Peraturan Menteri ATR Nomor 14 Tahun 2021 sebagai salah satu turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Forum lintas sektor terhadap Rancangan Peraturan Daerah RTRW Kota Bandar Lampung 2021-2041 telah dilakukan pada tahun 2021 dan tahapan selanjutnya sedang menunggu persetujuan substansi RTRW dari Kementerian ATR/BPN untuk kemudian dilanjutkan pembahasan dengan DPRD.

b. Persentase Bangunan ber-IMB

Persentase bangunan ber-IMB per satuan bangunan adalah perbandingan jumlah bangunan ber-IMB terhadap jumlah seluruh bangunan yang ada. Tertib administrasi dalam pengurusan IMB belum sepenuhnya dijalankan oleh masyarakat. Diperlukan peningkatan pembinaan, sosialisasi, serta penindakan yang tegas untuk mewujudkan tertib IMB di Kota Bandar Lampung. Berikut data persentase bangunan ber-IMB berdasarkan

penerbitan IMB yang dilakukan oleh sektor pelayanan publik Tahun 2016-2020 :

Tabel 2.70 Bangunan ber-IMB Tahun 2016-2020

Tahun	Penerbitan IMB	Persentase Bangunan ber-IMB
2016	2.241	37,31
2017	1.431	49,23
2018	1.897	65,04
2019	1.835	80,33
2020	1.574	93,45

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandar Lampung, 2021

Sertifikat Laik Fungsi (SLF) adalah salah satu dokumen bangunan gedung yang wajib dimiliki oleh pengguna bangunan sebelum bangunan tersebut dimanfaatkan. Sertifikat Laik Fungsi diterbitkan setelah bangunan gedung memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung, merupakan dasar penerbitan SLF di Kota Bandar Lampung. Sebelum SLF di implemmentasikan dalam kurun waktu tahun 2014 – 2016, Pemerintah Kota Bandar Lampung melakukan pendalaman teknis dan memperoleh pendampingan dari Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam merumuskan pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG), pendataan bangunan gedung dan petunjuk pelaksanaan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Hasil dari pendampingan dan pembahasan di tingkat pusat dengan berpedoman dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menyusun Petunjuk pelaksanaan yang mengatur Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran, tugas dan wewenang TABG serta pendataan bangunan gedung diatur melalui Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penyelenggaraan, Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, Tim Ahli Bangunan Gedung, dan Pendataan Bangunan Gedung.

Dalam periode tahun 2016 – 2017, implementasi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 08 Tahun 2016, dilaksanakan melalui Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung Kota Bandar Lampung berdasarkan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 270/III.04/HK/2018 Tentang Pembentukan Sekretariat Tim Ahli Bangunan Gedung Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018, dan setelah Tim Ahli Bangunan Gedung terbentuk maka dilakukan sosialisasi yang berkaitan dengan SLF kepada masyarakat dan pelaku usaha sehingga implementasi penerbitan SLF di Kota Bandar Lampung bisa terealisasi di Tahun 2018.

Berikut ini adalah data Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung yang diterbitkan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung Tahun 2018-2020 :

Tabel 2.71 Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Tahun 2018-2020

Tahun	Penerbitan IMB
2018	5
2019	11
2020	18

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung, 2021

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pembangunan perumahan merupakan program penyediaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Selain hal tersebut perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan perumahan menjadi prioritas untuk ditangani dan dilaksanakan sebagai bentuk komitmen pelaksanaan program 100-0-100 Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Berikut adalah jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun 2016-2020:

Tabel 2.72 Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2016-2020

Tahun	Rumah Tidak Layak Huni	Kelurahan
2016	2.187	26
2017	2.187	26
2018	2.843	67

Tahun	Rumah Tidak Layak Huni	Kelurahan
2019	2.843	67
2020	2.843	67

Sumber : Pokja PKP Kota Bandar Lampung, 2021

Untuk mendukung penanganan RTLH pada tahun 2017-2020 Kota Bandar Lampung mendapat bantuan dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian PUPR Republik Indonesia melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sumber anggaran APBN/DAK sebanyak 819 unit RTLH. Untuk tahun 2020 pelaksanaan BSPS kota Bandar Lampung sebanyak 277 unit.

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Pemerintah Kota Bandar Lampung selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir telah melaksanakan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan terhadap masyarakat di wilayah Kota Bandar Lampung. Tim Penegakan Peraturan Daerah dan Tim Ketertiban Umum Kota Bandar Lampung telah melaksanakan beberapa penertiban antara lain Operasi Penertiban Pedagang Kaki Lima; Operasi Penertiban Tempat Hiburan Pada Bulan Suci Ramadhan; Operasi Penertiban Gelandangan dan Pengemis Serta Anak Jalanan; Pendataan Perizinan serta Objek-objek Pajak Tempat-tempat Usaha di Wilayah Kota Bandar Lampung; Pengamanan Unjuk Rasa; Penertiban Spanduk dan Banner Yang Pemasangannya Melanggar Peraturan Daerah dan yang Telah Habis Masa Izin dan lain sebagainya. Berikut adalah data terkait aktifitas penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Tahun 2016-2020:

Tabel 2.73 Persentase Penegakan Peraturan Daerah Tahun 2016-2020

Tahun	Penegakan Perda (Persen)
2016	74
2017	100
2018	100
2019	100
2020	100

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung, 2021

Data diatas menggambarkan aktifitas penegakan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung terhadap Peraturan Daerah yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

6. Sosial

a. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Berikut adalah data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2016-2020:

Tabel 2.74 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Anak terlantar	1.438	1.307	1.307	1.307	220
Lanjut usia terlantar	1.946	1.526	1.604	1.635	628
Perempuan rawan sosial ekonomi	625	266	420	427	900
Anak Jalanan	4	4	1	1	61
Anak yang berhadapan dengan hukum	4	-	-	-	10
Korban penyalahgunaan NAPZA	98	37	41	43	129
Penyandang cacat	1.062	607	767	820	817
Gelandangan dan pengemis	57	50	7	8	48
Tuna susila	77	44	47	47	144
Bekas warga binaan LP (napi)	144	12	18	19	69
Fakir miskin	55.234	49.711	49.711	43.322	43.332
Pemulung	380	109	145	151	264

Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka, Badan Pusat Statistik, 2018; Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, 2021

Berikut adalah data Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Tertangani Tahun 2016-2020:

Tabel 2.75 Persentase PMKS yang Tertangani Tahun 2016-2020

Tahun	PMKS yang Tertangani (persen)
2016	25,00
2017	37,36
2018	40,00
2019	50,00
2020	70,00

Sumber : Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, 2021

b. Tempat Pemakaman

Berikut adalah data yang menunjukkan jumlah tempat pemakaman sampai dengan Tahun 2020:

Tabel 2.76 Jumlah Tempat Pemakaman Penduduk sampai dengan Tahun 2020

Jenis Tempat Pemakaman	Jumlah Tempat Pemakaman (Lokasi)
Tempat Pemakaman Umum	103
Tempat Pemakaman Khusus	43
Tempat Pemakaman Bukan Umum	138
Total	284

Sumber : Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, 2021

Data menunjukkan jumlah tempat pemakaman yang tersedia di Kota Bandar Lampung yang terdiri dari tempat pemakaman umum, tempat pemakaman bukan umum, dan tempat pemakaman khusus. Jumlah tersebut masih mencukupi kebutuhan masyarakat akan tempat pemakaman di Kota Bandar Lampung.

Saat ini terdapat 6 (enam) areal pemakaman milik Pemerintah Kota Bandar Lampung yang terdiri dari 3 (tiga) areal pemakaman berlokasi di Kecamatan Kemiling dengan luasan sebesar 38.600 m², 1 (satu) areal pemakaman berlokasi di Kecamatan Teluk Betung Barat dengan luasan sebesar 14.449 m², dan 1 (satu) areal pemakaman berlokasi di Kecamatan Langkapura dengan luasan 6.150 m², serta 1(satu) areal pemakaman berlokasi di Kecamatan Teluk Betung Timur yang diperuntukkan untuk korban *Covid-19* dengan luasan sebesar 30.000 m². Pengelolaan areal pemakaman yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung adalah terkait penyediaan infrastruktur penunjang pemakaman seperti pagar, talud/bronjong dan akses jalan ke areal pemakaman baik milik pemerintah maupun pemakaman milik masyarakat/umum. Berikut adalah rincian luasan pemakaman milik Pemerintah Kota Bandar Lampung :

Tabel 2.77 Luasan Areal Pemakaman Milik Pemerintah Kota Bandar Lampung

Lokasi Pemakaman	Luasan (m ²)
Kelurahan Beringin Kecamatan Kemiling	20.000
Kelurahan Bukit Kemiling Permai Kecamatan Kemiling	18.000
Kelurahan Pinang Jaya Kecamatan Kemiling	600
Kelurahan Batu Putu Kecamatan Teluk Betung Barat	14.449
Kelurahan Langkapura Kecamatan Langkapura	6.150
Kelurahan Teluk Betung Barat Kecamatan Teluk Betung Timur	30.000

Sumber : Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, 2021

2.3.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Berikut adalah data yang menunjukkan data ketenagakerjaan Tahun 2016-2020:

Tabel 2.78 Jumlah Angkatan Kerja Tahun 2016-2020

Tahun	Angkatan Kerja	Penduduk yang Bekerja	Pengangguran Terbuka	Rasio Kesempatan Kerja
2016	445.064	407.190	37.874	91,5
2017	476.469	437.884	38.071	91,9
2018	504.849	468.121	36.728	92,7
2019	511.686	475.244	36.442	92,9
2020	554.224	505.483	48.741	91,2

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, 2021

Dampak *Pandemi Covid-19* yang semakin merebak termasuk di Kota Bandar Lampung menyebabkan sejumlah pekerja atau buruh dirumahkan bahkan mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Tenaga Kerja mencatat sejak 3 April 2020 sampai dengan Juli 2020 setidaknya terdapat 1.687 tenaga kerja yang telah dirumahkan dan 59 orang pekerja yang mengalami PHK oleh 41 pihak perusahaan. Berikut adalah rekapitulasi jumlah tenaga kerja yang dirumahkan dan mengalami PHK Akibat Dampak *Pandemi Covid-19* di Kota Bandar Lampung periode 3 April 2020 s.d 16 Juli 2020:

Tabel 2.79 Jumlah Tenaga Kerja yang Terkena Dampak *Pandemi Covid-19*

Jumlah Perusahaan	Jumlah Tenaga Kerja (orang)	
	Dirumahkan	PHK
41	1.687	59

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung, 2021

Pandemi Covid-19 yang terjadi pada Tahun 2020 menyebabkan banyak tenaga kerja yang dirumahkan dan di PHK sebagai akibat dari semakin menurunnya jumlah lapangan kerja.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah upaya terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan untuk meningkatkan wawasan, kepedulian, perhatian, kapasitas perempuan dan perlindungan anak. Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender.

Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung, partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintahan pada Tahun 2016 sebesar 4,20 persen, Tahun 2017 sebesar 3,71 persen, Tahun 2018 sebesar 3,23 persen, Tahun 2019 menjadi sebesar 3,24 persen, dan tahun 2020 sebesar 3,03. Angka tersebut menunjukkan jumlah pegawai Negeri Sipil perempuan di Pemerintah Kota Bandar Lampung dibandingkan dengan jumlah pekerja perempuan secara keseluruhan di Kota Bandar Lampung. Penurunan pada Tahun 2017 dan 2018 disebabkan karena tidak ada penambahan ataupun penerimaan PNS pada tahun tersebut, sementara terdapat PNS yang pensiun atau purna tugas.

Untuk membantu Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam hal penanganan dan pencegahan terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, terdapat 6 (enam) Lembaga perempuan dan perlindungan anak di Kota Bandar Lampung sebagai berikut :

1. Lembaga Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung (LPA)
2. Lembaga Advokasi Perempuan Damar (Damar)
3. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI)
4. Children Crisis Center (CCC)
5. Lembaga Advokasi Anak (Lada)
6. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

Keberadaan *Non Governmental Organizations* dalam upaya perlindungan perempuan dan anak sebagai wujud partisipasi masyarakat dan menjadi mitra aktif pemerintah dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut :

1. Lembaga Advokasi Damar mendorong/ advokasi dalam berbagai kebijakan yang peduli kepada perempuan; bekerja sama dalam penanganan kasus terhadap perempuan baik dalam pendampingan maupun dalam penyelesaian kasus.
2. Melalui Forum Komunikasi Puspa (Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak). Forum Puspa terdiri dari berbagai Lembaga/ Organisasi perempuan dan Anak termasuk juga dari disabilitas dan organisasi yang berbasis agama, Organisasi Profesi (IDI, IBI, HIMPSI, AJI) dan Dunia Usaha, yang bekerja bersama melalui lembaga masing-masing dan bersinergi dalam upaya perlindungan perempuan dan Anak.
3. Dengan pembentukan UPT PPA akan semakin terbuka kerjasama dalam penanganan terhadap kasus-kasus baik perempuan dan Anak (dalam penjangkauan, pendampingan, rehabilitasi terhadap korban serta untuk penyelesaian kasus sampai kepada pengadilan).
4. Pembentukan Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga), sebagai layanan dalam pencegahan dan perlindungan perempuan dan anak. Kegiatan yang dilakukan berupa sosialisasi, edukasi dan konseling terhadap permasalahan terhadap anak, perempuan dan keluarga, dalam sosialisasi dan edukasi dapat dilakukan keberbagai lapisan masyarakat, secara berkelompok, maupun lewat komunitas dimana dapat bekerja sama dengan lembaga non pemerintah dalam pelaksanaannya.
5. Dalam Pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan lembaga Non Pemerintah, melalui layanan pengaduan dan pendampingan, pemulangan dan reintegrasi terhadap korban TPPO.

Selain lembaga sebagaimana tersebut diatas, Pemerintah Kota Bandar Lampung juga memiliki kader-kader binaan yang tersebar di Kelurahan dan Kecamatan yang bertugas untuk melakukan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan perempuan dan anak yang terjadi di masyarakat. Adapun kader-kader sebagaimana dimaksud adalah :

1. Kader Pelihara Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang berjumlah 252 orang dan tersebar di 126 Kelurahan se Kota Bandar Lampung;
2. Kader Pos Curhat yang tersebar di 20 Kecamatan dengan jumlah 10 orang per Kecamatan.

3. Pangan

Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah merupakan amanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 11/Permentan/KN.130.4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Daerah dan diperkuat dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penyediaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok (Beras) di Wilayah Kota Bandar Lampung. Berikut adalah data yang menunjukkan cadangan pangan yang dialokasikan melalui APBD Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2020:

Tabel 2.80 Cadangan Pangan Pemerintah Tahun 2016-2020

Tahun	Cadangan Pangan Pemerintah (Ton)
2016	7
2017	7,148
2018	15,712
2019	24,084
2020	24,084

Sumber : Dinas Pangan Kota Bandar Lampung, 2021

Berikut adalah data ketersediaan energi dan protein perkapita Tahun 2016-2020:

Tabel 2.81 Ketersediaan Energi dan Protein Tahun 2016-2020

Tahun	Energi (Kal/kap/hari)	Protein (gr/kap/hari)
2016	2.286	71,98
2017	2.308	71,98
2018	2.286	71,98
2019	3.339	72,06
2020	2.490	72,10

Sumber : Dinas Pangan Kota Bandar Lampung, 2021

Berikut adalah data terkait Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan masyarakat Tahun 2016-2020 :

Tabel 2.82 Pengawasan Keamanan Pangan Tahun 2016-2020

Tahun	Tingkat Keamanan Pangan (%)
2016	62,5
2017	62,5
2018	80
2019	80
2020	85

Sumber : Dinas Pangan Kota Bandar Lampung, 2021

Dalam upaya meningkatkan keamanan pangan yang beredar di masyarakat, Dinas pangan gencar melakukan sidak ke pasar di Kota Bandar Lampung bekerjasama dengan instansi terkait, mengawasi dan juga melakukan edukasi kepada penjual di pasar tradisional dan swalayan. Salah satu komitmen dinas pangan terbukti dengan keberhasilan Pasar Way Halim, Bandar Lampung mendapat penghargaan dari BPOM RI Tingkat nasional sebagai pasar sehat dan aman dari bahan berbahaya.

4. Pertanahan

Berikut adalah data yang menunjukkan penyelesaian konflik pertanahan Tahun 2016-2020:

Tabel 2.83 Penyelesaian Konflik Pertanahan Tahun 2016-2019

Tahun	Penyelesaian Konflik Pertanahan Tahun
2016	Konflik Tanah Milik Pelindo di Kecamatan Panjang
2017	Konflik Tanah Milik Pelindo di Kecamatan Panjang dan Konflik Asset Pemerintah Provinsi Lampung yang ada di Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame
2018	Konflik Tanah SDN 2 Rajabasa
2019	Tidak ada Penyelesain Konflik
2020	Tidak ada Penyelesain Konflik

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kota Bandar Lampung, 2021

Selain itu, Pemerintah Kota Bandar Lampung juga memberikan bantuan sertifikasi tanah bagi warga tidak mampu. Berikut adalah data yang menunjukkan jumlah sertifikat warga tidak mampu yang terbit dan sedang dalam proses Tahun 2016-2020 :

Tabel 2.84 Sertifikasi Tanah bagi Warga Tidak Mampu Tahun 2016-2020

Tahun	Peserta Proda (Bidang)	Jumlah Serifikat yang Terbit (Bidang)	Jumlah Serifikat yang dalam Proses (Bidang)
2016	50	50	-
2017	228	-	228
2018	228	-	228
2019	228	-	228
2020	171	-	171

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kota Bandar Lampung, 2021

Sebagai daerah perkotaan yang padat penduduk, penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya tentu saja masih terjadi. Munculnya kawasan permukiman kumuh perkotaan terutama munculnya permukiman liar (*squatter area*) juga tidak dapat dihindari. Berdasarkan data Pokja PKP Nuwo Berseri Kota Bandar Lampung, luas kawasan permukiman liar (*squatter area*) di Kota Bandar Lampung sebagai berikut : tahun 2017 dengan luas 61,78 ha di 91 RT (7.976 KK); tahun 2018 dengan luas 20,18 ha di 28 RT (2.616 KK); dan tahun 2019 dengan luas 2,37 ha di 6 RT (607 KK). Dengan demikian terjadi pengurangan terhadap luasan kawasan permukiman liar yang ada di Kota Bandar Lampung. Hal ini dikarenakan adanya penanganan kawasan perkotaan secara kolaborasi. Untuk tahun 2020, tidak dilakukan pendataan dikarenakan tidak adanya penanganan kumuh perkotaan di lokasi squatter tersebut.

5. Lingkungan Hidup

a. Persentase Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau (RTH) dimaksudkan untuk menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air, menciptakan aspek planologis perkotaan, serta meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau 30 persen dari luas wilayah kota yang terdiri dari publik 20 persen dan privat 10 persen. Kondisi eksisting di Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa ketersediaan ruang terbuka hijau saat ini jika dilihat dari luasannya belum dapat memenuhi ketentuan

tersebut, dan ruang terbuka hijau yang sudah ada perlu direvitalisasi fungsinya kembali.

RTH publik terdiri dari taman kecamatan, taman kota, pemakaman, sempadan sungai dan sempadan pantai, sempadan mata air dan kawasan ekosistem mangrove yang tersebar diseluruh kecamatan wilayah Kota Bandar Lampung. Sedangkan RTH *private* tersebar pada lahan dengan fungsi permukiman di seluruh bagian wilayah kota. Selain itu RTH *private* juga tersebar pada kawasan industri yang banyak tersebar di wilayah Kecamatan Panjang, Sukabumi dan Kecamatan Bumi Waras. Luas ruang terbuka hijau (RTH) publik di Kota Bandar Lampung saat ini berjumlah 658,57 Ha atau sekitar 4,37% dari total luas lahan terbangun Kota Bandar Lampung yang terdiri dari taman kota sebesar 355 Ha, taman kecamatan sebesar 22 Ha, pemakaman sebesar 62 Ha, sempadan sungai dan sempadan pantai sebesar 181,2 Ha, sempadan mata air 0,37 Ha dan kawasan ekosistem mangrove sebesar 38 Ha.

b. Persampahan

Permasalahan lingkungan hidup di Kota Bandar Lampung di dominasi oleh masalah persampahan. Masalah persampahan yang timbul sebagai dampak atas meningkatnya aktivitas penduduk di Kota Bandar Lampung. Berikut adalah data yang menunjukkan jumlah penanganan sampah yang telah dilakukan di Kota Bandar Lampung Tahun 2017-2020:

Tabel 2.85 Penanganan Sampah Tahun 2017-2020

Tahun	Produksi Sampah Perhari (Ton)	Volume Sampah Terangkut Perhari (Ton)	Persentase
2017	800-900	700-800	80
2018	800-1.000	700-850	80
2019	900-1.100	800-900	80
2020	1.100-1.300	900-950	80

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, 2021

Semakin meningkatnya jumlah penduduk dan pemukiman di Kota Bandar Lampung menuntut kesiapan pemerintah dalam mengatasi masalah

persampahan. Berikut adalah data yang menunjukkan UPT Pengelolaan Sampah dan lokasi TPS di Kota Bandar Lampung :

Tabel 2.86 UPT Pengelolaan Sampah dan Lokasi TPS

UPT Pengelolaan Sampah	Lokasi TPS
Panjang	1 Candy Baypass
	2 Srengsem
	3 Ketapang Kuala Ki Agus Anang
	4 Karang Maritim
	5 Pasar Panjang
	6 LDC Belakang
	7 Ketapang Kuala Atas
Sukabumi	1 TPS Villa Marina Jl. P. Singkep 7
	2 TPS Griya Abdi Negara Jl. P. Tirtayasa
	3 TPS Perumahan Nusantara Permai
	4 TPS Container Campang Raya Jl. Alimudin Umar
	5 TPS Jl. Soekarno Hatta
	6 TPS Karunia Indah Jl. P. Bangka
	7 TPS Puskud
Way Halim	1 TPS Jl. Belia Jagabaya li
	2 TPS Ismail, Jl. Pulau Buton
	3 TPS Kali Paman, Jl. Pulau Seram
	4 TPS Villa Citra, Jl. Hj Said
	5 TPS Dom, Jl. Morotai
	6 TPS Gantung BTN 3 Way Halim Permai
	7 TPS Gantung Jl. Griya Utama WHP
	8 TPS Pkor Jl. Sumpah Pemuda
	9 TPS Pasar Perumnas Jl. Gunung Rajabasa Raya
Sukarame	1 TPS UIN Kel-Sukarame
	2 TPS Umbul Rakub Kel- Way Dadi
	3 TBS Gantung Man, Kel- Kopri Jaya
Teluk Betung Timur	1 TPS Teluk Bone Jl. Telukbone
	2 TPS Jl. Ikan Sebelah
	3 TPS Jl. RE Martadinata Putra Wisata
	4 TPS Jl. Zulkarnaen Subing
	5 TPS Lempasing Jl. Remartadinata
Rajabasa	1 TPS UPT Rajabasa
	2 TPS Pasar Rajabasa Raya
	3 TPS Gedung Meneng
Labuhan ratu	1 TPS Gantung Jl. Sultan Haji
	2 TPS Labuhan Ratu Gg. Family 1 Labuhan Dalam
	3 Kampung Baru
Teluk Betung Barat	1 TPS Container Jl. Dr. Setia Budi Kuripan
	2 TPS Konatiner Jl. Wan Abdurahman Batu Putu
Kedamaian	1 TPS Jl. Merbau Kel. Kupang Raya
	2 TPS Jl. Putri Balau Kel. Bumi Kedamaian
Tanjung Karang Timur	1 Pasar Tugu
	2 Bukit Klutum
Enggal	1 Jl. Way Sekampung
Kedaton	1 TPS Gantung Sidodadi Jl. Badak
	2 TPS Ratulangi
Kemiling	1 BKP
	2 Beringin Raya Jl. Garuda
	3 Beringin Jaya, Kalpataru
Tanjung Karang Barat	1 Gang Jeruk
	2 Ps. Tamin
	3 TPS Ratulangi

UPT Pengelolaan Sampah	Lokasi TPS
Teluk Betung Selatan	1 Cimeng
	2 Sumur Putri
	3 Kali Akar
	4 Talang Polda
	5 Gunung Mas
	6 Pesawahan
Langkapura	1 TPS Gantung Langkapura Gang Swadaya
	2 TPS Induk Gang Senen
Bumi Waras	1 TPS Kunyit Bw
	2 TPS Payang Bw
	3 TPS Nila Kandi Bw
	4 TPS Container Kangkung Bw
Teluk Betung Utara	1 TPS Dewi Sartika
	2 TPS Alfurgon Jl. Dipenogoro
	3 TPS Container Jl. Dr. Cipto Mangunnkusumo
	4 TPS Gantung Gg. Nusa Indah
	5 Bak Sampah Depan Kejaksaan Tinggi
Tanjung Senang	1 TPS Tanjung Senang
Tanjung Karang Pusat	1 TPS Bambu Kuning
	2 TPS Terminal Ramayana
	3 TPS Pasar Bawah
	4 TPS Hanoman
	5 TPS Pasar Tamin
	6 TPS Pasar Gintung
	7 TPS Gunung Botak
TPA Bakung	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, 2021

TPA Bakung merupakan satu-satunya tempat pemrosesan akhir sampah bagi masyarakat Kota Bandar Lampung. TPA Bakung mempunyai luas 14,01 ha dan mulai beroperasi pada Tahun 1994. Hingga saat ini TPA Bakung sudah beroperasi selama ± 27 Tahun dengan sampah yang masuk ke TPA ± 600 ton/hari dan pada saat ini meningkat menjadi ± 750 ton/hari.

Pengelolaan sampah di TPA Bakung masih menggunakan sistem *open dumping* dikarenakan sampah di TPA Bakung yang *overload* dan sudah terlalu tinggi untuk dikelola (saat ini ketinggian sampah mencapai ± 20 m) sehingga sampah yang masuk dibuang dengan cara menumpuk. Hanya sekitar 10% sampah yang masuk ke TPA dikelola dengan cara *control Landfill*, yaitu dengan cara penimbunan tanah secara berkala pada tumpukan sampah. Ketinggian sampah di TPA Bakung saat ini tentunya sangat membahayakan keselamatan para pemulung yang beroperasi di TPA Bakung.

Pemerintah Kota Bandar Lampung akan mengupayakan pengelolaan sampah dengan skema *Waste to Energi* melalui pembangunan PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) atau pemanfaatan sampah untuk dijadikan *Pelet/RDF (Refuse - Derived Fuel)* dengan mencari alternatif pembiayaan di luar APBD.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penataan Administrasi yang baik sehingga dapat terwujud tertib administrasi kependudukan yang memadai yang akhirnya dapat digunakan dalam sebagai tolak ukur/pertimbangan Walikota dan Pemerintah Daerah dalam menentukan berbagai keputusan dan kebijakan yang menyangkut warga Kota Bandar Lampung, untuk itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkomitmen untuk melaksanakan pendaftaran dan pendataan penduduk secara baik, cepat dan teratur. Pemerintah Kota Bandar Lampung telah melaksanakan fungsinya dengan melaksanakan fungsi administratif seperti pembuatan akta kelahiran, kematian, dan pendataan penduduk melalui Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Penerapan KTP-El lebih diutamakan dikarenakan akan dihapuskannya KTP SIAK dan akan diberlakukannya KTP-El seumur hidup, pelaksanaan pencetakan KTP-El diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sedangkan perekaman KTP-El di serahkan kepada kecamatan masing-masing Kota Bandar Lampung. Berikut ini adalah data yang menunjukkan jumlah penduduk Kota Bandar Lampung yang telah melakukan perekaman e-KTP dan memiliki e-KTP Tahun 2016-2020:

Tabel 2.87 Penduduk Kota Bandar Lampung yang Telah Melakukan Perekaman e-KTP dan Memiliki e-KTP Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Penduduk ber e-KTP	Jumlah Penduduk yang Sudah Rekam	Jumlah Penduduk yang Belum Rekam	Jumlah Penduduk 0 s/d 17 Tahun - 1 Hari
2016	1.169.286	79.192	505.289	261.075	323.730
2017	1.176.612	52.497	566.866	242.956	314.293
2018	1.179.627	69.791	609.892	195.504	304.440
2019	1.183.251	77.987	634.497	155.801	314.966
2020	1.189.297	134.528	606.029	125.356	323.384

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, 2021

Berikut ini adalah data yang menunjukkan persentase data kependudukan dan pencatatan sipil pada Tahun 2020 :

Tabel 2.88 Persentase Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016-2020 (Persen)

Tahun	Penduduk ber-KTP	Bayi ber-Akte Kelahiran	Pasangan ber-Akte Perkawinan	Penduduk ber-Kartu Keluarga	Anak ber-Kartu Identitas Anak
2016	15,67	76,84	100	24,23	8,84
2017	9,26	82,27	100	26,60	6,57
2018	11,44	85,10	100	33,39	5,47
2019	12,20	93,34	100	24,90	16,25
2020	22,19	99,41	100	24,08	7,73

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, 2021

Pada pesentase Pasangan ber-Akte Perkawinan telah mencapai 100 persen dengan asumsi yaitu akte yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung berdasarkan pasangan non muslim yang melaporkan perkawinannya ke catatan sipil Kota Bandar Lampung.

7. Pemberdayaan Masyarakat

a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui satuan kerja terkait telah melakukan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan pemberdayaan masyarakat, diantaranya pembinaan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan dan Kecamatan. Berikut adalah data yang menunjukkan persentase kelompok binaan LPM tahun 2016-2020 :

Tabel 2.89 Persentase Kelompok Binaan LPM Tahun 2016-2020

Tahun	Kelompok Binaan LPM (Persen)
2016	48
2017	60
2018	60
2019	95
2020	95

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung, 2021

b. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Berikut adalah data yang menunjukkan jumlah LSM Tahun 2016-2020:

Tabel 2.90 Jumlah LSM Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat
2016	53
2017	70
2018	118
2019	136
2020	151

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung, 2021

Data tersebut menunjukkan terjadinya peningkatan jumlah LSM yang terdaftar pada Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung. Akan tetapi terjadi penurunan LSM baru yang mendaftar pada kurun waktu dua tahun terakhir. Hal ini terkait dengan diperketatnya regulasi tentang keormasaan dari mulai tatacara pendaftaran sampai dengan hak dan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Cakupan Pasangan Usia Subur yang Istrinya di Bawah Usia 20 Tahun

Berikut adalah data cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi Peserta KB Aktif Tahun 2016-2020:

Tabel 2.91 Cakupan Pasangan Usia Subur yang Istrinya di Bawah Usia 20 (Dua Puluh) Tahun

Tahun	Cakupan
2016	2,79
2017	2,95
2018	0,27
2019	0,28
2020	0,30

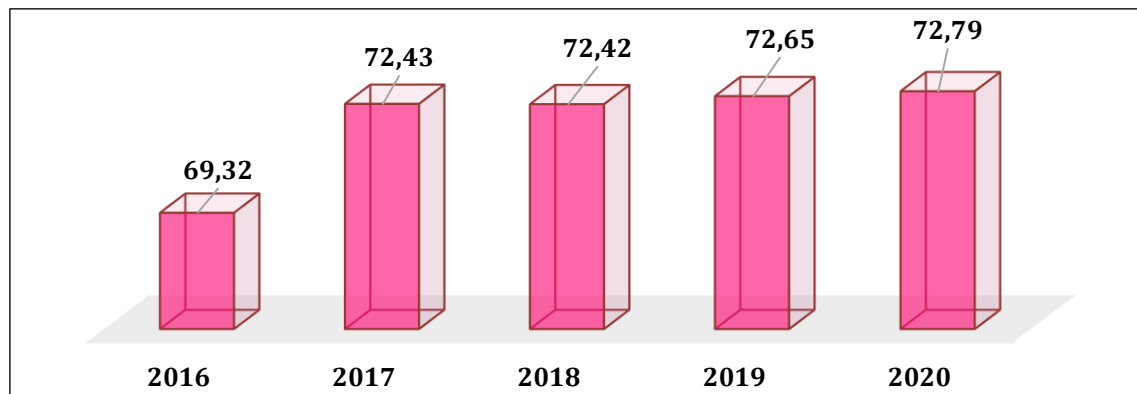
Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung, 2021

Data tersebut menunjukkan terjadi penurunan yang signifikan terhadap PUS yang Istrinya di Bawah usia 20 Tahun pada kurun waktu tahun 2018 – tahun 2020 dibandingkan Tahun 2017 dan tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa pendewasaan usia perkawinan di Kota Bandar Lampung cukup berhasil.

b. Cakupan Sasaran PUS menjadi Peserta KB Aktif

Berikut adalah data cakupan PUS menjadi Peserta KB Aktif Tahun 2016-2020:

Diagram 2.16 Cakupan Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB Aktif Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung, 2021

Data tersebut menunjukkan bahwa sejak Tahun 2016 terjadi peningkatan jumlah cakupan Pasangan Usia Subur yang menjadi peserta KB aktif sebagai dampak yang muncul atas meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap program Keluarga Berencana (KB) sekaligus keberhasilan Pemerintah Kota Bandar Lampung mengendalikan jumlah penduduk.

c. Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (*Unmeet Need*)

Unmeet need dapat didefinisikan sebagai kelompok yang belum terpenuhi kebutuhan kontrasepsinya, mencakup semua pria atau wanita usia subur yang sudah menikah atau hidup bersama dan dianggap aktif secara seksual yang tidak menggunakan metode kontrasepsi, baik yang tidak ingin punya anak lagi ataupun menunda kelahiran berikutnya. Berikut adalah data cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (*Unmeet Need*) Tahun 2016-2020:

Tabel 2.92 Cakupan Pasangan Usia Subur yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (*Unmeet Need*) Tahun 2016-2020

Tahun	Cakupan (%)
2016	12,93
2017	12,25
2018	27,57
2019	11,62
2020	11,50

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung, 2021

Data tersebut diatas menunjukkan bahwa terjadi penurunan *Unmeet Need* pada Tahun 2020 yaitu menjadi sebesar 11,50% dibandingkan tahun sebelumnya.

Dari data cakupan PUS menjadi peserta KB Aktif dengan Cakupan PUS yang ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (*Unmeet Need*) yang telah disajikan diatas terlihat bahwa kedua data tersebut tidak memiliki korelasi secara langsung, artinya angka peningkatan PUS menjadi peserta KB Aktif tidak berbanding lurus dengan angka penurunan *Unmeet Need*. Hal ini disebabkan karena Pasangan Usia Subur yang menjadi Peserta Baru yang berasal dari orang yang pertama kali ber KB atau yang pasca persalinan dan keguguran, jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan Pasangan Usia Subur *Unmeet Need* yang menjadi Peserta Baru.

Itu sebabnya peningkatan cakupan Peserta Aktif lebih besar dibandingkan dengan penurunan angka *Unmeet Need*. Masih rendahnya *Unmeet Need* dikarenakan rata-rata Peserta Aktif memang tidak mau Ber-KB, baik yang

tidak ingin mempunyai anak lagi atau pun menunda kelahiran berikutnya, bukan karena tidak adanya pelayanan KB.

9. Perhubungan

a. Tingkat Pelayanan pada Jalan Arteri Primer

Tingkat pelayanan adalah kemampuan ruas jalan dan/atau persimpangan untuk menampung lalu lintas pada keadaan tertentu. Penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan merupakan kegiatan penentuan tingkat pelayanan ruas jalan dan/atau persimpangan berdasarkan indikator tingkat pelayanan. Jalan arteri primer menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antarpusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah. Untuk jalan arteri primer di Kota Bandar Lampung, tingkat pelayanan sekurang-kurangnya B atau dengan kondisi: 1) arus stabil dengan volume lalu lintas sedang dan kecepatan mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas; 2) kepadatan lalu lintas rendah hambatan internal lalu lintas belum mempengaruhi kecepatan; 3) pengemudi masih punya cukup kebebasan untuk memilih kecepatannya dan lajur jalan yang digunakan. Tingkat pelayanan pada jalan arteri primer sampai dengan tahun 2020 yaitu C.

b. Tingkat Pelayanan pada Jalan Arteri Sekunder

Jalan arteri sekunder adalah jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi, dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk masyarakat dalam kota, atau juga disebut sebagai jalan protokol. Untuk jalan arteri sekunder di Bandar Lampung, tingkat pelayanan sekurang-kurangnya C atau dengan kondisi: 1) arus stabil tetapi kecepatan dan pergerakan kendaraan dikendalikan oleh volume lalu lintas yang lebih tinggi; 2) kepadatan lalu lintas sedang karena hambatan internal lalu lintas meningkat; 3) pengemudi memiliki keterbatasan untuk memilih kecepatan, pindah lajur atau mendahului. Tingkat pelayanan pada jalan arteri sekunder sampai dengan 2020 yaitu C.

c. Tingkat Pelayanan pada Jalan Kolektor Primer

Jalan kolektor primer adalah jalan yang dikembangkan untuk melayani dan menghubungkan antarpusat kegiatan wilayah dan pusat kegiatan lokal dan atau kawasan-kawasan berskala kecil dan atau pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan pengumpan lokal. Untuk jalan kolektor Primer di Bandar Lampung, tingkat pelayanan sekurang-kurangnya B. Tingkat pelayanan pada jalan kolektor primer sampai dengan Tahun 2020 yaitu D.

d. Tingkat Pelayanan pada Jalan Kolektor Sekunder

Jalan kolektor sekunder adalah jalan yang melayani angkutan pengumpulan atau pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk masyarakat di dalam kota. Untuk Jalan Kolektor Sekunder di Bandar Lampung, tingkat pelayanan sekurang-kurangnya C. Tingkat pelayanan pada jalan kolektor sekunder sampai dengan Tahun 2020 yaitu C.

e. Tingkat Pelayanan pada Jalan Lokal Sekunder

Jalan lokal sekunder adalah menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan. Untuk jalan lokal sekunder di Bandar Lampung, tingkat pelayanan sekurang-kurangnya D. Tingkat pelayanan pada jalan lokal sekunder sampai dengan Tahun 2020 yaitu B.

f. Pelayanan Terminal

Pada saat ini terdapat 6 (enam) terminal di Kota Bandar Lampung yaitu Terminal Kemiling, Terminal Rajabasa Raya Tipe C, Terminal Pasar Bawah, Terminal Lempasing, Terminal Sukaraja dan Terminal Panjang.

Pelayanan terminal yang dilakukan Dinas Perhubungan antara lain:

- 1) Melaksanakan kegiatan penertiban dan pengawasan angkutan umum yang ada di wilayah Kota Bandar Lampung;

- 2) Membantu pelayanan posko angkutan lebaran, natal dan tahun baru dan pengendalian lalu lintas di sekitar daerah jangkauan terminal;
- 3) Memungut retribusi terminal dan retribusi kekayaan daerah seperti sewa WC/KM.

g. Pelayanan Parkir

Pelayanan perparkiran yang dilakukan Dinas Perhubungan yaitu memungut retribusi parkir di tepi jalan. Berikut adalah data pelayanan parkir Tahun 2016-2020 :

Tabel 2.93 Pelayanan Parkir Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Titik Parkir	837	621	621	621	190
Ruas Jalan	92	92	92	92	21
Pengelola Wilayah Parkir	19	15	15	15	5
Juru Parkir	937	937	937	844	190

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, 2021

h. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

Pelayanan pengujian kendaraan bermotor dilakukan oleh Dinas Perhubungan yaitu Retribusi Kendaraan Bermotor. Berikut adalah data pelayanan pengujian kendaraan bermotor Tahun 2016-2020 :

Tabel 2.94 Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun 2016-2020

Tahun	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
2016	13.946 Kendaraan Wajib Uji
2017	12.955 Kendaraan Wajib Uji
2018	10.929 Kendaraan Wajib Uji
2019	10.279 Kendaraan Wajib Uji
2020	13.048 Kendaraan Wajib Uji

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, 2021

Alat uji yang tersedia sebanyak 7 (tujuh) unit terdiri dari *Head Light Tester*, *Slide Slip Tester*, *Axle Load Tester*, *Brake Slip Tester*, dan *Speedometer Tester* yang telah dioperasikan sejak Tahun 1974 serta pengadaan Alat uji *CoHc Tester* dan *Smoke Tester* di Tahun 2020.

i. Pelayanan Sarana dan Prasarana dan Pembinaan Keselamatan

Pelayanan sarana, prasarana dan pembinaan keselamatan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung yaitu melakukan pembinaan terhadap Uji Pertama Kendaraan Wajib Uji dan Penetapan Teknis Laik Jalan, Pembinaan Prasarana Angkutan Umum serta Pembinaan Keselamatan Berlalu Lintas Lingkup Angkutan Umum.

10. Komunikasi dan Informatika

Pada Tahun 2020, persentase rumah tangga yang mengakses internet sebesar 90 persen, meningkat dibandingkan Tahun 2019 yaitu sebesar 85 persen, Tahun 2017 dan 2018 yaitu sebesar 80 persen dan 2016 yaitu sebesar 70 persen. Persentase layanan telekomunikasi, informasi, dan komunikasi (TIK) pada Tahun 2020 meningkat menjadi sebesar 90 persen dibandingkan Tahun 2019 sebesar 85 persen, Tahun 2017 dan 2018 sebesar 80 persen dan Tahun 2016 sebesar 70 persen. Pembangunan internet untuk area publik di Kota Bandar Lampung pada Tahun 2020 sama dengan Tahun 2019 yaitu sebanyak 46 titik, meningkat dibandingkan Tahun 2017 dan 2018 sebanyak 34 titik dan Tahun 2016 yaitu 27 titik.

11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

a. Peningkatan Produktivitas Koperasi

Berikut adalah data yang menunjukkan Peningkatan Produktivitas Koperasi Tahun 2016-2020:

Tabel 2.95 Peningkatan Produktivitas Koperasi Tahun 2016-2020

Tahun	Volume Usaha (Milyar)	Peningkatan (%)
2016	562,868	0,35
2017	512,359	-8,98
2018	500,887	-2,23
2019	488,676	-2,44
2020	464,635	-2,26

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2021

Data tersebut menunjukkan terjadi penurunan pada produktivitas koperasi.

b. Peningkatan Produktivitas Usaha Kecil dan Menengah

Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan unsur utama pembangunan ekonomi yang saat ini menjadi prioritas untuk dikembangkan. Hal ini dikarenakan UKM mampu mengurangi masalah kesenjangan antargolongan pendapatan dan antar pelaku usaha, pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja. Lebih dari itu, pengembangan UKM mampu memperluas basis ekonomi dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempercepat perubahan struktural, yaitu meningkatnya perekonomian daerah dan ketahanan nasional. Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu meningkatkan perannya dalam membina UKM dan menciptakan iklim usaha yang baik sehingga produktivitas UKM tiap tahun selalu meningkat. Berikut adalah data yang menunjukkan jumlah UKM non BPR/LKM Tahun 2016-2020:

Tabel 2.96 Jumlah UKM non BPR/LKM Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah UKM non BPR/LKM
2016	40.851
2017	44.232
2018	46.324
2019	51.709
2020	57.019

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandar Lampung, 2021

12. Penanaman Modal

a. Pertumbuhan Penanaman Modal Asing

Berikut adalah data yang menunjukkan Pertumbuhan Penanaman Modal (PMA) Asing Tahun 2016-2020:

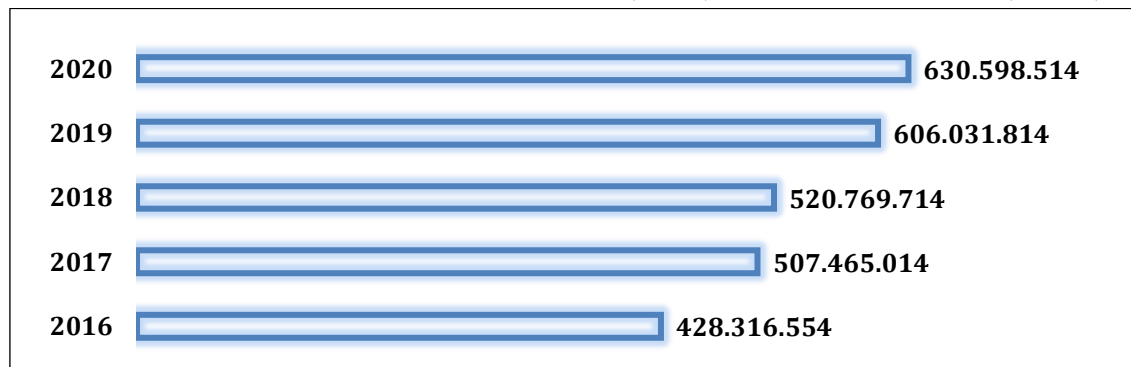
Tabel 2.97 Pertumbuhan Penanaman Modal Asing Tahun 2016-2020

Tahun	PMA (Dolar)	Pertumbuhan (%)
2016	428.316.554	21,71
2017	507.465.014	18,48
2018	520.769.714	2,62
2019	606.031.814	16,37
2020	630.598.514	4,05

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandar Lampung, 2021



Diagram 2.17 Penanaman Modal Asing (PMA) Tahun 2016-2020 (Dolar)



Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandar Lampung, 2021

Data tersebut menunjukkan bahwa PMA di Bandar Lampung terus meningkat walaupun pertumbuhannya selama 5 (lima) tahun terakhir cenderung fluktuatif.

b. Pertumbuhan Penanaman Modal Dalam Negeri

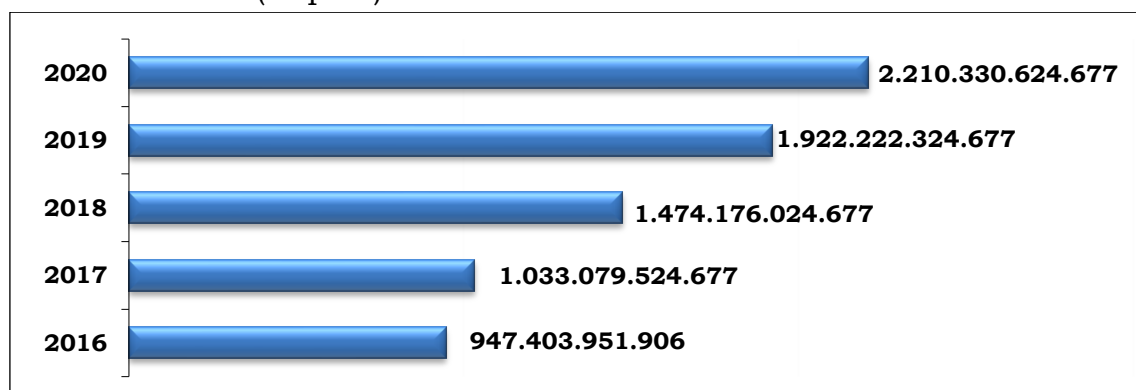
Berikut adalah data yang menunjukkan Pertumbuhan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Tahun 2016-2020:

Tabel 2.98 Pertumbuhan Penanaman Modal Dalam Negeri Tahun 2016-2020

Tahun	PMDN (Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2016	947.403.951.906	6,78
2017	1.033.079.524.677	9,04
2018	1.474.176.024.677	42,70
2019	1.922.222.324.677	30,39
2020	2.210.330.624.677	14,99

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandar Lampung, 2021

Diagram 2.18 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Tahun 2016-2020 (Rupiah)



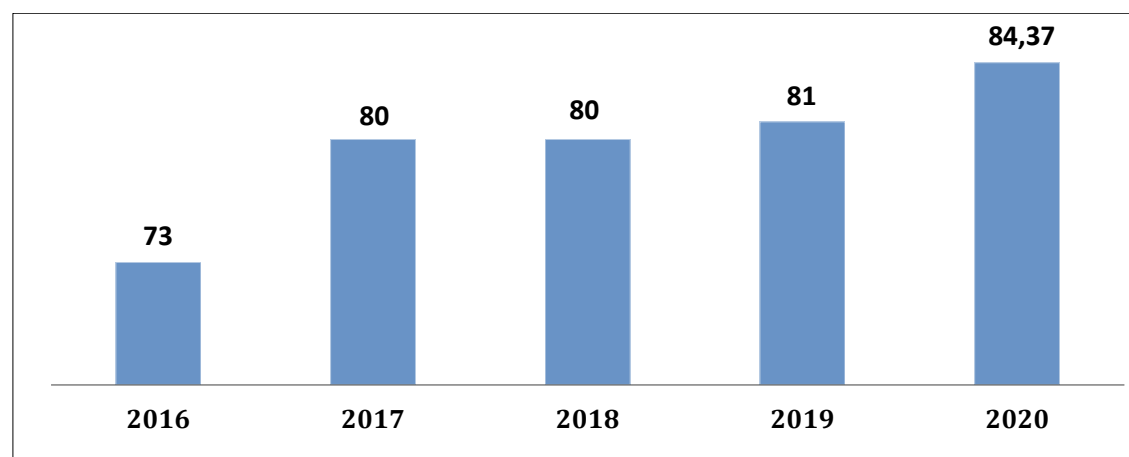
Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandar Lampung, 2021

Data tersebut menunjukkan terjadi peningkatan pertumbuhan jumlah modal yang diinvestasikan di Kota Bandar Lampung selama 3 (tiga) tahun terakhir. Hal ini berarti Bandar Lampung memiliki potensi yang menjanjikan bagi investor. Hal yang tidak kalah pentingnya untuk menjaga kondisi ini adalah menjaga iklim investasi agar tetap kondusif seperti ketersediaan jaminan sarana transportasi, keamanan, perizinan, dan lain lain.

c. IKM Bidang Perizinan

Berikut adalah data yang menunjukkan IKM Bidang Perizinan Tahun 2016-2020:

Diagram 2.19 Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandar Lampung, 2021

13. Kepemudaan dan Olah Raga

a. Organisasi Pemuda Aktif

Berdasarkan data Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Bandar Lampung, organisasi pemuda yang aktif di Kota Bandar Lampung Tahun 2020 sebanyak 32 organisasi dari 38 organisasi pemuda yang ada. Berikut adalah data yang menunjukkan persentase organisasi pemuda yang aktif Tahun 2016-2020:

Tabel 2.99 Organisasi Pemuda yang Aktif di Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Organisasi Pemuda	Organisasi Pemuda yang Aktif	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif
2016	692	173	25
2017	225	102	40
2018	185	102	50
2019	45	32	70
2020	38	32	85

Sumber : Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bandar Lampung, 2021

Dari data diatas terlihat bahwa selama 5 (lima) tahun terakhir, organisasi pemuda di Kota Bandar Lampung terus menurun baik jumlah organisasi secara keseluruhan maupun jumlah organisasi pemuda yang aktif, meskipun secara persentase organisasi pemuda yang aktif semakin meningkat. Kedepan diharapkan jumlah tersebut terus meningkat diiringi dengan meningkatnya peran dan partisipasi pemuda di Kota Bandar Lampung.

b. Jumlah Event Olahraga Tingkat Kota/Kabupaten yang Terlaksana

Pengembangan kawasan olahraga terpadu di Kota Bandar Lampung saat ini didasarkan pada upaya untuk menciptakan atlet-atlet handal di berbagai bidang di tingkat nasional maupun internasional. Untuk itu perlu didukung dengan pengembangan sarana dan prasarana penunjang yang berskala nasional dan internasional, baik untuk latihan maupun melaksanakan event-event olahraga tingkat Kota sebagai upaya peningkatan kemampuan atlet di kancah nasional maupun internasional. Pada Tahun 2018, telah dilaksanakan 2 (dua) event olah raga tingkat Kota, yaitu Kejuaraan Wushu dan Kejuaraan Bola Volley. Terdapat peningkatan pada Tahun 2019 menjadi 11 (sebelas) event olah raga yaitu Kejuaraan Kempo, Futsal, Wushu, Tenis Meja, Tekwondo, Sepak Bola, Judo, Pencak Silat, Karate, Atletik, dan Bola Volly. Pada Tahun 2020, event olahraga tidak diadakan dikarenakan *Pandemi Covid-19*.

c. Sarana Olahraga

Berikut adalah data sarana olahraga umum yang dimiliki Pemerintah Kota Bandar Lampung sampai dengan Tahun 2020:

Tabel 2.100 Sarana Prasarana Olahraga sampai dengan Tahun 2020

Sarana/Prasarana	Jumlah	Lokasi
Stadion Olahraga	1	Pahoman, Bandar Lampung
Lapangan Tenis Indoor	1	Pahoman, Bandar Lampung
Lapangan Tenis Outdoor	1	Kemiling, Bandar Lampung
Lapangan Sepakbola	1	Bandar Lampung

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandar Lampung, 2021

14. Statistik

Data statistik merupakan komponen sekaligus instrumen strategis dalam sebuah pemerintahan, bahkan disebut pula statistik menentukan arah kebijakan pembangunan. Berdasarkan UU nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 31 mengharuskan perencanaan pembangunan didasarkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Data statistik itu bersifat spesifik, terukur, terjangkau, relevan dan ada masa waktunya, sesuai dengan kebutuhan dalam hal penentu dan kebijakan pemerintah. Selain itu, statistik juga berguna untuk mengevaluasi dampak kebijakan pembangunan yaitu berupa kinerja dalam waktu yang telah berjalan perlu indikator kualitatif dan kuantitatif.

Pembangunan di bidang statistik diarahkan pada upaya penyediaan data dan informasi statistik yang cepat, tepat, rinci dan relevan sesuai kebutuhan masyarakat dan terpublikasinya data dan informasi statistik yang cepat, tepat, rinci dan relevan sesuai kebutuhan masyarakat dan kebutuhan manajemen kebijakan serta meningkatnya mutu pelayanan statistik daerah.

Oleh karena itu, sebagai upaya penyediaan data dan informasi statistik daerah, Pemerintah Kota Bandar Lampung telah melakukan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik selama kurun waktu lebih dari lima tahun

terakhir, hal tersebut terwujud dengan tersusun dokumen indikator ekonomi daerah berupa Bandar Lampung Dalam Angka (BLDA) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bandar Lampung.

15. Persandian

Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.

Saat ini merupakan era keterbukaan dan globalisasi. Era ini berdampak pada keterbukaan informasi, dimana untuk memperoleh informasi sangat-sangat mudah, bahkan dijamin oleh Undang-Undang. Sebagaimana warga negara Indonesia memiliki kebebasan untuk mengakses informasi yang tertuang dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Namun bukan berarti bahwa kebebasan tersebut tanpa batas. Kebebasan untuk mengakses informasi dibatasi oleh informasi yang dikecualikan, dimana informasi ini wajib dilindungi agar selama masa berlakunya, informasi yang dikecualikan ini tetap terjaga kerahasiaan, keutuhan dan keasliannya, untuk menjaga stabilitas negara.

Urusan pemerintahan bidang persandian tergabung bersama urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, dan statistik serta perumpunan urusan tersebut harus diwadahi dalam perangkat daerah berbentuk dinas. Berdasarkan hal tersebut persandian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung.

Praktek persandian pada dasarnya adalah kegiatan pengamanan kegiatan komunikasi dan isi dari komunikasi yang dilakukan oleh intern pemerintah dalam pelayanan publik salah satunya tersedianya call center di Kota Bandar Lampung.

16. Kebudayaan

Sebagai bentuk dan upaya dalam mempromosikan kebudayaan daerah, Pemerintah Kota Bandar Lampung setiap tahunnya selalu mengikuti berbagai festival seni dan budaya baik lokal maupun luar daerah, yang terdiri dari Pentas Seni Budaya, Pagelaran Seni Budaya, Pentas Tari Kreasi, Festival dan Parade, Pawai Budaya, Carnaval Budaya/Pawai Budaya Nusantara, Gebyar Pesona Budaya. Hal tersebut akan selalu ditingkatkan agar budaya Lampung lebih dikenal dan berdampak pada kunjungan wisatawan ke Kota Bandar Lampung.

Peranan Kota Bandar Lampung dalam mengembangkan kebudayaan juga dapat terlihat dari pengembangan dan pemeliharaan peninggalan budaya yang ada di Kota Bandar Lampung. Berikut adalah beberapa objek wisata Seni Budaya yang ada di Kota Bandar Lampung:

Tabel 2.101 Objek Wisata Seni Budaya di Kota Bandar Lampung

Objek Wisata Budaya	Alamat Objek Wisata Budaya
Bunker Peninggalan Jepang	Jl. Amir Hamzah Teluk Betung
Goa Jajar	Jl. Juanda/Kesehatan Pahoman
Goa Cepit	Gunung Betung Tanjungkarang
Kelanteng Vihara Thay Hin Bio, Jl. Ikan Kakap, Telukbetung Selatan	Bangunan peribadatan umat Budha
Masjid Tua Al-Anwar, Jl. Laks. Mahayati, Telukbetung Selatan	Bentuk arsitektur dan nilai historisnya
Pura Way Lunik	Bangunan peribadatan besar bagi umat Hindu
Monumen Krakatau (Taman Dipangga), Jl. W.R. Supratman, Telukbetung Utara	Monumen bersejarah dan taman
Museum Lampung “Ruwa Jurai”, Jl. Z.A. P. Alam Gedung Meneng	Museum dengan koleksi hasil kebudayaan masyarakat Lampung
Anjungan Lampung, Way Halim	Pusat Cindera Mata, Kuliner dan Kegiatan Seni Budaya, serta Replika Rumah Adat Lima Belas kabupaten/kota.
Rumah Adat Lampung Dalam Olok Gading, Jl. Basuki Rachmat, Telukbetung Utara	Bentuk arsitektur tradisional Lampung
Taman Budaya, Jl. Cut Nyak Dien, Tanjung Karang Pusat	Taman tempat rekreasi dan pertunjukan budaya
Lamban Balak Kedatun Keagungan Lampung	Rumah adat, dan perabot peninggalan Kerajaan Lampung
Kampung De Berow	Replika Kapal De Berow di Kampung De”Brow
Situs Keratuan Dibalaw	Peninggalan sejarah kerajaan Keratuan Balau di kedamaian
Reservoir PDAM Way Rilau	Peninggalan sejarah Belanda di Imam Bonjol
Jembatan Beton	Peninggalan sejarah Belanda di Kecamatan Telukbetung Selatan
Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Peninggalan Belanda	Di Telukbetung Selatan

Objek Wisata Budaya	Alamat Objek Wisata Budaya
Stasiun Kereta Api Jl Kotaraja Tanjung Karang Pusat	Peninggalan sejarah Belanda
Rumah Adat Jajar Intan Kedamaian	Bentuk arsitektur tradisional Lampung
Gereja Marturia Jl Imam Bonjol Tanjung Karang	Peninggalan sejarah Belanda

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, 2021

17. Perpustakaan

Minat baca masyarakat Kota Bandar Lampung dapat terlihat dari jumlah pengunjung di perpustakaan daerah Kota Bandar Lampung. Pada kurun waktu dua tahun terakhir, jumlah pengunjung perpustakaan mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena pada Tahun 2019 dilaksanakan pembangunan rehab kantor sebagai upaya peningkatan fasilitas, sarana dan prasarana perpustakaan sehingga menyebabkan operasional perpustakaan terganggu. Sedangkan untuk penurunan jumlah pengunjung perpustakaan di Tahun 2020, lebih dikarenakan *Pandemi Covid-19* yang menyebabkan adanya pembatasan sosial sehingga mengakibatkan penurunan jumlah pengunjung perpustakaan secara drastis. Berikut adalah data yang menunjukkan jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah Tahun 2016-2020:

Tabel 2.102 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Pengunjung (Orang)
2016	14.223
2017	11.284
2018	12.457
2019	8.012
2020	3.791

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung, 2021

Berikut adalah data yang menunjukkan jumlah perpustakaan di Kota Bandar Lampung :

Tabel 2.103 Jumlah Perpustakaan di Kota Bandar Lampung

Uraian	Jumlah Perpustakaan
Perpustakaan Perguruan Tinggi	25
Perpustakaan Sekolah dan Madrasah	145
Perpustakaan Umum Kota	1
Perpustakaan Umum Kecamatan	8
Perpustakaan Umum Kelurahan	63

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung, 2021

Perpustakaan juga diarahkan untuk memperkuat perannya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kemampuan literasi serta dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan mengurangi kesenjangan akses informasi. Perpustakaan berbasis *Inklusi* sosial juga telah dilaksanakan antara lain dengan melakukan pendampingan ke TBM SURYA dalam memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk dapat menciptakan usaha ekonomi baru serta memberikan bantuan buku yang berkaitan dengan kreativitas dan keterampilan.

18. Kearsipan

Penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pengelolaan, pembinaan serta pengawasan kearsipan dalam suatu sistem kearsipan yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya. Berikut adalah data arsip terpilah berupa arsip statis dan dinamis yang berasal dari masing-masing Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2020 :

Tabel 2.104 Jumlah Data Arsip Terpilah Tahun 2016-2020

Tahun	Data Arsip Terpilah
2016	2.000 berkas
2017	2.205 berkas
2018	1.500 berkas
2019	2.400 berkas
2020	611 berkas

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandar Lampung, 2021

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

a. Produksi Perikanan Per Tahun

Berikut adalah data yang menunjukkan produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya Tahun 2016-2020:

Tabel 2.105 Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya Tahun 2016-2020 (Ton)

Kategori	2016	2017	2018	2019	2020
Produksi Perikanan Tangkap (ton)	628,76	613,10	3.200	3.404	3.232,02
Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	110,31	118,23	113,92	115,55	131,40
Jumlah	739,07	731,33	3.313,92	3.519,55	3.363,42

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung, 2021

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia serta sumber data yang terbatas hanya dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang ada di Kota Bandar Lampung menyebabkan pada tahun 2016 dan 2017 data produksi perikanan tangkap relatif rendah. Sejak tahun 2018 sumber data produksi perikanan tangkap diperluas yaitu (1) bersumber dari TPI atau disebut dengan sumber data pelabuhan dan (2) bersumber dari data yang bukan dari pelabuhan atau non pelabuhan. Sumber data non pelabuhan ini dijadikan data perikanan tangkap dikarenakan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan kepada nelayan-nelayan skala kecil yang hasil tangkapannya tidak dilelang di TPI dikarenakan hasil tangkapannya tidak banyak. Namun demikian, jumlah nelayan kecil di Kota Bandar Lampung ini cukup banyak sehingga terjadi kenaikan produksi perikanan tangkap yang signifikan yang merupakan gabungan dari dua sumber data tersebut. Sedangkan pada tahun 2020 terjadi penurunan produksi perikanan tangkap akibat adanya *Pandemi Covid-19* yang juga berdampak terhadap penjualan hasil tangkapan (ikan banyak tetapi pembelinya yang berkurang) sehingga trip untuk melakukan penangkapan ikan semakin jarang.

Adapun untuk perikanan budidaya terjadinya fluktuasi produksi perikanan budidaya disebabkan cuaca atau terjadinya musim kemarau yang cukup panjang dan juga terjadinya degradasi lahan yang banyak berubah menjadi Kawasan permukiman. Pada tahun 2019 dan 2020 terjadi peningkatan

produksi perikanan budidaya disebabkan oleh adanya bantuan sarana dan prasarana perikanan budidaya yang dananya bersumber dari APBN dan juga bantuan langsung dari Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada kelompok-kelompok pembudidaya ikan di Kota bandar Lampung baik berupa bantuan bibit/benih, pakan, *bioflog* dan juga pendampingan yang dilakukan oleh penyuluh perikanan.

2. Pariwisata

a. Kunjungan Wisata

Berikut adalah data kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara ke Kota Bandar Lampung berdasarkan jumlah tamu hotel Tahun 2016-2020:

Tabel 2.106 Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2020

Wisatawan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Nusantara	111.612	117.193	599.460	1.064.493	819.492
Mancanegara	313	339	4.589	22.218	1.767

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung, 2021

Keberadaan Jalan Tol Trans Sumatera memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di Bandar Lampung khususnya pada sektor Pariwisata. Hal ini terlihat dengan adanya peningkatan kunjungan wisatawan berdasarkan jumlah tamu hotel baik wisatawan nusantara maupun mancanegara yang cukup signifikan pada Tahun 2019. Namun demikian pada tahun 2020 terjadi penurunan pada jumlah kunjungan wisatawan akibat *Pandemi Covid-19*.

3. Pertanian

a. Produksi Tanaman Pangan

Berikut adalah data yang menunjukkan Produksi Tanaman Pangan di Tahun 2016-2020:

Tabel 2.107 Produksi Tanaman Pangan Tahun 2016–2020

Tanaman	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Padi Sawah					
Luas panen (Ha)	1.740,3	1.702,4	1.658,90	1.637,60	1.226,3
Produksi (ton)	10.093,74	10.239,94	9.540,21	9.269,65	7.110,06
Padi Ladang					
Luas panen (Ha)	-	-	50	-	-
Produksi (ton)	-	-	287,54	-	-
Ubi Kayu					
Luas panen (Ha)	64	65	43	75	53
Produksi (ton)	1.477,6	1.501,3	982,55	1.785	1.245,5
Ubi Jalar					
Luas panen (Ha)	9	15	16	11	13
Produksi (ton)	84,3	140,63	148,00	107,50	117,87
Jagung					
Luas panen (Ha)	111	116	212,5	157	217
Produksi (ton)	530,68	556,8	1.005,22	771,91	1.066,55
Kacang Tanah					
Luas panen (Ha)	16	15	6	-	6
Produksi (ton)	17,04	16,07	8,1	-	8,2

Sumber : Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung, 2021

Terdapat penurunan luas panen dan produksi padi sawah sejak tahun 2017, demikian juga dengan produktivitasnya. Alih fungsi lahan seperti untuk perumahan, industri, dan penggunaan lainnya akan berpengaruh terhadap produksi pertanian dan luas panen di masa yang akan datang. Hal ini perlu disikapi oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan mengefektifkan lahan pekarangan untuk dijadikan kebun rumah tangga. Diharapkan dengan adanya kebun rumah tangga ini akan menambah sisi ekonomi keluarga sekaligus menjaga ketahanan pangan dan produktivitas pertanian di Kota Bandar Lampung.

b. Produksi Tanaman Holtikultura (Sayuran)

Berikut adalah data yang menunjukkan Produktivitas Tanaman Sayuran Tahun 2016–2020:

Tabel 2.108 Produktivitas Tanaman Sayuran Tahun 2016–2020

Tanaman	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Buncis					
Luas panen (Ha)	11	16	15	11	49
Produksi (ton)	238	14	9	9,3	296

Tanaman	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kacang Panjang					
Luas panen (Ha)	25	15	17	12	35
Produksi (ton)	274	21,8	13,7	14,9	163,5
Kangkung					
Luas panen (Ha)	136	108	103	99	107
Produksi (ton)	2.475	84,3	60,7	49,2	399,6
Bayam					
Luas panen (Ha)	132	105	91	94	88
Produksi (ton)	1.767	94,1	69,6	69,9	351,1
Terong					
Luas panen (Ha)	23	11	21	33	38
Produksi (ton)	307	42,1	21	69,9	351,1
Ketimun					
Luas panen (Ha)	8	12	17	19	16
Produksi (ton)	311	10,4	15,5	15,6	56,4
Sawi					
Luas panen (Ha)	146	116	114	117	108
Produksi (ton)	7.452	69,2	74,6	118,8	473,2
Cabe					
Luas panen (Ha)	20	25	24	23	132
Produksi (ton)	144	22,2	14,6	33	540,7
Tomat					
Luas panen (Ha)	18	18	17	17	37
Produksi (ton)	145	16,5	11,4	16,9	201,6

Sumber : Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung, 2021

Secara umum, terdapat peningkatan produksi tanaman sayuran pada Tahun 2020. Mengefektifkan lahan pekarangan untuk menjadi kebun rumah tangga juga menjadi solusi untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat dan produktivitas pertanian di Kota Bandar Lampung kedepan.

c. Populasi Ternak

Berikut adalah data yang menunjukkan Populasi ternak Tahun 2016-2020:

Tabel 2.109 Populasi Ternak Besar, Kecil dan Unggas Tahun 2016–2020

Ternak	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2019
Sapi potong	1.491	1.189	1.246	1.108	1.064
Sapi perah	13	13	13	13	-
Kerbau	67	61	69	54	24
Kuda	30	25	25	36	70
Kambing	3.327	3.129	3.166	3.207	2.895
Kambing perah	37	21	21	8	-
Domba	401	345	385	358	295
Kelinci	1.620	1.558	1.575	1.055	690
Ayam Buras	39.940	38.174	38.413	29.339	26.250
Ayam Petelur	12.000	12.000	11.500	4.500	5.000
Ayam pedaging	23.000	23.000	21.500	12.700	24.500
Layer	-	-	-	-	-

Ternak	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2019
Broiler	-	-	-	-	-
Itik/entok	3.435	2.733	2.657	2.470	2.045
Puyuh	15.329	14.877	10.660	8.446	3.000
Merpati	5.211	5.048	4.752	4.643	3.901

Sumber : Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung, 2021

d. Kontribusi Kategori Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB

Berikut adalah data yang menunjukkan Kontribusi Kategori Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB Tahun 2016-2019:

Tabel 2.110 Persentase Kontribusi Kategori Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB Tahun 2016-2020

Lapangan Usaha	Tahun				
	2016	2017	2018	2019*	2020**
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,32	4,08	3,85	3,70	3,77

Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka, Badan Pusat Statistik 2021

Data tersebut menunjukkan bahwa Kontribusi Kategori Pertanian terhadap PDRB Kota Bandar Lampung cenderung menurun tiap tahunnya.

4. Perdagangan

Berikut adalah data pasar tradisional dan pasar modern Tahun 2016-2020:

Tabel 2.111 Jumlah Pasar Tradisional dan Modern Tahun 2016-2020

Pasar	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Tradisional	31	31	34	34	33
Moderen	16	22	21	22	31

Sumber : Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, 2021

Kontribusi kategori perdagangan (perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor) terhadap PDRB Kota Bandar Lampung selama kurun waktu 2016 sampai dengan 2020 berturut-turut sebesar 14,68 persen; 14,19 persen; 14,15 persen; 14,36 persen dan 13,30 persen. Jika dilihat dari angka tersebut, kontribusi Kategori Perdagangan terhadap perekonomian Kota Bandar Lampung selama 5 tahun terakhir berada diatas

13 persen. Berikut adalah data Pertumbuhan Kategori Perdagangan Tahun 2016-2020:

Tabel 2.112 Persentase Pertumbuhan Kategori Perdagangan Tahun 2016-2020

Lapangan Usaha	Tahun				
	2016	2017	2018	2019*	2020**
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,60	3,96	4,19	6,09	-10,00

Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka, Badan Pusat Statistik 2020

Data tersebut menunjukkan bahwa selama kurun waktu tahun 2016-2019, PDRB menurut lapangan usaha dengan Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mengalami peningkatan pertumbuhan setiap tahunnya. Namun pada Tahun 2020, pertumbuhan Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor berkontraksi sebesar 10,00 persen.

5. Perindustrian

Pertumbuhan Industri Kecil menengah di Kota Bandar Lampung cenderung berfluktuasi dari Tahun 2016-2020. Berikut data yang menunjukkan Pertumbuhan IKM Tahun 2016-2020:

Tabel 2.113 Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
IKM	6,09	5,85	3,61	4,03	2,38

Sumber : Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung, 2021

Berikut adalah data Pertumbuhan Kategori Industri Pengolahan Tahun 2016-2020:

Tabel 2.114 Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019*	2020**
Industri Pengolahan	6,25	6,02	6,12	6,86	-4,27

Sumber : Kota Bandar Lampung Dalam Angka, Badan Pusat Statistik 2021

Data tersebut menunjukkan bahwa Kategori Industri Pengolahan mengalami pertumbuhan yang cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Pada Tahun 2019 pertumbuhan Kategori Industri Pengolahan mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2018. Sedangkan Tahun 2020, pertumbuhan Kategori Industri Pengolahan berkontraksi sebesar 4,27 persen.

6. Transmigrasi

Urusan transmigrasi merupakan urusan pemerintahan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dan urusan ini baru dilaksanakan pada Tahun 2017. Program transmigrasi di Kota Bandar Lampung bertujuan untuk membantu daerah-daerah yang padat penduduknya, terutama untuk wilayah kumuh yang padat penduduk.

Pada Tahun 2019 telah dilaksanakan sosialisasi di 5 (lima) kecamatan guna menjangkau masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi dengan peserta sebanyak 80 orang. Sehingga selama kurun waktu Tahun 2018 dan 2019 telah dilakukan sosialisasi di 10 (sepuluh) kecamatan yang meliputi Kecamatan Panjang, Teluk Betung Selatan, Bumi Waras, Teluk Betung Timur, Teluk Betung Barat, Enggal, Way Halim, Tanjung Karang Pusat, Teluk Betung Utara, dan Tanjung Karang Timur. Pada Tahun 2020, sosialisasi program transmigrasi tidak dapat dilaksanakan karena terkendala adanya pandemi *Covid-19*.

2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

1. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah

Berikut adalah data Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2020:

Tabel 2.115 Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2016-2020

Tahun	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah
2016	23,50
2017	29,44
2018	25,45
2019	27,34
2020	25,45

Sumber: BPPRD Kota Bandar Lampung, 2021

Data tersebut menunjukkan bahwa persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2020 cenderung berfluktuasi, namun demikian jika dibandingkan dengan Tahun 2016, terjadi kenaikan persentase selama tahun 2017-2020. Tahun 2020 persentase pencapaian PAD sebesar 25,45 persen, menurun 2,14 persen dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 27,34 persen.

2. Opini Penilaian BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

Berikut adalah Opini Penilaian BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2016-2020:

Tabel 2.116 Opini Penilaian BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2016-2020

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : BPKAD Kota Bandar Lampung, 2021

Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bandar Lampung selama kurun waktu 9 (delapan) tahun terakhir memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Capaian prestasi tersebut harus dipertahankan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung.

3. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Bandar Lampung

Dalam lingkup Pemerintah Kota Bandar Lampung, BUMD merupakan unit usaha milik Pemerintah Kota Bandar Lampung. Alasan ekonomis yang biasanya dijadikan acuan pertama mendirikan BUMD adalah mengoptimalisasi potensi ekonomi daerah dalam upaya menggali dan mengembangkan sumber daya daerah, memberikan pelayanan masyarakat

atau *public service*, dan mencari keuntungan. Alasan strategis mendirikan BUMD adalah mendirikan lembaga usaha yang melayani kepentingan publik.

Maksud dan tujuan Pemerintah Kota Bandar Lampung mendirikan PD/BUMD adalah :

- 1) Sebagai aparat perekonomian daerah dalam rangka mengisi otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab, PD/BUMD harus dapat membantu kelancaran pembangunan daerah;
- 2) Sebagai unit perekonomian daerah PD/BUMD harus mampu berfungsi sebagai aparat pengembangan dan pembangunan ekonomi daerah yang secara aktif langsung melakukan usaha-usaha di berbagai sektor industri, jasa, perdagangan disamping menyelenggarakan usaha pelayanan bagi masyarakat dan kemanfaatan umum, yang sekaligus sebagai penyedia lapangan kerja;
- 3) Sebagai sumber keuangan daerah guna meningkatkan kemampuan dan kekuatan daerah dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah dan penyelenggaraan pelayanan umum.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2018, PD BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung berubah bentuk badan hukum dan nama perusahaan daerah menjadi PT BPR Waway Lampung (Perseroda). Sehingga sampai dengan Tahun 2019 Kota Bandar Lampung memiliki 5 BUMD yaitu BPR Bank Waway, BPR Syariah Bandar Lampung, PDAM Way Rilau, PD Pasar dan PD Kebersihan; yang mana 2 (dua) PD berstatus Perseroan Terbatas (PT) yaitu BPR Bank Waway dan BPR Syariah.

Pada Tahun 2020 terdapat 3 (tiga) Perusahaan Daerah yang sedang mengajukan penyesuaian bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda), yaitu :

1. PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung;
2. PD Pasar Tapis Berseri Kota Bandar Lampung;
3. PD Kebersihan Tapis Berseri Kota Bandar Lampung.

Penyesuaian bentuk badan hukum ini sedang diproses di DPRD Kota Bandar Lampung dan diharapkan akan selesai di Tahun 2021. Dengan berubahnya bentuk badan hukum tersebut diharapkan dapat dilakukan penilaian terhadap nilai aset sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan dalam menentukan arah kebijakan yang diambil oleh pengurus PD. Terkait dengan pencapaian kinerja BUMD Perusahaan Daerah sudah memiliki 5 (lima) perusahaan dalam kategori sehat yaitu:

1. PT BPR WAWAY Kota Bandar Lampung;
2. PT BPR SYARIAH;
3. PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung;
4. PD Pasar Tapis Berseri Kota Bandar Lampung;
5. PD Kebersihan Tapis Berseri Kota Bandar Lampung Kota Bandar Lampung.

Berikut adalah data kontribusi masing-masing BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016-2020 :

Tabel 2.117 Kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016-2020

Nama BUMD	Jumlah Kontribusi Terhadap PAD(Rupiah)				
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
PDAM WAY RILAU KOTA BANDAR LAMPUNG	500.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	5.000.000.000,00
PT. BPR WAWAY LAMPUNG (PERSERODA)	4.123.482.819,26	5.779.915.793,00	6.900.000.000,00	6.918.439.531,00	8.071.743.172,00
PT. BPR SYARIAH BANDAR LAMPUNG	0	398.991.172,00	967.691.015,00	1.280.088.574,00	1.404.034.830,00
PD PASAR TAPIS BERSERI	0	0	0	150.000.000,00	62.591.151,00
PD KEBERSIHAN TAPIS BERSERI	0	0	0	60.000.000,00	0

Sumber : Bagian Perekonomian Setda Kota Bandar Lampung, 2021

4. Koperasi Sehat dan Cukup Sehat

Berikut adalah data perkembangan koperasi Tahun 2016-2020:

Tabel 2.118 Perkembangan Koperasi Tahun 2016-2020

Uraian	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Koperasi	Unit	740	741	744	662	664
Aktif	Unit	355	313	158	167	175
Tidak Aktif	Unit	385	428	586	495	489
Anggota	Orang	102.088	91.966	91.370	84.878	82.814
Persentase Koperasi Aktif	%	47,97	42,24	21,23	25,22	26,35

Uraian	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Permodalan						
- Modal Sendiri	Rp. Milyar	246.547	260.397	276.107	284.529	309.839
- Modal Luar	Rp. Milyar	285.481	251.985	259.018	249.022	239.969
Volume Usaha	Rp. Milyar	562.868	512.359	500.887	488.676	464.635
Sisa Hasil Usaha	Rp. Milyar	30.436	29.605	31.123	29.856	32.156

Sumber : Dinas Koperasi UKM Kota Bandar Lampung, 2021

Keberadaan koperasi maupun usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menjadi salah satu sektor yang turut menopang perekonomian di Kota Bandar Lampung, namun masih belum banyak yang tergolong dalam kategori koperasi sehat dan cukup sehat. Koperasi tergolong sehat jika koperasi tersebut menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT), punya usaha yang jelas, ada iuran wajib dan sukerela, sisa hasil usaha (SHU) dibagi dan punya Nomor Induk Koperasi (NIK) dari Kementerian. Berikut adalah data perkembangan koperasi sehat Tahun 2016-2020:

Tabel 2.119 Perkembangan Koperasi Sehat Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
I.	Koperasi Aktif	355	313	158	167	175
II.	Yang sudah melaksanakan RAT	88	99	91	91	107
III.	Kategori Koperasi					
	Sehat	1	1	1	1	5
	Cukup Sehat	61	59	50	50	57
	Dalam Pengawasan	23	36	37	37	43
	Dalam Pengawasan Khusus	3	3	3	3	2

Sumber : Dinas Koperasi UKM Kota Bandar Lampung, 2021

Berikut adalah data Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat Tahun 2016-2020:

Tabel 2.120 Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat Tahun 2016-2020

Tahun	Koperasi Sehat dan Cukup Sehat
2016	2,70
2017	3,10
2018	4,03
2019	6,05
2020	8,28

Sumber : Dinas Koperasi UKM Kota Bandar Lampung, 2021

5. UMKM yang Memiliki Laba

Dalam perekonomian Indonesia, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Selain itu, kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam goncangan krisis ekonomi. Maka sudah menjadi keharusan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penguatan kelompok UMKM yang melibatkan banyak kelompok.

UMKM yang terdapat di semua sektor ekonomi merupakan usaha yang banyak memberikan lapangan usaha tanpa harus mempunyai jenjang pendidikan maupun keahlian khusus. Perkembangan jumlah UMKM di Kota Bandar Lampung cukup pesat dari tahun ke tahun, idealnya adalah jika perkembangan jumlah UMKM tersebut idealnya diikuti oleh laba usaha, sehingga UMKM tersebut dapat terus bertahan dan berkembang. Berikut adalah data perkembangan UMKM Tahun 2016-2020:

Tabel 2.121 Perkembangan UMKM Tahun 2016-2020

Tahun	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah	Jumlah Keseluruhan
2016	21.013	15.291	5.383	41.687
2017	23.494	15.350	5.388	44.232
2018	25.385	15.505	5.434	46.324
2019	30.696	15.568	5.445	51.709
2020	35.978	15.584	5.447	57.019

Sumber: Dinas Koperasi UKM Kota Bandar Lampung, 2021

Berikut adalah data UKM yang memiliki laba Tahun 2016-2020:

Tabel 2.122 Persentase UKM yang Memiliki Laba Tahun 2016-2020

Tahun	UKM yang Memiliki Laba
2016	16,38
2017	16,67
2018	17,01
2019	16,85
2020	16,14

Sumber: Dinas Koperasi UKM Kota Bandar Lampung, 2021

6. Skor Pola Pangan Harapan

Masalah kekurangan gizi pada anak merupakan masalah gizi yang belum pernah tuntas. Tingkat konsumsi gizi yang masih rendah, tidak seimbang,

dan tidak beragam diduga berkorelasi dengan masih tingginya prevalensi pendek (*stunting*), berat badan kurang (*underweight*), dan kurus (*wasting*).

Pola Pangan Harapan (PPH) atau *Desirable Dietary Pattern* (DDP) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan kedepan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat. Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan instrumen sederhana untuk menilai mutu gizi konsumsi pangan kelompok baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor. PPH juga sebagai instrumen untuk mengevaluasi pola konsumsi pangan masyarakat dan sekaligus sebagai bahan untuk merencanakan kebutuhan pangan tingkat regional dan nasional.

Penghitungan skor PPH dimaksudkan untuk menganalisis pola konsumsi pangan suatu masyarakat terhadap pola konsumsi pangan yang ideal (Pola Pangan Harapan). Skor PPH ini berfungsi sebagai :

- a. Indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi atau pangan;
- b. Baseline data untuk mengestimasi kebutuhan pangan ideal di suatu wilayah;
- c. Baseline data untuk menghitung proyeksi konsumsi dan penyediaan pangan ideal untuk suatu wilayah.

Beberapa hal yang mempengaruhi skor PPH konsumsi yaitu :

- a. Tingkat pendapatan masyarakat (Rumah Tangga);
- b. Pengetahuan masyarakat terutama ibu rumah tangga tentang pangan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman) semakin membaik dengan adanya sosialisasi;
- c. Lingkungan (sumber daya/kebiasaan/budaya).

Berikut adalah data skor Pola Pangan Harapan Tahun 2016-2020:

Tabel 2.123 Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2016-2020

Tahun	Skor
2016	82,95
2017	83,00
2018	84,00
2019	85,20
2020	85,50

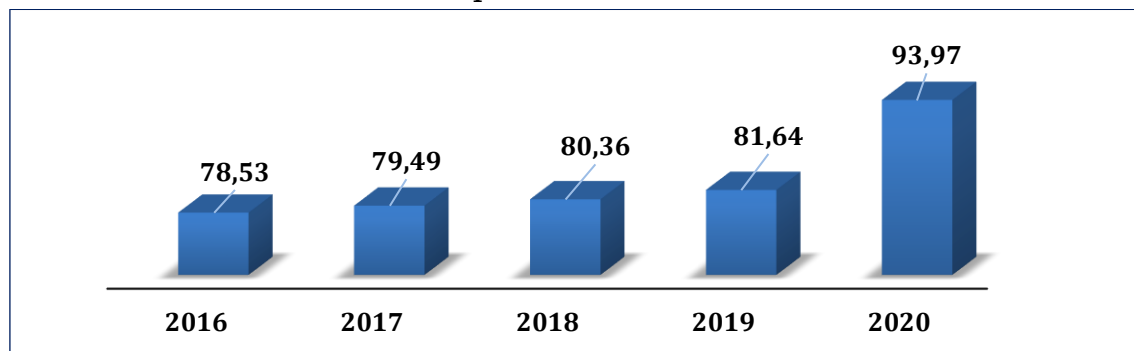
Sumber : Dinas Pangan Kota Bandar Lampung, 2021

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1. Kondisi Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap

Berikut adalah data kondisi Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap Tahun 2016-2020 :

Diagram 2.20 Persentase Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, 2021

Sedangkan untuk Kondisi Jalan Kota dalam Kondisi Mantap Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.124 Persentase Kondisi Jalan Kota dalam Kondisi Mantap Tahun 2016-2020

Tahun	Kondisi Jalan Kota dalam Kondisi Mantap
2016	90,09
2017	79,49
2018	80,95
2019	81,64
2020	87,98

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, 2021

Dalam sistem jaringan jalan Nasional, pada Tahun 2017 sebagian besar jalan kota yaitu 683 ruas jalan atau sepanjang 528,426 Km yang kondisinya mantap beralih menjadi jalan lingkungan, jalan kota yang tersisa justru jalan kota dengan kondisi tidak mantap, sehingga pada Tahun 2017 kondisi jalan kota dalam kondisi mantap persentasenya menurun menjadi 79,49 persen. Namun demikian persentase kondisi jalan kota dalam kondisi mantap di Kota Bandar Lampung meningkat pada Tahun 2018 dan Tahun 2019 dibandingkan Tahun 2017. Berikut data yang menggambarkan infrastruktur jalan Tahun 2016-2017:

Tabel 2.125 Infrastruktur Jalan Tahun 2016-2017

Status Jalan	2016		2017	
	Jumlah Ruas	Panjang (Km)	Jumlah Ruas	Panjang (Km)
Jalan Lingkungan	2.106	498,653	2.789	959,481
Jalan Kota	1.090	922,586	407	394,16
Jalan Provinsi	3	9,379	3	9,379
Jalan Nasional	12	57,65	12	57,65

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, 2018

Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung Tahun 2021, pada kurun waktu Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 tidak terjadi perubahan data jumlah ruas maupun panjang Jalan Lingkungan, Jalan Kota, Jalan Propinsi maupun jalan Nasional. Jumlah ruas maupun panjang Jalan Lingkungan, Jalan Kota, Jalan Propinsi maupun jalan Nasional sama dengan Tahun 2017; sesuai dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 204.1/III.03/HK/2018 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Satusnya sebagai Jalan Kota di Kota Bandar Lampung.

Pembangunan *fly over* merupakan salah satu tindakan penyediaan prasarana transportasi untuk menambah kapasitas jalan sehingga dapat lebih banyak menampung volume lalu lintas dan memperlancar lalu lintas. Ketersediaan prasarana transportasi yang cukup efektif dapat memberikan keamanan dan keselamatan berkendara kepada para pelaku pergerakan. Dengan meningkatnya jumlah kendaraan setiap tahun maka pembangunan

fly over perlu dilaksanakan untuk mengimbangi volume lalu lintas yang ditimbulkan oleh peningkatan jumlah kendaraan. Oleh karena itu, pada Tahun 2012, Pemerintah Kota Bandar Lampung memulai pembangunan *fly over* Sultan Agung-Riyacudu. Tabel dibawah ini menunjukkan jumlah *fly over* di Kota Bandar Lampung yang telah terbangun:

Tabel 2.126 Jumlah *Fly Over* dan *Underpass*

FLY OVER	KETERANGAN
<i>Fly Over</i> Sultan Agung – Riyacudu	Sudah Terbangun
<i>Fly Over</i> Antasari – Tirtayasa	Sudah Terbangun
<i>Fly Over</i> Gajah Mada - Ir. Juanda	Sudah Terbangun
<i>Fly Over</i> Kimaja - Ratu Dibalau	Sudah Terbangun
<i>Fly Over</i> Gajah Mada - Antasari	Sudah Terbangun
<i>Fly Over</i> Teuku Umar (MBK)	Sudah Terbangun
<i>Fly Over</i> Cik Dik Tiro - Pramuka	Sudah Terbangun
<i>Fly Over</i> Pramuka – Indra Bangsawan	Sudah Terbangun
<i>Underpass</i> Pagar Alam – Soemantri BJ	Sudah Terbangun
<i>Fly Over</i> Untung Suropati – RA. Basyid	Sudah Terbangun
<i>Fly Over</i> Abdul Haq – Komarudin	Sudah Terbangun
<i>Fly Over</i> Sultan Agung	Sudah Terbangun

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, 2021

2. Pengelolaan Drainase

Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, *drainase* Kota Bandar Lampung pada Tahun 2020 sepanjang 117,551 km. Terdapat beberapa sistem *Drainase* yang direncanakan di Kota Bandar Lampung diantaranya adalah:

a. Sistem *Drainase* permukaan

Dilakukan dengan membuat penampungan kemudian dengan sistem retensi air akan diresapkan kedalam tanah dengan menggunakan sumur-sumur resapan dan sisanya akan merupakan limpasan permukaan yang akan ditampung oleh sistem *drainase* yang ada.

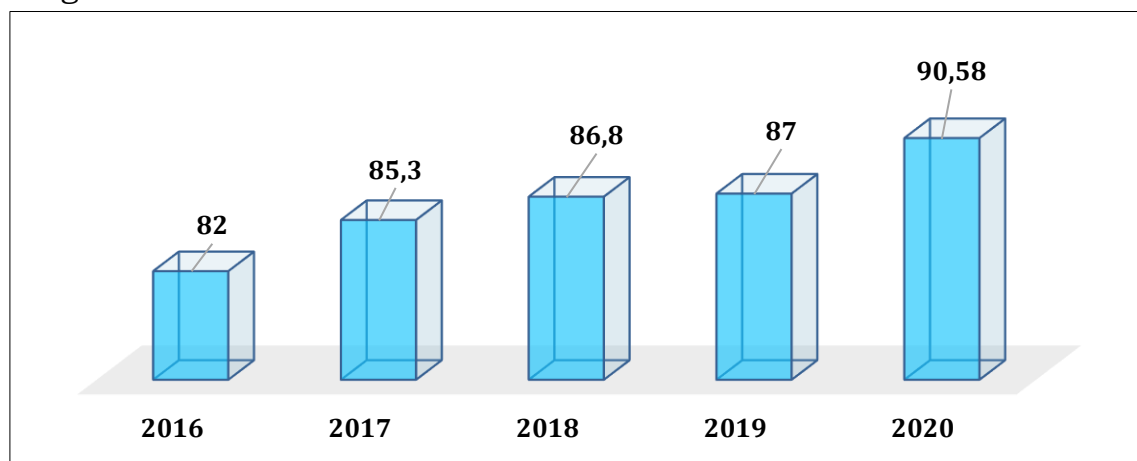
b. Sistem *Drainase* terpadu

- Pada bagian atas saluran akan dimanfaatkan sebagai prasarana umum, seperti sambungan telephon, listrik bawah tanah, pipa air minum dan lain-lain.
- Pada bagian bawah saluran dimanfaatkan sebagai saluran *drainase*, seperti limbah rumah tangga dan air hujan pada musim hujan.

- c. Pada sistem *drainase* terpadu akan dibuatkan tempat-tempat penampungan sampah sehingga sampah yang ada tidak langsung terbawa dan masuk pada sistem Drainase yang ada.
- c. Sistem *Drainase* secara retensi
Dilakukan dengan membuat kolam-kolam di sekitar hunian atau pada daerah yang lebih luas sehingga dapat digunakan untuk menyimpan air dan penanggulangan banjir.
- d. Sistem *Drainase* secara infiltrasi
Diterapkan pada daerah yang padat penduduknya dengan menggunakan:
- Drainase* sumur resapan, dimaksudkan menampung air dari atap yang diteruskan melalui selokan keliling tritisan kemudian masuk kedalam sumur resapan. Resapan ini dilengkapi dengan pipa peluap untuk menyalurkan air ke saluran *drainase* jika air mengalami kelebihan.
 - Drainase* saluran porous, diterapkan pada kawasan permukiman yang elevasi air tanahnya tidak terlalu dalam.

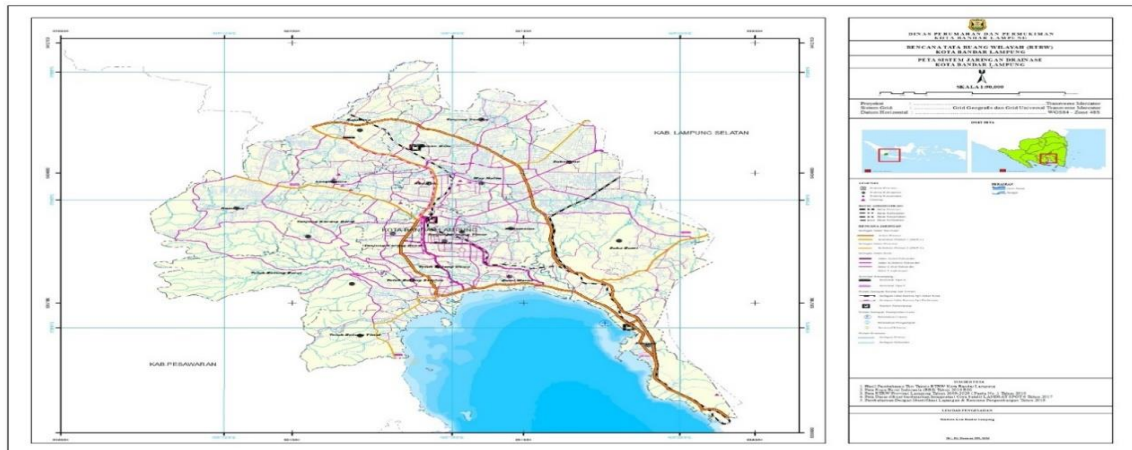
Berikut adalah data persentase drainase dalam kondisi baik Tahun 2016-2020:

Diagram 2.21 Persentase Drainase dalam Kondisi Baik Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, 2021

Gambar 2.9 Peta Sungai dan Jaringan Drainase

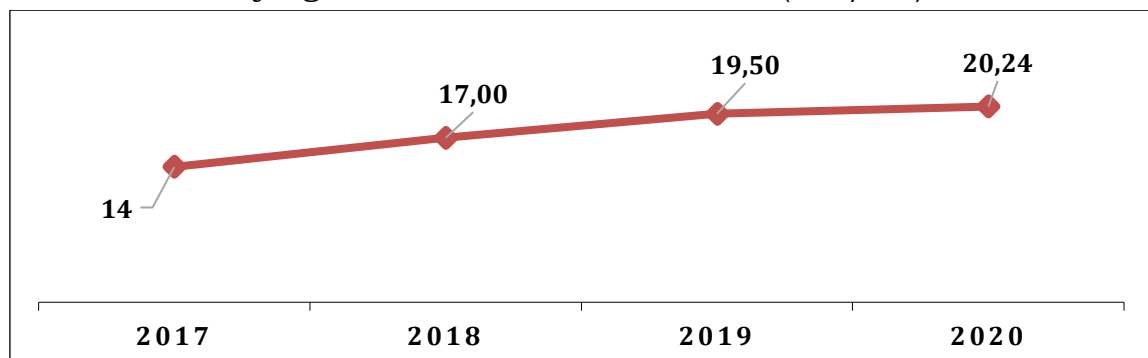


Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung, 2021

3. Penerangan Jalan Umum

Penerangan jalan umum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari adanya jalan. Tujuan utama dari penerangan jalan adalah untuk menghasilkan kecepatan, keakuratan, dan kenyamanan penglihatan di waktu malam hari, menjaga kualitas jarak pandang, serta memudahkan bagi kendaraan yang melintas dan juga pejalan kaki. Fungsi penerangan jalan umum selain untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengendara, khususnya untuk mengantisipasi situasi perjalanan pada malam hari juga untuk keamanan lingkungan atau mencegah kriminalitas serta untuk memberikan kenyamanan dan keindahan lingkungan jalan. Berikut adalah data Rasio jumlah lampu penerangan jalan umum terhadap panjang jalan kota Bandar Lampung Tahun 2016-2020 :

Grafik 2.11 Rasio Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum terhadap Panjang Jalan Kota Tahun 2016-2020 (titik/km)



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, 2021

Dengan demikian artinya pada tahun 2020 setiap 1 km jalan kota memiliki 20,24 titik lampu jalan.

4. Kondisi Transportasi Kota Bandar Lampung

(a) Aspek Angkutan Umum

Pelayanan transportasi yang ada saat ini dilayani oleh :

1. Bus Rapi Trans (BRT) Bandar Lampung

Berikut adalah data jumlah Bus Rapi Transit (BRT) Bandar Lampung Tahun 2016-2020 :

Tabel 2.127 Bus Rapi Transit Bandar Lampung Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah BRT
2016	59
2017	59
2018	23
2019	30
2020	30

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, 2021

Jumlah Bus Rapi Trans (BRT) dengan rute pelayanan di gambarkan pada tabel bawah ini :

Tabel 2.128 Pelayanan Bus Rapi Trans Bandar Lampung Tahun 2017-2020

Jurusan	Jumlah (unit)		
	2017	2018	2019 dan 2020
Rajabasa –	20	0	0
Korpri – Sukaraja	16	0	0
Rajabasa – Panjang	23	23	20 Via Soekarno Hatta (Swasta) 10 Via Kota (Pemkot Bandar)

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, 2021

2. Angkutan Perkotaan

Berikut adalah data jumlah Angkutan Perkotaan dan jumlah trayek angkutan pada Tahun 2016-2020:

Tabel 2.129 Angkutan Perkotaan Bandar Lampung Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Angkutan Perkotaan
2016	477
2017	143
2018	107
2019	107
2020	29

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, 2021

Tabel 2.130 Jurusan, Warna dan Jumlah Trayek Angkutan Tahun 2016-2020

Jurusan	Warna	Jumlah Trayek				
		2016	2017	2018	2019	2020
T.Karang – Rajabasa	Biru Laut	148	68	4	4	1
T.Karang - Sukaraja	Ungu	105	53	13	13	1
Sukaraja – Serengsem	Orange	112	69	21	21	6
T.Karang – Garuntang	Hijau	73	27	5	5	3
T. Karang – Way Kandis	Cream	97	40	6	6	-
T.Karang - Jl. P.Tirtayasa – Ir. Sutami	Putih/Hijau	42	22	14	14	2
Tanjung Karang – Kemiling	Merah Hati	125	80	23	23	9
Tanjung – Sukarame	Abu-Abu	105	41	1	1	-
Tanjung Sukarame – Permata Biru	Abu-Abu/Biru	46	25	7	7	2
Tanjung Karang – Sam Ratulangi	Merah/Biru	76	41	10	10	5
Pasar Cimeng-Lemapasing	Biru Dongker	17	2	1	1	-
Sukaraja – Lempasing	Biru Dongker	21	7	2	2	-

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, 2021

3. Angkutan Aglomerasi

Angkutan aglomerasi tidak dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

4. Angkutan Taksi

Angkutan Taksi Perkotaan berbasis Argometer tidak dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

5. Angkutan Berbasis Online

Terdapat beberapa perusahaan berbasis online yang membantu pelayanan angkutan yaitu Grab, Go-Jek, dan Maxim.



(b) Aspek Lalu Lintas

Kota Bandar Lampung sebagai pusat pemerintahan Provinsi Lampung mengalami perkembangan kehidupan kota yang dinamis. Pertambahan jumlah penduduk dan dinamika kehidupan penduduk kota mendorong bertambahnya prasarana sarana perkotaan seperti perumahan, kendaraan, jaringan jalan, dan sarana-sarana perkotaan lainnya. Kondisi tersebut juga berdampak pada perubahan dan terjadinya alih fungsi lahan kota. Kawasan yang dulunya hanya lahan kosong sekarang sudah banyak beralih fungsi menjadi pemukiman maupun pusat perdagangan.

Pergerakan Lalu Lintas Kota Bandar Lampung saat ini sangat pesat dan dapat melayani sampai ke wilayah yang berbatasan dengan wilayah Kota Bandar Lampung. Kondisi tingkat pelayanan lalu lintas saat ini sebagai berikut :

- a. Tingkat pelayanan pada Jalan arteri primer
Tingkat pelayanan jalan pada beberapa jalan arteri primer di Kota Bandar Lampung adalah C seperti Jl. Soekarno Hatta
- b. Tingkat pelayanan pada Jalan arteri sekunder
Tingkat pelayanan jalan pada beberapa jalan arteri sekunder di Kota Bandar Lampung adalah C seperti Jl. ZA. Pagar Alam.
- c. Tingkat pelayanan pada Jalan kolektor primer
Tingkat pelayanan jalan pada beberapa jalan kolektor primer di Kota Bandar Lampung adalah D seperti Jl. RA. Kartini.
- d. Tingkat pelayanan pada Jalan kolektor sekunder
Tingkat pelayanan jalan pada beberapa jalan kolektor sekunder di Kota Bandar Lampung adalah C seperti Jl. Urip Sumoharjo.
- e. Tingkat pelayanan pada Jalan lokal sekunder
Tingkat pelayanan jalan pada beberapa jalan lokal sekunder di Kota Bandar Lampung adalah B seperti Jl. M. Yamin.

Kondisi fasilitas pendukung jalan yang ada di Kota Bandar Lampung :

(1) Marka Jalan

Berikut adalah data jumlah marka jalan yang dikerjakan pada Tahun 2016-2020 :

Tabel 2.131 Marka Jalan yang dikerjakan Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah
2016	5.276,84 m ²
2017	3.982 m ²
2018	7.000 m ²
2019	2.792,57 m ²
2020	24.781,01 m ²

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, 2021

(2) Rambu Jalan

Berikut adalah data jumlah rambu – rambu lalu lintas Tahun 2016-2020:

Tabel 2.132 Jumlah Rambu Lalu Lintas Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Rambu kondisi baik	573	543	681	974	1.117
Rambu kondisi rusak	88	88	88	-	-
Rambu kondisi hilang	32	32	32	7	-

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, 2021

(3) Persimpangan

Berikut adalah data jumlah persimpangan Tahun 2016-2020:

Tabel 2.133 Jumlah Persimpangan Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Simpang Tiga Prioritas	36	36	44	45	44
Simpang Tiga APILL	10	13	9	10	7
Simpang Tiga Bundaran	-	-	-	-	3
Simpang Tiga Fly Over	-	-	-	-	3
Simpang Tiga Underpass	-	-	-	-	1
Simpang Empat Prioritas	6	6	11	9	9
Simpang Empat APILL	14	18	19	14	12
Simpang Ema	-	-	-	-	7

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, 2021



(c) Data Kasus/Kejadian Kecelakaan per Tahun

Berikut adalah data kejadian kecelakaan Tahun 2016-2020:

Tabel 2.134 Kasus/Kejadian Kecelakaan Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Kejadian
2016	415
2017	297
2018	241
2019	297
2020	220

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, 2021

Berdasarkan data kecelakaan POLRESTA Kota Bandar Lampung, jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas selama 4 (empat) tahun terakhir berfluktuasi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa diperlukan berbagai upaya Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas di Kota Bandar Lampung. Namun demikian terjadi penurunan kejadian kecelakaan pada Tahun 2020 dibandingkan dengan Tahun 2019.

5. Cakupan Layanan TIK (Telekomunikasi, Informasi, dan Komunikasi)

Berikut adalah data yang menunjukkan jumlah jaringan komunikasi Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2020:

Tabel 2.135 Jumlah Jaringan Komunikasi Tahun 2016-2020

Keterangan	Jumlah Jaringan Komunikasi (Unit)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Menara di atas Gedung	149	145	171	184	165
Menara di atas tanah	312	356	342	378	393
Menara eksisting	438	501	513	562	558
Menara baru	13	7	9	-	-
Menara terbangun	13	-	-	-	-
Menara tahap pembangunan	3	-	-	-	-
Jumlah	929	1.009	1.035	1.124	1.116

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandar Lampung, 2021

Data tersebut menunjukkan Kota Bandar Lampung sudah memiliki ketersediaan sarana dan prasarana untuk informasi dan telekomunikasi yang mendukung kegiatan masyarakat dan pembangunan.

6. Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai Peruntukannya

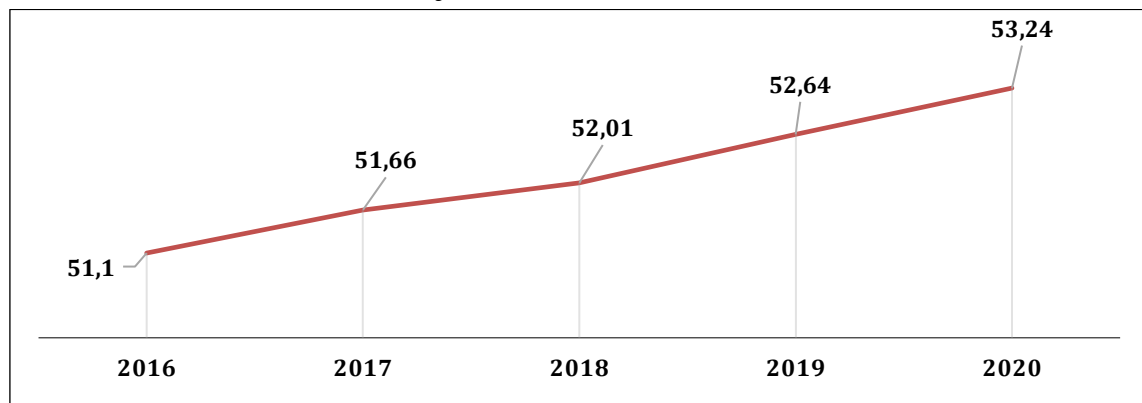
Berikut adalah data yang menunjukkan pelanggaran PERDA Penataan Ruang Tahun 2016-2020:

Tabel 2.136 Pelanggaran Peraturan Daerah Penataan Ruang Tahun 2016-2020

Uraian	Jumlah /Kasus				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase pelanggaran PERDA Penataan Ruang yang ditangani	50,00%	64,36 %	74,02%	79,23%	58,51%
Jumlah pelanggaran pemanfaatan ruang	357	188	154	130	94
- Yang terselesaikan	229	121	114	103	55
- Yang terus ditangani untuk dilakukan penyesuaian aturan	128	67	40	27	39

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung, 2021

Grafik 2.12 Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Peruntukannya Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung, 2021

7. Indeks Resiko Bencana

Seperti halnya Kota besar lainnya di Indonesia, Kota Bandar Lampung juga menghadapi berbagai macam permasalahan bencana. Berikut ini adalah indeks Resiko Bencana Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2020 :

Tabel 2.137 Indeks Resiko Bencana Tahun 2016-2020

Tahun	Indeks	Kategori
2016	182	Tinggi
2017	182	Tinggi
2018	165,56	Tinggi
2019	155,80	Tinggi
2020	152,816 ^{*)}	Tinggi

Sumber : www.inarisk.bnpb.go.id ; ^{*)} angka proyeksi

Kelurahan siaga bencana merupakan kebijakan pemerintah dalam penanggulangan bencana berbasis komunitas. Setiap kelurahan siaga bencana diharapkan sudah mengetahui apa yang harus dilakukan, terutama mengenai keselamatan mereka jika terjadi bencana alam, jadi BPBD Kota Bandar Lampung tinggal mengingatkan saja. Setiap kelurahan siaga bencana diberikan pengetahuan mengenai mitigasi bencana, terutama untuk jenis bencana yang rawan terjadi di daerah tersebut. Sampai dengan Tahun 2020, telah ditetapkan 2 (dua) Kelurahan Siaga Bencana di Kota Bandar Lampung yaitu Kelurahan Kota Karang dan Kelurahan Kota Karang Raya.

8. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Indikator yang digunakan dalam perhitungan IKLH adalah Indeks Kualitas/ Pencemaran Air, Indeks Kualitas/Pencemaran Udara, dan Indeks Tutupan Hutan/Lahan. Berikut adalah data IKLH Tahun 2016-2020:

Tabel 2.138 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2016-2020

Tahun	IKLH
2016	54,00
2017	55,00
2018	55,00
2019	55,00
2020	60,32

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, 2021

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

1. Angka Kriminalitas

Berikut adalah data jumlah tindak kriminalitas Tahun 2016-2020:

Tabel 2.139 Jumlah Tindak Kriminalitas Tahun 2016-2020

Tahun	Kriminalitas
2016	3.293
2017	3.173

Tahun	Kriminalitas
2018	1.870
2019	1.734
2020	3.349

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung, 2021

2. Lama Proses Perizinan

Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Daya saing investasi suatu daerah tidak terjadi dengan serta merta. Pembentukan daya saing investasi berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kemudahan perijinan, kemudahan dalam memperoleh perijinan dan berapa lama proses dilakukan. Berikut adalah data yang menunjukkan jenis dan lama proses perizinan di Kota Bandar Lampung.

Tabel 2.140 Jenis dan Standar Waktu dalam Penyelesaian Izin

Jenis Perizinan	Waktu Penyelesaian
Izin Prinsip Penanaman Modal	3 (tiga) hari kerja
Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	3 (tiga) hari kerja
Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	5 (lima) hari kerja
Izin Usaha Penanaman Modal	6 (enam) hari kerja
Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger)	5 (lima) hari kerja
Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal	5 (lima) hari kerja
Izin Usaha Industri (IUI)	7 (tujuh) hari kerja
Keterangan Rencana Kota (KRK)	7 (tujuh) hari kerja
Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	15 (lima belas) hari kerja
Izin Pendahuluan Membangun (IPM)	15 (lima belas) hr kerja
Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	3 (tiga) hari kerja
Izin Gangguan (HO) Dicabut berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2017	-
Izin Peletakan Titik Reklame (IPTR)	7 (tujuh) hari kerja
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	3 (tiga) hari kerja
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	3 (tiga) hari kerja
Tanda Daftar Gudang (TDG)	5 (lima) hari kerja
Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	7 (tujuh) hari kerja
Izin Usaha Angkutan (IUA)	1 (satu) hari kerja
Izin Usaha Toko Modern (IUTM)	5 (lima) hari kerja
Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)	5 (lima) hari kerja
Tanda Daftar Industri (TDI)	5 (lima) hari kerja
Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)	5 (lima) hari kerja

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandar Lampung, 2020

3. Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah

Dukungan Pemerintah dalam rangka menciptakan iklim berinvestasi yang kondusif berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2015 tentang Perizinan Daerah pada pasal 15 yaitu Pemberian insentif dan pemberian kemudahan perizinan.

- 1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan dalam perizinan dan penanaman modal kepada perseorangan dan/atau badan hukum yang akan melaksanakan kegiatan usahanya.
- 2) Pemberian insentif dapat berbentuk :
 - a. Pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah
 - b. Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah
- 3) Pemberian kemudahan dapat berbentuk :
 - a. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal
 - b. Percepatan pemberian perizinan
 - c. Pemberian bantuan teknis
- 4) Jenis atau bidang usaha yang dapat memperoleh insentif dan/atau kemudahan dalam pemberian perizinan dan penanaman modal meliputi:
 - a. Usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi
 - b. Usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan
 - c. Usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya
 - d. Usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu
 - e. Usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus
- 5) Sektor atau usaha kegiatan yang dapat memperoleh insentif dan/atau kemudahan dalam pemberian perizinan dan penanaman modal meliputi:
 - a. Sektor listrik, gas dan air bersih
 - b. Sektor konstruksi dan bangunan
 - c. Sektor pariwisata dan kebudayaan termasuk sektor pendukungnya
 - d. Sektor industri diprioritaskan industri yang ramah lingkungan
 - e. Sektor transportasi dan komunikasi



Adapun Jumlah dan Macam Pajak serta Retribusi Daerah di Kota Bandar Lampung ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2.141 Jumlah dan Macam Pajak serta Retribusi Daerah

Jenis Pajak dan Retribusi	Tahun	
	2019	2020
Pajak Hotel	8	8
Pajak Restoran	5	5
Pajak Hiburan	9	9
Pajak Reklame	9	9
Pajak Penerangan Jalan	1	1
Pajak Batuan Bukan Logam	1	1
Pajak Parkir	1	1
Pajak Air Tanah	1	1
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	1	1
Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan	1	1
Retribusi Jasa Umum	7	7
Retribusi Jasa Usaha	9	6
Retribusi Perizinan Tertentu	2	2

Sumber: BPPRD Kota Bandar Lampung, 2021

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

1. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Berikut adalah data TPT Tahun 2016-2020 :

Tabel 2.142 Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
TPT	8,10	8,10	7,28	7,12	8,78

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Besarnya jumlah penduduk usia kerja berkaitan erat dengan besarnya penduduk itu sendiri, karena penduduk usia kerja merupakan segmen dari jumlah total penduduk secara keseluruhan. Dari total penduduk usia kerja (15 tahun ke atas), lebih dari separuh penduduk Bandar Lampung termasuk dalam angkatan kerja. Berikut adalah data TPAK Tahun 2016-2020:

Tabel 2.143 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
TPAK	63,41	63,41	65,92	65,52	67,79

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

3. Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Bandar Lampung

Berikut adalah data yang menunjukkan Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2020:

Tabel 2.144 Jumlah Aparatur Sipil Negara Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2020 (orang)

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
PNS	9.716	9.353	8.836	8.347	8.478
ASN	4.193	4.385	4.643	5.005	5.401

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung, 2021

Tabel 2.145 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Bandar Lampung

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar (Target Kondisi Kinerja pada Tahun 2020)	Interpretasi Belum Tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
1.1. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1.1.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
1. Pertumbuhan Ekonomi	%	6,43	6,28	6,20	6,21	-1,85	3,0-4,0	<
2. PDRB per Kapita (ADHK Tahun 2010)	Rp	32.933.856	34.374.187	35.871.912	37.456.633	33.151.383	38.050.000	<
PDRB per Kapita (ADHB)	Rp	44.843.785	49.298.501	52.823.565	56.469.729	50.665.005		
3. Laju Inflasi	%	2,75	3,14	2,92	3,53	1,93	1,20-2,00	=
4. Rasio Gini	%	0,369	0,342	0,342	0,316	0,359	0,31	<
5. Persentase Kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	21,12	21,26	21,18	21,39	20,97	21,16	<
6. Persentase Kategori Perdagangan terhadap PDRB	%	14,68	14,19	14,15	14,36	13,30	13,65	<
7. Persentase Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Bidang Pariwisata) terhadap PDRB	%	2,81	2,82	2,85	2,90	2,57	2,00	>
1.1.2. Fokus Kesejahteraan Sosial								
1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	75,34	75,98	76,63	77,33	77,44	76,00-78,00	=
2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,88	10,89	10,90	10,92	10,93	11,00	<
3. Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,67	13,87	14,23	14,53	14,64	14,40	>
4. Angka Harapan Hidup (AHH)	Angka	70,75	70,84	71,01	71,28	71,37	71,00	>
5. Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) pada Anak Balita	%	17,40	21,80	16,09	3,08	5,77	9,00	>

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar (Target Kondisi Kinerja pada Tahun 2020)	Interpretasi Belum Tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
6. Prevalensi <i>Stunting</i> (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun)	%	21,20	23,80	26,38	6,10	6,60	6,10	<
7. Persentase Penduduk Miskin	%	10,15	9,94	9,04	8,71	8,81	9,00-10,00	>
8. Persentase Luas Kawasan Kumuh di Kota Bandar Lampung	%	12,06	8,50	5,41	2,82	1,5	2,78	>
9. Persentase Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	%		9,19	12,24	19,06	28,81	72,25	<
10. Indeks Pembangunan Gender	Angka	93,94	93,53	93,55	93,96	93,86	94,94	<
11. Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	60,00	62,11	62,39	71,54	71,88	64,00	>
12. Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Tingkat Capaian			Pratama	Madya	Madya ⁹⁾	Pratama	>
13. Persentase Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak yang terselesaikan	%	37,00	35,23	66,00	86,00	100,00	48,00	>
14. Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,019	1,018	1,018	1,017	1,109	1,77	>
1.1.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga								
1. Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Lestari	Angka	0	0	0	0	0	1	<
2. Jumlah Pemuda Pelopor	Orang	7	8	8	8	8	14	<
3. Persentase Cabang Olahraga yang Berprestasi/ Mendapatkan Medali	%	91,67	91,67	100,00	100,00	100,00	100,00	=
1.1.4 Fokus Reformasi Birokrasi								
1. Indeks Reformasi Birokrasi	Skor		56,04	55,55	60,01	59,98	87,00	<

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar (Target Kondisi Kinerja pada Tahun 2020)	Interpretasi Belum Tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Angka	45,29	48,9	53,03	55,14	57,09	62	<
3. Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Predikat	T	T	ST	ST ⁿ	Dalam Proses	ST	=
4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat	B	B	A	A	A	A	=
1.2. ASPEK PELAYANAN UMUM								
1.2.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib								
1.2.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar								
1. Pendidikan								
a. APM SD/MI	%	83,29	81,84	98,19	96,20	91,32	99,33	<
b. APM SMP/MTs	%	65,14	65,49	86,95	89,63	80,17	95,64	<
c. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	82,01	85,59	48,87	49,46	49,36	89,10	<
d. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	97,08	93,58	111,47	109,23	108,14	112,34	<
e. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	89,99	89,50	109,32	107,16	96,37	111,00	<
f. Persentase Satuan Pendidikan Dasar (SD/MI) yang Berakreditasi A	%	19,49	28,03	28,03	30,00	30,00	40,32	<
g. Persentase Satuan Pendidikan Dasar (SMP/MTs) yang Berakreditasi A	%	26,45	35,93	39,52	41,00	41,00	37,97	>

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar (Target Kondisi Kinerja pada Tahun 2020)	Interpretasi Belum Tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
h. Bangunan SD dalam Kondisi Baik	%	45,06	45,72	46,73	35,16	48,95	80,00	<
l. Bangunan SMP dalam Kondisi Baik	%	38,31	38,63	39,03	41,49	49,19	95,00	<
j. Jumlah Lembaga Pendidikan Non Formal yang Terakreditasi	Angka	17	18	19	54	30	21	>
k. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/DIV	%	82,79	89,18	84,45	84,10	83,16	92,25	<
l. Persentase Guru SD yang Bersertifikasi	%	41,07	48,27	41,80	42,03	35,77	65,70	<
m. Persentase Guru SMP yang Bersertifikasi	%	43,03	55,93	54,26	43,45	49,89	70,15	<
2. Kesehatan:								
a. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Angka	7	5	4	4	2	5	>
b. Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	Angka	5	4	2	3	1	5	>
c. Rasio Posyandu Persatuan Balita	Angka	133	131	130	129	129	140	>
d. Prevalensi Kekurangan Gizi (<i>Underweight</i>) pada Anak Balita	%	17,40	21,80	16,09	3,08	5,77	9,00	>
e. Prevalensi <i>Stunting</i> (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun)	%	21,20	23,80	26,38	6,10	6,60	6,10	<
f. Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 Penduduk (CNR)	Angka	220	232	231	331	211	293	<
g. Prevalensi HIV	%	0,22	0,16	0,19	0,22	0,24	0,22	<

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar (Target Kondisi Kinerja pada Tahun 2020)	Interpretasi Belum Tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
h. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	%	80,00	97,00	85,00	97,00	95,00	95,00	=
i. Persentase Eliminasi Malaria	Permil	< 1	0,82	< 1	0,38	0,09	< 1	=
j. Persentase Penemuan Penyakit Tidak Menular (Diabetes Melitus)	%	10,00	1,76	2,32	6,00	3,46	50,00	<
k. Prevalensi Tekanan Darah Tinggi	%	24,16	4,49	5,56	11,93	7,99	21,00	>
l. Prevalensi Obesitas pada Penduduk Usia 18+ Tahun	%	15,40	1,00	2,99	10,04	5,94	15,40	>
m. Prevalensi Merokok Penduduk Usia <18 Tahun	%	7,40	1,29	1,37	0,85	1,50	5,80	>
n. Persentase Puskesmas yang Terakreditasi	%	40,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
o. Cakupan Pelayanan Anak Balita	%	80,00	87,20	85,06	91,13	86,00	90,00	<
p. Hasil Evaluasi Kinerja RSUD	Kriteria	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	=
q. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan RSUD	%	90,00	90,91	90,91	90,91	95,45	100,00	<
r. Pencapaian 80 Persen Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi	%	92,00	98,80	90,00	96,90	89,16	95,00	<
s. RSUD yang Tersertifikasi Akreditasi Nasional	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
t. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/ Kartu Indonesia Sehat (KIS)	%	65,00	70,00	70,00	100,00	100,00	100,00	=

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar (Target Kondisi Kinerja pada Tahun 2020)	Interpretasi Belum Tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
u. Persentase Puskesmas dengan Minimal Memiliki 5 (Lima) Jenis Tenaga Kesehatan	%	65,00	70,00	72,00	75,00	80,00	80,00	=
v. Cakupan Persalinan Ibu di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	%	74,00	93,60	94,17	96,02	95,64	82,00	>
w. Pemenuhan Minimal 7 (Tujuh) Dokter Spesialis di RSUD	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
x. Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas	%	80,00	87,80	80,00	93,50	79,92	90,00	<
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
a. Persentase Jalan Kota dalam Kondisi Baik (>40 km/jam)	%	90,09	79,09	80,95	81,64	87,98	100,00	<
b. Persentase Penanganan Luas Genangan	%	14,63	21,21	50,32	67,39	68,74	79,92	<
c. Persentase Penduduk Berakses Air Minum	%	41,41	43,21	43,65	44,17	44,82	61,80	<
d. Persentase Rumah Tinggal yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak	%	33,26	36,49	35,99	35,96	35,61	50,88	<
e. Persentase Bangunan ber-IMB	%	37,31	49,23	65,04	80,33	93,45	87,38	>
f. Persentase Pelanggaran Perda Penataan Ruang yang Ditangani	%	50,00	64,36	74,02	79,23	58,51	70,00	<
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman								
a. Persentase RTLH yang Tertangani	%		9,19	12,24	19,06	28,81	72,25	<

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar (Target Kondisi Kinerja pada Tahun 2020)	Interpretasi Belum Tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat								
a. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	%	74,00	100,00	100,00	100,00	100,00	82,00	>
b. Persentase Penegakan PERDA	%	74,00	100,00	100,00	100,00	100,00	82,00	>
6. Sosial								
a. Persentase PMKS yang Tertangani	%	25	37,36	40	50	70	40	>
1.2.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar								
1. Tenaga kerja								
a. Upah Minimum Kota	Rp	1.870.000	2.054.365,32	2.263.390	2.445.141,15	2.739.983,04	2.747.173,00	<
b. Angka Perselisihan Pengusaha-Pekerja per Tahun	Angka			53	55	65	58	>
c. Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Angka			53	34	29	58	<
d. Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan	Angka	225	980	980	681	1.232	1.080	>
e. Besaran Pekerja/ Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	Angka	92.025	103.262	140.533	91.546	79.478	140.226	<
f. Persentase Penyelesaian Perselisihan Buruh dan Pengusaha terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah	%			100,00	100,00	100,00	100,00	=

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar (Target Kondisi Kinerja pada Tahun 2020)	Interpretasi Belum Tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
g. Persentase Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	%		15,00	17,50	20,00	20,00	22,50	<
h. Persentase Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat	%		40,00	45,00	50,00	50,00	55,00	<
i. Persentase Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan	%		20,00	20,00	20,00	-	80,00	<
j. Rasio Pencaker yang Terdaftar Lulusan S1/S2/S3 Dibagi Pencaker yang Terdaftar per Tahun	Angka		23,00	22,00	21,11	21,00	21,00	=
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
a. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan	%	4,20	3,71	3,23	3,24	3,03	4,33	<
b. Persentase Aktifitas Perempuan dalam Penanganan Kasus Kekerasan di Masyarakat	% per 100.000 perempuan	6,33	57,70	80,19	147,00	134,80	137,00	<
c. Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Tertangani Sesuai Standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
d. Persentase Kecamatan Layak Anak	%			30,00	70,00	70,00	75,00	<
3. Pangan								
a. Cadangan Pangan Pemerintah	Ton	7,00	7,148	15,712	24,084	24,084	10,00	>
b. Ketersediaan Energi per Kapita	(kkal/kap/hari)	2.286,00	2.308,00	2.286,00	3.339,00	2.490,00	2.400,00	>

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar (Target Kondisi Kinerja pada Tahun 2020)	Interpretasi Belum Tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
c. Ketersediaan Protein per Kapita	(gr/kap/hari)	71,98	71,98	71,98	72,06	72,10	71,98	>
d. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	(%)	62,50	62,50	80,00	80,00	85,00	62,50	>
4. Pertanahan								
a. Persentase Penyelesaian Izin Lokasi	%		100,00	100,00	100,00	60,00	100,00	<
5. Lingkungan Hidup								
a. Penurunan Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	=
b. Persentase Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah	%	11,08	11,08	11,08	11,08	11,08	14,00	<
c. Persentase Jumlah Penduduk yang Dilayani Melalui Kegiatan Pengurangan Volume Sampah (3R)	%		50,00	50,00	40,00	50,00	60,00	<
d. Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	%	90,22	91,00	92,80	95,00	95,00	95,00	=
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
a. Terselenggaranya Pelayanan Terpadu Satu Atap Secara Mantap	%	80,00	85,00	85,00	90,00	100,00	100,00	=
7. Pemberdayaan Masyarakat								
a. Persentase Kelurahan yang Difasilitasi dan Diberdayakan	%	90,00	90,00	90,00	90,00	95,00	95,00	=

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar (Target Kondisi Kinerja pada Tahun 2020)	Interpretasi Belum Tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
a. Angka Kelahiran (<i>Total Fertility Rate</i> /TFR)	per Perempuan Usia Reproduksi 15-49 Tahun	2,17	2,17	2,37	2,37	2,37	2,12	<
b. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya di Bawah Usia 20 Tahun	%	2,79	0,58	0,3	0,28	0,30	2,83	>
c. Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Aktif	%	67,32	72,43	72,43	72,65	72,79	67,4	<
d. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)	%	12,93	12,26	12,10	11,62	11,50	9,31	<
e. Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	30,5	32,48	33,18	34,19	34,68	35,38	<
f. Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi	%	10,7	21,3	15,9	16,54	15,58	6,48	<
9. Perhubungan								
a. Tingkat Pelayanan pada Jalan Arteri	Skala	C	C	C	C	C	B	<
b. Tingkat Pelayanan pada Jalan Kolektor	Skala	C	C	C	C	C	B	<
10. Komunikasi dan Informasi								
a. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	%	70,00	80,00	80,00	85,00	90,00	100,00	<

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar (Target Kondisi Kinerja pada Tahun 2020)	Interpretasi Belum Tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah								
a. Persentase UKM Non BPR/LKM aktif	%	49,59	46,88	45,20	40,63	36,89	60,20	<
b. Persentase BPR/LKM aktif	%	47,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
c. Persentase Usaha Mikro dan Kecil dibanding seluruh UKM	%	87,08	87,82	88,26	89,47	63,10	87,84	<
d. Persentase Koperasi Aktif Dibanding Jumlah Koperasi Terdaftar	%	47,97	42,24	21,23	25,23	26,35	65,05	<
12. Penanaman Modal								
a. IKM Bidang Perizinan	Angka	73	80	80	81,00	84,37	90	<
13. Kepemudaan dan Olah Raga								
a. Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	%	25,00	40,00	55,00	70,00	85,00	85,00	=
b. Cakupan Pembinaan Olahraga	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
c. Peningkatan Pelatih yang Bersertifikasi	Angka			8,00	24,00	24,00	24,00	=
d. Cakupan Pembinaan Atlet Muda/Pelajar	%	40,00	55,00	65,00	70,00	75,00	75,00	=
e. Atlet Berprestasi	%	45,00	55,00	70,00	80,00	90,00	90,00	=
f. Persentase Wirausaha Muda	%				50,00	80,00	80,00	=
14. Statistik								
a. Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi	dokumen	ada	ada	ada	ada	ada	ada	=
15. Persandian								

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar (Target Kondisi Kinerja pada Tahun 2020)	Interpretasi Belum Tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
a. Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah	%	60,00	75,00	80,00	80,00	80,00	100,00	<
16. Kebudayaan								
a. Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Daerah/Nasional	Angka	5	1	2	1	0	5	<
b. Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Lestari	Angka	0	0	0	0	0	1	<
c. Jumlah Promosi Budaya yang Diselenggarakan/Diikuti	Angka	10	0	1	1	0	10	<
d. Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Diinventarisasi	Angka				52	0	90,00	<
17. Perpustakaan								
a. Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	Buku	468	1.680	1.850	1.508	0	1.600	<
18. Kearsipan								
a. Peningkatan Pengolahan Arsip (Berkas)	Berkas	2.000	2.205	1.500	2.400	611	2.600	<
1.2.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan								
1. Kelautan dan Perikanan								
a. Nilai Konsumsi Ikan	(kg/perkapita/tahun)	29,08	30,93	31,72	35,81	41,22	33,20	>
b. Produksi Perikanan Budidaya	Ton	110,31	118,23	113,92	115,55	131,40	131,01	>
c. Produksi Perikanan Tangkap	Ton	628,76	613,10	3.200,00	3.404,00	3.232,02	703,11	>

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar (Target Kondisi Kinerja pada Tahun 2020)	Interpretasi Belum Tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
2. Pariwisata								
a. Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik	Orang	111.612	117.193	559.460	1.064.493	819.492	193.211	>
b. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	313	339	4.589	22.218	1.767	1.850	<
c. Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan	Hari	1,5	1,8	1,7	1,7	1,5	2,0	<
d. Kontribusi terhadap PAD dari Pariwisata	%	13,29	12,35	18,64	23,16	23,37	15,00	>
3. Pertanian								
a. Produksi Padi	Ton/Tahun	9.410,75	10.239,94	9.827,76	9.269,65	7.110,06	10.711,04	<
b. Produksi Jagung	Ton/Tahun	475,08	556,80	1.005,00	771,91	1.066,55	472,37	>
c. Produksi Daging	Ton/Tahun	4.362,40	5.143,16	5.219,76	5.474,75	5.239,188	4.986,40	>
d. Peningkatan Kawasan Hijau Pertamanan Kota	m²	54.663,62	60.737,36	76.641,00	146.643,68	146.643,68	80.841,43	>
4. Perdagangan								
a. Persentase Jumlah Pasar yang Ditata	%	10	10	10	10	0	80	<
5. Perindustrian								
a. Pertumbuhan IKM	%	6,09	5,85	3,61	4,03	2,38	6,41	<
b. Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	%		9,52	14,29	33,33	50,00	6,50	>

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar (Target Kondisi Kinerja pada Tahun 2020)	Interpretasi Belum Tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
1.2.3 Fokus Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan								
1. Perencanaan								
a. Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	%	80,00	98,60	100,00	92,53	87,43	90,00	<
b. Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
2. Keuangan								
a. Ketepatan Waktu Penyusunan RAPBD dan RAPBD-P	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
b. Persentase Kesesuaian Data Rincian Data Total BMD dengan Aktiva Tetap di Neraca Pemerintah Kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
c. Persentase Terlaksananya Penilaian dan Penghapusan BMD Sesuai dengan Usulan OPD	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
d. Persentase Penerimaan Pajak Daerah terhadap PAD	%	65,88	60,61	71,95	75,76	76,14	54,01	>
3. Kepegawaian								
a. Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah (ASN)	Angka	40	39	39	39	39	39	=
4. Penelitian dan Pengembangan								
a. Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	%		50,00	55,00	60,00	42,86	65,00	<

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar (Target Kondisi Kinerja pada Tahun 2020)	Interpretasi Belum Tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
5. Fungsi Penunjang Lainnya								
a. Presentase Tindak Lanjut Temuan	%	94,00	85,00	93,21	92,45	100,00	90,00	>
b. Jumlah Temuan BPK Tahun Berjalan	Angka	29	23	29	40	40	40	=
c. Pemenuhan Infrastruktur Kapabilitas APIP	Level	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	=
d. Tingkat Kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	=
e. Persentase Konflik Sosial yang terselesaikan	%	60,00	75,00	80,00	82,00	80,00	80,00	=
f. Persentase Korban Bencana yang di Evakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap	%	100,00	90,62	86,62	97,94	100,00	100,00	=
g. Terwujudnya Peraturan Daerah yang Berkualitas yang Tidak Bertentangan dengan Peraturan yang Lebih Tinggi	%	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	=
1.3. ASPEK DAYA SANG DAERAH								
1.3.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah								
1. Persentase PAD Terhadap Total Pendapatan Daerah	%	23,50	29,44	25,45	27,34	25,45	32,47	<
2. Opini Wajar Tanpa Pengecualian BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	=
3. Persentase Peningkatan Nilai Investasi (PMDN)	%	6,78	9,04	42,70	30,39	14,99	10,80	>

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar (Target Kondisi Kinerja pada Tahun 2020)	Interpretasi Belum Tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
4. Persentase Peningkatan Nilai Investasi (PMA)	%	21,71	18,48	2,62	16,37	4,05	19,12	<
5. BUMD dengan Kategori Sehat dan Baik	Angka	3	3	3	3	5	5	=
6. Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat	%	2,70	3,10	4,03	6,05	8,28	4,45	>
7. Persentase UMKM yang Memiliki Laba	%	16,38	16,67	17,01	16,85	16,14	10,81	>
8. Skor Pola Pangan Harapan	skor	82,95	83,00	84,00	85,20	85,50	83,20	>
1.3.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur								
1. Persentase Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	%	78,53	79,49	80,36	81,64	93,97	89,54	>
2. Persentase Drainase dalam Kondisi Baik	%	82,00	85,30	86,80	87,00	90,58	90,00	>
3. Rasio Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum terhadap Panjang Jalan Kota	titik/km	14,00	14,00	17,00	19,50	20,24	20,20	>
4. Jumlah Kasus/Kejadian Kecelakaan per Tahun	Kejadian	415	297	241	297	220	158	<
5. Cakupan Layanan TIK (Telekomunikasi, Informasi dan Komunikasi)	%	70,00	80,00	80,00	85,00	90,00	100,00	<
6. Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Peruntukannya	%	51,10	51,66	52,01	52,64	53,24	70,00	<
7. Jumlah Kelurahan Siaga Bencana	Angka	2	0	0	0	0	2	<
8. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	54,00	55,00	55,00	55,00	60,32	60,00	=

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar (Target Kondisi Kinerja pada Tahun 2020)	Interpretasi Belum Tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
1.3.3 Fokus Iklim Berinvestasi								
1. Angka Kriminalitas	Angka	3.293	3.173	1.870	1.734	3.349	2.701	<
1.3.4 Fokus Sumber Daya Manusia								
1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	8,10	8,10	7,28	7,12	8,78	7,90-8,90	=
2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	63,41	63,41	65,92	65,52	67,79	68,32	<

2.5 Capaian Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan yang bersifat wajib sesuai dengan standar pelayanan minimal yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin hak masyarakat untuk menerima suatu Pelayanan Dasar dari Pemerintahan Daerah dengan mutu tertentu, serta mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah sendiri menerapkan SPM dalam rangka pemenuhan Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara Indonesia. Dalam penerapan SPM ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM yang terdiri dari:

- (1) Pendidikan
- (2) Kesehatan
- (3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- (4) Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman
- (5) Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan
- (6) Sosial

Capaian Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2020 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.146 Pencapaian SPM Kota Bandar Lampung

No	Bidang Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	2016			2017			2018			2019			2020		
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Pendidikan	1.1 Pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	Orang	145.337	141.533	97,38	154.248	144.599	93,74	157.752	149.168	94,56	160.075	150.644	94,11	164.266	145.414	88,52
		1.2 Pendidikan kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Orang	187.611	185.753	99,01	189.487	192.100	101,38									
		1.3 Pendidikan anak usia dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Orang	57.524	19.610	34,09	58.139	46.951	80,76	57.938	28.316	48,87	57.709	28.485	49,36	57.709	28.485	49,36
2	Kesehatan	2.1 Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar (K4)	Orang				20.216	18.869	93,34	20.216	18.869	93,34	19.896	18.942	95,21	19.731	18.587	94,20
		2.2 Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan (PN)	Orang				19.297	17.962	93,08	19.297	17.962	93,08	18.992	18.237	96,02	18.836	18.014	95,64

No	Bidang Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	2016			2017			2018			2019			2020		
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.3 Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir usia 0 - 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (KN Lengkap)	Orang				18.227	17.340	95,13	18.227	17.340	95,13	18.018	17.293	95,98	17.908	16.990	94,87
		2.4 Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar + Jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar + Balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang				91.981	62.614	68,07	91.981	62.614	68,07	90.994	84.420	92,78	90.461	79.160	87,51
		2.5 Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang				35.029	32.789	93,61	35.029	32.789	93,61	109.006	36.551	33,53	35.811	0	0,00
		2.6 Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali	Orang				42.955	32.882	76,55	42.955	32.882	76,55	69.084	64.215	92,95	77.173	64.283	83,30
		2.7 Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah orang usia 15-59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	Orang				728.291	420.499	57,74	728.291	420.499	57,74	701.676	691.516	98,55	716.763	334.888	46,72



No	Bidang Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	2016			2017			2018			2019			2020		
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.8 Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah penderita hipertensi usia >= 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang				159.366	33.521	21,03	159.366	33.521	21,03	130.076	92.873	71,40	132.667	63.432	47,81
		2.9 Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	Jumlah penderita diabetes mellitus usia >= 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang				51.626	13.154	25,48	51.626	13.154	25,48	53.712	46.736	87,01	27.788	27.451	98,79
		2.10 Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Orang				813	524	64,45	813	524	64,45	1.778	1.263	71,03	1.817	1.290	71,00
		2.11 Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang	Orang				2.975	2.259	75,93	2.975	2.259	75,93	30.094	23.987	79,71	30.132	16.488	54,72
		2.12 Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Orang				18.302	11.129	60,81	18.302	11.129	60,81	15.549	13.549	87,14	17.574	14.189	80,74
			Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K-4 (mendapat pelayanan kehamilan paling sedikit 4 kali sesuai standar)	Persen	95	95	100,00												

No	Bidang Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	2016			2017			2018			2019			2020		
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	Persen	80	84	105,00												
			Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	Persen	90	96	106,67												
			Cakupan Pelayanan Ibu Nifas (masa 6 sampai 42 jam pasca persalinan)	Persen	90	85	94,44												
			Cakupan Neonatus (bayi umur 0-28 hari) dengan Komplikasi yang Ditangani	Persen	80	84	105,00												
			Cakupan Kunjungan Bayi	Persen	90	95	105,56												
			Cakupan Desa /Kelurahan Universal Child Immunization (desa/ kelurahan dengan cakupan imunisasi dasar secara lengkap pada bayi >= 80%)	Persen	100	100	100,00												
			Cakupan Pelayanan Pemantauan Tumbuh-Kembang Anak Balita (12-59 bulan)	Persen	90	92	102,22												

No	Bidang Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	2016			2017			2018			2019			2020		
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak Usia 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin	Persen	100	100	100,00												
			Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	Persen	90	100	111,11												
			Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Siswa Kelas I SD dan Setingkat oleh Tenaga Kesehatan atau Tenaga Terlatih (guru UKS/ dokter kecil	Persen	100	100	100,00												
			Cakupan Peserta KB Aktif pada Pasangan Usia Subur	Persen	70	72	102,86												
			Angka Penemuan Acute Flacid Paralysis (lumpuh layuh mendadak) per 100.000 penduduk < 15 tahun	Persen	100	100	100,00												
			Cakupan Penemuan Penderita Pneumonia Balita	Persen	100	100	100,00												
			Cakupan Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif	Persen	85	90	105,88												
			Cakupan Penderita DBD yang ditangani	Persen	100	100	100,00												

No	Bidang Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	2016			2017			2018			2019			2020		
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Cakupan Penemuan Penderita Diare	Persen	100	100	100,00												
			Cakupan Pelayanan Pasien Masyarakat Miskin di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar (Puskesmas/ Balai Pengobatan/ Praktek bersama dan Perorangan)	Persen	100	100	100,00												
			Cakupan Pelayanan Pasien Masyarakat Miskin di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan (Rumah Sakit/ BKMM/ BKPM/ BKIM)	Persen	100	100	100,00												
			Cakupan Pelayanan Gawat Darurat level 1 yang harus diberikan oleh Sarana Kesehatan (Rumah Sakit) di Kab/Kota	Persen	100	100	100,00												
			Cakupan Desa/kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa yang ditangani < 24 jam	Persen	100	100	100,00												
			Cakupan Desa Siaga Aktif	Persen	80	100	125,00												
3	Pekerjaan Umum	3.1 Penduduk berakses air minum	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh akses air minum	Persen	41,41	41,41	100,00	43,21	43,21	100,00	44,98	43,65	97,04	52,54	44,17	84,07	61,80	44,82	72,52

No	Bidang Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	2016			2017			2018			2019			2020		
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		3.2 Rumah tinggal yang memiliki akses terhadap sanitasi layak	Persentase jumlah penduduk yang memiliki akses sanitasi yang layak	Persen	33,26	33,26	100,00	36,49	36,49	100,00	40,63	35,99	88,58	44,64	35,96	80,56	50,88	35,61	69,99
4	Perumahan Rakyat	4.1 Rumah Layak Huni dan Terjangkau	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah daerah)	Persen										100	100	100,00	100	100	100,00
		4.2 Lingkungan Yang Sehat dan Aman Yang Di Dukung Dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman Yang Di Dukung Dengan PSU (bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah daerah)	Persen										100	100	100,00	100	100	100,00
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	5.1 Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum PERDA dan PERKADA	Persen	100	74	74,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00	100	100	100,00
		5.2 Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	100	79	78,50	100	79	79,00	100	80	79,50	100	80	80,00	100	80	80,00
		5.3 Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	100	89	88,50	100	89	89,00	100	90	89,50	100	90	90,00	100	90	90,00

No	Bidang Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	2016			2017			2018			2019			2020		
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		5.4 Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	89	88,50	100	89	89,00	100	90	89,50	100	90	90,00	100	90	90,00
		5.5 Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	89	88,50	100	89	89,00	100	90	89,50	100	90	90,00	100	90	90,00
6	Sosial	6.1 Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Orang	20	16	80,00	90	23	25,56	100	2	2,00	50	34	68,00	100	3	3,00
		6.2 Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Orang	96	23	23,96	210	180	85,71	210	170	80,95	258	207	80,23	104	103	99,04
		6.3 Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlanter diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlanter yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Orang	60	20	33,33	90	90	100,00	90	90	100,00	140	3	2,02	195	95	48,72
		6.4 Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	Orang	10	7	70,00	12	7	58,33	12	7	58,33	20	19	95,00	17	17	100,00

No	Bidang Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	2016			2017			2018			2019			2020		
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		6.5 Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Kecamatan	20	14	70,00	20	15	75,00	20	17	85,00	20	19	95,00	20	20	100,00

Percepatan Penerapan SP) merupakan salah satu kebijakan prioritas nasional yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut oleh Pemerintah Daerah. Oleh Karena itu Pemerintah Kota Bandar Lampung telah melakukan langkah-langkah untuk percepatan penerapan dan pencapaian SPM. Namun demikian didalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang mengakibatkan capaian SPM masih belum optimal, diantaranya capaian SPM Bidang Sosial dan Kesehatan.

Capaian SPM Bidang sosial yang masih sangat rendah khususnya Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti. Hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan keuangan daerah yang mengakibatkan kegiatan-kegiatan terkait rehabilitasi sosial dasar untuk penyandang disabilitas menjadi terhambat khususnya pada Tahun 2018 dan 2020.

Indikator SPM Bidang Kesehatan Tahun 2016 menggunakan pedoman pelaksanaan SPM berdasar Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 741/Menkes/Per/VII/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota yang terdiri dari 18 indikator, sedangkan untuk Tahun 2017 dan seterusnya, Indikator SPM menggunakan pedoman SPM yaitu Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang terdiri dari 12 indikator.

Untuk Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif, Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi target belum maksimal, hal ini disebabkan karena tidak maksimalnya pelayanan POSBINDU (Pos Pembinaan Terpadu) dalam upaya deteksi dini permasalahan penyakit tidak menular di masyarakat seperti diabetes mellitus, darah tinggi dan hipertensi pada saat pandemi covid 19. Pelayanan POSBINDU dilakukan secara pasif, menunggu masyarakat datang untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sehingga target pemeriksaan tidak maksimal seperti yang diharapkan. Kegiatan POSBINDU ini sebelum masa pandemi covid-19 dilakukan secara aktif dengan mendatangi tempat-tempat keramaian seperti pasar tradisional, *care free*

day dimana banyak orang berkerumun untuk berolah raga. Pada tempat keramaian tersebut dilakukan pemeriksaan kesehatan, sehingga dapat menjaring sebanyak banyaknya masyarakat untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan, oleh karenanya sebelum masa pandemi *covid-19* target dapat tercapai.

Pencapaian hasil kegiatan pada jenis Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis sebesar 54,72 persen. Berdasarkan data tersebut menunjukkan masih adanya 45,28 persen orang terduga Tuberkulosis yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Hal ini disebabkan karena :

- a. Belum maksimalnya petugas Puskesmas dalam penemuan kasus suspek Tuberkulosis.
- b. Belum maksimalnya klinik kesehatan, dokter praktik mandiri (DPM) dalam melaporkan kasus suspek Tuberkulosis yang ada diperoleh kepada Puskesmas setempat.
- c. Belum maksimalnya integrasi oleh program lain di Puskesmas dalam upaya penemuan kasus suspek Tuberkulosis baik secara pasif maupun aktif.
- d. Belum maksimalnya komitmen lintas sektor (kelurahan, kecamatan) dalam rangka penemuan kasus suspek Tuberkulosis.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan jumlah penemuan penderita baru TBC di Kota Bandar Lampung. Semakin banyak ditemukan penderita baru TBC maka akan semakin cepat dan tepat dilakukan pengobatan secara tuntas sehingga penularannya dapat dikendalikan. Upaya tersebut diantaranya:

- a. Bekerja sama dengan melibatkan lembaga masyarakat aisyiah dalam upaya penemua penderita TBC baru di masyarakat.
- b. Memperkuat kembali komitmen lintas sektor (kelurahan, kecamatan, klinik kesehatan swasta, praktek dokter) serta peran keluarga dalam upaya mencegah dan menanggulangi penyakit TBC.

- c. Secara rutin dan terus menerus melakukan edukasi dan promosi kesehatan kepada masyarakat melalui Puskesmas agar apabila diantara anggota keluarganya mengalami gejala TBC agar segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan.

2.6 Capaian Kinerja Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2016-2020

Kota Bandar Lampung memiliki keinginan yang kuat untuk turut berperan aktif dalam pencapaian agenda TPB/SDGs. RPJMD Tahun 2021-2026 memperhatikan analisis capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Kota Bandar Lampung sesuai dengan kelompok kewenangan kota. Capaian tersebut secara umum disajikan dalam bentuk data dengan baseline tahun 2016. Berdasarkan data capaian tersebut selanjutnya dilakukan analisis apakah capaian dari masing-masing indikator pada tahun terakhir telah memenuhi target yang selaras dengan target nasional. Berikut kami sajikan capaian indikator SDGs di Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2020.

Tabel 2.147 Capaian Indikator SDGs di Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2020

KODE INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET PADA AKHIR PRIODE PERENCANAAN (2020)	CAPAIAN				
					BASELINE (2016)	2017	2018	2019	2020
TUJUAN 1 : MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN									
Target 1.3. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada Tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan									
1.3.1	Persentase Jumlah Lansia yang Tertangani	Persen	11,00	25,00	16,00	16,00	23,00	9,00	12,00
1.3.2	Persentase Jumlah Anak Terlantar yang Tertangani	Persen	96,00	71,00	58,00	58,00	63,00	60,00	70,00
1.3.3	Persentase Jumlah Penyandang Cacat dan Trauma yang Dibina	Persen	4,00	12,00	8,00		10,00	5,00	-
1.3.4	Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial	Persen	8,00	36,00	25,00		30,00	9,00	-

KODE INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET PADA AKHIR PRIODE PERENCANAAN (2020)	CAPAIAN				
					BASELINE (2016)	2017	2018	2019	2020
1.3.5	Persentase Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	Persen	7,00	56,00	38,00	42,00	46,00	42,00	55,00
1.3.6	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	Persen		50,00	25,00	37,36	40,00	50,00	70,00
1.3.7	Persentase PMKS yang Tertangani	Persen		3,50	25,00	37,36	40,00	50,00	70,00
1.3.8	Persentase Ketersediaan Data PMKS dan PSKS	Persen	9,00	6,00	6,00				
1.3.9	Persentase Panti Sosial yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya	Persen	9,00	6,00	6,00				
1.3.10	Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial	Persen	9,00	6,00	6,00				
1.3.11	Cakupan Pendampingan Program PKH	Persen	100,00		100,00	100,00	100,00		
1.3.12	Cakupan Pendampingan Program PKH dan BPNT Kota Bandar Lampung	Persen		100,00				100,00	100,00
1.3.13	Jumlah PSKS yang Ikut Serta dalam Penanganan Masalah Sosial	Orang	145,00	325,00	222,00	244,00	269,00	673,00	768,00
1.3.14	Rasio Tempat Ibadah Agama Persatuan Penduduk	Tempat Ibadah/ Jiwa	0,16	0,18	0,16	0,17	0,17	0,15	0,17
1.3.15	Persentase TPU yang Ditangani	Persen		15,00				15,00	
1.3.1	Persentase Tempat Pemakaman Umum per Satuan Penduduk	Persen		8,40				0,03	
TUJUAN 2 : MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN									
Target 2.2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.									
2.2.1	Persentase Balita Kurang Gizi	Persen	21,70	13,00	17,40			3,08	
2.2.2	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Anak Baduta (bawah dua tahun)	Persen	-	21,00	21,20			6,10	



KODE INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET PADA AKHIR PRIODE PERENCANAAN (2020)	CAPAIAN				
					BASELINE (2016)	2017	2018	2019	2020
2.2.3	Cakupan Pelayanan Anak Balita	Persen	80,00	90,00	80,00			92,78	
2.2.4	Persentase Setiap Orang Usia ≥60 Tahun Mendapatkan Screening Kesehatan Sesuai Standar	Persen	50,00	50,00	50,00				
Target 2.3. Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian.									
2.3.1	Persentase Tersusunnya Pelaporan Monitoring dan Evaluasi	Persen	80,00	80,00	80,00				
2.3.2	Persentase Tersedianya Benih Sayuran dan Rak Beserta Media Tanam	Persen	30,00	30,00	30,00				
2.3.3	Keikutsertaan Dinas Dalam Promosi Pembangunan	Kali	1,00	1,00	1,00				
2.3.4	Persentase Tersedianya Sarana Pertanian untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Persen	10,00	0,00	0,00				
2.3.5	Tersedianya data Statistik Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Data	ada	tidak	tidak				
2.3.6	Persentase Termonitornya Harga-Harga Komoditi Pertanian Ditingkat Usaha Tani	Persen	80,00	80,00	80,00				
2.3.7	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	Persen	55,00		62,50				
2.3.8	Cadangan Pangan Pemerintah	Ton	14,00	10,00	7,00	-	8,50	24,08	-
2.3.9	Ketersediaan Energi per Kapita	kcal/kap/hari	2.286,00	2.400,00	2.286,00	-	2.286,00	3.339,00	2.490,00
2.3.10	Ketersediaan Protein per Kapita	gr/kap/hari	71,98	71,98	71,98		71,98	72,06	72,10
2.3.11	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	Persen	55,00	62,50		62,50	60,00	80,00	85,00
2.3.12	Tersedianya Buku Pertanian dalam Angka	Dokumen	0,00	4		1	1	1	-
2.3.13	Produksi Tembakau	ton/tahun		29,75	6,75	25,65			



KODE INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET PADA AKHIR PRIODE PERENCANAAN (2020)	CAPAIAN				
					BASELINE (2016)	2017	2018	2019	2020
2.3.14	Persentase Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan Kompetensinya Melalui Pelatihan	Persen		10,00		10,00	100,00	26,92	10,00
2.3.15	Peningkatan Pendapatan Petani	Persen		20,00		5,00	5,00	31,96	4,00
2.3.16	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	Persen			67,85				
Target 2.4. Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.									
2.4.1	Kontribusi Sub Sektor Pertanian Tanaman Hortikultura terhadap PDRB	Persen		0,14		0,14	0,14	0,14	
2.4.2	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian Tanaman Hortikultura	Persen		12,15		12,15	12,15	12,15	
2.4.3	Data Potensi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Dokumen		1,00		1,00	1,00	1,00	
2.4.4	Produksi Padi	Ton/Thn	9.250,00	10.337,83	9.410,75	9.558,41	9.827,76	9.269,65	
2.4.5	Produksi Jagung	Ton/Thn	346,80	410,36	475,08	512,49	1.005,00	771,91	
2.4.6	Desa yang Berbudidaya Sayuran Organik	Angka		1,00				1,00	
2.4.7	Pusat Pelatihan Budidaya Hortikultura	Angka		1,00					
2.4.8	Kontribusi Sektor Pertanian (palawija) terhadap PDRB	Persen		0,24		0,24	0,24	0,24	
2.4.9	Kontribusi Sektor Perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	Persen		0,20		0,20	0,20	0,20	
2.4.10	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	Persen		0,02					96,24
2.4.11	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan Berkelanjutan	Persen		55,56					96,24
2.4.12	Cakupan Kelompok Tani yang Mendapatkan Bantuan Sarana dan Prasarana Pertanian	Persen		35,00			35,00		50,00



KODE INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET PADA AKHIR PRIODE PERENCANAAN (2020)	CAPAIAN				
					BASELINE (2016)	2017	2018	2019	2020
2.4.13	Pembinaan, Monitoring dan koordinasi Penatausahaan Hasil Hutan	Persen		100,00	100,00				
2.4.14	Persentase Administrasi Penunjang Kegiatan Rehabilitasi Lahan dan Lingkungan	Persen		100,00	100,00	100,00			
2.4.15	Persentase Penghijauan Lingkungan	Persen		100,00	100,00	100,00			
2.4.16	Persentase Pengembangan Tanaman Bambu	Persen		100,00	100,00	100,00			
Target 2.5. Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana yang disepakati secara internasional.									
2.5.1	Jumlah Kasus Penyakit yang Berasal dari Hewan (rabies, antrax, flu burung dll)	Kasus		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2	Produksi Daging	Ton/Thn	4.042,52	4.986,40	4.362,40	4.568,44	5.219,76	5.474,75	5.078,67
2.5.4	Sarana Pertanian untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Persen		27,95	27,95				
2.5.5	Tersedianya Bibit Pala dan Cengkeh Unggul (Batang)	Jumlah			3.350,00				
2.5.7	Persentase Kelompok Petani Tembakau yang Dibina	Persen		70,00		-	58,00		
2.5.8	Persentase Luas Lahan Tembakau yang Menggunakan Bibit Tembakau Berkadar Nikotin Rendah	Persen		81,82		29,75		100,00	70,00
TUJUAN 3 : MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA									
Target 3.4. Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.									
3.4.1	Eliminasi Malaria	Angka	<1	<1	<1	<1	<1	0,38	<1
3.4.2	Persentase Penemuan Penyakit Tidak Menular (Diabetes Melitus)	Persen	10,00	50,00	10,00	20,00	45,00	87,01	47,50
3.4.3	Prevalensi Obesitas pada Penduduk Usia 18+ Tahun	Persen	15,40	15,40	15,40	15,40	20,00	66,31	15,00
3.4.4	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	Persen	75,00	95,00	80,00	85,00	85,00	97,00	90,00

KODE INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET PADA AKHIR PRIODE PERENCANAAN (2020)	CAPAIAN				
					BASELINE (2016)	2017	2018	2019	2020
3.4.5	Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk (CNR)	Orang	193,00	271,00	220,00	231,00	231,00	331,00	258,00
3.4.6	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari Total Populasi	Persen	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	1,57	0,20
3.4.7	Persentase Puskesmas yang Melakukan Deteksi Dini dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM) dan Pelayanan Kesehatan Jiwa (Posbindu)	Persen	50,00	90,00	50,00	60,00	83,00	100,00	90,00
3.4.8	Prevalensi Tekanan Darah Tinggi	Persen	22,88	21,00	24,16	23,90	30,00	71,40	20,00
3.4.9	Prevalensi Merokok Penduduk Usia <18 Tahun	Persen	7,80	5,80	7,40	7,00	7,00	32,43	3,40
3.4.10	Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Persen	40,00	50,00	40,00	40,00	40,00	100,00	50,00
3.4.11	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)	Persen	69,2	100,00	65,00	70,00	100,00	100,00	100,00
3.4.12	Persentase Puskesmas yang Terakreditasi	Persen		100,00	40,00	80,00	100,00	100,00	100,00
3.4.13	Pencapaian 80 Persen Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi	Persen	90,38	95,00	92,00	98,80	90,00	96,90	84,70
3.4.14	Rasio Posyandu per Satuan Balita	Balita/ Posyandu	168,00	140,00	133,00	131,00	126,00	140,00	140,00
3.4.15	Persentase Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Pustu dan Jaringan yang Sesuai Standar	Persen	60,00	90,00	70,00	80,00	80,00	90,00	100,00
3.4.16	Cakupan Penduduk Miskin yang Mendapat Pelayanan Kesehatan	Persen	100,00	100,00	100,00				
3.4.17	Cakupan Manajemen Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	70,00	95,00	70,00	75,00	80,00	85,00	100,00
3.4.18	Persentase Puskesmas yang Melakukan Kegiatan GEMA CERMAT untuk Meningkatkan	Persen	60,00	100,00		75,00	75,00	100,00	100,00



KODE INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET PADA AKHIR PRIODE PERENCANAAN (2020)	CAPAIAN				
					BASELINE (2016)	2017	2018	2019	2020
	Penggunaan Obat Nasional pada Masyarakat								
3.4.19	Persentase Puskesmas yang Memanfaatkan Obat Tradisional dan Melakukan Asuhan Mandiri	Persen	50,00	100,00	60,00				
3.4.20	Persentase Produsen Industri Rumah Tangga (PIRT) yang Mendapatkan Ijin Rekomendasi	Persen	72,00	90,00	75,00		80,00	50,00	
3.4.21	Cakupan Persalinan Ibu di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Persen	72,00	82,00	74,00	76,00	78,00	96,02	95,64
3.4.22	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Angka	8,00	5,00	7,00	5,00	4,00	4,00	2,00
3.4.23	Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	Angka	6,00	5,00	5,00	4,00	2,00	3,00	2,00
3.4.24	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin 30 PKM dan 50 Pustu	Persen	80,00	90,00	80,00	80,00	80,00	93,50	100,00
3.4.25	Angka Penggunaan Tempat Tidur (BOR)	Persen	95,00	85,00	95,00	92,00	90,00	58,00	39,00
3.4.26	Rata-Rata Lama Perawatan di Rumah Sakit (LOS=Length Of Stay)	Hari	4,00	6,00	4,50	5,00	5,50	3,00	3,00
3.4.27	TOI (Turn Over Interval = Tenggang Perputaran)	Hari	0,25	1,00	0,50	0,50	5,50	3,00	3,00
3.4.28	BTO (Bed Turn Over = Angka Perputaran Tempat Tidur)	Kali	60,00	50,00	60,00	60,00	55,00	47,00	40,00
3.4.29	Gross Death Rate (GDR)/Per Mill	0/00		20,35	20,48	20,45	20,40	19,71	10,00
3.4.30	Net Death Rate (NDR)/Per Mill	0/00		8,50	9,00	9,00	8,70	10,11	19,00
3.4.31	Cakupan Pelayanan BLUD	Persen		100,00				100,00	100,00
3.4.32	Hasil Evaluasi Kinerja RSUD	Nilai	Baik	Baik	Baik	Baik		Baik	Baik
3.4.33	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan RSUD	Persen	89,00	100,00	90,00	95,00		90,91	95,45
3.4.34	RSUD yang Tersertifikasi Akreditasi Nasional	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00
3.4.35	Pemenuhan Minimal Tujuh Dokter Spesialis di RSUD	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00



KODE INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET PADA AKHIR PRIODE PERENCANAAN (2020)	CAPAIAN				
					BASELINE (2016)	2017	2018	2019	2020
Target 3.7. Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.									
3.7.1	Cakupan Pasangan Usia Subur yang Istrinya di Bawah Usia 20 Tahun	Persen	2,78	2,83	2,79	2,75	2,95	0,28	0,30
3.7.2	Cakupan Pasangan Usia Subur yang Ingin ber KB Tidak Terpenuhi (unmeet need)	Persen	12,23	9,31	12,93	12,25	12,25	11,62	11,50
3.7.3	Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Aktif	Persen	67,30	67,40	67,32	62,43	72,43	72,65	72,79
3.7.4	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita	Persen	78,70	70,00	78,30	67,62	97,62	96,82	50,00
3.7.5	Angka Kelahiran (Total Fertility Rate/TFR)	Angka	2,17	2,12	2,17	2,17	2,15	2,17	2,37
3.7.6	Rasio Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB (PLKB/PKB) 1 Petugas di Setiap 1 Desa/Kelurahan (Petugas)	Persen	69,84	100,00	70,63	69,05	66,60	100,00	100,00
3.7.7	Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 Petugas di Setiap 1 Desa/ Kelurahan (Petugas)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.7.8	Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	29,95	35,38	30,50	32,48	21,12	32,19	34,68
3.7.9	Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi	Persen	10,80	6,48	10,70	10,70	18,94	16,54	15,58
3.7.10	Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD)1 Petugas di Setiap 1 Desa/ Kelurahan (Petugas)	Angka	126,00	126,00	126,00				
3.7.11	Cakupan Pasangan Usia Subur Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	Persen	82,60	87,00	80,40	81,67	91,67	84,21	50,00
3.7.12	Cakupan Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat Setiap Tahun	Persen	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

KODE INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET PADA AKHIR PRIODE PERENCANAAN (2020)	CAPAIAN				
					BASELINE (2016)	2017	2018	2019	2020
3.7.13	Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa/Kelurahan Setiap Tahun	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00
3.7.14	Persentase Sekolah yang Mendapat Pembinaan Kesehatan Reproduksi Remaja	Persen	70,00	75,00	75,00				
TUJUAN 4 : MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA									
Target 4.1. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.									
4.1.1	APK PAUD	Angka	81,67	89,10	82,01	85,59	48,87	49,46	49,36
4.1.2	Persentase Satuan PAUD Berakreditasi	Persen	30,83	71,81	39,03	47,22	55,42	40,84	54,00
4.1.3	APK SD/MI	Angka	116,53	112,34	111,32	111,51	111,02	109,23	108,14
4.1.4	APM SD/MI	Angka	95,74	99,33	96,38	97,67	98,15	96,20	91,32
4.1.5	Rasio Guru terhadap Murid SD/MI	Angka	1:19		1:20	1:20	1:20		
4.1.6	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mengikuti Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Keahlian	Orang	6.115		9.547	10.502	11.552		
4.1.7	Penerima Kartu Indonesia Pintar SD	Orang			22.000	23.000	24.000		
4.1.8	Persentase Peserta Didik SD/MI Putus Sekolah	Persen	0,06		0,06	0,05	0,04		
4.1.9	Persentase Lulusan SD/MI yang Melanjutkan ke SMP/MI/ SMP/PLB	Persen	110,26		110,00	111,00	112,00		
4.1.10	APK SMP/MTs	Persen	101,75	111,00	101,80	103,72	109,00	107,16	96,37
4.1.11	APM SMP/MTs	Persen	89,62	95,64	74,52	85,97	86,93	89,63	80,17
4.1.12	Rasio Guru terhadap Murid SMP/MTs	Angka	1:20		1:20	1:20	1:16,50		
4.1.13	Persentase Peserta Didik SMP Putus Sekolah	Persen	0,06		0,05	0,04	0,03		
4.1.14	Angka Kelulusan SMP	Persen	96,90		97,00	98,00	99,00		
4.1.15	Angka Kelulusan SMA	Persen	99,87		100,00				
4.1.16	Penerima Kartu Indonesia Pintar SMP	Orang	10.970,00		11.000	12.000	13.000		

KODE INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET PADA AKHIR PRIODE PERENCANAAN (2020)	CAPAIAN				
					BASELINE (2016)	2017	2018	2019	2020
4.1.17	Bangunan SD dalam Kondisi Baik	Persen		80,00				35,16	80,00
4.1.18	Bangunan SMP dalam Kondisi Baik	Persen		95,00				41,49	95,00
4.1.19	Persentase Satuan Pendidikan Dasar (SD/MI) yang Berakreditasi A	Persen		40,32				30,00	31,00
4.1.20	Persentase Satuan Pendidikan Dasar (SMP/MTs) yang Berakreditasi A	Persen		37,97				41,00	42,00
4.1.21	APM SMA/SMK/MA/Paket C	Persen	61,44	83,76	83,76				
4.1.22	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C	Persen	97,50	98,50	98,50				
4.1.23	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C	Persen	0,07	0,05	0,05				
4.1.24	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA/Paket C	Persen	99,87	100,00	100,00				
4.1.25	Bangunan SMA/SMK/MA dalam Kondisi Baik	Persen	97,00	100,00	100,00				
Target 4.6. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.									
4.6.1	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	Persen	10,00	85,00	25,00	40,00	55,00	70,00	85,00
4.6.2	Persentase Wirausaha Muda	Persen		80,00				50,00	
4.6.3	Cakupan Pembinaan Olahraga	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.6.4	Peningkatan Pelatih yang Bersertifikasi	Persen		24,00	-		8,00	24,00	24,00
4.6.5	Cakupan Pembinaan Atlet Muda/Pelajar	Persen	35,00	75,00	40,00	55,00	65,00	70,00	75,00
4.6.6	Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga dalam 1 Tahun	Kali	3,00	10,00	4,00	5,00	-	8,00	10,00
4.6.7	Atlet Berprestasi	Persen	40,00	90,00	45,00	55,00	70,00	80,00	90,00
Target 4.7. Pada tahun 2030, menjamin semua peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan, termasuk antara lain, melalui pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang berkelanjutan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, promosi budaya damai dan non-kekerasan, kewarganegaraan global dan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya dan kontribusi budaya terhadap pembangunan berkelanjutan.									
4.7.1	Jumlah Lembaga Pendidikan Non Formal yang Terakreditasi	Lembaga	16,00	21,00	17,00	18,00	19,00	54,00	22,00



KODE INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET PADA AKHIR PRIODE PERENCANAAN (2020)	CAPAIAN				
					BASELINE (2016)	2017	2018	2019	2020
4.7.2	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/DIV	Persen	75,38	92,25	82,79	90,97	84,45	84,10	92,25
4.7.3	Persentase Guru SD yang Bersertifikasi	Persen	40,15	65,70	41,07	43,47	41,80	42,03	37,38
4.7.4	Persentase Guru SMP yang Bersertifikasi	Persen	42,35	70,15	43,03	47,06	54,26	43,45	57,40
4.7.5	Persentase TK yang Dilakukan Pembinaan	Persen	90,00	100,00	92,00	94,00	-	100,00	100,00
4.7.6	Persentase Sekolah SMP/MTs yang Melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Berbasis Online	Persen	23,57	30,37	21,93	24,68	24,00	100,00	100,00
4.7.7	Jumlah Peserta Sosialisasi PUG Pendidikan	Orang	75,00	90,00		80,00	-	-	-
4.7.8	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun	Orang	13.207,00	14.500,00	15.643	11.284	12.457	8.012	3.791
4.7.9	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	Buku	18.268,00	23.836,00	468,00	1.680	1.850	1.508	2.554
4.7.10	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Judul	8.752,00	11.986,00	234,00	930,00	925,00	550,00	900,00
4.7.11	Buku Siap Layan	Buku	3.750,00	10.000,00			1.433	1.583	1.250
4.7.12	Persentase Budaya Gemar Membaca Siswa Sekolah	Persen		100,00	30,00				
4.7.13	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat	Persen				40,00	45,00	50,00	20,00
4.7.14	Persentase Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat	Persen		55,00		-	20,00	-	-
4.7.15	Persentase Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan	Persen		20,00		-	17,50	-	-
4.7.16	Persentase Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Persen		22,50		23,00	22,00	21,11	20,00
4.7.17	Persentase SDM yang Telah Mengikuti Diklat	Persen	30,00	30,00	30,00				



KODE INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET PADA AKHIR PRIODE PERENCANAAN (2020)	CAPAIAN				
					BASELINE (2016)	2017	2018	2019	2020
4.7.18	Penyelenggaraan Festival dan Budaya	Kali		5	5	5	1	1	-
4.7.19	Jumlah Promosi Budaya yang Diselenggarakan/ Diikuti	Even		10,00	10,00	10,00	-	1,00	-
4.7.20	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Lestari	Angka	0	3	0	0	-	-	-
4.7.21	Persentase Sanggar Seni yang Aktif	Persen	63,49	100,00	71,42	79,36	100,00	47,14	
4.7.22	Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Diinventarisasi	Angka		90,00				52,00	-
Target 4.a. Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.									
4.a.1	Kualitas SDM Pengelola Perpustakaan	Orang	50,00	50,00	100,00				
4.a.2	Penyediaan dan Pengolahan Koleksi Bahan Pustaka	Buku	18.602,00	1.000,00	800,00				
4.a.3	Sarana dan Prasarana Perpustakaan Sesuai Standar Perpustakaan Nasional	Paket	-	1,00	1,00			1,00	
4.a.4	Buku Siap Layan	Buku	3.750,00		1.250				
TUJUAN 5 : MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN									
Target 5.1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimana pun									
5.1.1	Persentase Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persen	100,00		100,00				
5.1.2	Tersedianya Informasi Data Gender dan Anak	Data		ada		ada	ada	ada	ada
5.1.3	Persentase Aktivis Perempuan dalam Penanganan Kasus Kekerasan di Masyarakat (persen per 100.000 perempuan)	Persen		137,00	6,33	55,00	80,19	147,00	147,00
Target 5.2. Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.									
5.2.1	Persentase Jumlah Perempuan yang Berdaya Guna dan Berdaya Saing	Persen		77,95		7,98	34,72	59,45	59,45
5.2.2	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan	Persen		4,33		3,10	3,23	3,19	3,19



KODE INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET PADA AKHIR PRIODE PERENCANAAN (2020)	CAPAIAN				
					BASELINE (2016)	2017	2018	2019	2020
Target 5.5. Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.									
5.5.1	Persentase Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persen	100,00		100,00				
5.5.2	Persentase Jumlah Perempuan yang Mampu Meningkatkan Kualitas Hidup Keluarga	Persen		77,78	-	16,50	31,42	58,15	59,59
5.5.3	Jumlah Perempuan Berdaya Terpenuhi Haknya dan Terlindungi	Orang			500,00				
5.5.4	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan	Persen			4,20				
TUJUAN 6 : MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN									
Target 6.1. Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua									
6.1.1	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	Persen	43,87		41,41	43,21			
6.1.2	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan	Persen	43,87		41,41	43,21			
Target 6.b Pada tahun 2030, Mendukung dan memperkuat partisipasi masyarakat lokal dalam meningkatkan pengelolaan air dan sanitasi.									
6.b.1	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Air Tidak Tersumbat	Persen	80,00	90,00	82,00	84,00	97,00	87,00	46,88
6.b.5	Persentase Penanganan Luas Genangan	Persen		79,92	14,63	22,33	50,32	67,39	79,92
6.b.6	Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/ Saluran Pembuangan Air (minimal 1,5 M)	Persen		70,00	52,00	55,00	56,00	12,62	13,00
6.b.7	Persentase Luas Embung yang Direhabilitasi	Persen		81,00			100,00	99,47	100,00
6.b.8	Cakupan Talud/Bronjong yang Direhabilitasi	Persen	60,00	75,00	63,00	66,00	50,00	89,02	100,00



KODE INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET PADA AKHIR PRIODE PERENCANAAN (2020)	CAPAIAN				
					BASELINE (2016)	2017	2018	2019	2020
Target 6.6. Pada tahun 2030, menerapkan melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.									
6.6.1	Panjang Penanganan Sungai yang Dinormalisasi	km	4,44	19,90	1,02	0,37	2,50	6,10	6,66
6.6.2	Panjang Penanganan Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor	km	4,44	19,90	1,02	0,37	2,50	-	-
6.6.3	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	Persen	43,87	61,80			55,00	44,17	61,80
6.6.4	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan	Persen	43,87	61,80			55,00	44,17	61,80
Target 6.5. Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas sesuai kepantasan									
6.5.1	Rasio Ketersediaan Kebutuhan SDA	Angka		>1	>1				
6.5.2	Persentase Ketersediaan Data LH	Persen	75,00	75,00	75,00				
TUJUAN 7 : MENJAMIN AKSES ENERGI YANG TERJANGKAU, ANDAL, BERKELANJUTAN DAN MODERN UNTUK SEMUA									
Target 7.b Pada tahun 2030, memperluas infrastruktur dan meningkatkan teknologi untuk penyediaan layanan energi modern dan berkelanjutan bagi semua negara negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil dan negara berkembang									
7.b.1	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	Persen	60,00	100,00	70,00	80,00	85,00	85,00	90,00
7.b.2	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi	Persen	70,00	100,00	70,00	80,00	85,00	85,00	95,00
7.b.3	Sistem Informasi Pemda yang Terimplementasi	Persen	80,00	100,00	80,00	100,00			
7.b.4	Persentase Tayang Publikasi Kegiatan Pemda di Media Elektronik	Persen	80,00	100,00	80,00	90,00	100,00	95,00	95,00
7.b.5	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Call Center dan Website	Persen	100,00		100,00	100,00			
7.b.6	Persentase Pembinaan dan Pengawasan POSTELSUS dan Penyiaran	Persen	100,00		100,00	100,00			



KODE INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET PADA AKHIR PRIODE PERENCANAAN (2020)	CAPAIAN				
					BASELINE (2016)	2017	2018	2019	2020
7.b.7	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah	Persen	50,00		60,00	75,00			
7.b.8	Persentase Ketersediaan Data/Statistik Dibandingkan Jumlah Data yang Seharusnya Tersedia	Persen	60,00		60,00	60,00			
7.b.9	Persentase Kepatuhan Wajib Retribusi Membayar Kewajiban	Persen	10,00	70,00	10,00		60,00	70,00	
TUJUAN 8 : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA									
Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.									
8.1.1	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDDB	Persen			21,12				
8.1.2	Pertumbuhan IKM	Persen	5,57		6,09				
8.1.3	Pertumbuhan IKM	Persen		6,41		5,85	3,61	4,03	2,38
8.1.4	Cakupan IKM yang Mendapatkan Pembinaan Dibandingkan dengan Seluruh IKM (incremental)	Persen		7,80		17,01	14,64	16,03	12,44
8.1.5	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	Persen		6,50		9,52	14,29	33,33	50,00
8.1.6	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen yang Ditindaklanjuti	Persen			37,37				
8.1.7	Persentase Promosi Produk Unggulan Daerah	Persen			91,79				
Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.									
8.3.1	Kontribusi Sub Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDDB	Persen		7,39	7,35		7,36	7,37	7,37
8.3.2	Persentase Penyediaan data Perkembangan Harga Pasar Dibandingkan Data yang Seharusnya Tersedia	Persen		100,00		90,00	100,00	100,00	100,00



KODE INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET PADA AKHIR PRIODE PERENCANAAN (2020)	CAPAIAN				
					BASELINE (2016)	2017	2018	2019	2020
8.3.3	Persentase Jumlah Pasar yang Ditata	Persen			10,00	10,00			
8.3.4	Persentase Jumlah Pasar yang Ditata	Persen		80,00			10,00	10,00	-
8.3.5	Cakupan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Lingkungan Pasar	Persen		80,00	75,00	100,00			
8.3.6	Cakupan Pengawasan Kemetrolagian	Persen		85,00			82,00	85,00	69,54
Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.									
8.9.1	Jumlah Objek Wisata yang Dikembangkan	Lokasi	10,00		2,00				
8.9.2	Jumlah Destinasi Baru yang Dikembangkan	Lokasi	10,00	2,00		3,00	-	4,00	5,00
8.9.3	Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan	Hari	1,00	2,00	1,50	1,78	1,71	1,70	1,50
8.9.4	Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik	Jiwa	100.176	193.211	111.612	117.193	599.460	1.064.493	819.492
8.9.5	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Jiwa	488	1.850	313,00	339,00	4.589	22.218	1.767
8.9.6	Jumlah Even Promosi yang Diselenggarakan/ Diikuti	Event	10,00	15,00	8,00	10,00	-	15,00	10,00
8.9.7	Kontribusi Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (bidang pariwisata) terhadap PDRB	Persen	2,74	2,95	2,75	2,80	2,85	2,90	2,90
8.9.8	Persentase Kredit Ekonomi Kerakyatan yang Tersalurkan	Persen	96,34		72,10				
8.9.9	Terpromosinya Produk UMKM (kali)	Jumlah	11,00		10,00				
8.9.10	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha (pendapatan kotor + piutang) Koperasi Dibanding Volume Usaha (pendapatan kotor + piutang) Koperasi Tahun Sebelumnya	Persen	9,21		0,35				
8.9.11	Persentase UKM Non BPR/LKM aktif	Persen		60,20		46,88	45,20	46,63	36,89
8.9.12	Persentase BPR/LKM Aktif	Persen		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00

KODE INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET PADA AKHIR PRIODE PERENCANAAN (2020)	CAPAIAN				
					BASELINE (2016)	2017	2018	2019	2020
8.9.13	Persentase Usaha Mikro dan Kecil Dibanding Seluruh UKM	Persen		87,84		87,82	88,26	89,47	63,10
8.9.14	Persentase Kredit Ekonomi Kerakyatan (KEK) Melalui Bank Pasar yang Disalurkan Dibandingkan Dana KEK yang Tersedia di Bank Pasar	Persen		85,00		87,82	46,97	31,53	19,05
8.9.15	Persentase Koperasi Aktif Dibanding Jumlah Koperasi Terdaftar	Persen		65,05		42,24	21,23	25,23	26,35
8.9.16	Persentase Pertumbuhan Anggota Koperasi Dibanding Jumlah Anggota Koperasi Tahun Sebelumnya	Persen		0,61		-9,92	1,50	-7,10	-0,024
8.9.17	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha (pendapatan kotor + piutang) Koperasi Dibanding Volume Usaha (pendapatan kotor + piutang) Koperasi Tahun Sebelumnya	Persen		2,25		-8,98	-2,23	-2,44	-0,051
TUJUAN 9 : MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI									
Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.									
9.1.1	Persentase Panjang Jaringan Jalan Kota dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	Persen	88,09	100,00	90,09	91,76	89,00	81,64	84,81
9.1.2	Persentase Jalan Kota dalam Kondisi Baik (>40 km/jam)	Persen	88,09	100,00	90,09	91,76	89,00	81,64	76,00
9.1.3	Rasio Panjang Jalan Kota Dibandingkan dengan Luas Wilayah	km/km ²	4,57	4,68	4,68	4,68	2,00	6,86	2,00
9.1.4	Rasio Panjang Jalan Kota Dibandingkan dengan Jumlah Penduduk	m/jiwa	0,92	0,86	0,92	0,91	0,86	1,29	0,37
9.1.5	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Alat Berat sebagai Penunjang Kegiatan Konstruksi	Persen	77,42	87,10	77,42		85,00		
9.1.6	Cakupan Jalan Kota Rusak yang Direhabilitasi	Persen	88,09	100,00	90,09	91,76	90,00	87,06	100,00



KODE INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET PADA AKHIR PRIODE PERENCANAAN (2020)	CAPAIAN				
					BASELINE (2016)	2017	2018	2019	2020
9.1.7	Persentase Pemeliharaan Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik	Persen	88,09	100,00	100,00	100,00	100,00		
9.1.8	Persentase OPD yang Memiliki Kantor Sendiri	Persen	50,00	100,00	55,00	60,00	98,00	98,50	80,45
9.1.9	Tersedianya Jasa Konsultansi Kegiatan Kontruksi	Jumlah	343,00	141,00	105,00	36,00			
9.1.10	Rasio Panjang Jalan Lingkungan dengan Jumlah Penduduk	m/jiwa	0,46	0,62			0,82	0,91	1,09
9.1.11	Rasio Panjang Jalan Lingkungan dengan Luas Wilayah	km/km2	2,30	3,37			0,49	4,87	5,89
9.1.12	Persentase Panjang Jalan Lingkungan dengan Kondisi Mantap	Persen	50,00	80,00			60,00	86,00	96,00
9.1.13	Rasio Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum terhadap Panjang Jalan Kota	Angka	Lampu/km	20,20		17,00	17,00	19,50	20,20
TUJUAN 10 : MENGURANGI KESENJANGAN INTRA DAN ANTARNEGARA									
Target 10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.									
10.3.1	Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Kasus		58,00	46,00	50,00	53,00	34,00	32,76
10.3.2	Angka Perselisihan Pengusaha-Pekerja per Tahun	Angka		58,00	46,00	50,00	53,00	55,00	65,00
10.3.3	Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	Orang		14.226	92.025	103.262	140.533	142.554	79.478
10.3.4	Persentase Penyelesaian Perselisihan Buruh dan Pengusaha terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah	Persen		100,00			100,00	100,00	100,00
10.3.5	Upah Minimum Kota	Rp	1.649.500	2.560.904	1.870.000	2.054.365	2.263.390	2.445.141	2.739.983
Target 10.7. Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan terkelola dengan baik.									
10.7.1	Rasio Pencaker yang Terdaftar Lulusan S1/S2/S3 Dibagi Pencaker yang Terdaftar per Tahun	Angka	26,09	21,00		23,00	22,00	21,11	20,00



KODE INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET PADA AKHIR PRIODE PERENCANAAN (2020)	CAPAIAN				
					BASELINE (2016)	2017	2018	2019	2020
10.7.2	Persentase Meningkatnya Tenaga Kerja yang Ditempatkan Dibandingkan Tahun Sebelumnya	Persen	36,04	97,62	7,50	30,39	23,31	227,50	
10.7.3	Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan	Orang	3.000,00	7.245,00	225,00	980,00	980,00	681,00	
TUJUAN 11 : MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN									
Target 11.1. Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.									
11.1.1	Rasio Panjang Jalan Lingkungan dengan Jumlah Penduduk	m/jiwa	0,46	0,62	0,45	0,49	0,82	0,91	1,09
11.1.2	Rasio Panjang Jalan Lingkungan dengan Luas Wilayah	km/km2	2,30	3,37	2,30	2,53	0,49	4,87	5,89
11.1.3	Persentase Panjang Jalan Lingkungan dengan Kondisi Mantap	Persen	50,00	80,00	55,00	60,00		86,00	96,00
11.1.4	Persentase Rumah Tinggal yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak	Persen	37,53	50,88	33,26	36,49	40,00	35,96	50,88
11.1.5	Persentase Areal Kawasan Kumuh	Persen	-	2,78	18,84	15,18	9,11	5,34	2,78
11.1.6	Cakupan Pengawasan Tim Ahli Bangunan Gedung	Persen	55,00		100,00	-	75,00		
11.1.7	Cakupan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	Persen			-	-			
11.1.8	Terpenuhinya Hak-Hak Anak			85,00		70,00	80,00		
11.1.9	Persentase Kecamatan Layak Anak			75,00					
Target 11.2. Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.									
11.2.1	Tingkat Pelayanan pada Jalan Arteri	Parameter	C	B	C	C	C	C	C
11.2.2	Tingkat Pelayanan pada Jalan Kolektor	Parameter	C	B	C	C	C	C	C
11.2.3	Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum	Orang	204.272,00	69.640	90.192	78.497	71.498	1.153.400	1.003.344

KODE INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET PADA AKHIR PRIODE PERENCANAAN (2020)	CAPAIAN				
					BASELINE (2016)	2017	2018	2019	2020
11.2.4	Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/ Bandara/ Terminal per Tahun	Orang	496,09	274.264	342,16	317.862	297.900	1.668.224	217.290
11.2.5	Persentase Prasarana dan Fasilitas LLAJ dalam Kondisi Baik	Persen	80,00	90,00	80,00	85,00	96,51	98,66	90,00
11.2.6	Meningkatnya Load Faktor Angkutan Umum (berdasarkan hasil survey)	Persen	30,37	52,74	35,32	40,34	40,34	38,34	45,37
11.2.7	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	Orang	204.272,00	69.640,00	90.192	79.497	378.310	1.153.400	1.003.344
11.2.8	Rasio Ijin Trayek	Persen	0,040	0,011	0,040	0,007	0,189	0,000	0,004
11.2.9	Rasio Volume Lalu Lintas pada Jalan Arteri	Persen	0,45	0,20	0,45	0,45	0,59	0,49	0,49
11.2.10	Rasio Volume Lalu Lintas pada Jalan Kolektor	Persen	0,50	0,30	0,50	0,50	0,52	0,61	0,61
11.2.11	Persentase Tersedianya Fasilitas Perlengkapan Jalan (rambu, marka, guardrail) pada Jalan Kota dalam Kondisi Baik	Persen	39,08	67,11	41,39	45,69	80,55	98,32	67,11
11.2.12	Rasio Titik Kemacetan yang Terkendali	Persen	42,85	75,00	66,66	53,84	23,00	25,00	70,00
11.2.13	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11.2.14	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	Uji	2,51	973	1.260	1.170	1.030	790	13.048
11.2.15	Tersedianya Unit Pengujian Kendaraan Bermotor bagi Kota yang Memiliki Populasi Kendaraan Wajib Uji Minimal 4000 (empat ribu) Kendaraan Wajib Uji	Unit	1,00	1,00				1	-
Target 11.3. Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara									
11.3	Cakupan Masyarakat di Wilayah Kumuh yang Mendapatkan Pemahaman Transmigrasi Dibandingkan Total Wilayah Kumuh	Persen		12,00				12,00	-



KODE INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET PADA AKHIR PRIODE PERENCANAAN (2020)	CAPAIAN				
					BASELINE (2016)	2017	2018	2019	2020
Target 11.6. Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.									
11.6.1	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	Angka	77,00	81,00	77,00	78,00	77,00	80,31	81,00
11.6.2	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	Angka	55,00	59,00	55,00	56,00	50,00	54,00	54,00
11.6.3	Persentase Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang Mentaati Persyaratan Administrasi dan Teknis Pencegahan Pencemaran Air	Persen	40,00	60,00	40,00	45,00	45,00	70,00	60,00
11.6.4	Persentase Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan Sumber Tidak Bergerak yang Memenuhi Persyaratan Administratif dan Teknis Pencegahan Pencemaran Udara	Persen	40,00	60,00	40,00	45,00	46,00	50,00	60,00
11.6.5	Persentase Luasan Lahan dan/atau Tanah untuk Produksi Biomassa yang Telah Ditetapkan dan Diinformasikan Status Kerusakannya	Persen	40,00	60,00	40,00	45,00	45,00	48,00	-
11.6.6	Persentase Ketersediaan Data LH	Persen	75,00	85,00	75,00	75,00	80,00	80,00	85,00
11.6.7	Persentase Jumlah Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	Persen	100,00		100,00	100,00			
11.6.8	Persentase Jumlah Ketaatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH dari Izin yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditangani	Persen		60,00			40,00	50,00	100,00
11.6.9	RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen		1			-		
11.6.10	Terintegrasinya RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota (dokumen)	Jumlah		1				-	
11.6.12	Persentase Jumlah Penduduk yang Dilayani Melalui Kegiatan Pengurangan Volume Sampah (3R)	Persen		60,00		50,00	50,00	40,00	-



KODE INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET PADA AKHIR PRIODE PERENCANAAN (2020)	CAPAIAN				
					BASELINE (2016)	2017	2018	2019	2020
11.6.13	Timbunan Sampah yang Ditangani	Ton	800,00	950,00		800,00	823,00	900,00	950,00
11.6.14	Persentase Cakupan Area Pelayanan Persampahan	Persen	100,00	100,00		100,00	100,00	98,00	100,00
11.6.15	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	Persen	90,15	95,00	90,22	90,00	95,00	95,00	80,00
11.6.16	Kualitas Pengelolaan TPA (koefisien operasi, kualitas lindi, penanganan gas)	Persen		60,00			50,00	10,00	60,00
Target 11.7. Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.									
11.7.1	Persentase RTLH yang Tertangani	Persen		72,25	-	-	16,69	18,23	72,25
11.7.2	Cakupan Pelaksanaan BSPS	Persen		100,00			16,69	13,45	100,00
11.7.3	Luasan RTH Publik Sebesar 20 Persen dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan	Persen	11,08	14,00	11,08	11,08	8,58	11,08	20,00
11.7.4	Persentase Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kota Beserta Rencana Rincinya melalui Peta Analog dan Peta Digital Terbaru (mutakhir)	Persen		100,00	100,00	100,00	-	96,31	100,00
11.7.5	Persentase Pemenuhan Dokumen Tata Ruang Wilayah	Persen			80,00				
11.7.6	Persentase TPU yang Ditangani	Persen		15,00				15,00	
11.7.7	Persentase Tempat Pemakaman Umum per Satuan Penduduk	Persen		8,40				0,03	
Target 11.C. Memberikan dukungan kepada negara-negara kurang berkembang, melalui bantuan keuangan dan teknis, dalam membangun bangunan yang berkelanjutan dan tangguh, dengan memanfaatkan bahan lokal									
11.c.1	Persentase Pelanggaran Perda Penataan Ruang yang Ditangani	Persen	55,00				57,52		
11.c.2	Persentase Bangunan ber-IMB	Persen		87,38			-	80,33	93,45
11.c.3	Persentase Pelanggaran Perda Penataan Ruang yang Ditangani	Persen		70,00				79,23	100,00

KODE INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET PADA AKHIR PRIODE PERENCANAAN (2020)	CAPAIAN				
					BASELINE (2016)	2017	2018	2019	2020
11.c.4	Persentase Sertifikat yang Diterbitkan dan Diserahkan kepada Masyarakat Dibandingkan Jumlah Bidang Tanah yang Dibantu Pengurusan Sertifikatnya	Persen		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-
11.c.5	Cakupan Pengawasan Tim Ahli Bangunan Gedung	Persen		100,00				99,70	100,00
11.c.6	Cakupan Peningkatan Kapasitas Masyarakat tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Bangunan	Persen		100,00	-			100,00	100,00
11.c.7	Persentase Konflik Pertanahan yang Termediasi Dibandingkan Konflik Pertanahan yang Terjadi	Persen		100,00		60,00			
11.c.8	Persentase Aset Tanah Pemkot yang Bersertifikat Dibandingkan dengan Jumlah Aset Tanah Pemkot	Persen			42,30				
11.c.9	Persentase Aset Tanah Pemkot yang Bersertifikat Dibandingkan dengan Jumlah Aset Tanah Pemkot	Persen		85,94		43,75	55,00	75,00	75,00
11.c.10	Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara	Persen		100,00		100,00	100,00	100,00	0,00
11.c.11	Persentase Penyelesaian Izin Lokasi	Persen		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
11.c.12	Berkurangnya Kawasan Pertambangan Ilegal	Persen		80,00	80,00				
Target 11.b. Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.									
11.b.1	Penurunan Tingkat Kerawanan Bencana	Status	Tinggi	Sedang	Tinggi		Sedang	Sedang	Sedang
11.b.2	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	Persen		100,00	100,00		76,84	100,00	100,00



KODE INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET PADA AKHIR PRIODE PERENCANAAN (2020)	CAPAIAN				
					BASELINE (2016)	2017	2018	2019	2020
11.b.3	Persentase Jangkauan Luas Wilayah Manajemen Kebakaran (Kecamatan)	Persen		80,00	40,00		98,19	100,00	100,00
11.b.4	Persentase Kesiapsiagaan Tanggap Daerah Layanan Wilayah Bencana	Persen		100,00	100,00	100,00	93,55	100,00	100,00
11.b.5	Terlatihnya Tim Rescue dan Satgas Penanggulangan Bencana	Persen	100,00	100,00	100,00				
11.b.6	Pelajar yang Siaga Menghadapi Bencana (Peserta)	Orang		80,00	80,00				
11.b.7	Satgas yang Siap dalam Penanggulangan Bencana	Orang		100,00	100,00				
11.b.8	Cakupan Penanganan Bencana Alam dan Sosial	Persen	20,00	29,00	20,00	20,00	24,00	27,00	29,00
11.b.9	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	Persen	20,00	29,00	20,00	20,00	24,00	27,00	29,00
11.b.10	Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap	Persen	20,00	29,00	20,00	20,00	24,00	-	-
11.b.11	Ketersediaan Buffer Stock Logistik dan Pemenuhan Dasar Korban Bencana	Persen		87,00	60,00	67,00	72,00	81,00	87,00
TUJUAN 12 : MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKELANJUTAN									
TUJUAN 13 : MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA									
Target 13.1. Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara									
13.1.1	Persentase Jumlah Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	Persen	100,00	100,00			100,00	100,00	100,00
13.1.2	Persentase Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Kota,	Persen		100,00			100,00	100,00	100,00



KODE INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET PADA AKHIR PRIODE PERENCANAAN (2020)	CAPAIAN				
					BASELINE (2016)	2017	2018	2019	2020
	Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kota yang Ditangani								
13.1.4	Peningkatan Kawasan Hijau Pertamanan	m²	49.197,26	80.841,43	54.663,62		76.641,00	146.643,68	146.643,68
13.1.5	Taman Kota dalam Kondisi Baik	Jumlah		5,00	5,00				
Target 13.2. Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional									
13.2.1	Penurunan Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca	Persen		5,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
13.2.2	Persentase Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah	Persen		14,00	11,08	11,08	11,20	11,08	11,08
TUJUAN 14 : MELESTARIKAN DAN MEMANFAATKAN SECARA BERKELANJUTAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN SAMUDERA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN									
Target 14.2. Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif									
14.2.1	Persentase Tingkat Keamanan Pangan	Persen		16,50			4,00	12,50	
14.2.2	Cakupan Usaha Kecil Masyarakat Kelautan Perikanan yang Dibantu	Persen		90,00		3,00	15,00	21,00	217,04
14.2.3	Peningkatan Volume Produksi Perikanan	Persen		21,00				-	-
Target 14.7. Pada tahun 2030, meningkatkan manfaat ekonomi dari pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya laut, termasuk melalui pengelolaan perikanan, budidaya dan pariwisata yang berkelanjutan									
14.7.1	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	217,49	131,01	110,31	118,23	122,17	115,55	100,30
14.7.2	Nilai Tukar Pembudidayaan Ikan	Jumlah		103,00	102,30	103,00			
14.7.3	Nilai Tukar Nelayan	Jumlah		102,10	101,00	102,10			
14.7.5	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	33.925,00	703,11	628,76	613,10	651,08	3.404,00	459,67
14.7.6	Cakupan Bina Kelompok Nelayan Dibandingkan Jumlah Kelompok Nelayan	Kelompok		33,00	13,00	17,00	6,00	28,00	33,00
14.7.7	Persentase Peningkatan Nilai Tambah Produk Perikanan	Persen		8,30		6,30	6,80	7,10	4,00
14.7.8	Persentase Ketersediaan Jenis dan Ragam Data Kelautan dan Perikanan	Persen		57,00			29,00	20,00	50,00

KODE INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET PADA AKHIR PRIODE PERENCANAAN (2020)	CAPAIAN				
					BASELINE (2016)	2017	2018	2019	2020
14.7.9	Jumlah Kebijakan Terbaru yang Ditetapkan Cakupan Perikanan dan Kelautan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		3	1		-		
14.7.10	Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan	Persen		100,00		100,00			
14.7.11	Nilai Konsumsi Ikan (kg/perkapita/tahun)	Jumlah	27,83	33,28	29,08	30,93	31,72	35,81	41,22
14.7.12	Ketersediaan Dana Pendamping	Persen		10,00	10,00				
14.7.13	Cakupan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Dikelola	Persen		99,17	99,17				
TUJUAN 15 : MELINDUNGI, MERESTORASI DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN, MENGELOLA HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKAN PENGGURUNAN, MEMULIHKAN DEGRADASI LAHAN, SERTA MENGHENTIKAN KEHILANGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI									
Target 15.1. Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.									
15.1.1	Persentase Pengendalian Satwa Liar di Hutan Kera Tirtosari	Persen		100,00	100,00				
15.1.2	Persentase Pemeliharaan Tata Batas Kawasan Hutan Register 19 Tahura	Persen		100,00	100,00				
TUJUAN 16 : MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN INKLUSIF DI SEMUA TINGKATAN									
Target 16.1. Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun									
16.1.1	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pengamanan Transtibmas dan Pencegahan Kriminal	Persen	80,00	80,00	80,00	-	80,00	80,00	100,00
16.1.2	Cakupan Petugas Linmas	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16.1.3	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	Persen	70,00	76,00	74,00	76,00	76,00	100,00	100,00
16.1.4	Persentase Penegakan PERDA	Persen	70,00	76,00	74,00	76,00	76,00	100,00	76,00
16.1.5	Persentase Konflik Sosial yang terselesaikan	Persen	60,00	80,00	60,00	75,00	80,00	82,00	60,00
16.1.6	Persentase SDM yang Mempunyai Kemampuan Deteksi Dini, Cegah Dini dan	Persen	60,00	60,00		60,00	60,00	70,00	70,00

KODE INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET PADA AKHIR PRIODE PERENCANAAN (2020)	CAPAIAN				
					BASELINE (2016)	2017	2018	2019	2020
	Tangkal Dini terhadap Kerawanan Konflik Sosial								
16.1.7	Persentase Organisasi Keagamaan yang Dibina	Persen		70,00	65,90	70,00			
16.1.8	Tingkat Partisipasi RT dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persen	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
16.1.9	Persentase Anggota Parpol yang Meningkatkan Pemahamannya tentang Demokrasi	Persen		95,00	95,00				
16.1.10	Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Kota	Persen		60,00					
16.1.11	Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Provinsi	Persen		70,00			70,00		
16.1.12	Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Legislatif	Persen		70,00				88,00	
16.1.13	Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Presiden	Persen		70,00				87,00	
Target 16.5. Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya									
16.5.1	Persentase Tindak Lanjut Temuan	Persen	-	90,00	94,00	85,00	93,21	92,45	100,00
16.5.2	Jumlah Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda (SPT)	SPT	70,00	55,00	60,00	40,00	60,00	51,00	55,00
16.5.3	Jumlah Temuan BPK Tahun Berjalan	Temuan	50,00	40,00	29,00	23,00	29,00	40,00	40,00
16.5.4	Persentase Kepatuhan Pelaporan Wajib LHKPN/LHKASN	Persen	20,00	50,00	20,00	-	-	40,00	50,00
16.5.5	Pemenuhan Infrastruktur Kapabilitas APIP	Level	2	3	2	2	3	3	3
16.5.6	Tingkat Kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	2	3	2	2	3	3	3
16.5.7	Persentase Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas Aparatur	Persen			100,00				

KODE INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET PADA AKHIR PRIODE PERENCANAAN (2020)	CAPAIAN				
					BASELINE (2016)	2017	2018	2019	2020
16.5.8	Cakupan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa Melalui SPSE	Persen			100,00				
16.5.9	Persentase Pengaduan Pelayanan Publik yang Ditangani	Persen		95,00	95,00	95,00	95,00	100,00	100,00
16.5.10	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Angka	44,77	62,00	45,29	48,90	53,03	55,14	62,00
16.5.11	Persentase OPD yang Melakukan Survei IKM Dibanding OPD yang Seharusnya Melakukan Survei IKM	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16.5.12	Persentase Layanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	94,00	88,89
16.5.13	Persentase KSD yang Terfasilitasi (terbit MoU) Dibandingkan dengan Usulan KSD	Persen		25,00		25,00	25,00	49,14	20,00
16.5.14	Persentase Perda yang Disahkan Dibagi Raperda yang Diusulkan	Persen		100,00				100,00	100,00
16.5.15	Persentase Perwalikota yang Disahkan Dibagi Perwalikota yang Diusulkan	Persen		100,00				100,00	100,00
16.5.16	Persentase Tersusunnya Dokumen ANJAB OPD Dibagi Jumlah OPD	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16.5.17	Persentase Tersusunnya Dokumen ABK OPD Dibagi Jumlah OPD	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16.5.18	Persentase Rekomendasi yang Diterbitkan Dibandingkan Jumlah KSD yang Masih Berlaku/Akan Berakhir	Persen		80,00		80,00	80,00	66,58	100,00
16.5.19	Persentase OPD yang Menggunakan Layanan Perencanaan Pengadaan Secara Elektronik	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00		



KODE INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET PADA AKHIR PRIODE PERENCANAAN (2020)	CAPAIAN				
					BASELINE (2016)	2017	2018	2019	2020
16.5.20	Persentase OPD yang Melaksanakan Monev Secara Elektronik	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16.5.21	Cakupan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa Melalui SPSE	Persen				100,00			
16.5.22	Ketepatan Waktu Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Daerah	Persen		100,00				100,00	100,00
16.5.23	Persentase OPD dengan Realisasi dan Penyerapan Anggaran Baik	Persen		85,00				100,00	100,00
16.5.24	Cakupan Kelurahan yang Mendapatkan Pembinaan Kadarkum/ Dibagi Seluruh Kelurahan yang Mengikuti Lomba Kelurahan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16.5.25	Persentase Perda yang Diupload ke JDIH/Dibagi Perda yang Disahkan Tahunan	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16.5.26	Persentase Perwali yang Diupload ke JDIH/Dibagi Perwali yang Disahkan Tahunan	Persen		100,00	100,00	125,00	100,00	100,00	100,00
16.5.27	Fasilitasi MTQ Tingkat Kota dan Provinsi	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16.5.28	Terselenggaranya TPHD	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16.5.29	Persentase Ekspose Kegiatan Pemerintah Kota Bandar Lampung Melalui Media Cetak dan Elektronik	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16.5.30	Persentase Dokumen Kendaraan Dinas Lingkup Sekretariat Daerah yang Terpelihara	Persen		100,00				87,00	100,00
16.5.31	Persentase Terlaksananya Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Transparan dan Akuntabel	Persen		100,00			100,00	100,00	100,00
16.5.32	Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan	Level		Level 5			Level 1	Level 1	Level 5



KODE INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET PADA AKHIR PRIODE PERENCANAAN (2020)	CAPAIAN				
					BASELINE (2016)	2017	2018	2019	2020
16.5.33	Tingkat Kematangan LPSE	Sertifikat		15			8	13	15
16.5.34	Cakupan Kelurahan yang Dimonitoring Dibandingkan Seluruh Kelurahan	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	25,00
16.5.35	Persentase Kelurahan yang Memiliki Gedung Kantor	Persen		95,00	70,00	80,00	85,00	88,89	88,89
16.5.36	Persentase Pejabat yang Memenuhi Persyaratan Jabatan (struktural) Dibandingkan Jumlah Jabatan Seluruh OPD	Persen		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
16.5.37	Persentase Pejabat yang Telah Mengikuti Diklat Struktural (PIM) Sesuai Jabatan Dibandingkan Jumlah Jabatan Seluruh OPD	Persen		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
16.5.38	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Dibandingkan Total ASN	Persen				24,00	24,00		
16.5.39	Rata-rata Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Kepegawaian Sesuai dengan SPM Kepegawaian	Persen		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
16.5.40	Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	Persen		100,00		100,00	0,09	100,00	100,00
16.5.41	Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	Persen		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
16.5.42	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah	ASN		39,00		39,00	39,00	39,00	39,00
16.5.43	Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah	ASN		208,00		208,00	208,00	208,00	208,00
16.5.44	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah	ASN		5.368,00		5.368,00	5.368,00	5.368,00	4804,00



KODE INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET PADA AKHIR PRIODE PERENCANAAN (2020)	CAPAIAN				
					BASELINE (2016)	2017	2018	2019	2020
16.5.45	Jumlah PNS yang Menerima Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	Orang	10,00	10,00	10,00				
16.5.46	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Realisasi Kegiatan BKD	Angka	16,00	16,00	16,00				
16.5.47	Jumlah Pelaksanaan Sidang Baperjakat, Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pajabat Struktural dan Fungsional, serta Pengalihan tugas/ Penempatan Tugas PNS dan Seleksi Pengisian Jabatan Tinggi Pratama	Angka	12,00	12,00	12,00				
16.5.48	Jumlah Jabatan Esselon II pada Instansi Pemerintah	ASN	40,00	40,00	40,00				
16.5.49	Jumlah PNS yang Menerima Tanda Penghargaan Satya Lencana Karya Satya	Orang	600,00	600,00	600,00				
16.5.50	Jumlah Pelaksanaan Rapat Pembinaan Disiplin PNS dan Pembinaan Waskat	Jumlah	15,00	15,00	15,00				
16.5.51	Tersusunnya Formasi Kebutuhan PNS Kota Bandar Lampung	Angka	600,00	600,00	600,00				
16.5.52	Terbitnya SK Cuti Pegawai Negeri Sipil	Jumlah	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
16.5.53	Jumlah SK Pensiun PNS yang Dikeluarkan BKN	Jumlah	400,00	400,00	400,00				
16.5.54	Jumlah Data dan Arsip PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang dikelola	Jumlah	11.650,00	11.650,00	11.650,00				
16.5.55	Jumlah Kasus Pegawai Negeri Sipil yang terselesaikan	Jumlah	35,00	35,00	35,00				
16.5.56	Jumlah PNS yang Melakukan Sumpah PNS	Orang	50,00	50,00	50,00				
16.5.57	Jumlah Informasi Aparatur Sipil Negara	ASN	11.650,00	11.650,00	11.650,00				



KODE INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET PADA AKHIR PRIODE PERENCANAAN (2020)	CAPAIAN				
					BASELINE (2016)	2017	2018	2019	2020
16.5.58	Jumlah KARPEG, KARIS, KARSU yang Dikeluarkan BKN	Jumlah	700,00	700,00	700,00				
16.5.59	Jumlah SK Kenaikan Pangkat PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung Periode April, Oktober dan Usulan Kenaikan Gaji Berkala	Jumlah	10.500,00	10.500,00	10.500,00				
16.5.60	Jumlah Peningkatan Status CPNS menjadi PNS	Orang	600,00	600,00	600,00				
16.5.61	Jumlah Tenaga Kontrak yang Mendapat SK Pengangkatan Kembali	Orang	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
16.5.62	Jumlah Peserta yang Lulus Seleksi CPNS Pelamar Umum dan Tenaga Honorer	Orang	600,00	600,00	600,00				
16.5.63	Jumlah Usulan NIP CPNS yang Terbit	Angka	600,00	600,00	600,00				
16.5.64	Jumlah PNS Fungsional yang Memperoleh Penetapan Angka Kredit	Orang	400,00	400,00	400,00				
16.5.65	Jumlah Kartu Pegawai Elektronik yang Terkonversi	Jumlah	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
16.5.66	Jumlah PNS yang Lulus Seleksi Izin Belajar dan Tugas Belajar (PNS)	Orang	300,00	300,00	300,00				
16.5.67	Jumlah CPNS Golongan I, II, III dari Formasi Honorer yang Mengikuti Diklat Prajabatan	Orang	120,00	120,00	120,00				
16.5.68	Jumlah PNS yang Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP)	Orang	100,00	100,00	100,00				
16.5.69	Jumlah PNS yang Mengikuti Ujian Dinas Tingkat I dan II	Orang	75,00	75,00	75,00				
16.5.70	Jumlah Pelaksanaan Upacara/Apel Mingguan, Bulanan, dan Hari-Hari Besar Nasional serta Acara Lainnya yang Diminta Walikota	Angka	70,00	70,00	70,00				



KODE INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET PADA AKHIR PRIODE PERENCANAAN (2020)	CAPAIAN				
					BASELINE (2016)	2017	2018	2019	2020
16.5.71	Jumlah PNS Mengikuti Pendidikan & Penjenjangan Struktural (Diklat/Pim Tk. III dan IV)	Orang	30,00	30,00	30,00				
16.5.72	Jumlah PNS yang Mengikuti Bimtek Sistem Administrasi Kepegawaian	Orang	100,00	100,00	100,00				
16.5.73	Jumlah PNS yang Mengikuti Bimtek Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah	Orang	100,00	100,00	100,00				
16.5.74	Persentase Ketepatan Waktu dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16.5.75	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang Ditetapkan dengan PERDA/ PERKADA	Dokumen	-	-	ada	-	ada		Ada
16.5.76	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang Ditetapkan dengan PERKADA	Dokumen	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Ada
16.5.77	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	Persen	75,00	90,00	80,00	98,00	100,00	92,53	87,43
16.5.78	Persentase Pemenuhan Fasilitasi dan Koordinasi/ Konsultasi Perencanaan Pembangunan	Persen	80,00	90,00	80,00	80,00	88,24	90,63	100,00
16.5.79	Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke Dalam APBD	Persen	100,00		100,00				
16.5.80	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Persen	100,00		100,00				
16.5.81	Persentase Pemenuhan Fasilitasi dan Koordinasi/ Konsultasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Persen	80,00		80,00				



KODE INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET PADA AKHIR PRIODE PERENCANAAN (2020)	CAPAIAN				
					BASELINE (2016)	2017	2018	2019	2020
16.5.82	Persentase Pemenuhan Fasilitas dan Koordinasi/ Konsultasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Persen	80,00		80,00				
16.5.83	Persentase Pemenuhan Fasilitas dan Koordinasi/ Konsultasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah dan SDA	Persen	80,00		80,00				
16.5.84	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Persen	80,00		100,00				
16.5.85	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	Persen		80,00		75,00	100,00	100,00	100,00
16.5.86	Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	Persen		65,00		50,00	55,00	60,00	42,86
16.5.87	Persentase Pemenuhan Dokumen Tata Ruang Wilayah	Persen		80,00		30,00			
16.5.88	Tersedianya Informasi Pembangunan Daerah	Persen		70,00		70,00			
16.5.89	Persentase Pemenuhan Informasi Statistik Daerah	Persen		70,00	70,00				
16.5.90	Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi	Sistem		Ada			Ada	Ada	Ada
16.5.91	Buku "Kota dalam angka"	Dokumen		Ada			Ada	Ada	Ada
16.5.92	Buku "PDRB"	Dokumen		Ada			-		Ada
16.5.93	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Call Center dan Website	Persen	100,00	100,00			100,00	100,00	100,00
16.5.94	Persentase Pembinaan dan Pengawasan POSTELSUS dan Penyiaran	Persen	100,00	100,00			100,00	100,00	100,00
16.5.95	Persentase Perangkat daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah	Persen	50,00	100,00			80,00	85,00	100,00
16.5.96	Peningkatan Pengolahan Arsip	Berkas	3000	17.000,00	2.000,00	2.205,00	1.500,00	2.400,00	611,00



KODE INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET PADA AKHIR PRIODE PERENCANAAN (2020)	CAPAIAN				
					BASELINE (2016)	2017	2018	2019	2020
16.5.97	Persentase Dokumen Kendaraan Dinas Lingkup Sekretariat Daerah yang Terpelihara	Persen				-	100,00		
16.5.98	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	Persen	18,00	62,00	10,00		57,00	87,50	10,00
16.5.99	Peningkatan Jumlah SDM Pengelola Kearsipan	Orang		200,00		-	-	-	10,00
16.5.100	Tersedianya Dokumen JRA yang Ditetapkan Perwali	Dokumen		ada			Ada		
16.5.101	Persentase Arsip yang Dimusnahkan	Persen		66,00				100,00	10,00
16.5.102	Persentase Anggota KORPRI yang Mendapat Pelayanan Kesehatan	Persen	82,00	82,00	82,00	82,00	80,00	60,00	35,25
16.5.103	Meningkatnya Partisipasi Anggota KORPRI dalam Even KORPRI	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	80,00	100,00	60,00
16.5.104	Persentase Kelurahan yang Difasilitasi dan Diberdayakan	Persen			90,00				
16.5.105	Persentase Kelurahan yang Difasilitasi dan Diberdayakan	Persen		95,00		90,00	90,00	90,00	2,38
16.5.106	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	Kelompok		110,00		50,00	75,00	147,00	147,00
16.5.107	Persentase PKK Aktif	Persen		90,00		85,00	85,00	90,00	90,00
16.5.108	Jumlah Kelurahan yang Memiliki Profil	Kelurahan		126,00		126,00	126,00	126,00	126,00
16.5.109	Pembentukan POKJANAL POSYANDU (Kelurahan)	Jumlah			126,00				
16.5.110	Persentase Pelaksanaan BBGRM	Persen		75,00		75,00	75,00	100,00	-
16.5.111	BOP BDC (Business Development Centre)	Orang		60,00		25,00	-	60,00	60,00
16.5.112	BOP P2KP	Kelurahan		126,00	126,00	-	-		
16.5.113	Pengendalian dan Monitoring Bedah Rumah	Kelurahan			126,00				
16.5.114	Pembentukan POKJANAL POSYANDU	Kelurahan		126,00		126,00	-	126,00	126,00
16.5.115	Cakupan Kawasan Permukiman yang Dikembangkan	Kelurahan		126,00	126,00				



KODE INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET PADA AKHIR PRIODE PERENCANAAN (2020)	CAPAIAN				
					BASELINE (2016)	2017	2018	2019	2020
16.5.116	Meningkatnya Lembaga Ekonomi Kelurahan yang Dikembangkan	Kelompok		55,00				45,00	55,00
16.5.117	Persentase Prolegda yang Disetujui Menjadi Perda	Persen		95,00	95,00	95,00	95,00	93,22	95,00
16.5.118	Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Persen		95,00	95,00	95,00	95,00	93,22	95,00
16.5.119	Terintegrasi Program-program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran ke Dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Persen		95,00	95,00	95,00	95,00	93,22	95,00
16.5.120	Terjaringnya Aspirasi Masyarakat dalam Usulan Dokumen RPJMD maupun Usulan Dokumen RKPD	Persen		95,00	95,00	95,00	95,00	93,22	95,00
16.5.121	Persentase Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD yang Terfasilitasi Dibandingkan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD yang Direncanakan	Persen		95,00			95,00	100,00	95,00
16.5.122	Persentase Kegiatan DPRD yang Terpublikasi	Persen		95,00			95,00	54,24	95,00
16.5.123	Persentase Perda yang Disahkan Dibagi Raperda yang Diusulkan	Persen			100,00	100,00	100,00		
16.5.124	Persentase Perwalikota yang Disahkan Dibagi Perwalikota yang Diusulkan	Persen			100,00	100,00	100,00		
16.5.125	Legislasi Peraturan Daerah yang Akan Dibahas Tahun Berjalan	Persen	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00



KODE INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET PADA AKHIR PRIODE PERENCANAAN (2020)	CAPAIAN				
					BASELINE (2016)	2017	2018	2019	2020
16.5.126	Terwujudnya Peraturan Daerah yang Berkualitas yang Tidak Bertentangan dengan Peraturan yang Lebih Tinggi	Persen	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
16.5.127	Persentase Penduduk ber KTP per Satuan Penduduk	Persen		97,00	90,00	92,00	94,00	95,00	97,00
16.5.128	Persentase Bayi Berakte Kelahiran	Persen		94,00	80,00	85,00	70,00	92,00	94,00
16.5.129	Persentase Pasangan Berakte Perkawinan	Persen		70,00	30,00	40,00	20,00	60,00	70,00
16.5.130	Pesentase Penduduk Berkartu Keluarga (KK)	Persen		95,00	88,00	89,00	73,00	93,00	95,00
16.5.131	Persentase Anak Berkartu Identitas Anak	Persen		70,00			15,00	50,00	70,00
16.5.132	Terselenggaranya Pelayanan Terpadu Satu Atap Secara Mantap	Persen	80,00	100,00	80,00	85,00	85,00	90,00	100,00
16.5.133	IKM Bidang Perizinan	Persen	72,00	90,00	73,00		80,00	81,13	85,25
16.5.134	Persentase Kecamatan yang Berkinerja Baik	Persen		90,00			80,00	80,00	90,00
16.5.135	Persentase Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban Sosial, dan Pembangunan Wilayah	Persen		100,00			100,00	100,00	100,00
16.5.136	Persentase Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban Sosial, dan Pembangunan Wilayah	Persen		100,00				100,00	
16.5.137	Pemenuhan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Kelurahan Kecamatan	Persen		100,00				100,00	
16.5.138	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen		98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
16.5.139	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Persen		98,00	80,00	98,00	98,00	98,00	98,00
16.5.140	Inventaris Kantor yang Terpelihara	Persen		98,00	85,00	98,00	98,00	98,00	98,00
16.5.141	Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Dinas KDH	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

KODE INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET PADA AKHIR PRIODE PERENCANAAN (2020)	CAPAIAN				
					BASELINE (2016)	2017	2018	2019	2020
16.5.142	Peningkatan Kualitas SDM dalam Pemenuhan Kompetensi Jabatan	Persen		100,00	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16.5.143	Cakupan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa Melalui SPSE	Persen		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
16.5.144	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan OPD Tepat Waktu	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16.5.145	Nilai EKPPD Tinggi (3)	Angka		3,00	3,00	3,00	2,80	3,00	3,00
16.5.146	Tingkat Partisipasi Pemkot dalam Kegiatan APEKSI Dibandingkan Jumlah Kegiatan APEKSI	Persen		100,00	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00
16.5.147	Persentase Pelaporan/Kegiatan TP dan DAK	Persen		100,00	100,00	-			
16.5.148	Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	Persen		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
16.5.149	Tersedianya Dokumen Evaluasi RPJMD	Dokumen		-		ada	-		-
16.5.150	Tersedianya Dokumen Evaluasi terhadap Hasil Pelaksanaan RKPD	Dokumen		ada		ada	ada	ada	Ada
16.5.151	Tersedianya Dokumen Evaluasi RPJPD	Dokumen		-		-	-		-
16.5.152	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Persen		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
TUJUAN 17 : MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN									
Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.									
17.1.1	Persentase Peningkatan Nilai Investasi PMA yang Termonitor	Persen	6,51	25,50				16,37	25,30
17.1.2	Persentase Peningkatan Jenis Investasi PMA yang Termonitor	Persen	12,50	14,50				14,50	13,70
17.1.3	Persentase Peningkatan Nilai Investasi PMDN yang Termonitor	Persen	18,24	13,50				30,39	14,05



KODE INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET PADA AKHIR PRIODE PERENCANAAN (2020)	CAPAIAN				
					BASELINE (2016)	2017	2018	2019	2020
17.1.4	Persentase Peningkatan Jenis Investasi PMDN yang Termonitor	Persen	12,50	14,50				25,00	13,30
17.1.5	Persentase Peningkatan Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Persen	7,90	11,00				3,45	11,65
17.1.6	Persentase Peningkatan Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Persen	8,25	10,75				30,39	11,75
17.1.7	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	Persen	18,24	20,24				30,39	20,29
17.1.8	Jumlah Industri Baru yang Mendukung MICE (jasa usaha)	Jumlah	-		20,00	220,00			
17.1.9	Kontribusi Kategori Pariwisata terhadap PAD	Persen	10,00		13,29	12,35			
17.1.10	Jumlah SDM Pariwisata yang Tersertifikasi	Orang	50,00		20,00	30,00			
17.1.11	Jumlah Industri Baru yang Mendukung MICE (jasa usaha)	Event	-	50,00			30,00	40,00	40,00
17.1.12	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	Persen	10,00	15,00			18,64	23,16	23,16
17.1.13	Jumlah SDM Pariwisata yang Tersertifikasi	Orang	50,00	50,00			60,00	40,00	40,00
17.1.14	Opini BPK atas LKPD	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
17.1.15	Ketepatan Waktu Penyusunan RAPBD dan RAPBD-P	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17.1.16	Ketepatan Waktu penyelesaian SP2D yang Dinyatakan Lengkap dan Sah Secara Ketentuan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17.1.17	Persentase Temuan Penatausahaan Keuangan oleh BPK/Inspektorat yang Ditindaklanjuti	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17.1.18	Persentase Kesesuaian Data Rincian Data Total BMD dengan Aktiva Tetap di Neraca Pemerintah Kota	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



KODE INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET PADA AKHIR PRIODE PERENCANAAN (2020)	CAPAIAN				
					BASELINE (2016)	2017	2018	2019	2020
17.1.19	Persentase Terlaksananya Penilaian dan Penghapusan BMD Sesuai dengan Usulan OPD	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17.1.20	Nilai Indeks Kepuasan atas Layanan Kas Daerah	Angka	2,00	4,00	2,00	2,00	3,00	3,00	4,00
17.1.21	Ketepatan Waktu Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Daerah	Persen	100,00		100,00	100,00	100,00		
17.1.22	Terselesaikannya Kewajiban Pembayaran Hutang	Persen		100,00		100,00		99,99	99,99
17.1.23	Persentase Penerimaan Pajak Daerah terhadap PAD	Persen	65,01		67,17				
17.1.24	Persentase Jumlah Peningkatan Objek Pajak	Persen			12,72				
17.1.25	Persentase Penerimaan Pajak Daerah terhadap PAD	Persen		54,01		55,48	72,22	75,81	76,14
17.1.26	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak	Persen		75,00		60,54	85,86	93,98	75,80
17.1.27	Persentase Jumlah Peningkatan Objek Pajak	Persen		13,72		13,07	6,73	11,67	17,98
17.1.28	Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah	Persen		79,52		74,30	74,35	79,08	79,30
Target 17.3 Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber.									
17.3.1	Persentase Proposal CSR yang Terasilitasi	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17.3.2	Persentase Penyediaan Data Harga Sembako	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan



Tidak Dilaksanakan pada Tahun Tersebut



2.7 Capaian Kinerja Pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2020

Pelaksanaan pembangunan Kota Bandar Lampung selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yaitu sejak tahun 2016-2020 berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2021 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 09 Tahun 2018.

Pelaksanaan RPJMD pada dasarnya merupakan rangkaian dari perencanaan yang dilaksanakan setiap tahun. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah guna terwujudnya visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung, tentu mengalami beberapa kendala yang mengakibatkan capaian kinerja tidak tercapai sepenuhnya. Oleh karena itu, capaian kinerja pelaksanaan kebijakan RPJMD periode sebelumnya akan menjadi dasar pertimbangan rencana pembangunan kedepannya.

Tabel berikut menggambarkan capaian kinerja pelaksanaan RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2020 terhadap pencapaian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah.

Tabel 2.148 Evaluasi Hasil Capaian RPJMD Tahun 2016-2020

Misi/Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Periode Perencanaan		Target RPJMD									
					2020		2016 (Realisasi)		2017		2018		2019		2020	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	
1 MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT																
1.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan dan Status Gizi Masyarakat		Angka Harapan Hidup (AHH)	Angka	70,65	71,05											
		Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,77	1,77											
1.1.1 Meningkatkan Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat		Angka Harapan Hidup (AHH)	Angka	70,65	71,00		70,75		70,75		70,85		70,95		71,00	
		Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) pada Anak Balita	Persen	21,70	9,00		17,40		21,80		17,00		13,00		9,00	
		Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun)	Persen	-	20,00		21,20		23,80		23,80		21,00		20,00	
	1.1.1.1 Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase Balita Kurang Gizi	Persen	21,70	13,00	57.310.000,00	17,40	7.310.000,00					13,00	50.000.000,00		
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Anak Baduta (bawah dua tahun)	Persen	-	21,00		21,20						21,00			
	1.1.1.2 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Cakupan Pelayanan Anak Balita	Persen	80,00	90,00	50.000.000,00	80,00	-					90,00	50.000.000,00		
	1.1.1.3 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	Persen	75,00		84.664.000,00	80,00	19.664.000,00	85,00	65.000.000,00						
		Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 Penduduk (CNR)	Angka	193,00			220,00		231,00							
		Eliminasi Malaria	Angka	<1			<1		<1							
		Prevalensi HIV/AIDS dari Total Populasi	Persen	0,22			0,22		0,22							
		Persentase Puskesmas yang Melakukan Deteksi Dini dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM) dan Pelayanan Kesehatan Jiwa (Posbindu)	Persen	50,00			50,00		60,00							
		Persentase Penemuan Penyakit Tidak Menular (Diabetes Melitus)	Persen	10,00			10,00		20,00							
		Prevalensi Tekanan Darah Tinggi	Persen	22,88			24,16		23,90							
		Prevalensi Obesitas pada Penduduk Usia 18+ Tahun	Persen	15,40			15,40		15,40							
		Prevalensi Merokok Penduduk Usia <18 Tahun	Persen	7,80			7,40		7,00							
	1.1.1.4 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	Persen		95,00	25.790.000.000,00					95,00	210.000.000,00	95,00	300.000.000,00	95,00	25.280.000.000,00
		Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk (CNR)	Orang		271,00						231,00		250,00		271,00	
		Eliminasi Malaria	Per Mil		<1						<1		<1		<1	
		Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari Total Populasi	Persen		0,22						0,22		0,22		0,22	
		Persentase Puskesmas yang Melakukan Deteksi Dini dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM) dan Pelayanan Kesehatan Jiwa (Posbindu)	Persen		90,00						90,00		90,00		90,00	
		Persentase Penemuan Penyakit Tidak Menular (Diabetes Melitus)	Persen		50,00						30,00		40,00		50,00	
		Prevalensi Tekanan Darah Tinggi	Persen		21,00						23,00		22,00		21,00	
		Prevalensi Obesitas pada Penduduk Usia 18+ Tahun	Persen		15,40						15,40		15,40		15,40	
		Prevalensi Merokok Penduduk Usia <18 Tahun	Persen		5,80						6,00		5,90		5,80	
	1.1.1.5 Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Persen	40,00	50,00	586.969.280,00	40,00	5.250.000,00	40,00	50.000.000,00	40,00	350.000.000,00	50,00	102.000.000,00	50,00	79.719.280,00
	1.1.1.6 Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/ Kartu Indonesia Sehat (KIS)	Persen	69,2	100,00	737.531.710.751,89	65,00	107.769.069.175,00	70,00	135.537.463.150,00	70,00	171.195.132.308,89	100,00	165.956.687.163,00	100,00	157.073.358.955,00
		Persentase Puskesmas yang Terakreditasi	Persen		100,00		40,00		80,00		100,00		100,00		100,00	
		Pencapaian 80 Persen Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi	Persen	90,38	95,00		92,00		98,80		94,00		95,00		95,00	

Misi/Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Target RPJMD									
				2016		2017		2018		2019		2020	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		12		13		14		15		16
1 MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT													
1.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan dan Status Gizi Masyarakat		Angka Harapan Hidup (AHH)	Angka										
		Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen										
1.1.1 Meningkatkan Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat		Angka Harapan Hidup (AHH)	Angka	70,75		70,84		71,01		71,28		71,37	
		Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) pada Anak Balita	Persen	17,40		21,80		16,09		3,08		5,77	
		Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun)	Persen	21,20		23,80		26,38		6,10		6,60	
	1.1.1.1 Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase Balita Kurang Gizi	Persen	17,40	7.310.000,00					3,08			
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Anak Baduta (bawah dua tahun)	Persen	21,20						6,10			
	1.1.1.2 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Cakupan Pelayanan Anak Balita	Persen	80,00	-					92,78	-		
	1.1.1.3 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	Persen	80,00	19.664.000,00	85,00	-						
		Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 Penduduk (CNR)	Angka	220,00		231,00							
		Eliminasi Malaria	Angka	<1		<1							
		Prevalensi HIV/AIDS dari Total Populasi	Persen	0,22		0,22							
		Persentase Puskesmas yang Melakukan Deteksi Dini dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM) dan Pelayanan Kesehatan Jiwa (Posbindu)	Persen	50,00		60,00							
		Persentase Penemuan Penyakit Tidak Menular (Diabetes Melitus)	Persen	10,00		20,00							
		Prevalensi Tekanan Darah Tinggi	Persen	24,16		23,90							
		Prevalensi Obesitas pada Penduduk Usia 18+ Tahun	Persen	15,40		15,40							
		Prevalensi Merokok Penduduk Usia <18 Tahun	Persen	7,40		7,00							
	1.1.1.4 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	Persen					85,00	190.706.900,00	97,00	130.380.100,00	90,00	14.839.343.516,00
		Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk (CNR)	Orang					231,00		331,00		258,00	
		Eliminasi Malaria	Per Ml					<1		0,38		<1	
		Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari Total Populasi	Persen					0,22		1,57		0,20	
		Persentase Puskesmas yang Melakukan Deteksi Dini dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM) dan Pelayanan Kesehatan Jiwa (Posbindu)	Persen					83,00		100,00		90,00	
		Persentase Penemuan Penyakit Tidak Menular (Diabetes Melitus)	Persen					45,00		87,01		47,50	
		Prevalensi Tekanan Darah Tinggi	Persen					30,00		71,40		20,00	
		Prevalensi Obesitas pada Penduduk Usia 18+ Tahun	Persen					20,00		66,31		15,00	
		Prevalensi Merokok Penduduk Usia <18 Tahun	Persen					7,00		32,43		3,40	
	1.1.1.5 Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Persen	40,00	5.250.000,00	40,00	-	40,00	-	100,00	-	50,00	79.719.280,00
	1.1.1.6 Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/ Kartu Indonesia Sehat (KIS)	Persen	65,00	107.769.069.175,00	70,00	81.583.624.121,00	100,00	140.076.304.488,33	100,00	132.553.899.203,58	100,00	82.950.509.816,00
		Persentase Puskesmas yang Terakreditasi	Persen	40,00		80,00		100,00		100,00		100,00	
		Pencapaian 80 Persen Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi	Persen	92,00		98,80		90,00		96,90		84,70	

Misi/Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD (%)										Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Perangkat Daerah Pelaksana	
				2016		2017		2018		2019		2020							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1	2	3	4	17=12/7*100		18=13/8*100		19=14/9*100		20=15/10*100		21=16/11*100		22		23=22/6*100		29	
1 MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT																			
1.1 Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Status Gizi Masyarakat		Angka Harapan Hidup (AHH)	Angka											71,37		100,45			
		Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen											1,109		62,66			
1.1.1 Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat		Angka Harapan Hidup (AHH)	Angka	100,00		100,13		100,23		100,47		100,52		71,37		100,52			
		Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) pada Anak Balita	Persen	100,00		100,00		105,66		422,08		155,98		5,77		155,98			
		Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun)	Persen	100,00		100,00		90,22		344,26		303,03		6,60		303,03			
1.1.1.1 Program Perbaikan Gizi Masyarakat		Persentase Balita Kurang Gizi	Persen	100,00	100,00					422,08	-			3,08	7.310.000,00	422,08	12,76	Dinas Kesehatan	
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Anak Baduta (bawah dua tahun)	Persen	100,00						344,26				6,10		344,26			
1.1.1.2 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita		Cakupan Pelayanan Anak Balita	Persen	100,00	-					103,09	-			92,78	-	103,09	-	Dinas Kesehatan	
1.1.1.3 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular		Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	Persen	100,00	100,00	100,00	0,00								19.664.000,00		23,23	Dinas Kesehatan	
		Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 Penduduk (CNR)	Angka	100,00		100,00													
		Eliminasi Malaria	Angka	100,00		100,00													
		Prevalensi HIV/AIDS dari Total Populasi	Persen	100,00		100,00													
		Persentase Puskesmas yang Melakukan Deteksi Dini dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM) dan Pelayanan Kesehatan Jiwa (Posbindu)	Persen	100,00		100,00													
		Persentase Penemuan Penyakit Tidak Menular (Diabetes Melitus)	Persen	100,00		100,00													
		Prevalensi Tekanan Darah Tinggi	Persen	100,00		100,00													
		Prevalensi Obesitas pada Penduduk Usia 18+ Tahun	Persen	100,00		100,00													
		Prevalensi Merokok Penduduk Usia <18 Tahun	Persen	100,00		100,00													
1.1.1.4 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	Persen					89,47	90,81	102,11	43,46	94,74	58,70	90,00	15.160.430.516,00	94,74	58,78	Dinas Kesehatan	
		Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk (CNR)	Orang					100,00		132,40		95,20		258,00		95,20			
		Eliminasi Malaria	Per Mil					100,00		263,16		100,00		<1		100,00			
		Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari Total Populasi	Persen					100,00		14,01		110,00		0,20		110,00			
		Persentase Puskesmas yang Melakukan Deteksi Dini dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM) dan Pelayanan Kesehatan Jiwa (Posbindu)	Persen					92,22		111,11		100,00		90,00		100,00			
		Persentase Penemuan Penyakit Tidak Menular (Diabetes Melitus)	Persen					150,00		217,53		95,00		47,50		95,00			
		Prevalensi Tekanan Darah Tinggi	Persen					130,43		30,81		105,00		20,00		105,00			
		Prevalensi Obesitas pada Penduduk Usia 18+ Tahun	Persen					129,87		23,22		102,67		15,00		102,67			
		Prevalensi Merokok Penduduk Usia <18 Tahun	Persen					116,67		18,19		170,59		3,40		170,59			
1.1.1.5 Program Pengembangan Lingkungan Sehat		Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Persen	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	-	200,00	-	100,00	100,00	50,00	84.969.280,00	100,00	14,48	Dinas Kesehatan	
1.1.1.6 Program Upaya Kesehatan Masyarakat		Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/ Kartu Indonesia Sehat (KIS)	Persen	100,00	100,00	100,00	60,19	142,86	81,82	100,00	79,87	100,00	52,81	100,00	544.933.406.803,91	100,00	73,89	Dinas Kesehatan	
		Persentase Puskesmas yang Terakreditasi	Persen	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
		Pencapaian 80 Persen Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi	Persen	100,00		100,00		95,74		102,00		89,16		84,70		89,16			

Misi/Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Periode Perencanaan		Target RPJMD									
					2020		2016 (Realisasi)		2017		2018		2019		2020	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.1.7 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.1.1.7 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rasio Posyandu per Satuan Balita	Balita/Posyandu	168,00	140,00	400.434.650,00	133,00	25.934.650,00	150,00	100.000.000,00	140,00	100.000.000,00	140,00	150.000.000,00	140,00	24.500.000,00
	1.1.1.8 Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Persentase Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Pustu dan Jaringannya yang Sesuai Standar	Persen	60,00	90,00	42.108.232.723,00	70,00	8.247.583.803,00	80,00	9.236.723.000,00	80,00	3.430.980.000,00	85,00	1.680.944.000,00	90,00	19.512.001.920,00
	1.1.1.9 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan Penduduk Miskin yang Mendapat Pelayanan Kesehatan	Persen	100,00	100,00	5.994.000,00	100,00	5.994.000,00								
	1.1.1.10 Program Manajemen Pelayanan Kesehatan	Cakupan Manajemen Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	70,00	95,00	1.239.250.519,00	70,00	256.901.875,00	75,00	174.381.000,00	80,00	399.625.644,00	85,00	278.342.000,00	90,00	130.000.000,00
	1.1.1.11 Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Puskesmas yang Melakukan Kegiatan GEMA CERMAT untuk Meningkatkan Penggunaan Obat Nasional pada Masyarakat	Persen	60,00	100,00	135.428.666.761,00			80,00	134.603.885.761,00	90,00	137.405.000,00	100,00	250.500.000,00	100,00	436.876.000,00
	1.1.1.12 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	Persentase Puskesmas yang Memanfaatkan Obat Tradisional dan Melakukan Asuhan Mandiri	Persen	50,00	100,00	29.833.600,00	60,00	29.833.600,00								
	1.1.1.13 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Persentase Produsen Industri Rumah Tangga (PIRT) yang Mendapatkan Ijin Rekomendasi	Persen	72,00	90,00	80.047.700,00	75,00	10.047.700,00			80,00	20.000.000,00	80,00	50.000.000,00		
	1.1.1.14 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Cakupan Persalinan Ibu di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Persen	72,00	82,00	6.281.031.000,00	74,00	7.800.000,00	76,00	735.297.000,00	78,00	1.747.145.000,00	80,00	1.904.000.000,00	82,00	1.886.789.000,00
		Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Angka	8,00	5,00		7,00		6,00		5,00		5,00		5,00	
		Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	Angka	6,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00	
	1.1.1.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin 30 PRM dan 50 Pustu	Persen	80,00	90,00	39.264.909.998,00	80,00	4.419.640.858,00	85,00	8.809.235.000,00	85,00	7.765.000.000,00	90,00	9.641.067.000,00	90,00	8.629.967.140,00
	1.1.1.16 Program Pengadaan, Peningkatan, Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Angka Penggunaan Tempat Tidur (BOR)	Persen	95,00	85,00	122.373.664.253,00	95,00	32.178.338.104,00	92,00	39.280.435.349,00	90,00	42.772.796.800,00	87,00	648.319.000,00	85,00	7.493.775.000,00
		Rata-Rata Lama Perawatan di Rumah Sakit (LOS=Length Of Stay)	Hari	4,00	6,00		4,50		5,00		5,50		6,00		6,00	
		TOI (Turn Over Interval = Tenggang Perputaran)	Hari	0,25	1,00		0,50		0,50		5,50		0,75		1,00	
		BTO (Bed Turn Over = Angka Perputaran Tempat Tidur)	Kali	60,00	50,00		60,00		60,00		55,00		55,00		50,00	
		Gross Death Rate (GDR)/Per Mill	0/00		20,35		20,48		20,45		20,40		20,35		20,35	
		Net Death Rate (NDR)/Per Mill	0/00		8,50		9,00		9,00		8,70		8,50		8,50	
	1.1.1.17 Program Pelayanan Kesehatan Rujukan	Cakupan Pelayanan BLUD	Persen		100,00	61.666.736.844,17							100,00	36.666.736.844,17	100,00	25.000.000.000,00
		Hasil Evaluasi Kinerja RSUD	Nilai	Baik	Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		Baik	
		Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan RSUD	Persen	89,00	100,00		90,00		95,00		100,00		100,00		100,00	
		RSUD yang Tersertifikasi Akreditasi Nasional	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
		Pemenuhan Minimal Tujuh Dokter Spesialis di RSUD	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
1.1.2 Meningkatkan Pengendalian Jumlah Penduduk		Laju Pertumbuhan penduduk	Persen	1,77	1,77		1,77		1,77		1,77		1,77		1,77	
	1.1.2.1 Program Keluarga Berencana	Cakupan Pasangan Usia Subur yang Istrinya di Bawah Usia 20 Tahun	Persen	2,78	2,83	18.304.224.950,00	2,79	841.419.450,00	2,80	2.102.084.000,00	2,81	4.474.304.000,00	2,82	5.646.583.000,00	2,83	5.239.834.500,00
		Cakupan Pasangan Usia Subur yang Ingin ber KB Tidak Terpenuhi (unmet need)	Persen	12,23	9,31		12,93		12,92		10,93		10,13		9,31	
		Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Aktif	Persen	67,30	67,40		67,32		67,34		67,36		67,38		67,40	
	1.1.2.2 Program Penyediaan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita	Persen	78,70	78,30	1.699.817.750,00	78,30	1.699.817.750,00								

Misi/Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Target RPJMD									
				2016		2017		2018		2019		2020	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	12		13		14		15		16	
	1.1.1.7 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rasio Posyandu per Satuan Balita	Balita/Posyandu	133,00	25.934.650,00	131,00	22.550.000,00	126,00	44.473.000,00	140,00	100.013.000,00	140,00	24.500.000,00
	1.1.1.8 Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Persentase Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Pustu dan Jaringannya yang Sesuai Standar	Persen	70,00	8.247.583.803,00	80,00	8.847.121.488,00	80,00	3.353.464.666,00	90,00	901.809.730,00	100,00	8.439.372.145,00
	1.1.1.9 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan Penduduk Miskin yang Mendapat Pelayanan Kesehatan	Persen	100,00	5.994.000,00								
	1.1.1.10 Program Manajemen Pelayanan Kesehatan	Cakupan Manajemen Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	70,00	256.901.875,00	75,00	100.289.400,00	80,00	230.690.425,00	85,00	141.329.100,00	100,00	31.567.500,00
	1.1.1.11 Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Puskesmas yang Melakukan Kegiatan GEMA CERMAT untuk Meningkatkan Penggunaan Obat Nasional pada Masyarakat	Persen			75,00	100.099.517.068,00	75,00	92.085.000,00	100,00	209.660.000,00	100,00	136.080.600,00
	1.1.1.12 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	Persentase Puskesmas yang Memanfaatkan Obat Tradisional dan Melakukan Asuhan Mandiri	Persen	60,00	29.833.600,00								
	1.1.1.13 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Persentase Produsen Industri Rumah Tangga (PIRT) yang Mendapatkan Ijin Rekomendasi	Persen	75,00	10.047.700,00			80,00		50,00			
	1.1.1.14 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Cakupan Persalinan Ibu di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Persen	74,00	7.800.000,00	76,00	-	78,00	-	96,02	168.023.500,00	95,64	285.544.500,00
		Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Angka	7,00		5,00		4,00		4,00		2,00	
		Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	Angka	5,00		4,00		2,00		3,00		2,00	
	1.1.1.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin 30 PKM dan 50 Pustu	Persen	80,00	4.419.640.858,00	80,00	8.185.187.848,00	80,00	7.093.468.337,00	93,50	6.493.295.895,00	100,00	2.492.001.140,00
	1.1.1.16 Program Pengadaan, Peningkatan, Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Angka Penggunaan Tempat Tidur (BOR)	Persen	95,00	32.178.338.104,00	92,00	33.899.942.024,94	90,00	29.990.837.240,11	58,00	646.851.380,00	39,00	3.437.010.200,00
		Rata-Rata Lama Perawatan di Rumah Sakit (LOS=Length Of Stay)	Hari	4,50		5,00		5,50		3,00		3,00	
		TOI (Turn Over Interval = Tenggang Perputaran)	Hari	0,50		0,50		5,50		3,00		3,00	
		BTO (Bed Turn Over = Angka Perputaran Tempat Tidur)	Kali	60,00		60,00		55,00		47,00		40,00	
		Gross Death Rate (GDR)/Per Mill	0/00	20,48		20,45		20,40		19,71		10,00	
		Net Death Rate (NDR)/Per Mill	0/00	9,00		9,00		8,70		10,11		19,00	
	1.1.1.17 Program Pelayanan Kesehatan Rujukan	Cakupan Pelayanan BLUD	Persen							100,00	17.851.770.418,13	100,00	22.545.500.769,17
		Hasil Evaluasi Kinerja RSUD	Nilai	Baik		Baik				Baik		Baik	
		Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan RSUD	Persen	90,00		95,00				90,91		95,45	
		RSUD yang Tersertifikasi Akreditasi Nasional	Persen	100,00		100,00				100,00		100,00	
		Pemenuhan Minimal Tujuh Dokter Spesialis di RSUD	Persen	100,00		100,00				100,00		100,00	
1.1.2 Meningkatkan Pengendalian Jumlah Penduduk		Laju Pertumbuhan penduduk	Persen	1,019		1,018		1,018		1,017		1,019	
	1.1.2.1 Program Keluarga Berencana	Cakupan Pasangan Usia Subur yang Istrinya di Bawah Usia 20 Tahun	Persen	2,79	841.419.450,00	2,75	777.073.600,00	2,95	2.072.702.150,00	0,28	2.856.509.050,00	0,30	888.616.117,00
		Cakupan Pasangan Usia Subur yang Ingin ber KB Tidak Terpenuhi (unmet need)	Persen	12,93		12,25		12,25		11,62		11,50	
		Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Aktif	Persen	67,32		62,43		72,43		72,65		72,79	
	1.1.2.2 Program Penyajian Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita	Persen	78,30	1.699.817.750,00								

Misi/Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD (%)										Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Perangkat Daerah Pelaksana
				2016		2017		2018		2019		2020						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	17=12/7*100		18=13/8*100		19=14/9*100		20=15/10*100		21=16/11*100		22		23=22/6*100		29
1.1.1.7 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rasio Posyandu per Satuan Balita	Balita/ Posyandu	100,00	100,00	87,33	22,55	90,00	44,47	100,00	66,68	100,00	100,00	140,00	217.470.650,00	100,00	54,31	Dinas Kesehatan	
	1.1.1.8 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Persentase Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Pustu dan Jaringannya yang Sesuai Standar	Persen	100,00	100,00	100,00	95,78	100,00	97,74	105,88	53,65	111,11	43,25	100,00	29.789.351.832,00	111,11	70,74	Dinas Kesehatan
	1.1.1.9 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan Penduduk Miskin yang Mendapat Pelayanan Kesehatan	Persen	100,00	100,00									100,00	5.994.000,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
	1.1.1.10 Program Manajemen Pelayanan Kesehatan	Cakupan Manajemen Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	100,00	100,00	100,00	57,51	100,00	57,73	100,00	50,78	111,11	24,28	100,00	760.778.300,00	105,26	61,39	Dinas Kesehatan
	1.1.1.11 Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Puskesmas yang Melakukan Kegiatan GEMA CERMAT untuk Meningkatkan Penggunaan Obat Nasional pada Masyarakat	Persen			93,75	74,37	83,33	67,02	100,00	83,70	100,00	31,15	100,00	100.537.342.668,00	100,00	74,24	Dinas Kesehatan
	1.1.1.12 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	Persentase Puskesmas yang Memanfaatkan Obat Tradisional dan Melakukan Asuhan Mandiri	Persen	100,00	100,00									100,00	29.833.600,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
	1.1.1.13 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Persentase Produsen Industri Rumah Tangga (PIRT) yang Mendapatkan Ijin Rekomendasi	Persen	100,00	100,00			100,00		62,50				50,00	10.047.700,00	55,56	12,55	Dinas Kesehatan
	1.1.1.14 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Cakupan Persalinan Ibu di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00	0,00	120,03	8,82	116,63	15,13	95,64	461.368.000,00	116,63	7,35	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Angka	100,00		83,33		125,00		125,00		250,00		2,00		250,00		
		Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	Angka	100,00		80,00		250,00		166,67		250,00		2,00		250,00		
	1.1.1.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin 30 PKM dan 50 Pustu	Persen	100,00	100,00	94,12	92,92	94,12	91,35	103,89	67,35	111,11	28,88	100,00	28.683.594.078,00	111,11	73,05	Dinas Kesehatan dan RSUD
	1.1.1.16 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata	Angka Penggunaan Tempat Tidur (BOR)	Persen	100,00	100,00	100,00	86,30	100,00	70,12	66,67	99,77	45,88	45,86	39,00	100.152.978.949,05	45,88	81,84	RSUD
		Rata-Rata Lama Perawatan di Rumah Sakit (LOS=Length Of Stay)	Hari	100,00		100,00		100,00		50,00		50,00		3,00		50,00		
		TOI (Turn Over Interval = Tenggang Perputaran)	Hari	100,00		100,00		100,00		400,00		300,00		3,00		300,00		
		BTO (Bed Turn Over = Angka Perputaran Tempat Tidur)	Kali	100,00		100,00		100,00		117,02		80,00		40,00		125,00		
		Gross Death Rate (GDR/ Per Mill	0/00	100,00		100,00		100,00		103,25		49,14		10,00		203,50		
		Net Death Rate (NDR/ Per Mill	0/00	100,00		100,00		100,00		84,08		223,53		19,00		44,74		
	1.1.1.17 Program Pelayanan Kesehatan Rujukan	Cakupan Pelayanan BLUD	Persen							100,00	48,69	100,00	90,18	100,00	40.397.271.187,30	100,00	65,51	RSUD
		Hasil Evaluasi Kinerja RSUD	Nilai	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Baik		100,00		
		Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan RSUD	Persen	100,00		100,00		0,00		90,91		95,45		95,45		95,45		
		RSUD yang Tersertifikasi Akreditasi Nasional	Persen	100,00		100,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Pemenuhan Minimal Tujuh Dokter Spesialis di RSUD	Persen	100,00		100,00		0,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
1.1.2 Meningkatkan Pengendalian Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan penduduk	Persen	173,70		173,87		173,87		174,04		173,70		1,109		159,60			
	1.1.2.1 Program Keluarga Berencana	Cakupan Pasangan Usia Subur yang Istrinya di Bawah Usia 20 Tahun	Persen	100,00	100,00	101,82	36,97	95,25	46,32	1.007,14	50,59	10,60	16,96	0,30	7.436.320.367,00	943,33	40,63	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Cakupan Pasangan Usia Subur yang Ingin ber KB Tidak Terpenuhi (unmet need)	Persen	100,00		105,47		89,22		87,18		123,52		11,50		80,96		
		Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Aktif	Persen	100,00		107,86		93,00		92,75		108,00		72,79		92,60		
1.1.2.2 Program Penyajian Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita	Persen	100,00	100,00									78,30	1.699.817.750,00	100,00	100,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

Misi/Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Periode Perencanaan		Target RPJMD										
					2020		2016 (Realisasi)		2017		2018		2019		2020		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1.1.2.3 Program Penyuluhan dan Penggerakan Masyarakat	Angka Kelahiran (Total Fertility Rate/TFR)	Angka	2,17	2,12	15.084.612.400,00	2,17	-	2,17	3.076.510.000,00	2,15	3.101.000.400,00	2,14	3.946.510.000,00	2,12	4.960.592.000,00	
		Rasio Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB (PLKB/PKB) 1 Petugas di Setiap 1 Desa/Kelurahan (Petugas)	Persen	69,84	100,00		70,63		69,05		100,00		100,00		100,00		
		Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 Petugas di Setiap 1 Desa/Kelurahan (Petugas)	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	29,95	35,38		30,50		32,48		33,18		34,58		35,38		
		Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi	Persen	10,80	6,48		10,70		10,70		9,57		7,71		6,48		
	1.1.2.4 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 Petugas di Setiap 1 Desa/Kelurahan (Petugas)	Angka	126,00	126,00	2.782.885.000,00	126,00	2.782.885.000,00									
		1.1.2.5 Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Pasangan Usia Subur Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	Persen	82,60	87,00	13.777.253.000,00	80,40	-	87,00	2.979.241.000,00	87,00	3.000.991.000,00	87,00	3.526.741.000,00	87,00	4.270.280.000,00
			Cakupan Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat Setiap Tahun	Persen	30,00	30,00		30,00		30,00		30,00		30,00		30,00	
	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita		Persen	78,70	70,00				70,00		70,00		70,00		70,00		
	1.1.2.6 Program Pengendalian Penduduk	Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa/Kelurahan Setiap Tahun	Persen	100,00	100,00	1.055.000.000,00	100,00	-	100,00	315.000.000,00	100,00	315.000.000,00	100,00	315.000.000,00	100,00	110.000.000,00	
	1.1.2.7 Program Pembinaan Kesehatan Reproduksi Remaja	Persentase Sekolah yang Mendapat Pembinaan Kesehatan Reproduksi Remaja	Persen	70,00	75,00	17.465.000,00	75,00	17.465.000,00									
1.2 Meningkatkan Pembangunan Berkesetaraan Gender		Indeks Pembangunan Gender	Angka	93,69	94,94												
		Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	59,05	64,00												
1.2.1 Meningkatkan Peran Perempuan dalam Pembangunan		Indeks Pembangunan Gender	Angka	93,69	94,94		93,94		94,19		94,44		94,69		94,94		
		Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	59,05	64,00		60,00		61,00		62,00		63,00		64,00		
	1.2.1.1 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persen	100,00		154.248.500,00	100,00	154.248.500,00									
		1.2.1.2 Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga	Persentase Jumlah Perempuan yang Mampu Meningkatkan Kualitas Hidup Keluarga	Persen	77,78	1.130.725.100,00		-	-	18,52	323.691.000,00	33,33	241.850.000,00	55,55	417.840.000,00	77,78	147.344.100,00
		1.2.1.3 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Jumlah Perempuan Berdaya Terpenuhi Haknya dan Terlindungi	Orang		2.460.787.050,00	500,00	2.460.787.050,00									
	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan		Persen				4,20										
	1.2.1.4 Program Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan	Persentase Jumlah Perempuan yang Berdaya Guna dan Berdaya Saing	Persen	77,95	4.048.095.000,00				7,98	1.467.220.000,00	34,72	1.488.875.000,00	56,34	1.052.000.000,00	77,95	40.000.000,00	
		Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan	Persen		4,33				4,22		4,26	4,29		4,33			
2 MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN MASYARAKAT																	
2.1 Meningkatkan Ketersediaan Layanan Pendidikan yang Bermutu dan Terjangkau bagi Seluruh Masyarakat		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	74,81	79,42												
		Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,87	11,00												
		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,35	14,40												

Misi/Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Target RPJMD										
				2016		2017		2018		2019		2020		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	12		13		14		15		16		
	1.1.2.3 Program Penyuluhan dan Penggerakan Masyarakat	Angka Kelahiran (Total Fertility Rate/TFR)	Angka	2,17	-	2,17	2.766.743.300,00	2,15	2.852.536.135,00	2,17	3.659.690.700,00	2,37	2.186.985.000,00	
		Rasio Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB (PLKB/PKB) 1 Petugas di Setiap 1 Desa/Kelurahan (Petugas)	Persen	70,63		69,05		66,60		100,00		100,00		
		Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 Petugas di Setiap 1 Desa/Kelurahan (Petugas)	Persen	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	30,50		32,48		21,12		32,19		34,68		
		Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi	Persen	10,70		10,70		18,94		16,54		15,58		
	1.1.2.4 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 Petugas di Setiap 1 Desa/Kelurahan (Petugas)	Angka	126,00	2.782.885.000,00									
		1.1.2.5 Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Pasangan Usia Subur Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	Persen	80,40	-	81,67	2.457.816.450,00	91,67	2.634.693.071,00	84,21	3.185.521.059,00	50,00	1.621.070.000,00
			Cakupan Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat Setiap Tahun	Persen	30,00		30,00		30,00		30,00		30,00	
	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita		Persen			67,62		97,62		96,82		50,00		
	1.1.2.6 Program Pengendalian Penduduk	Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa/ Kelurahan Setiap Tahun	Persen	100,00	-	100,00	131.393.100,00	100,00	101.576.000,00	100,00	130.470.000,00	50,00	-	
	1.1.2.7 Program Pembinaan Kesehatan Reproduksi Remaja	Persentase Sekolah yang Mendapat Pembinaan Kesehatan Reproduksi Remaja	Persen	75,00	17.465.000,00									
1.2 Meningkatnya Pembangunan Berkesetaraan Gender		Indeks Pembangunan Gender	Angka											
		Indeks Pemberdayaan Gender	Angka											
1.2.1 Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan		Indeks Pembangunan Gender	Angka	93,94		93,53		93,55		93,96		93,86		
		Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	60,00		62,11		62,39		71,54		71,54*)		
	1.2.1.1 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persen	100,00	154.248.500,00									
		1.2.1.2 Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga	Persentase Jumlah Perempuan yang Mampu Meningkatkan Kualitas Hidup Keluarga	Persen	-	-	16,50	289.769.500,00	31,42	205.485.900,00	58,15	375.341.000,00	59,59	27.874.750,00
			1.2.1.3 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Jumlah Perempuan Berdaya Terpenuhi Haknya dan Terlindungi	Orang	500,00	2.460.787.050,00							
	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan	Persen		4,20										
	1.2.1.4 Program Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan	Persentase Jumlah Perempuan yang Berdaya Guna dan Berdaya Saing	Persen			7,98	1.192.132.950,00	34,72	1.440.039.700,00	59,45	1.039.960.000,00	59,45	-	
		Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan	Persen			3,10		3,23		3,19		3,19		
2 MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN MASYARAKAT														
2.1 Meningkatnya Ketersediaan Layanan Pendidikan yang Bermutu dan Terjangkau bagi Seluruh Masyarakat		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka											
		Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun											
		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun											

Misi/Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD (%)										Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Perangkat Daerah Pelaksana
				2016		2017		2018		2019		2020						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	17=12/7*100	18=13/8*100	19=14/9*100	20=15/10*100	21=16/11*100	22	23=22/6*100	29							
	1.1.2.3 Program Penyuluhan dan Penggerakan Masyarakat	Angka Kelahiran (Total Fertility Rate/ TFR)	Angka	100,00	-	100,00	89,93	100,00	91,99	98,62	92,73	89,45	44,09	2,37	11.465.955.135,00	89,45	76,01	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Rasio Petugas Lapangan KB/ Penyuluh KB (PLKB/ PKB) 1 Petugas di Setiap 1 Desa/ Kelurahan (Petugas)	Persen	100,00		100,00		66,60		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 Petugas di Setiap 1 Desa/ Kelurahan (Petugas)	Persen	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	100,00		100,00		63,65		93,09		98,02		34,68		98,02		
		Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi	Persen	100,00		100,00		50,53		46,61		41,59		15,58		41,59		
	1.1.2.4 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/ KR yang Mandiri	Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD)1 Petugas di Setiap 1 Desa/ Kelurahan (Petugas)	Angka	100,00	100,00									126,00	2.782.885.000,00	100,00	100,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.1.2.5 Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Pasangan Usia Subur Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber- KB	Persen	100,00	-	93,87	82,50	105,37	87,79	96,79	90,32	57,47	37,96	50,00	9.899.100.580,00	57,47	71,85	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Cakupan Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat Setiap Tahun	Persen	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		30,00		100,00		
		Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita	Persen			96,60		139,46		138,31		71,43		50,00		71,43		
	1.1.2.6 Program Pengendalian Penduduk	Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa/ Kelurahan Setiap Tahun	Persen	100,00	-	100,00	41,71	100,00	32,25	100,00	41,42	50,00	-	50,00	363.439.100,00	50,00	34,45	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.1.2.7 Program Pembinaan Kesehatan Reproduksi Remaja	Persentase Sekolah yang Mendapat Pembinaan Kesehatan Reproduksi Remaja	Persen											75,00	17.465.000,00	100,00	100,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1.2 Meningkatnya Pembangunan Berkesetaraan Gender		Indeks Pembangunan Gender	Angka											93,86		98,86		
		Indeks Pemberdayaan Gender	Angka											71,54*)		111,78		
1.2.1 Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan		Indeks Pembangunan Gender	Angka	100,00		99,30		99,06		99,23		98,86		93,86		98,86		
		Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	100,00		101,82		100,63		113,56		111,78		71,54*)		111,78		
	1.2.1.1 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persen	100,00	100,00										154.248.500,00		100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		1.2.1.2 Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga	Persentase Jumlah Perempuan yang Mampu Meningkatkan Kualitas Hidup Keluarga	Persen	-	-	89,09	89,52	94,27	84,96	104,68	89,83	76,61	18,92	56,69	898.471.150,00	72,89	79,46
	1.2.1.3 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Jumlah Perempuan Berdaya Terpenuhi Haknya dan Terlindungi	Orang	100,00	100,00										2.460.787.050,00		100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan	Persen	100,00														
	1.2.1.4 Program Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan	Persentase Jumlah Perempuan yang Berdaya Guna dan Berdaya Saing	Persen			100,00	81,25	100,00	96,72	105,52	98,86	76,27	-	59,45	3.672.132.650,00	76,27	90,71	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan	Persen			73,46		75,82		74,36		73,67		3,19		73,67		
2 MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN MASYARAKAT																		
2.1 Meningkatnya Ketersediaan Layanan Pendidikan yang Bermutu dan Terjangkau bagi Seluruh Masyarakat		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka											77,44		97,51		
		Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun											10,93		99,36		
		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun											14,64		101,67		

Misi/Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Periode Perencanaan		Target RPJMD									
					2020		2016 (Realisasi)		2017		2018		2019		2020	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	
2.1.1 Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan		Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,87	11,00		10,88		10,90		10,95		10,98		11,00	
		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,35	14,40		13,67		13,87		13,92		14,25		14,40	
	2.1.1.1 Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	Angka	81,67	89,10	3.720.735.264,00	82,01	-	87,94	370.515.000,00	88,12	563.000.000,00	88,75	1.767.053.000,00	89,10	1.020.167.264,00
		Persentase Satuan PAUD Berakreditasi	Persen	30,83	71,81		39,03		47,22		55,42		63,61		71,81	
	2.1.1.2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APK SD/MI	Angka	116,53		210.441.320.632,00	111,32	29.078.722.060,00	111,51	61.299.424.600,00	111,02	120.063.173.972,00				
		APM SD/MI	Angka	95,74			96,38		97,67		98,15					
		Rasio Guru terhadap Murid SD/MI	Angka	1:19			1:20		1:20		1:20					
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mengikuti Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Keahlian	Orang	6.115,00			9.547,00		10.502,00		11.552,00					
		Penerima Kartu Indonesia Pintar SD	Orang				22.000,00		23.000,00		24.000,00					
		Persentase Peserta Didik SD/MI Putus Sekolah	Persen	0,06			0,06		0,05		0,04					
		Persentase Lulusan SD/MI yang Melanjutkan ke SMP/MI/SMPLB	Persen	110,26			110,00		111,00		112,00					
		APK SMP/MTs	Persen	101,75			101,80		103,72		109,00					
		APM SMP/MTs	Persen	89,62			74,52		85,97		86,93					
		Rasio Guru terhadap Murid SMP/MTs	Angka	1:20			1:20		1:20		1:20					
		Persentase Peserta Didik SMP Putus Sekolah	Persen	0,06			0,05		0,04		0,03					
		Angka Kelulusan SMP	Persen	96,90			97,00		98,00		99,00					
		Angka Kelulusan SMA	Persen	99,87			100,00									
		Penerima Kartu Indonesia Pintar SMP	Orang	10.970,00			11.000,00		12.000,00		13.000,00					
	2.1.1.3 Program Pendidikan Dasar	APK SD/MI	angka		112,34	304.042.346.185,00							111,68	141.446.699.922,00	112,34	162.595.646.263,00
		APM SD/MI	angka		99,33								98,67		99,33	
		APK SMP/MTs	angka		111,00								110,00		111,00	
		APM SMP/MTs	angka		95,64								91,29		95,64	
		Bangunan SD dalam Kondisi Baik	Persen		80,00								70,00		80,00	
		Bangunan SMP dalam Kondisi Baik	Persen		95,00								90,00		95,00	
		Persentase Satuan Pendidikan Dasar (SD/MI) yang Berakreditasi A	Persen		40,32								30,65		40,32	
		Persentase Satuan Pendidikan Dasar (SMP/MTs) yang Berakreditasi A	Persen		37,97								35,44		37,97	
	2.1.1.4 Program Pendidikan Menengah	APM SMA/SMK/MA/Paket C	Persen	61,44	83,76	28.351.281.450,00	83,76	28.351.281.450,00								
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C	Persen	97,50	98,50		98,50									
		Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C	Persen	0,07	0,05		0,05									
		Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA/Paket C	Persen	99,87	100,00		100,00									
		Bangunan SMA/SMK/MA dalam Kondisi Baik	Persen	97,00	100,00		100,00									
	2.1.1.5 Program Pendidikan Non Formal	Jumlah Lembaga Pendidikan Non Formal yang Terakreditasi	Lembaga	16,00	21,00	7.857.644.500,00	17,00	364.362.500,00	18,00	839.235.000,00	19,00	432.600.000,00	20,00	5.470.080.000,00	21,00	751.367.000,00
	2.1.1.6 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/DIV	Persen	75,38	92,25	117.040.335.472,00	82,79	25.015.406.700,00	90,97	19.630.287.472,00	91,30	27.651.600.000,00	91,75	20.669.405.000,00	92,25	24.073.636.300,00
		Persentase Guru SD yang Bersertifikasi	Persen	40,15	65,70		41,07		43,47		45,50		50,85		65,70	
		Persentase Guru SMP yang Bersertifikasi	Persen	42,35	70,15		43,03		47,06		55,47		65,70		70,15	

Misi/Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Target RPJMD									
				2016		2017		2018		2019		2020	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	12		13		14		15		16	
2.1.1 Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan		Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,88		10,89		10,90		10,92		10,93	
		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,67		13,87		14,23		14,53		14,64	
	2.1.1.1 Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	Angka	82,01	-	85,59	76.497.000,00	48,87	445.987.000,00	49,46	1.152.237.736,00	49,36	625.881.944,00
		Persentase Satuan PAUD Berakreditasi	Persen	39,03		47,22		55,42		40,84		54,00	
	2.1.1.2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APK SD/MI	Angka	111,32	29.078.722.060,00	111,51	15.504.768.714,00	111,02	91.575.621.626,00				
		APM SD/MI	Angka	96,38		97,67		98,15					
		Rasio Guru terhadap Murid SD/MI	Angka	1:20		1:20		1:20					
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mengikuti Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Keahlian	Orang	9.547,00		10.502,00		11.552,00					
		Penerima Kartu Indonesia Pintar SD	Orang	22.000,00		23.000,00		24.000,00					
		Persentase Peserta Didik SD/MI Putus Sekolah	Persen	0,06		0,05		0,04					
		Persentase Lulusan SD/MI yang Melanjutkan ke SMP/MI/SMPLB	Persen	110,00		111,00		112,00					
		APK SMP/MTs	Persen	101,80		103,72		109,00					
		APM SMP/MTs	Persen	74,52		85,97		86,93					
		Rasio Guru terhadap Murid SMP/MTs	Angka	1:20		1:20		1:16,50					
		Persentase Peserta Didik SMP Putus Sekolah	Persen	0,05		0,04		0,03					
		Angka Kelulusan SMP	Persen	97,00		98,00		99,00					
		Angka Kelulusan SMA	Persen	100,00									
		Penerima Kartu Indonesia Pintar SMP	Orang	11.000,00		12.000,00		13.000,00					
	2.1.1.3 Program Pendidikan Dasar	APK SD/MI	angka							109,23	71.035.932.914,00	108,14	61.301.565.630,00
		APM SD/MI	angka							96,20		91,32	
		APK SMP/MTs	angka							107,16		96,37	
		APM SMP/MTs	angka							89,63		80,17	
		Bangunan SD dalam Kondisi Baik	Persen							35,16		80,00	
		Bangunan SMP dalam Kondisi Baik	Persen							41,49		95,00	
		Persentase Satuan Pendidikan Dasar (SD/MI) yang Berakreditasi A	Persen							30,00		31,00	
		Persentase Satuan Pendidikan Dasar (SMP/MTs) yang Berakreditasi A	Persen							41,00		42,00	
	2.1.1.4 Program Pendidikan Menengah	APM SMA/SMK/MA/Paket C	Persen	83,76	28.351.281.450,00								
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C	Persen	98,50									
		Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C	Persen	0,05									
		Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA/Paket C	Persen	100,00									
		Bangunan SMA/SMK/MA dalam Kondisi Baik	Persen	100,00									
	2.1.1.5 Program Pendidikan Non Formal	Jumlah Lembaga Pendidikan Non Formal yang Terakreditasi	Lembaga	17,00	364.362.500,00	18,00	380.377.600,00	19,00	222.953.500,00	54,00	2.531.123.500,00	22,00	209.400.000,00
	2.1.1.6 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/DIV	Persen	82,79	25.015.406.700,00	90,97	9.054.297.200,00	84,45	26.427.333.980,00	84,10	18.998.277.000,00	83,16	11.177.529.100,00
		Persentase Guru SD yang Bersertifikasi	Persen	41,07		43,47		41,80		42,03		37,38	
		Persentase Guru SMP yang Bersertifikasi	Persen	43,03		47,06		54,26		43,45		57,40	

Misi/Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD (%)										Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Perangkat Daerah Pelaksana
				2016		2017		2018		2019		2020						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	17=12/7*100	18=13/8*100	19=14/9*100	20=15/10*100	21=16/11*100	22	23=22/6*100	29							
2.1.1 Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan		Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	100,00		99,91		99,54		99,45		99,36		10,93		99,36		
		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	100,00		100,00		102,23		101,96		101,67		14,64		101,67		
	2.1.1.1 Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	Angka	100,00	-	97,33	20,65	55,46	79,22	55,73	65,21	55,40	61,35	49,36	2.300.603.680,00	55,40	61,83	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase Satuan PAUD Berakreditasi	Persen	100,00		100,00		100,00		64,20		75,20		54,00		75,20		
	2.1.1.2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APK SD/MI	Angka	100,00	100,00	100,00	25,29	100,00	76,27						136.159.112.400,00		64,70	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		APM SD/MI	Angka	100,00		100,00		100,00										
		Rasio Guru terhadap Murid SD/MI	Angka	100,00		100,00		100,00										
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mengikuti Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Keahlian	Orang	100,00		100,00		100,00										
		Penerima Kartu Indonesia Pintar SD	Orang	100,00		100,00		100,00										
		Persentase Peserta Didik SD/MI Putus Sekolah	Persen	100,00		100,00		100,00										
		Persentase Lulusan SD/MI yang Melanjutkan ke SMP/MI/SMPLB	Persen	100,00		100,00		100,00										
		APK SMP/MTs	Persen	100,00		100,00		100,00										
		APM SMP/MTs	Persen	100,00		100,00		100,00										
		Rasio Guru terhadap Murid SMP/MTs	Angka	100,00		100,00		82,50										
		Persentase Peserta Didik SMP Putus Sekolah	Persen	100,00		100,00		100,00										
		Angka Kelulusan SMP	Persen	100,00		100,00		100,00										
		Angka Kelulusan SMA	Persen	100,00														
		Penerima Kartu Indonesia Pintar SMP	Orang	100,00		100,00		100,00										
	2.1.1.3 Program Pendidikan Dasar	APK SD/MI	angka							97,81	50,22	96,26	37,70	108,14	132.337.498.544,00	96,26	43,53	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		APM SD/MI	angka							97,50		91,94		91,32		91,94		
		APK SMP/MTs	angka							97,42		86,82		96,37		86,82		
		APM SMP/MTs	angka							98,18		83,82		80,17		83,82		
		Bangunan SD dalam Kondisi Baik	Persen							50,23		100,00		80,00		100,00		
		Bangunan SMP dalam Kondisi Baik	Persen							46,10		100,00		95,00		100,00		
		Persentase Satuan Pendidikan Dasar (SD/MI) yang Berakreditasi A	Persen							97,88		76,88		31,00		76,88		
		Persentase Satuan Pendidikan Dasar (SMP/MTs) yang Berakreditasi A	Persen							115,69		110,61		42,00		110,61		
	2.1.1.4 Program Pendidikan Menengah	APM SMA/SMK/MA/Paket C	Persen	100,00	100,00									83,76	28.351.281.450,00	100,00	100,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/ Paket C	Persen	100,00										98,50		100,00		
		Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C	Persen	100,00										0,05		100,00		
		Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA/Paket C	Persen	100,00										100,00		100,00		
		Bangunan SMA/SMK/MA dalam Kondisi Baik	Persen	100,00										100,00		100,00		
	2.1.1.5 Program Pendidikan Non Formal	Jumlah Lembaga Pendidikan Non Formal yang Terakreditasi	Lembaga	100,00	100,00	100,00	45,32	100,00	51,54	270,00	46,27	104,76	27,87	22,00	3.708.217.100,00	104,76	47,19	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2.1.1.6 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/DIV	Persen	100,00	100,00	100,00	46,12	92,50	95,57	91,66	91,91	90,15	46,43	92,25	90.672.843.980,00	100,00	77,47	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase Guru SD yang Bersertifikasi	Persen	100,00		100,00		91,87		82,65		56,89		37,38		56,89		
		Persentase Guru SMP yang Bersertifikasi	Persen	100,00		100,00		97,82		66,13		81,82		57,40		81,82		

Misi/Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Periode Perencanaan		Target RPJMD									
					2020		2016 (Realisasi)		2017		2018		2019		2020	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.1.1.7 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase TK yang Dilakukan Pembinaan	Persen	90,00	100,00	598.681.432.264,11	92,00	4.175.170.863,00	94,00	138.552.531.580,00	96,00	149.876.321.901,11	98,00	152.949.127.245,00	100,00	153.128.280.675,00
		Persentase Sekolah SMP/MTs yang Melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Berbasis Online	Persen	23,57	30,37		21,93		24,68		26,58		28,48		30,37	
	2.1.1.8 Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Jumlah Peserta Sosialisasi PUG Pendidikan	Orang	75,00	90,00	172.600.000,00			80,00	43.600.000,00	80,00	43.000.000,00	90,00	43.000.000,00	90,00	43.000.000,00
	2.1.1.9 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun	Orang	13.207,00	14.500,00	1.588.729.900,00	15.643,00	90.355.000,00	13.750,00	294.224.000,00	14.000,00	363.376.800,00	14.250,00	625.096.800,00	14.500,00	215.677.300,00
		Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	Buku	18.268,00	23.836,00		468,00		1.000,00		1.200,00		1.300,00		1.600,00	
		Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Judul	8.752,00	11.986,00		234,00		600,00		700,00		800,00		900,00	
		Buku Siap Layan	Buku	3.750,00	10.000,00						1.250,00		1.250,00		1.250,00	
	2.1.1.10 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan dan Otomatisasi Perpustakaan Umum	Kualitas SDM Pengelola Perpustakaan	Orang	50,00	50,00	2.066.472.000,00	100,00	66.472.000,00					2.000.000.000,00			
		Penyediaan dan Pengolahan Koleksi Bahan Pustaka	Buku	18.602,00	1.000,00		800,00									
		Sarana dan Prasarana Perpustakaan Sesuai Standar Perpustakaan Nasional	Paket	-	1,00		1,00						1,00			
		Buku Siap Layan	Buku	3.750,00			1.250,00									
2.1.2 Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Prestasi Olahraga		Jumlah Pemuda Pelopor	Orang	4	14		7		8		9		11		14	
		Persentase Cabang Olahraga yang Berprestasi/Mendapatkan Medali	Persen	91,67	100,00		91,67		91,67		100,00		100,00		100,00	
	2.1.2.1 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	Persen	10,00	85,00	1.575.570.375,00	25,00	215.832.000,00	40,00	300.000.000,00	55,00	300.000.000,00	70,00	380.838.000,00	85,00	378.900.375,00
	2.1.2.2 Program Peningkatan Kapasitas dan Peran Pemuda	Persentase Wirausaha Muda	Persen		80,00	25.000.000,00							50,00	25.000.000,00		
	2.1.2.3 Program Pembinaan dan Pemasyarakan Olahraga	Cakupan Pembinaan Olahraga	Persen		100,00	4.168.793.182,00	100,00	1.035.768.000,00	100,00	732.905.111,00	100,00	1.063.565.071,00	100,00	748.160.000,00	100,00	588.395.000,00
		Peningkatan Pelatih yang Bersertifikasi	Persen		24,00		-				8,00		16,00		24,00	
		Cakupan Pembinaan Atlet Muda/Pelajar	Persen	35,00	75,00		40,00		55,00		65,00		70,00		75,00	
	2.1.2.4 Program Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga dalam 1 Tahun	Kali	3,00	10,00	410.642.000,00	4,00	83.942.000,00	5,00	85.200.000,00	7,00	100.000.000,00	8,00	100.000.000,00	10,00	41.500.000,00
		Atlet Berprestasi	Persen	40,00	90,00		45,00		55,00		70,00		80,00		90,00	
3	MENINGKATKAN DAYA DUKUNG INFRASTRUKTUR DALAM SKALA MANTAP UNTUK Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Sosial															
3.1 Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Kota Bandar Lampung dalam Kondisi Mantap yang Berwawasan Lingkungan		Persentase Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	Persen	75,27	89,54											
		Persentase Drainase dalam Kondisi Baik	Persen	80,00	90,00											
		Persentase Luas Kawasan Kumuh di Kota Bandar Lampung	Persen	-	2,78											
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	53,00	60,00											
3.1.1 Meningkatkan Mobilitas dan Aksesibilitas Masyarakat Antarwilayah serta Keselamatan Transportasi		Persentase Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	Persen	75,27	89,54		78,53		80,62		82,56		88,14		89,54	
		Persentase Drainase dalam Kondisi Baik	Persen	80,00	90,00		82,00		84,00		86,00		88,00		90,00	
		Rasio Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum terhadap Panjang Jalan Kota	titik/km	14,00	20,20		14,00		17,00		19,00		19,10		20,20	

Misi/Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Target RPJMD										
				2016		2017		2018		2019		2020		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	12	13	14	15	16						
	2.1.1.7 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase TK yang Dilakukan Pembinaan	Persen	92,00	4.175.170.863,00	94,00	99.232.610.723,00	-	119.767.586.241,11	100,00	118.942.985.845,00	100,00	121.413.229.283,00	
		Persentase Sekolah SMP/MTs yang Melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Berbasis Online	Persen	21,93		24,68		24,00		100,00		100,00		
	2.1.1.8 Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Jumlah Peserta Sosialisasi PUG Pendidikan	Orang			80,00	-	-	-	-	-	-	-	
	2.1.1.9 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun	Orang	15.643,00	90.355.000,00	11.284,00	110.542.500,00	12.457,00	153.199.447,00	8.012,00	473.287.650,00	3.791,00	9.821.500,00	
		Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	Buku	468,00		1.680,00		1.850,00		1.508,00		2.554,00		
		Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Judul	234,00		930,00		925,00		550,00		900,00		
		Buku Siap Layan	Buku					1.433,00		1.583,00		1.250,00		
	2.1.1.10 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan dan Otomatisasi Perpustakaan Umum	Kualitas SDM Pengelola Perpustakaan	Orang	100,00	66.472.000,00						1.325.676.900,00			
		Penyediaan dan Pengolahan Koleksi Bahan Pustaka	Buku	800,00										
		Sarana dan Prasarana Perpustakaan Sesuai Standar Perpustakaan Nasional	Paket	1,00						1,00				
		Buku Siap Layan	Buku	1.250,00										
	2.1.2 Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Prestasi Olahraga		Jumlah Pemuda Pelopor	Orang	7		8		8		8		8	
			Persentase Cabang Olahraga yang Berprestasi/Mendapatkan Medali	Persen	91,67		91,67		100,00		100,00		100,00	
		2.1.2.1 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	Persen	25,00	215.832.000,00	40,00	295.674.000,00	55,00	295.470.000,00	70,00	312.702.500,00	85,00	93.425.000,00
2.1.2.2 Program Peningkatan Kapasitas dan Peran Pemuda		Persentase Wirausaha Muda	Persen							50,00	-			
2.1.2.3 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga		Cakupan Pembinaan Olahraga	Persen	100,00	1.035.768.000,00	100,00	709.244.985,00	100,00	1.041.200.500,00	100,00	739.980.000,00	100,00	154.808.000,00	
		Peningkatan Pelatih yang Bersertifikasi	Persen	-				8,00		24,00		24,00		
		Cakupan Pembinaan Atlit Muda/Pelajar	Persen	40,00		55,00		65,00		70,00		75,00		
2.1.2.4 Program Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga		Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga dalam 1 Tahun	Kali	4,00	83.942.000,00	5,00	-	-	99.486.000,00	8,00	95.068.935,00	10,00	35.000.000,00	
		Athlet Berprestasi	Persen	45,00		55,00		70,00		80,00		90,00		
3 MENINGKATKAN DAYA DUKUNG INFRASTRUKTUR DALAM SKALA MANTAP UNTUK Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan S														
3.1 Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Kota Bandar Lampung dalam Kondisi Mantap yang Berwawasan Lingkungan		Persentase Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	Persen											
		Persentase Drainase dalam Kondisi Baik	Persen											
		Persentase Luas Kawasan Kumuh di Kota Bandar Lampung	Persen											
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka											
3.1.1 Meningkatkan Mobilitas dan Aksesibilitas Masyarakat Antarwilayah serta Keselamatan Transportasi		Persentase Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	Persen	78,53		79,49		80,36		81,64		93,97		
		Persentase Drainase dalam Kondisi Baik	Persen	82,00		85,30		86,80		87,00		90,58		
		Rasio Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum terhadap Panjang Jalan Kota	titik/ km	14,00		14,00		17,00		19,50		20,24		

Misi/Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD (%)										Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Perangkat Daerah Pelaksana	
				2016		2017		2018		2019		2020							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1	2	3	4	17=12/7*100		18=13/8*100		19=14/9*100		20=15/10*100		21=16/11*100		22		23=22/6*100		29	
	2.1.1.7 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase TK yang Dilakukan Pembinaan	Persen	100,00	100,00	100,00	71,62	-	79,91	102,04	77,77	100,00	79,29	100,00	463.531.582.955,11	100,00	77,43	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Persentase Sekolah SMP/MTs yang Melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Berbasis Online	Persen	100,00		100,00		90,29		351,12		329,27		100,00		329,27			
	2.1.1.8 Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Jumlah Peserta Sosialisasi PUG Pendidikan	Orang			100,00	0,00	-	-	-	-	-	-	80,00	-	88,89	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	2.1.1.9 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun	Orang	100,00	100,00	82,07	37,57	88,98	42,16	56,22	75,71	26,14	4,55	3.791,00	837.206.097,00	26,14	52,70	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	Buku	100,00		168,00		154,17		116,00		159,63		26.328,00		110,45			
		Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Judul	100,00		155,00		132,14		68,75		100,00		12.291,00		102,54			
		Buku Siap Layan	Buku					114,64		126,64		100,00		8.016,00		80,16			
	2.1.1.10 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan dan Otomatisasi Perpustakaan Umum	Kualitas SDM Pengelola Perpustakaan	Orang	100,00	100,00					66,28				100,00	1.392.148.900,00	200,00	67,37	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Penyediaan dan Pengolahan Koleksi Bahan Pustaka	Buku	100,00										800,00		80,00			
		Sarana dan Prasarana Perpustakaan Sesuai Standar Perpustakaan Nasional	Paket	100,00						100,00				1,00		100,00			
		Buku Siap Layan	Buku	100,00															
	2.1.2 Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Prestasi Olahraga		Jumlah Pemuda Pelopor	Orang	100,00		100,00		88,89		72,73		57,14		8		57,14		
			Persentase Cabang Olahraga yang Berprestasi/Mendapatkan Medali	Persen	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		2.1.2.1 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	Persen	100,00	100,00	100,00	98,56	100,00	98,49	100,00	82,11	100,00	24,66	85,00	1.213.103.500,00	100,00	76,99	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		2.1.2.2 Program Peningkatan Kapasitas dan Peran Pemuda	Persentase Wirausaha Muda	Persen							100,00	-			50,00	-	62,50	-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.1.2.3 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga		Cakupan Pembinaan Olahraga	Persen	100,00	100,00	100,00	96,77	100,00	97,90	100,00	98,91	100,00	26,31	100,00	3.681.001.485,00	100,00	88,30	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
		Peningkatan Pelatih yang Bersertifikasi	Persen	-				100,00		150,00		100,00		24,00		100,00			
		Cakupan Pembinaan Atlet Muda/Pelajar	Persen	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		75,00		100,00			
2.1.2.4 Program Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga		Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga dalam 1 Tahun	Kali	100,00	100,00	100,00	-	-	99,49	100,00	95,07	100,00	84,34	10,00	313.496.935,00	100,00	76,34	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
		Atlet Berprestasi	Persen	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		90,00		100,00			
3 MENINGKATKAN DAYA DUKUNG INFRASTRUKTUR DALAM SKALA MANTAP UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PELAYANAN S																			
3.1 Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Kota Bandar Lampung dalam Kondisi Mantap yang Berwawasan Lingkungan		Persentase Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	Persen											93,97		104,95			
		Persentase Drainase dalam Kondisi Baik	Persen											90,58		100,64			
		Persentase Luas Kawasan Kumuh di Kota Bandar Lampung	Persen											1,50		185,33			
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka											60,32		100,53			
3.1.1 Meningkatkan Mobilitas dan Aksesibilitas Masyarakat Antarwilayah serta Keselamatan Transportasi		Persentase Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	Persen	100,00		98,60		97,34		92,63		104,95		93,97		104,95			
		Persentase Drainase dalam Kondisi Baik	Persen	100,00		101,55		100,93		98,86		100,64		90,58		100,64			
		Rasio Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum terhadap Panjang Jalan Kota	titik/ km	100,00		82,35		89,47		102,09		100,20		20,24		100,20			

Misi/Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Periode Perencanaan		Target RPJMD									
					2020		2016 (Realisasi)		2017		2018		2019		2020	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	
3.1.1.1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase Panjang Jaringan Jalan Kota dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	Persen	88,09	100,00	883.556.294.800,50	90,09	79.678.812.730,00	91,76	376.024.217.350,00	93,42	164.797.766.728,50	100,00	115.415.322.500,00	100,00	147.640.175.492,00
		Persentase Jalan Kota dalam Kondisi Baik (>40 km/jam)	Persen	88,09	100,00		90,09		91,76		93,42		100,00		100,00	
		Rasio Panjang Jalan Kota Dibandingkan dengan Luas Wilayah	km/km²	4,57	4,68		4,68		4,68		4,68		4,68		4,68	
		Rasio Panjang Jalan Kota Dibandingkan dengan Jumlah Penduduk	m/jiwa	0,92	0,86		0,92		0,91		0,89		0,88		0,86	
	3.1.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Persen	77,42	87,10	2.500.000.000,00	77,42	-			87,10	2.500.000.000,00				
	3.1.1.3	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persen	88,09	100,00	56.507.720.332,00	90,09	9.028.009.700,00	91,76	1.613.000.000,00	93,42	1.171.171.000,00	93,42	18.251.342.000,00	100,00	26.444.197.632,00
	3.1.1.4	Program Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Persen	88,09	100,00	39.699.462.000,00	100,00	-	100,00	18.699.462.000,00	100,00	21.000.000.000,00				
	3.1.1.5	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Air Tidak Tersumbat	Persen	80,00		1.510.259.600,00	82,00	1.510.259.600,00								
		Persentase Penanganan Luas Genangan	Persen	-			14,63									
		Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/ Saluran Pembuangan Air (minimal 1,5 M)	Persen	50,00			52,00									
	3.1.1.6	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Air Tidak Tersumbat	Persen		90,00	75.371.281.765,00			84,00	9.992.814.900,00	86,00	17.154.736.800,00	88,00	15.334.055.690,00	90,00	32.889.674.375,00
		Persentase Penanganan Luas Genangan	Persen		79,92				22,33		55,12		73,81		79,92	
		Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/ Saluran Pembuangan Air (minimal 1,5 M)	Persen		70,00				55,00		60,00		65,00		70,00	
	3.1.1.7	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Persen		81,00	996.562.100,00					25,00	300.000.000,00	75,00	500.000.000,00	81,00	196.562.100,00
	3.1.1.8	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Talud/ Bronjong	Persen	60,00	75,00	41.114.002.945,00	63,00	7.829.963.200,00	66,00	9.384.510.000,00	69,00	8.217.740.000,00	72,00	8.242.124.000,00	75,00	7.439.665.745,00
	3.1.1.9	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Keciaptakarya	Persen	50,00	100,00	1.031.164.686.520,40	55,00	26.238.204.750,00	60,00	129.736.876.300,00	80,00	230.735.386.164,40	85,00	315.397.776.595,00	95,00	329.056.442.711,00
	3.1.1.10	Panjang Penanganan Sungai yang Dinormalisasi	km	4,44	19,90	30.791.527.715,00	1,02	1.628.243.100,00	0,37	3.025.102.200,00	2,22	7.296.176.020,00	5,18	7.004.411.700,00	6,66	11.837.594.695,00
		Panjang Penanganan Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor	km	4,44	19,90		1,02		0,37		2,22		5,18		6,66	
3.1.1.11	Program Perencanaan Dan Pengendalian	Tersedianya Jasa Konsultansi Kegiatan Kontruksi	Jumlah	343,00	141,00	14.027.753.000,00	105,00	29.753.000,00	36,00	13.998.000.000,00						
3.1.1.12	Program Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan	Rasio Panjang Jalan Lingkungan dengan Jumlah Penduduk	m/jiwa	0,46	0,62	233.092.990.741,50					0,53	50.183.407.479,50	0,57	54.008.769.921,00	0,62	128.900.813.341,00
		Rasio Panjang Jalan Lingkungan dengan Luas Wilayah	km/km2	2,30	3,37						2,78		3,06		3,37	
		Persentase Panjang Jalan Lingkungan dengan Kondisi Mantap	Persen	50,00	80,00						65,00		70,00		75,00	
3.1.1.13	Program Penataan dan Pengembangan Keindahan Kota	Rasio Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum terhadap Panjang Jalan Kota	Angka	Lampu/km		211.329.127.367,00			17,00	159.928.112.187,00	19,00	51.401.015.180,00				
3.1.1.14	Program Pengelolaan dan Peningkatan Pelayanan PJU	Rasio Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum terhadap Panjang Jalan Kota	Angka		20,20	21.676.574.820,00							19,10	9.307.036.600,00	20,20	12.369.538.220,00
3.1.1.15	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	Persen	43,87	61,80	28.549.387.965,10					44,98	10.223.986.800,10	52,54	8.001.093.755,00	61,80	10.324.307.410,00
		Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan	Persen	43,87	61,80						44,98		52,54		61,80	

Misi/Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Target RPJMD									
				2016		2017		2018		2019		2020	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	12		13		14		15		16	
	3.1.1.1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase Panjang Jaringan Jalan Kota dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	Persen	90,09	79.678.812.730,00	91,76	253.336.496.277,00	89,00	141.378.778.448,00	81,64	68.432.807.142,59	84,81	40.801.899.910,00
		Persentase Jalan Kota dalam Kondisi Baik (>40 km/jam)	Persen	90,09		91,76		89,00		81,64		76,00	
		Rasio Panjang Jalan Kota Dibandingkan dengan Luas Wilayah	km/km ²	4,68		4,68		2,00		6,86		2,00	
		Rasio Panjang Jalan Kota Dibandingkan dengan Jumlah Penduduk	m/jiwa	0,92		0,91		0,86		1,29		0,37	
	3.1.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Alat Berat sebagai Penunjang Kegiatan Konstruksi	Persen	77,42	-			85,00	2.470.429.710,00				
	3.1.1.3 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Cakupan Jalan Kota Rusak yang Direhabilitasi	Persen	90,09	9.028.009.700,00	91,76	1.039.639.500,00	90,00	1.109.305.000,00	87,06	15.889.309.157,00	100,00	11.105.305.640,00
	3.1.1.4 Program Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Persentase Pemeliharaan Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik	Persen	100,00	-	100,00	10.086.623.900,00	100,00	14.122.869.000,00				
	3.1.1.5 Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Air Tidak Tersumbat	Persen	82,00	1.510.259.600,00								
		Persentase Penanganan Luas Genangan	Persen	14,63									
		Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/ Saluran Pembuangan Air (minimal 1,5 M)	Persen	52,00									
	3.1.1.6 Program Prasarana Sumber Daya Air	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Air Tidak Tersumbat	Persen			84,00	2.261.557.500,00	97,00	12.800.348.100,00	87,00	10.293.474.825,00	46,88	6.040.061.770,00
		Persentase Penanganan Luas Genangan	Persen			22,33		50,32		67,39		79,92	
		Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/ Saluran Pembuangan Air (minimal 1,5 M)	Persen			55,00		56,00		12,62		13,00	
	3.1.1.7 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Persentase Luas Embung yang Direhabilitasi	Persen					100,00	282.103.900,00	99,47	497.336.000,00	100,00	192.176.000,00
	3.1.1.8 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Talud/ Bronjong	Cakupan Talud/ Bronjong yang Direhabilitasi	Persen	63,00	7.829.963.200,00	66,00	6.793.208.225,00	50,00	7.524.683.700,00	89,02	7.337.162.700,00	100,00	5.415.096.405,00
	3.1.1.9 Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Keciaptakarya	Persentase OPD yang Memiliki Kantor Sendiri	Persen	55,00	26.238.204.750,00	60,00	59.154.247.890,00	98,00	166.002.242.335,00	98,50	149.811.857.395,00	80,45	140.944.317.575,00
	3.1.1.10 Program Pemeliharaan Sumber Daya Air	Panjang Penanganan Sungai yang Dinormalisasi	km	1,02	1.628.243.100,00	0,37	1.773.098.109,00	2,50	6.486.144.320,00	6,10	3.857.193.605,00	6,66	3.620.753.975,00
		Panjang Penanganan Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor	km	1,02		0,37		2,50					
	3.1.1.11 Program Perencanaan Dan Pengendalian	Tersedianya Jasa Konsultansi Kegiatan Kontruksi	Jumlah	105,00	29.753.000,00	36,00	3.146.391.200,00						
	3.1.1.12 Program Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan	Rasio Panjang Jalan Lingkungan dengan Jumlah Penduduk	m/jiwa					0,82	45.087.633.009,00	0,91	39.702.572.269,00	1,09	35.186.648.605,00
		Rasio Panjang Jalan Lingkungan dengan Luas Wilayah	km/km ²					0,49		4,87		5,89	
		Persentase Panjang Jalan Lingkungan dengan Kondisi Mantap	Persen					60,00		86,00		96,00	
	3.1.1.13 Program Penataan dan Pengembangan Keindahan Kota	Rasio Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum terhadap Panjang Jalan Kota	Angka			17,00	151.290.862.237,00	17,00	40.602.668.322,00				
	3.1.1.14 Program Pengelolaan dan Peningkatan Pelayanan PJU	Rasio Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum terhadap Panjang Jalan Kota	Angka							19,50	7.446.233.700,00	20,20	4.651.159.500,00
	3.1.1.15 Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	Persen					55,00	8.774.918.218,00	44,17	5.057.786.356,00	61,80	3.540.322.305,00
		Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan	Persen					55,00		44,17		61,80	

Misi/Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD (%)										Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Perangkat Daerah Pelaksana	
				2016		2017		2018		2019		2020		K	Rp	K	Rp		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	2	3	4	17=12/7*100	18=13/8*100	19=14/9*100	20=15/10*100	21=16/11*100	22=17/12*100	23=18/13*100	24=19/14*100	25=20/15*100	26=21/16*100	27=22/17*100	28=23/18*100	29			
3.1.1.1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase Panjang Jaringan Jalan Kota dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	Persen	100,00	100,00	100,00	67,37	95,27	85,79	81,64	59,29	84,81	27,64	87,98	583.628.794.507,59	87,98	66,05	Dinas Pekerjaan Umum	
		Persentase Jalan Kota dalam Kondisi Baik (>40 km/jam)	Persen	100,00		100,00		95,27		81,64		76,00		76,00		76,00			
		Rasio Panjang Jalan Kota Dibandingkan dengan Luas Wilayah	km/km²	100,00		100,00		42,74		146,58		42,74		2,00		42,74			
		Rasio Panjang Jalan Kota Dibandingkan dengan Jumlah Penduduk	m/jiwa	100,00		100,00		96,63		68,22		43,02		0,37		43,02			
	3.1.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Alat Berat sebagai Penunjang Kegiatan Konstruksi	Persen	100,00	-		97,59	98,82					85,00	2.470.429.710,00	97,59	98,82	Dinas Pekerjaan Umum	
	3.1.1.3	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Cakupan Jalan Kota Rusak yang Direhabilitasi	Persen	100,00	100,00	100,00	64,45	96,34	94,72	93,19	87,06	100,00	42,00	100,00	38.171.568.997,00	100,00	67,55	Dinas Pekerjaan Umum
	3.1.1.4	Program Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Persentase Pemeliharaan Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik	Persen	100,00	-	100,00	53,94	100,00	67,25				100,00	24.209.492.900,00	100,00	60,98	Dinas Pekerjaan Umum	
	3.1.1.5	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Air Tidak Tersumbat	Persen	100,00	100,00								82,00	1.510.259.600,00	# DIV/0!	100,00	Dinas Pekerjaan Umum	
			Persentase Penanganan Luas Genangan	Persen	100,00									14,63		# DIV/0!			
			Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/ Saluran Pembuangan Air (minimal 1,5 M)	Persen	100,00									52,00		# DIV/0!			
	3.1.1.6	Program Prasarana Sumber Daya Air	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Air Tidak Tersumbat	Persen			100,00	22,63	112,79	74,62	98,86	67,13	52,09	18,36	46,88	31.395.442.195,00	52,09	41,65	Dinas Pekerjaan Umum
			Persentase Penanganan Luas Genangan	Persen			100,00		91,29		91,30		100,00		79,92		100,00		
			Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/ Saluran Pembuangan Air (minimal 1,5 M)	Persen			100,00		93,33		19,42		18,57		13,00		18,57		
	3.1.1.7	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Persentase Luas Embung yang Direhabilitasi	Persen				400,00	94,03	132,63	99,47	123,46	97,77	100,00	971.615.900,00	123,46	97,50	Dinas Pekerjaan Umum	
	3.1.1.8	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Talud/ Bronjong	Cakupan Talud/ Bronjong yang Direhabilitasi	Persen	100,00	100,00	100,00	72,39	72,46	91,57	123,64	89,02	133,33	72,79	100,00	34.900.114.230,00	133,33	84,89	Dinas Pekerjaan Umum
3.1.1.9	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Keciaptakarya	Persentase OPD yang Memiliki Kantor Sendiri	Persen	100,00	100,00	100,00	45,60	122,50	71,94	115,88	47,50	84,68	42,83	80,45	542.150.869.945,00	80,45	52,58	Dinas Pekerjaan Umum	
3.1.1.10	Program Pemeliharaan Sumber Daya Air	Panjang Penanganan Sungai yang Dinormalisasi	km	100,00	100,00	100,00	58,61	112,61	88,90	117,76	55,07	100,00	30,59	6,66	17.365.433.109,00	33,47	56,40	Dinas Pekerjaan Umum	
		Panjang Penanganan Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor	km	100,00		100,00		112,61			-		-		-		-		
3.1.1.11	Program Perencanaan Dan Pengendalian	Tersedianya Jasa Konsultansi Kegiatan Kontruksi	Jumlah	100,00	100,00	100,00	22,48							141,00	3.176.144.200,00	100,00	22,64	Dinas Pekerjaan Umum	
3.1.1.12	Program Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan	Rasio Panjang Jalan Lingkungan dengan Jumlah Penduduk	m/jiwa					154,72	89,85	62,64	73,51	56,88	27,30	1,09	119.976.853.883,00	56,88	51,47	Dinas Pekerjaan Umum	
		Rasio Panjang Jalan Lingkungan dengan Luas Wilayah	km/km2					17,63		62,83		57,22		5,89		57,22			
		Persentase Panjang Jalan Lingkungan dengan Kondisi Mantap	Persen					92,31		122,86		128,00		96,00		120,00			
3.1.1.13	Program Penataan dan Pengembangan Keindahan Kota	Rasio Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum terhadap Panjang Jalan Kota	Angka			100,00	94,60	89,47	78,99					191.893.530.559,00		90,80	Dinas Pekerjaan Umum		
3.1.1.14	Program Pengelolaan dan Peningkatan Pelayanan PJU	Rasio Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum terhadap Panjang Jalan Kota	Angka							102,09	80,01	100,00	37,60	20,20	12.097.393.200,00	100,00	55,81	Dinas Pekerjaan Umum	
3.1.1.15	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	Persen					122,28	85,83	84,07	63,21	100,00	34,29	61,80	17.373.026.879,00	100,00	60,85	Dinas Pekerjaan Umum	
		Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan	Persen					122,28		84,07		100,00		61,80		100,00			

Misi/Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Periode Perencanaan		Target RPJMD									
					2020		2016 (Realisasi)		2017		2018		2019		2020	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	
		Jumlah Kasus/Kejadian Kecelakaan per Tahun	Kejadian	381	158		415		297		241		195		158	
3.1.1.16 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tingkat Pelayanan pada Jalan Arteri	Parameter	C	B	470.664.100,00	C	28.521.000,00	C	34.458.500,00	C	114.364.000,00	C	243.320.600,00	B	50.000.000,00	
	Tingkat Pelayanan pada Jalan Kolektor	Parameter	C	B		C		C		C		C		B		
	Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum	Orang	204.272,00	69.640		90.192	78.497	75.572,00	73.305	69.640						
	Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/ Terminal per Tahun	Orang	496,09	274.264		342,16	317.862	301.969	292.910	274.264						
3.1.1.17 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ	Persentase Prasarana dan Fasilitas LLAJ dalam Kondisi Baik	Persen	80,00	90,00	1.900.200.112,00	80,00	105.460.000,00	85,00	379.331.312,00	85,00	653.457.900,00	85,00	533.810.900,00	90,00	228.140.000,00	
3.1.1.18 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Meningkatnya Load Faktor Angkutan Umum (berdasarkan hasil survey)	Persen	30,37	52,74	236.958.500,00	35,32	-	40,34	24.608.500,00	44,77	75.888.500,00	47,10	88.486.500,00	52,74	47.975.000,00	
	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	Orang	204.272,00	69.640,00		90.192	79.497	75.572	73.305	69.640						
	Rasio Jln Trayek	Persen	0,040	0,011		0,040	0,007	0,014	0,014	0,011						
3.1.1.19 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Rasio Volume Lalu Lintas pada Jalan Arteri	Persen	0,45	0,20	21.154.810.500,00	0,45	1.669.478.050,00	0,45	2.531.112.000,00	0,40	4.721.438.550,00	0,30	3.937.330.900,00	0,20	8.295.451.000,00	
	Rasio Volume Lalu Lintas pada Jalan Kolektor	Persen	0,50	0,30		0,50		0,50		0,45		0,40		0,30		
	Persentase Tersedianya Fasilitas Perlengkapan Jalan (rambu, marka, guardrail) pada Jalan Kota dalam Kondisi Baik	Persen	39,08	67,11		41,39	45,69	56,77	61,94	67,11						
	Rasio Titik Kemacetan yang Terkendali	Persen	42,85	75,00		66,66	53,84	83,33	58,33	75,00						
3.1.1.20 Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	Persen	100,00	100,00	1.320.924.000,00	100,00	614.446.000,00	100,00	140.447.000,00	100,00	210.915.000,00	100,00	177.558.000,00	100,00	177.558.000,00	
	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	Uji	2,51	973,00		1.260	1.170,00	1.030,00	980,00	973,00						
	Tersedianya Unit Pengujian Kendaraan Bermotor bagi Kota yang Memiliki Populasi Kendaraan Wajib Uji Minimal 4000 (empat ribu) Kendaraan Wajib Uji	Unit	1,00	1,00												
	Cakupan Layanan TIK (Telekomunikasi, Informasi dan Komunikasi)	Persen	60,00	100,00		70,00		80,00		85,00		90,00		100,00		
3.1.1.22 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	Persen	60,00	100,00	14.280.888.050,00	70,00	295.564.162,00	80,00	899.573.088,00	85,00	764.800.000,00	90,00	2.528.250.000,00	100,00	9.792.700.800,00	
	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi	Persen	70,00	100,00		70,00		80,00		85,00		90,00		100,00		
3.1.1.23 Program Penelitian dan Pengembangan Iptek	Sistem Informasi Penda yang Terimplementasi	Persen	80,00	100,00	155.990.000,00	80,00	99.990.000,00	100,00	56.000.000,00							
3.1.1.24 Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Persentase Tayang Publikasi Kegiatan Penda di Media Elektronik	Persen	80,00	100,00	7.976.268.012,00	80,00	1.309.000.000,00	90,00	1.466.000.000,00	90,00	1.330.000.000,00	95,00	1.460.000.000,00	100,00	2.411.268.012,00	
3.1.1.25 Program Peningkatan Komunikasi dan Informasi Serta Penggunaan Media Massa	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Call Center dan Website	Persen	100,00		142.464.140,00	100,00	68.144.140,00	100,00	74.320.000,00							
	Persentase Pembinaan dan Pengawasan POSTELSUS dan Pengajaran	Persen	100,00			100,00		100,00								
	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah	Persen	50,00			60,00		75,00								
3.1.1.26 Program Pengembangan Sistem Manajemen Data	Persentase Ketersediaan Data/Statistik Dibandingkan Jumlah Data yang Seharusnya Tersedia	Persen	60,00		101.000.000,00	60,00	-	60,00	101.000.000,00							
3.1.1.27 Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	Persentase Kepatuhan Wajib Retribusi Membayar Keuajiban	Persen	10,00	70,00	550.000.000,00	10,00				60,00	200.000.000,00	70,00	350.000.000,00			

Misi/Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Target RPJMD									
				2016		2017		2018		2019		2020	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	12		13		14		15		16	
		Jumlah Kasus/Kejadian Kecelakaan per Tahun	Kejadian	415		297		241		297		220	
3.1.1.16 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tingkat Pelayanan pada Jalan Arteri	Parameter	C	28.521.000,00		C	32.480.000,00	C	109.453.000,00	C	198.030.600,00	C	49.025.900,00
	Tingkat Pelayanan pada Jalan Kolektor	Parameter	C			C		C		C		C	
	Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum	Orang	90.192			78.497		71.498		1.153.400		1.003.344	
	Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/ Terminal per Tahun	Orang	342,16			317.862		297.900		1.668.224,00		217.290,00	
3.1.1.17 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ	Persentase Prasarana dan Fasilitas LLAJ dalam Kondisi Baik	Persen	80,00	105.460.000,00		85,00	338.651.100,00	96,51	365.025.600,00	98,66	440.028.000,00	90,00	151.240.000,00
3.1.1.18 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Meningkatnya Load Faktor Angkutan Umum (berdasarkan hasil survey)	Persen	35,32	-		40,34	-	40,34	14.598.500,00	38,34	-	45,37	-
	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	Orang	90.192			79.497		378.310		1.153.400		1.003.344	
	Rasio Jln Trayek	Persen	0,040			0,007		0,189		0,000		0,004	
3.1.1.19 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Rasio Volume Lalu Lintas pada Jalan Arteri	Persen	0,45	1.669.478.050,00		0,45	2.452.342.950,00	0,59	4.061.652.650,00	0,49	2.919.483.040,00	0,49	6.780.477.700,00
	Rasio Volume Lalu Lintas pada Jalan Kolektor	Persen	0,50			0,50		0,52		0,61		0,61	
	Persentase Tersedianya Fasilitas Perlengkapan Jalan (rambu, marka, guardrail) pada Jalan Kota dalam Kondisi Baik	Persen	41,39			45,69		80,55		98,32		67,11	
	Rasio Titik Kemacetan yang Terkendali	Persen	66,66			53,84		23,00		25,00		70,00	
3.1.1.20 Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	Persen	100,00	614.446.000,00		100,00	136.007.000,00	100,00	177.595.000,00	100,00	173.790.000,00	100,00	173.790.000,00
	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	Uji	1.260			1.170,00		1.030,00		790,00		13.048,00	
	Tersedianya Unit Pengujian Kendaraan Bermotor bagi Kota yang Memiliki Populasi Kendaraan Wajib Uji Minimal 4000 (empat ribu) Kendaraan Wajib Uji	Unit								1		-	
	Cakupan Layanan TIK (Telekomunikasi, Informasi dan Komunikasi)	Persen	70,00			80,00		80,00		85,00		90,00	
3.1.1.22 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	Persen	70,00	295.564.162,00		80,00	548.973.230,00	85,00	423.288.187,00	85,00	419.347.900,00	90,00	2.613.115.800,00
	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi	Persen	70,00			80,00		85,00		85,00		95,00	
3.1.1.23 Program Penelitian dan Pengembangan Iptek	Sistem Informasi Penda yang Terimplementasi	Persen	80,00	99.990.000,00		100,00	-						
3.1.1.24 Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Persentase Tayang Publikasi Kegiatan Penda di Media Elektronik	Persen	80,00	1.309.000.000,00		90,00	1.289.791.000,00	100,00	1.304.174.000,00	95,00	1.437.869.600,00	95,00	2.245.799.150,00
3.1.1.25 Program Peningkatan Komunikasi dan Informasi Serta Penggunaan Media Massa	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Call Center dan Website	Persen	100,00	68.144.140,00		100,00	60.955.375,00						
	Persentase Pembinaan dan Pengawasan POSTELSUS dan Pengiaran	Persen	100,00			100,00							
	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah	Persen	60,00			75,00							
3.1.1.26 Program Pengembangan Sistem Manajemen Data	Persentase Ketersediaan Data/Statistik Dibandingkan Jumlah Data yang Seharusnya Tersedia	Persen	60,00	-		60,00	22.840.000,00						
3.1.1.27 Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	Persentase Kepatuhan Wajib Retribusi Membayar Keuajiban	Persen	10,00	-				60,00	150.663.046,00	70,00	302.250.274,00		

Misi/Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD (%)										Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Perangkat Daerah Pelaksana
				2016		2017		2018		2019		2020						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	17=12/7*100		18=13/8*100		19=14/9*100		20=15/10*100		21=16/11*100		22		23=22/6*100		29
		Jumlah Kasus/Kejadian Kecelakaan per Tahun	Kejadian	100,00		100,00		100,00		65,66		71,82		220,00		71,82		
3.1.1.16 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tingkat Pelayanan pada Jalan Arteri	Parameter	100,00	100,00	100,00	94,26	100,00	95,71	100,00	81,39	100,00	98,05	C	417.510.500,00	100,00	88,71	Dinas Perhubungan	
	Tingkat Pelayanan pada Jalan Kolektor	Parameter	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		C		100,00			
	Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum	Orang	100,00		100,00		94,61		1.573,43		1.440,76		1.003.344		1440,76			
	Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/ Terminal per Tahun	Orang	100,00		100,00		98,65		569,53		79,23		217.290,00		79,23			
3.1.1.17 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ	Persentase Prasarana dan Fasilitas LLAJ dalam Kondisi Baik	Persen	100,00	100,00	100,00	89,28	113,54	55,86	116,07	82,43	100,00	66,29	90,00	1.400.404.700,00	100,00	73,70	Dinas Perhubungan	
3.1.1.18 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Meningkatnya Load Faktor Angkutan Umum (berdasarkan hasil survey)	Persen	100,00	-	100,00	-	90,10	19,24	81,40	-	86,03	-	45,37	14.598.500,00	86,03	6,16	Dinas Perhubungan	
	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	Orang	100,00		100,00		500,60		1.573,43		1.440,76		1.003.344		1440,76			
	Rasio Jln Trayek	Persen	100,00		100,00		1.350,00		0,71		36,36		0,004		36,36			
3.1.1.19 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Rasio Volume Lalu Lintas pada Jalan Arteri	Persen	100,00	100,00	100,00	96,89	147,50	86,03	163,33	74,15	245,00	81,74	0,49	17.883.434.390,00	245,00	84,54	Dinas Perhubungan	
	Rasio Volume Lalu Lintas pada Jalan Kolektor	Persen	100,00		100,00		115,56		152,50		203,33		0,61		203,33			
	Persentase Tersedianya Fasilitas Perlengkapan Jalan (rambu, marka, guardrail) pada Jalan Kota dalam Kondisi Baik	Persen	100,00		100,00		141,89		158,73		100,00		67,11		100,00			
	Rasio Titik Kemacetan yang Terkendali	Persen	100,00		100,00		27,60		42,86		93,33		70,00		93,33			
3.1.1.20 Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	Persen	100,00	100,00	100,00	96,84	100,00	84,20	100,00	97,88	100,00	97,88	100,00	1.275.628.000,00	100,00	96,57	Dinas Perhubungan	
	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	Uji	100,00		100,00		100,00		80,61		1.341,01		13.048,00		1.341,01			
	Tersedianya Unit Pengujian Kendaraan Bermotor bagi Kota yang Memiliki Populasi Kendaraan Wajib Uji Minimal 4000 (empat ribu) Kendaraan Wajib Uji	Unit							100,00				1		100,00			
	Cakupan Layanan TIK (Telekomunikasi, Informasi dan Komunikasi)	Persen	100,00		100,00		94,12		94,44		90,00		90,00		90,00			
3.1.1.22 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	Persen	100,00	100,00	100,00	61,03	100,00	55,35	94,44	16,59	90,00	26,68	90,00	4.300.289.279,00	90,00	30,11	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi	Persen	100,00		100,00		100,00		94,44		95,00		95,00		95,00			
3.1.1.23 Program Penelitian dan Pengembangan Iptek	Sistem Informasi Pemd yang Terimplementasi	Persen	100,00	100,00	100,00	-							100,00	99.990.000,00	100,00	64,10	Dinas Komunikasi dan Informatika	
3.1.1.24 Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Persentase Tayang Publikasi Kegiatan Pemd di Media Elektronik	Persen	100,00	100,00	100,00	87,98	111,11	98,06	100,00	98,48	95,00	93,14	95,00	7.586.633.750,00	95,00	95,12	Dinas Komunikasi dan Informatika	
3.1.1.25 Program Peningkatan Komunikasi dan Informasi Serta Penggunaan Media Massa	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Call Center dan Website	Persen	100,00	100,00	100,00	82,02								129.099.515,00		90,62	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Persentase Pembinaan dan Pengawasan POSTELSUS dan Pengajaran	Persen	100,00		100,00													
	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah	Persen	100,00		100,00													
3.1.1.26 Program Pengembangan Sistem Manajemen Data	Persentase Ketersediaan Data/Statistik Dibandingkan Jumlah Data yang Seharusnya Tersedia	Persen	100,00	-	100,00	22,61								22.840.000,00		22,61	Dinas Komunikasi dan Informatika	
3.1.1.27 Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	Persentase Kepatuhan Wajib Retribusi Membayar Kewajiban	Persen	100,00	-			100,00	75,33	100,00	86,36			70,00	452.913.320,00	100,00	82,35	Dinas Komunikasi dan Informatika	

Misi/Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Periode Perencanaan		Target RPJMD									
					2020		2016 (Realisasi)		2017		2018		2019		2020	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	
3.1.2 Meningkatkan Kualitas Perumahan dan Pemukiman		Persentase Luas Kawasan Kumuh di Kota Bandar Lampung	Persen	-	2,78		18,84		15,18		10,15		6,09		2,78	
		Persentase Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Persen	-	72,25				9,24		16,78		44,49		72,25	
	3.1.2.1 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Infrastruktur	Persentase Rumah Tinggal yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak	Persen	37,53	50,88	19.994.099.213,00	33,26	230.040.131,00	36,49	2.375.340.000,00	40,63	2.445.064.358,00	44,64	6.452.654.000,00	50,88	8.491.000.724,00
		Persentase Areal Kawasan Kumuh	Persen	-	2,78		18,84		15,18		10,15		6,09		2,78	
	3.1.2.2 Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	Persen	43,87		6.193.719.250,00	41,41	1.496.899.200,00	43,21	4.696.820.050,00						
		Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan	Persen	43,87			41,41		43,21							
	3.1.2.3 Program Pengembangan Perumahan	Persentase Panjang Jaringan Jalan Lingkungan dengan Kondisi Mantap	Persen	55,00		10.322.757.100,00	55,00	10.322.757.100,00								
	3.1.2.4 Program Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan	Rasio Panjang Jalan Lingkungan dengan Jumlah Penduduk	Angka	0,46		36.682.820.950,00	0,45	-	0,49	36.682.820.950,00						
		Rasio Panjang Jalan Lingkungan dengan Luas Wilayah	Angka	2,30			2,30		2,53							
		Persentase Panjang Jalan Lingkungan dengan Kondisi Mantap	Persen	50,00					60,00							
	3.1.2.5 Program Perumahan	Cakupan Pengawasan Tim Ahli Bangunan Gedung	Persen	55,00		100.000.000,00	100,00	-	100,00	100.000.000,00						
	3.1.2.6 Program Peningkatan Fungsi Lembaga Bangunan Gedung	Cakupan Pengawasan Tim Ahli Bangunan Gedung	Persen	55,00		100.000.000,00					100,00	100.000.000,00				
	3.1.2.5 Program Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Cakupan Pelaksanaan BSFS	Persen			50.000.000,00	-	-	100,00	50.000.000,00						
	3.1.2.5 Program Peningkatan Kualitas Perumahan	Persentase RTLH yang Tertangani	Persen		72,25	5.099.354.000,00	-	-	9,24	100.000.000,00	16,78	2.666.000.000,00	44,49	247.144.000,00	72,25	2.086.210.000,00
		Cakupan Pelaksanaan BSFS	Persen		100,00						100,00		100,00		100,00	
3.1.3 Meningkatkan Tata Ruang Sesuai Pemanfaatannya		Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Peruntukannya	Persen		70,00		50,00		50,00		64,15		68,00		70,00	
	3.1.3.1 Program Perencanaan Tata Ruang	Luasan RTH Publik Sebesar 20 Persen dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan	Persen	11,08	14,00	1.344.403.550,00	11,08	5.412.000,00	11,08	187.003.750,00	12,00	680.000.000,00	13,00	360.000.000,00	14,00	111.987.800,00
		Persentase Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kota Beserta Rencana Rincinya melalui Peta Analog dan Peta Digital Terbaru (mutakhir)	Persen		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
		Persentase Pemenuhan Dokumen Tata Ruang Wilayah	Persen				80,00									
	3.1.3.2 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Bangunan ber-IMB	Persen	18,63		234.874.000,00	37,31	57.874.000,00	49,53	177.000.000,00						
		Persentase Pelanggaran Perda Penataan Ruang yang Ditangani	Persen				50,00		50,00							
		Persentase Pemenuhan Fasilitas dan Koordinasi Tim Penataan Ruang Wilayah	Persen				80,00									
	3.1.3.9 Program Pengendalian Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Pelanggaran Perda Penataan Ruang yang Ditangani	Persen	55,00		200.000.000,00					64,15	200.000.000,00				
	3.1.3.3 Program Pengendalian Tata Ruang	Persentase Bangunan ber-IMB	Persen		87,38	926.642.500,00					62,15	400.000.000,00	74,77	335.000.000,00	87,38	191.642.500,00
		Persentase Pelanggaran Perda Penataan Ruang yang Ditangani	Persen		70,00								68,00		70,00	
		Cakupan Pengawasan Tim Ahli Bangunan Gedung	Persen		100,00								100,00		100,00	
	3.1.3.4 Program Pemanfaatan Ruang	Cakupan Peningkatan Kapasitas Masyarakat tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Bangunan	Persen		100,00	193.499.600,00	-	3.774.600,00					100,00	100.000.000,00	100,00	89.725.000,00
	3.1.3.5 Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase Sertifikat yang Diterbitkan dan Diserahkan kepada Masyarakat Dibandingkan Jumlah Bidang Tanah yang Dibantu Pengurusan Sertifikatnya	Persen		100,00	75.554.953.239,00	100,00	30.826.678.250,00	100,00	19.560.877.718,00	100,00	5.000.000.000,00	100,00	19.869.035.000,00	100,00	298.362.271,00
	3.1.3.6 Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Persentase Konflik Pertanahan yang Termediasi Dibandingkan Konflik Pertanahan yang Terjadi	Persen		100,00	40.980.000,00			100,00	40.980.000,00						

Misi/Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Target RPJMD									
				2016		2017		2018		2019		2020	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	12		13		14		15		16	
3.1.2 Meningkatkan Kualitas Perumahan dan Pemukiman		Persentase Luas Kawasan Kumuh di Kota Bandar Lampung	Persen	12,06		8,50		5,41		2,82		1,50	
		Persentase Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Persen			9,19		12,24		19,06		28,81	
	3.1.2.1 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Infrastruktur	Persentase Rumah Tinggal yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak	Persen	33,26	230.040.131,00	36,49	404.661.743,00	40,00	1.509.374.179,00	35,96	3.727.005.526,00	50,88	2.116.493.544,00
		Persentase Areal Kawasan Kumuh	Persen	18,84		15,18		9,11		5,34		2,78	
	3.1.2.2 Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	Persen	41,41	1.496.899.200,00	43,21	3.464.417.300,00						
		Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan	Persen	41,41		43,21							
	3.1.2.3 Program Pengembangan Perumahan	Persentase Panjang Jaringan Jalan Lingkungan dengan Kondisi Mantap	Persen	55,00	10.322.757.100,00								
	3.1.2.4 Program Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan	Rasio Panjang Jalan Lingkungan dengan Jumlah Penduduk	Angka	0,45	-	0,49	14.236.167.015,00						
		Rasio Panjang Jalan Lingkungan dengan Luas Wilayah	Angka	2,30		2,53							
		Persentase Panjang Jalan Lingkungan dengan Kondisi Mantap	Persen			60,00							
	3.1.2.5 Program Perumahan	Cakupan Pengawasan Tim Ahli Bangunan Gedung	Persen	100,00	-	-	7.200.000,00						
	3.1.2.6 Program Peningkatan Fungsi Lembaga Bangunan Gedung	Cakupan Pengawasan Tim Ahli Bangunan Gedung	Persen					75,00	82.607.000,00				
	3.1.2.5 Program Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Cakupan Pelaksanaan BSFS	Persen	-	-	-	7.278.000,00						
	3.1.2.5 Program Peningkatan Kualitas Perumahan	Persentase RTLH yang Tertangani	Persen	-	-	-	-	16,69	2.592.768.545,00	18,23	215.627.500,00	72,25	1.745.450.000,00
		Cakupan Pelaksanaan BSFS	Persen					16,69		13,45		100,00	
3.1.3 Meningkatkan Tata Ruang Sesuai Pemanfaatannya		Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Peruntukannya	Persen	51,10		51,66		52,01		52,64		53,24	
	3.1.3.1 Program Perencanaan Tata Ruang	Luasan RTH Publik Sebesar 20 Persen dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan	Persen	11,08	5.412.000,00	11,08	34.167.744,00	8,58	439.300.550,00	11,08	247.548.058,00	20,00	110.387.800,00
		Persentase Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kota Beserta Rencana Rincinya melalui Peta Analog dan Peta Digital Terbaru (mutakhir)	Persen	100,00		100,00		-		96,31		100,00	
		Persentase Pemenuhan Dokumen Tata Ruang Wilayah	Persen	80,00									
	3.1.3.2 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Bangunan ber-IMB	Persen	37,31	57.874.000,00	49,53	102.447.500,00						
		Persentase Pelanggaran Perda Penataan Ruang yang Ditangani	Persen	50,00		50,00							
		Persentase Pemenuhan Fasilitas dan Koordinasi Tim Penataan Ruang Wilayah	Persen	80,00									
	3.1.3.9 Program Pengendalian Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Pelanggaran Perda Penataan Ruang yang Ditangani	Persen					57,52	164.379.000,00				
	3.1.3.3 Program Pengendalian Tata Ruang	Persentase Bangunan ber-IMB	Persen					-	84.784.202,00	80,33	165.759.528,00	93,45	87.438.970,00
		Persentase Pelanggaran Perda Penataan Ruang yang Ditangani	Persen							79,23		100,00	
		Cakupan Pengawasan Tim Ahli Bangunan Gedung	Persen							99,70		100,00	
	3.1.3.4 Program Pemanfaatan Ruang	Cakupan Peningkatan Kapasitas Masyarakat tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Bangunan	Persen	-	3.774.600,00					100,00	86.200.000,00	100,00	40.150.000,00
	3.1.3.5 Program Penataan, Pengawasan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase Sertifikat yang Diterbitkan dan Diserahkan kepada Masyarakat Dibandingkan Jumlah Bidang Tanah yang Dibantu Pengurusan Sertifikatnya	Persen	100,00	30.826.678.250,00	100,00	9.837.800.000,00	-	-	100,00	17.771.678.300,00	-	-
	3.1.3.6 Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Persentase Konflik Pertanahan yang Termediasi Dibandingkan Konflik Pertanahan yang Terjadi	Persen			60,00	21.258.000,00						

Misi/Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD (%)										Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Perangkat Daerah Pelaksana
				2016		2017		2018		2019		2020						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	17=12/7*100		18=13/8*100		19=14/9*100		20=15/10*100		21=16/11*100		22		23=22/6*100		29
3.1.2 Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Pemukiman		Persentase Luas Kawasan Kumuh di Kota Bandar Lampung	Persen	156,22		178,59		187,62		215,96		185,33		1,50		185,33		
		Persentase Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Persen			99,46		72,94		42,84		39,88		28,81		39,88		
	3.1.2.1 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Infrastruktur	Persentase Rumah Tinggal yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak	Persen	100,00	100,00	100,00	17,04	98,45	61,73	80,56	57,76	100,00	24,93	50,88	7.987.575.123,00	100,00	39,95	Dinas Pekerjaan Umum
		Persentase Areal Kawasan Kumuh	Persen	100,00		100,00		89,75		114,04		100,00		2,78		100,00		
	3.1.2.2 Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	Persen	100,00	100,00	100,00	73,76								4.961.316.500,00		80,10	Dinas Pekerjaan Umum
		Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan	Persen	100,00		100,00												
	3.1.2.3 Program Pengembangan Perumahan	Persentase Panjang Jaringan Jalan Lingkungan dengan Kondisi Mantap	Persen	100,00	100,00										10.322.757.100,00		100,00	Dinas Pekerjaan Umum
	3.1.2.4 Program Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan	Rasio Panjang Jalan Lingkungan dengan Jumlah Penduduk	Angka	100,00	-	100,00	38,81								14.236.167.015,00		38,81	Dinas Pekerjaan Umum
		Rasio Panjang Jalan Lingkungan dengan Luas Wilayah	Angka	100,00		100,00												
		Persentase Panjang Jalan Lingkungan dengan Kondisi Mantap	Persen			100,00												
	3.1.2.5 Program Perumahan	Cakupan Pengawasan Tim Ahli Bangunan Gedung	Persen	100,00	-	0,00	7,20								7.200.000,00		7,20	Dinas Perumahan dan Permukiman
	3.1.2.6 Program Peningkatan Fungsi Lembaga Bangunan Gedung	Cakupan Pengawasan Tim Ahli Bangunan Gedung	Persen					75,00	82,61						82.607.000,00		82,61	Dinas Perumahan dan Permukiman
	3.1.2.5 Program Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Cakupan Pelaksanaan BSFS	Persen	-	-	-	14,56								7.278.000,00		14,56	Dinas Perumahan dan Permukiman
	3.1.2.5 Program Peningkatan Kualitas Perumahan	Persentase RTLH yang Tertangani	Persen	-	-	-	-	99,46	97,25	40,98	87,25	100,00	83,67	72,25	4.553.846.045,00	100,00	89,30	Dinas Perumahan dan Permukiman
		Cakupan Pelaksanaan BSFS	Persen					16,69		13,45		100,00		100,00		100,00		
3.1.3 Meningkatnya Tata Ruang Sesuai Pemanfaatannya		Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Peruntukannya	Persen	102,20		103,32		81,08		77,41		76,06		53,24		76,06		
	3.1.3.1 Program Perencanaan Tata Ruang	Luasan RTH Publik Sebesar 20 Persen dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan	Persen	100,00	100,00	100,00	18,27	71,50	64,60	85,23	68,76	142,86	98,57	20,00	836.816.152,00	142,86	62,24	Dinas Tata Kota dan Bappeda (Tahun 2016), Dinas Perumahan dan Permukiman
		Persentase Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kota Beserta Rencana Rincinya melalui Peta Analog dan Peta Digital Terbaru (mutakhir)	Persen	100,00		100,00		-		96,31		100,00		100,00		100,00		
		Persentase Pemenuhan Dokumen Tata Ruang Wilayah	Persen	100,00														
		Persentase Bangunan ber-IMB	Persen	100,00	100,00	100,00	57,88								160.321.500,00		68,26	Dinas Pekerjaan Umum
	3.1.3.2 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Pelanggaran Perda Penataan Ruang yang Ditangani	Persen	100,00		100,00												
		Persentase Pemenuhan Fasilitas dan Koordinasi Tim Penataan Ruang Wilayah	Persen	100,00														
		Persentase Pelanggaran Perda Penataan Ruang yang Ditangani	Persen															
	3.1.3.9 Program Pengendalian Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Pelanggaran Perda Penataan Ruang yang Ditangani	Persen					89,66	82,19						164.379.000,00		82,19	Dinas Perumahan dan Permukiman
	3.1.3.3 Program Pengendalian Tata Ruang	Persentase Bangunan ber-IMB	Persen					-	21,20	107,44	49,48	106,95	45,63	93,45	337.982.700,00	106,95	36,47	Dinas Perumahan dan Permukiman
Persentase Pelanggaran Perda Penataan Ruang yang Ditangani		Persen							116,51		142,86		100,00		142,86			
Cakupan Pengawasan Tim Ahli Bangunan Gedung		Persen							99,70		100,00		100,00		100,00			
3.1.3.4 Program Pemanfaatan Ruang	Cakupan Peningkatan Kapasitas Masyarakat tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Bangunan	Persen	-	100,00					100,00	86,20	100,00	44,75	100,00	130.124.600,00	100,00	67,25	Dinas Perumahan dan Permukiman	
3.1.3.5 Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase Sertifikat yang Diterbitkan dan Diserahkan kepada Masyarakat Dibandingkan Jumlah Bidang Tanah yang Dibantu Pengurusan Sertifikatnya	Persen	100,00	100,00	100,00	50,29	-	-	100,00	89,44	-	-	100,00	58.436.156.550,00	100,00	77,34	Dinas Perumahan dan Permukiman; Dinas Pekerjaan Umum; Sekretariat Daerah (2017)	
3.1.3.6 Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Persentase Konflik Pertanahan yang Termediasi Dibandingkan Konflik Pertanahan yang Terjadi	Persen			60,00	51,87							60,00	21.258.000,00	60,00	51,87	Sekretariat Daerah	

Misi/Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Periode Perencanaan		Target RPJMD									
					2020		2016 (Realisasi)		2017		2018		2019		2020	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.1.3.7 Program Pengelolaan Tanah Aset Pemda	Persentase Aset Tanah Pemkot yang Bersertifikat Dibandingkan dengan Jumlah Aset Tanah Pemkot	Persen		130.151.570,00	42,30	130.151.570,00									
	3.1.3.8 Program Pengelolaan Tanah Aset Pemda dan Tertib Pertanahan	Persentase Aset Tanah Pemkot yang Bersertifikat Dibandingkan dengan Jumlah Aset Tanah Pemkot	Persen		85,94	3.420.812.121,00			43,75	156.000.600,00	57,81	1.040.000.000,00	71,88	1.125.000.000,00	85,94	1.099.811.521,00
		Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara	Persen		100,00				100,00		100,00		100,00		100,00	
		Persentase Penyelesaian Izin Lokasi	Persen		100,00				100,00		100,00		100,00		100,00	
3.1.4 Menurunnya Resiko Akibat Bencana		Jumlah Keluruhan Siaga Bencana	Jumlah		10		2		2		2		2		2	
	3.1.4.1 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Penurunan Tingkat Kerawanan Bencana	Status	Tinggi	Sedang	2.170.058.370,00	Tinggi	549.257.000,00			Sedang	282.667.000,00	Sedang	562.664.900,00	Sedang	775.469.470,00
		Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	Persen		100,00		100,00				100,00		100,00		100,00	
		Persentase Jangkauan Luas Wilayah Manajemen Kebakaran (Kecamatan)	Persen		80,00		40,00				60,00		70,00		80,00	
	3.1.4.2 Program Kedaruratan dan Logistik	Persentase Korban Bencana yang di Evakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap	Persen		100,00	16.375.309.050,00	100,00	543.989.650,00	100,00	889.248.450,00	100,00	7.716.907.700,00	100,00	6.937.097.500,00	100,00	288.065.750,00
		Tingkat Ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Penanggulangan Bencana dalam Skala Mantab pada Seluruh Kawasan-kawasan Rawan Bencana	Persen		76,00		60,00		64,00		68,00		72,00		76,00	
	3.1.4.3 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Persentase Kesiapsiagaan Tanggap Daerah Layanan Wilayah Bencana	Persen		100,00	52.537.831.257,00	100,00	10.801.030.550,00	100,00	11.444.285.000,00	100,00	14.426.165.801,00	100,00	945.435.237,00	100,00	14.920.914.669,00
	3.1.4.4 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Terlatihnya Tim Rescue dan Satgas Penanggulangan Bencana	Persen	100,00	100,00	191.960.000,00	100,00	191.960.000,00								
		Pelajar yang Siaga Menghadapi Bencana (Peserta)	Orang		80,00		80,00									
		Satgas yang Siap dalam Penanggulangan Bencana	Orang		100,00		100,00									
3.1.5 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Menunjang Kota Layak Anak		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	53,00	60,00		54,00		55,00		56,00		58,00		60,00	
	3.1.5.1 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	Angka	77,00	81,00	4.739.443.750,00	77,00	68.778.000,00	78,00	591.290.000,00	79,00	1.788.000.000,00	80,00	1.701.375.750,00	81,00	590.000.000,00
		Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	Angka	55,00	59,00		55,00		56,00		57,00		58,00		59,00	
		Persentase Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang Mentaati Persyaratan Administrasi dan Teknis Pencegahan Pencemaran Air	Persen	40,00	60,00		40,00		45,00		50,00		55,00		60,00	
		Persentase Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan Sumber Tidak Bergerak yang Memenuhi Persyaratan Administratif dan Teknis Pencegahan Pencemaran Udara	Persen	40,00	60,00		40,00		45,00		50,00		55,00		60,00	
		Persentase Luasan Lahan dan/atau Tanah untuk Produksi Biomassa yang Telah Ditetapkan dan Diinformasikan Status Kerusakannya	Persen	40,00	60,00		40,00		45,00		50,00		55,00		60,00	
		Persentase Ketersediaan Data LH	Persen	75,00	85,00		75,00		75,00		80,00		80,00		85,00	
		Persentase Jumlah Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	Persen	100,00			100,00		100,00							
		Persentase Jumlah Ketaatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUL LH dari Izin yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditangani	Persen		60,00						40,00		50,00		60,00	
		RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen		1						1					
		Terintegrasinya RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota (dokumen)	Jumlah		1								1			
	3.1.5.2 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Rasio Ketersediaan Kebutuhan SDA	Angka		>1	32.079.500,00	>1	32.079.500,00								
	3.1.5.3 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase Ketersediaan Data LH	Persen	75,00	75,00	1.125.000,00	75,00	1.125.000,00								

Misi/Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Target RPJMD									
				2016		2017		2018		2019		2020	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	12		13		14		15		16	
	3.1.3.7 Program Pengelolaan Tanah Aset Pemda	Persentase Aset Tanah Pemkot yang Bersertifikat Dibandingkan dengan Jumlah Aset Tanah Pemkot	Persen	42,30	130.151.570,00								
	3.1.3.8 Program Pengelolaan Tanah Aset Pemda dan Tertib Pertanahan	Persentase Aset Tanah Pemkot yang Bersertifikat Dibandingkan dengan Jumlah Aset Tanah Pemkot	Persen			43,75	50.108.080,00	55,00	82.574.140,00	75,00	122.783.625,00	75,00	584.001.852,00
		Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara	Persen			100,00		100,00		100,00		0,00	
		Persentase Penyelesaian Izin Lokasi	Persen			100,00		100,00		100,00		100,00	
3.1.4 Menurunnya Resiko Akibat Bencana		Jumlah Keluruhan Siaga Bencana	Jumlah	2		-		-		-		-	
	3.1.4.1 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Penurunan Tingkat Kerawanan Bencana	Status	Tinggi	549.257.000,00			Sedang	243.378.400,00	Sedang	271.930.500,00	Sedang	-
		Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	Persen	100,00				76,84		100,00		100,00	
		Persentase Jangkauan Luas Wilayah Manajemen Kebakaran (Kecamatan)	Persen	40,00				98,19		100,00		100,00	
	3.1.4.2 Program Kedaruratan dan Logistik	Persentase Korban Bencana yang di Evakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap	Persen	100,00	543.989.650,00	100,00	634.505.350,00	86,62	6.056.252.450,00	97,94	800.000,00	100,00	43.022.500,00
		Tingkat Ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Penanggulangan Bencana dalam Skala Mantab pada Seluruh Kawasan-kawasan Rawan Bencana	Persen	60,00		64,00		86,31		80,00		76,00	
	3.1.4.3 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Persentase Kesiapsiagaan Tanggap Daerah Layanan Wilayah Bencana	Persen	100,00	10.801.030.550,00	100,00	7.410.413.387,00	93,55	13.495.444.592,00	100,00	902.170.050,00	100,00	7.034.539.100,00
	3.1.4.4 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Terlatihnya Tim Rescue dan Satgas Penanggulangan Bencana	Persen	100,00	191.960.000,00								
		Pelajar yang Siaga Menghadapi Bencana (Peserta)	Orang	80,00									
		Satgas yang Siap dalam Penanggulangan Bencana	Orang	100,00									
3.1.5 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Menunjang Kota Layak Anak		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	54,00		55,00		55,00		55,00		59,10	
	3.1.5.1 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	Angka	77,00	68.778.000,00	78,00	258.950.700,00	77,00	917.557.700,00	80,31	855.267.850,00	81,00	10.208.155,00
		Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	Angka	55,00		56,00		50,00		51,00		54,00	
		Persentase Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang Mentaati Persyaratan Administrasi dan Teknis Pencegahan Pencemaran Air	Persen	40,00		45,00		45,00		70,00		60,00	
		Persentase Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan Sumber Tidak Bergerak yang Memenuhi Persyaratan Administratif dan Teknis Pencegahan Pencemaran Udara	Persen	40,00		45,00		46,00		50,00		60,00	
		Persentase Luasan Lahan dan/atau Tanah untuk Produksi Biomassa yang Telah Ditetapkan dan Diinformasikan Status Kerusakannya	Persen	40,00		45,00		45,00		48,00		-	
		Persentase Ketersediaan Data LH	Persen	75,00		75,00		80,00		80,00		85,00	
		Persentase Jumlah Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	Persen	100,00		100,00							
		Persentase Jumlah Ketaatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUV LH dari Izin yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditangani	Persen					40,00		50,00		100,00	
		RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen					-					
		Terintegrasinya RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota (dokumen)	Jumlah										
	3.1.5.2 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Rasio Ketersediaan Kebutuhan SDA	Angka	>1	32.079.500,00								
	3.1.5.3 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase Ketersediaan Data LH	Persen	75,00	1.125.000,00								

Misi/Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD (%)										Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Perangkat Daerah Pelaksana
				2016		2017		2018		2019		2020		K	Rp	K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	17=12/7*100	18=13/8*100	19=14/9*100	20=15/10*100	21=16/11*100	22	23=22/6*100	29							
	3.1.3.7 Program Pengelolaan Tanah Aset Pemda	Persentase Aset Tanah Pemkot yang Bersertifikat Dibandingkan dengan Jumlah Aset Tanah Pemkot	Persen	100,00	100,00									130.151.570,00		100,00	Sekretariat Daerah	
	3.1.3.8 Program Pengelolaan Tanah Aset Pemda dan Tertib Pertanahan	Persentase Aset Tanah Pemkot yang Bersertifikat Dibandingkan dengan Jumlah Aset Tanah Pemkot	Persen			100,00	32,12	95,14	7,94	104,34	10,91	87,27	53,10	75,00	839.467.697,00	87,27	24,54	Sekretariat Daerah : Dinas Permukiman dan Permukiman
		Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara	Persen			100,00		100,00		100,00		0,00		100,00		100,00		
		Persentase Penyelesaian Izin Lokasi	Persen			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
3.1.4 Menurunnya Resiko Akibat Bencana		Jumlah Kelurahan Siaga Bencana	Jumlah	100,00		-	-	-	-	-	-	2		20,00				
	3.1.4.1 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Penurunan Tingkat Kerawanan Bencana	Status	100,00	100,00			100,00	86,10	100,00	48,33	100,00	-	Sedang	1.064.565.900,00	100,00	49,06	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	Persen	100,00			76,84		100,00		100,00		100,00		100,00			
		Persentase Jangkauan Luas Wilayah Manajemen Kebakaran (Kecamatan)	Persen	100,00			163,65		142,86		125,00		100,00		125,00			
	3.1.4.2 Program Kedaruratan dan Logistik	Persentase Korban Bencana yang di Evakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap	Persen	100,00	100,00	100,00	71,35	86,62	78,48	97,94	0,01	100,00	14,93	100,00	7.278.569.950,00	100,00	44,45	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Tingkat Ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Penanggulangan Bencana dalam Skala Mantab pada Seluruh Kawasan-kawasan Rawan Bencana	Persen	100,00		100,00		126,93		111,11		100,00		76,00		100,00		
	3.1.4.3 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Persentase Kesiapsiagaan Tanggap Daerah Layanan Wilayah Bencana	Persen	100,00	100,00	100,00	64,75	93,55	93,55	100,00	95,42	100,00	47,15	100,00	39.643.597.679,00	100,00	75,46	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	3.1.4.4 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Terlatihnya Tim Rescue dan Satgas Penanggulangan Bencana	Persen	100,00	100,00									100,00	191.960.000,00	100,00	100,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Pelajar yang Siaga Menghadapi Bencana (Peserta)	Orang	100,00										80,00		100,00		
		Satgas yang Siap dalam Penanggulangan Bencana	Orang	100,00										100,00		100,00		
	3.1.5 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Menunjang Kota Layak Anak		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	100,00		100,00		98,21		94,83		98,50		59,10		98,50	
	3.1.5.1 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	Angka	100,00	100,00	100,00	43,79	97,47	51,32	100,39	50,27	100,00	1,73	81,00	2.110.762.405,00	100,00	44,54	Dinas Lingkungan Hidup
		Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	Angka	100,00		100,00		87,72		87,93		91,53		54,00		91,53		
		Persentase Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang Mentaati Persyaratan Administrasi dan Teknis Pencegahan Pencemaran Air	Persen	100,00		100,00		90,00		127,27		100,00		60,00		100,00		
		Persentase Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan Sumber Tidak Bergerak yang Memenuhi Persyaratan Administratif dan Teknis Pencegahan Pencemaran Udara	Persen	100,00		100,00		92,00		90,91		100,00		60,00		100,00		
		Persentase Luasan Lahan dan/atau Tanah untuk Produksi Biomassa yang Telah Ditetapkan dan Diinformasikan Status Kerusakannya	Persen	100,00		100,00		90,00		87,27		0,00		48,00		80,00		
		Persentase Ketersediaan Data LH	Persen	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		85,00		100,00		
		Persentase Jumlah Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	Persen	100,00		100,00												
		Persentase Jumlah Ketaatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUV LH dari Izin yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditangani	Persen					100,00		100,00		166,67		100,00		166,67		
	RPPLH Kabupaten/ Kota	Dokumen					-											
	Terintegrasinya RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kabupaten/ Kota (dokumen)	Jumlah							-				-		-			
3.1.5.2 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Rasio Ketersediaan Kebutuhan SDA	Angka	100,00	100,00									>1	32.079.500,00	100,00	100,00	Dinas Lingkungan Hidup	
3.1.5.3 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase Ketersediaan Data LH	Persen	100,00	100,00									75,00	1.125.000,00	100,00	100,00	Dinas Lingkungan Hidup	

Misi/Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Periode Perencanaan		Target RPJMD									
					2020		2016 (Realisasi)		2017		2018		2019		2020	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	
	3.1.5.4 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan dan Energi	Berkurangnya Kawasan Pertambangan Ilegal	Persen		80,00	68.090.200,00	80,00	68.090.200,00								
	3.1.5.5 Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	Persentase Jumlah Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	Persen	100,00	100,00	360.000.000,00					100,00	120.000.000,00	100,00	120.000.000,00	100,00	120.000.000,00
		Persentase Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kota yang Ditangani	Persen		100,00						100,00		100,00		100,00	
	3.1.5.6 Program Peningkatan Adaptasi Terhadap Dampak Perubahan Iklim	Penurunan Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca	Persen		5,00	2.171.388.000,00	1,00	611.388.000,00	1,00	250.000.000,00	1,00	470.000.000,00	1,00	220.000.000,00	1,00	620.000.000,00
		Persentase Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah	Persen		14,00		11,08		11,08		12,00		13,00		14,00	
	3.1.5.7 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	Persen	90,15		503.895.000,00	90,22	503.895.000,00								
	3.1.5.8 Program Pengelolaan Sampah	Persentase Jumlah Penduduk yang Dilayani Melalui Kegiatan Pengurangan Volume Sampah (3R)	Persen		60,00	46.556.364.690,00			50,00	8.568.697.500,00	50,00	16.522.062.500,00	55,00	17.283.563.210,00	60,00	4.182.041.480,00
		Timbulan Sampah yang Ditangani	Ton	800,00	950,00				800,00		850,00		900,00		950,00	
		Persentase Cakupan Area Pelayanan Persampahan	Persen	100,00	100,00				100,00		100,00		100,00		100,00	
		Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	Persen	90,15	95,00				91,00		93,00		95,00		95,00	
		Kualitas Pengelolaan TPA (koefisien operasi, kualitas lindi, penanganan gas)	Persen		60,00						50,00		55,00		60,00	
	3.1.5.9 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Peningkatan Kawasan Hijau Pertamanan	m²	49.197,26		1.125.622.500,00	54.663,62	1.125.622.500,00								
	3.1.5.12 Program Penataan dan Pengembangan Keindahan Kota	Peningkatan Kawasan Hijau Pertamanan Kota	m²		80.841,43	5.652.034.300,00					66.811,10	850.000.000,00	73.492,21	2.876.953.600,00	80.841,43	1.925.080.700,00
	3.1.5.13 Program Penataan dan Pengembangan Keindahan Kota	Taman Kota dalam Kondisi Baik	Jumlah		5,00	3.327.940.050,00	5,00	3.327.940.050,00								
		Rasio Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum terhadap Panjang Jalan Kota	Angka	14,00	14,00		14,00									
			Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Tingkat Capaian	-	Pratama					Pratama		Pratama		Pratama	
3.1.5.11 Program Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Terpenuhinya Hak-Hak Anak	Persen		85,00	1.828.234.750,00			70,00	362.822.250,00	75,00	224.500.000,00	80,00	675.000.000,00	85,00	565.912.500,00	
	Persentase Kecamatan Layak Anak	Persen		75,00						25,00		50,00		75,00		
4 MENGEKSPANSI DAN MEMPERKUAT EKONOMI DAERAH DENGAN BERLANDASKAN PADA EKONOMI KERAKYATAN																
4.1 Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi, Struktur Perekonomian yang Kokoh serta Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat		Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,33	6,89											
4.1.1 Meningkatkan Kontribusi Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata terhadap Struktur Perekonomian Daerah		Persentase Kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persen	21,25	21,16		21,12		21,13		21,14		21,15		21,16	
	4.1.1.1 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	Persen				21,12	-								
		Pertumbuhan IKM	Persen	5,57			6,09									
	4.1.1.2 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Pertumbuhan IKM	Persen		6,41	6.353.880.100,00			6,14	632.861.000,00	6,23	1.181.019.100,00	6,32	1.300.000.000,00	6,41	3.240.000.000,00
		Cakupan IKM yang Mendapatkan Pembinaan Dibandingkan dengan Seluruh IKM (incremental)	Persen		7,80				6,43		6,70		7,50		7,80	
		Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	Persen		6,50				5,40		5,75		6,20		6,50	

Misi/Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Target RPJMD										
				2016		2017		2018		2019		2020		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	12		13		14		15		16		
	3.1.5.4	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan dan Energi	Berkurangnya Kawasan Pertambangan Ilegal	Persen	80,00	68.090.200,00								
	3.1.5.5	Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	Persentase Jumlah Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	Persen					100,00	12.482.000,00	100,00	-	100,00	-
			Persentase Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kota yang Ditangani	Persen					100,00		100,00		100,00	
	3.1.5.6	Program Peningkatan Adaptasi Terhadap Dampak Perubahan Iklim	Penurunan Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	1,00	611.388.000,00	1,00	-	1,00	228.695.260,00	1,00	-	-	-
			Persentase Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah	Persen	11,08		11,08		11,08		11,08		11,08	
	3.1.5.7	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	Persen	90,22	503.895.000,00								
	3.1.5.8	Program Pengelolaan Sampah	Persentase Jumlah Penduduk yang Dilayani Melalui Kegiatan Pengurangan Volume Sampah (3R)	Persen			50,00	1.753.736.100,00	55,00	4.590.830.250,00	50,00	6.439.721.960,00	-	859.077.650,00
			Timbulan Sampah yang Ditangani	Ton			800,00		823,00		900,00		950,00	
			Persentase Cakupan Area Pelayanan Persampahan	Persen			100,00		100,00		100,00		100,00	
			Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	Persen			90,00		95,00		95,00		80,00	
			Kualitas Pengelolaan TPA (koefisien operasi, kualitas lindi, penanganan gas)	Persen					50,00		50,00		50,00	
	3.1.5.9	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Peningkatan Kawasan Hijau Pertamanan	m²	54.663,62	1.125.622.500,00								
	3.1.5.12	Program Penataan dan Pengembangan Keindahan Kota	Peningkatan Kawasan Hijau Pertamanan Kota	m²					76.641,00	836.349.000,00	146.643,68	1.267.134.700,00	146.643,68	1.729.154.600,00
	3.1.5.13	Program Penataan dan Pengembangan Keindahan Kota	Taman Kota dalam Kondisi Baik	Jumlah	5,00	3.327.940.050,00								
			Rasio Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum terhadap Panjang Jalan Kota	Angka	14,00									
		Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Tingkat Capaian					Pratama		Madya		Madya		
	3.1.5.11	Program Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Terpenuhinya Hak-Hak Anak	Persen			70,00	106.643.000,00	80,00	208.290.000,00	90,17	633.672.000,00	69,23	458.720.500,00
			Persentase Kecamatan Layak Anak	Persen					30,00		65,00		65,00	
4 MENGEKSPANSI DAN MEMPERKUAT EKONOMI DAERAH DENGAN BERLANDASKAN PADA EKONOMI KERAKYATAN														
4.1	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi, Struktur Perekonomian yang Kokoh serta Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat	Pertumbuhan Ekonomi	Persen											
4.1.1	Meningkatnya Kontribusi Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata terhadap Struktur Perekonomian Daerah	Persentase Kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persen	21,12		21,26		21,18		21,39		20,97		
		Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	Persen	21,12	-									
		Pertumbuhan IKM	Persen	6,09										
		Pertumbuhan IKM	Persen			5,85	403.204.229,00	3,61	813.480.975,00	4,03	1.199.953.524,00	2,38	377.963.985,00	
		Cakupan IKM yang Mendapatkan Pembinaan Dibandingkan dengan Seluruh IKM (incremental)	Persen			17,01		14,64		16,03		12,44		
		Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	Persen			9,52		14,29		33,33		50,00		

Misi/Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD (%)										Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Perangkat Daerah Pelaksana
				2016		2017		2018		2019		2020						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	17=12/7*100	18=13/8*100	19=14/9*100	20=15/10*100	21=16/11*100	22	23=22/6*100	29							
	3.1.5.4 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan dan Energi	Berkurangnya Kawasan Pertambangan Ilegal	Persen	100,00	100,00								80,00	68.090.200,00	100,00	100,00	Dinas Lingkungan Hidup	
	3.1.5.5 Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	Persentase Jumlah Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	Persen				100,00	10,40	100,00	-	100,00	-	100,00	12.482.000,00	100,00	3,47	Dinas Lingkungan Hidup	
		Persentase Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kota yang Ditangani	Persen				100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
	3.1.5.6 Program Peningkatan Adaptasi Terhadap Dampak Perubahan Iklim	Penurunan Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	100,00	100,00	100,00	-	100,00	48,66	100,00	-	-	0,00	4,00	840.083.260,00	80,00	38,69	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah	Persen	100,00		100,00		92,33		85,23		79,14		11,08	79,14			
	3.1.5.7 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	Persen	100,00	100,00									503.895.000,00		100,00	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	
	3.1.5.8 Program Pengelolaan Sampah	Persentase Jumlah Penduduk yang Dilayani Melalui Kegiatan Pengurangan Volume Sampah (3R)	Persen			100,00	20,47	110,00	27,79	90,91	37,26	-	20,54	50,00	13.643.365.960,00	83,33	29,31	Dinas Lingkungan Hidup
		Timbulan Sampah yang Ditangani	Ton			100,00		96,82		100,00		100,00		950,00		100,00		
		Persentase Cakupan Area Pelayanan Persampahan	Persen			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	Persen			98,90		102,15		100,00		84,21		80,00		84,21		
		Kualitas Pengelolaan TPA (koefisien operasi, kualitas lindi, penanganan gas)	Persen					100,00		90,91		83,33		50,00		83,33		
	3.1.5.9 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Peningkatan Kawasan Hijau Pertamanan	m²	100,00	100,00									1.125.622.500,00		100,00	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	
	3.1.5.12 Program Penataan dan Pengembangan Keindahan Kota	Peningkatan Kawasan Hijau Pertamanan Kota	m²					114,71	98,39	199,54	44,04	181,40	89,82	146643,68	3.832.638.300,00	181,40	67,81	Dinas Pertanian
	3.1.5.13 Program Penataan dan Pengembangan Keindahan Kota	Taman Kota dalam Kondisi Baik	Jumlah	100,00	100,00									5,00	3.327.940.050,00	100,00	100,00	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
		Rasio Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum terhadap Panjang Jalan Kota	Angka	100,00										14,00		100,00		
		Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Tingkat Capaian				100,00		200,00		200,00		Madya		200,00			
3.1.5.11 Program Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Terpenuhinya Hak-Hak Anak	Persen			100,00	29,39	106,67	92,78	112,71	93,88	81,45	81,06	69,23	1.407.325.500,00	81,45	76,98	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	Persentase Kecamatan Layak Anak	Persen					120,00		130,00		86,67		65,00		86,67			
4 MENGEKSPANSI DAN MEMPERKUAT EKONOMI DAERAH DENGAN BERLANDASKAN PADA EKONOMI KERAKYATAN																		
4.1 Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi, Struktur Perekonomian yang Kokoh serta Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat		Pertumbuhan Ekonomi	Persen										-1,85		-26,85			
4.1.1 Meningkatkan Kontribusi Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata terhadap Struktur Perekonomian Daerah		Persentase Kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persen	100,00		100,62		100,19		101,13		99,10		20,97		99,10		
	4.1.1.1 Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	Persen	100,00	-										-		-	
		Pertumbuhan IKM	Persen	100,00														
	4.1.1.2 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Pertumbuhan IKM	Persen			95,28	63,71	57,95	68,88	63,77	92,30	37,13	11,67	2,38	2.794.602.713,00	37,13	43,98	Dinas Perindustrian
		Cakupan IKM yang Mendapatkan Pembinaan Dibandingkan dengan Seluruh IKM (incremental)	Persen			264,54		218,51		213,73		159,49		12,44		159,49		
		Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	Persen			176,30		248,52		537,58		769,23		50,00		769,23		

Misi/Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Periode Perencanaan		Target RPJMD									
					2020		2016 (Realisasi)		2017		2018		2019		2020	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	
		Persentase Kategori Perdagangan terhadap PDRB	Persen	14,79	14,97		14,70		14,75		14,90		14,95		14,97	
4.1.1.3	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen yang Ditindaklanjuti	Persen			5.736.000,00	37,37	5.736.000,00								
4.1.1.4	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Persentase Promosi Produk Unggulan Daerah	Persen			348.647.900,00	91,79	348.647.900,00								
4.1.1.5	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Kontribusi Sub Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB	Persen			1.516.933.550,00	7,35	1.516.933.550,00								
4.1.1.6	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Persentase Penyediaan Data Perkembangan Harga Pasar Dibandingkan Data yang Seharusnya Tersedia	Persen			1.475.265.350,00			90,00	1.475.265.350,00						
4.1.1.7	Program Perdagangan	Kontribusi Sub Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB	Persen		7,39	2.999.601.303,00					7,37	410.844.550,00	7,38	2.052.003.550,00	7,39	536.753.203,00
		Persentase Penyediaan data Perkembangan Harga Pasar Dibandingkan Data yang Seharusnya Tersedia	Persen		100,00						100,00		100,00		100,00	
4.1.1.8	Program Penataan Lingkungan Pasar	Persentase Jumlah Pasar yang Ditata	Persen			387.940.000,00	10,00	287.940.000,00	10,00	100.000.000,00						
4.1.1.9	Program Bina Pasar	Persentase Jumlah Pasar yang Ditata	Persen		80,00	1.691.426.800,00					20,00	791.238.900,00	20,00	267.451.400,00	20,00	632.736.500,00
4.1.1.10	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Lingkungan Pasar	Cakupan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Lingkungan Pasar	Persen		80,00	244.023.000,00	75,00	69.023.000,00	80,00	175.000.000,00						
4.1.1.11	Program Peningkatan dan Pengembangan Tertib Ukur	Cakupan Pengawasan Kemetrolagian	Persen		85,00	1.514.399.432,00					80,00	89.828.941,00	83,00	1.311.251.441,00	85,00	113.319.050,00
		Persentase Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Bidang Pariwisata) terhadap PDRB	Persen	2,74	2,95		2,75		2,80		2,85		2,90		2,95	
4.1.1.12	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah Objek Wisata yang Dikembangkan	Lokasi	10,00		18.300.000,00	2,00	18.300.000,00								
		Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan	Hari	1,00			1,50									
4.1.1.13	Program Pengembangan Destinasi Wisata	Jumlah Destinasi Baru yang Dikembangkan	Lokasi	10,00	2,00	4.565.979.200,00			2,00	50.000.000,00	2,00	43.372.700,00	2,00	80.000.000,00	2,00	4.392.606.500,00
		Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan	Hari	1,00	2,00				1,70		1,80		1,90		2,00	
4.1.1.14	Program Pengembangan Pemasaran Wisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik	Orang	100.176,00		791.537.900,00	111.612	791.537.900,00								
		Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	488,00			313,00									
		Jumlah Even Promosi yang Diselenggarakan/Dikuti	Jumlah	10,00			8,00									
		Kontribusi Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (bidang pariwisata) terhadap PDRB	Persen	2,74			2,75									
4.1.1.15	Program Pengembangan Pemasaran	Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik	Jiwa	100.176,00	193.211	827.284.000,00			117.193	327.284.000,00	155.135	200.000.000,00	173.178	250.000.000,00	193.211	50.000.000,00
		Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Jiwa	488,00	1.850,00				339,00		1.500,00		1.650,00		1.850,00	
		Jumlah Even Promosi yang Diselenggarakan/Dikuti	Event	10,00	15,00				10,00		10,00		15,00		15,00	
		Kontribusi Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (bidang pariwisata) terhadap PDRB	Persen	2,74	2,95				2,80		2,85		2,90		2,95	
4.1.1.16	Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah Industri Baru yang Mendukung MICE (jasa usaha)	Jumlah	-		757.686.750,00	20,00	136.786.750,00	30,00	620.900.000,00						
		Kontribusi Kategori Pariwisata terhadap PAD	Persen	10,00			13,29		13,45							
		Jumlah SDM Pariwisata yang Tersertifikasi	Orang	50,00			20,00		30,00							
4.1.1.17	Program Pengembangan Kemitraan dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Industri Baru yang Mendukung MICE (jasa usaha)	Event	-	50,00	6.523.951.736,00					30,00	976.168.550,00	40,00	1.576.404.593,00	50,00	3.971.378.593,00
		Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	Persen	10,00	15,00						12,00		12,00		15,00	
		Jumlah SDM Pariwisata yang Tersertifikasi	Orang	50,00	50,00						30,00		40,00		50,00	

Misi/Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Target RPJMD									
				2016		2017		2018		2019		2020	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	12		13		14		15		16	
		Persentase Kategori Perdagangan terhadap PDRB	Persen	14,68									
4.1.1.3	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen yang Ditindaklanjuti	Persen	37,37	5.736.000,00								
4.1.1.4	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Persentase Promosi Produk Unggulan Daerah	Persen	91,79	348.647.900,00								
4.1.1.5	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Kontribusi Sub Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB	Persen	7,35	1.516.933.550,00								
4.1.1.6	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Persentase Penyediaan Data Perkembangan Harga Pasar Dibandingkan Data yang Seharusnya Tersedia	Persen			90,00	1.439.210.875,00						
4.1.1.7	Program Perdagangan	Kontribusi Sub Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB	Persen					7,36	405.940.700,00	7,37	2.011.666.250,00	7,37	183.385.000,00
		Persentase Penyediaan data Perkembangan Harga Pasar Dibandingkan Data yang Seharusnya Tersedia	Persen					100,00		100,00		100,00	
4.1.1.8	Program Penataan Lingkungan Pasar	Persentase Jumlah Pasar yang Ditata	Persen	10,00	287.940.000,00	10,00	2.991.000,00						
4.1.1.9	Program Bina Pasar	Persentase Jumlah Pasar yang Ditata	Persen					10,00	478.675.000,00	10,00	265.931.400,00	-	6.826.500,00
4.1.1.10	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Lingkungan Pasar	Cakupan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Lingkungan Pasar	Persen	75,00	69.023.000,00	100,00	23.641.000,00						
4.1.1.11	Program Peningkatan dan Pengembangan Tertib Ukur	Cakupan Pengawasan Kemetrolagian	Persen					82,00	29.480.400,00	85,00	554.537.941,00	69,54	22.615.250,00
		Persentase Kategori Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum (Bidang Pariwisata) terhadap PDRB	Persen	2,81		2,82		2,85		2,90		2,57	
4.1.1.12	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah Objek Wisata yang Dikembangkan	Lokasi	2,00	18.300.000,00								
		Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan	Hari	1,50									
4.1.1.13	Program Pengembangan Destinasi Wisata	Jumlah Destinasi Baru yang Dikembangkan	Lokasi			3,00	26.960.000,00	-	40.266.200,00	4,00	44.650.500,00	5,00	830.768.780,00
		Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan	Hari			1,78		1,71		1,70		1,50	
4.1.1.14	Program Pengembangan Pemasaran Wisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik	Orang	111.612,00	791.537.900,00								
		Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	313,00									
		Jumlah Even Promosi yang Diselenggarakan/Dikuti	Jumlah	8,00									
		Kontribusi Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (bidang pariwisata) terhadap PDRB	Persen	2,75									
4.1.1.15	Program Pengembangan Pemasaran	Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik	Jiwa			117.193,00	224.133.830,00	599.460,00	157.499.600,00	1.064.493,00	246.120.000,00	819.492,00	49.745.000,00
		Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Jiwa			339,00		4.589,00		22.218,00		1.767,00	
		Jumlah Even Promosi yang Diselenggarakan/Dikuti	Event			10,00		-		15,00		10,00	
		Kontribusi Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (bidang pariwisata) terhadap PDRB	Persen			2,80		2,85		2,90		2,90	
4.1.1.16	Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah Industri Baru yang Mendukung MICE (jasa usaha)	Jumlah	20,00	136.786.750,00	220,00	595.973.500,00						
		Kontribusi Kategori Pariwisata terhadap PAD	Persen	13,29		12,35							
		Jumlah SDM Pariwisata yang Tersertifikasi	Orang	20,00		30,00							
4.1.1.17	Program Pengembangan Kemitraan dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Industri Baru yang Mendukung MICE (jasa usaha)	Event					30,00	381.732.950,00	40,00	1.143.973.900,00	40,00	830.768.780,00
		Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	Persen					18,64		23,16		23,16	
		Jumlah SDM Pariwisata yang Tersertifikasi	Orang					60,00		40,00		40,00	

Misi/Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD (%)										Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Perangkat Daerah Pelaksana
				2016		2017		2018		2019		2020						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	17=12/7*100	18=13/8*100	19=14/9*100	20=15/10*100	21=16/11*100	22	23=22/6*100	29							
		Persentase Kategori Perdagangan terhadap PDRB	Persen	99,86		0,00		0,00		0,00		0,00		13,30		88,84		
4.1.1.3	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen yang Ditindaklanjuti	Persen	100,00	100,00									5.736.000,00		100,00		Dinas Perdagangan
4.1.1.4	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Persentase Promosi Produk Unggulan Daerah	Persen	100,00	100,00									348.647.900,00		100,00		Dinas Perdagangan
4.1.1.5	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Kontribusi Sub Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB	Persen	100,00	100,00									1.516.933.550,00		100,00		Dinas Perdagangan
4.1.1.6	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Persentase Penyediaan Data Perkembangan Harga Pasar Dibandingkan Data yang Seharusnya Tersedia	Persen			100,00	97,56							90,00	1.439.210.875,00		97,56	Dinas Perdagangan
4.1.1.7	Program Perdagangan	Kontribusi Sub Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB	Persen					99,86	98,81	99,86	98,03	99,73	34,17	7,37	2.600.991.950,00	99,73	86,71	Dinas Perdagangan
		Persentase Penyediaan data Perkembangan Harga Pasar Dibandingkan Data yang Seharusnya Tersedia	Persen					100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
4.1.1.8	Program Penataan Lingkungan Pasar	Persentase Jumlah Pasar yang Ditata	Persen	100,00	100,00	100	2,99								290.931.000,00		74,99	Dinas Perdagangan
4.1.1.9	Program Bina Pasar	Persentase Jumlah Pasar yang Ditata	Persen					50,00	60,50	50,00	99,43	-	1,08	40,00	751.432.900,00	50,00	44,43	Dinas Perdagangan
4.1.1.10	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Lingkungan Pasar	Cakupan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan di Lingkungan Pasar	Persen	100,00	100,00	125,00	13,51							100,00	92.664.000,00	125,00	37,97	Dinas Perdagangan
4.1.1.11	Program Peningkatan dan Pengembangan Tertib Ukur	Cakupan Pengawasan Kemetrolagian	Persen					102,50	32,82	102,41	42,29	81,81	19,96	69,54	606.633.591,00	81,81	40,06	Dinas Perdagangan
		Persentase Kategori Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum (Bidang Pariwisata) terhadap PDRB	Persen	102,18		100,71		100,00		100,00		87,12		2,57		87,12		
4.1.1.12	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah Objek Wisata yang Dikembangkan	Lokasi	100,00	100,00										18.300.000,00		100,00	Dinas Kebudayaan dan Pariutsata
		Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan	Hari	100,00														
4.1.1.13	Program Pengembangan Destinasi Wisata	Jumlah Destinasi Baru yang Dikembangkan	Lokasi			150,00	53,92	-	92,84	200,00	55,81	250,00	18,91	5,00	942.645.480,00	250,00	20,64	Dinas Pariwisata
		Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan	Hari			104,71		95,00		89,47		75,00		1,50		75,00		
4.1.1.14	Program Pengembangan Pemasaran Wisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik	Orang	100,00	100,00										791.537.900,00		100,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	100,00														
		Jumlah Even Promosi yang Diselenggarakan/Dikuti	Jumlah	100,00														
		Kontribusi Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (bidang pariwisata) terhadap PDRB	Persen	100,00														
4.1.1.15	Program Pengembangan Pemasaran	Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik	Jiwa			100,00	68,48	386,41	78,75	614,68	98,45	424,14	99,49	819.492,00	677.498.430,00	424,14	81,89	Dinas Pariwisata
		Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Jiwa			100,00		305,93		1.346,55		95,51		1.767,00		95,51		
		Jumlah Even Promosi yang Diselenggarakan/Dikuti	Event			100,00		-		100,00		66,67		10,00		66,67		
		Kontribusi Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (bidang pariwisata) terhadap PDRB	Persen			100,00		100,00		100,00		98,31		2,90		98,31		
4.1.1.16	Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah Industri Baru yang Mendukung MICE (jasa usaha)	Jumlah	100,00	100,00	733,33	95,99								732.760.250,00		96,71	Dinas Pariwisata
		Kontribusi Kategori Pariwisata terhadap PAD	Persen	100,00		91,82												
		Jumlah SDM Pariwisata yang Tersertifikasi	Orang	100,00		100,00												
4.1.1.17	Program Pengembangan Kemitraan dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Industri Baru yang Mendukung MICE (jasa usaha)	Event					100,00	39,11	100,00	72,57	80,00	20,92	40,00	2.356.475.630,00	80,00	36,12	Dinas Pariwisata
		Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	Persen					155,33		193,00		154,40		23,16		154,40		
		Jumlah SDM Pariwisata yang Tersertifikasi	Orang					200,00		100,00		80,00		40,00		80,00		

Misi/Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Periode Perencanaan		Target RPJMD									
					2020		2016 (Realisasi)		2017		2018		2019		2020	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	
4.1.2 Meningkatnya Kontribusi KUMKM dalam Perekonomian Daerah		Persentase Koperasi Sehat	Persen	2,49	4,45		2,70		3,10		3,37		4,05		4,45	
		Persentase UMKM Yang Memiliki Laba	Persen	17,85	18,02		16,38		16,67		17,23		17,59		18,02	
	4.1.2.1 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase Kredit Ekonomi Kerakyatan yang Tersalurkan	Persen	96,34		672.337.850,00	72,10	672.337.850,00								
		Terpromosinya Produk UMKM (kali)	Jumlah	11,00			10,00									
		Persentase Pertumbuhan Volume Usaha (pendapatan kotor + piutang) Koperasi Dibanding Volume Usaha (pendapatan kotor + piutang) Koperasi Tahun Sebelumnya	Persen	9,21			0,35									
	4.1.2.2 Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi	Persentase UKM Non BPR/ LKM aktif	Persen	60,20	5.935.732.000,00			50,00	796.205.000,00	50,30	886.205.000,00	50,80	1.299.000.000,00	60,20	2.954.322.000,00	
		Persentase BPR/ LKM Aktif	Persen	100,00				100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase Usaha Mikro dan Kecil Dibanding Seluruh UKM	Persen	87,84				87,40		87,52		87,83		87,84		
		Persentase Kredit Ekonomi Kerakyatan (KEK) Melalui Bank Pasar yang Disalurkan Dibandingkan Dana KEK yang Tersedia di Bank Pasar	Persen	85,00				76,00		80,00		83,00		85,00		
		Persentase Koperasi Aktif Dibanding Jumlah Koperasi Terdaftar	Persen	65,05				49,12		53,76		59,03		65,05		
	4.1.2.3 Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	Persentase Pertumbuhan Anggota Koperasi Dibanding Jumlah Anggota Koperasi Tahun Sebelumnya	Persen	0,61	369.634.500,00			0,46	30.000.000,00	0,51	30.000.000,00	0,55	145.000.000,00	0,61	164.634.500,00	
		Persentase Pertumbuhan Volume Usaha (pendapatan kotor + piutang) Koperasi Dibanding Volume Usaha (pendapatan kotor + piutang) Koperasi Tahun Sebelumnya	Persen	2,25				1,50		1,75		2,00		2,25		
4.1.3 Meningkatnya Investasi		Persentase Peningkatan Nilai Investasi (PMDN)	Persen	18,24	13,50		6,78		9,00		10,50		12,00		13,50	
		Persentase Peningkatan Nilai Investasi (PMA)	Persen	6,51	25,50		21,72		22,50		23,50		24,50		25,50	
	4.1.3.1 Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Nilai Investasi PMA yang Termonitor	Persen	6,51	25,50	205.000.000,00							24,50	155.000.000,00	25,50	50.000.000,00
		Persentase Peningkatan Jenis Investasi PMA yang Termonitor	Persen	12,50	14,50								13,50		14,50	
		Persentase Peningkatan Nilai Investasi PMDN yang Termonitor	Persen	18,24	13,50								12,00		13,50	
		Persentase Peningkatan Jenis Investasi PMDN yang Termonitor	Persen	12,50	14,50								13,50		14,50	
		Persentase Peningkatan Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/ PMA)	Persen	7,90	11,00								9,50		11,00	
		Persentase Peningkatan Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/ PMA)	Persen	8,25	10,75								9,50		10,75	
		Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	Persen	18,24	20,24								19,24		20,24	
		Persentase Penduduk Miskin	Persen	10,33	7,62		10,07		9,89		9,02		8,28		7,62	
		Rasio Gini	Persen	0,39	0,31		0,369		0,34		0,34		0,32		0,31	
4.1.4 Meningkatnya Kesejahteraan Rakyat																
	4.1.4.1 Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Jumlah Lansia yang Tertangani	Persen	11,00	25,00	308.697.700,00	16,00	45.210.000,00	21,00	23.786.300,00	23,00	50.000.000,00	24,00	77.000.000,00	25,00	112.701.400,00
	4.1.4.2 Program Pembinaan Anak Terlantar	Persentase Jumlah Anak Terlantar yang Tertangani	Persen	96,00	71,00	117.125.000,00	58,00	16.125.000,00	58,00	30.000.000,00	63,00	30.000.000,00	67,00	30.000.000,00	71,00	11.000.000,00
	4.1.4.3 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Persentase Jumlah Penyandang Cacat dan Trauma yang Dibina	Persen	4,00	12,00	162.207.150,00	8,00	31.998.500,00			10,00	50.000.000,00	11,00	50.000.000,00	12,00	30.208.650,00
		Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial	Persen	8,00	36,00		25,00				30,00		33,00		36,00	
	4.1.4.4 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, Psk, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Persentase Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	Persen	7,00	56,00	1.112.132.912,00	38,00	111.254.000,00	42,00	288.744.500,00	46,00	200.000.000,00	51,00	320.000.000,00	56,00	192.134.412,00
		Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	Persen				25,00		37,36		40,00					
		Persentase PMKS yang Tertangani	Persen				25,00		37,36		40,00					

Misi/Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Target RPJMD									
				2016		2017		2018		2019		2020	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	12		13		14		15		16	
4.1.2 Meningkatnya Kontribusi KUMKM dalam Perekonomian Daerah		Persentase Koperasi Sehat	Persen	2,70		3,10		4,03		6,05		8,28	
		Persentase UMKM Yang Memiliki Laba	Persen	16,38		16,67		17,01		16,85		16,14	
	4.1.2.1 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase Kredit Ekonomi Kerakyatan yang Tersalurkan	Persen	72,10	672.337.850,00								
		Terpromosinya Produk UMKM (kali)	Jumlah	10,00									
		Persentase Pertumbuhan Volume Usaha (pendapatan kotor + piutang) Koperasi Dibanding Volume Usaha (pendapatan kotor + piutang) Koperasi Tahun Sebelumnya	Persen	0,35									
	4.1.2.2 Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi	Persentase UKM Non BPR/ LKM aktif	Persen			46,88	775.705.150,00	45,20	854.213.797,00	46,63	1.247.944.521,00	36,89	483.046.000,00
		Persentase BPR/ LKM Aktif	Persen			100,00		100,00		100,00		100,00	
		Persentase Usaha Mikro dan Kecil Dibanding Seluruh UKM	Persen			87,82		88,26		89,47		63,10	
		Persentase Kredit Ekonomi Kerakyatan (KEK) Melalui Bank Pasar yang Disalurkan Dibandingkan Dana KEK yang Tersedia di Bank Pasar	Persen			87,82		46,97		31,53		19,05	
		Persentase Koperasi Aktif Dibanding Jumlah Koperasi Terdaftar	Persen			42,24		21,23		25,23		26,35	
	4.1.2.3 Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	Persentase Pertumbuhan Anggota Koperasi Dibanding Jumlah Anggota Koperasi Tahun Sebelumnya	Persen			-9,92	9.700.000,00	1,50	11.990.000,00	-7,10	139.050.000,00	-0,024	33.900.000,00
		Persentase Pertumbuhan Volume Usaha (pendapatan kotor + piutang) Koperasi Dibanding Volume Usaha (pendapatan kotor + piutang) Koperasi Tahun Sebelumnya	Persen			-8,98		-2,23		-2,44		-0,051	
4.1.3 Meningkatnya Investasi		Persentase Peningkatan Nilai Investasi (PMDN)	Persen	6,78		9,04		42,70		30,39		14,99	
		Persentase Peningkatan Nilai Investasi (PMA)	Persen	21,71		18,48		2,62		16,37		4,05	
	4.1.3.1 Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Nilai Investasi PMA yang Termonitor	Persen							16,37	127.908.791,00	25,30	-
		Persentase Peningkatan Jenis Investasi PMA yang Termonitor	Persen							14,50		13,70	
		Persentase Peningkatan Nilai Investasi PMDN yang Termonitor	Persen							30,39		14,05	
		Persentase Peningkatan Jenis Investasi PMDN yang Termonitor	Persen							25,00		13,30	
		Persentase Peningkatan Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/ PMA)	Persen							3,45		11,65	
		Persentase Peningkatan Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/ PMA)	Persen							30,39		11,75	
		Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	Persen							30,39		20,29	
		Persentase Penduduk Miskin	Persen	10,07		9,94		9,04		8,71		8,81	
		Rasio Gini	Persen	0,369		0,342		0,342		0,316		0,359	
4.1.4 Meningkatnya Kesejahteraan Rakyat													
	4.1.4.1 Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Jumlah Lansia yang Tertangani	Persen	16,00	45.210.000,00	16,00	18.438.800,00	23,00	29.635.800,00	9,00	2.178.800,00	12,00	54.717.500,00
	4.1.4.2 Program Pembinaan Anak Terlantar	Persentase Jumlah Anak Terlantar yang Tertangani	Persen	58,00	16.125.000,00	58,00	30.000.000,00	63,00	21.675.000,00	60,00	24.175.000,00	70,00	10.975.000,00
	4.1.4.3 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Persentase Jumlah Penyandang Cacat dan Trauma yang Dibina	Persen	8,00	31.998.500,00			10,00	978.800,00	5,00	34.262.850,00	-	824.600,00
		Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial	Persen	25,00				30,00		9,00		-	
	4.1.4.4 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narkotika, Psk, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Persentase Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	Persen	38,00	111.254.000,00	42,00	165.512.500,00	46,00	173.095.650,00	42,00	281.306.550,00	55,00	174.832.250,00
		Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	Persen	25,00		37,36		40,00					
		Persentase PMKS yang Tertangani	Persen	25,00		37,36		40,00					

Misi/Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD (%)										Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Perangkat Daerah Pelaksana
				2016		2017		2018		2019		2020						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	17=12/7*100		18=13/8*100		19=14/9*100		20=15/10*100		21=16/11*100		22		23=22/6*100		29
4.1.2 Meningkatnya Kontribusi KUMKM dalam Perekonomian Daerah		Persentase Koperasi Sehat	Persen	100,00		100,00		119,58		149,38		186,07		8,28		186,07		
		Persentase UMKM Yang Memiliki Laba	Persen	100,00		100,00		98,72		95,79		89,57		16,14		89,57		
	4.1.2.1 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase Kredit Ekonomi Kerakyatan yang Tersalurkan	Persen	100,00	100,00										672.337.850,00		100,00	Dinas Koperasi dan UKM
		Terpromosinya Produk UMKM (kali)	Jumlah	100,00														
		Persentase Pertumbuhan Volume Usaha (pendapatan kotor + piutang) Koperasi Dibanding Volume Usaha (pendapatan kotor + piutang) Koperasi Tahun Sebelumnya	Persen	100,00														
	4.1.2.2 Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi	Persentase UKM Non BPR/LKM aktif	Persen			93,76	97,43	89,86	96,39	91,79	96,07	61,28	16,35	36,89	3.360.909.468,00	61,28	56,62	Dinas Koperasi dan UKM
		Persentase BPR/LKM Aktif	Persen			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase Usaha Mikro dan Kecil Dibanding Seluruh UKM	Persen			100,48		100,85		101,87		71,84		63,10		71,84		
		Persentase Kredit Ekonomi Kerakyatan (KEK) Melalui Bank Pasar yang Disalurkan Dibandingkan Dana KEK yang Tersedia di Bank Pasar	Persen			115,55		58,71		37,99		22,41		19,05		22,41		
		Persentase Koperasi Aktif Dibanding Jumlah Koperasi Terdaftar	Persen			85,99		39,49		42,74		40,51		26,35		40,51		
	4.1.2.3 Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	Persentase Pertumbuhan Anggota Koperasi Dibanding Jumlah Anggota Koperasi Tahun Sebelumnya	Persen			-2.156,52	32,33	294,12	39,97	-1.290,91	95,90	-3,93	20,59	-0,024	194.640.000,00	-3,93	52,66	Dinas Koperasi dan UKM
		Persentase Pertumbuhan Volume Usaha (pendapatan kotor + piutang) Koperasi Dibanding Volume Usaha (pendapatan kotor + piutang) Koperasi Tahun Sebelumnya	Persen			-598,67		-127,43		-122,00		-2,27		-0,051		-2,27		
4.1.3 Meningkatnya Investasi		Persentase Peningkatan Nilai Investasi (PMDN)	Persen	100,00		100,44		406,67		253,25		111,04		14,99		111,04		
		Persentase Peningkatan Nilai Investasi (PMA)	Persen	99,95		82,13		11,15		66,82		15,88		4,05		15,88		
	4.1.3.1 Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Nilai Investasi PMA yang Termonitor	Persen							66,82	82,52	99,22	0,00	25,30	127.908.791,00	99,22	62,39	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Persentase Peningkatan Jenis Investasi PMA yang Termonitor	Persen							107,41		94,48		13,70		94,48		
		Persentase Peningkatan Nilai Investasi PMDN yang Termonitor	Persen							253,25		104,07		14,05		104,07		
		Persentase Peningkatan Jenis Investasi PMDN yang Termonitor	Persen							185,19		91,72		13,30		91,72		
		Persentase Peningkatan Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/ PMA)	Persen							36,32		105,91		11,65		105,91		
		Persentase Peningkatan Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/ PMA)	Persen							319,89		109,30		11,75		109,30		
		Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	Persen							157,95		100,25		20,29		100,25		
	4.1.4 Meningkatnya Kesejahteraan Rakyat		Persentase Penduduk Miskin	Persen	100,00		99,50		99,78		95,06		86,49		8,81		86,49	
		Rasio Gini	Persen	100,00		99,42		99,42		101,27		86,35		0,359		86,35		
4.1.4.1 Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		Persentase Jumlah Lansia yang Tertangani	Persen	100,00	100,00	76,19	77,52	100,00	59,27	37,50	2,83	48,00	48,55	12,00	150.180.900,00	48,00	48,65	Dinas Sosial
4.1.4.2 Program Pembinaan Anak Terlantar		Persentase Jumlah Anak Terlantar yang Tertangani	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	72,25	89,55	80,58	98,59	99,77	70,00	102.950.000,00	98,59	87,90	Dinas Sosial
4.1.4.3 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma		Persentase Jumlah Penyandang Cacat dan Trauma yang Dibina	Persen	100,00	100,00			100,00	1,96	45,45	68,53	-	2,73	5,00	68.064.750,00	41,67	41,96	Dinas Sosial
		Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial	Persen	100,00				100,00		27,27		-		9,00		25,00		
4.1.4.4 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, Psk, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)		Persentase Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	Persen	100,00	100,00	100,00	57,32	100,00	86,55	82,35	87,91	98,21	90,99	55,00	906.000.950,00	98,21	81,47	Dinas Sosial
		Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	Persen	100,00		100,00		100,00										
		Persentase PMKS yang Tertangani	Persen	100,00		100,00		100,00										

Misi/Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Periode Perencanaan		Target RPJMD									
					2020		2016 (Realisasi)		2017		2018		2019		2020	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	
4.1.4.5 Program Operasional Bencana Alam dan Bencana Sosial	Cakupan Penanganan Bencana Alam dan Sosial	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggapi Darurat	Persen	20,00	29,00	35.261.083.760,00	20,00	48.606.460,00	20,00	53.850.000,00	24,00	50.000.000,00	27,00	50.000.000,00	29,00	35.058.627.300,00
		Persentase Korban Bencana yang Disediakan dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap	Persen	20,00	29,00		20,00		20,00		24,00	27,00	29,00	29,00	29,00	
		Ketersediaan Buffer Stock Logistik dan Pemenuhan Dasar Korban Bencana	Persen		87,00		60,00		67,00		72,00	81,00	87,00	87,00	87,00	
4.1.4.6 Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Persentase Ketersediaan Data PMKS dan PSKS	Persentase Panti Sosial yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya	Persen	9,00	6,00	80.505.000,00	6,00	80.505.000,00							6,00	
		Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial	Persen	9,00	6,00		6,00								6,00	
															6,00	
4.1.4.7	Program Keluarga Harapan (PKH)	Cakupan Pendampingan Program PKH	Persen	100,00		654.150.500,00	100,00	99.256.000,00	100,00	286.894.500,00	100,00	268.000.000,00				
4.1.4.8	Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kota Bandar Lampung	Cakupan Pendampingan Program PKH dan BPNT Kota Bandar Lampung	Persen		100,00	3.115.610.342,00							100,00	765.000.000,00	100,00	2.350.610.342,00
4.1.4.9 Program Pemberdayaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah PSKS yang Ikut Serta dalam Penanganan Masalah Sosial	Rasio Tempat Ibadah Agama Persatuan Penduduk	Tempat Ibadah/ Juwa	0,16	0,18	4.919.464.600,00	222,00	541.508.750,00	244,00	1.039.492.500,00	269,00	1.155.920.000,00	295,00	1.108.920.000,00	325,00	1.073.623.350,00
		Persentase TPU yang Ditangani	Persen	-			-		5,00							
		Persentase Tempat Pemakaman Umum Persatuan Penduduk	Persen	-			-		2,33							
4.1.4.10 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	Persentase PMKS yang Tertangani	Persen	50,00	3,50	513.427.000,00							40,00	232.320.000,00	40,00	281.107.000,00
													3,00		3,00	
4.1.4.11 Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Persentase TPU yang Ditangani	Persentase Tempat Pemakaman Umum per Satuan Penduduk	Persen	15,00	8,40	100.000.000,00							15,00	100.000.000,00		
													8,40			
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	8,51	5,59		8,10		7,34		6,76		6,17		5,59	
			Persen	61,77	68,32		63,41		64,00		64,95		66,63		68,32	
4.1.4.12	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat	Persen			176.458.765,00	30,00	176.458.765,00								
4.1.4.13 Program Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat	Persentase Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Keutrusahaan	Persen	55,00	20,00	653.007.800,00			40,00	202.309.500,00	45,00	126.566.100,00	50,00	160.566.100,00	55,00	163.566.100,00
		Persentase Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Persen	22,50					15,00		17,50	20,00	22,50	22,50	22,50	
4.1.4.14	Program Pengembangan Data dan Informasi Ketenagakerjaan	Rasio Pencaker yang Terdaftar Lulusan S1/S2/ S3 Dibagi Pencaker yang Terdaftar per Tahun	Angka	26,09	21,00	205.534.400,00			23,00	40.688.000,00	22,00	107.431.400,00	21,00	40.000.000,00	21,00	17.415.000,00
4.1.4.15 Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase Meningkatnya Tenaga Kerja yang Ditempatkan Dibandingkan Tahun Sebelumnya	Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan	Persen	36,04	97,62	389.919.300,00	7,50	62.124.900,00	30,39	126.612.600,00	23,31	100.590.900,00	18,90	100.590.900,00		
			Orang	3.000,00	7.245,00		225,00		980,00		980,00	980,00	980,00			

Misi/Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Target RPJMD									
				2016		2017		2018		2019		2020	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	12		13		14		15		16	
	4.1.4.5 Program Operasional Bencana Alam dan Bencana Sosial	Cakupan Penanganan Bencana Alam dan Sosial	Persen	20,00	48.606.460,00	20,00	44.753.500,00	24,00	40.469.250,00	27,00	45.901.504,00	29,00	16.930.774.000,00
		Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggapi Darurat	Persen	20,00		20,00		24,00		27,00		29,00	
		Persentase Korban Bencana yang Disediakan dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap	Persen	20,00		20,00		24,00		-		-	
		Ketersediaan Buffer Stock Logistik dan Pemenuhan Dasar Korban Bencana	Persen	60,00		67,00		72,00		81,00		87,00	
	4.1.4.6 Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Persentase Ketersediaan Data PMKS dan PSKS	Persen	6,00	80.505.000,00								
		Persentase Panti Sosial yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya	Persen	6,00									
		Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial	Persen	6,00									
	4.1.4.7 Program Keluarga Harapan (PKH)	Cakupan Pendampingan Program PKH	Persen	100,00	99.256.000,00	100,00	110.792.725,00	100,00	240.773.656,00				
	4.1.4.8 Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kota Bandar Lampung	Cakupan Pendampingan Program PKH dan BPNT Kota Bandar Lampung	Persen							100,00	719.986.040,00	100,00	2.066.079.000,00
	4.1.4.9 Program Pemberdayaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah PSKS yang ikut Serta dalam Penanganan Masalah Sosial	Orang	222,00	541.508.750,00	244,00	590.979.300,00	269,00	493.532.750,00	673,00	795.686.200,00	768,00	507.180.050,00
		Rasio Tempat Ibadah Agama Persatuan Penduduk	Tempat Ibadah/ Juwa	0,16		0,17		0,17		0,15		0,17	
		Persentase TPU yang Ditangani	Persen	-		-							
		Persentase Tempat Pemakaman Umum Persatuan Penduduk	Persen	-		-							
	4.1.4.10 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	Persen							50,00	-	70,00	-
		Persentase PMKS yang Tertangani	Persen							50,00		70,00	
	4.1.4.11 Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Persentase TPU yang Ditangani	Persen							15,00	76.265.250,00		
		Persentase Tempat Pemakaman Umum per Satuan Penduduk	Persen							0,03			
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	8,10		8,10		7,28		7,12		8,78	
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	63,41		63,41		65,92		65,52		67,79	
	4.1.4.12 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat	Persen	30,00	176.458.765,00								
	4.1.4.13 Program Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat	Persen			40,00	5.545.500,00	45,00	89.220.500,00	50,00	138.963.700,00	20,00	-
		Persentase Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Keutarausahaan	Persen			-		20,00		-		-	
		Persentase Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Persen			-		17,50		-		-	
	4.1.4.14 Program Pengembangan Data dan Informasi Ketenagakerjaan	Rasio Pencaker yang Terdaftar Lulusan S1/ S2/ S3 Dibagi Pencaker yang Terdaftar per Tahun	Angka			23,00	29.846.000,00	22,00	98.922.492,00	21,11	36.532.250,00	20,00	-
	4.1.4.15 Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase Meningkatnya Tenaga Kerja yang Ditempatkan Dibandingkan Tahun Sebelumnya	Persen	7,50	62.124.900,00	30,39	55.401.700,00	23,31	78.017.830,00	227,50	100.390.900,00		
		Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan	Orang	225,00		980,00		980,00		681,00			

Misi/Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD (%)										Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Perangkat Daerah Pelaksana
				2016		2017		2018		2019		2020						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	17=12/7*100		18=13/8*100		19=14/9*100		20=15/10*100		21=16/11*100		22		23=22/6*100		29
	4.1.4.5 Program Operasional Bencana Alam dan Bencana Sosial	Cakupan Penanganan Bencana Alam dan Sosial	Persen	100,00	100,00	100,00	83,11	100,00	80,94	100,00	91,80	100,00	48,29	29,00	17.110.504.714,00	100,00	48,53	Dinas Sosial
		Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	Persen	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		29,00		100,00		
		Persentase Korban Bencana yang Diwakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap	Persen	100,00		100,00		100,00		-		-		-		-		
		Ketersediaan Buffer Stock Logistik dan Pemenuhan Dasar Korban Bencana	Persen	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		87,00		100,00		
	4.1.4.6 Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Persentase Ketersediaan Data PMKS dan PSKS	Persen	100,00	100,00									6,00	80.505.000,00	100,00	100,00	Dinas Sosial
		Persentase Panti Sosial yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya	Persen	100,00										6,00		100,00		
		Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial	Persen	100,00										6,00		100,00		
	4.1.4.7 Program Keluarga Harapan (PKH)	Cakupan Pendampingan Program PKH	Persen	100,00	100,00	100,00	38,62	100,00	89,84						450.822.381,00		68,92	Dinas Sosial
	4.1.4.8 Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kota Bandar Lampung	Cakupan Pendampingan Program PKH dan BPNT Kota Bandar Lampung	Persen							100,00	94,12	100,00	87,90	100,00	2.786.065.040,00	100,00	89,42	Dinas Sosial
	4.1.4.9 Program Pemberdayaan dan Pengembangan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah PSKS yang Ikut Serta dalam Penanganan Masalah Sosial	Orang	100,00	100,00	100,00	56,85	100,00	42,70	228,14	71,75	236,31	47,24	768,00	2.928.887.050,00	236,31	59,54	Dinas Sosial
		Rasio Tempat Ibadah Agama Persatuan Penduduk	Tempat Ibadah/ Jiwa	100,00		100,00		100,00		83,33		94,44		0,17		94,44		
		Presentase TPU yang Ditangani	Persen	-		0,00												
		Persentase Tempat Pemakaman Umum Persatuan Penduduk	Persen	-		0,00												
	4.1.4.10 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	Persen							125,00	0,00			15,00	-	30,00	0,00	Dinas Sosial
		Persentase PMKS yang Tertangani	Persen							1.666,67				0,03		0,86		
	4.1.4.11 Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Persentase TPU yang Ditangani	Persen							100,00	76,27			15,00	76.265.250,00	100,00	76,27	Dinas Sosial
		Persentase Tempat Pemakaman Umum per Satuan Penduduk	Persen							0,36				0,03		0,36		
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	100,00		90,62		92,79		86,66		63,61		8,78		63,61		
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	100,00		99,08		101,50		98,33		99,23		67,79		99,23		
	4.1.4.12 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat	Persen	100,00	100,00										176.458.765,00		100,00	Dinas Tenaga Kerja
	4.1.4.13 Program Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat	Persen			100,00	2,74	100,00	70,49	100,00	86,55	36,36	0,00	20,00	233.729.700,00	36,36	35,79	Dinas Tenaga Kerja
		Persentase Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Keutrusahaan	Persen			-		100,00		-		-		20,00		100,00		
		Persentase Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Persen			-		100,00		-		-		17,50		77,78		
	4.1.4.14 Program Pengembangan Data dan Informasi Ketenagakerjaan	Rasio Pencaker yang Terdaftar Lulusan S1/S2/ S3 Dibagi Pencaker yang Terdaftar per Tahun	Angka			100,00	73,35	100,00	92,08	100,52	91,33	95,24	-	20,00	165.300.742,00	95,24	80,42	Dinas Tenaga Kerja
	4.1.4.15 Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase Meningkatnya Tenaga Kerja yang Ditempatkan Dibandingkan Tahun Sebelumnya	Persen	100,00	100,00	100,00	43,76	100,00	77,56	1.203,70	99,80			227,50	295.935.330,00	233,05	75,90	Dinas Tenaga Kerja
		Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan	Orang	100,00		100,00		100,00		69,49				681,00		9,40		

Misi/Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD									
					2020	2016 (Realisasi)		2017		2018		2019		2020	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.1.4.16 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Angka Perselisihan Pengusaha-Pekerja per Tahun	Angka		207.341.900,00	46,00	88.646.000,00	50,00	118.695.900,00						
		Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Jumlah			46,00		50,00							
		Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	Orang	89.554,00		92.025,00		103.262							
		Upah Minimum Kota	Rp	1.649.500		1.870.000		2.054.365							
	4.1.4.17 Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Kasus		58,00	601.097.500,00				53,00	118.695.900,00	56,00	188.811.550,00	58,00	293.590.050,00
		Angka Perselisihan Pengusaha-Pekerja per Tahun	Angka		58,00					53,00		56,00		58,00	
		Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	Orang		14.226					104.621		120.230		14.226	
		Persentase Penyelesaian Perselisihan Buruh dan Pengusaha terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah	Persen		100,00					100,00		100,00		100,00	
		Upah Minimum Kota	Rp		2.560.904					2.263.390		2.493.577		2.560.904	
	4.1.4.18 Program Pengembangan Masyarakat Melalui Transmigrasi	Cakupan Masyarakat di Wilayah Kumuh yang Mendapatkan Pemahaman Transmigrasi Dibandingkan Total Wilayah Kumuh	Persen		12,00	75.000.000,00				12,00	35.000.000,00	12,00	25.000.000,00	12,00	15.000.000,00
		Laju Inflasi	Persen	4,65	3,00 - 3,04		2,75		3,12 - 3,15		3,08 - 3,12		3,03 - 3,08		3,00 - 3,04
		PDRB per Kapita (ADHK Tahun 2010)			40.261.279		32.859.032		34.663.160		36.529.200		38.395.240		40.261.279
		PDRB per Kapita (ADHB)													
		Skor Pola Pangan Harapan	Skor	82,10	86,00		82,95		83,50		84,50		85,00		86,00
	4.1.4.19 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian, Peternakan dan Kehutanan	Persentase Tersusunnya Pelaporan Monitoring dan Evaluasi	Persen	80,00	80,00	8.922.500,00	80,00	8.922.500,00							
		Persentase Tersedianya Benih Sayuran dan Rak Beserta Media Tanam	Persen	30,00	30,00		30,00								
		Keikutsertaan Dinas Dalam Promosi Pembangunan	Kali	1,00	1,00		1,00								
		Persentase Tersedianya Sarana Pertanian untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Persen	10,00	0,00		0,00								
		Tersedianya data Statistik Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Data	ada	tidak		tidak								
	4.1.4.20 Program Peningkatan Kualitas SDM Aparatur dan Kelembagaan	Persentase SDM yang Telah Mengikuti Diklat	Persen	30,00	30,00	623.593.100,00	30,00	623.593.100,00							
	4.1.4.21 Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Persentase Termonitornya Harga-Harga Komoditi Pertanian Ditingkat Usaha Tani	Persen	80,00	80,00	22.478.000,00	80,00	22.478.000,00							
		Cadangan Pangan Pemerintah	Ton	14,00	7,00		7,00								
		Ketersediaan Energi per Kapita (kcal/kap/hari)	Jumlah	2.286,00			2.286,00								
		Ketersediaan Protein per Kapita (gr/kap/hari)	Jumlah	71,98			71,98								
		Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	Persen	55,00			62,50								
	4.1.4.22 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Cadangan Pangan Pemerintah	Ton	14,00	10,00	3.279.460.800,00		10,00	720.488.500,00	10,00	800.488.500,00	10,00	770.347.000,00	10,00	988.136.800,00
		Ketersediaan Energi per Kapita	kcal/kap/hari	2.286,00	2.400,00			2.308,00		2.352,00		2.374,00		2.400,00	
		Ketersediaan Protein per Kapita	gr/kap/hari	71,98	71,98			71,98		71,98		71,98		71,98	
		Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	Persen	55,00	62,50			62,50		62,50		62,50		62,50	

Misi/Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Target RPJMD									
				2016		2017		2018		2019		2020	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	12		13		14		15		16	
	4.1.4.16 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Angka Perselisihan Pengusaha-Pekerja per Tahun	Angka	46,00	88.646.000,00	50,00	110.669.469,00						
		Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Jumlah	46,00		50,00							
		Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	Orang	92.025,00		103.262,00							
		Upah Minimum Kota	Rp	1.870.000		2.054.365							
	4.1.4.17 Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Kasus					53,00	109.717.205,00	34,00	147.534.926,00	32,76	198.092.200,00
		Angka Perselisihan Pengusaha-Pekerja per Tahun	Angka					53,00		55,00		65,00	
		Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	Orang					140.533		142.554		79.478	
		Persentase Penyelesaian Perselisihan Buruh dan Pengusaha terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah	Persen					100,00		100,00		100,00	
		Upah Minimum Kota	Rp					2.263.390,00		2.445.141,15		2.739.983	
	4.1.4.18 Program Pengembangan Masyarakat Melalui Transmigrasi	Cakupan Masyarakat di Wilayah Kumuh yang Mendapatkan Pemahaman Transmigrasi Dibandingkan Total Wilayah Kumuh	Persen						34.863.000,00	12,00	24.797.700,00	-	-
		Laju Inflasi	Persen	2,75		3,14		2,92		3,53		1,93	
		PDRB per Kapita (ADHK Tahun 2010)		32.933.856		34.374.187,00		35.871.912,00		37.456.633,00		33.151.383,00	
		PDRB per Kapita (ADHB)		44.843.785		49.298.501,00		52.823.565,00		56.469.729,00		50.665.005,00	
		Skor Pola Pangan Harapan	Skor	82,95		83,00		84,00		85,20		85,50	
	4.1.4.19 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian, Peternakan dan Kehutanan	Persentase Tersusunnya Pelaporan Monitoring dan Evaluasi	Persen	80,00	8.922.500,00								
		Persentase Tersedianya Benih Sayuran dan Rak Beserta Media Tanam	Persen	30,00									
		Keikutsertaan Dinas Dalam Promosi Pembangunan	Kali	1,00									
		Persentase Tersedianya Sarana Pertanian untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Persen	0,00									
		Tersedianya data Statistik Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Data	tidak									
	4.1.4.20 Program Peningkatan Kualitas SDM Aparatur dan Kelembagaan	Persentase SDM yang Telah Mengikuti Diklat	Persen	30,00	623.593.100,00								
	4.1.4.21 Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Persentase Termonitornya Harga-Harga Komoditi Pertanian Ditingkat Usaha Tani	Persen	80,00	22.478.000,00								
		Cadangan Pangan Pemerintah	Ton	7,00									
		Ketersediaan Energi per Kapita (kcal/kap/hari)	Jumlah	2.286,00									
		Ketersediaan Protein per Kapita (gr/kap/hari)	Jumlah	71,98									
		Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	Persen	62,50									
	4.1.4.22 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Cadangan Pangan Pemerintah	Ton			-	35.996.000,00	8,50	285.048.400,00	24,08	545.340.150,00	-	287.521.000,00
		Ketersediaan Energi per Kapita	kcal/kap/hari			-		2.286,00		3.339,00		2.490,00	
		Ketersediaan Protein per Kapita	gr/kap/hari			-		71,98		72,06		72,10	
		Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	Persen			62,50		60,00		80,00		85,00	

Misi/Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD (%)										Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Perangkat Daerah Pelaksana
				2016		2017		2018		2019		2020						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	17=12/7*100		18=13/8*100		19=14/9*100		20=15/10*100		21=16/11*100		22		23=22/6*100		29
4.1.4.16 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Angka Perselisihan Pengusaha-Pekerja per Tahun	Angka	100,00	100,00	100,00	93,24								199.315.469,00		96,13	Dinas Tenaga Kerja	
	Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Jumlah	100,00		100,00													
	Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	Orang	100,00		100,00													
	Upah Minimum Kota	Rp	100,00		100,00													
4.1.4.17 Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Kasus					100,00	92,44	60,71	78,14	56,48	67,47	58,00	455.344.331,00	100,00	75,75	Dinas Tenaga Kerja	
	Angka Perselisihan Pengusaha-Pekerja per Tahun	Angka					100,00		98,21		112,07		58,00		100,00			
	Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	Orang					134,33		118,57		558,68		14.226,00		100,00			
	Persentase Penyelesaian Perselisihan Buruh dan Pengusaha terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah	Persen					100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
	Upah Minimum Kota	Rp					100,00		98,06		106,99		2.560.904		100,00			
4.1.4.18 Program Pengembangan Masyarakat Melalui Transmigrasi	Cakupan Masyarakat di Wilayah Kumuh yang Mendapatkan Pemahaman Transmigrasi Dibandingkan Total Wilayah Kumuh	Persen					0,00	99,61	100,00	99,19		-	12,00	59.660.700,00	100,00	79,55	Dinas Tenaga Kerja	
	Laju Inflasi	Persen	100,00		100,32		106,85		87,25		157,51		1,93		157,51			
	PDRB per Kapita (ADHK Tahun 2010)		100,23		99,17		98,20		97,56		82,34		33.151.383		82,34			
	PDRB per Kapita (ADHB)												50.665.005					
	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	100,00		99,40		99,41		100,24		99,42		85,50		99,42			
4.1.4.19 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian, Peternakan dan Kehutanan	Persentase Tersusunnya Pelaporan Monitoring dan Evaluasi	Persen	100,00	100,00									80,00	8.922.500,00	100,00	100,00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian	
	Persentase Tersedianya Benih Sayuran dan Rak Beserta Media Tanam	Persen	100,00										30,00		100,00			
	Keikutsertaan Dinas Dalam Promosi Pembangunan	Kali	100,00										1,00		100,00			
	Persentase Tersedianya Sarana Pertanian untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Persen	-										-		-			
	Tersedianya data Statistik Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Data	-										tidak		-			
4.1.4.20 Program Peningkatan Kualitas SDM Aparatur dan Kelembagaan	Persentase SDM yang Telah Mengikuti Diklat	Persen	100,00	100,00									30,00	623.593.100,00	100,00	100,00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian	
4.1.4.21 Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Persentase Termonitornya Harga-Harga Komoditi Pertanian Ditingkat Usaha Tani	Persen	100,00	100,00									80,00	22.478.000,00	100,00	100,00	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian	
	Cadangan Pangan Pemerintah	Ton	100,00															
	Ketersediaan Energi per Kapita (kkal/kap/hari)	Jumlah	100,00															
	Ketersediaan Protein per Kapita (gr/kap/hari)	Jumlah	100,00															
	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	Persen	100,00															
4.1.4.22 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Cadangan Pangan Pemerintah	Ton			-	5,00	85,00	35,61	240,84	70,79	-	29,10	-	1.153.905.550,00	-	35,19	Dinas Pangan	
	Ketersediaan Energi per Kapita	kkal/kap/hari			-		97,19		140,65		103,75		2.490,00		103,75			
	Ketersediaan Protein per Kapita	gr/kap/hari			-		100,00		100,11		100,17		72,10		100,17			
	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	Persen				100,00		96,00		128,00		136,00		85,00		136,00		

Misi/Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Periode Perencanaan		Target RPJMD									
					2020		2016 (Realisasi)		2017		2018		2019		2020	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.1.4.23 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Hortikultura Ramah Lingkungan	Kontribusi Sub Sektor Pertanian Tanaman Hortikultura terhadap PDRB	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian Tanaman Hortikultura	Persen		0,14	604.364.150,00			0,14	85.000.000,00	0,14	70.000.000,00	0,14	127.693.000,00	0,14	321.671.150,00
		Data Potensi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Dokumen		12,15				12,15		12,15		12,15		12,15	
		Produksi Padi	Ton/Thn		1,00				1,00		1,00		1,00		1,00	
		Produksi Jagung	Ton/Thn						9.558,41		10.129,57					
		Desa yang Berbudidaya Sayuran Organik	Angka						512,49		402,42					
		Pusat Pelatihan Budidaya Hortikultura	Angka		1,00								1,00		0,00	
		Kontribusi Sektor Pertanian (palawija) terhadap PDRB	Persen		1,00										1,00	
		Kontribusi Sektor Perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	Persen		0,24				0,24		0,24		0,24		0,24	
		Kontribusi Sektor Perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	Persen		0,20				0,20		0,20		0,20		0,20	
		Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	Persen		0,02				0,02		0,02		0,02		0,02	
4.1.4.24	Program Pengembangan Data dan Informasi Statistik Daerah	Tersedianya Buku Pertanian dalam Angka	Dokumen	0,00	4	159.350.000,00			1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	39.350.000,00
4.1.4.25	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Produksi Tembakau	ton/tahun		29,75	2.748.358.100,00	6,75	2.694.548.700,00	25,65	53.809.400,00						
4.1.4.26	Program Peningkatan Penyaluran Pendidikan dan Pelatihan Pertanian	Persentase Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan Kompetensinya Melalui Pelatihan	Persen		10,00	1.785.097.250,00			10,00	130.000.000,00	10,00	486.000.000,00	10,00	1.027.116.000,00	10,00	141.981.250,00
4.1.4.27	Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian	Peningkatan Pendapatan Petani	Persen		20,00	360.418.412,00			5,00	118.058.412,00	5,00	150.000.000,00	5,00	92.360.000,00	5,00	-
4.1.4.28	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	Persen			7.334.000,00	67,85	7.334.000,00								
		Produksi Padi	Ton/Thn	9.250,00			9.410,75									
		Produksi Jagung	Ton/Thn	346,80			475,08									
4.1.4.29	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Jumlah Kasus Penyakit yang Berasal dari Hewan (rabies, antrax, flu burung dll)	Kasus			147.395.000,00	0,00	147.395.000,00								
		Produksi Daging	Ton/Thn	4.042,52			4.362,40									
4.1.4.30	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	Jumlah Kasus Penyakit yang Berasal dari Hewan (rabies, antrax, flu burung dll)	Kasus		0,00	1.375.335.072,00			0,00	80.000.000,00	0,00	1.035.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	180.335.072,00
		Produksi Daging	Ton/Thn	4.042,52	4.986,40				4.568,44		4.784,88		4.907,21		4.986,40	
4.1.4.31	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian, Peternakan dan Kehutanan	Sarana Pertanian untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Persen		27,95	100.217.250,00	27,95	100.217.250,00								
4.1.4.32	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan dan Kehutanan	Tersedianya Bibit Pala dan Cengkeh Unggul (Batang)	Jumlah			37.317.000,00	3.350,00	37.317.000,00								
4.1.4.33	Program Penguatan Kelembagaan Kelompok Petani Tembakau	Persentase Kelompok Petani Tembakau yang Dibina	Persen		70,00	1.364.649.571,00			50,00	534.824.771,00	70,00	829.824.800,00				
4.1.4.34	Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku	Persentase Luas Lahan Tembakau yang Menggunakan Bibit Tembakau Berkadar Nikotin Rendah	Persen		81,82	1.033.188.900,00			29,75	295.000.000,00			80,91	400.000.000,00	81,82	338.188.900,00
4.1.4.35	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Produksi Tanaman Pangan	Produksi Padi (ton/tahun)	Jumlah		10.337,83	247.250.000,00							10.337,83	247.250.000,00		
		Produksi Jagung (ton/tahun)	Jumlah		410,36								410,36			
4.1.4.36	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan Berkelanjutan	Persen		55,56	63.375.000,00									55,56	63.375.000,00
4.1.4.37	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Cakupan Kelompok Tani yang Mendapatkan Bantuan Sarana dan Prasarana Pertanian	Persen		35,00	6.431.381,00					35,00	6.431.381,00			35,00	-

Misi/Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Target RPJMD									
				2016		2017		2018		2019		2020	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	12		13		14		15		16	
4.1.4.23 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Hortikultura Ramah Lingkungan	Kontribusi Sub Sektor Pertanian Tanaman Hortikultura terhadap PDRB	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian Tanaman Hortikultura	Persen			0,14	82.205.500,00	0,14	65.660.000,00	0,14	84.638.500,00	0,14	69.879.000,00
		Data Potensi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Dokumen			1,00		1,00		1,00		1,00	
		Produksi Padi	Ton/Thn			9.558,41		9.827,76					
		Produksi Jagung	Ton/Thn			512,49		1.005,00					
		Desa yang Berbudidaya Sayuran Organik	Angka							1,00		0,00	
		Pusat Pelatihan Budidaya Hortikultura	Angka									1,00	
		Kontribusi Sektor Pertanian (palawija) terhadap PDRB	Persen			0,24		0,24		0,24		0,24	
		Kontribusi Sektor Perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	Persen			0,20		0,20		0,20		0,20	
		Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	Persen			0,02		0,02		0,02		0,02	
	4.1.4.24 Program Pengembangan Data dan Informasi Statistik Daerah	Tersedianya Buku Pertanian dalam Angka	Dokumen			1	37.095.000,00	1	36.295.000,00	1	34.645.000,00	-	-
	4.1.4.25 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Produksi Tembakau	ton/tahun	6,75	2.694.548.700,00	25,65	-						
	4.1.4.26 Program Peningkatan Penyaluran Pendidikan dan Pelatihan Pertanian	Persentase Penyaluran Pertanian yang Ditingkatkan Kompetensinya Melalui Pelatihan	Persen			10,00	100.733.800,00	100,00	461.868.500,00	26,92	997.557.050,00	10,00	-
	4.1.4.27 Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian	Peningkatan Pendapatan Petani	Persen			5,00	62.147.500,00	5,00	106.937.000,00	31,96	76.133.500,00	4,00	-
	4.1.4.28 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	Persen	67,85	7.334.000,00								
		Produksi Padi	Ton/Thn	9.410,75									
		Produksi Jagung	Ton/Thn	475,08									
	4.1.4.29 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Jumlah Kasus Penyakit yang Berasal dari Hewan (rabies, antrax, flu burung dll)	Kasus	0,00	147.395.000,00								
		Produksi Daging	Ton/Thn	4.362,40									
	4.1.4.30 Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	Jumlah Kasus Penyakit yang Berasal dari Hewan (rabies, antrax, flu burung dll)	Kasus			0,00	47.510.000,00	0,00	1.007.018.350,00	0,00	79.041.000,00	0,00	87.227.000,00
		Produksi Daging	Ton/Thn			4.568,44		5.219,76		5.474,75		5.078,67	
	4.1.4.31 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian, Peternakan dan Kehutanan	Sarana Pertanian untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Persen	27,95	100.217.250,00								
	4.1.4.32 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan dan Kehutanan	Tersedianya Bibit Pala dan Cengkeh Unggul (Batang)	Jumlah	3.350,00	37.317.000,00								
	4.1.4.33 Program Penguatan Kelembagaan Kelompok Petani Tembakau	Persentase Kelompok Petani Tembakau yang Dibina	Persen			-	-	58,00	459.378.925,00				
	4.1.4.34 Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku	Persentase Luas Lahan Tembakau yang Menggunakan Bibit Tembakau Berkadar Nikotin Rendah	Persen			29,75	271.745.000,00			100,00	133.484.000,00	70,00	234.620.900,00
	4.1.4.35 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Produksi Tanaman Pangan	Produksi Padi (ton/tahun)	Jumlah							9.269,65	-		
		Produksi Jagung (ton/tahun)	Jumlah							771,91			
	4.1.4.36 Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan Berkelanjutan	Persen									96,24	60.990.000,00
	4.1.4.37 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Cakupan Kelompok Tani yang Mendapatkan Bantuan Sarana dan Prasarana Pertanian	Persen					35,00	-			50,00	-

Misi/Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD (%)										Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Perangkat Daerah Pelaksana
				2016		2017		2018		2019		2020						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	17=12/7*100		18=13/8*100		19=14/9*100		20=15/10*100		21=16/11*100		22		23=22/6*100		29
4.1.4.23 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Holtikultura Ramah Lingkungan	Kontribusi Sub Sektor Pertanian Tanaman Hortikultura terhadap PDRB	Persen			100,00	96,71	100,00	93,80	100,00	66,28	100,00	21,72	0,14	302.383.000,00	100,00	50,03	Dinas Pertanian	
	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian Tanaman Hortikultura	Persen			100,00		100,00		100,00		100,00		12,15		100,00			
	Data Potensi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Dokumen			100,00		100,00		100,00		100,00		1,00		100,00			
	Produksi Padi	Ton/Thn			100,00		97,02											
	Produksi Jagung	Ton/Thn			100,00		249,74											
	Desa yang Berbudidaya Sayuran Organik	Angka						100,00		100,00		1,00		100,00				
	Pusat Pelatihan Budidaya Hortikultura	Angka									1,00		100,00					
	Kontribusi Sektor Pertanian (palawija) terhadap PDRB	Persen			100,00		100,00		100,00		100,00		0,24		100,00			
	Kontribusi Sektor Perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	Persen			100,00		100,00		100,00		100,00		0,20		100,00			
	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	Persen			100,00		100,00		100,00		100,00		0,02		100,00			
4.1.4.24 Program Pengembangan Data dan Informasi Statistik Daerah	Tersedianya Buku Pertanian dalam Angka	Dokumen			100,00	92,74	100,00	90,74	100,00	86,61	-	-	3	108.035.000,00	75,00	67,80	Dinas Pertanian	
4.1.4.25 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Produksi Tembakau	ton/tahun	100,00	100,00	100,00	-							25,65	2.694.548.700,00	86,22	98,04	Dinas Pertanian	
4.1.4.26 Program Peningkatan Penyuluhan Pendidikan dan Pelatihan Pertanian	Persentase Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan Kompetensinya Melalui Pelatihan	Persen			100,00	77,49	1.000,00	95,03	269,20	97,12	100,00	-	10,00	1.560.159.350,00	100,00	87,40	Dinas Pertanian	
4.1.4.27 Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian	Peningkatan Pendapatan Petani	Persen			100,00	52,64	100,00	71,29	639,20	82,43	80,00	-	45,96	245.218.000,00	229,80	68,04	Dinas Pertanian	
4.1.4.28 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	Persen	100,00	100,00										7.334.000,00		100,00	Dinas Pertanian	
	Produksi Padi	Ton/Thn	100,00															
	Produksi Jagung	Ton/Thn	100,00															
4.1.4.29 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Jumlah Kasus Penyakit yang Berasal dari Hewan (rabies, antrax, flu burung dll)	Kasus	100,00	100,00										147.395.000,00		100,00	Dinas Pertanian	
	Produksi Daging	Ton/Thn	100,00															
4.1.4.30 Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	Jumlah Kasus Penyakit yang Berasal dari Hewan (rabies, antrax, flu burung dll)	Kasus			100,00	59,39	100,00	97,30	100,00	98,80	100,00	48,37	0,00	1.220.796.350,00	100,00	88,76	Dinas Pertanian	
	Produksi Daging	Ton/Thn			100,00		109,09		111,57		101,85		5.078,67		101,85			
4.1.4.31 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian, Peternakan dan Kehutanan	Sarana Pertanian untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Persen	100,00	100,00									27,95	100.217.250,00	100,00	100,00	Dinas Pertanian	
4.1.4.32 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan dan Kehutanan	Tersedianya Bibit Pala dan Cengkeh Unggul (Batang)	Jumlah	100,00	100,00										37.317.000,00		100,00	Dinas Pertanian	
4.1.4.33 Program Penguatan Kelembagaan Kelompok Petani Tembakau	Persentase Kelompok Petani Tembakau yang Dibina	Persen				-	-	82,86	55,36					58,00	459.378.925,00	82,86	33,66	Dinas Pertanian
4.1.4.34 Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku	Persentase Luas Lahan Tembakau yang Menggunakan Bibit Tembakau Berkadar Nikotin Rendah	Persen			100,00	92,12				123,59	33,37	85,55	69,38	70,00	639.849.900,00	85,55	61,93	Dinas Pertanian
4.1.4.35 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Produksi Tanaman Pangan	Produksi Padi (ton/tahun)	Jumlah							89,67	-			9.269,65	-	89,67	0,00	Dinas Pertanian	
	Produksi Jagung (ton/tahun)	Jumlah							188,10				771,91		188,10			
4.1.4.36 Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan Berkelanjutan	Persen									173,22	96,24	96,24	60.990.000,00	173,22	96,24	Dinas Pertanian	
4.1.4.37 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Cakupan Kelompok Tani yang Mendapatkan Bantuan Sarana dan Prasarana Pertanian	Persen					100,00	-			142,86	-	50,00	-	142,86	-	Dinas Pertanian	

Misi/Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Periode Perencanaan		Target RPJMD									
					2020		2016 (Realisasi)		2017		2018		2019		2020	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	
	4.1.4.38 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Pembinaan, Monitoring dan koordinasi Penatausahaan Hasil Hutan	Persen		100,00	19.649.500,00	100,00	19.649.500,00								
	4.1.4.39 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Persentase Administrasi Penunjang Kegiatan Rehabilitasi Lahan dan Lingkungan	Persen		100,00	966.216.050,00	100,00	954.181.200,00	100,00	12.034.850,00						
		Persentase Penghijauan Lingkungan	Persen		100,00		100,00		100,00							
		Persentase Pengembangan Tanaman Bambu	Persen		100,00		100,00		100,00							
	4.1.4.40 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Persentase Pengendalian Satwa Liar di Hutan Kera Tirtosari	Persen		100,00	2.954.000,00	100,00	2.954.000,00								
		Persentase Pemeliharaan Tata Batas Kawasan Hutan Register 19 Tahura	Persen		100,00		100,00									
	4.1.4.41 Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	217,49	131,01	2.077.264.600,00			118,23	901.174.000,00	122,17	653.060.350,00	125,14	84.800.000,00	131,01	438.230.250,00
	4.1.4.42 Program Peningkatan dan Pengembangan Produksi Perikanan Budi Daya	Nilai Tukar Pembudidayaan Ikan	Jumlah		103,00	315.019.850,00	102,30	305.160.900,00	103,00	9.858.950,00						
		Nilai Tukar Nelayan	Jumlah		102,10		101,00		102,10							
		Produksi Perikanan Budidaya	Ton	217,49			110,31									
	4.1.4.43 Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	33.925,00	703,11	1.370.136.100,00	628,76	622.629.800,00	613,10	337.250.000,00	651,08	184.100.000,00	680,33	101.070.000,00	703,11	125.086.300,00
		Cakupan Bina Kelompok Nelayan Dibandingkan Jumlah Kelompok Nelayan	Kelompok		33,00		13,00		17,00		22,00		28,00		33,00	
	4.1.4.44 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Persentase Peningkatan Nilai Tambah Produk Perikanan	Persen		8,30	541.437.050,00			6,30	137.577.000,00	6,80	169.572.800,00	7,10	93.022.500,00	7,40	141.264.750,00
	4.1.4.45 Program Meta Data, Informasi dan Inovasi Potensi Kelautan dan Perikanan	Persentase Ketersediaan Jenis dan Ragam Data Kelautan dan Perikanan	Persen		57,00	96.130.000,00					29,00	9.900.000,00	35,00	60.650.000,00	57,00	25.580.000,00
	4.1.4.46 Program Perumusan Kebijakan Bidang Kelautan dan Perikanan	Jumlah Kebijakan Terbaru yang Ditetapkan Cakupan Perikanan dan Kelautan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Dokumen		3	7.565.000,00	1				2	7.565.000,00				
	4.1.4.47 Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan	Persen		100,00	109.735.000,00			100,00	109.735.000,00						
	4.1.4.48 Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan	Nilai Konsumsi Ikan (kg/perkapita/tahun)	Jumlah	27,83		391.044.000,00	29,08	381.094.000,00	30,93	9.950.000,00						
	4.1.4.49 Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Ketersediaan Dana Pendamping	Persen		10,00	101.240.000,00	10,00	101.240.000,00								
	4.1.4.50 Program Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Cakupan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Dikelola	Persen		99,17	13.900.000,00	99,17	13.900.000,00								
	4.1.4.51 Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Persentase Tingkat Keamanan Pangan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Persen		16,50	121.925.000,00					4,00	78.500.000,00	12,50	43.425.000,00		
	4.1.4.52 Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim	Nilai Konsumsi Ikan	kg/perkapita/tahun		33,28	301.921.000,00					31,54	62.500.000,00	31,78	35.375.000,00	33,20	204.046.000,00
	4.1.4.53 Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	Cakupan Usaha Kecil Masyarakat Kelautan Perikanan yang Dibantu	Persen			776.061.000,00			3,00	776.061.000,00						
	4.1.4.54 Program Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan	Cakupan Usaha Kecil Masyarakat Kelautan Perikanan yang Dibantu	Persen		90,00	1.313.717.650,00					15,00	354.789.650,00	21,00	737.324.000,00	26,00	221.604.000,00

Misi/Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Target RPJMD									
				2016		2017		2018		2019		2020	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	12		13		14		15		16	
	4.1.4.38 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Pembinaan, Monitoring dan koordinasi Penatausahaan Hasil Hutan	Persen	100,00	19.649.500,00								
	4.1.4.39 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Persentase Administrasi Penunjang Kegiatan Rehabilitasi Lahan dan Lingkungan	Persen	100,00	954.181.200,00	100,00	-						
		Persentase Penghijauan Lingkungan	Persen	100,00		100,00							
		Persentase Pengembangan Tanaman Bambu	Persen	100,00		100,00							
	4.1.4.40 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Persentase Pengendalian Satwa Liar di Hutan Kera Tirtosari	Persen	100,00	2.954.000,00								
		Persentase Pemeliharaan Tata Batas Kawasan Hutan Register 19 Tahura	Persen	100,00									
	4.1.4.41 Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi Perikanan Budidaya	Ton			118,23	855.879.500,00	122,17	541.799.250,00	115,55	82.800.000,00	100,30	190.600.000,00
	4.1.4.42 Program Peningkatan dan Pengembangan Produksi Perikanan Budi Daya	Nilai Tukar Pembudidayaan Ikan	Jumlah	102,30	305.160.900,00	103,00	-						
		Nilai Tukar Nelayan	Jumlah	101,00		102,10							
		Produksi Perikanan Budidaya	Ton	110,31									
	4.1.4.43 Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	628,76	622.629.800,00	613,10	318.440.000,00	651,08	158.977.500,00	3.404,00	100.551.000,00	459,67	93.163.500,00
		Cakupan Bina Kelompok Nelayan Dibandingkan Jumlah Kelompok Nelayan	Kelompok	13,00		17,00		6,00		28,00		33,00	
	4.1.4.44 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Persentase Peningkatan Nilai Tambah Produk Perikanan	Persen			6,30	72.473.500,00	6,80	153.479.500,00	7,10	90.605.580,00	4,00	-
	4.1.4.45 Program Meta Data, Informasi dan Inovasi Potensi Kelautan dan Perikanan	Persentase Ketersediaan Jenis dan Ragam Data Kelautan dan Perikanan	Persen					29,00	3.975.000,00	20,00	34.900.000,00	50,00	25.580.000,00
	4.1.4.46 Program Perumusan Kebijakan Bidang Kelautan dan Perikanan	Jumlah Kebijakan Terbaru yang Ditetapkan: Cakupan Perikanan dan Kelautan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Dokumen	1	-			-					
	4.1.4.47 Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan	Persen			100,00	104.443.850,00						
	4.1.4.48 Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan	Nilai Konsumsi Ikan (kg/perkapita/tahun)	Jumlah	29,08	381.094.000,00	30,93	-						
	4.1.4.49 Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Ketersediaan Dana Pendamping	Persen	10,00	101.240.000,00								
	4.1.4.50 Program Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Cakupan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Dikelola	Persen	99,17	13.900.000,00								
	4.1.4.51 Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Persentase Tingkat Keamanan Pangan	Persen					4,00	62.147.500,00	12,50	40.106.000,00		
	4.1.4.52 Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim	Nilai Konsumsi Ikan	kg/perkapita/tahun					31,72	55.092.000,00	35,81	30.975.000,00	41,22	-
	4.1.4.53 Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	Cakupan Usaha Kecil Masyarakat Kelautan Perikanan yang Dibantu	Persen			3,00	723.983.300,00						
	4.1.4.54 Program Pemberdayaan Usaha Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan	Cakupan Usaha Kecil Masyarakat Kelautan Perikanan yang Dibantu	Persen					15,00	337.561.000,00	21,00	718.794.600,00	217,04	188.600.000,00

Misi/Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD (%)										Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Perangkat Daerah Pelaksana
				2016		2017		2018		2019		2020						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	17=12/7*100		18=13/8*100		19=14/9*100		20=15/10*100		21=16/11*100		22		23=22/6*100		29
	4.1.4.38 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Pembinaan, Monitoring dan koordinasi Penatausahaan Hasil Hutan	Persen	100,00	100,00									100,00	19.649.500,00	100,00	100,00	Dinas Pertanian
	4.1.4.39 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Persentase Administrasi Penunjang Kegiatan Rehabilitasi Lahan dan Lingkungan	Persen	100,00	100,00	100,00								100,00	954.181.200,00	100,00	98,75	Dinas Pertanian
		Persentase Penghijauan Lingkungan	Persen	100,00							100,00	100,00						
		Persentase Pengembangan Tanaman Bambu	Persen	100,00							100,00	100,00						
	4.1.4.40 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Persentase Pengendalian Satwa Liar di Hutan Kera Tirtosari	Persen	100,00	100,00									100,00	2.954.000,00	100,00	100,00	Dinas Pertanian
		Persentase Pemeliharaan Tata Batas Kawasan Hutan Register 19 Tahura	Persen	100,00								100,00	100,00					
	4.1.4.41 Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi Perikanan Budidaya	Ton			100,00	94,97	100,00	82,96	92,34	97,64	76,56	43,49	100,30	1.671.078.750,00	76,56	80,45	Dinas Kelautan dan Perikanan
	4.1.4.42 Program Peningkatan dan Pengembangan Produksi Perikanan Budi Daya	Nilai Tukar Pembudidayaan Ikan	Jumlah	100,00	100,00	100,00								103,00	305.160.900,00	100,00	96,87	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Nilai Tukar Nelayan	Jumlah	100,00	100,00								102,10	100,00				
		Produksi Perikanan Budidaya	Ton	100,00														
	4.1.4.43 Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	100,00	100,00	100,00	94,42	100,00	86,35	500,35	99,49	65,38	74,48	459,67	1.293.761.800,00	65,38	94,43	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Cakupan Bina Kelompok Nelayan Dibandingkan Jumlah Kelompok Nelayan	Kelompok	100,00	100,00		27,27		100,00		100,00		33,00	100,00				
	4.1.4.44 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Persentase Peningkatan Nilai Tambah Produk Perikanan	Persen			100,00	52,68	100,00	90,51	100,00	97,40	54,05		4,00	316.558.580,00	48,19	58,47	Dinas Kelautan dan Perikanan
	4.1.4.45 Program Meta Data, Informast dan Inovasi Potensi Kelautan dan Perikanan	Persentase Ketersediaan Jenis dan Ragam Data Kelautan dan Perikanan	Persen					100,00	40,15	57,14	57,54	87,72	100,00	50,00	64.455.000,00	87,72	67,05	Dinas Kelautan dan Perikanan
	4.1.4.46 Program Perumusan Kebijakan Bidang Kelautan dan Perikanan	Jumlah Kebijakan Terbaru yang Ditetapkan Cakupan Perikanan dan Kelautan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	100,00	-				-	-				1	-	33,33	-	Dinas Kelautan dan Perikanan
	4.1.4.47 Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan	Persen			100,00	95,18							100,00	104.443.850,00	100,00	95,18	Dinas Kelautan dan Perikanan
	4.1.4.48 Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan	Nilai Konsumsi Ikan (kg/perkapita/tahun)	Jumlah	100,00	100,00	100,00		-							381.094.000,00		97,46	Dinas Kelautan dan Perikanan
	4.1.4.49 Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Ketersediaan Dana Pendamping	Persen	100,00	100,00									10,00	101.240.000,00	100,00	100,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
4.1.4.50 Program Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Cakupan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Dikelola	Persen	100,00	100,00									99,17	13.900.000,00	100,00	100,00	Dinas Kelautan dan Perikanan	
4.1.4.51 Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Persentase Tingkat Keamanan Pangan	Persen					100,00	79,17	100,00	92,36			16,50	102.253.500,00	100,00	83,87	Dinas Kelautan dan Perikanan	
4.1.4.52 Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim	Nilai Konsumsi Ikan	kg/perkapita/tahun					100,57	88,15	112,68	87,56	124,16		124,16	86.067.000,00	373,08	28,51	Dinas Kelautan dan Perikanan	
4.1.4.53 Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	Cakupan Usaha Kecil Masyarakat Kelautan Perikanan yang Dibantu	Persen			100,00	93,29								723.983.300,00		93,29	Dinas Kelautan dan Perikanan	
4.1.4.54 Program Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan	Cakupan Usaha Kecil Masyarakat Kelautan Perikanan yang Dibantu	Persen					100,00	95,14	100,00	97,49	834,78	85,11	217,04	1.244.955.600,00	241,16	94,77	Dinas Kelautan dan Perikanan	

Misi/Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD										
					2020		2016 (Realisasi)		2017		2018		2019		2020	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	
5. MENGEKSPANSI MASYARAKAT AGAMIS DAN BERBUDAYA																
5.1 Terwujudnya Masyarakat yang Aman, Tertib, dan Memelihara Warisan Budaya		Angka Kriminalitas	Angka	3.038,00	2.597											
		Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Lestari	Angka	0,00	4											
5.1.1 Meningkatnya Rasa Aman di Masyarakat		Angka Kriminalitas	Angka	3.038,00	2.597		3.293		3.029		2.878		2.734		2.597	
	5.1.1.1 Program Pemeliharaan Kontrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persen	80,00	80,00	1.951.604.334,00	80,00	477.769.606,00	80,00	401.584.728,00	80,00	400.000.000,00	80,00	450.000.000,00	80,00	222.250.000,00	
	5.1.1.2 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan Petugas Linmas	Persen	100,00	100,00	5.410.504.461,00	100,00	-	100,00	1.530.474.964,00	100,00	1.444.295.964,00	100,00	1.455.025.964,00	100,00	980.707.569,00
		Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	Persen	70,00	76,00		74,00		76,00		76,00		80,00		76,00	
		Persentase Penegakan PERDA	Persen	70,00	76,00		74,00		76,00		76,00		80,00		76,00	
		Persentase Konflik Sosial yang Terselesaikan	Persen	60,00	80,00	3.193.741.960,00	60,00	1.395.121.960,00	75,00	248.000.000,00	80,00	373.000.000,00	80,00	423.000.000,00	80,00	754.620.000,00
		Persentase SDM yang Mempunyai Kemampuan Deteksi Dini, Cegah Dini dan Tangkal Dini terhadap Kerawanan Konflik Sosial	Persen	60,00	60,00				60,00		60,00		60,00		60,00	
	5.1.1.3 Program Pembinaan dan Bantuan Terhadap Kehidupan Beragama	Persentase Organisasi Keagamaan yang Dibina	Persen		70,00	267.678.400,00	65,90	142.678.400,00	70,00	125.000.000,00						
	5.1.1.4 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Tingkat Partisipasi RT dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persen	70,00	70,00	3.325.437.150,00	70,00	312.392.150,00	70,00	780.000.000,00	70,00	725.000.000,00	70,00	475.000.000,00	70,00	1.033.045.000,00
	5.1.1.5 Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase Anggota Parpol yang Meningkatkan Pemahamannya tentang Demokrasi	Persen		95,00	1.472.288.875,00	95,00	22.288.875,00		45.000.000,00		530.000.000,00		475.000.000,00		400.000.000,00
		Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Kota	Persen		60,00											
		Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Provinsi	Persen		70,00						70,00					
		Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Legislatif	Persen		70,00								70,00			
		Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Presiden	Persen		70,00								70,00			
		Persentase Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak yang Terselesaikan	Persen	35,00	48,00		37,00		40,00		42,00		45,00		48,00	
	5.1.1.7 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persen	100,00		124.772.350,00	100,00	124.772.350,00								
		Persentase Aktivis Perempuan dalam Penanganan Kasus Kekerasan di Masyarakat (persen per 1000 perempuan)	Persen				6,33									
	5.1.1.8 Program Data dan Informasi Gender dan Anak	Tersedianya Informasi Data Gender dan Anak	Data		ada	688.449.000,00			ada	211.699.000,00	ada	160.250.000,00	ada	198.250.000,00	ada	118.250.000,00
		Persentase Aktivis Perempuan dalam Penanganan Kasus Kekerasan di Masyarakat (persen per 100.000 perempuan)	Persen		137,00				57,70		81,18		109,00		137,00	
	5.1.2 Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya Daerah		Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Lestari	Angka	0	3	-	0		0		1		1		1
5.1.2.1 Program Pengelolaan Keragaman Budaya		Penyelenggaraan Festival dan Budaya	Kali		5	1.288.787.400,00	5	67.470.000,00	5	641.317.400,00	5	200.000.000,00	5	190.000.000,00	5	190.000.000,00
5.1.2.2 Program Pengembangan Seni dan Nilai Budaya		Jumlah Promosi Budaya yang Diselenggarakan/Dikuti	Even		10,00	5.863.422.500,00	10,00	1.303.422.500,00	10,00	1.680.000.000,00	10,00	1.170.000.000,00	10,00	730.000.000,00	10,00	980.000.000,00
		Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Lestari	Angka		0	3		0		0		1		1		1
		Persentase Sanggar Seni yang Aktif	Persen		63,49	100,00		71,42		79,36		100,00		100,00		100,00
5.1.2.3 Program Pembinaan Seni dan Nilai Budaya	Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Diinventarisasi	Angka		90,00	425.000.000,00						80,00		250.000.000,00	90,00	175.000.000,00	

Misi/Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Target RPJMD									
				2016		2017		2018		2019		2020	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	12		13		14		15		16	
5. MENGEKSPANSI MASYARAKAT AGAMIS DAN BERBUDAYA													
5.1 Terwujudnya Masyarakat yang Aman, Tertib, dan Memelihara Warisan Budaya		Angka Kriminalitas	Angka										
		Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Lestari	Angka										
5.1.1 Meningkatnya Rasa Aman di Masyarakat		Angka Kriminalitas	Angka	3.293		3.173		1.870		1.734		3.349	
	5.1.1.1 Program Pemeliharaan Kantirantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persen	80,00	477.769.606,00	-	-	80,00	359.182.230,00	80,00	389.680.641,00	100,00	217.750.000,00	
	5.1.1.2 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan Petugas Linmas	Persen	100,00	-	100,00	646.767.700,00	100,00	1.097.247.278,00	100,00	1.025.595.700,00	100,00	58.499.300,00
		Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	Persen	74,00		76,00		76,00		100,00		100,00	
		Persentase Penegakan PERDA	Persen	74,00		76,00		76,00		100,00		76,00	
		Persentase Konflik Sosial yang Terelesaikan	Persen	60,00	1.395.121.960,00	75,00	39.384.920,00	80,00	332.660.995,00	82,00	369.627.520,00	60,00	600.835.000,00
		Persentase SDM yang Mempunyai Kemampuan Deteksi Dini, Cegah Dini dan Tangkal Dini terhadap Kerawanan Konflik Sosial	Persen			60,00		60,00		70,00		70,00	
	5.1.1.3 Program Pembinaan dan Bantuan Terhadap Kehidupan Beragama	Persentase Organisasi Keagamaan yang Dibina	Persen	65,90	142.678.400,00	70,00	488.167,00						
	5.1.1.4 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Tingkat Partisipasi RT dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persen	70,00	312.392.150,00	70,00	871.292.550,00	70,00	718.509.859,00	70,00	450.536.667,00	70,00	587.890.854,00
	5.1.1.5 Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase Anggota Parpol yang Meningkatkan Pemahamannya tentang Demokrasi	Persen	95,00	22.288.875,00		-		385.109.140,00		441.967.720,00		105.150.000,00
		Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Kota	Persen										
		Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Provinsi	Persen					70,00					
		Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Legislatif	Persen							88,00			
		Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Presiden	Persen							87,00			
		Persentase Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak yang Terelesaikan	Persen	37,00		35,23		66,00		86,00		100,00	
	5.1.1.7 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persen	100,00	124.772.350,00								
		Persentase Aktivis Perempuan dalam Penanganan Kasus Kekerasan di Masyarakat (persen per 1000 perempuan)	Persen	6,33									
	5.1.1.8 Program Data dan Informasi Gender dan Anak	Tersedianya Informasi Data Gender dan Anak	Data			ada	132.372.983,00	ada	104.987.200,00	ada	189.836.000,00	ada	-
		Persentase Aktivis Perempuan dalam Penanganan Kasus Kekerasan di Masyarakat (persen per 100.000 perempuan)	Persen			55,00		80,19		147,00		147,00	
5.1.2 Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya Daerah		Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Lestari	Angka	0		0		0		0		0	
	5.1.2.1 Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Penyelenggaraan Festival dan Budaya	Kali	5	67.470.000,00	5	95.790.500,00	1	92.891.000,00	1	189.100.000,00	-	-
	5.1.2.2 Program Pengembangan Seni dan Nilai Budaya	Jumlah Promosi Budaya yang Diselenggarakan/Dikuti	Even	10,00	1.303.422.500,00	10,00	528.591.550,00	-	376.902.050,00	1,00	702.412.000,00	-	4.750.000,00
		Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Lestari	Angka	0		0		-		-		-	
		Persentase Sanggar Seni yang Aktif	Persen	71,42		79,36		100,00		47,14			
	5.1.2.3 Program Pembinaan Seni dan Nilai Budaya	Jumlah Karya Budaya yang Drevitalisasi dan Diinventarisasi	Angka							52,00	-	-	-

Misi/Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD (%)										Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Perangkat Daerah Pelaksana		
				2016		2017		2018		2019		2020		K	Rp	K	Rp			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	17=12/7*100		18=13/8*100		19=14/9*100		20=15/10*100		21=16/11*100		K	Rp	K	Rp	29		
														22		23=22/6*100				
5. MENGEKSPANSI MASYARAKAT AGAMIS DAN BERBUDAYA																				
5.1 Terwujudnya Masyarakat yang Aman, Tertib, dan Memelihara Warisan Budaya		Angka Kriminalitas	Angka											3349		77,55				
		Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Lestari	Angka											-		-				
5.1.1 Meningkatnya Rasa Aman di Masyarakat		Angka Kriminalitas	Angka	100,00		95,46		153,90		157,67		77,55		3.349		77,55				
	5.1.1.1	Program Pemeliharaan Kantarantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persen	100,00	100,00	-	-	100,00	89,80	100,00	86,60	125,00	97,98	100,00	1.444.382.477,00	125,00	74,01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
	5.1.1.2	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan Petugas Linmas	Persen	100,00	-	100,00	42,26	100,00	75,97	100,00	70,49	100,00	5,97	100,00	2.828.109.978,00	100,00	52,27	Satuan Polisi Pamong Praja	
			Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	Persen	100,00		100,00		100,00		125,00		131,58		100,00		131,58			
			Persentase Penegakan PERDA	Persen	100,00		100,00		100,00		125,00		100,00		76,00		100,00			
			Persentase Konflik Sosial yang Terelesaikan	Persen	100,00	100,00	100,00	15,88	100,00	89,19	102,50	87,38	75,00	79,62	60,00	2.737.630.395,00	75,00	85,72		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Persentase SDM yang Mempunyai Kemampuan Deteksi Dini, Cegah Dini dan Tangkal Dini terhadap Kerawanan Konflik Sosial	Persen			100,00				116,67		116,67		70,00		116,67			
	5.1.1.3	Program Pembinaan dan Bantuan Terhadap Kehidupan Beragama	Persen	100,00	100,00	100,00	0,39							70,00	143.166.567,00	100,00	53,48	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
	5.1.1.4	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persen	100,00	100,00	100,00	111,70	100,00	99,10	100,00	94,85	100,00	56,91	70,00	2.940.622.080,00	100,00	88,43	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
	5.1.1.5	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase Anggota Parpol yang Meningkatkan Pemahamannya tentang Demokrasi	Persen	100,00	100,00	-	-	72,66		93,05		26,29	95,00	954.515.735,00	100,00	64,83	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
			Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Kota	Persen			-							60,00		100,00				
			Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Provinsi	Persen			-		100,00					70,00		100,00				
			Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Legislatif	Persen			-				125,71			88,00		125,71				
			Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Presiden	Persen			-				124,29			87,00		124,29				
			Persentase Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak yang Terelesaikan	Persen	100,00		88,08		157,14		191,11		208,33	100,00		208,33				
	5.1.1.7	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persen	100,00	100,00									124.772.350,00		100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
			Persentase Aktivis Perempuan dalam Penanganan Kasus Kekerasan di Masyarakat (persen per 1000 perempuan)	Persen	100,00															
	5.1.1.8	Program Data dan Informasi Gender dan Anak	Tersedianya Informasi Data Gender dan Anak	Data			100,00	62,53	100,00	65,51	100,00	95,76	100,00	0,00	ada	427.196.183,00	100,00	62,05	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Persentase Aktivis Perempuan dalam Penanganan Kasus Kekerasan di Masyarakat (persen per 100.000 perempuan)	Persen			95,32		98,78		134,86		107,30		147,00		107,30			
5.1.2 Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya Daerah		Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Lestari	Angka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-			
	5.1.2.1	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Kali	100,00	100,00	100,00	14,94	20,00	46,45	20,00	99,53	-	-	-	445.251.500,00	-	34,55	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	5.1.2.2	Program Pengembangan Seni dan Nilai Budaya	Jumlah Promosi Budaya yang Diselenggarakan/Dikuti	Even	100,00	100,00	100,00	31,46	-	32,21	10,00	96,22	-	0,48	-	2.916.078.100,00	-	49,73	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Lestari	Angka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			Persentase Sanggar Seni yang Aktif	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	47,14	0,00	-	-	-	-					
	5.1.2.3	Program Pembinaan Seni dan Nilai Budaya	Jumlah Karya Budaya yang Drevitalisasi dan Diinventarisasi	Angka							65,00	-	0,00	-	52,00	-	57,78	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

Misi/Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Periode Perencanaan		Target RPJMD									
					2020		2016 (Realisasi)		2017		2018		2019		2020	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	
6. MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH SERTA BERORIENTASI KEMITRAAN DENGAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA																
6.1 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel, Transparan, Taat Hukum, Partisipatif, Demokratis, dan Responsif		Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	Skor	55,79	87,00											
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Angka	44,77	64,00											
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat	B	A											
		Opini Wajar Tanpa Pengecualian BPK	Predikat	WTP	WTP											
6.1.1 Meningkatnya Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Bandar Lampung		Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	skor	55,79	87,00		60,56		74,21		80,00		85,00		87,00	
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Angka	44,77	62,00		45,29		48,90		50,01		60,01		62,00	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat	B	A		B		B		B		B		A	
	6.1.1.1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Kebijakan KDH	Persentase Tindak Lanjut Temuan	Persen	-	90,00	8.947.266.437,00	80,00	1.026.364.285,00	80,00	970.316.534,00	85,00	1.220.316.534,00	85,00	2.025.000.000,00	90,00	3.705.269.084,00
		Jumlah Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda (SPT)	SPT	70,00	55,00		60,00		60,00		60,00		55,00		55,00	
		Jumlah Temuan BPK Tahun Berjalan	Temuan	50,00	40,00		50,00		45,00		45,00		40,00		40,00	
		Persentase Kepatuhan Pelaporan Wajib LHKPN/LHKASN	Persen	20,00	50,00		20,00		20,00		30,00		40,00		50,00	
	6.1.1.2 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Pemenuhan Infrastruktur Kapabilitas APP	Level	2	3	457.391.255,00	2	75.391.255,00	2	95.000.000,00	3	95.000.000,00	3	95.000.000,00	3	97.000.000,00
		Tingkat Kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	2	3		2		2		3		3		3	
	6.1.1.6 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas Aparatur	Persen			626.357.800,00	100,00	626.357.800,00								
		Cakupan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa Melalui SPSE	Persen				100,00									
	6.1.1.3 Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Pengaduan Pelayanan Publik yang Ditangani	Persen		95,00	2.128.846.220,00	95,00	288.858.920,00	95,00	632.215.000,00	95,00	360.000.000,00	95,00	455.000.000,00	95,00	392.772.300,00
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Angka	44,77	62,00		45,29		48,90		50,01		60,01		62,00	
		Persentase OPD yang Melakukan Survei IKM Dibanding OPD yang Seharusnya Melakukan Survei IKM	Persen		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	6.1.1.4 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku	Persentase Layanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku	Persen		100,00	15.360.899.508,00	100,00	2.377.182.500,00	100,00	3.129.452.900,00	100,00	3.845.796.900,00	100,00	3.658.988.304,00	100,00	2.349.478.904,00
	6.1.1.5 Program Kerjasama Daerah	Persentase KSD yang Terfasilitasi (terbit MoU) Dibandingkan dengan Usulan KSD	Persen		25,00	959.158.100,00			25,00	260.570.000,00	25,00	250.604.600,00	25,00	257.116.000,00	25,00	190.867.500,00
	6.1.1.6 Program Penataan Produk Hukum Daerah	Persentase Perda yang Disahkan Dibagi Raperda yang Disulkan	Persen		100,00	439.000.000,00							100,00	245.000.000,00	100,00	194.000.000,00
		Persentase Perualikota yang Disahkan Dibagi Perualikota yang Disulkan	Persen		100,00								100,00		100,00	
	6.1.1.7 Program Penataan Kelembagaan dan Organisasi Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen ANJAB OPD Dibagi Jumlah OPD	Persen		100,00	1.051.432.600,00	100,00	200.684.750,00	100,00	105.000.000,00	100,00	240.000.000,00	100,00	220.000.000,00	100,00	285.747.850,00
		Persentase Tersusunnya Dokumen ABK OPD Dibagi Jumlah OPD	Persen		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	6.1.1.8 Program Pengendalian dan Evaluasi	Persentase Rekomendasi yang Diterbitkan Dibandingkan Jumlah KSD yang Masih Berlaku/Akan Berakhir	Persen		80,00	851.034.100,00			80,00	133.205.000,00	80,00	249.395.400,00	80,00	242.884.000,00	80,00	225.549.700,00

Misi/Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Target RPJMD									
				2016		2017		2018		2019		2020	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	12		13		14		15		16	
6. MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH SERTA BERORIENTASI KEMITRAAN DENGAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA													
6.1 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel, Transparan, Taat Hukum, Partisipatif, Demokratis, dan Responsif		Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	Skor										
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Angka										
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat										
		Opini Wajar Tanpa Pengecualian BPK	Predikat										
6.1.1 Meningkatkan Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Bandar Lampung		Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	skor	60,56		56,04		55,55		60,01		59,98	
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Angka	45,29		48,90		53,03		55,14		57,09	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat	B		B		A		A		A	
	6.1.1.1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Kebijakan KDH	Persentase Tindak Lanjut Temuan	Persen	94,00	1.026.364.285,00	85,00	809.735.714,00	93,21	1.190.759.395,00	92,45	1.884.148.325,00	100,00	2.419.322.950,00
		Jumlah Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda (SPT)	SPT	60,00		40,00		60,00		51,00		55,00	
		Jumlah Temuan BPK Tahun Berjalan	Temuan	29,00		23,00		29,00		40,00		40,00	
		Persentase Kepatuhan Pelaporan Wajib LHKPN/LHKASN	Persen	20,00		-		-		40,00		50,00	
	6.1.1.2 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Pemenuhan Infrastruktur Kapabilitas APP	Level	2	75.391.255,00	2	35.836.000,00	3	91.767.800,00	3	94.575.000,00	3	96.000.000,00
		Tingkat Kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	2		2		3		3		3	
	6.1.1.6 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas Aparatur	Persen	100,00	626.357.800,00								
		Cakupan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa Melalui SPSE	Persen	100,00									
	6.1.1.3 Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Pengaduan Pelayanan Publik yang Ditangani	Persen	95,00	288.858.920,00	95,00	296.720.768,00	95,00	261.924.048,00	100,00	376.811.000,00	100,00	265.672.650,00
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Angka	45,29		48,90		53,03		55,14		62,00	
		Persentase OPD yang Melakukan Survei IKM Dibanding OPD yang Seharusnya Melakukan Survei IKM	Persen	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	6.1.1.4 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase Layanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku	Persen	100,00	2.377.182.500,00	100,00	2.099.427.760,00	100,00	2.078.963.060,00	94,00	3.393.665.059,00	88,89	1.546.379.000,00
	6.1.1.5 Program Kerjasama Daerah	Persentase KSD yang Terfasilitasi (terbit MoU) Dibandingkan dengan Usulan KSD	Persen			25,00	153.559.300,00	25,00	9.717.700,00	49,14	100.618.500,00	20,00	22.610.700,00
	6.1.1.6 Program Penataan Produk Hukum Daerah	Persentase Perda yang Disahkan Dibagi Raperda yang Diusulkan	Persen							100,00	243.502.500,00	100,00	154.950.900,00
		Persentase Perualikota yang Disahkan Dibagi Perualikota yang Diusulkan	Persen							100,00		100,00	
	6.1.1.7 Program Penataan Kelembagaan dan Organisasi Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen ANJAB OPD Dibagi Jumlah OPD	Persen	100,00	200.684.750,00	100,00	54.995.505,00	100,00	195.880.433,00	100,00	202.158.000,00	100,00	243.034.940,00
		Persentase Tersusunnya Dokumen ABK OPD Dibagi Jumlah OPD	Persen	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	6.1.1.8 Program Pengendalian dan Evaluasi	Persentase Rekomendasi yang Diterbitkan Dibandingkan Jumlah KSD yang Masih Berlaku/Akan Berakhir	Persen			80,00	102.900.000,00	80,00	96.981.700,00	66,58	166.557.308,00	100,00	15.600.000,00

Misi/Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD (%)										Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Perangkat Daerah Pelaksana	
				2016		2017		2018		2019		2020							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1	2	3	4	17=12/7*100		18=13/8*100		19=14/9*100		20=15/10*100		21=16/11*100		22		23=22/6*100		29	
6. MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH SERTA BERORIENTASI KEMITRAAN DENGAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA																			
6.1 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel, Transparan, Taat Hukum, Partisipatif, Demokratis, dan Responsif		Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	Skor												59,98		68,94		
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Angka												57,09		89,20		
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat												A		100,00		
		Opini Wajar Tanpa Pengecualian BPK	Predikat												WTP		100,00		
6.1.1 Meningkatkan Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Bandar Lampung		Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	skor	100,00		75,52		69,44		70,60		68,94		59,98		68,94			
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Angka	100,00		100,00		106,04		91,88		92,08		57,09		92,08			
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat	100,00		100,00		200,00		200,00		100,00		A		100,00			
	6.1.1.1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Kebijakan KDH	Persentase Tindak Lanjut Temuan	Persen	117,50	100,00	106,25	83,45	109,66	97,58	108,76	93,04	111,11	65,29	100,00	7.330.330.669,00	111,11	81,93	Inspektorat	
		Jumlah Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda (SPT)	SPT	100,00		66,67		100,00		107,84		100,00		55,00		100,00			
		Jumlah Temuan BPK Tahun Berjalan	Temuan	58,00		51,11		64,44		100,00		100,00		40,00		100,00			
		Persentase Kepatuhan Pelaporan Wajib LHKPN/LHKASN	Persen	100,00		-		-		100,00		100,00		50,00		100,00			
	6.1.1.2 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Pemenuhan Infrastruktur Kapabilitas APfP	Level	100,00	100,00	100,00	37,72	100,00	96,60	100,00	99,55	100,00	98,97	3	393.570.055,00	100,00	86,05	Inspektorat	
		Tingkat Kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		3		100,00			
	6.1.1.6 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas Aparatur	Persen	100,00	100,00										626.357.800,00		100,00	Sekretariat Daerah	
		Cakupan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa Melalui SPSE	Persen	100,00															
	6.1.1.3 Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Pengaduan Pelayanan Publik yang Ditangani	Persen	100,00	100,00	100,00	46,93	100,00	72,76	105,26	82,82	105,26	67,64	100,00	1.489.987.386,00	105,26	69,99	Sekretariat Daerah	
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Angka	100,00		100,00		106,04		91,88		100,00		62,00		100,00			
		Persentase OPD yang Melakukan Survei IKM Dibanding OPD yang Seharusnya Melakukan Survei IKM	Persen	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
	6.1.1.4 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase Layanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku	Persen	100,00	100,00	100,00	67,09	100,00	54,06	94,00	92,75	88,89	65,82	88,89	11.495.617.379,00	88,89	74,84	Sekretariat Daerah	
	6.1.1.5 Program Kerjasama Daerah	Persentase KSD yang Terfasilitasi (terbit MoU) Dibandingkan dengan Usulan KSD	Persen			100,00	58,93	100,00	3,88	196,56	39,13	80,00	11,85	20,00	286.506.200,00	80,00	29,87	Sekretariat Daerah	
	6.1.1.6 Program Penataan Produk Hukum Daerah	Persentase Perda yang Disahkan Dibagi Raperda yang Diusulkan	Persen							100,00	99,39	100,00	79,87	100,00	398.453.400,00	100,00	90,76	Sekretariat Daerah	
		Persentase Perualikota yang Disahkan Dibagi Perualikota yang Diusulkan	Persen							100,00		100,00	100,00			100,00			
	6.1.1.7 Program Penataan Kelembagaan dan Organisasi Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen ANJAB OPD Dibagi Jumlah OPD	Persen	100,00	100,00	100,00	52,38	100,00	81,62	100,00	91,89	100,00	85,05	100,00	896.753.628,00	100,00	85,29	Sekretariat Daerah	
Persentase Tersusunnya Dokumen ABK OPD Dibagi Jumlah OPD		Persen	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00				
6.1.1.8 Program Pengendalian dan Evaluasi	Persentase Rekomendasi yang Diterbitkan Dibandingkan Jumlah KSD yang Masih Berlaku/Akan Berakhir	Persen			100,00	77,25	100,00	38,89	83,23	68,57	125,00	6,92	100,00	382.039.008,00	125,00	44,89	Sekretariat Daerah		

Misi/Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Periode Perencanaan		Target RPJMD									
					2020		2016 (Realisasi)		2017		2018		2019		2020	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.1.1.9 Program Administrasi Pembangunan	Persentase OPD yang Menggunakan Layanan Perencanaan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase OPD yang Menggunakan Layanan Perencanaan Pengadaan Secara Elektronik	Persen		100,00	2.471.873.500,00	100,00	137.286.000,00	100,00	700.010.000,00	100,00	211.695.000,00		741.722.500,00		681.160.000,00
		Persentase OPD yang Melaksanakan Movev Secara Elektronik	Persen		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
		Cakupan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa Melalui SPSE	Persen						100,00							
		Ketepatan Waktu Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Daerah	Persen		100,00								100,00		100,00	
		Persentase OPD dengan Realisasi dan Penyerapan Anggaran Baik	Persen		85,00							75,00			80,00	
	6.1.1.10 Program Penegakan Hukum	Cakupan Kelurahan yang Mendapatkan Pembinaan Kadarkum/Dibagi Seluruh Kelurahan yang Mengikuti Lomba Kelurahan	Persen	100,00	100,00	2.086.395.890,00	100,00	524.395.890,00	100,00	238.000.000,00	100,00	473.000.000,00	100,00	518.000.000,00	100,00	333.000.000,00
	6.1.1.11 Program Dokumentasi dan Informasi Hukum	Persentase Perda yang Diupload ke JDHI/Dibagi Perda yang Disahkan Pertama	Persen		100,00	448.132.700,00	100,00	74.982.700,00	100,00	57.000.000,00	100,00	57.000.000,00	100,00	97.000.000,00	100,00	162.150.000,00
		Persentase Perwali yang Diupload ke JDHI/Dibagi Perwali yang Disahkan Pertama	Persen		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	6.1.1.12 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Fasilitasi MTQ Tingkat Kota dan Provinsi	Persen		100,00	15.576.224.660,00	100,00	2.479.159.980,00	100,00	2.688.549.680,00	100,00	2.908.111.250,00	100,00	3.358.111.250,00	100,00	4.142.292.500,00
		Terselenggaranya TPHD	Persen		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	6.1.1.13 Program Pelayanan Administrasi Informasi Media Massa	Persentase Ekspose Kegiatan Pemerintah Kota Bandar Lampung Melalui Media Cetak dan Elektronik	Persen		100,00	4.246.225.000,00	100,00	635.150.000,00	100,00	638.000.000,00	100,00	904.025.000,00	100,00	994.025.000,00	100,00	1.075.025.000,00
	6.1.1.14 Program Pelayanan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Sekretariat Daerah	Persentase Dokumen Kendaraan Dinas Lingkup Sekretariat Daerah yang Terpelihara	Persen		100,00	100.000.000,00							100,00	50.000.000,00	100,00	50.000.000,00
	6.1.1.15 Program Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Persentase Terlaksananya Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Transparan dan Akuntabel	Persen		100,00	5.206.808.100,00					100,00	357.500.000,00	100,00	2.298.213.800,00	100,00	2.551.094.300,00
		Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan	Level		Level 5						Level 1		Level 1		Level 5	
		Tingkat Kematangan LPSE	Sertifikat		15						8		13		15	
	6.1.1.16 Program Penguatan Lembaga Pemerintah Kecamatan Kelurahan	Cakupan Kelurahan yang Dimonitoring Dibandingkan Seluruh Kelurahan	Persen		100,00	2.762.632.699,00	100,00	497.050.000,00	100,00	574.276.713,00	100,00	606.276.713,00	100,00	663.966.968,00	100,00	421.062.305,00
		Persentase Kelurahan yang Memiliki Gedung Kantor	Persen		95,00		70,00		80,00		85,00		90,00		95,00	
	6.1.1.17 Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Daerah	Persentase Pejabat yang Memenuhi Persyaratan Jabatan (Struktural) Dibandingkan Jumlah Jabatan Seluruh OPD	Persen		100,00	14.493.883.618,00			100,00	1.715.227.600,00	100,00	2.174.747.384,00	100,00	3.449.641.784,00	100,00	7.154.266.850,00
		Persentase Pejabat yang Telah Mengikuti Diklat Struktural (PIM) Sesuai Jabatan Dibandingkan Jumlah Jabatan Seluruh OPD	Persen		100,00				100,00				100,00		100,00	
		Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Dibandingkan Total ASN	Persen						24,00		24,00					
		Rata-rata Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Kepegawaian Sesuai dengan SPM Kepegawaian	Persen		100,00				100,00		100,00		100,00		100,00	
		Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	Persen		100,00				100,00		100,00		100,00		100,00	
		Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	Persen		100,00				100,00		100,00		100,00		100,00	
		Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah	ASN		39,00				39,00		39,00		39,00		39,00	
		Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah	ASN		208,00				208,00		208,00		208,00		208,00	
		Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah	ASN		5.368,00				5.368,00		5.368,00		5.368,00		5.368,00	

Misi/Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Target RPJMD									
				2016		2017		2018		2019		2020	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	12		13		14		15		16	
	6.1.1.9 Program Administrasi Pembangunan	Persentase OPD yang Menggunakan Layanan Perencanaan Pengadaan Secara Elektronik	Persen	100,00	137.286.000,00	100,00	663.709.500,00	100,00	147.470.000,00				268.847.500,00
		Persentase OPD yang Melaksanakan Movev Secara Elektronik	Persen	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
		Cakupan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa Melalui SPSE	Persen			100,00							
		Ketepatan Waktu Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Daerah	Persen							100,00		100,00	
		Persentase OPD dengan Realisasi dan Penyerapan Anggaran Baik	Persen							100,00		100,00	
	6.1.1.10 Program Penegakan Hukum	Cakupan Kelurahan yang Mendapatkan Pembinaan Kadarkum/Dibagi Seluruh Kelurahan yang Mengikuti Lomba Kelurahan	Persen	100,00	524.395.890,00	100,00	222.463.450,00	100,00	452.820.750,00	100,00	507.816.750,00	100,00	259.160.300,00
	6.1.1.11 Program Dokumentasi dan Informasi Hukum	Persentase Perda yang Diupload ke JDHI/Dibagi Perda yang Disahkan Pertama	Persen	100,00	74.982.700,00	100,00	57.000.000,00	100,00	56.766.400,00	100,00	96.909.000,00	100,00	142.981.000,00
		Persentase Perwali yang Diupload ke JDHI/Dibagi Perwali yang Disahkan Pertama	Persen	100,00		125,00		100,00		100,00		100,00	
	6.1.1.12 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Fasilitasi MTQ Tingkat Kota dan Provinsi	Persen	100,00	2.479.159.980,00	100,00	2.603.363.180,00	100,00	2.872.931.530,00	100,00	3.203.763.982,00	100,00	2.216.887.500,00
		Terselenggaranya TPHD	Persen	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	6.1.1.13 Program Pelayanan Administrasi Informasi Media Massa	Persentase Ekspose Kegiatan Pemerintah Kota Bandar Lampung Melalui Media Cetak dan Elektronik	Persen	100,00	635.150.000,00	100,00	630.900.000,00	100,00	902.475.000,00	100,00	991.425.000,00	100,00	897.575.000,00
	6.1.1.14 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Sekretariat Daerah	Persentase Dokumen Kendaraan Dinas Lingkup Sekretariat Daerah yang Terpelihara	Persen							87,00	42.000.000,00	100,00	42.000.000,00
	6.1.1.15 Program Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Persentase Terlaksananya Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Transparan dan Akuntabel	Persen					100,00	268.849.244,00	100,00	2.170.701.769,00	100,00	1.411.525.800,00
		Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan	Level					Level 1		Level 1		Level 5	
		Tingkat Kematangan LPSE	Sertifikat					8		13		15	
	6.1.1.16 Program Penguatan Lembaga Pemerintah Kecamatan Kelurahan	Cakupan Kelurahan yang Dimonitoring Dibandingkan Seluruh Kelurahan	Persen	100,00	497.050.000,00	100,00	527.646.150,00	100,00	557.617.050,00	100,00	574.689.250,00	25,00	105.336.000,00
		Persentase Kelurahan yang Memiliki Gedung Kantor	Persen	70,00		80,00		85,00		88,89		88,89	
	6.1.1.17 Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Daerah	Persentase Pejabat yang Memenuhi Persyaratan Jabatan (Struktural) Dibandingkan Jumlah Jabatan Seluruh OPD	Persen			100,00	1.236.092.455,00	100,00	1.597.081.466,00	100,00	2.453.847.359,00	100,00	3.210.277.155,00
		Persentase Pejabat yang Telah Mengikuti Diklat Struktural (PIM) Sesuai Jabatan Dibandingkan Jumlah Jabatan Seluruh OPD	Persen			100,00		100,00		100,00		100,00	
		Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Dibandingkan Total ASN	Persen			24,00		24,00					
		Rata-rata Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Kepegawaian Sesuai dengan SPM Kepegawaian	Persen			100,00		100,00		100,00		100,00	
		Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	Persen			100,00		0,09		100,00		100,00	
		Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	Persen			100,00		100,00		100,00		100,00	
		Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah	ASN			39,00		39,00		39,00		39,00	
		Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah	ASN			208,00		208,00		208,00		208,00	
		Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah	ASN			5.368,00		5.368,00		5.368,00		4804,00	

Misi/Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD (%)										Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Perangkat Daerah Pelaksana
				2016		2017		2018		2019		2020						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	17=12/7*100		18=13/8*100		19=14/9*100		20=15/10*100		21=16/11*100		22		23=22/6*100		29
6.1.1.9 Program Administrasi Pembangunan	Program Administrasi Pembangunan	Persentase OPD yang Menggunakan Layanan Perencanaan Pengadaan Secara Elektronik	Persen	100,00	100,00	100,00	94,81	100,00	69,66		0,00		39,47	100,00	1.217.313.000,00	100,00	49,25	Sekretariat Daerah
		Persentase OPD yang Melaksanakan Movev Secara Elektronik	Persen	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Cakupan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa Melalui SPSE	Persen			100,00												
		Ketepatan Waktu Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Daerah	Persen							100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase OPD dengan Realisasi dan Penyerapan Anggaran Baik	Persen							133,33		125,00		100,00		117,65		
6.1.1.10 Program Penegakan Hukum	Program Penegakan Hukum	Cakupan Kelurahan yang Mendapatkan Pembinaan Kadarkum/Dibagi Seluruh Kelurahan yang Mengikuti Lomba Kelurahan	Persen	100,00	100,00	100,00	93,47	100,00	95,73	100,00	98,03	100,00	77,83	100,00	1.966.657.140,00	100,00	94,26	Sekretariat Daerah
6.1.1.11 Program Dokumentasi dan Informasi Hukum	Program Dokumentasi dan Informasi Hukum	Persentase Perda yang Diupload ke JDHI/ Dibagi Perda yang Disahkan Pertama	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,59	100,00	99,91	100,00	88,18	100,00	428.639.100,00	100,00	95,65	Sekretariat Daerah
		Persentase Perwali yang Diupload ke JDHI/ Dibagi Perwali yang Disahkan Pertama	Persen	100,00		125,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
6.1.1.12 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Fasilitasi MTQ Tingkat Kota dan Provinsi	Persen	100,00	100,00	100,00	96,83	100,00	98,79	100,00	95,40	100,00	53,52	100,00	13.376.106.172,00	100,00	85,88	Sekretariat Daerah
		Terselenggaranya TPHD	Persen	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
6.1.1.13 Program Pelayanan Administrasi Informasi Media Massa	Program Pelayanan Administrasi Informasi Media Massa	Persentase Ekspose Kegiatan Pemerintah Kota Bandar Lampung Melalui Media Cetak dan Elektronik	Persen	100,00	100,00	100,00	98,89	100,00	99,83	100,00	99,74	100,00	83,49	100,00	4.057.525.000,00	100,00	95,56	Sekretariat Daerah
6.1.1.14 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Sekretariat Daerah	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Sekretariat Daerah	Persentase Dokumen Kendaraan Dinas Lingkup Sekretariat Daerah yang Terpelihara	Persen							87,00	84,00	100,00	84,00	100,00	84.000.000,00	100,00	84,00	Sekretariat Daerah
6.1.1.15 Program Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Program Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Persentase Terlaksananya Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Transparan dan Akuntabel	Persen					100,00	75,20	100,00	94,45	100,00	55,33	100,00	3.851.076.813,00	100,00	73,96	Sekretariat Daerah
		Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan	Level					100,00		100,00		100,00		Level 5		100,00		
		Tingkat Kematangan LPSE	Sertifikat					100,00		100,00		100,00		15		100,00		
6.1.1.16 Program Penguatan Lembaga Pemerintah Kecamatan Kelurahan	Program Penguatan Lembaga Pemerintah Kecamatan Kelurahan	Cakupan Kelurahan yang Dimonitoring Dibandingkan Seluruh Kelurahan	Persen	100,00	100,00	100,00	91,88	100,00	91,97	100,00	86,55	25,00	25,02	25,00	2.262.338.450,00	25,00	81,89	Sekretariat Daerah dan Kecamatan
		Persentase Kelurahan yang Memiliki Gedung Kantor	Persen	100,00		100,00		100,00		98,77		93,57		88,89		93,57		
6.1.1.17 Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Daerah	Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Daerah	Persentase Pejabat yang Memenuhi Persyaratan Jabatan (struktural) Dibandingkan Jumlah Jabatan Seluruh OPD	Persen			100,00	72,07	100,00	73,44	100,00	71,13	100,00	44,87	100,00	8.497.298.435,00	100,00	58,63	Badan Kepegawaian Daerah
		Persentase Pejabat yang Telah Mengikuti Diklat Struktural (PIM) Sesuai Jabatan Dibandingkan Jumlah Jabatan Seluruh OPD	Persen			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Dibandingkan Total ASN	Persen			100,00		100,00										
		Rata-rata Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Kepegawaian Sesuai dengan SPM Kepegawaian	Persen			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	Persen			100,00		0,09		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	Persen			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah	ASN			100,00		100,00		100,00		100,00		39,00		100,00		
		Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah	ASN			100,00		100,00		100,00		100,00		208,00		100,00		
		Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah	ASN			100,00		100,00		100,00		89,49		4804,00		89,49		

Misi/Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Periode Perencanaan		Target RPJMD									
					2020		2016 (Realisasi)		2017		2018		2019		2020	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	
	6.1.1.18 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Jumlah PNS yang Menerima Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	Orang	10,00	10,00	790.726.988,00	10,00	790.726.988,00								
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Realisasi Kegiatan BKD	Angka	16,00	16,00		16,00									
		Jumlah Pelaksanaan Sidang Baperjakat, Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pajabat Struktural dan Fungsional, serta Pengalihugasan/ Penempatan Tugas PNS dan Seleksi Pengisian Jabatan Tinggi Pratama	Angka	12,00	12,00		12,00									
		Jumlah Jabatan Esselon II pada Instansi Pemerintah	ASN	40,00	40,00		40,00									
		Jumlah PNS yang Menerima Tanda Penghargaan Satya Lencana Karya Satya	Orang	600,00	600,00		600,00									
		Jumlah Pelaksanaan Rapat Pembinaan Disiplin PNS dan Pembinaan Waskat	Jumlah	15,00	15,00		15,00									
		Tersusunnya Formasi Kebutuhan PNS Kota Bandar Lampung	Angka	600,00	600,00		600,00									
		Terbitnya SK Cuti Pegawai Negeri Sipil	Jumlah	1.000,00	1.000,00		1.000,00									
		Jumlah SK Pensiun PNS yang Dikeluarkan BKN	Jumlah	400,00	400,00		400,00									
		Jumlah Data dan Arsip PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang terkelola	Jumlah	11.650,00	11.650,00		11.650,00									
		Jumlah Kasus Pegawai Negeri Sipil yang terselesaikan	Jumlah	35,00	35,00		35,00									
		Jumlah PNS yang Melakukan Sumpah PNS	Orang	50,00	50,00		50,00									
		Jumlah Informasi Aparatur Sipil Negara	ASN	11.650,00	11.650,00		11.650,00									
	6.1.1.19 Program Pelayanan Mutasi dan Pensiun Pegawai	Jumlah KARPEG, KARIS, KARSU yang Dikeluarkan BKN	Jumlah	700,00	700,00	311.345.768,00	700,00	311.345.768,00								
		Jumlah SK Kenaikan Pangkat PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung Periode April, Oktober dan Usulan Kenaikan Gaji Berkala	Jumlah	10.500,00	10.500,00		10.500,00									
		Jumlah Peningkatan Status CPNS menjadi PNS	Orang	600,00	600,00		600,00									
		Jumlah Tenaga Kontrak yang Mendapat SK Pengangkatan Kembali	Orang	5.000,00	5.000,00		5.000,00									
		Jumlah Peserta yang Lulus Seleksi CPNS Pelamar Umum dan Tenaga Honorar	Orang	600,00	600,00		600,00									
		Jumlah Usulan NIP CPNS yang Terbit	Angka	600,00	600,00		600,00									
		Jumlah PNS Fungsional yang Memperoleh Penetapan Angka Kredit	Orang	400,00	400,00		400,00									
		Jumlah Kartu Pegawai Elektronik yang Terkonversi	Jumlah	2.000,00	2.000,00		2.000,00									
	6.1.1.20 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang Lulus Seleksi lain Belajar dan Tugas Belajar (PNS)	Orang	300,00	300,00	2.070.119.950,00	300,00	2.070.119.950,00								
		Jumlah CPNS Golongan I, II, III dari Formasi Honorar yang Mengikuti Diklat Prajabatan	Orang	120,00	120,00		120,00									
		Jumlah PNS yang Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP)	Orang	100,00	100,00		100,00									
		Jumlah PNS yang Mengikuti Ujian Dinas Tingkat I dan II	Orang	75,00	75,00		75,00									
		Jumlah Pelaksanaan Upacara/Apel Mingguan, Bulanan, dan Hari-Hari Besar Nasional serta Acara Lainnya yang Diminta Walikota	Angka	70,00	70,00		70,00									
		Jumlah PNS Mengikuti Pendidikan & Penjurangan Struktural (DiklatPm Tk. III dan IV)	Orang	30,00	30,00		30,00									
		Jumlah PNS yang Mengikuti Bimtek Sistem Administrasi Kepegawaian	Orang	100,00	100,00		100,00									
		Jumlah PNS yang Mengikuti Bimtek Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah	Orang	100,00	100,00		100,00									

Misi/Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Target RPJMD									
				2016		2017		2018		2019		2020	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	12		13		14		15		16	
	6.1.1.18 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Jumlah PNS yang Menerima Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	Orang	10,00	790.726.988,00								
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Realisasi Kegiatan BKD	Angka	16,00									
		Jumlah Pelaksanaan Sidang Baperjakat, Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pajabat Struktural dan Fungsional, serta Pengalihan Tugas/ Penempatan Tugas PNS dan Seleksi Pengisian Jabatan Tinggi Pratama	Angka	12,00									
		Jumlah Jabatan Esselon II pada Instansi Pemerintah	ASN	40,00									
		Jumlah PNS yang Menerima Tanda Penghargaan Satya Lencana Karya Satya	Orang	600,00									
		Jumlah Pelaksanaan Rapat Pembinaan Disiplin PNS dan Pembinaan Waskat	Jumlah	15,00									
		Tersusunnya Formasi Kebutuhan PNS Kota Bandar Lampung	Angka	600,00									
		Terbitnya SK Cuti Pegawai Negeri Sipil	Jumlah	1.000,00									
		Jumlah SK Penstun PNS yang Dikeluarkan BKN	Jumlah	400,00									
		Jumlah Data dan Arsip PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang terkelola	Jumlah	11.650,00									
		Jumlah Kasus Pegawai Negeri Sipil yang terselesaikan	Jumlah	35,00									
		Jumlah PNS yang Melakukan Sumpah PNS	Orang	50,00									
		Jumlah Informasi Aparatur Sipil Negara	ASN	11.650,00									
	6.1.1.19 Program Pelayanan Mutasi dan Pensiun Pegawai	Jumlah KARPEG, KARIS, KARSU yang Dikeluarkan BKN	Jumlah	700,00	311.345.768,00								
		Jumlah SK Kenaikan Pangkat PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung Periode April, Oktober dan Usulan Kenaikan Gaji Berkala	Jumlah	10.500,00									
		Jumlah Peningkatan Status CPNS menjadi PNS	Orang	600,00									
		Jumlah Tenaga Kontrak yang Mendapat SK Pengangkatan Kembali	Orang	5.000,00									
		Jumlah Peserta yang Lulus Seleksi CPNS Pelamar Umum dan Tenaga Honoror	Orang	600,00									
		Jumlah Usulan NIP CPNS yang Terbit	Angka	600,00									
		Jumlah PNS Fungsional yang Memperoleh Penetapan Angka Kredit	Orang	400,00									
		Jumlah Kartu Pegawai Elektronik yang Terkonversi	Jumlah	2.000,00									
	6.1.1.20 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang Lulus Seleksi Iain Belajar dan Tugas Belajar (PNS)	Orang	300,00	2.070.119.950,00								
		Jumlah CPNS Golongan I, II, III dari Formasi Honoror yang Mengikuti Diklat Prajabatan	Orang	120,00									
		Jumlah PNS yang Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP)	Orang	100,00									
		Jumlah PNS yang Mengikuti Ujian Dinas Tingkat I dan II	Orang	75,00									
		Jumlah Pelaksanaan Upacara/Apel Mingguan, Bulanan, dan Hari-Hari Besar Nasional serta Acara Lainnya yang Diminta Walikota	Angka	70,00									
		Jumlah PNS Mengikuti Pendidikan & Penjurangan Struktural (DiklatPm Tk. III dan IV)	Orang	30,00									
		Jumlah PNS yang Mengikuti Bimtek Sistem Administrasi Kepegawaian	Orang	100,00									
		Jumlah PNS yang Mengikuti Bimtek Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah	Orang	100,00									

Misi/Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD (%)										Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Perangkat Daerah Pelaksana
				2016		2017		2018		2019		2020						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	17=12/7*100		18=13/8*100		19=14/9*100		20=15/10*100		21=16/11*100		22		23=22/6*100		29
6.1.1.18 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Jumlah PNS yang Menerima Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Realisasi Kegiatan BKD	Angka	100,00										16,00		100,00	Badan Kepegawaian Daerah	
		Jumlah Pelaksanaan Sidang Baperjakat, Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pajabat Struktural dan Fungsional, serta Pengalihan tugas/ Penempatan Tugas PNS dan Seleksi Pengisian Jabatan Tinggi Pratama	Angka	100,00										12,00		100,00		
		Jumlah Jabatan Esselon II pada Instansi Pemerintah	ASN	100,00										40,00		100,00		
		Jumlah PNS yang Menerima Tanda Penghargaan Satya Lencana Karya Satya	Orang	100,00										600,00		100,00		
		Jumlah Pelaksanaan Rapat Pembinaan Disiplin PNS dan Pembinaan Waskat	Jumlah	100,00										15,00		100,00		
		Tersusunnya Formasi Kebutuhan PNS Kota Bandar Lampung	Angka	100,00										600,00		100,00		
		Terbitnya SK Cuti Pegawai Negeri Sipil	Jumlah	100,00										1.000,00		100,00		
		Jumlah SK Pensiun PNS yang Dikeluarkan BKN	Jumlah	100,00										400,00		100,00		
		Jumlah Data dan Arsip PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang terkelola	Jumlah	100,00										11.650,00		100,00		
		Jumlah Kasus Pegawai Negeri Sipil yang Terseseaikan	Jumlah	100,00										35,00		100,00		
		Jumlah PNS yang Melakukan Sumpah PNS	Orang	100,00										50,00		100,00		
		Jumlah Informasi Aparatur Sipil Negara	ASN	100,00										11.650,00		100,00		
		6.1.1.19 Program Pelayanan Mutasi dan Pensiun Pegawai	Jumlah KARPEG, KARIS, KARSU yang Dikeluarkan BKN	Jumlah SK Kenaikan Pangkat PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung Periode April, Oktober dan Usulan Kenaikan Gaji Berkala	Jumlah	100,00										10.500,00		
Jumlah Peningkatan Status CPNS menjadi PNS	Orang			100,00										600,00		100,00		
Jumlah Tenaga Kontrak yang Mendapat SK Pengangkatan Kembali	Orang			100,00										5.000,00		100,00		
Jumlah Peserta yang Lulus Seleksi CPNS Pelamar Umum dan Tenaga Honorer	Orang			100,00										600,00		100,00		
Jumlah Usulan NIP CPNS yang Terbit	Angka			100,00										600,00		100,00		
Jumlah PNS Fungsional yang Memperoleh Penetapan Angka Kredit	Orang			100,00										400,00		100,00		
Jumlah Kartu Pegawai Elektronik yang Terkonversi	Jumlah			100,00										2.000,00		100,00		
6.1.1.20 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang Lulus Seleksi Izin Belajar dan Tugas Belajar (PNS)			Jumlah CPNS Golongan I, II, III dari Formasi Honorer yang Mengikuti Diklat Prajabatan	Orang	100,00										120,00		100,00
		Jumlah PNS yang Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP)	Orang	100,00										100,00		100,00		
		Jumlah PNS yang Mengikuti Ujian Dinas Tingkat I dan II	Orang	100,00										75,00		100,00		
		Jumlah Pelaksanaan Upacara/Apel Mingguan, Bulanan, dan Hari-Hari Besar Nasional serta Acara Lainnya yang Diminta Walikota	Angka	100,00										70,00		100,00		
		Jumlah PNS Mengikuti Pendidikan & Penjurangan Struktural (DiklatPm Tk. III dan IV)	Orang	100,00										30,00		100,00		
		Jumlah PNS yang Mengikuti Bimtek Sistem Administrasi Kepegawaian	Orang	100,00										100,00		100,00		
		Jumlah PNS yang Mengikuti Bimtek Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah	Orang	100,00										100,00		100,00		

Misi/Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD											
					2020		2016 (Realisasi)		2017		2018		2019		2020		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
6.1.1.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketepatan Waktu dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan	Persen	100,00	100,00	10.747.351.152,00	100,00	1.044.914.302,00	100,00	1.277.499.950,00	100,00	2.549.825.000,00	100,00	2.678.500.000,00	100,00	3.196.611.900,00		
	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang Ditetapkan dengan PERDA/ PERKADA	Dokumen	-	-		ada		-		ada				-			
	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang Ditetapkan dengan PERKADA	Dokumen	ada	ada		ada		ada		ada		ada		ada			
	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	Persen	75,00	90,00		80,00		80,00		85,00		85,00		90,00			
	Persentase Pemenuhan Fasilitas dan Koordinasi/ Konsultasi Perencanaan Pembangunan	Persen	80,00	90,00		80,00		80,00		85,00		85,00		90,00			
	Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke Dalam APBD	Persen	100,00			100,00											
	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Persen	100,00			100,00											
6.1.1.22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase Pemenuhan Fasilitas dan Koordinasi/ Konsultasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Persen	80,00		3.100.000,00	80,00	3.100.000,00										
6.1.1.23 Program Perencanaan Sosial Budaya	Persentase Pemenuhan Fasilitas dan Koordinasi/ Konsultasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Persen	80,00		78.117.733,00	80,00	78.117.733,00										
6.1.1.24 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA	Persentase Pemenuhan Fasilitas dan Koordinasi/ Konsultasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah dan SDA	Persen	80,00		41.837.500,00	80,00	41.837.500,00										
6.1.1.25 Program Penanggulangan Kemiskinan	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Persen	80,00		81.854.782,00	100,00	81.854.782,00										
6.1.1.26 Program Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	Persen		80,00	1.924.055.000,00			75,00	330.000.000,00	80,00	475.000.000,00	80,00	320.000.000,00	80,00	799.055.000,00		
	Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	Persen		65,00				50,00		60,00		65,00		65,00			
6.1.1.27 Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase Pemenuhan Dokumen Tata Ruang Wilayah	Persen		80,00	172.500.000,00			80,00	172.500.000,00								
6.1.1.28 Program Pengembangan dan Informasi Statistik Daerah	Tersedianya Informasi Pembangunan Daerah	Persen		70,00	203.199.000,00			70,00	203.199.000,00								
6.1.1.29 Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah	Persentase Pemenuhan Informasi Statistik Daerah	Persen		70,00	141.880.000,00	70,00	141.880.000,00										
6.1.1.30 Program Pengembangan Sistem Manajemen Data	Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi	Sistem		Ada	1.077.197.800,00					Ada	170.000.000,00	Ada	726.000.000,00	Ada	181.197.800,00		
	Buku "Kota dalam angka"	Dokumen		Ada						Ada		Ada		Ada			
	Buku "PDRB"	Dokumen		Ada						-				Ada			
6.1.1.31 Program Peningkatan Komunikasi dan Informasi serta Penggunaan Media Massa	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Call Center dan Website	Persen	100,00	100,00	3.401.530.000,00					100,00	313.000.000,00	100,00	2.365.000.000,00	100,00	723.530.000,00		
	Persentase Pembinaan dan Pengawasan POSTELSUS dan Penyiaran	Persen	100,00	100,00						100,00		100,00		100,00			
	Persentase Perangkat daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah	Persen	50,00	100,00						80,00		85,00		100,00			
6.1.1.32 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah	Peningkatan Pengolahan Arsip	Berkas	3000	17.000,00	327.603.000,00	2.000,00	43.582.000,00	2.000,00	149.356.000,00	2.200,00	60.000.000,00	2.400,00	60.000.000,00	2.600,00	14.665.000,00		
	Persentase Dokumen Kendaraan Dinas Lingkup Sekretariat Daerah yang Terpelihara	Persen			105.550.000,00			100,00	55.550.000,00	100,00	50.000.000,00						
6.1.1.33 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baik	Persen	18,00	62,00	157.349.000,00	10,00	27.586.500,00			31,00	45.000.000,00	45,00	45.000.000,00	62,00	39.762.500,00		
6.1.1.34 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi di Bidang Arsip	Peningkatan Jumlah SDM Pengelola Kearsipan	Orang		200,00	234.500.000,00			50,00	84.500.000,00	50,00	30.000.000,00	50,00	40.000.000,00	50,00	80.000.000,00		
6.1.1.35 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Tersedianya Dokumen JRA yang Ditetapkan Perwali	Dokumen		ada	186.207.842,00					Ada	100.000.000,00		50.000.000,00		36.207.842,00		
	Persentase Arsip yang Dimusnahkan	Persen		66,00							33,00			33,00			

Misi/Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Target RPJMD									
				2016		2017		2018		2019		2020	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	12		13		14		15		16	
	6.1.1.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketepatan Waktu dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan	Persen	100,00	1.044.914.302,00	100,00	865.624.434,00	100,00	1.831.320.280,00	100,00	2.054.193.600,00	100,00	2.032.480.900,00
		Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang Ditetapkan dengan PERDA/ PERKADA	Dokumen	ada		-		ada				Ada	
		Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang Ditetapkan dengan PERKADA	Dokumen	ada		ada		ada		ada		Ada	
		Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	Persen	80,00		98,00		100,00		92,53		87,43	
		Persentase Pemenuhan Fasilitas dan Koordinasi/ Konsultasi Perencanaan Pembangunan	Persen	80,00		80,00		88,24		90,63		100,00	
		Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke Dalam APBD	Persen	100,00									
		Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Persen	100,00									
	6.1.1.22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase Pemenuhan Fasilitas dan Koordinasi/ Konsultasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Persen	80,00	3.100.000,00								
	6.1.1.23 Program Perencanaan Sosial Budaya	Persentase Pemenuhan Fasilitas dan Koordinasi/ Konsultasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Persen	80,00	78.117.733,00								
	6.1.1.24 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA	Persentase Pemenuhan Fasilitas dan Koordinasi/ Konsultasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah dan SDA	Persen	80,00	41.837.500,00								
	6.1.1.25 Program Penanggulangan Kemiskinan	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Persen	100,00	81.854.782,00								
	6.1.1.26 Program Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah	Persentase Implementasi Rencana Kelitangan	Persen			75,00	22.681.000,00	100,00	259.201.700,00	100,00	227.427.226,00	100,00	511.405.700,00
		Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	Persen			50,00		55,00		60,00		42,86	
	6.1.1.27 Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase Pemenuhan Dokumen Tata Ruang Wilayah	Persen			80,00	48.935.000,00						
	6.1.1.28 Program Pengembangan dan Informasi Statistik Daerah	Tersedianya Informasi Pembangunan Daerah	Persen			70,00	103.110.000,00						
	6.1.1.29 Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah	Persentase Pemenuhan Informasi Statistik Daerah	Persen	70,00	141.880.000,00								
	6.1.1.30 Program Pengembangan Sistem Manajemen Data	Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi	Sistem					Ada	89.985.000,00	Ada	639.094.408,00	Ada	122.327.500,00
		Buku "Kota dalam angka"	Dokumen					Ada		Ada		Ada	
		Buku "PDRB"	Dokumen					-				Ada	
	6.1.1.31 Program Peningkatan Komunikasi dan Informasi serta Penggunaan Media Massa	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Call Center dan Website	Persen					100,00	235.386.000,00	100,00	2.054.938.878,00	100,00	589.297.000,00
		Persentase Pembinaan dan Pengawasan POSTELUS dan Penyiaran	Persen					100,00		100,00		100,00	
		Persentase Perangkat daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah	Persen					80,00		85,00		100,00	
	6.1.1.32 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah	Peningkatan Pengolahan Arsip	Berkas	2.000,00	43.582.000,00	2.205,00	32.642.000,00	1.500,00	38.632.600,00	2.400,00	59.396.500,00	611,00	-
		Persentase Dokumen Kendaraan Dinas Lingkup Sekretariat Daerah yang Terpelihara	Persen			-	-	100,00	43.500.000,00				
	6.1.1.33 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	Persen	10,00	27.586.500,00			57,00	30.274.000,00	87,50	33.974.000,00	10,00	-
	6.1.1.34 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi di Bidang Arsip	Peningkatan Jumlah SDM Pengelola Kearsipan	Orang			-	19.465.000,00	-	-	-	-	10,00	
	6.1.1.35 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Tersedianya Dokumen JRA yang Ditetapkan Perwali	Dokumen					Ada	48.641.972,00		22.884.500,00		-
		Persentase Arsip yang Dimusnahkan	Persen							100,00		10,00	

Misi/Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD (%)										Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Perangkat Daerah Pelaksana
				2016		2017		2018		2019		2020						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	17=12/7*100		18=13/8*100		19=14/9*100		20=15/10*100		21=16/11*100		22		23=22/6*100		29
6.1.1.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketepatan Waktu dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan	Persen	100,00	100,00	100,00	67,76	100,00	71,82	100,00	76,69	100,00	63,58	100,00	7.828.533.516,00	100,00	72,84	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang Ditetapkan dengan PERDA/ PERKADA	Dokumen	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	100,00			
		Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang Ditetapkan dengan PERKADA	Dokumen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
		Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	Persen	100,00	122,50	117,65	108,86	97,14	87,43	97,14	111,11	100,00	111,11	100,00				
		Persentase Pemenuhan Fasilitas dan Koordinasi/ Konsultasi Perencanaan Pembangunan	Persen	100,00	100,00	103,81	106,62	111,11	100,00	111,11	100,00	111,11	100,00					
		Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke Dalam APBD	Persen	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Persen	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
6.1.1.22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase Pemenuhan Fasilitas dan Koordinasi/ Konsultasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Persen	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.100.000,00	100,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
6.1.1.23	Program Perencanaan Sosial Budaya	Persentase Pemenuhan Fasilitas dan Koordinasi/ Konsultasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Persen	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	78.117.733,00	100,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
6.1.1.24	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA	Persentase Pemenuhan Fasilitas dan Koordinasi/ Konsultasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah dan SDA	Persen	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	41.837.500,00	100,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
6.1.1.25	Program Penanggulangan Kemiskinan	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Persen	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	81.854.782,00	100,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
6.1.1.26	Program Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	Persen	-	-	100,00	6,87	125,00	54,57	125,00	71,07	125,00	64,00	100,00	1.020.715.626,00	125,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	Persen	-	-	100,00	91,67	92,31	65,94	42,86	65,94	42,86	65,94	42,86				
6.1.1.27	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase Pemenuhan Dokumen Tata Ruang Wilayah	Persen	-	-	100,00	28,37	-	-	-	-	-	-	80,00	48.935.000,00	100,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
6.1.1.28	Program Pengembangan dan Informasi Statistik Daerah	Tersedianya Informasi Pembangunan Daerah	Persen	-	-	100,00	50,74	-	-	-	-	-	-	70,00	103.110.000,00	100,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
6.1.1.29	Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah	Persentase Pemenuhan Informasi Statistik Daerah	Persen	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	70,00	141.880.000,00	100,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
6.1.1.30	Program Pengembangan Sistem Manajemen Data	Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi	Sistem	-	-	-	-	100,00	52,93	100,00	88,03	100,00	67,51	Ada	851.406.908,00	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Buku "Kota dalam angka"	Dokumen	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	Ada	100,00			
		Buku "PDRB"	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	Ada	100,00			
6.1.1.31	Program Peningkatan Komunikasi dan Informasi serta Penggunaan Media Massa	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Call Center dan Website	Persen	-	-	-	-	100,00	75,20	100,00	86,89	100,00	81,45	100,00	2.879.621.878,00	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Persentase Pembinaan dan Pengawasan POSTELUS dan Penyiaran	Persen	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	100,00			
		Persentase Perangkat daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunkasi Perangkat Daerah	Persen	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	100,00			
6.1.1.32	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah	Peningkatan Pengolahan Arsip	Berkas	100,00	100,00	110,25	21,86	68,18	64,39	100,00	98,99	23,50	-	611,00	174.253.100,00	3,59	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Persentase Dokumen Kendaraan Dinas Lingkup Sekretariat Daerah yang Terpelihara	Persen	-	-	-	-	100,00	87,00	-	-	-	-	-	43.500.000,00	-		41,21
6.1.1.33	Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baik	Persen	100,00	100,00	-	-	183,87	67,28	194,44	75,50	16,13	-	10,00	91.834.500,00	16,13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
6.1.1.34	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi di Bidang Arsip	Peningkatan Jumlah SDM Pengelola Kearsipan	Orang	-	-	-	23,04	-	-	-	-	20,00	-	10,00	19.465.000,00	5,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
6.1.1.35	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Tersedianya Dokumen JRA yang Ditetapkan Perwali	Dokumen	-	-	-	-	100,00	48,64	-	45,77	-	0,00	ada	71.526.472,00	100,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Persentase Arsip yang Dimusnahkan	Persen	-	-	-	-	-	-	303,03	-	30,30	-	10,00	15,15			

Misi/Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Periode Perencanaan		Target RPJMD									
					2020		2016 (Realisasi)		2017		2018		2019		2020	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	
	6.1.1.36 Program Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Korpri	Persentase Anggota KORPRI yang Mendapat Pelayanan Kesehatan	Persen	82,00	82,00	4.362.019.160,00	82,00	569.060.940,00	82,00	1.098.500.000,00	82,00	1.204.774.610,00	82,00	993.007.610,00	82,00	496.676.000,00
		Meningkatnya Partisipasi Anggota KORPRI dalam Even KORPRI	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	6.1.1.37 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase Kelurahan yang Difasilitasi dan Diberdayakan	Persen			226.253.000,00	90,00	226.253.000,00								
	6.1.1.38 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persentase Kelurahan yang Difasilitasi dan Diberdayakan	Persen	95,00	2.840.175.000,00				90,00	780.000.000,00	90,00	713.500.000,00	95,00	727.000.000,00	95,00	619.675.000,00
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	Kelompok	110,00					50,00		75,00		90,00		110,00	
		Persentase PKK Aktif	Persen	90,00					85,00		85,00		90,00		90,00	
		Jumlah Kelurahan yang Memiliki Profil	Kelurahan	126,00					126,00		126,00		126,00		126,00	
	6.1.1.39 Program Peningkatan Masyarakat dalam Membangun Desa	Pembentukan POKJANAL POSYANDU (Kelurahan)	Jumlah		39.895.750,00		126,00	39.895.750,00								
	6.1.1.40 Program Peningkatan Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Persentase Pelaksanaan BBGRM	Persen	75,00	964.250.000,00				75,00	275.000.000,00	75,00	275.000.000,00	75,00	225.000.000,00	75,00	189.250.000,00
		BOP BDC (Business Development Centre)	Orang	60,00					25,00		25,00		60,00		60,00	
	6.1.1.41 Program Penanggulangan Kemiskinan	BOP P2KP	Kelurahan	126,00	267.548.200,00		126,00	67.548.200,00	126,00	100.000.000,00	126,00	100.000.000,00				
	6.1.1.42 Program Peningkatan Kualitas Perumahan	Pengendalian dan Monitoring Bedah Rumah	Kelurahan		76.364.750,00		126,00	76.364.750,00								
	6.1.1.43 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Pembentukan POKJANAL POSYANDU	Kelurahan	126,00	308.750.000,00				126,00	50.000.000,00	126,00	100.000.000,00	126,00	100.000.000,00	126,00	58.750.000,00
	6.1.1.44 Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Pemukiman	Cakupan Kawasan Permukiman yang Dikembangkan	Kelurahan	126,00	177.142.600,00		126,00	177.142.600,00								
	6.1.1.45 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan	Meningkatnya Lembaga Ekonomi Kelurahan yang Dikembangkan	Kelompok	55,00	261.500.000,00								45,00	110.000.000,00	55,00	151.500.000,00
	6.1.1.46 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Prolegda yang Disetujui Menjadi Perda	Persen	95,00	95.707.262.585,00		95,00	12.473.564.900,00	95,00	17.869.144.450,00	95,00	21.045.265.033,00	95,00	20.142.429.602,00	95,00	24.176.858.600,00
		Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RRLM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Persen	95,00			95,00		95,00		95,00		95,00		95,00	
		Terintegrasi Program-program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran ke Dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setuan DPRD	Persen	95,00			95,00		95,00		95,00		95,00		95,00	
		Terjaringnya Aspirasi Masyarakat dalam Usulan Dokumen RPJMD maupun Usulan Dokumen RKPD	Persen	95,00			95,00		95,00		95,00		95,00		95,00	
	6.1.1.47 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pimpinan dan Anggota DPRD	Persentase Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD yang Terfasilitasi Dibandungkan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD yang Direncanakan	Persen	95,00	336.356.750,00						95,00	134.898.750,00	95,00	135.000.000,00	95,00	66.458.000,00
	6.1.1.48 Program Peningkatan Publikasi dan Pelayanan Informasi Media Massa	Persentase Kegiatan DPRD yang Terpublikasi	Persen	95,00	1.607.780.250,00						95,00	414.566.250,00	95,00	531.000.000,00	95,00	662.214.000,00
	6.1.1.49 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Perda yang Disahkan Dibagi Raperda yang Diusulkan	Persen		1.863.796.100,00		100,00	423.787.600,00	100,00	245.000.000,00	100,00	393.702.500,00		275.966.000,00		525.340.000,00
		Persentase Perwalikota yang Disahkan Dibagi Perwalikota yang Diusulkan	Persen				100,00		100,00		100,00					
		Legislasi Peraturan Daerah yang Akan Dibahas Tahun Berjalan	Persen	95,00	95,00		95,00		95,00		95,00		95,00		95,00	
		Terwujudnya Peraturan Daerah yang Berkualitas yang Tidak Bertentangan dengan Peraturan yang Lebih Tinggi	Persen	95,00	95,00		95,00		95,00		95,00		95,00		95,00	

Misi/Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Target RPJMD									
				2016		2017		2018		2019		2020	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	12		13		14		15		16	
	6.1.1.36 Program Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Korpri	Persentase Anggota KORPRI yang Mendapat Pelayanan Kesehatan	Persen	82,00	569.060.940,00	82,00	459.067.698,00	80,00	811.784.102,00	60,00	799.198.503,00	35,25	148.923.619,00
		Meningkatnya Partisipasi Anggota KORPRI dalam Even KORPRI	Persen	100,00		100,00		80,00		100,00		60,00	
	6.1.1.37 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase Kelurahan yang Difasilitasi dan Diberdayakan	Persen	90,00	226.253.000,00								
	6.1.1.38 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persentase Kelurahan yang Difasilitasi dan Diberdayakan	Persen			90,00	328.955.000,00	90,00	262.757.700,00	90,00	699.725.000,00	2,38	400.291.000,00
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	Kelompok			50,00		75,00		147,00		147,00	
		Persentase PKK Aktif	Persen			85,00		85,00		90,00		90,00	
		Jumlah Kelurahan yang Memiliki Profil	Kelurahan			126,00		126,00		126,00		126,00	
	6.1.1.39 Program Peningkatan Masyarakat dalam Membangun Desa	Pembentukan POKJANAL POSYANDU (Kelurahan)	Jumlah	126,00	39.895.750,00								
	6.1.1.40 Program Peningkatan Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Persentase Pelaksanaan BBGRM	Persen			75,00	90.008.000,00	75,00	54.328.000,00	100,00	203.660.300,00	-	82.139.400,00
		BOP BDC (Business Development Centre)	Orang			25,00		-	-	60,00		60,00	
	6.1.1.41 Program Penanggulangan Kemiskinan	BOP P2KP	Kelurahan	126,00	67.548.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.1.1.42 Program Peningkatan Kualitas Perumahan	Pengendalian dan Monitoring Bedah Rumah	Kelurahan	126,00	76.364.750,00								
	6.1.1.43 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Pembentukan POKJANAL POSYANDU	Kelurahan			126,00	16.560.000,00	-	64.330.000,00	126,00	77.712.000,00	126,00	53.000.000,00
	6.1.1.44 Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Pemukiman	Cakupan Kawasan Permukiman yang Dikembangkan	Kelurahan	126,00	177.142.600,00								
	6.1.1.45 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan	Meningkatnya Lembaga Ekonomi Kelurahan yang Dikembangkan	Kelompok							45,00	106.782.500,00	55,00	31.743.000,00
	6.1.1.46 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Prolegda yang Disetujui Menjadi Perda	Persen	95,00	12.473.564.900,00	95,00	14.263.057.615,00	95,00	15.855.696.865,00	93,22	14.998.035.501,00	95,00	15.513.826.398,00
		Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RRJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Persen	95,00		95,00		95,00		93,22		95,00	
		Terintegrasi Program-program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran ke Dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setuan DPRD	Persen	95,00		95,00		95,00		93,22		95,00	
		Terjaringnya Aspirasi Masyarakat dalam Usulan Dokumen RPJMD maupun Usulan Dokumen RKPD	Persen	95,00		95,00		95,00		93,22		95,00	
	6.1.1.47 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pimpinan dan Anggota DPRD	Persentase Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD yang Terfasilitasi Dibandingkan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD yang Direncanakan	Persen					95,00	65.127.550,00	100,00	42.602.170,00	95,00	15.782.600,00
	6.1.1.48 Program Peningkatan Publikasi dan Pelayanan Informasi Media Massa	Persentase Kegiatan DPRD yang Terpublikasi	Persen					95,00	219.801.750,00	54,24	50.227.000,00	95,00	180.675.000,00
	6.1.1.49 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Perda yang Disahkan Dibagi Raperda yang Diusulkan	Persen	100,00	423.787.600,00	100,00	244.660.000,00	100,00	242.523.412,00		52.236.000,00		122.491.000,00
		Persentase Perwalikota yang Disahkan Dibagi Perwalikota yang Diusulkan	Persen	100,00		100,00		100,00					
		Legislasi Peraturan Daerah yang Akan Dibahas Tahun Berjalan	Persen	95,00		95,00		95,00		95,00		95,00	
		Terwujudnya Peraturan Daerah yang Berkualitas yang Tidak Bertentangan dengan Peraturan yang Lebih Tinggi	Persen	95,00		95,00		95,00		95,00		95,00	

Misi/Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD (%)										Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Perangkat Daerah Pelaksana
				2016		2017		2018		2019		2020						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	17=12/7*100	18=13/8*100	19=14/9*100	20=15/10*100	21=16/11*100	22	23=22/6*100	29							
	6.1.1.36 Program Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Korpri	Persentase Anggota KORPRI yang Mendapat Pelayanan Kesehatan	Persen	100,00	100,00	100,00	41,79	97,56	67,38	73,17	80,48	42,99	29,98	35,25	2.788.034.862,00	42,99	63,92	Sekretariat Korpri
		Meningkatnya Partisipasi Anggota KORPRI dalam Even KORPRI	Persen	100,00		100,00		80,00		100,00		60,00		60,00		60,00		
	6.1.1.37 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase Kelurahan yang Difasilitasi dan Diberdayakan	Persen	100,00	100,00										226.253.000,00		100,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
	6.1.1.38 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persentase Kelurahan yang Difasilitasi dan Diberdayakan	Persen			100,00	42,17	100,00	36,83	94,74	96,25	2,51	64,60	2,38	1.691.728.700,00	2,51	59,56	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	Kelompok			100,00		100,00		163,33		133,64		147,00		147,00		
		Persentase PKK Aktif	Persen			100,00		100,00		100,00		100,00		90,00		90,00		
		Jumlah Kelurahan yang Memiliki Profil	Kelurahan			100,00		100,00		100,00		100,00		126,00		100,00		
	6.1.1.39 Program Peningkatan Masyarakat dalam Membangun Desa	Pembentukan POKJANAL POSYANDU (Kelurahan)	Jumlah	100,00	100,00										39.895.750,00		100,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
	6.1.1.40 Program Peningkatan Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Persentase Pelaksanaan BBGRM	Persen			100,00	32,73	100,00	19,76	133,33	90,52	-	43,40	-	430.135.700,00	-	44,61	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
		BOP BDC (Business Development Centre)	Orang			100,00		-		100,00		100,00		60,00		100,00		
	6.1.1.41 Program Penanggulangan Kemiskinan	BOP P2KP	Kelurahan	100,00	100,00	-	-	-	-					126,00	67.548.200,00	100,00	25,25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
	6.1.1.42 Program Peningkatan Kualitas Perumahan	Pengendalian dan Monitoring Bedah Rumah	Kelurahan	100,00	100,00										76.364.750,00		100,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
	6.1.1.43 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Pembentukan POKJANAL POSYANDU	Kelurahan			100,00	33,12	-	64,33	100,00	77,71	100,00	90,21	126,00	211.602.000,00	100,00	68,54	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
	6.1.1.44 Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Pemukiman	Cakupan Kawasan Permukiman yang Dikembangkan	Kelurahan	100,00	100,00									126,00	177.142.600,00	100,00	100,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
	6.1.1.45 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan	Meningkatnya Lembaga Ekonomi Kelurahan yang Dikembangkan	Kelompok							100,00	97,08	100,00	20,95	55,00	138.525.500,00	100,00	52,97	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
	6.1.1.46 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Prolegda yang Disetujui Menjadi Perda	Persen	100,00	100,00	100,00	79,82	100,00	75,34	98,13	74,46	100,00	64,17	95,00	73.104.181.279,00	100,00	76,38	Sekretariat DPRD
		Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RRJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Persen	100,00		100,00		100,00		98,13		100,00		95,00		100,00		
		Terintegrasi Program-program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran ke Dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setuan DPRD	Persen	100,00		100,00		100,00		98,13		100,00		95,00		100,00		
		Terjaringnya Aspirasi Masyarakat dalam Usulan Dokumen RPJMD maupun Usulan Dokumen RKPD	Persen	100,00		100,00		100,00		98,13		100,00		95,00		100,00		
	6.1.1.47 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pimpinan dan Anggota DPRD	Persentase Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD yang Terfasilitasi Dibandungkan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD yang Direncanakan	Persen					100,00	48,28	105,26	31,56	100,00	23,75	95,00	123.512.320,00	100,00	36,72	Sekretariat DPRD
	6.1.1.48 Program Peningkatan Publikasi dan Pelayanan Informasi Media Massa	Persentase Kegiatan DPRD yang Terpublikasi	Persen					100,00	53,02	57,09	9,46	100,00	27,28	95,00	450.703.750,00	100,00	28,03	Sekretariat DPRD
	6.1.1.49 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Perda yang Disahkan Dibagi Raperda yang Diusulkan	Persen	100,00	100,00	100,00	99,86	100,00	61,60		18,93		23,32		1.085.698.012,00		58,25	Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD
		Persentase Perwalikota yang Disahkan Dibagi Perwalikota yang Diusulkan	Persen	100,00		100,00		100,00										
		Legislasi Peraturan Daerah yang Akan Dibahas Tahun Berjalan	Persen	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		95,00		100,00		
		Terwujudnya Peraturan Daerah yang Berkualitas yang Tidak Bertentangan dengan Peraturan yang Lebih Tinggi	Persen	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		95,00		100,00		

Misi/Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD										
					2020		2016 (Realisasi)		2017		2018		2019		2020	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
	6.1.1.50 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase Penduduk ber KTP per Satuan Penduduk	Persen		97,00	13.583.759.900,00	90,00	641.804.900,00	92,00	2.804.817.000,00	94,00	2.930.679.000,00	95,00	3.404.066.000,00	97,00	3.802.393.000,00
		Persentase Bayi Berakte Kelahiran	Persen		94,00		80,00		85,00		90,00		92,00		94,00	
		Persentase Pasangan Berakte Perkawinan	Persen		70,00		30,00		40,00		50,00		60,00		70,00	
		Persentase Penduduk Berkartu Keluarga (KK)	Persen		95,00		88,00		89,00		90,00		93,00		95,00	
		Persentase Anak Berkartu Identitas Anak	Persen		70,00						30,00		50,00		70,00	
		Terselenggaranya Pelayanan Terpadu Satu Atap Secara Mantap	Persen	80,00	100,00		80,00		85,00		85,00		90,00		100,00	
	6.1.1.51 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	IKM Bidang Perizinan	Persen	72,00	90,00	2.855.257.500,00	73,00	25.570.000,00			80,00	500.000.000,00	82,00	1.224.000.000,00	90,00	1.105.687.500,00
	6.1.1.52 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja	Persentase Kecamatan yang Berkinerja Baik	Persen		90,00	2.112.457.424,00					80,00	796.151.779,00	85,00	780.545.250,00	90,00	535.760.395,00
	6.1.1.53 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Persentase Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban Sosial, dan Pembangunan Wilayah	Persen		100,00	293.865.724.539,00					100,00	64.542.375.050,00	100,00	73.556.803.062,00	100,00	155.766.546.427,00
	6.1.1.54 Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban Sosial, dan Pembangunan Wilayah	Persen		100,00	8.838.688.000,00							100,00	8.838.688.000,00		
	6.1.1.55 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kecamatan	Pemenuhan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Kelurahan Kecamatan	Persen		100,00	37.800.000.040,00							100,00	37.800.000.040,00		
6.1.2 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Kemandirian Keuangan Daerah		Opini Wajar Tanpa Pengecualian BPK			WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP	
	6.1.2.1 Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK atas LKPD	Predikat	WTP	WTP	92.510.489.319,00	WTP	13.695.718.529,00	WTP	6.287.536.837,00	WTP	17.583.777.048,00	WTP	30.345.355.234,00	WTP	24.598.101.671,00
		Ketepatan Waktu Penyusunan RAPBD dan RAPBD-P	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
		Ketepatan Waktu penyelesaian SP2D yang Dinyatakan Lengkap dan Sah Secara Ketentuan	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
		Persentase Temuan Penatausahaan Keuangan oleh BPK/Inspektorat yang Ditindaklanjuti	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
		Persentase Kesesuaian Data Rincian Data Total BMD dengan Aktiva Tetap di Neraca Pemerintah Kota	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
		Persentase Terlaksananya Penilaian dan Penghapusan BMD Sesuai dengan Usulan OPD	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
		Nilai Indeks Kepuasan atas Layanan Kas Daerah	Angka	2,00	4,00		2,00		2,00		3,00		3,00		4,00	
		Ketepatan Waktu Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Daerah	Persen	100,00			100,00		100,00		100,00					
		Terselaksananya Kewajiban Pembayaran Hutang	Persen		100,00				100,00				100,00			
		Persentase Penerimaan Pajak Daerah terhadap PAD	Persen	65,01			67,17									
		Persentase Jumlah Peningkatan Objek Pajak	Persen				12,72									
		Persentase PAD terhadap Total Pendapatan Daerah			32,47		23,50		36,06		32,84		33,32		32,47	
	6.1.2.2 Program Optimalisasi Penerimaan PAD	Persentase Penerimaan Pajak Daerah terhadap PAD	Persen		54,01	29.253.765.080,00			55,48	5.088.730.430,00	66,41	6.326.104.760,00	61,48	7.109.537.260,00	54,01	10.729.392.630,00
		Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak	Persen		75,00				75,00		75,00		75,00		75,00	
		Persentase Jumlah Peningkatan Objek Pajak	Persen		13,72				12,97		13,22		13,47		13,72	
Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah		Persen		79,52				79,00		79,17		79,35		79,52		

Misi/Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Target RPJMD									
				2016		2017		2018		2019		2020	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	12		13		14		15		16	
	6.1.1.50 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase Penduduk ber KTP per Satuan Penduduk	Persen	90,00	641.804.900,00	92,00	2.540.303.825,00	94,00	2.679.644.057,00	95,00	3.112.519.633,00	97,00	3.362.107.352,00
		Persentase Bayi Berakte Kelahiran	Persen	80,00		85,00		70,00		92,00		94,00	
		Persentase Pasangan Berakte Perkawinan	Persen	30,00		40,00		20,00		60,00		70,00	
		Persentase Penduduk Berkartu Keluarga (KK)	Persen	88,00		89,00		73,00		93,00		95,00	
		Persentase Anak Berkartu Identitas Anak	Persen					15,00		50,00		70,00	
		Terselenggaranya Pelayanan Terpadu Satu Atap Secara Mantap	Persen	80,00		85,00		85,00		90,00		100,00	
	6.1.1.51 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	IKM Bidang Perizinan	Persen	73,00	25.570.000,00			80,00	420.798.701,00	81,13	1.034.881.801,00	85,25	563.750.826,00
	6.1.1.52 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja	Persentase Kecamatan yang Berkinerja Baik	Persen					80,00	402.293.458,00	80,00	469.912.000,00	90,00	82.263.773,00
	6.1.1.53 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Persentase Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban Sosial, dan Pembangunan Wilayah	Persen					100,00	55.075.825.055,00	100,00	61.878.506.871,00	100,00	134.063.288.084,00
	6.1.1.54 Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban Sosial, dan Pembangunan Wilayah	Persen							100,00	8.108.620.000,00		
	6.1.1.55 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kecamatan	Pemenuhan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Kelurahan Kecamatan	Persen							100,00	37.790.973.773,00		
6.1.2 Meningkatkan Kualitas Pengelolaan dan Kemandirian Keuangan Daerah		Opini Wajar Tanpa Pengecualian BPK		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP	
	6.1.2.1 Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK atas LKPD	Predikat	WTP	13.695.718.529,00	WTP	5.629.942.880,00	WTP	15.523.846.434,00	WTP	29.180.120.065,00	WTP	24.322.854.354,00
		Ketepatan Waktu Penyusunan RAPBD dan RAPBD-P	Persen	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
		Ketepatan Waktu penyelesaian SP2D yang Dinyatakan Lengkap dan Sah Secara Ketentuan	Persen	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
		Persentase Temuan Penatausahaan Keuangan oleh BPK/Inspektorat yang Ditindaklanjuti	Persen	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
		Persentase Kesesuaian Data Rincian Data Total BMD dengan Aktiva Tetap di Neraca Pemerintah Kota	Persen	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
		Persentase Terlaksananya Penilaian dan Penghapusan BMD Sesuai dengan Usulan OPD	Persen	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
		Nilai Indeks Kepuasan atas Layanan Kas Daerah	Angka	2,00		2,00		3,00		3,00		4,00	
		Ketepatan Waktu Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Daerah	Persen	100,00		100,00		100,00					
		Terselesaikannya Kewajiban Pembayaran Hutang	Persen			100,00				99,99		99,99	
		Persentase Penerimaan Pajak Daerah terhadap PAD	Persen	67,17									
		Persentase Jumlah Peningkatan Objek Pajak	Persen	12,72									
		Persentase PAD terhadap Total Pendapatan Daerah		23,50		29,44		25,45		27,34		25,45	
	6.1.2.2 Program Optimalisasi Penerimaan PAD	Persentase Penerimaan Pajak Daerah terhadap PAD	Persen			60,61	4.361.342.068,00	71,95	5.375.298.550,00	76,59	5.970.563.600,00	76,14	8.490.015.144,00
		Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak	Persen			60,54		85,86		86,83		75,80	
		Persentase Jumlah Peningkatan Objek Pajak	Persen			17,98		11,67		11,67		17,98	
		Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah	Persen			74,30		78,08		79,30		79,30	

Misi/Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD (%)										Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Perangkat Daerah Pelaksana
				2016		2017		2018		2019		2020						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	17=12/7*100		18=13/8*100		19=14/9*100		20=15/10*100		21=16/11*100		22		23=22/6*100		29
	6.1.1.50 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase Penduduk ber KTP per Satuan Penduduk	Persen	100,00	100,00	100,00	90,57	100,00	91,43	100,00	91,44	100,00	88,42	97,00	12.336.379.767,00	100,00	90,82	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase Bayi Berakte Kelahiran	Persen	100,00			100,00		77,78		100,00		100,00		94,00		100,00	
		Persentase Pasangan Berakte Perkawinan	Persen	100,00			100,00		40,00		100,00		100,00		70,00		100,00	
		Persentase Penduduk Berkartu Keluarga (KK)	Persen	100,00			100,00		81,11		100,00		100,00		95,00		100,00	
		Persentase Anak Berkartu Identitas Anak	Persen					50,00		100,00		100,00		70,00		100,00		
		Terselenggaranya Pelayanan Terpadu Satu Atap Secara Mantap	Persen	100,00			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
	6.1.1.51 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	IKM Bidang Perizinan	Persen	100,00	100,00			100,00	84,16	98,94	84,55	94,72	50,99	85,25	2.045.001.328,00	94,72	71,62	Dinas Pemananam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	6.1.1.52 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja	Persentase Kecamatan yang Berkinerja Baik	Persen					100,00	50,53	94,12	60,20	100,00	15,35	90,00	954.469.231,00	100,00	45,18	Kecamatan
	6.1.1.53 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Persentase Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban Sosial, dan Pembangunan Wilayah	Persen					100,00	85,33	100,00	84,12	100,00	86,07	100,00	251.017.620.010,00	100,00	85,42	Kecamatan
	6.1.1.54 Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban Sosial, dan Pembangunan Wilayah	Persen							100,00	91,74			100,00	8.108.620.000,00	100,00	91,74	Kecamatan
	6.1.1.55 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kecamatan	Pemenuhan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Kelurahan Kecamatan	Persen							100,00	99,98			100,00	37.790.973.773,00	100,00	99,98	Kecamatan
6.1.2 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Kemandirian Keuangan Daerah	Opini Wajar Tanpa Pengecualian BPK		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		WTP		100,00			
6.1.2.1 Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK atas LKPD	Predikat	100,00	100,00	100,00	89,54	100,00	100,00	100,00	96,16	100,00	98,88	WTP	88.352.482.262,00	WTP	95,51	BPPRD, BPKAD, Sekretariat Daerah dan Seluruh OPD	
	Ketepatan Waktu Pengususan RAPBD dan RAPBD-P	Persen	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
	Ketepatan Waktu penyelesaian SP2D yang Dinyatakan Lengkap dan Sah Secara Ketentuan	Persen	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
	Persentase Temuan Penatausahaan Keuangan oleh BPK/Inspektorat yang Ditindaklanjuti	Persen	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
	Persentase Kesesuaian Data Rincian Data Total BMD dengan Aktiva Tetap di Neraca Pemerintah Kota	Persen	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
	Persentase Terlaksananya Penilaian dan Penghapusan BMD Sesuai dengan Usulan OPD	Persen	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
	Nilai Indeks Kepuasan atas Layanan Kas Daerah	Angka	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		4,00		100,00			
	Ketepatan Waktu Pengususan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Daerah	Persen	100,00		100,00		100,00											
	Terselesaikannya Kewajiban Pembayaran Hutang	Persen			100,00				99,99									
	Persentase Penerimaan Pajak Daerah terhadap PAD	Persen	100,00															
	Persentase Jumlah Peningkatan Objek Pajak	Persen	100,00															
	Persentase PAD terhadap Total Pendapatan Daerah		100,00		81,64		77,50		82,05		78,38		25,45		78,38			
6.1.2.2 Program Optimalisasi Penerimaan PAD	Persentase Penerimaan Pajak Daerah terhadap PAD	Persen			109,25	85,71	108,34	84,97	124,58	83,98	140,97	79,13	76,14	24.197.219.362,00	140,97	82,71	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	
	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak	Persen			3,38		114,48		115,77		101,07		75,80		101,07			
	Persentase Jumlah Peningkatan Objek Pajak	Persen			138,63		88,28		86,64		131,05		17,98		131,05			
	Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah	Persen			94,05		98,62		99,94		99,72		79,30		99,72			

Misi/Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Periode Perencanaan		Target RPJMD										
					2020		2016 (Realisasi)		2017		2018		2019		2020		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		
		BUMD dengan Kategori Sehat dan Baik			5		3		5		5		5		5		
	6.1.2.3	Program Pengembangan Ekonomi Daerah	Persentase Proposal CSR yang Terfasilitasi	Persen	100,00	2.601.922.000,00	100,00	247.057.000,00	100,00	525.000.000,00	100,00	575.000.000,00	100,00	750.000.000,00	100,00	504.865.000,00	
			Persentase Penyediaan Data Harga Sembako	Persen	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
6.1.3 Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah		Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah			ST		T		ST		ST		ST		ST		
	6.1.3.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	98,00	1.256.221.845.405,29	98,00	197.462.420.521,00	98,00	273.537.716.319,29	98,00	213.054.993.532,00	98,00	273.560.044.119,00	98,00	298.606.670.914,00	
	6.1.3.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Persen	98,00	244.625.820.484,87	80,00	23.490.651.353,00	98,00	43.253.012.350,00	98,00	46.380.517.288,00	98,00	66.339.274.003,00	98,00	65.162.365.490,87	
			Inventaris Kantor yang Terpelihara	Persen	98,00		85,00		98,00		98,00		98,00		98,00		
	6.1.3.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Dinas KDH	Persen	100,00	7.116.134.600,00	100,00	1.262.829.600,00	100,00	1.215.000.000,00	100,00	1.501.200.000,00	100,00	1.658.500.000,00	100,00	1.478.605.000,00	
	6.1.3.4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kualitas SDM dalam Pemenuhan Kompetensi Jabatan	Persen	100,00	7.541.567.378,00	60,00	218.580.952,00	100,00	1.623.281.859,00	100,00	2.832.568.567,00	100,00	2.417.654.000,00	100,00	449.482.000,00	
			Cakupan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa Melalui SPSE	Persen	100,00				100,00		100,00		100,00		100,00		
	6.1.3.5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan OPD Tepat Waktu	Persen	100,00	13.951.474.308,21	100,00	1.952.461.989,00	100,00	1.801.737.423,21	100,00	3.267.703.836,00	100,00	3.063.110.560,00	100,00	3.866.460.500,00	
	6.1.3.6	Program Peningkatan Kualitas Pejabat Daerah Kerjasama Antarpemda	Nilai EKPPD Tinggi (3)	Angka	3,00	2.428.577.655,00	3,00	306.028.500,00	3,00	515.906.280,00	3,00	525.906.155,00	3,00	520.215.900,00	3,00	560.520.820,00	
			Tingkat Partisipasi Pemkot dalam Kegiatan APEKSI Dibandingkan Jumlah Kegiatan APEKSI	Persen	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	6.1.3.7	Program Kerjasama Pembangunan	Persentase Pelaporan/ Kegiatan TP dan DAK	Persen	100,00	11.312.500,00	100,00	11.312.500,00									
	6.1.3.8	Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	Persen	100,00	981.800.000,00				100,00	475.000.000,00	100,00	145.000.000,00	100,00	161.800.000,00	100,00	200.000.000,00
			Tersedianya Dokumen Evaluasi RPJMD	Dokumen	ada							-				ada	
			Tersedianya Dokumen Evaluasi terhadap Hasil Pelaksanaan RKPD	Dokumen	ada							ada		ada		ada	
			Tersedianya Dokumen Evaluasi RPJPD	Dokumen	-						-		-			-	
			Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Persen	100,00					100,00		100,00		100,00		100,00	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	
Predikat Kinerja																	

Keterangan
 Tidak Dilaksanakan pada Tahun Tersebut

Misi/Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Target RPJMD										
				2016		2017		2018		2019		2020		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	12		13		14		15		16		
		BUMD dengan Kategori Sehat dan Baik		3		3		3		3		5		
	6.1.2.3	Program Pengembangan Ekonomi Daerah	Persentase Proposal CSR yang Terfasilitasi	Persen	100,00	247.057.000,00	100,00	383.517.400,00	100,00	498.395.500,00	100,00	695.202.034,00	100,00	265.589.500,00
			Persentase Penyediaan Data Harga Sembako	Persen	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
6.1.3 Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah		Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		T		T		ST		ST		Dalam Proses		
	6.1.3.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	98,00	197.462.420.521,00	98,00	231.653.086.366,00	98,00	198.332.519.981,00	98,00	240.724.499.676,00	98,00	243.173.948.574,00
	6.1.3.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Persen	80,00	23.490.651.353,00	98,00	26.273.039.218,00	98,00	31.718.769.543,00	98,00	43.525.751.246,00	98,00	38.207.322.323,00
			Inventaris Kantor yang Terpelihara	Persen	85,00		98,00		98,00		98,00		98,00	
	6.1.3.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Dinas KDH	Persen	100,00	1.262.829.600,00	100,00	932.950.000,00	100,00	1.095.436.000,00	100,00	1.114.600.000,00	100,00	1.182.455.000,00
	6.1.3.4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kualitas SDM dalam Pemenuhan Kompetensi Jabatan	Persen	60,00	218.580.952,00	100,00	991.378.611,00	100,00	1.692.188.975,00	100,00	1.355.026.082,00	100,00	193.217.462,00
			Cakupan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa Melalui SPSE	Persen			100,00		100,00		100,00		100,00	
	6.1.3.5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan OPD Tepat Waktu	Persen	100,00	1.952.461.989,00	100,00	1.402.256.658,00	100,00	2.497.137.666,00	100,00	2.669.501.338,00	100,00	1.828.845.966,00
	6.1.3.6	Program Peningkatan Kualitas Pejabat Daerah Kerjasama Antarpemda	Nilai EKPPD Tinggi (3)	Angka	3,00	306.028.500,00	3,00	171.657.367,00	2,80	234.815.235,00	3,00	262.079.498,00	3,00	371.156.236,00
			Tingkat Partisipasi Pemkot dalam Kegiatan APEKSI Dibandingkan Jumlah Kegiatan APEKSI	Persen	100,00		100,00		50,00		100,00		100,00	
	6.1.3.7	Program Kerjasama Pembangunan	Persentase Pelaporan/ Kegiatan TP dan DAK	Persen	100,00	11.312.500,00								
6.1.3.8	Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	Persen			100,00	344.433.900,00	100,00	121.400.100,00	100,00	120.961.200,00	100,00	93.241.505,00	
		Tersedianya Dokumen Evaluasi RPJMD	Dokumen			ada		-				-		
		Tersedianya Dokumen Evaluasi terhadap Hasil Pelaksanaan RKPD	Dokumen			ada		ada		ada		Ada		
		Tersedianya Dokumen Evaluasi RPJPD	Dokumen			-		-				-		
		Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Persen			100,00		100,00		100,00		100,00		
Rata-rata capaian kinerja (%)														
Predikat Kinerja														

Keterangan
 Tidak Dilaksanakan pada Tahun Tersebut

Misi/Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD (%)										Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		Perangkat Daerah Pelaksana	
				2016		2017		2018		2019		2020							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1	2	3	4	17=12/7*100		18=13/8*100		19=14/9*100		20=15/10*100		21=16/11*100		22		23=22/6*100		29	
		BUMD dengan Kategori Sehat dan Baik		100,00		60,00		60,00		60,00		100,00		5		100,00			
	6.1.2.3	Program Pengembangan Ekonomi Daerah	Persentase Proposal CSR yang Terfasilitasi	Persen	100,00	100,00	100,00	73,05	100,00	86,68	100,00	92,69	100,00	52,61	100,00	2.089.761.434,00	100,00	80,32	Sekretariat Daerah
			Persentase Penyediaan Data Harga Sembako	Persen	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
6.1.3 Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah		Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		100,00		50,00		100,00		100,00		-		100,00		100,00			
	6.1.3.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	Persen	100,00	100,00	100,00	84,69	100,00	93,09	100,00	88,00	100,00	81,44	98,00	1.111.346.475.118,00	100,00	88,47	Seluruh OPD
	6.1.3.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	Persen	100,00	100,00	100,00	60,74	100,00	68,39	100,00	65,61	100,00	58,63	98,00	163.215.533.683,00	100,00	66,72	Seluruh OPD
			Inventaris Kantor yang Terpelihara	Persen	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		98,00		100,00		
	6.1.3.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Dinas KDH	Persen	100,00	100,00	100,00	76,79	100,00	72,97	100,00	67,21	100,00	79,97	100,00	5.588.270.600,00	100,00	78,53	Seluruh OPD
	6.1.3.4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kualitas SDM dalam Pemenuhan Kompetensi Jabatan	Persen	100,00	100,00	100,00	61,07	100,00	59,74	100,00	56,05	100,00	42,99	100,00	4.450.392.082,00	100,00	59,01	Seluruh OPD
			Cakupan Pelayanan Pengadaan Barang-Jasa Melalui SPSE	Persen			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	6.1.3.5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan OPD Tepat Waktu	Persen	100,00	100,00	100,00	77,83	100,00	76,42	100,00	87,15	100,00	47,30	100,00	10.350.203.617,00	100,00	74,19	Seluruh OPD
	6.1.3.6	Program Peningkatan Kualitas Pejabat Daerah Kerjasama Antarpemda	Nilai EKPPD Tinggi (3)	Angka	100,00	100,00	100,00	33,27	93,33	44,65	100,00	50,38	100,00	66,22	3,00	1.345.736.836,00	100,00	55,41	Sekretariat Daerah
			Tingkat Partisipasi Pemkot dalam Kegiatan APEKSI Dibandingkan Jumlah Kegiatan APEKSI	Persen	100,00		100,00		50,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	6.1.3.7	Program Kerjasama Pembangunan	Persentase Pelaporan/Kegiatan TP dan DAK	Persen	100,00	100,00									100,00	11.312.500,00	100,00	100,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	6.1.3.8	Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	Persen			100,00	72,51	100,00	83,72	100,00	74,76	100,00	46,62	100,00	680.036.705,00	100,00	69,26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Tersedianya Dokumen Evaluasi RPJMD	Dokumen			100,00		-			-		-		-			
			Tersedianya Dokumen Evaluasi terhadap Hasil Pelaksanaan RKPD	Dokumen			100,00		100,00		100,00		100,00	ada		100,00			
			Tersedianya Dokumen Evaluasi RPJPD	Dokumen					-			-		-		-			
			Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Persen			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
Rata-rata capaian kinerja (%)				97,86	88,69	86,46	52,99	102,26	68,51	120,32	70,15	107,14	44,50			107,11	68,76		
Predikat Kinerja				ST	T	T	R	ST	S	ST	S	ST	SR			ST	S		

Keterangan
 Tidak Dilaksanakan pada Tahun Tersebut



BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Ruang lingkup Keuangan daerah meliputi:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak lain;
3. Penerimaan daerah;
4. Pengeluaran daerah;
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diamanatkan

bahwa dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada daerah maka penyelenggara pemerintahan daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dan dalam rangka mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah untuk periode 2021-2026, Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam melakukan penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

3.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Analisis kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kinerja kondisi keuangan di masa lalu. Dari analisis kinerja beberapa tahun ke belakang dapat menjadi referensi melakukan proyeksi kinerja kondisi keuangan melalui berbagai macam metode analisa misalnya dengan melihat rata-rata pertumbuhan, menggunakan asumsi makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain), dan dapat juga dengan dasar kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah serta dapat melalui kebijakan bidang keuangan daerah.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan daerah. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas: pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, sehingga menganalisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan terlebih dahulu harus memahami jenis obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan, susunan/struktur masing-masing APBD.

Tabel 3.1 berikut menunjukkan rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran pendapatan belanja daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2016 s.d. 2020.

Tabel 3.1 Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2016 s.d. 2020 Kota Bandar Lampung

Uraian	Tahun					Rata2 Pertumbuhan
	2016	2017	2018	2019	2020	
PENDAPATAN	2.057.086.652.010,39	2.081.420.040.685,32	2.162.096.665.248,89	2.294.656.383.146,90	2.145.801.470.570,74	1,18
PENDAPATANASLI DAERAH (PAD):	483.379.398.034,84	612.809.680.623,87	550.275.048.130,32	627.296.544.826,64	537.542.438.100,13	4,07
Pajak daerah	324.667.322.496,99	373.764.303.246,73	398.448.008.992,24	480.420.824.001,04	410.455.262.268,60	6,93
Retribusi daerah	49.653.325.819,00	28.256.993.503,00	29.579.486.070,00	29.626.488.615,00	25.725.636.298,00	(12,85)
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	10.886.472.354,14	13.461.922.795,62	14.894.667.167,54	17.468.775.203,28	21.276.185.222,10	18,34
Lain-lain PAD yang sah	98.172.277.364,71	197.326.461.078,52	107.352.885.900,54	99.780.457.007,32	80.085.354.311,43	7,15
PENDAPATAN TRANSFER:	1.473.281.572.797,00	1.456.610.360.061,45	1.521.812.767.118,57	1.573.905.158.320,26	1.493.843.904.312,61	0,42
- Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan)	1.376.175.794.387,00	1.408.084.149.250,00	1.364.968.467.075,00	1.400.623.202.255,00	1.320.383.923.526,00	(0,97)
Dana Bagi Hasil Pajak	53.196.217.333,00	52.149.891.576,00	52.082.460.745,00	38.159.663.251,00	52.417.270.224,00	2,13
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	5.657.394.267,00	14.367.286.176,00	13.246.278.505,00	5.813.609.460,00	8.258.705.982,00	33,03
Dana Alokasi Umum	1.053.232.762.000,00	1.034.730.849.000,00	1.034.730.849.000,00	1.110.510.308.000,00	1.019.027.785.000,00	(0,67)
Dana Alokasi Khusus	264.089.420.787,00	306.836.122.498,00	264.908.878.825,00	246.139.621.544,00	240.680.162.320,00	(1,70)
- Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	-	-	-	9.163.335.000,00	40.888.117.000,00	346,21
Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	-	-	-	9.163.335.000,00	40.888.117.000,00	346,21
- Transfer Pemerintah Provinsi	97.105.778.410,00	48.526.210.811,45	156.844.300.043,57	164.118.621.065,26	132.571.863.786,61	39,65
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	97.105.778.410,00	48.526.210.811,45	156.844.300.043,57	164.118.621.065,26	132.571.863.786,61	39,65

Uraian	Tahun					Rata2 Pertumbuhan
	2016	2017	2018	2019	2020	
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	100.425.681.178,55	12.000.000.000,00	90.008.850.000,00	93.454.680.000,00	114.415.128.158,00	147,07
Pendapatan Hibah	95.425.681.178,55	4.500.000.000,00	90.008.850.000,00	93.454.680.000,00	114.415.128.158,00	457,79
Dana insentif daerah/Tunjangan Guru Non Sertifikasi	5.000.000.000,00	7.500.000.000,00	-	-	-	50,00
BELANJA	1.755.858.575.285,90	2.207.777.630.380,46	2.190.205.773.408,55	2.190.661.163.232,67	2.127.497.164.301,98	5,52
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.033.425.230.162,07	1.003.335.518.094,19	916.343.556.345,00	965.431.296.426,00	999.053.027.312,00	(0,69)
Belanja Pegawai	996.238.369.851,00	942.773.372.279,00	846.288.947.463,00	878.091.123.309,00	858.447.741.229,00	(3,52)
Belanja Bunga	2.520.236.265,07	3.782.146.561,19	15.537.458.764,00	15.223.964.418,00	3.391.039.104,00	70,28
Belanja Hibah	29.436.203.850,00	52.529.492.354,00	49.493.407.486,00	58.115.459.419,00	103.783.336.979,00	42,17
Belanja Bantuan Sosial	2.545.000.000,00	2.576.000.000,00	2.372.500.000,00	9.841.250.000,00	6.992.750.000,00	69,79
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa/ Kelurahan Dan Partai Politik	1.078.654.000,00	1.171.220.000,00	1.171.220.000,00	1.174.259.780,00	-	(22,79)
Belanja Tidak Terduga	1.606.766.196,00	503.286.900,00	1.480.022.632,00	2.985.239.500,00	26.438.160.000,00	253,18
BELANJA LANGSUNG	722.433.345.123,83	1.204.442.112.286,27	1.273.862.217.063,55	1.225.229.866.806,67	1.128.444.136.989,98	15,19
Belanja Pegawai	128.778.385.730,69	130.649.350.076,99	155.907.216.486,50	245.927.369.156,50	312.251.919.810,33	26,37
Belanja Barang Dan Jasa	394.447.506.838,54	584.251.087.735,28	692.755.797.238,54	668.577.338.927,48	552.618.463.513,15	11,46
Belanja Modal	199.207.452.554,60	489.541.674.474,00	425.199.203.338,51	310.725.158.722,69	263.573.753.666,50	22,63

Uraian	Tahun					Rata2 Pertumbuhan
	2016	2017	2018	2019	2020	
Penerimaan Pembiayaan	24.563.686.310,24	172.826.174.508,65	85.741.471.094,51	8.800.003.559,85	14.266.985.974,08	131,40
SiLPA TA sebelumnya	24.563.686.310,24	12.065.073.808,65	10.408.821.794,51	8.800.003.559,85	14.266.985.974,08	(4,49)
Penerimaan Pinjaman Daerah	0	160.761.100.700,00	75.332.649.300,00	0,00	-	(38,29)
Pengeluaran Pembiayaan	306.014.331.692,49	36.059.763.019,00	48.832.359.375,00	98.523.437.500,00	20.755.859.375,00	(7,49)
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	95.425.681.178,55	13.500.000.000,00	34.076.500.000,00	39.500.000.000,00	6.000.000.000,00	(0,58)
Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah	25.600.000.000,00	15.164.218.418,00	14.755.859.375,00	59.023.437.500,00	14.755.859.375,00	45,39
Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada Masyarakat	184.988.650.513,94	7.395.544.601,00	0,00	0,00	0,00	(49,00)
PEMBIAIAN NETO	(281.450.645.382,25)	136.766.411.489,65	36.909.111.719,51	(89.723.433.940,15)	(6.488.873.400,92)	(164,37)

Sumber: LHP LKPD Kota Bandar Lampung, 2016-2020

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. (UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Pendapatan Daerah selain berasal dari penerimaan dari daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah, juga berasal dari penerimaan dari dana perimbangan serta lain-lain pendapatan yang sah.

Pendapatan daerah Kota Bandar Lampung selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2016-2020) cenderung mengalami peningkatan meskipun pada tahun 2020 mengalami penurunan. Secara umum penurunan pendapatan daerah Kota Bandar Lampung tahun 2020 tersebut disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia dan Kota Bandar Lampung.

Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah Kota Bandar Lampung selama kurun waktu 2016-2020 adalah sebesar 1,18 persen dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi pada lain-lain pendapatan yang sah yaitu sebesar 147,07 persen, selanjutnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tumbuh rata-rata sebesar 4,07 persen.

Pada tahun 2017 terjadi peningkatan pendapatan daerah yaitu sebesar Rp24.333.388.674,93 dengan persentase peningkatan sebesar 1,18 persen, dibandingkan pendapatan daerah Tahun 2016. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan pendapatan daerah sebesar Rp80.676.624.563,57 dengan persentase peningkatan sebesar 3,88 persen dibandingkan pendapatan daerah tahun 2017. Pada Tahun 2019 terjadi peningkatan pendapatan daerah sebesar Rp132.559.717.898,01 dengan persentase peningkatan sebesar 6,13 persen dibandingkan pendapatan daerah Tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2020 terjadi penurunan pendapatan daerah sebesar Rp148.854.912.576,16 dibandingkan dengan tahun 2019 dengan persentase penurunan sebesar 6,49 persen. Penurunan pendapatan daerah tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 tersebut terjadi pada pos Pendapatan

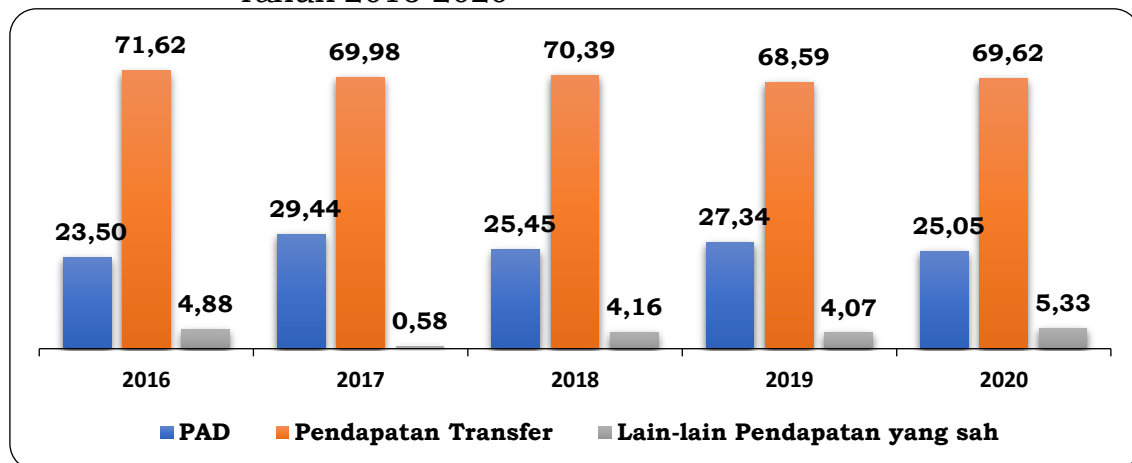
Asli Daerah dan pos Pendapatan Transfer yang masing-masing mengalami penurunan sebesar 14,31 persen dan 5,09 persen, sedangkan pos Lain-lain Pendapatan yang sah mengalami peningkatan sebesar 22,43 persen yang berasal dari kenaikan pendapatan hibah.

Ditinjau dari kontribusi masing-masing pos pendapatan terhadap total pendapatan daerah Kota Bandar Lampung selama kurun waktu 2016-2020 maka pos pendapatan daerah dengan kontribusi paling tinggi adalah pendapatan transfer yang terdiri dari transfer pemerintah pusat (dana perimbangan), transfer pemerintah pusat lainnya dan transfer pemerintah provinsi.

Adapun secara lebih rinci pendapatan transfer yang kontribusinya paling besar adalah transfer pemerintah pusat (dana perimbangan). Selanjutnya jika transfer pemerintah pusat (dana perimbangan) tersebut diurutkan dari yang paling besar porsinya secara berurutan adalah dana alokasi umum kemudian dana alokasi khusus kemudian dana bagi hasil pajak dan yang terakhir adalah dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam)

Berikut adalah diagram yang menunjukkan kontribusi masing-masing pos Pendapatan Daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang sah Tahun 2016-2020:

Diagram 3.1 Kontribusi Pos Pendapatan Transfer-Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah dan Lain-lain Pendapatan yang sah Tahun 2016-2020



Sumber: LHP LKPD Kota Bandar Lampung, 2016-2020

Tingginya kontribusi Pendapatan Transfer terhadap total pendapatan daerah Kota Bandar Lampung jika dibandingkan dengan tingkat kontribusi PAD mencerminkan tingginya ketergantungan daerah terhadap sumber ekstern, khususnya pemerintah pusat, atau dapat juga dikatakan bahwa Kapasitas Fiskal Daerah Kota Bandar Lampung dalam posisi yang rendah. Namun begitu, untuk kontribusi dari sektor pajak dan retribusi pada perkembangannya mampu memberikan kontribusi yang tinggi untuk pendapatan daerah Kota Bandar Lampung.

B. Belanja Daerah

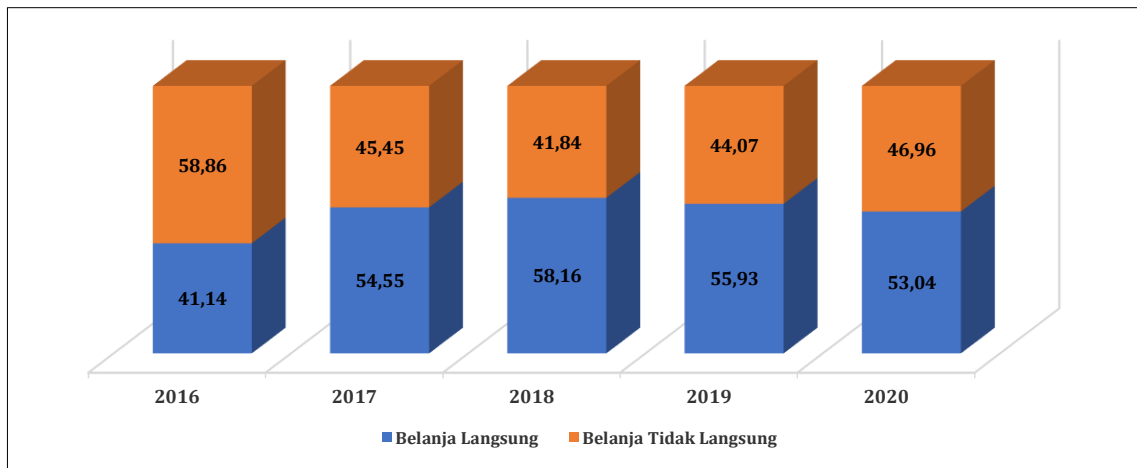
Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Kondisi belanja daerah Pemerintah Kota Bandar Lampung selama kurun waktu lima tahun terakhir (2016-2020) dalam perkembangannya sebagaimana pendapatan daerah yakni cenderung mengalami peningkatan meskipun pada tahun 2020 mengalami penurunan.

Pada tahun 2016, total belanja sebesar Rp1.755.858.575.285,90 dan pada tahun 2017 sebesar Rp2.207.777.630.380,46. Pada tahun 2018 total belanja Pemerintah Kota Bandar Lampung mencapai Rp2.190.205.773.408,55 dan pada tahun 2019 sebesar Rp2.190.661.163.232,67. Pada tahun 2020 total belanja Pemerintah Kota Bandar Lampung sebesar Rp2.127.497.164.301,98. Rata-rata pertumbuhan total belanja Pemerintah Kota Bandar Lampung pada periode tahun 2016-2021 mencapai 5,52 persen

Belanja daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung merupakan komponen belanja daerah yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil kepada kelurahan, bantuan keuangan kepada kelurahan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan Belanja Langsung merupakan komponen belanja daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari

belanja pegawai, belanja barang-jasa, dan belanja modal. Berikut adalah proporsi realisasi belanja tidak langsung dan belanja langsung Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2020:

Diagram 3.2 Proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Pemerintah Kota Bandar Lampung 2016-2020 (Persen)



Sumber: LRA Kota Bandar Lampung, 2016-2020

Selama periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 terlihat bahwa struktur/komposisi antara realisasi Belanja Tidak Langsung dengan Belanja Langsung menunjukkan angka yang semakin berimbang dengan kecenderungan proporsi realisasi Belanja Langsung semakin lebih besar dibandingkan dengan Belanja Tidak Langsung. Belanja Tidak Langsung pada tahun 2016 sebesar 58,86 persen; pada tahun 2017 sebesar 45,45 persen; pada tahun 2018 sebesar 41,84 persen; pada tahun 2019 sebesar 44,07 persen dan pada tahun 2020 sebesar 46,96 persen. Sedangkan Belanja pada tahun 2016 sebesar 41,14 persen; pada tahun 2017 sebesar 54,55 persen; pada tahun 2018 sebesar 58,16 persen; pada tahun 2019 sebesar 55,93 persen dan pada tahun 2020 sebesar 53,04 persen. Selanjutnya belanja tidak langsung tersebut secara rata-rata digunakan untuk belanja pegawai sebesar 91,92 persen, sementara belanja langsung secara rata-rata digunakan untuk belanja pegawai sebesar 17,73 persen dan sebesar 52,21 persen untuk belanja barang dan jasa.

C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar Kembali dan/atau pengeluaran Yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dalam penganggaran pemerintah daerah, pembiayaan daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Berdasarkan tabel 3.1 diatas tampak bahwa rata-rata pertumbuhan realisasi pembiayaan netto Kota Bandar Lampung mulai Tahun 2016 sampai dengan 2020 sebesar -164,37 persen dengan rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar 131,40 persen dan rata-rata pertumbuhan realisasi pengeluaran pembiayaan -7,49 persen.

3.1.2 Neraca Daerah

Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah.

Neraca Daerah adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana pada periode tertentu. Jumlah aset yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung mengalami peningkatan selama kurun waktu 2016-2020. Rata-rata Peningkatan aset Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2020 adalah sebesar 8,41 persen. Kewajiban Pemerintah Kota Bandar Lampung selama kurun waktu 2016-2020 cenderung meningkat meskipun pada tahun 2018 mengalami penurunan. Rata-rata peningkatan kewajiban Pemerintah Kota

Bandar Lampung selama kurun waktu 2016-2020 adalah sebesar 21,24 persen dengan peningkatan tertinggi terjadi pada tahun anggaran 2020 yaitu sebesar 54,02 persen. Secara keseluruhan, ekuitas Pemerintah Kota Bandar Lampung selama kurun waktu 2016-2020 cenderung meningkat. Rata-rata peningkatan ekuitas Pemerintah Kota Bandar Lampung selama kurun waktu 2016-2020 adalah sebesar 7,15 persen.

Neraca Daerah Kota Bandar Lampung tahun 2016-2020 tampak pada tabel berikut :

Tabel 3.2 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Bandar Lampung

Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan
	2016	2017	2018	2019	2020	
ASET	3.969.587.683.021,55	4.054.682.810.254,11	4.845.482.340.685,16	5.341.823.605.415,54	5.435.388.082.111,43	8,41
ASET LANCAR	336.210.680.759,71	280.865.566.917,71	319.534.947.210,04	358.956.956.036,83	295.167.470.550,25	(2,03)
Kas di Kas Daerah	82.303.409,51	419.034.005,12	371.465.967,45	196.907.162,37	329.273.370,38	104,50
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	46.134,00	82.499,00	523.695.100,00	326.324,14	158.667,13
Kas di BLUD RSUD A. Dadi Tjokrodipo	4.429.471.999,77	2.354.184.955,21	609.907.044,17	4.530.880.222,81	4.221.472.374,33	128,78
Kas di BLUD Puskesmas	7.292.401.694,76	7.439.763.210,87	7.809.954.661,03	6.527.189.588,90	6.859.727.943,18	(1,08)
Kas di Bendahara Penerimaan	54.229.300,00	0	35.000.000,00	0	0	(50,00)
Kas Lainnya	8.200.248,00	222.200.101,11	0	3.016.800.000,00	404.632.846,81	605,77
Deposito Berjangka pada BLUD RSUD	0	0	0	0	0	-
Piutang Pajak	218.409.335.324,00	237.989.972.415,00	261.881.755.825,40	290.011.716.360,40	323.540.671.237,68	10,33
Penyisihan Piutang Pajak	-132.139.288.704,08	-148.446.454.163,64	-153.030.874.555,80	-177.010.390.843,60	-197.929.881.433,48	10,73
Piutang Retribusi	4.758.726.270,00	5.250.870.625,00	5.275.560.193,00	5.333.231.218,00	5.564.683.277,00	4,06
Penyisihan Piutang Retribusi	-911.824.242,40	-1.986.076.564,80	-2.805.197.826,00	-3.367.872.222,00	-3.901.675.070,00	48,74
Piutang HasilPengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				6.913.968.329,10	7.728.596.400,00	11,78
Beban Jasa Dibayar Dimuka	835.085.801,67	890.958.332,34	1.046.183.333,66	977.320.833,65	1.034.316.667,41	5,84
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	48.400.000,00	0	0	0	0	(25,00)
Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-48.400.000,00	0	0	0	0	(25,00)
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	2.436.751.019,00	2.197.001.019,00	2.197.001.019,00	2.195.001.019,00	2.213.080.251,00	(2,28)
Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	0	0	0	0	0	-
Piutang Lain-lain	226.362.922.498,97	159.847.115.801,83	114.609.876.724,44	69.467.290.532,65	75.719.224.132,00	(22,02)
Penyisihan Piutang Lain-Lain	-10.725.096.000,00	-11.608.730.134,00	-9.631.167.512,00	-4.898.436.890,00	-11.487.022.890,00	19,14

Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan
	2016	2017	2018	2019	2020	
Persediaan	15.317.462.140,51	26.293.681.180,67	91.165.399.836,69	154.539.646.625,55	80.870.045.110,80	85,06
INVESTASI JANGKA PANJANG	99.889.603.390,95	119.766.929.404,45	160.465.595.637,43	322.718.750.683,41	337.677.542.425,68	39,91
Investasi Non Permanen	1.667.889.035,99	1.475.087.981,00	1.517.712.767,00	1.578.265.406,35	1.591.657.553,00	(0,96)
Dana Bergulir	3.816.390.062,00	3.816.390.062,00	3.792.573.680,00	1.578.265.406,35	1.591.657.553,00	(14,54)
Penyisihan Dana Bergulir	-2.148.501.026,01	-2.341.302.081,00	-2.274.860.913,00	0	0	(23,47)
Investasi Permanen	98.221.714.354,96	118.291.841.423,45	158.947.882.870,43	321.140.485.277,06	336.085.884.872,68	40,37
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	98.221.714.354,96	118.291.841.423,45	158.947.882.870,43	321.140.485.277,06	336.085.884.872,68	40,37
ASET TETAP	3.277.513.267.128,64	3.611.901.203.799,28	4.308.814.612.719,62	4.546.370.588.920,21	4.769.247.328.865,41	9,98
Tanah	1.391.407.570.033,00	1.394.279.162.379,86	1.980.851.059.736,14	1.987.435.004.320,00	1.934.060.811.125,00	9,98
Peralatan dan Mesin	333.589.736.948,78	348.987.754.532,00	381.691.615.875,31	435.076.783.486,71	489.722.358.164,64	10,13
Gedung dan Bangunan	747.797.512.787,89	778.707.459.127,36	866.056.452.067,88	1.018.359.166.185,24	1.291.266.646.351,75	14,93
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.837.103.324.884,71	2.238.219.290.166,41	2.385.063.208.288,15	2.515.402.986.390,99	2.740.177.123.568,59	10,70
Aset Tetap Lainnya	47.352.193.249,03	63.042.535.645,00	81.979.213.935,00	97.858.571.286,05	111.406.378.918,05	24,10
Konstruksi dalam pengerjaan	93.206.865.892,00	157.072.299.439,95	172.346.271.188,21	267.684.026.761,62	244.969.128.701,92	31,27
Akumulasi Penyusutan	-1.172.943.936.666,77	-1.368.407.297.491,30	-1.559.173.208.371,07	-1.775.445.949.510,40	-2.042.355.117.964,53	14,88
ASET LAINNYA	255.974.131.742,26	42.149.110.132,67	56.667.185.118,07	113.777.309.775,09	33.295.740.270,09	(4,76)
Tagihan Penjualan Angsuran	0	48.400.000,00	48.400.000,00	0	0	(25,00)
Kerjasama Pemanfaatan	12.975.932.774,09	12.857.132.774,09	12.857.132.774,09	12.857.132.774,09	12.857.132.774,09	(0,23)
Aset Lain-lain	242.998.198.968,17	29.243.577.358,58	43.761.652.343,98	100.920.177.001,00	20.438.607.496,00	3,14
KEWAJIBAN	458.851.744.758,20	530.751.905.844,97	448.986.914.261,11	586.769.714.063,95	903.716.181.570,25	21,24
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	458.851.744.758,20	380.038.373.938,72	286.672.461.136,11	483.478.698.438,95	859.448.603.445,25	26,17
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	25.019.283,70	25.019.283,70	0	0	0	(25,00)
Utang Bunga Pemerintah Pusat	555.010.109,88	483.199.303,99	887.177.267,00	650.596.704,00	8.853.719.139,00	326,22
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	15.164.218.418,00	10.047.568.793,75	59.023.437.500,00	59.023.437.500,00	103.291.015.625,00	132,17

Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan
	2016	2017	2018	2019	2020	
Pendapatan Diterima Dimuka	8.464.397.036,85	10.015.948.085,84	10.612.117.790,88	11.474.785.529,49	10.370.865.238,18	5,70
Utang Belanja	426.889.954.363,77	359.109.037.526,44	216.149.728.578,23	412.329.878.705,46	736.933.003.443,07	28,45
Utang Jangka Pendek Lainnya	7.753.145.546,00	357.600.945,00	0	0	0	(48,85)
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0	150.713.531.906,25	162.314.453.125,00	103.291.015.625,00	44.267.578.125,00	(21,45)
Utang kepada Pemerintah Pusat	0	150.713.531.906,25	162.314.453.125,00	103.291.015.625,00	44.267.578.125,00	(21,45)
Utang Bunga	0	0	0	0	0	-
Utang Jangka Panjang	0	0	0	0	0	-
EKUITAS	3.510.735.938.263,35	3.523.930.904.409,14	4.396.495.426.424,06	4.755.053.891.351,59	4.531.671.900.541,18	7,15
EKUITAS	3.510.735.938.263,35	3.523.930.904.409,14	4.396.495.426.424,06	4.755.053.891.351,59	4.531.671.900.541,18	7,15
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	3.969.587.683.021,55	4.054.682.810.254,11	4.845.482.340.685,16	5.341.823.605.415,54	5.435.388.082.111,43	8,41

Sumber: LHP LKPD Kota Bandar Lampung, 2016-2020

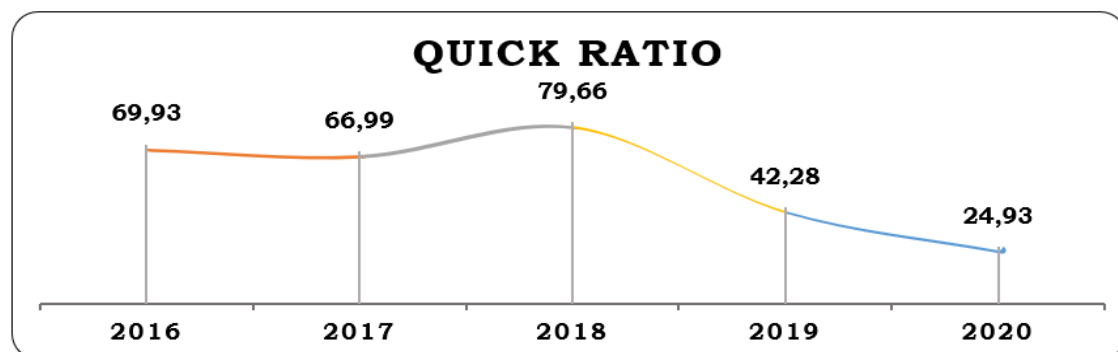
A. Analisis Rasio Likuiditas

Rasio Cair (*Quick Ratio*)

Rasio Cair (*Quick Ratio*) menggambarkan kemampuan daerah untuk menjamin kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar di luar persediaan yang ada. Rasio Cair dihitung dengan mengurangi Persediaan dari Aset Lancar dan hasilnya dibagi dengan Utang Jangka Pendek. Persediaan merupakan unsur Aset Lancar yang paling tidak likuid sehingga harus dikeluarkan dari perhitungan.

Analisis rasio ini bertujuan menilai kemampuan untuk memenuhi Kewajiban Jangka Pendek. Secara umum, angka di atas 100% menunjukkan hasil yang baik, artinya pemerintah daerah dapat menjamin Kewajiban Jangka Pendeknya dengan Aktiva Lancar Non Persediaan yang ada, sedangkan angka di bawah 100% menunjukkan hasil yang kurang. Berikut Perkembangan rasio cair Pemerintah Kota Bandar Lampung selama kurun waktu 2016-2020:

Grafik 3.1 Perkembangan Rasio Cair Tahun 2016-2020 (Persen)



Sumber : Laporan Neraca Pemerintah Kota Bandar Lampung, 2016-2020

Rasio cair Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung pada kurun waktu Tahun 2016-2020 mengalami perkembangan yang berfluktuatif. Nilai *quick ratio* pada Tahun 2017 terjadi sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dari sebesar 69,93 persen menjadi 66,99 persen. Kemudian pada Tahun 2018 terjadi peningkatan nilai *quick ratio* yaitu menjadi sebesar 79,66 persen. Selanjutnya nilai *quick ratio* pada tahun 2019 terjadi penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya menjadi sebesar 42,28

persen dan pada tahun 2020 juga terjadi penurunan nilai *quick ratio* menjadi sebesar 24,93 persen. Kondisi nilai *quick ratio* selama kurun waktu Tahun 2016-2020 yang berfluktuatif tersebut menggambarkan adanya ketidakstabilan kemampuan keuangan daerah untuk menjamin kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar di luar persediaan. Begitupula capaian nilai *quick ratio* yang masih di bawah 100 persen, hal ini menunjukkan kinerja kemampuan keuangan yang masih kurang baik dalam menjamin pembayaran Kewajiban Jangka Pendeknya per akhir tahun anggaran.

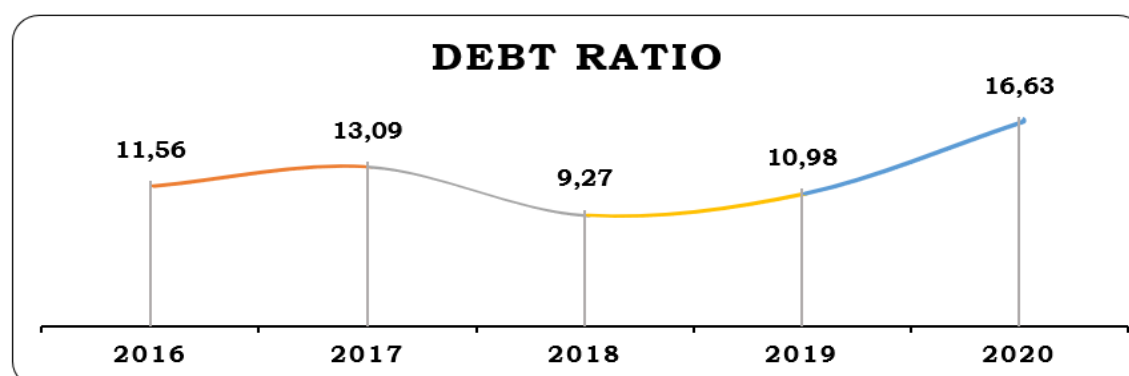
B. Analisis Rasio Solvabilitas

1. Rasio Utang Terhadap Aset (Debt Ratio)

Rasio solvabilitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio Utang terhadap Total Aset (*Debt Ratio*) dihitung dengan membandingkan Total Utang, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan Total Aset yang dikuasai Pemerintah Kota Bandar Lampung. Analisis rasio ini bertujuan mengukur persentase jumlah dana yang berasal dari kreditor atau donator atau pihak ketiga dalam membiayai pembangunan.

Berikut perkembangan Rasio Utang Terhadap Aset (*Debt Ratio*) Pemerintah Kota Bandar Lampung selama kurun waktu 2016-2020:

Grafik 3.2 Perkembangan Rasio Kewajiban Terhadap Total Aset Pemerintah Tahun 2016-2020 (Persen)



Sumber: Laporan Neraca Pemerintah Kota Bandar Lampung, 2016-2020

Dari gambar grafik tersebut dapat dilihat bahwa rasio solvabilitas Pemerintah Kota Bandar Lampung selama kurun waktu Tahun 2016-2020 berada pada kisaran angka 9,27 persen sampai 16,63 persen. Angka rasio pada tahun 2016 sebesar 11,56 persen kemudian pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi sebesar 13,09 persen. Pada tahun 2018 menurun menjadi sebesar 9,27 persen lalu tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi sebesar 10,98 persen dan tahun 2020 juga mengalami kenaikan menjadi sebesar 16,63 persen. Angka rasio selama kurun waktu Tahun 2016-2020 yang berada pada kisaran angka 9,27 persen sampai 16,63 persen (mendekati 0 persen) tersebut menunjukkan tingkat rasio yang baik artinya pembiayaan pembangunan sebagian besar ditanggung oleh kemampuan sendiri.

Analisis Rasio Utang terhadap Total Aset harus dihubungkan dengan *Debt Service Ratio* (DSR), yaitu rasio yang membandingkan antara Jumlah Pembayaran Pokok Pinjaman dan Bunga dengan total pendapatan. Dengan menghubungkan kedua rasio ini maka akan didapat angka Rasio Utang terhadap Total Aset yang terbaik bagi pemerintah daerah

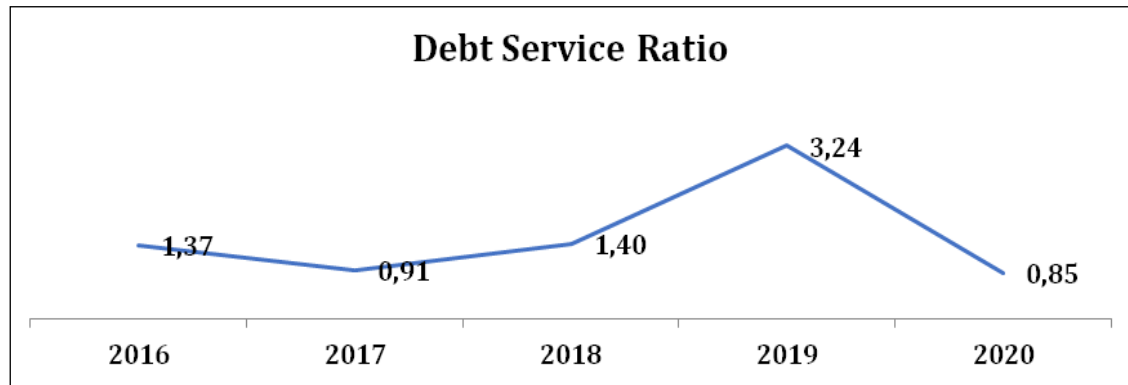
2. Debt Service Ratio (DSR)

Debt Service Ratio dihitung dengan membandingkan antara Jumlah Pembayaran Pokok Pinjaman dan Bunga Pinjaman dibanding Total Pendapatan. Yang dimasukkan dalam perhitungan tersebut adalah Pembayaran Utang dan Bunga dan Biaya Pinjaman Lainnya yang dibayar dalam satu tahun anggaran.

Rasio DSR yang konservatif (minimal) dapat diartikan baik dan sebaliknya semakin besar angka rasio maka semakin buruk kondisi keuangan pemerintah daerah atau semakin berat beban APBD.

Berikut perkembangan *Debt Service Ratio* Pemerintah Kota Bandar Lampung selama kurun waktu 2016-2020

Grafik 3.3 Perkembangan *Debt Service Ratio* Tahun 2016-2020 (Persen)



Sumber: Laporan Neraca Pemerintah Kota Bandar Lampung, 2016-2020

Dari gambar grafik tersebut dapat dilihat bahwa *Debt Service Ratio* (DSR) Pemerintah Kota Bandar Lampung selama kurun waktu Tahun 2016-2020 berada pada kisaran angka 0,85 persen sampai 3,24 persen. Angka DSR pada tahun 2016 sebesar 1,37 persen kemudian pada tahun 2017 menurun menjadi sebesar 0,91 persen. Pada tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi sebesar 1,40 persen lalu tahun 2019 mengalami kenaikan lagi menjadi sebesar 3,24 persen selanjutnya pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar 0,85 persen. Angka DSR selama kurun waktu Tahun 2016-2020 yang berada pada kisaran angka 0,85 persen sampai 3,24 persen menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung mempunyai kemampuan yang baik dalam memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman.

3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

3.2.1.1 Kebijakan Umum Pendapatan

Keuangan daerah menggambarkan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunannya. Keuangan daerah secara garis besar terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Adapun pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dana perimbangan terdiri dari bagi hasil pajak - bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari propinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi/pemerintah daerah lainnya, dan dana insentif daerah.

Pendapatan daerah diharapkan terus meningkat terutama yang berasal dari pendapatan asli daerah. Karena semakin besar pendapatan berarti semakin banyak belanja yang dapat dibiayai. Hal itu berarti semakin banyak masalah daerah akan diselesaikan serta makin besar dorongan pada pendayagunaan potensi daerah. Disisi lain, belanja daerah harus diefisienkan dan diefektifkan agar pengeluaran tersebut dapat berdampak luas dalam penyelesaian masalah daerah dan mengoptimalkan pendayagunaan potensi daerah. Di Kota Bandar Lampung sebagaimana nampak pada diagram 3.1, pendapatan daerah sampai saat ini masih bertumpu pada Pendapatan Transfer yakni pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan masih diatas 60 persen. Sumber dana perimbangan berasal dari pemerintah pusat, artinya keuangan daerah masih tergantung pada dana yang berasal dari pemerintah pusat. Namun begitu, kemandirian Daerah Kota Bandar Lampung selama periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dikatakan semakin baik. Hal ini ditunjukkan dari proporsi PAD (dana yang berasal daerah itu sendiri) terhadap total pendapatan Daerah yang cenderung meningkat. Adanya pandemi covid-19 menyebabkan persentase PAD terhadap total pendapatan Daerah pada Tahun pada tahun 2020 menjadi sebesar 25,05 persen. Angka tersebut masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang sebesar 23,50 persen.

Akan sulit mengintervensi berapa dana perimbangan yang akan diperoleh karena kewenangannya ada pada pemerintah pusat. Daerah hanya secara tidak langsung mempengaruhi kondisi yang menjadi variabel yang mempengaruhi alokasi serta memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan pemerintah pusat. Kondisi ini belum menjadikan sepenuhnya

daerah mandiri. Hal ini tidak sepenuhnya masalah daerah karena memang sumber pendapatan yang dilimpahkan ke daerah adalah sumber-sumber yang secara ekonomi kecil potensinya. Dalam rangka perbaikan terhadap sumber pendapatan daerah, pemerintah pusat berupaya memberikan kepada daerah sumber pendapatan yang secara ekonomi potensial.melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi daerah.

Beberapa strategi peningkatan pendapatan Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menutup terjadinya kesenjangan fiskal adalah:

1. Penguatan Regulasi Pendapatan Daerah

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memuat jenis-jenis penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi kewenangan daerah, Pemerintah Daerah bersama-sama dengan DPRD telah melakukan revisi terhadap beberapa Peraturan Daerah (Perda) yang merupakan peraturan pelaksanaan dalam kegiatan pemungutan Pendapatan Asli Daerah, khususnya mengenai pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Bandar Lampung.

Salah satu bentuk upaya ini adalah Penyusunan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, dan Penyusunan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 06 Tahun 2018 tentang Sistem Pembayaran Pajak Daerah Secara Elektronik (*e-Billing*). Pemerintah Kota Bandar Lampung melakukan pembenahan regulasi mengenai peningkatan standarisasi pelayanan dalam bentuk penyusunan Pedoman Operasional Standar (POS) pelayanan perpajakan, retribusi, dan perizinan yang bertujuan untuk meningkatkan iklim investasi yang

kondusif bagi para investor dalam menanamkan modalnya di Kota Bandar Lampung.

2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Intensifikasi perolehan pendapatan Daerah dimaksudkan untuk mengefektifkan pendapatan melalui optimalisasi pendapatan rutin daerah seperti; dari sektor perpajakan, retribusi Daerah, pendapatan Perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan penerimaan lain.

Ekstensifikasi merupakan aktivitas mendapatkan sumber-sumber pendapatan daerah dari pihak eksternal. Strategi *fund rising* ini dimungkinkan dengan pihak swasta yang memiliki komitmen terhadap pembangunan di Kota Bandar Lampung.

3. Peningkatan Kompetensi Personil Pengelola Pendapatan

Setelah melakukan penguatan regulasi dan penerapan metode intensifikasi dan ekstensifikasi dalam memaksimalkan potensi penerimaan, maka yang tidak kalah penting untuk dilakukan adalah optimalisasi fungsi personil pengelola pendapatan. Dalam melaksanakan peningkatan pendapatan daerah, selain mengacu kepada Pedoman Operasional Standar (POS) yang berlaku, juga dibutuhkan personil yang memiliki kemampuan yang memadai.

Upaya peningkatan kemampuan personil ini dilakukan dalam bentuk pemberian bimbingan tentang materi pelayanan dan POS secara berkesinambungan. Hasil akhir yang diharapkan adalah peningkatan kemampuan personil untuk memberikan pelayanan dengan kualitas yang baik kepada para wajib pajak, wajib retribusi, dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Selain itu, guna meningkatkan motivasi dan etos kerja pegawai, juga telah diberlakukan sistem insentif bagi pejabat dan seluruh personil yang terkait dalam pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, dan pelayanan publik.



4. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Untuk meningkatkan kemampuan Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan dan Badan Usaha Milik Daerah/Badan Layanan Umum Daerah, diperlukan dukungan kemampuan teknologi informasi yang memadai. Oleh karenanya, setelah melakukan pembenahan secara konsepsional dalam bentuk penyusunan POS dalam sektor perpajakan daerah, retribusi daerah, dan pelayanan publik, Pemerintah Kota Bandar Lampung juga telah memanfaatkan program aplikasi dalam kegiatan operasionalnya. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan meminimalisir tingkat kebocoran dalam pemungutan pajak dan retribusi.

Melalui upaya tersebut selama kurun waktu 2016 - 2020, pendapatan daerah mampu tumbuh rata-rata sebesar 1,18 persen. Sedangkan PAD tumbuh rata-rata sebesar 4,07 persen.

3.2.1.2 Kebijakan Umum Belanja

Belanja daerah sepenuhnya tergantung pada pendapatan. Hal ini artinya bahwa kemampuan belanja dipengaruhi oleh kapasitas pendapatan. Belanja daerah merupakan komponen pengeluaran yang digunakan untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. Belanja juga sebagai upaya untuk mengatasi masalah daerah dan mendorong optimalisasi pendayagunaan potensi daerah sehingga harus dilakukan secara efisien dan efektif.

Berikut adalah proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kota Bandar Lampung 2016-2020 :

Tabel 3.3 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Bandar Lampung

Uraian	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
	(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
TA 2016	1.125.016.755.581,69	2.061.872.906.978,39	54,56
TA 2017	1.073.422.722.355,99	2.243.837.393.399,46	47,84
TA 2018	1.002.196.163.949,50	2.239.038.132.783,55	44,76
TA 2019	1.124.018.492.465,50	2.289.184.600.732,67	49,10
TA 2020	1.170.699.661.039,33	2.148.253.023.676,98	54,50

Sumber: LRA Kota Bandar Lampung, 2016-2020

Selama periode tahun 2016-2021, persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah (Belanja+Pembiayaan Pengeluaran) relatif masih cukup besar namun selama tahun 2017-2020 persentasenya cenderung menurun atau lebih kecil dibandingkan tahun 2016. Pada tahun 2016 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur terhadap Total Pengeluaran sebesar 54,56 persen; tahun 2017 sebesar 47,84 persen; tahun 2018 sebesar 44,76 persen; tahun 2019 sebesar 49,10 persen, dan tahun 2020 sebesar 54,50 persen.

Masih dominannya belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur tersebut perlu mendapatkan perhatian mengingat semakin tinggi proporsi belanja aparatur maka semakin rendah penggunaan anggaran yang bersifat substansial pembangunan, begitu pula sebaliknya. Semakin rendah proporsi belanja aparatur maka semakin tinggi penggunaan anggaran untuk pembangunan daerah atau pelayanan publik. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan efisiensi penggunaan anggaran pada keuangan daerah.

Kedepan upaya yang sistematis dan kontinyu untuk mengefisienkan dan mengefektifkan belanja daerah masih perlu terus dilakukan. Hal ini membutuhkan pengaturan dan manajemen penganggaran yang baik :

1. Guna menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran maka perlu dilakukan analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat.

2. Dalam rangka mengefektifkan pengeluaran maka penganggaran haruslah menetapkan masalah yang mendesak serta penentuan prioritas penyelesaiannya serta menerapkan pengeluaran jangka menengah.
3. Untuk menunjang penerapan anggaran berbasis kinerja maka harus segera diefektifkan berlakunya standar pelayanan minimum serta analisa standar belanja.
4. Proses pengadaan barang dan jasa harus dapat dilakukan secara akuntabel dan transparan.
5. Untuk pengeluaran yang bersifat pemeliharaan terutama bagi barang publik berupa infrastruktur harus ada mekanisme yang bersifat berkelanjutan sehingga bisa melakukan respon dengan cepat.
6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan harus dapat menjamin kualitas pekerjaan sehingga terpenuhi masa berlakunya.

Belanja daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2020. pada hakekatnya diarahkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. Adapun penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah

dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

Kebijakan belanja diarahkan pada program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2021. Selanjutnya kebijakan alokasi anggaran kedalam prioritas program/kegiatan selama kurun waktu 2016-2021 dipisahkan menjadi prioritas I, prioritas II dan prioritas III.

Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat (Prioritas I) merupakan pengeluaran pemerintah yang bersifat wajib dan mengikat, serta periodik, artinya setiap tahun selalu terjadi. Pengeluaran ini terdiri dari belanja tidak langsung, belanja langsung, dan pengeluaran pembiayaan. Data realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dapat dijadikan dasar untuk melakukan penghitungan kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. Berikut adalah data realisasi pengeluaran periodik Wajib dan Mengikat Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2020:

Tabel 3.4 Realisasi Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Kota Bandar Lampung

URAIAN	TAHUN ANGGARAN				
	2016	2017	2018	2019	2020
BELANJA TIDAK LANGSUNG	869.071.339.207,07	909.014.218.840,19	806.856.846.227,00	820.249.930.227,00	774.483.486.080,00
Belanja Gaji dan Tunjangan	848.315.507.501,00	887.325.791.591,00	765.231.402.785,00	775.288.943.452,00	740.213.829.363,00
Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	4.994.700.000,00	6.631.284.000,00	12.063.800.000,00	11.806.260.000,00	12.401.120.000,00
Insentif Pemungutan Pajak Daerah	13.240.895.441,00	11.274.996.688,00	14.024.184.678,00	17.930.762.357,00	18.477.497.613,00
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	-	-	-	-	-
Belanja Bunga	2.520.236.265,07	3.782.146.561,19	15.537.458.764,00	15.223.964.418,00	3.391.039.104,00
BELANJA LANGSUNG	601.720.839.523,83	1.071.418.394.584,27	1.128.192.461.795,55	942.683.546.799,30	728.603.729.196,98
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	61.650.000,00	44.550.000,00	21.500.000,00	-	-
Belanja Jasa Kantor	190.308.017.075,00	208.158.450.944,00	251.521.269.890,00	216.750.578.197,00	142.244.638.895,00
Belanja Sewa Gedung Kantor	2.563.240.350,00	1.929.279.750,00	2.166.796.200,00	3.336.506.508,00	2.378.189.650,00
Belanja Langsung Program Prioritas Pencapaian Visi dan Misi Pendidikan	86.984.943.573,00	199.394.160.977,43	239.152.887.397,11	213.572.068.995,00	194.732.355.957,06
Belanja Langsung Program Prioritas Pencapaian Visi dan Misi Kesehatan	152.983.367.764,83	159.127.454.769,84	181.072.030.056,44	159.906.727.423,71	135.261.149.465,92
Belanja Langsung Program Prioritas Pencapaian Visi dan Misi Peningkatan Sarana Umum	168.819.620.761,00	502.764.498.143,00	454.257.978.252,00	349.117.665.675,59	253.987.395.229,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	306.014.331.692,49	36.059.763.019,00	48.832.359.375,00	98.523.437.500,00	20.755.859.375,00
Penyertaan Modal Pemerintah daerah	95.425.681.178,55	13.500.000.000,00	34.076.500.000,00	39.500.000.000,00	6.000.000.000,00
Pembayaran Pokok Hutang Kepada Pemerintah	25.600.000.000,00	15.164.218.418,00	14.755.859.375,00	59.023.437.500,00	14.755.859.375,00
Pembayaran Pokok Hutang Kepada Masyarakat	184.988.650.513,94	7.395.544.601,00			
TOTAL	1.776.806.510.423,39	2.016.492.376.443,46	1.983.881.667.397,55	1.861.456.914.526,30	1.523.843.074.651,98

Sumber: LRA Kota Bandar Lampung, 2016-2020

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan hutang. Pengeluaran pembiayaan berupa pembayaran hutang serta penyertaan modal.

Analisis pembiayaan daerah dilakukan dengan terlebih dahulu mencari besarnya defisit riil anggaran, sekaligus mencari penutup defisit riil anggaran tersebut.

a. Analisis Sumber Penutup Defisit Riil

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran. Langkah awal dalam melakukan analisis ini dengan mencari nilai defisit riil anggaran, yaitu mencari nilai realisasi pendapatan, setelah dikurangi realisasi belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Perkembangan defisit riil anggaran Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2020, dijelaskan pada tabel 3.5 berikut.

Tabel 3.5 Defisit Riil Anggaran Kota Bandar Lampung

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Realisasi Pendapatan Daerah	2.057.086.652.010,39	2.081.420.040.685,32	2.162.096.665.248,89	2.294.656.383.146,90	2.145.801.470.570,74
Dikurangi realisasi:					
Belanja Daerah	1.755.858.575.285,90	2.207.777.630.380,46	2.190.205.773.408,55	2.190.661.163.232,67	2.127.497.164.301,98
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	306.014.331.692,49	36.059.763.019,00	48.832.359.375,00	98.523.437.500,00	20.755.859.375,00
Defisit Riil	(4.786.254.968,00)	(162.417.352.714,14)	(76.941.467.534,66)	5.471.782.414,23	(2.451.553.106,24)

Sumber: LRA Kota Bandar Lampung, 2016-2020

Untuk mendapatkan surplus riil atau defisit riil harus diperhitungkan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah berupa pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah. Berdasarkan tabel 3. 5 tersebut nampak bahwa pada tahun 2016, 2017, dan 2018 APBD Kota Bandar Lampung mengalami defisit riil yang masing-masing sebesar Rp4.786.254.968,00; Rp162.417.352.714,14; dan Rp76.941.467.534,66. Selanjutnya pada tahun 2019 APBD Kota Bandar Lampung mengalami surplus riil sebesar Rp5.471.782.414,23. Namun demikian, pada tahun 2020 APBD Kota Bandar Lampung kembali mengalami defisit riil sebesar Rp2.451.553.106,24

Defisit riil dapat ditutupi dengan berbagai komponen, yaitu SiLPA tahun anggaran sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, dan Penerimaan Piutang Daerah. Komponen. Komposisi penutup defisit riil anggaran Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2020 nampak pada tabel 3.6 dibawah

Selanjutnya dengan memperhatikan data defisit riil anggaran dan komposisi penutup defisit riil anggaran selama tahun 2016 sampai dengan 2020, maka dapat kita ketahui nilai sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan sebagai akumulasi dari surplus/defisit riil anggaran ditambah penerimaan pembiayaan sebagai komposisi penutup defisit riil anggaran sebagaimana nampak pada tabel 3.7. Adapun tabel 3.6 dan 3.7 tersaji dibawah ini.

Tabel 3.6 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Bandar Lampung

Uraian	Proporsi dari Total Defisit Riil				
	2016	2017	2018	2019	2020
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	24.563.686.310,24	12.065.073.808,65	10.408.821.794,51	8.800.003.559,85	14.266.985.974,08
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	160.761.100.700,00	75.332.649.300,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	24.563.686.310,24	172.826.174.508,65	85.741.471.094,51	8.800.003.559,85	14.266.985.974,08

Sumber: LRA Kota Bandar Lampung, 2016-2020

Tabel 3.7 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan Kota Bandar Lampung

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	2.057.086.652.010,39	2.081.420.040.685,32	2.162.096.665.248,89	2.294.656.383.146,90	2.145.801.470.570,74
	Dikurangi realisasi:					
2.	Belanja Daerah	1.755.858.575.285,90	2.207.777.630.380,46	2.190.205.773.408,55	2.190.661.163.232,67	2.127.497.164.301,98
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	306.014.331.692,49	36.059.763.019,00	48.832.359.375,00	98.523.437.500,00	20.755.859.375,00
A	Defisit riil	(4.786.254.968,00)	(162.417.352.714,14)	(76.941.467.534,66)	5.471.782.414,23	(2.451.553.106,24)
	Defisit Riil ditutup oleh Realisasi Penerimaan Pembiayaan					
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	24.563.686.310,24	172.826.174.508,65	85.741.471.094,51	8.800.003.559,85	14.266.985.974,08
A+B	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan	19.777.431.342,24	10.408.821.794,51	8.800.003.559,85	14.271.785.974,08	11.815.432.867,84

Sumber: LRA Kota Bandar Lampung, 2016-2020

b. Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 mendefinisikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA sebagai selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Analisis SiLPA ini dilakukan untuk memberi gambaran tentang komposisi sisa lebih perhitungan anggaran. Dengan kata lain melalui Analisis SiLPA, dapat diketahui dari mana sumber perolehan SiLPA, dan seberapa besar kontribusi yang diberikan dari masing-masing sumber perolehan SiLPA tersebut.

Tabel 3.8 di bawah memberikan gambaran perolehan SiLPA Kota Bandar Lampung selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Dari tabel 3.8 tersebut terlihat bahwa perolehan SiLPA yang terdapat pada APBD Kota Bandar Lampung pada tahun 2016 berasal dari pelampauan penerimaan PAD sedangkan perolehan SiLPA pada tahun 2017 hingga 2020 diperoleh dari sisa penghematan belanja atau akibat lainnya.

Tabel 3.8 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Bandar Lampung

Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
Jumlah SiLPA	24.563.686.310,24	100	12.065.073.808,65	100	10.408.821.794,51	100	8.800.003.559,85	100	14.266.985.974,08	100
Pelampauan penerimaan PAD	24.563.686.310,24	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Pelampauan penerimaan dana perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	0	0	12.065.073.808,65	100	10.408.821.794,51	100	8.800.003.559,85	100	14.266.985.974,08	100
Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kegiatan lanjutan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: LRA Kota Bandar Lampung, 2016-2020

Kebijakan pembiayaan pada tahun 2016-2020 diarahkan pada:

1. Dari sisi penerimaan, pembiayaan daerah diarahkan pada pengamanan sisa perhitungan tahun anggaran berjalan untuk dapat dipergunakan secara efisien.
2. Dari sisi pengeluaran, pembiayaan daerah diarahkan pada tahun anggaran berikutnya untuk membayar cicilan pokok pinjaman yang jatuh tempo dan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah.

Penyertaan modal dimungkinkan terutama untuk kegiatan yang secara finansial menguntungkan. Pemerintah Kota Bandar Lampung sampai dengan bulan Mei tahun 2021, sudah memiliki 5 BUMD yaitu PT BPR Waway Lampung, PT BPRS Bandar Lampung, PDAM Way Rilau, PD Pasar Tapis Berseri dan PD Kebersihan disamping itu Pemerintah Kota Bandar Lampung juga ikut memiliki saham pada PT Bank Lampung.

3.3. KERANGKA PENDANAAN

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan.

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

A. Proyeksi Pendapatan

Pendapatan daerah merupakan cerminan kemampuan anggaran dan kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada publik. Oleh karena itu, pendapatan daerah merupakan hal utama yang perlu diperkirakan dalam penghitungan. Proyeksi data masa lalu merupakan proyeksi data untuk lima tahun kedepan yang didasarkan pada pertumbuhan selama lima tahun yang lalu. Proyeksi pendapatan merupakan sekumpulan angka-angka perkiraan yang

dapat berubah dan atau berbeda atau bersifat indikatif sepanjang faktor-faktor penghitungnya atau asumsi-asumsinya tidak mengalami perubahan.

Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun kedepan, untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Dengan melihat performa pendapatan daerah tahun 2016-2020 maka dimasa yang akan datang pendapatan daerah diharapkan dapat meningkat lebih tinggi, yang diikuti dengan berbagai upaya-upaya untuk dapat mencapainya.

Pendapatan daerah Kota Bandar Lampung sampai saat ini memang masih bertumpu pada dana perimbangan artinya keuangan daerah masih tergantung pada dana yang berasal dari pemerintah pusat. Namun demikian. Pemerintah Kota Bandar Lampung selama periode tahun 2016-2020 telah berupaya untuk meningkatkan kemandirian fiskal dan melakukan beberapa strategi peningkatan pendapatan Daerah seperti Penguatan Regulasi Pendapatan Daerah, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah, Peningkatan Kompetensi Personil Pengelola Pendapatan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi. Melalui upaya tersebut, selama periode 2016-2020 pendapatan daerah mampu tumbuh rata-rata sebesar 1,18 persen dan PAD tumbuh rata-rata sebesar 4,07 persen. Begitu pula kemandirian fiskal Daerah Kota Bandar Lampung dapat dikatakan semakin baik. Hal ini ditunjukkan dari proporsi PAD terhadap total pendapatan Daerah yang cenderung meningkat.

Kebijakan pendapatan daerah tahun 2021-2026 adalah melakukan evaluasi terhadap strategi peningkatan pendapatan Daerah yang telah dilakukan guna menjadi lebih baik untuk dilanjutkan yang tentunya akan diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan asli daerah, peningkatan pendapatan transfer dan peningkatan lain-lain pendapatan yang sah dengan beberapa kebijakan/langkah yang akan ditempuh antara lain:

1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah

Optimalisasi PAD ini merupakan strategi untuk meningkatkan kemampuan/kemandirian fiskal daerah Kota Bandar Lampung. Dengan mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung saat ini maka fokus strategi Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah guna mengurangi ketergantungan fiskal adalah perluasan basis pajak dengan tetap berperan melalui Peningkatan ekonomi daerah. Strategi perluasan basis pajak yaitu dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memberikan pengawasan serta penegakan hukum yang berkeadilan serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Beberapa rencana yang akan dilaksanakan antara lain:

- a. Penerapan *tax clearance* secara *link system* dengan OPD terkait dan penerapan pembayaran pajak secara online (*Payment Online System*) dengan pihak BPN pada proses pembayaran BPHTB serta melaksanakan proses pelayanan administrasi perpajakan secara online (pajak online) melalui aplikasi SAI PEPADUN (Sistem Aplikasi Pelayanan Pajak Daerah Terpadu Online) untuk mempermudah Wajib Pajak dalam proses pendaftaran, pelaporan dan pembayaran kewajiban perpajakannya.
- b. Melakukan proses pendataan terhadap wajib pajak dan Objek Pajak baru maupun peremajaan data secara digital/online
- c. Dukungan APBD pada kegiatan – kegiatan untuk melengkapi sarana yang digunakan dalam rangka optimalisasi penerimaan PAD (Pajak Daerah)
- d. Melakukan pengawasan/monitoring dan mengevaluasi setiap tahapan kegiatan yang dilakukan untuk optimalisasi pajak daerah
- e. Melakukan kerjasama dengan Pihak Kejaksaan Negeri Kota Bandar Lampung dalam melakukan Penagihan Piutang Pajak dengan nilai pajak diatas Lima Puluh Juta Rupiah.
- f. Melakukan kerjasama dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung

dalam bentuk pengawasan bersama dan pertukaran data peredaran omzet setiap wajib pajak daerah yang melakukan pelaporan SPT tahunan di Kantor Pajak Pratama yang ada di Wilayah Kota Bandar Lampung dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak pusat dan pajak daerah di Kota Bandar Lampung

- g. Melakukan aksi sita atau penyegelan terhadap Wajib Pajak yang benar benar membandel. Dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Inspektorat Kota Bandar Lampung, pihak Kejaksaan maupun Kepolisian.
 - h. Penggunaan Alat Perekam Transaksi (*Taping Box*). Melakukan penambahan pemasangan alat *Tapping Box* terhadap Objek Pajak yang belum terpasang. Berkoordinasi dengan PT Bank Lampung sebagai pihak yang menunjuk vendor untuk melakukan pemasangan
 - i. Meningkatkan Pelayanan Prima kepada Wajib Pajak dengan membuka loket pembayaran PBB-P2 di setiap Kecamatan
2. Optimalisasi penerimaan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat dan Propinsi

B. Proyeksi Belanja

Proyeksi belanja Kota Bandar Lampung tahun 2021-2026 didasarkan pada perhitungan proyeksi pendapatan daerah dan memperhatikan rata-rata pertumbuhan belanja daerah Kota Bandar Lampung tahun 2016 s.d. 2020 serta indikator makro ekonomi dengan beberapa asumsinya dan kondisi pada tahun berjalan. Dari hal tersebut diperoleh proyeksi tingkat pertumbuhan belanja daerah yang digunakan sebagai gambaran dasar untuk mempehitungkan belanja daerah yang harus dipenuhi di masa yang akan datang.

Belanja daerah Kota Bandar Lampung tahun 2021-2026 terdiri dari: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Belanja Operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

Tabel berikut adalah proyeksi anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 s.d 2026.

Tabel 3.9 Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021 s.d 2026 Kota Bandar Lampung

Uraian	Pertumbuhan (%)	Tahun					
		2021*	2022	2023	2024	2025	2026
PENDAPATAN DAERAH	3,99	2.703.588.863.227,00	2.698.224.596.465,23	2.799.257.668.629,81	3.059.224.299.641,21	3.107.597.669.969,58	3.278.998.102.539,44
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,14	991.584.810.227,00	800.000.000.000,00	840.000.000.000,00	882.000.000.000,00	926.100.000.000,00	972.405.000.000,00
- Pajak Daerah	(0,70)	679.900.000.000,00	520.195.262.269,00	546.205.025.382,45	573.515.276.651,57	602.191.040.484,15	632.300.592.508,36
- Retribusi Daerah	(7,07)	107.396.850.000,00	47.954.673.205,48	50.352.406.865,75	52.870.027.209,04	55.513.528.569,49	58.289.204.997,97
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	(2,69)	47.000.000.000,00	31.276.185.222,10	32.839.994.483,21	34.481.994.207,37	36.206.093.917,73	38.016.398.613,62
- Lain-lain PAD yang Sah	9,50	157.287.960.227,00	200.573.879.303,42	210.602.573.268,59	221.132.701.932,02	232.189.337.028,62	243.798.803.880,05
PENDAPATAN TRANSFER	6,31	1.610.692.053.000,00	1.791.846.996.465,23	1.847.561.188.629,81	2.059.942.995.641,21	2.058.352.300.769,58	2.177.290.464.879,44
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	6,51	1.410.692.053.000,00	1.581.846.996.465,23	1.627.061.188.629,81	1.828.417.995.641,21	1.815.251.050.769,58	1.922.034.152.379,44
Dana Perimbangan :	6,56	1.367.869.346.000,00	1.536.883.154.115,23	1.579.849.154.162,31	1.778.845.359.450,33	1.763.199.782.769,17	1.867.380.320.979,00
- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	5,00	50.688.287.000,00	53.222.701.350,00	55.883.836.417,50	58.678.028.238,38	61.611.929.650,29	64.692.526.132,81
- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	7,39	1.035.373.952.000,00	1.203.615.162.765,23	1.229.917.763.244,81	1.411.417.398.986,96	1.377.400.424.282,62	1.462.290.994.568,13
- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)	3,87	281.807.107.000,00	280.045.290.000,00	294.047.554.500,00	308.749.932.225,00	324.187.428.836,25	340.396.800.278,06
Dana Insentif Daerah (DID)	5,00	42.822.707.000,00	44.963.842.350,00	47.212.034.467,50	49.572.636.190,88	52.051.268.000,42	54.653.831.400,44
Pendapatan Transfer Antar Daerah	5,00	200.000.000.000,00	210.000.000.000,00	220.500.000.000,00	231.525.000.000,00	243.101.250.000,00	255.256.312.500,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5,00	200.000.000.000,00	210.000.000.000,00	220.500.000.000,00	231.525.000.000,00	243.101.250.000,00	255.256.312.500,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5,00	101.312.000.000,00	106.377.600.000,00	111.696.480.000,00	117.281.304.000,00	123.145.369.200,00	129.302.637.660,00
Pendapatan Hibah	5,00	4.500.000.000,00	4.725.000.000,00	4.961.250.000,00	5.209.312.500,00	5.469.778.125,00	5.743.267.031,25
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan	5,00	96.812.000.000,00	101.652.600.000,00	106.735.230.000,00	112.071.991.500,00	117.675.591.075,00	123.559.370.628,75
BELANJA DAERAH	5,97	2.409.649.186.646,79	2.590.457.018.340,23	2.735.757.668.629,81	2.995.724.299.641,21	3.044.097.669.969,58	3.215.498.102.539,44
Belanja Operasi	5,69	2.080.815.352.927,14	2.193.322.110.320,87	2.317.994.782.363,19	2.560.321.622.590,00	2.590.300.732.176,21	2.738.863.708.308,24
- Belanja Pegawai	6,78	966.954.617.594,79	1.044.000.555.045,88	1.111.508.719.975,85	1.183.463.862.754,76	1.260.163.342.147,22	1.341.924.635.547,14
- Belanja Barang dan Jasa	5,27	1.013.589.133.595,35	1.078.011.215.274,99	1.131.601.880.387,34	1.188.224.138.085,24	1.247.585.378.028,98	1.310.239.317.854,85
- Belanja Bunga	5,00	18.500.000.000,00	19.425.000.000,00	20.396.250.000,00	21.416.062.500,00	22.486.865.625,00	23.611.208.906,25
- Belanja Hibah	29,51	70.431.601.737,00	44.057.340.000,00	46.260.207.000,00	158.573.198.250,00	50.984.818.375,00	53.551.952.000,00
- Belanja Bantuan Sosial	(2,15)	11.340.000.000,00	7.828.000.000,00	8.227.725.000,00	8.644.361.000,00	9.080.328.000,00	9.536.594.000,00
Belanja Modal	8,18	298.833.833.719,65	365.634.908.019,36	384.687.886.266,62	400.673.927.051,20	417.331.750.293,38	438.345.947.356,20
Belanja Tidak Terduga	5,00	30.000.000.000,00	31.500.000.000,00	33.075.000.000,00	34.728.750.000,00	36.465.187.500,00	38.288.446.875,00
Belanja Transfer	-	-	-	-	-	-	-

Uraian	Pertumbuhan (%)	Tahun					
		2021*	2022	2023	2024	2025	2026
SURPLUS/(DEFISIT)	(52,21)	293.939.676.580,21	107.767.578.125,00	63.500.000.000,00	63.500.000.000,00	63.500.000.000,00	63.500.000.000,00
PEMBIAYAAN DAERAH	(52,21)	(293.939.676.580,21)	(107.767.578.125,00)	(63.500.000.000,00)	(63.500.000.000,00)	(63.500.000.000,00)	(63.500.000.000,00)
Pengeluaran Pembiayaan	(53,62)	318.500.000.000,00	107.767.578.125,00	63.500.000.000,00	63.500.000.000,00	63.500.000.000,00	63.500.000.000,00
Penyertaan Modal Daerah	-	63.500.000.000,00	63.500.000.000,00	63.500.000.000,00	63.500.000.000,00	63.500.000.000,00	63.500.000.000,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	(91,32)	255.000.000.000,00	44.267.578.125,00	-	-	-	-
Penerimaan Pembiayaan	(100,00)	24.560.323.419,79	-	-	-	-	-
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	(100,00)	24.560.323.419,79	-	-	-	-	-

Sumber : APBD Kota Bandar Lampung Tahun 2021 dan Hasil Proyeksi TAPD 2021

*) anggaran

Pendapatan Tahun 2021 merupakan nilai anggaran pendapatan dalam APBD Tahun 2021. Sedangkan nilai pendapatan Tahun 2022-2026 disusun berdasarkan proyeksi sumber pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pada tahun 2021 anggaran pendapatan Kota Bandar Lampung sebesar Rp2.703.588.863.227,00 dan diproyeksikan pada tahun 2022 jumlah pendapatan sebesar Rp2.698.224.596.465,23. Selanjutnya Pemerintah Kota Bandar Lampung memproyeksikan adanya peningkatan pendapatan yang diharapkan mampu meningkatkan kinerja pembangunan di Kota Bandar Lampung sehingga diharapkan pada tahun 2026 jumlah pendapatan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung adalah mencapai Rp3.278.998.102.539,44.

Proyeksi pendapatan yang dibuat di atas dianggap masih realistis seiring kemampuan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mengfektifkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Pusat serta dari Sumber pendapatan lain yang sah. Selain itu iklim investasi, keamanan, dan kegiatan perekonomian di Kota Bandar Lampung selama periode 2021-2026 diperkirakan semakin baik dan stabil dibanding tahun 2020 dengan asumsi kondisi makro ekonomi diperkirakan akan terus membaik sesuai dengan target yang telah ditetapkan seiring dengan pemulihan ekonomi global dan dorongan stimulus kebijakan yang berlanjut serta implementasi vaksin dan protokol kesehatan yang mampu mengendalikan penyebaran covid-19 yang pada akhirnya akan mendorong permintaan domestik sehingga mendukung estimasi tersebut.

Pagu indikatif belanja daerah tahun 2021-2026 pada tabel 3.9 diatas terinci dalam Tabel 7.2 (Bab VII RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026) yang merupakan rincian program yang disertai dengan besaran pagu indikatif. Belanja tahun 2021 merupakan nilai anggaran belanja dalam APBD Tahun 2021. Sedangkan nilai belanja tahun 2022-2026 disusun berdasarkan proyeksi. Pada tahun 2021 anggaran belanja Kota Bandar Lampung sebesar Rp2.409.649.186.646,79. Kedepan diharapkan terjadi

peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan belanja daerah dan Pemerintah Kota Bandar Lampung memproyeksikan adanya peningkatan belanja untuk melaksanakan program-program pembangunan. Pada tahun 2022 diproyeksikan jumlah belanja sebesar Rp2.590.457.018.340,23 dan pada tahun 2026 sebesar Rp3.215.498.102.539,44.

Terkait kebijakan pembiayaan daerah tahun 2021-2026, dari sisi penerimaan, pembiayaan daerah diarahkan pada pengamanan sisa perhitungan tahun anggaran berjalan untuk dapat dipergunakan secara efisien. Dari sisi pengeluaran, pembiayaan daerah diarahkan pada tahun anggaran berikutnya untuk membayar cicilan pokok pinjaman yang jatuh tempo dan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah.

Selanjutnya, Pemerintah Kota Bandar Lampung kedepan juga tidak menutup kemungkinan untuk melakukan pinjaman daerah, jika diperlukan untuk mendanai pembangunan yang prioritas dalam rangka pencapaian visi misi kepala daerah. Pelaksanaan pinjaman daerah ini akan dilakukan dengan berpedoman kepada UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.

3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Pengeluaran haruslah selalu didasarkan atas kapasitas pendapatan. Mengingat luas dan besarnya cakupan masalah yang dihadapi maka harus ada upaya mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut mengurangi masalah dan bahkan menyelesaikan masalah. Untuk membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah maka harus terbangun komunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat.

Kemampuan keuangan daerah merupakan total dana yang diperkirakan dapat tersedia untuk membiayai seluruh program/kegiatan pembangunan (pagu indikatif) sesuai urutan prioritas. Adapun kapasitas riil kemampuan keuangan daerah merupakan total penerimaan daerah setelah dikurangkan

dengan berbagai belanja yang wajib dan mengikat dan pengeluaran pembiayaan.

Diharapkan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang (2021-2026), kemampuan keuangan daerah Kota Bandar Lampung akan semakin meningkat. Hal tersebut didasarkan pada pendapatan daerah Kota Bandar Lampung yang diproyeksikan mengalami peningkatan. Selanjutnya kebijakan penganggaran yang dianut oleh Kota Bandar Lampung adalah anggaran berimbang sedangkan kebijakan alokasi anggaran menganut prinsip skala prioritas.

A. Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

Berdasarkan rencana anggaran dan hasil perhitungan proyeksi pendapatan, perhitungan proyeksi sisa lebih riil perhitungan anggaran, perhitungan proyeksi belanja periodik yang wajib dan mengikat serta perhitungan proyeksi pengeluaran pembiayaan maka dapat diproyeksikan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah tahun 2021-2026 untuk mendanai pembangunan Kota Bandar Lampung. Rencana anggaran dan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kota Bandar Lampung tahun 2021-2026 nampak pada tabel berikut:

Tabel 3.10 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung

Uraian	Tahun 2021*	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
PENDAPATAN	2.703.588.863.227,00	2.698.224.596.465,23	2.799.257.668.629,81	3.059.224.299.641,21	3.107.597.669.969,58	3.278.998.102.539,44
Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran	24.560.323.419,79	-	-	-	-	-
Total Penerimaan	2.728.149.186.646,79	2.698.224.596.465,23	2.799.257.668.629,81	3.059.224.299.641,21	3.107.597.669.969,58	3.278.998.102.539,44
Dikurangi:						
Belanja periodik yang wajib dan mengikat	838.786.232.476,79	906.709.678.224,00	964.449.241.793,54	1.025.944.069.117,64	1.091.442.703.374,36	1.161.210.369.499,97
Pengeluaran Pembiayaan	318.500.000.000,00	107.767.578.125,00	63.500.000.000,00	63.500.000.000,00	63.500.000.000,00	63.500.000.000,00
Kapasitas riil kemampuan keuangan	1.570.862.954.170,00	1.683.747.340.116,23	1.771.308.426.836,27	1.969.780.230.523,57	1.952.654.966.595,23	2.054.287.733.039,47

Sumber : APBD Kota Bandar Lampung Tahun 2021 dan Hasil Proyeksi TAPD 2021

*) anggaran

Belanja periodik yang wajib dan mengikat merupakan pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah berupa belanja operasi yang terdiri dari belanja gaji dan tunjangan ASN, belanja gaji dan tunjangan DPRD, belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH, belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH, belanja pegawai BLUD, belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD, Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) guru PNSD, dan belanja bunga.

B. Kebijakan Alokasi Anggaran

Kebijakan alokasi anggaran merupakan serangkaian kebijakan yang telah ditetapkan sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, serta dalam rangka pencapaian efektifitas program. Mengingat keterbatasan anggaran, maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas (*money follow program*) dan kebutuhan.

Kebijakan alokasi anggaran Kota Bandar Lampung tahun 2021-2026 disusun kedalam prioritas yang dipisahkan menjadi prioritas I, prioritas II dan prioritas III. Prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum prioritas II selanjutnya prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 maka kebijakan alokasi anggaran Pemerintah Kota Bandar Lampung selama kurun waktu 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Prioritas I

Prioritas pertama dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan penerapan pelayanan dasar dan prioritas Pemerintah Daerah serta beberapa belanja wajib dan mengikat seperti belanja jasa kantor (Telepon, Air, Listrik, Kawat/Faksimili/Internet/TV berlangganan). Pemenuhan penerapan pelayanan dasar merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan

pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat (SPM). Pengeluaran ini terdiri dari belanja operasi dan belanja modal.

Prioritas II

Prioritas Kedua dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah. Suatu prioritas II berhubungan dengan program/kegiatan/sub kegiatan unggulan Perangkat Daerah yang berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan masyarakat tugas dan fungsi Perangkat Daerah termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan.

Prioritas III

Prioritas ketiga dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya selain prioritas I dan prioritas II. Pengalokasian dana pada prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar.

Rincian rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kota Bandar Lampung Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 berdasarkan alokasi anggaran dalam prioritas I, prioritas II dan prioritas III tersajikan pada tabel 3.11 berikut:

Tabel 3.11 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

Uraian	Tahun 2021*	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Kapasitas riil kemampuan keuangan	1.570.862.954.170,00	1.683.747.340.116,23	1.771.308.426.836,27	1.969.780.230.523,57	1.952.654.966.595,23	2.054.287.733.039,47
PRIORITAS I	247.835.844.453,00	259.691.819.087,20	273.617.437.578,80	287.645.799.716,34	303.024.260.521,42	318.441.131.353,21
Belanja Operasi :	68.487.565.784,00	68.418.952.747,20	72.475.254.665,74	76.775.188.479,89	81.335.582.677,91	86.172.749.243,51
- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	26.968.468.000,00	28.856.260.760,00	30.876.199.013,20	33.037.532.944,12	35.350.160.250,21	37.824.671.467,73
- Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	2.331.965.700,00	2.495.203.299,00	2.669.867.529,93	2.856.758.257,03	3.056.731.335,02	3.270.702.528,47
- Belanja Honorarium	10.964.762.719,00	11.513.000.854,95	12.088.650.897,70	12.693.083.442,58	13.327.737.614,71	13.994.124.495,45
- Belanja Bantuan Sosial	11.340.000.000,00	7.828.000.000,00	8.227.725.000,00	8.644.361.000,00	9.080.328.000,00	9.536.594.000,00
- Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	136.500.000,00	143.325.000,00	150.491.250,00	158.015.812,50	165.916.603,13	174.212.433,28
- Belanja Jasa Kantor (Telepon, Air, Listrik, Internet/kawat/faximili)	13.685.428.296,00	14.369.699.710,80	15.088.184.696,34	15.842.593.931,16	16.634.723.627,71	17.466.459.809,10
- Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	3.060.441.069,00	3.213.463.122,45	3.374.136.278,57	3.542.843.092,50	3.719.985.247,13	3.905.984.509,48
Belanja Operasi Dan Belanja Modal :	179.348.278.669,00	191.272.866.340,00	201.142.182.913,06	210.870.611.236,45	221.688.677.843,51	232.268.382.109,70
Belanja Operasi (Belanja Barang dan Jasa) dan Belanja Modal -Program OPD untuk Pemenuhan/Penerapan Pelayanan Dasar (SPM)	170.826.229.669,00	180.695.461.290,00	190.048.807.610,56	198.641.933.098,83	208.859.745.652,75	218.808.083.234,58
Belanja Operasi (Belanja Barang dan Jasa) dan Belanja Modal -Program OPD pada Urusan dalam Mendukung Pencapaian Misi Ekonomi	8.522.049.000,00	10.577.405.050,00	11.093.375.302,50	12.228.678.137,63	12.828.932.190,76	13.460.298.875,12

Uraian	Tahun 2021*	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
PRIORITAS II	1.116.192.319.281,00	1.234.646.769.121,10	1.296.534.771.515,99	1.358.484.001.063,83	1.422.707.825.000,88	1.494.770.226.349,48
Belanja Operasi Dan Belanja Modal :						
Belanja Operasi (Belanja Barang dan Jasa) dan Belanja Modal - Program Penunjang OPD dan Program pada Urusan/Unsur OPD diluar prioritas 1	1.116.192.319.281,00	1.234.646.769.121,10	1.296.534.771.515,99	1.358.484.001.063,83	1.422.707.825.000,88	1.494.770.226.349,48
PRIORITAS III	206.834.790.436,00	189.408.751.907,93	201.156.217.741,49	323.650.429.743,39	226.922.881.072,93	241.076.375.336,78
Belanja Operasi :						
- Belanja Tambahan Penghasilan PNS	106.403.188.699,00	113.851.411.907,93	121.821.010.741,49	130.348.481.493,39	139.472.875.197,93	149.235.976.461,78
- Belanja Hibah	70.431.601.737,00	44.057.340.000,00	46.260.207.000,00	158.573.198.250,00	50.984.818.375,00	53.551.952.000,00
Belanja Tidak Terduga	30.000.000.000,00	31.500.000.000,00	33.075.000.000,00	34.728.750.000,00	36.465.187.500,00	38.288.446.875,00
Belanja Transfer	0	0	0	0	0	0

Sumber : APBD Kota Bandar Lampung Tahun 2021 dan Hasil Proyeksi TAPD 2021

*) anggaran

- **Proyeksi Belanja Prioritas I**

Belanja Prioritas I diproyeksikan akan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, anggaran belanja prioritas I sebesar Rp247.835.844.453,00. Selanjutnya pada tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp318.441.131.353,21. Peningkatan pengeluaran belanja ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah sekaligus meningkatkan hasil pembangunan untuk Kota Bandar Lampung dengan tetap meningkatkan pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung.

- **Proyeksi Belanja Prioritas II**

Belanja Prioritas kedua merupakan Belanja Operasi (berupa belanja barang dan jasa) dan Belanja Modal pada program prioritas dan Program Penunjang ditingkat OPD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Anggaran Belanja Prioritas II tahun 2021 sebesar Rp1.116.192.319.281,00. Diproyeksikan pada tahun 2026 belanja Prioritas II sebesar Rp1.494.770.226.349,48. Peningkatan Belanja Operasi (berupa belanja barang dan jasa) dan Belanja Modal diharapkan mampu meningkatkan program pembangunan di Kota Bandar Lampung.

- **Proyeksi Belanja Prioritas III**

Belanja prioritas ketiga dialokasikan untuk mendanai belanja operasi seperti: belanja tambahan penghasilan PNS, dan belanja hibah. Belanja prioritas ketiga juga dialokasikan untuk mendanai belanja tidak terduga dan belanja transfer (Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa). Pengalokasian dana pada prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar.

3.3.3 Rencana Alokasi Penerapan SPM

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, sesuai dengan amanat Pasal 18 ayat (3) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. SPM diterapkan pada urusan wajib daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota. Untuk urusan pemerintahan lainnya, daerah dapat mengembangkan dan menerapkan standar/indikator kinerja. Selanjutnya penerapan SPM diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar yang dimuat dalam dokumen RPJMD.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

Dalam rangka implementasi SPM maka alokasi anggaran yang direncanakan dalam penerapan SPM ini disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.12 Rencana Alokasi Penerapan SPM Tahun 2021 s.d 2026 Kota Bandar Lampung

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	KERANGKA PENDANAAN					
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM		2021	2022	2023	2024	2025	2026
A		1	01		PENDIDIKAN	157.921.050.000,00	165.816.870.663,00	174.107.989.626,56	182.813.463.007,89	191.954.142.908,29	201.551.892.803,70
1	Pendidikan Dasar	1	01	02	Program Pengelolaan Pendidikan	155.390.970.000,00	163.160.286.663,00	171.318.579.626,56	179.884.598.507,89	188.878.851.908,29	198.322.837.253,70
2	Pendidikan Kesetaraan	1	01	02	Program Pengelolaan Pendidikan	1.128.000.000,00	1.184.400.000,00	1.243.620.000,00	1.305.790.000,00	1.371.071.000,00	1.439.624.550,00
3	Pendidikan Anak Usia Dini	1	01	02	Program Pengelolaan Pendidikan	1.402.080.000,00	1.472.184.000,00	1.545.790.000,00	1.623.074.500,00	1.704.220.000,00	1.789.431.000,00
B		1	02		KESEHATAN	542.493.500,00	564.928.500,00	585.722.750,00	590.870.095,31	585.722.750,00	585.722.750,00
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1	02	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	109.262.500,00	114.725.625,00	120.461.906,25	120.461.906,25	120.461.906,25	120.461.906,25
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1	02	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	24.512.500,00	25.738.125,00	27.025.031,25	27.025.031,25	27.025.031,25	27.025.031,25
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1	02	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	-	-	-	-	-	-

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	KERANGKA PENDANAAN					
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM		2021	2022	2023	2024	2025	2026
4	Pelayanan Kesehatan Balita	1	02	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	143.262.500,00	150.425.625,00	155.446.906,25	160.594.251,56	155.446.906,25	155.446.906,25
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	1	02	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	67.662.500,00	71.045.625,00	74.597.906,25	74.597.906,25	74.597.906,25	74.597.906,25
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	1	02	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	23.000.000,00	24.150.000,00	24.150.000,00	24.150.000,00	24.150.000,00	24.150.000,00
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	1	02	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	24.493.500,00	24.493.500,00	24.493.500,00	24.493.500,00	24.493.500,00	24.493.500,00
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	1	02	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	18.900.000,00	18.900.000,00	19.845.000,00	19.845.000,00	19.845.000,00	19.845.000,00
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1	02	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	18.900.000,00	18.900.000,00	18.900.000,00	18.900.000,00	18.900.000,00	18.900.000,00

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	KERANGKA PENDANAAN					
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM		2021	2022	2023	2024	2025	2026
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	1	02	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	35.000.000,00	36.750.000,00	38.587.500,00	38.587.500,00	38.587.500,00	38.587.500,00
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	1	02	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	31.500.000,00	31.500.000,00	31.500.000,00	31.500.000,00	31.500.000,00	31.500.000,00
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	1	02	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	46.000.000,00	48.300.000,00	50.715.000,00	50.715.000,00	50.715.000,00	50.715.000,00
C		1	03		PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	6.218.614.000,00	6.529.544.700,00	6.856.021.935,00	7.198.823.031,63	7.558.764.182,96	7.936.702.392,25
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	1	03	03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	2.971.501.000,00	3.120.076.050,00	3.276.079.852,50	3.439.883.845,00	3.611.878.037,00	3.792.471.939,00

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	KERANGKA PENDANAAN					
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM		2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	1	03	05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	3.247.113.000,00	3.409.468.650,00	3.579.942.082,50	3.758.939.186,63	3.946.886.145,96	4.144.230.453,25
D		1	04		PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	50.000.000,00	52.500.000,00	55.125.000,00	57.881.250,00	60.775.312,00
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/ kota dan Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	1	04	02	Program Pengembangan Perumahan	-	50.000.000,00	52.500.000,00	55.125.000,00	57.881.250,00	60.775.312,00

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	KERANGKA PENDANAAN					
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E		1	05		KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.004.072.169,00	2.327.617.427,00	2.774.948.299,00	2.027.645.714,00	2.454.927.999,00	2.117.768.086,00
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban Umum	1	05	02	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.004.072.169,00	1.027.617.427,00	1.054.448.299,00	1.096.120.714,00	1.161.826.749,00	1.217.768.086,00
2	Pelayanan informasi rawan bencana	1	05	03	Program Penanggulangan Bencana	-	100.000.000,00	100.000.000,00	-	200.000.000,00	300.000.000,00
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1	05	03	Program Penanggulangan Bencana	-	900.000.000,00	1.000.000.000,00	400.000.000,00	600.000.000,00	400.000.000,00
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1	05	03	Program Penanggulangan Bencana	-	200.000.000,00	400.000.000,00	300.000.000,00	250.000.000,00	100.000.000,00
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	1	05	04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	-	100.000.000,00	220.500.000,00	231.525.000,00	243.101.250,00	100.000.000,00

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	KERANGKA PENDANAAN					
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F		1	06		SOSIAL	5.140.000.000,00	5.406.500.000,00	5.671.625.000,00	5.956.006.250,00	6.248.306.562,50	6.555.221.890,63
1	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti	1	06	04	Program Rehabilitasi Sosial	90.000.000,00	104.000.000,00	104.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00
2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	1	06	06	Program Penanganan Bencana	5.050.000.000,00	5.302.500.000,00	5.567.625.000,00	5.846.006.250,00	6.138.306.562,50	6.445.221.890,63
TOTAL KEBUTUHAN ANGGARAN PELAYANAN DASAR						170.826.229.669,00	180.695.461.290,00	190.048.807.610,56	198.641.933.098,83	208.859.745.652,75	218.808.083.234,58



BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

4.1.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

1. Pemulihan ekonomi dalam upaya menekan dampak *Pandemi Covid-19*. Pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung pada Tahun 2020 berkontraksi sebesar 1,85 persen.
2. Laju inflasi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir cenderung fluktuatif, pada tahun 2020 inflasi yang terjadi yaitu sebesar 1,93 persen. Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu menjaga daya beli masyarakat dengan cara mengendalikan stabilitas harga terutama bahan pokok.
3. Distribusi pendapatan masyarakat Kota Bandar Lampung masih ada ketimpangan atau belum merata. Hal ini terlihat dari rasio gini Kota Bandar Lampung pada Tahun 2020 yang masih berada di angka 0,359.
4. Kontribusi Kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB Kota Bandar Lampung perlu ditingkatkan. Pada tahun 2020, Kategori Industri Pengolahan memberikan kontribusi sebesar 20,97 persen terhadap PDRB Kota Bandar Lampung.

5. Kontribusi Kategori Perdagangan terhadap PDRB Kota Bandar Lampung perlu ditingkatkan. Pada tahun 2020, Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memberikan kontribusi sebesar 13,30 persen terhadap PDRB Kota Bandar Lampung.
6. Kontribusi Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Kategori Sektor Jasa masih perlu ditingkatkan. Pada Tahun 2020, Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Kategori Sektor Jasa memberikan kontribusi sebesar 15,42 persen terhadap PDRB Kota Bandar Lampung.
7. Penduduk miskin atau yang berada di bawah garis kemiskinan masih cukup tinggi. Berdasarkan data tahun 2020 sekitar 8,81 persen penduduk Bandar Lampung masih berada di bawah garis kemiskinan.
8. Tingkat Pengangguran Terbuka yang masih relatif tinggi. Pada Tahun 2020 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bandar Lampung sebesar 8,78 persen.
9. Kawasan kumuh, permukiman liar (squatter area) dan rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Bandar Lampung masih membutuhkan penanganan. Persentase luas kawasan kumuh di Kota Bandar Lampung Tahun 2020 sebesar 2,83 persen.
10. Pertumbuhan penduduk masih relatif tinggi. Pada tahun 2020, laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,109 persen.
11. Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih perlu ditingkatkan. Pada tahun 2020, persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah sebesar 25,45 persen.
12. Opini penilaian BPK terhadap pengelolaan Keuangan Daerah perlu dipertahankan. Sembilan tahun terakhir pengelolaan keuangan daerah mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

13. Badan Usaha Milik Daerah yang sejatinya dibentuk untuk mewujudkan tujuan mulia pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dibarengi dengan pencapaian keuntungan finansial untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum bekerja secara optimal.
14. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik masih perlu untuk ditingkatkan. Keberhasilan reformasi birokrasi tercermin dari kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang semakin baik dan netralitas merupakan landasan utama bagi terwujudnya percepatan reformasi birokrasi.
15. Kondisi Jalan Mantap perlu untuk dipertahankan dengan meningkatkan kualitas jalan perkotaan.
16. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan data tahun 2020, IKLH Kota Bandar Lampung mencapai angka 60. Angka tersebut masih dibawah target nasional yaitu sebesar 68,5.

4.1.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

4.1.2.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib

4.1.2.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Permasalahan terkait pendidikan di Kota Bandar Lampung antara lain:

- a. Angka rata-rata lama sekolah belum mencapai 12 tahun. Pada Tahun 2020 rata-rata lama sekolah sebesar 10,93 tahun.
- b. Jumlah satuan pendidikan PAUD dan Pendidikan Dasar yang terakreditasi masih rendah/sedikit. Berdasarkan data Tahun 2020, jumlah PAUD yang berakreditasi 54,00 persen dari jumlah PAUD yang ada, sedangkan pendidikan dasar yang terakreditasi A Tahun 2020 tingkat SD sebesar 30,00 persen dan tingkat SMP sebesar 41,00 persen.

- c. Angka Partisipasi Kasar PAUD masih perlu ditingkatkan, APK PAUD Tahun 2020 sebesar 49,36 persen.
- d. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau masyarakat belum terwujud sepenuhnya.
- e. Kurangnya penguasaan dan pemanfaatan IT dalam pembelajaran.
- f. Biaya pendidikan menengah pertama dan tinggi masih membebani orang tua peserta didik, khususnya masyarakat tidak mampu.
- g. Kualitas tenaga pendidik yang belum merata pada setiap sekolah, sehingga diperlukan upaya pemerataan kualitas guru.
- h. Sarana dan prasarana gedung tempat pendidikan termasuk sarana penunjang pendidikan masih ada yang belum memadai. Keterbatasan dan harga lahan di Bandar Lampung juga menuntut pengembangan pembangunan kearah vertikal dengan utilitas yang modern
- i. Masih kurangnya kesejahteraan tenaga pendidik yang berstatus honorer.

2. Kesehatan

Permasalahan terkait kesehatan di Kota Bandar Lampung antara lain:

- a. Pandemi *Covid-19* yang belum dapat diprediksi kapan akan berakhir masih memerlukan konsentrasi terhadap dukungan tenaga medis dan infrastruktur kesehatan.
- b. Kesadaran masyarakat dalam upaya pencegahan berbagai penyakit menular ataupun tidak menular termasuk perkembangan yang sangat cepat dari kasus *Covid-19* dengan melaksanakan pola hidup bersih dan sehat masih harus ditingkatkan.
- c. Penempatan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama belum merata.
- d. Jumlah tenaga kesehatan di Kota Bandar Lampung masih kurang, terutama untuk tenaga fungsional tertentu seperti fungsional gizi, kesehatan lingkungan, kefarmasian, analis laboratorium, rekam medik dan tenaga administrasi lainnya.

- e. Pembiayaan kesehatan bagi masyarakat harus ditingkatkan, terutama untuk promotif dan preventif.
- f. Meningkatnya prevalensi terjadinya penyakit degeneratif akibat situasi kondisi perkotaan, pola hidup dan masalah lingkungan.
- g. Penyediaan sarana prasarana kesehatan/Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) masih harus ditingkatkan agar sesuai dengan standar.
- h. Masih adanya Angka kematian ibu, bayi dan balita.
- i. Masih adanya kasus stunting di Kota Bandar Lampung.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

3.1. Pekerjaan Umum

Permasalahan terkait sarana dan prasarana umum di Kota Bandar Lampung antara lain:

- a. Volume jalan di Kota Bandar Lampung masih perlu ditingkatkan sehingga jalan yang ada dapat mendukung pergerakan penduduk dan kendaraan serta mengurangi kemacetan. Berdasarkan data Tahun 2020, rasio Panjang jalan dibandingkan luas wilayah sebesar 7,89 dan rasio panjang jalan dibandingkan jumlah penduduk sebesar 1,46.
- b. Masih terdapat infrastruktur jalan lingkungan yang rusak.
- c. Jalan alternatif sebagai pemecah arus kemacetan belum dikembangkan secara optimal
- d. Kondisi *drainase* yang tidak selaras dengan tata ruang dan prasarana lainnya telah menimbulkan dampak negatif pada sarana jalan dan menyebabkan banjir.
- e. Prasarana dasar kawasan permukiman belum berfungsi dengan baik, seperti:
 - 1) Penumpukan sedimentasi pada jaringan *Drainase* di Kota Bandar Lampung yang menyebabkan kapasitas jaringan tidak mampu menampung volume air hujan;

- 2) Tingkat pelayanan sanitasi aman dan layak belum memadai;
 - 3) Akses sarana air bersih perpipaan masih rendah;
 - 4) Sarana dan pengelolaan sampah belum memadai;
 - 5) Penataan Kawasan permukiman kumuh melalui peningkatan dan pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman dan penyediaan Rumah Layak Huni.
- f. Masih sering terjadi genangan di titik-titik tertentu.
 - g. Sistem informasi pengelolaan infrastruktur perkotaan datanya belum *update*, tidak sebanding dengan kecepatan pelaksanaan pembangunan.
 - h. Masih terdapat ruas jalan yang memerlukan penerangan jalan umum yang hemat energi.
 - i. Akses alternatif menuju jalan tol trans Sumatera yang merupakan jalan kota perlu ditingkatkan.
 - j. Kebutuhan sarana gedung dalam rangka peningkatan pelayanan publik.
 - k. Masih banyak rumah tangga yang belum mendapatkan akses Sumber Air Bersih dan Sumber Air Layak. Data Tahun 2020 menunjukkan bahwa Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak baru mencapai 44,82 persen.

3.2. Penataan Ruang

Permasalahan terkait penataan ruang di Kota Bandar Lampung antara lain:

- a. Belum optimalnya pemanfaatan dokumen rencana tata ruang sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan (Peraturan Daerah tentang RTRW sedang direvisi dan RDTR sedang disusun).
- b. Persentase bangunan ber-IMB dan SLF (bagi bangunan komersil) masih harus ditingkatkan.
- c. Tekanan alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi non pertanian yang menimbulkan dampak terhadap kelestarian lingkungan.
- d. Perlunya komitmen untuk mencegah timbulnya permukiman baru diatas air secara illegal/ Pemukiman liar (*Squatter area*).

- e. Belum optimalnya pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan tata bangunan dan lingkungan.
- f. Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi TABG Kota Bandar Lampung dan penerbitan sertifikat laik fungsi (SLF) bangunan gedung.
- g. Perlunya inovasi daerah terkait penataan wilayah pesisir.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan terkait perumahan dan permukiman di Kota Bandar Lampung antara lain:

- a. Perlunya peningkatan peran dan kesadaran masyarakat dalam proses pemeliharaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman melalui program pemberdayaan masyarakat.
- b. Belum tertatanya beberapa kawasan permukiman liar (squatter area) disempadan pantai dan sungai serta beberapa kawasan yang pertumbuhannya tidak memenuhi aspek kesehatan dan perencanaan kota.
- c. Masih rendahnya proses penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung oleh pengembang.
- d. Perlunya penanganan peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Bandar Lampung melalui anggaran APBD Kota Bandar Lampung, dimana sampai dengan tahun 2020 rata-rata penuntasan RTLH setiap tahunnya melalui sumber pendanaan APBN hanya sekitar 100-300 unit.
- e. Perlu adanya bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) untuk perumahan bersubsidi dan permukiman kumuh dari Pemerintah Kota Bandar Lampung.
- f. Jumlah rumah susun sewa yang masih kurang di Kota Bandar Lampung sebagai solusi mengatasi bertambahnya jumlah penduduk.

- g. Perlu adanya kerjasama, baik dengan pihak perbankan maupun swasta yang bergerak dalam bidang perumahan terkait pengadaan perumahan bagi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) dengan mudah dan ringan.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Permasalahan terkait urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kota Bandar Lampung yaitu :

- a. Masih adanya gangguan ketentraman dan ketertiban di masyarakat.
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan.
- c. Penanganan bencana daerah masih perlu ditingkatkan.

6. Sosial

Permasalahan terkait sosial di Kota Bandar Lampung yaitu :

- a. Dampak sosial akibat Pandemi *Covid-19* yang masih membutuhkan penanganan.
- b. Belum optimalnya penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial serta Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Perlindungan Sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
- c. Belum optimalnya pelaksanaan pemeliharaan dan pembuatan rumah jaga serta fasilitas TPU.

4.1.2.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Permasalahan terkait Ketenagakerjaan di Kota Bandar Lampung antara lain:

- a. Tenaga kerja yang dirumahkan sebagai dampak adanya Pandemi *Covid-19*.
- b. Ketersediaan lapangan kerja masih terbatas.
- c. Tingkat pengangguran masih relatif tinggi.

- d. Belum seimbang antara pertumbuhan angkatan kerja yang besar dengan pertumbuhan kesempatan kerja.
- e. Keterampilan dan kecakapan tenaga kerja yang masih rendah, kurang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja dan kewirausahaan.
- f. Keterbatasan informasi pasar kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Bandar Lampung antara lain:

- a. Upaya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan termasuk upaya pencegahan dan penanganannya masih harus ditingkatkan.
- b. Tingkat partisipasi perempuan khususnya di bidang politik dan hukum masih belum maksimal.
- c. Sistem pencatatan dan pelaporan serta sistem penanganan dan penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak perlu ditingkatkan.
- d. Kapasitas pemberdayaan perempuan dan anak di Kota Bandar Lampung masih terbatas.
- e. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan/ regulasi yang ditujukan untuk perlindungan perempuan dan anak masih perlu ditingkatkan.
- f. Peran masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media dalam perlindungan perempuan dan anak perlu ditingkatkan.
- g. Indeks Pembangunan Gender (IPG) masih perlu ditingkatkan.
- h. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) masih perlu ditingkatkan.
- i. Masih banyak perempuan rentan terhadap tindak kekerasan.
- j. Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.

- k. Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan terlihat dari kasus pornografi dan *cyber crime*.
- l. Kurangnya pemahaman tentang penanganan dan perlakuan terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABH) sehingga hak ABH sulit terpenuhi.

3. Pangan

Permasalahan pangan di Kota Bandar Lampung antara lain terkait:

- a. Cadangan pangan Pemerintah Daerah yang masih perlu diperhatikan kecukupannya.
- b. Ketersediaan Pangan yang disebabkan oleh alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan non pertanian, langkanya ketersediaan sumber daya air dan curah hujan yang tidak menentu. Selain itu tingkat produktivitas usaha tani relatif rendah karena sempitnya lahan pertanian.
- c. Keamanan pangan yang beredar di masyarakat ditunjukkan dengan masih terjadinya berbagai kasus gangguan kesehatan akibat pangan tidak aman tercemar secara biologi, fisik karena pemakaian bahan kimia yang berlebihan atau yang terlarang.
- d. Diversifikasi Pangan (masih ketergantungan dengan pangan beras).
- e. Proses distribusi yang tidak lancar sehingga menyebabkan harga pangan naik
- f. Ketersediaan informasi harga, distribusi, pasokan dan akses pangan masih memiliki keterbatasan dalam hal penyajian dan analisis data. Saat ini, Dinas pangan masih dalam tahap awal mempersiapkan sistem penginputan informasi harga pangan pokok secara digital, sehingga agar kelak dapat diakses oleh pihak yang membutuhkan.

4. Pertanahan

Permasalahan terkait pertanahan di Kota Bandar Lampung antara lain:

- a. Perlunya peningkatan fungsi koordinasi antara organisasi perangkat daerah penyelenggara bidang pertanahan untuk meningkatkan sinergitas dan keterpaduan program pertanahan.
- b. Perlunya dokumentasi dan database terkait penyelenggaraan kegiatan bidang pertanahan terutama terkait program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, penanganan kasus dan sengketa tanah serta pengembangan sistem informasi dan pendaftaran tanah.
- c. Perlunya komitmen dan kesepakatan dengan Pemerintah Propinsi terkait penanganan pertanahan kawasan permukiman liar (*squatter area*) melalui program sertifikasi secara komunal atas nama Pemerintah Kota Bandar Lampung.

5. Lingkungan Hidup

Permasalahan terkait lingkungan hidup di Kota Bandar Lampung antara lain:

- a. Ruang Terbuka Hijau Ruang (RTH) masih perlu ditingkatkan.
- b. Tingginya konversi lahan produktif ke lahan terbangun.
- c. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan.
- d. Masih tingginya pencemaran di kawasan pesisir pantai.
- e. Meningkatnya kasus pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh laju pertumbuhan penduduk di wilayah perkotaan.
- f. Pencemaran udara sebagai dampak kemajuan transportasi dan industrialisasi, pencemaran sungai dan tanah karena limbah industri dan limbah rumah tangga.
- g. Sarana dan prasarana persampahan yang belum memadai dan optimal.

- h. Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang masih menggunakan *system open dumping* berdampak kurang baik terhadap sanitasi lingkungan di sekitar TPA dan berakibat semakin pendeknya umur TPA.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan terkait Kependudukan di Kota Bandar Lampung antara lain:

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan perekaman KTP Elektronik berbasis NIK dan memiliki dokumen pencatatan sipil lainnya.
- b. Sinkronisasi dan pemutakhiran data kependudukan terkait data ganda penduduk Kota Bandar Lampung perlu ditingkatkan.

7. Pemberdayaan Masyarakat

Permasalahan terkait pemberdayaan masyarakat di Kota Bandar Lampung yaitu :

- a. Masih kurangnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan.
- b. Belum optimalnya kualitas lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan maupun aparatur penyelenggara pemerintahan kelurahan.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan terkait Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kota Bandar Lampung antara lain:

- a. Masih tingginya *Unmeet Need*. Kondisi pada tahun 2020 *Unmeet Need* sebesar 11,50 persen.
- b. Angka kelahiran total (TFR) per Pasangan Usia Subur (15 - 49 tahun) pada Tahun 2020 sebesar 2,37; dimana kondisi ideal yang diharapkan adalah 2 (setiap keluarga memiliki 2 anak saja).

9. Perhubungan

Permasalahan terkait perhubungan di Kota Bandar Lampung antara lain:

- a. Perlu penataan trayek angkutan umum dan penataan jaringan trayek angkutan umum massal yang sesuai dengan kondisi saat ini.

- b. Masih kurangnya sarana pendukung operasional lalu lintas (kendaraan operasional, kendaraan hidrolik, kendaraan derek, water barrier, traffic cone, alat komunikasi) dan fasilitas keselamatan lalu lintas
- c. Pelayanan pada Jalan Arteri dan kolektor masih perlu ditingkatkan untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas.
- d. Perlunya memenuhi fasilitas ruang parkir pada 5 (lima) wilayah parkir yang dikelola Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.
- e. Belum terimplementasinya Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung terkait penyelenggaraan transportasi Kota Bandar Lampung.
- f. Perlu segera dilakukan upaya peningkatan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang antara jalan raya dengan jalan rel (PJR) yang ada di wilayah Kota Bandar Lampung.
- g. Perlu peningkatan sarana dan prasarana kebutuhan petugas Pintu Perlintasan Kereta Api untuk memastikan tugas dapat berjalan optimal.
- h. Perlu dilakukan penambahan lokasi Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di ruas-ruas jalan yang volume lalu lintasnya padat untuk mengurangi kemacetan lalu lintas.
- i. Perlu adanya dana alokasi pemeliharaan halte dan Jembatan Pemeliharaan Orang (JPO) untuk memastikan fasilitas halte dan JPO selalu dalam kondisi yang layak dipergunakan.
- j. Perlu dilakukan pendataan terhadap potensi kendaraan wajib uji baru berdasarkan jenis JBB kendaraannya sehingga dapat diketahui pertumbuhannya setiap tahun.

10. Komunikasi dan Informatika

Permasalahan terkait komunikasi dan informatika di Kota Bandar Lampung antara lain:

- a. Pemahaman dan keterampilan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi aparatur dan masyarakat perlu ditingkatkan.
- b. Belum terselenggaranya pemerataan infrastruktur TIK untuk meningkatkan pelayanan publik.



- c. Belum optimalnya sistem *e-government* dan aplikasi pendukungnya.
- d. Belum terbentuknya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Kota Bandar Lampung.
- e. Belum adanya Peraturan Daerah (Perda) mengenai pengelolaan dan pelaksanaan *Smart City* Kota.

11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Permasalahan terkait Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kota Bandar Lampung antara lain:

- a. Produktivitas UKM yang menurun bahkan mati akibat Pandemi *Covid-19* perlu untuk dibangun kembali.
- b. Produktivitas/volume usaha koperasi masih rendah. Pada tahun 2020, produktivitas/volume usaha koperasi sebesar 464,635 Milyar, dengan penurunan 2,26 persen dari tahun sebelumnya.
- c. Rendahnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi oleh sektor Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
- d. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia terkait perkoperasian.
- e. Rendahnya aksesibilitas pelaku UMKM terhadap sumber permodalan khususnya perbankan.

12. Penanaman Modal

Permasalahan terkait penanaman modal di Kota Bandar Lampung antara lain:

- a. Penanaman Modal Asing masih perlu ditingkatkan. Pada tahun 2020 jumlah penanaman modal asing mencapai 630.598.514 (dolar), dengan persentase pertumbuhan dari tahun sebelumnya sebesar 4,05 persen.
- b. Penanaman Modal Dalam Negeri masih perlu ditingkatkan. Pada tahun 2020 jumlah penanaman modal dalam negeri mencapai Rp2.210.330.624.677 dengan persentase pertumbuhan dari tahun sebelumnya sebesar 14,99 persen.

- c. Peluang investasi yang ada belum bisa di konversi menjadi investasi sektor riil secara optimal.
- d. Belum optimalnya ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan bagi perluasan usaha penanaman modal.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan terkait kepemudaan dan olah raga di Kota Bandar Lampung antara lain:

- a. Masih minimnya kader-kader kepemimpinan dan kepoloporan pemuda.
- b. Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan masih kurang.
- c. Sarana olah raga masih terbatas.
- d. Pembinaan atlit dan pelatih masih minim.

14. Statistik

Permasalahan terkait statistik di Kota Bandar Lampung antara lain yaitu :

- a. Akurasi data sektoral dari Perangkat Daerah yang masih kurang konsisten, sehingga masih terdapat perbedaan antara data yang dikeluarkan oleh BPS dan data Perangkat Daerah.
- b. Belum optimalnya koordinasi dengan OPD terkait data kestatistikan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Wali Data di Pemerintah Kota Bandar Lampung.

15. Persandian

Permasalahan terkait persandian di Kota Bandar Lampung antara lain :

- a. Terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang menguasai urusan persandian serta belum optimalnya pengamanan terhadap sistem sandi daerah.
- b. Belum adanya Tenaga Fungsional Sandi Man yang berasal dari ASN.
- c. Belum optimalnya pengamanan cyber dan persandian di Tingkat Kota Bandar Lampung khususnya pengamanan data aplikasi online antar OPD/ Data Center

- d. Belum terselenggaranya Standar Operasional Prosedur (SOP) baik pada keamanan cyber dan persandian dan Telekomunikasi Informasi dan Komunikasi (TIK).

16. Kebudayaan

Permasalahan terkait kebudayaan di Kota Bandar Lampung antara lain:

- a. Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, seni, bahasa dan sastra daerah;
- b. Belum optimalnya pengelolaan budaya sebagai aset yang sangat berharga dalam membangun jati diri dan mewarnai segenap sektor kehidupan dan menyaring masuknya budaya-budaya asing yang kurang sesuai dengan tatanan, tuntunan dan tontonan budaya lokal;
- c. Belum optimalnya pengelolaan budaya untuk meningkatkan daya tarik wisata dari luar daerah dan dunia internasional.

17. Perpustakaan

Permasalahan terkait perpustakaan di Kota Bandar Lampung antara lain:

- a. Masih rendahnya minat dan budaya baca masyarakat sehingga pemanfaatan terhadap perpustakaan belum optimal.
- b. Penurunan jumlah pengunjung perpustakaan sebagai dampak dari Pandemi *Covid-19*.
- c. Masih terbatasnya koleksi bahan pustaka sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
- d. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki.
- e. Masih rendahnya kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau diklat terkait perpustakaan.

18. Kearsipan

Permasalahan terkait kearsipan di Kota Bandar Lampung antara lain:

- a. Sarana dan Prasarana penyimpanan kearsipan masih belum memadai sehingga perlu dilakukan pembenahan dan penataan secara berkesinambungan.
- b. Kurangnya pengetahuan dinas/instansi tentang arti pentingnya arsip sebagai sumber informasi.
- c. Kurangnya kesadaran OPD untuk menyerahkan arsip statis ke lembaga kearsipan.
- d. Rendahnya kesempatan untuk mengikuti seminar dan workshop serta pelatihan terkait kearsipan.

4.1.2.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Permasalahan terkait urusan kelautan dan perikanan di Kota Bandar Lampung antara lain:

- a. Belum optimal dan terkelolanya tempat pelelangan ikan di kota bandar lampung untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap dan mendukung peningkatan nilai tukar nelayan;
- b. Pemanfaatan dan pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya milik pemerintah dan masyarakat yang tersedia belum termanfaatkan dengan baik, guna membantu dalam peningkatan volume produksi perikanan budidaya;
- c. Pemberdayaan pelaku usaha perikanan skala kecil yang masih belum merata dan belum memiliki *impact/outcome* nyata dalam peningkatan nilai tukar pembudidaya dan nelayan terhadap peningkatan produksi perikanan;
- d. Tingginya permintaan ikan konsumsi berkualitas tidak sebanding dengan seiringnya tingkat populasi penduduk yang meningkat setiap

tahunnya, sehingga perlu adanya tata kelola *supply-demand* dan pengembangan daya saing produk hasil perikanan di masyarakat;

- e. Terjadinya degradasi dan alih fungsi lahan pada wilayah green belt di sempadan pantai sebagai ekosistem pesisir yang lestari yang berubah menjadi kawasan industri dan pemukiman;
- f. Masih rendah dan lemahnya kompetensi sumber daya manusia termasuk pada kelembagaan kelompok di sektor perikanan dan kelautan.

2. Pariwisata

Permasalahan terkait urusan pariwisata di Kota Bandar Lampung yaitu :

- a. Sektor pariwisata yang menurun akibat Pandemi *Covid-19*.
- b. Kurangnya sajian atraksi pariwisata budaya di tempat destinasi pariwisata.
- c. Rambu petunjuk jalan ke arah tempat wisata masih sangat minim.
- d. Kurangnya pemandu wisata berbahasa asing khususnya selain berbahasa inggris.
- e. Terbatasnya tenaga kerja tersertifikasi.

3. Pertanian

Permasalahan terkait urusan pertanian di Kota Bandar Lampung antara lain:

- a. Keterbatasan dan alih fungsi lahan Pertanian menjadi fungsi lain (pemukiman), semakin mempersulit usaha Pertanian, Peternakan dan Perkebunan.
- b. Sebagian petani berkebun di tanah register karena tidak mempunyai lahan sendiri.
- c. Minimnya pengetahuan petani dalam pengolahan pasca panen hasil pertanian.

- d. Sebagian besar petani tidak mempunyai modal untuk merehabilitasi tanaman perkebunan yang sudah tua, sehingga hasilnya tidak maksimal.
- e. Belum optimalnya infrastruktur pertanian.
- f. Usaha peternakan yang ada masih didominasi skala rumah tangga, belum berorientasi agribisnis dengan skala usaha tertentu.
- g. Belum maksimalnya produksi hasil peternakan akibat manajemen dan SDM yang masih kurang, ketersediaan HMT (Hijauan Makanan Ternak) dan kualitas bibit yang rendah.
- h. Masih rendahnya permodalan bagi petani dan pelaku usaha pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan untuk dapat menghasilkan produksi yang maksimal dan produk olahan yang berkualitas dan berdaya saing.
- i. Bandar Lampung belum bebas penyakit rabies dan flu burung (AI).

4. Perdagangan

Permasalahan terkait urusan perdagangan di Kota Bandar Lampung antara lain:

- a. Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB cenderung fluktuatif tiap tahunnya dan pertumbuhannya masih perlu ditingkatkan lagi. Pada tahun 2020, kontribusi Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,30 persen dengan pertumbuhan terkontraksi sebesar 10,00 persen.
- b. Meningkatnya animo masyarakat untuk berprofesi sebagai pedagang mengakibatkan bertambahnya jumlah pedagang, hal ini akan berdampak secara langsung pada kebutuhan tempat berdagang.

5. Perindustrian

Permasalahan terkait urusan perindustrian di Kota Bandar Lampung antara lain:

- a. Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan cenderung fluktuatif tiap tahunnya. Pada tahun 2020, pertumbuhan Kategori Industri Pengolahan berkontraksi sebesar 4,27 persen dengan kontribusi terhadap PDRB sebesar 20,97 persen.
- b. Sektor industri yang menurun akibat Pandemi *Covid-19*.
- c. Kurangnya modal usaha Industri Kecil Menengah.
- d. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan sebagian Industri Kecil Menengah.
- e. Kurangnya sarana dan prasarana industri kecil dan menengah.

6. Transmigrasi

Permasalahan terkait urusan transmigrasi di Kota Bandar Lampung adalah hal-hal yang berkaitan dengan faktor eksternal, diantaranya kerjasama antar instansi yang masih belum terbangun, juga rendahnya animo dan pengetahuan masyarakat mengenai ketransmigrasian itu sendiri.

4.2. ISU STRATEGIS

4.2.1 ISU STRATEGIS BERDASARKAN ISU PEMBANGUNAN NASIONAL DAN GLOBAL

1. Penerapan Industri 4.0 dan Ekonomi Digital

Saat ini dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0. Revolusi tersebut memberikan tantangan dan peluang bagi perkembangan perekonomian ke depan. Di satu sisi, digitalisasi, otomatisasi, dan penggunaan kecerdasan buatan dalam aktivitas ekonomi akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi modern, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Teknologi digital juga membantu proses pembangunan di berbagai bidang di

antaranya pendidikan melalui pembelajaran jarak jauh (*distance learning*), pemerintahan melalui *e-government*, inklusi keuangan melalui *financial technology (fin-tech)*, dan pengembangan UMKM seiring berkembangnya *e-commerce*. Namun di sisi lain, perkembangan revolusi industri 4.0 berpotensi menyebabkan hilangnya pekerjaan di dunia. Diperkirakan 60 persen jabatan pekerjaan di dunia akan tergantikan oleh otomatisasi. Di Indonesia, diperkirakan 51,8 persen potensi pekerjaan yang akan hilang. Di samping itu, tumbuhnya berbagai aktivitas bisnis dan jual beli berbasis online belum dibarengi oleh optimalisasi penerimaan negara dan pengawasan kepatuhan pajak atas transaksi tersebut.

2. Ketersediaan Energi

Tantangan pemenuhan kebutuhan energi ke depan diperkirakan akan semakin berat. Cadangan sumber energi fosil (non-terbarukan) seperti minyak dan gas bumi semakin menipis, sementara pengembangan sumber energi terbarukan juga masih belum signifikan untuk dapat mencukupi kebutuhan energi dalam negeri.

Suplai energi dari dalam negeri pada tahun 2018 hanya mampu memenuhi sekitar 75 persen dari permintaan energi nasional dan diperkirakan akan terus menurun hingga 28 persen di tahun 2045. Berkurangnya kemampuan produksi energi domestik diperkirakan dapat mempengaruhi keseimbangan antara suplai dan kebutuhan energi nasional di masa yang akan datang.

Guna memenuhi kebutuhan energi nasional, maka pada tahun 2024 porsi energi baru terbarukan harus ditingkatkan hingga menuju 23 persen dari bauran energi nasional. Selain itu, diperlukan peningkatan upaya penemuan sumber-sumber energi baru untuk mengantisipasi laju penurunan cadangan sumber daya energi fosil di masa mendatang.



Keterbatasan daya dukung sumber daya alam dan degradasi daya tampung lingkungan hidup merupakan tantangan nyata yang dapat menghambat pencapaian target-target pembangunan. Diperlukan upaya yang holistik dan terintegrasi dari berbagai sektor untuk mengatasi tantangan tersebut. Perencanaan pembangunan perlu memperhatikan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pencapaian target-target pembangunan serta memperhatikan arahan fungsi dan struktur ruang dalam pembangunan kewilayahan.

3. *Sustainable Development Goals / SDG's*

25 September 2015 bertempat di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), para pemimpin dunia secara resmi mengesahkan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau disebut *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai kesepakatan pembangunan global. Kurang lebih 193 kepala negara hadir, termasuk Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla turut mengesahkan Agenda SDGs.

Dengan mengusung tema "Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan", SDGs yang berisi 17 Tujuan serta 169 Target yang merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan (berlaku sejak 2016 hingga 2030), guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berlaku bagi seluruh negara (universal), sehingga seluruh negara tanpa kecuali negara maju memiliki kewajiban moral untuk mencapai Tujuan dan Target SDGs.

Gambar 4.1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



17 Tujuan SDGs yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/SDGs di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya. TPB/SDGs merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals*/MDGs) yang lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak

negara baik negara maju maupun berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, inklusif dengan pelibatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan media, Filantropi dan Pelaku Usaha, serta Akademisi dan Pakar.

Untuk memudahkan pelaksanaan dan pemantauan, 17 Tujuan dan 169 target TPB/SDGs di Indonesia dikelompokkan ke dalam empat pilar yang dalam pelaksanaan keempat pilar tersebut saling berkaitan dan saling mendukung satu sama lain, yaitu:

1. Pilar pembangunan sosial: meliputi Tujuan 1, 2, 3, 4 dan 5
2. Pilar pembangunan ekonomi: meliputi Tujuan 7, 8, 9, 10 dan 17
3. Pilar pembangunan lingkungan: meliputi Tujuan 6, 11, 12, 13, 14 dan 15
4. Pilar pembangunan hukum dan tata kelola: meliputi Tujuan 16.

4.2.2 ISU STRATEGIS BERDASARKAN RPJPD KOTA BANDAR LAMPUNG

Beberapa isu strategis Pembangunan Jangka Panjang yang tercantum dalam Dokumen RPJPD Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025, sebagai berikut:

1. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia;
2. Belum optimalnya pengembangan potensi ekonomi;
3. Belum optimalnya penegakkan supremasi hukum dan peningkatan kesadaran politik;
4. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
5. Terbatasnya pembangunan sarana dan prasarana dasar;
6. Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan;
7. Kota Bandar Lampung rawan bencana alam banjir, longsor, gempa bumi, dan tsunami.

4.2.3 ISU STRATEGIS BERDASARKAN RTRW KOTA BANDAR LAMPUNG

Beberapa isu strategis berdarakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung Tahun 2021 – 2041 diantaranya adalah:

1. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Kota Bandar Lampung ditetapkan sebagai salah satu Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dalam system perkotaan nasional dan dalam Pusat pemerintahan provinsi, Simpul utama kegiatan ekspor-impor, Pusat perdagangan dan jasa regional, Pusat pendukung jasa pariwisata, Pendidikan tinggi, Simpul utama transportasi skala nasional.
2. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera, Kota Bandar Lampung merupakan jasa pelayanan pemerintahan, perkebunan, pariwisata, industri, perdagangan serta perikanan.
3. Kota Bandar Lampung dalam hal ini diharapkan dapat memainkan peran dan fungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa regional. Dengan dukungan fasilitas yang ada, tentunya Kota Bandar Lampung juga mampu memainkan peran sebagai simpul koleksi dan distribusi serta outlet produksi regional, sehingga diharapkan mampu berperan sebagai *growth centre* bagi pengembangan kawasan perkotaan di sekitarnya.
4. Pembangunan Jalan Tol Bakauheni – Terbanggi Besar yang beberapa ‘*enterchange*’nya ada di Kota Bandar Lampung.
5. Kebutuhan Air Baku : Berdasarkan kajian kondisi hidrologi, Kota Bandar Lampung termasuk kedalam zona rawan ketersediaan air tanah. Diproyeksikan hingga akhir tahun rencana ketersediaan air tanah tersebut kurang dapat diandalkan untuk memenuhi masyarakat Kota Bandar Lampung.
6. Kondisi Air Permukaan : Berdasarkan hasil uji kualitas air sungai, Sebagian besar sungai-sungai yang ada di Kota Bandar Lampung memiliki kualitas yang kurang baik. Hal ini disebabkan oleh pencemaran kegiatan domestik rumah tangga, industri, pasar, rumah sakit, dan lainnya. Sehingga secara eksisting air sungai pun belum dapat



digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Bandar Lampung.

7. Kota Bandar Lampung merupakan Kota yang rawan akan bencana gempa bumi, pergeseran tanah dan Tsunami. Hingga saat ini perkembangan dan pertumbuhan Kota belum cukup memperhatikan zonasi-zonasi kawasan yang merupakan zona rawan bencana tersebut. Sehingga tingkat kerentanan bencana Kota cukup tinggi. Selain itu pemahaman masyarakat dalam mensikapi kondisi alam yang berada di kawasan bencana masih rendah.
8. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian dan perkebunan menjadi non pertanian akibat dari keterbatasan lahan dan kebutuhan faktor ekonomi masyarakat. Terutama pada Kecamatan Kemiling, Teluk Betung Barat dan Panjang.
9. Penggerusan beberapa bukit di Kota Bandar Lampung semakin tidak terkendali. Hal ini berimplikasi pada berkurangnya ruang terbuka hijau kota, daerah tangkapan air, titik evakuasi bencana, serta menurunnya estetika kota Bandar Lampung.
10. Munculnya *slum area* dikawasan bantaran sungai, pesisir pantai, permukiman di bantaran rel kereta api, permukiman di SUTET dan permukiman di lereng bukit. Hal ini disebabkan akibat dari keterbatasan lahan dan kebutuhan faktor ekonomi masyarakat.
11. Secara eksisting supply energi listrik bagi untuk Kota Bandar Lampung berasal dari dua pembangkit listrik yang dimiliki PLN, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Teluk Betung dengan kapasitas 18,18 MW dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Tarahan dengan kapasitas total 21,35 MW serta Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Tarahan dengan total kapasitas 48,54 MW. Berdasarkan hasil proyeksi Kota Bandar Lampung diprediksi kebutuhan listriknya meningkat seiring dengan perkembangan jumlah penduduk yang terus meningkat dan aktivitas ekonomi yang tinggi. Kebutuhan akan listrik terlihat dari data jumlah KWH yang terus meningkat. Sehingga supply energi listrik yang



ada belum dapat memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Kota Bandar Lampung.

12. Secara eksisting kondisi drainase di Kota Bandar Lampung masih perlu diperhatikan karena ada beberapa saluran drainase yang mengalami kerusakan akibat dari penimbunan lumpur, sampah dan tidak terawatnya saluran yang ada sehingga mengakibatkan banjir pada musim hujan.
13. Masih tercampurnya fungsi saluran darinse sebagai saluran air hujan dengan pembuangan air limbah dapur dan cuci/*grey water*. Sementara jika dilihat secara fungsional kateristik sistem drainase berbeda dengan sistem air limbah hal ini tentunya akan membawa masalah pada daerah hulu aliran.
14. Secara eksisting panjang ruas jalan di Kota Bandar Lampung saat ini belum memenuhi standar yang ada. Jaringan jalan yang ada juga belum terstruktur dengan baik.
15. Terjadinya titik kemacetan di Kota Bandar lampung disebabkan oleh peningkatan volume kendaraan yang cukup tinggi, perlintasan kereta api barang, serta beberapa hal lainnya.
16. Terminal yang ada secara kuantitas kurang melayani pergerakan kota dan kawasan perkotaan Kota Bandar Lampung, sehingga perlu adanya penambahan terminal. Peningkatan kualitas pelayanan terminal yg ada.

4.2.4 ISU STRATEGIS BERDASARKAN ANALISIS PERMASALAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG

1. Penanganan Pandemi *Covid-19* Beserta Dampak Sosial dan Pemulihan Ekonomi Daerah

Tahun 2020 merupakan tahun yang berat bagi dunia ketika tiba-tiba muncul wabah *Covid-19* yang awalnya muncul secara lokal di Wuhan – China, lalu merebak dan memporak-porandakan sendi-sendi perekonomian dunia. Perkembangan krisis kesehatan yang berdampak pada ekonomi dunia ini praktis membuat seluruh negara di dunia harus



mundur dengan rencana-rencana strategis yang telah ditetapkan semula untuk kemudian digantikan kebijakan tanggap darurat dengan memobilisasi semua sumber daya untuk mengatasi wabah *Covid-19*.

Sejak Pemerintah Indonesia mengonfirmasi kasus pertama *Covid-19* pada 2 Maret 2020, banyak kebijakan dan strategi dibuat dalam rangka mencegah transmisi dan kematian signifikan akibat penyakit ini. Pandemi *Covid-19* merupakan salah satu kondisi *force majeure* yang mengancam keselamatan masyarakat Indonesia sehingga perlu direspon dengan cepat oleh seluruh stakeholder diantaranya adalah pemerintah daerah (Pemda).

Pandemi *Corona Virus Disease 19* atau *Covid-19* yang mengancam keselamatan masyarakat Indonesia masih belum dapat diprediksi kapan akan berakhir, sehingga kedepan seluruh stakeholder dan Pemerintah Daerah masih perlu merespon dengan cepat penanganan pandemi ini termasuk juga penanganan dampak sosial ekonomi akibat dari adanya *Covid-19*.

Menyusun perencanaan di tengah suasana yang tidak pasti tentu saja dibutuhkan langkah strategis untuk dapat menangani wabah *Covid-19* tersebut. Kita berharap tentunya krisis *Covid-19* ini segera berakhir, namun kita juga harus bersiap-siap jika skenario masih berlanjut. Jika pada Tahun 2020 krisis ini selesai, maka di beberapa tahun kedepan kita harus fokus pada pemulihan, terutama pemulihan ekonomi dan pemulihan sektor-sektor yang dapat memajukan kesejahteraan rakyat. Namun disamping itu Pemerintah Daerah juga harus bersiap diri jika pandemi ini masih terus berlanjut dan obat paten belum ditemukan, maka hanya solusi pencegahan yang menjadi jalan terbaik untuk diupayakan agar Pemerintah Daerah dapat melindungi setiap nyawa warganya.



2. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor utama dalam pembangunan. Negara-negara yang memiliki pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, serta tingkat kesejahteraan yang lebih baik biasanya adalah negara-negara yang memiliki SDM yang berkualitas. Oleh karena itu, kualitas SDM merupakan salah satu faktor penentu bagi kemampuan suatu negara atau daerah untuk menjadi negara atau daerah yang memiliki daya saing tinggi. Dalam upaya meningkatkan kualitas SDM maka masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan dan Kesehatan harus diatasi.

Kondisi pendidikan di Kota Bandar Lampung secara umum sudah menunjukkan capaian yang cukup baik, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan dalam rangka menciptakan pelayanan pendidikan prima bagi masyarakat. Beberapa isu strategis dan kursorial dalam bidang Pendidikan yang masih sangat relevan hingga saat ini adalah; (i) Mutu atau kualitas pendidikan, (ii) Penguatan Sumber Daya Manusia-SDM, (iii) Perluasan akses pendidikan, dan (iv) Menghadirkan tatakelola pendidikan dalam bentuk *Integrated System* berbasis Teknologi Informasi.

Dalam menghadapi tantangan ke depan dengan adanya globalisasi maka perlu memperhatikan akses pendidikan berkualitas yang menjangkau seluruh kalangan, baik kaum disabilitas maupun yang sudah mencapai usia non sekolah, namun belum mengenyam pendidikan secara baik (belum lulus pendidikan dasar). Oleh karena itu, Peningkatan Kualitas Pendidikan bagi semua kalangan, yang meliputi penyediaan prasarana dan sarana Pendidikan termasuk perpustakaan dan laboratorium, peningkatan kualitas tenaga pendidik, pengelolaan sistem pendidikan yang berkualitas dan pembiayaan Pendidikan masih perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Bandar Lampung kedepan.

Disamping itu treatment terhadap sekolah dan madrasah dalam berbagai hal harus diberlakukan sama.

Kualitas SDM perempuan dan generasi muda juga tidak kalah penting dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah, untuk itu pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan peningkatan SDM generasi muda juga menjadi isu yang perlu menjadi perhatian.

Selain pendidikan, kesehatan juga merupakan salah satu isu penting. Pembangunan kesehatan adalah sebagai bagian dari pembangunan nasional, dalam pembangunan kesehatan tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Derajat kesehatan masyarakat masih menjadi persoalan di Kota Bandar Lampung dan membutuhkan penanganan yang komprehensif khususnya bagi masyarakat miskin dan berkebutuhan khusus. Kasus kematian ibu, bayi dan balita serta kasus gizi buruk masih terjadi dan memerlukan penanganan. Angka kematian bayi bagi masyarakat miskin tiga kali lebih tinggi dari masyarakat tidak miskin.

Penduduk Miskin dalam mendapatkan pelayanan kesehatan seluruhnya harus menjadi tanggungjawab pemerintah, meskipun demikian dalam implementasinya masih ada penduduk miskin yang belum mendapatkan jaminan kesehatan dikarenakan berbagai sebab, antara lain *data base* yang digunakan masih ada perbedaan persepsi, dan juga mekanisme pelayanan rujukan dan klaim yang belum sesuai. Selain itu fasilitas pelayanan Kesehatan lanjutan bagi peyandang cacat dan lansia belum memadai.

Pelayanan kesehatan bukan hanya proses pengobatan yang diberikan kepada masyarakat saat berada di Puskesmas atau rumah sakit, namun jauh sebelum itu yakni bagaimana cara pencegahan penyakit dan menerapkan pola hidup sehat bagi masyarakat. Kesadaran masyarakat



untuk melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dirasa masih kurang.

Selaras dengan isu strategis pembangunan kesehatan yang menjadi arahan Presiden, maka penurunan Angka Stunting, Angka Kematian Ibu dan Bayi, perbaikan pengelolaan Jaminan Kesehatan, Penguatan Pelayanan Kesehatan serta isu terkait obat dan alat kesehatan menjadi isu pembangunan Kesehatan Kota Bandar Lampung yang memerlukan penanganan kedepan.

Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat Kota Bandar Lampung dengan mengedepankan upaya promotif, preventif, kuratif dan edukatif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), peningkatan kualitas prasarana sarana kesehatan, kualitas tenaga medis dan paramedis, perbaikan sistem pelayanan dengan memperhatikan keterjangkauan dan ketersediaan pelayanan untuk seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung termasuk masyarakat miskin dan kelompok masyarakat berkebutuhan khusus menjadi perhatian Pemerintah untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

3. Masalah Transportasi dan Kemacetan

Sebagai ibukota Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung menghadapi permasalahan transportasi yang kompleks akibat meningkatnya aktivitas ekonomi dan sosial. Kondisi sistem transportasi Kota Bandar Lampung dari tahun ke tahun semakin mengalami perubahan ke arah yang mengkhawatirkan. Munculnya persoalan-persoalan transportasi seperti kemacetan lalu lintas, masalah perparkiran, angkutan umum dan sebagainya disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan transportasi yang tidak diimbangi dengan peningkatan pelayanan moda transportasi dan penyediaan utilitas dan infrastruktur yang memadai.



Permasalahan transportasi di Kota Bandar Lampung secara teknis disebabkan antara lain kapasitas jalan yang tidak sebanding dengan laju pertumbuhan kendaraan khususnya kendaraan pribadi, terbatasnya ketersediaan dan pelayanan angkutan umum, tidak terintegrasinya sistem dan jaringan transportasi multimoda. Permasalahan yang paling mendasar adalah menyangkut kapasitas jalan yang sudah tidak mencukupi untuk memenuhi pergerakan orang dan barang yang terus meningkat dari dalam kota maupun dari luar kota Bandar Lampung. Penambahan ruas jalan tidak sebanding dengan pertumbuhan kendaraan bermotor, kondisi ini menyebabkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan menimbulkan titik-titik kemacetan. Hampir semua ruas jalan arteri di Kota Bandar Lampung sudah mengalami kemacetan terutama pada jam-jam tertentu.

Terbatasnya ketersediaan dan pelayanan angkutan umum menyebabkan masih tingginya penggunaan kendaraan pribadi. Pertambahan kendaraan bermotor terus meningkat setiap waktu. Memang beberapa tahun terakhir telah dilakukan penambahan armada Bus Rapid Transit (BRT), namun pengadaan bus tersebut belum dimanfaatkan secara optimal, sedangkan untuk angkutan kota (angkot) yang merupakan moda transportasi yang bisa dimaksimalkan untuk menjadi *feeder* ke kawasan pemukiman, peremajaan dan revitalisasinya masih belum optimal.

Faktor lain yang menyebabkan kemacetan adalah rendahnya tingkat kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas. Ketidaksiplinan tersebut dapat dilihat dari cara berkendara yang tidak tertib, tidak mematuhi rambu lalu lintas dan pelanggaran etika pada lampu pengaturan lalu lintas. Rendahnya tingkat kedisiplinan salah satunya juga didorong oleh minimnya pelibatan masyarakat secara luas dalam perencanaan program transportasi.



4. Penanggulangan Banjir, Rob dan Genangan

Banjir merupakan masalah yang berulang setiap tahun di Kota Bandar Lampung yang bisa terjadi hingga lima kali dalam setahun. Rentannya Kota Bandar Lampung terhadap banjir dan genangan tidak terlepas dari demografi Kota Bandar Lampung serta aliran 2 sungai besar dan 23 sungai-sungai kecil di dalam wilayahnya. Disamping itu adanya perkembangan dalam bentuk kegiatan konstruksi di wilayah Kota Bandar Lampung serta terjadinya alih fungsi lahan menjadi kawasan permukiman, menyebabkan berkurangnya luas daerah resapan. Selain itu juga ditambah dengan kondisi dimana sebagian besar tanah di Kota Bandar Lampung sudah menjadi hak milik perseorangan, kian mempersulit penataan kota dalam membangun infrastruktur pengendali banjir, drainase kota, maupun pembangunan sumur resapan. Hal ini perlu menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan (*stake holder*) terkait pengelolaan skema pengelolaan sumber daya air secara menyeluruh.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam implementasi penanggulangan banjir dan genangan adalah diperlukannya penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan tata laksana, dengan mengefektifkan berbagai upaya perbaikan sistem sungai dan saluran, pintu air, proteksi air laut, pengembangan sistem informasi untuk peringatan dini, dan kesiap-siagaan masyarakat.

Selain banjir, Pemerintah Kota Bandar Lampung juga perlu mengantisipasi fenomena banjir rob yang disebabkan oleh pasang surut air laut maupun penurunan muka tanah pada beberapa kawasan. Dalam rangka menanggulangi hal tersebut diperlukan upaya pembangunan tanggul laut dan tanggul muara sungai.

5. Kawasan kumuh, Permukiman Liar dan Rumah Tidak Layak Huni.

Urbanisasi dan pertumbuhan populasi yang cepat berkontribusi pada munculnya permukiman informal di Kota Bandar Lampung. Sebagai



pusat kegiatan di Provinsi Lampung, sekitar 12.4% populasi Provinsi berada di Bandar Lampung. Bandar Lampung melayani berbagai area di sekitarnya, baik dalam hal pemerintahan, perdagangan, layanan keuangan, pendidikan dan lain sebagainya. Perannya sebagai pusat pertumbuhan didukung oleh rencana untuk meningkatkan aksesibilitas ke dan dari Kota Bandar Lampung.

Ada tujuh indikator area kumuh yaitu 1) kumuh dalam hal bangunan, 2) jalan lingkungan, 3) pasokan air minum, 4) drainase dan lingkungan, 5) pengelolaan air limbah, 6) pengelolaan limbah padat, dan 7) perlindungan dari kebakaran. KOTAKU Bandar Lampung mencatat bahwa terdapat 18 kelurahan di kota yang masuk dalam kategori area kumuh terutama permukimannya. Kelurahan-kelurahan ini adalah: Bumi Kedamaian, Way Gubak, Way Laga, Ketapang, Campang Raya, Kangkung, Sawah Berebes, Rajabasa Nunyai, Rajabasa Raya, Rajabasa Jaya, Way Dadi Baru, Kaliawi Persada, Pasir Gintung, Kebon Jeruk, Pesawahan, Kaliawi, Kelapa Tiga, dan Gulak Galik. Pemerintah kota Bandar Lampung mengeluarkan kebijakan pelaksanaan program termasuk satu data, satu peta dan satu dokumen perencanaan untuk semua yang berkaitan dengan area kumuh. Saat masa pelaksanaan, sinkronisasi dan harmonisasi antara aktor/sektor, sumber pendanaan, infrastruktur yang harus memenuhi standar harus dipertimbangkan dalam menangani kawasan kumuh dan permukiman informal.

6. Masalah Penataan Ruang

Upaya penataan ruang kota seringkali tidak diimbangi dengan pengelolaan penggunaan lahan yang efektif sehingga menimbulkan kesemrawutan kota, yang terwujud dalam penggunaan tempat-tempat umum bagi kegiatan PKL, seperti trotoar/pinggir jalan, taman, terminal/stasiun ataupun kolong jembatan. Keterbatasan wahana atau tempat untuk menyalurkan kebutuhan-kebutuhan sosial budaya, seperti untuk berinteraksi dan mengejawantahkan aspirasi-aspirasi

sosial budayanya ataupun keterbatasan sarana rekreasi yang murah menyebabkan penduduk kota menggunakan jalan atau gang sempit sebagai tempat bermain sepakbola. Permukiman kumuh tumbuh di berbagai sudut kota, khususnya di sempadan sungai, jalur kereta api dan di lahan-lahan kosong. Meningkatnya jumlah penduduk Kota Bandar Lampung akan menyebabkan kampung-kampung kota semakin sesak, tidak sehat dan rawan kriminalitas.

7. Peningkatan Ekonomi Daerah dan Perluasan Kesempatan Kerja

Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakatnya. Masalah ketenagakerjaan di Kota Bandar Lampung ditandai oleh beberapa ketidakseimbangan yang dasar. Pertama adalah ketidak-seimbangan secara umum antara penyediaan lapangan kerja dan kebutuhan lapangan kerja. Jumlah yang dibutuhkan melebihi jumlah yang dapat disediakan. Kedua adalah kekurangseimbangan antara kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dengan penyediaan tenaga terdidik. Ketiga adalah adanya kecenderungan semakin meningkatnya peranan dan aspirasi angkatan kerja wanita.

Untuk itu, Pemerintah Daerah harus merumuskan solusi terbaik untuk meningkatkan perekonomian daerah yang mampu menciptakan lapangan kerja baru di Kota Bandar Lampung. Mulai dari membuat regulasi dan kebijakan serta menjaga sinergi antara pemerintah daerah dengan pengusaha; pengembangan sektor-sektor ekonomi seperti Jasa, konstruksi, Pariwisata, industri dan UMKM yang diharapkan akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja, penyerapan sumberdaya daerah serta meningkatkan ekspor produk dan jasa yang dihasilkan; hingga pemberian bantuan bagi masyarakat dalam bentuk pelatihan, pembuatan sarana penunjang maupun pemberian bantuan finansial.

Termasuk kesiapan daerah dalam memasuki Era industri 4.0 yang memanfaatkan teknologi otomatisasi tinggi yang ditopang infrastruktur



berbasis internet dan ekonomi digital, akan ada banyak peran yang tergantikan dalam disrupsi besar tersebut. Manusia yang tidak terampil dan peka terhadap perubahan menganggap itu semua sebagai ancaman dan mimpi buruk, karena pekerjaan dengan kemampuan sangat mudah akan diambil alih oleh mesin. Oleh karena itu, kesiapan daerah untuk memasuki era industri 4.0 yang akan mempengaruhi kinerja sektor-sektor strategis daerah menjadi isu yang sangat penting dan perlu untuk direspon.

8. Masalah Kemiskinan dan PMKS

Permasalahan kemiskinan merupakan tantangan utama dan menjadi isu pembangunan Kota Bandar Lampung dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun tingkat kemiskinan Kota Bandar Lampung selama tahun-tahun terakhir ini terus menunjukkan penurunan, namun masih tingginya angka kemiskinan dibanding wilayah lainnya yg sudah baik mengisyaratkan pada kita bahwa Bandar Lampung masih harus menaruh perhatian pada kemiskinan sebagai prioritas dalam kebijakan pembangunan.

Berdasarkan data BPS Tahun 2020, dari 1.166.066 jiwa penduduk Kota Bandar Lampung sekitar 8,81 persen atau sebesar 93.740 jiwa penduduk Kota Bandar Lampung masih berada di bawah garis kemiskinan.

Kemiskinan secara umum dilihat atas dasar pemenuhan kebutuhan atau materi yang dapat diukur berdasarkan tingkat pendapatan atau tingkat konsumsi suatu rumah tangga dengan jumlah minimum kebutuhan hidup. Akan tetapi saat ini kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Masalah kemiskinan seakan tak pernah habis, persoalan munculnya jutaan anak-anak yang tidak bisa mengenyam pendidikan



berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan sosial, menguatnya arus perpindahan dari desa ke kota dengan tujuan memperbaiki kehidupan, dan pemenuhan kebutuhan pangan, sandang dan papan sangat terbatas.

Oleh karena itu, kebijakan anggaran Pemerintah Kota Bandar Lampung yang pro kemiskinan yang dapat memberikan aktifitas-aktifitas secara langsung untuk pengentasan kemiskinan disegala bidang/sektor perlu untuk terus diperhatikan, termasuk memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

9. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Persoalan ketentraman dan ketertiban pada saat ini maupun pada waktu yang akan datang akan tetap menjadi permasalahan krusial bagi Kota Bandar Lampung. Hal ini sejalan dengan dinamika yang berkembang bersamaan dengan transformasi masyarakat menuju masyarakat yang demokratis. Kondisi yang tentram dan tertib menjadi salah satu prasyarat utama bagi kelangsungan pembangunan.

Isu dalam penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yaitu isu terkait kondusivitas dan stabilitas daerah, dengan masalah pokok yaitu merujuk pada isu mengenai derajat keamanan, kondisi daerah yang tertib dan demokratis serta mendukung stabilitas ekonomi dan daya tarik investasi. Dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu masih rendahnya penegakan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, aman serta memiliki kepedulian sosial dan bermartabat.



Kota Bandar Lampung memiliki jumlah penduduk yang cukup besar sehingga masalah Ketertiban dan ketenteraman serta Keindahan (K3) menjadi lebih kompleks. Selain itu keberadaan organisasi sosial, organisasi masyarakat, LSM dan Partai Politik yang ada di lingkungan masyarakat belum menunjukkan kinerja yang optimal, masih banyak organisasi masyarakat yang belum terdaftar. Kondisi ketenteraman, ketertiban umum dipengaruhi oleh kenaikan jumlah demo yang terjadi dan dapat menyebabkan potensi konflik sosial. Kejadian kriminalitas maupun demo tersebut dapat disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor lingkungan pergaulan dan belum baiknya disiplin masyarakat dalam mematuhi hukum/peraturan perundang-undangan serta dengan adanya dampak negatif arus globalisasi yang tidak terbandung, menimbulkan adanya gangguan keamanan dan ketertiban serta pelanggaran dan tindakan kekerasan dalam masyarakat. Maka dari itu diperlukan perhatian lebih untuk menjamin Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kota Bandar Lampung.

10. Reformasi birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Reformasi Birokrasi yang sudah dimulai sejak 2010 dipertegas dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi (GDRB) 2010-2025. *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 ini lalu dibuatkan *Road Map* Reformasi Birokrasi yang terbagi dalam beberapa fase dimana Tahun 2020 Reformasi Birokrasi akan masuk fase ke-3, yaitu sejak 2020-2024.

Tujuan Reformasi Birokrasi sesuai GDRB 2010-2025, yakni untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, menjadi pelayan masyarakat, dan abdi negara. Birokrasi seperti itu diharapkan akan memberikan kontribusi nyata pada capaian kinerja pemerintahan dan pembangunan nasional serta daerah. Tujuan

Reformasi Birokrasi di atas ialah dalam rangka mengejar visi Reformasi Birokrasi 'terwujudnya pemerintahan kelas dunia'.

Selanjutnya Peraturan Presiden No 81 Tahun 2010 secara operasional diturunkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024. Dalam rangka menjalankan program Reformasi Birokrasi pada kedua fase yang sudah berjalan, ditetapkanlah delapan area perubahan, yaitu mentalitas ASN, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, peraturan perundangan, dan pelayanan publik.

Pelaksanaan reformasi birokrasi adalah jalan utama dalam rangka mewujudkan pelayanan pemerintah yang lebih optimal. Reformasi birokrasi secara berkesinambungan menjadi mutlak untuk dilakukan, dimana hal ini dapat terwujud jika Pemerintah memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dengan memfokuskan pada aspek kelembagaan, aparatur serta tata laksana dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif.

Adapun permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi antara lain adalah masih perlunya penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang mengedepankan prinsip efisiensi, efektifitas dan transparansi, pembenahan birokrasi terkait perubahan budaya kerja yang mengutamakan profesionalisme dan akuntabilitas bagi seluruh aparat pemerintah secara terpadu dan berkesinambungan. Lebih lanjut diperlukan pula upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan, penyesuaian struktur organisasi, dan jumlah pegawai untuk mewujudkan organisasi tepat ukuran dan fungsi yang lebih optimal dalam peningkatan kualitas dan akselerasi pelayanan publik, termasuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dipandang sebagai konsekwensi logis dari serangkain



perubahan-perubahan yang sudah dilakukan terkait reformasi birokrasi.

Aspek penting lainnya adalah perlunya kebijakan dan pelayanan pemerintah yang berbasis data yang terintegrasi serta dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Lebih lanjut, guna meminimalisir praktik KKN, konflik kepentingan, serta menghindari *high cost economy* diperlukan peraturan khusus yang mengatur hubungan antar lembaga.

11. Pengembangan dan Penguatan Inovasi Daerah

Pengembangan dan Penguatan Inovasi Daerah melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) sering kali dikaitkan dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi. Beberapa daerah telah berhasil meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonominya dengan signifikan melalui penciptaan dan pengembangan inovasi daerah melalui peningkatan kapasitas iptek. Namun, pengembangan Iptek saja tidak cukup, karena perlu diintegrasikan ke dalam perumusan kebijakan publik yang mencakup kultur, budaya, serta pembangunan manusia dan wilayah. Selain itu perlu disesuaikan pula pelaksanaan penelitian dan inovasi yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat Kota Bandar Lampung.

Pelaksanaan penelitian dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan keunggulan komparatif Kota Bandar Lampung menjadi keunggulan kompetitif dalam pengelolaan sumber daya ekonomi dan lingkungan. Dengan demikian penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan wilayah dan masyarakat menjadi basis penting dalam keberlanjutan pembangunan.

12. Masalah Lingkungan Hidup

Masalah yang terkait dengan kualitas lingkungan hidup dan pada akhirnya kualitas hidup masyarakat kota meliputi aspek fisik seperti



kualitas udara, air dan tanah masih menjadi perhatian yang membutuhkan penanganan kedepan. Polusi udara buruk karena BBM yang masih mengandung timbal dan asap kendaraan yang tidak tersaring baik, polusi suara juga semakin terasa karena bunyi mesin kendaraan umum yang melebihi ambang toleransi. Sementara itu air tanah yang menjadi sumber bagi sebagian penduduk kota kualitasnya terganggu karena tercemar limbah rumah tangga dan industri. Masalah persampahan, masalah sanitasi kota, serta kualitas air yang kurang baik masih menjadi momok bagi Kota Bandar Lampung. Masih banyak warga yang secara sadar membuang sampah dan limbah ke sungai sehingga mengundang adanya bencana seperti banjir dan rusaknya ekosistem sungai akibat tercemar oleh zat-zat kimia yang beracun.

Produksi limbah di Kota Bandar Lampung cenderung meningkat setiap tahunnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa produksi limbah yang masuk ke TPA Bakung pada tahun 2019 mencapai 1.000 ton/hari, sehingga dapat diperkirakan volume limbah pada tahun 2019 adalah sekitar 365.000 ton. Dengan mempertimbangkan angka ini, TPA Bakung memiliki potensi besar untuk menghasilkan gas rumah kaca (GRK). Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan menyatakan bahwa TPA Bakung menghasilkan 788.404 m³ gas metana pada tahun 2018. Dari perhitungan potensi gas metana setiap tahunnya di TPA ternyata cukup besar dan jumlah ini terus meningkat pada setiap tahunnya. Peningkatan paling signifikan diperkirakan terjadi pada tahun 2019 yang mana terdapat peningkatan 567.397 m³ volume gas metana dari tahun sebelumnya.

Pengelolaan limbah di daerah pesisir Kota Bandar Lampung cukup mengkhawatirkan. Garis pesisir telah diperluas ke arah laut karena masyarakat setempat menggunakan limbah rumah tangga sebagai bahan baku tempat pembuangan akhir di sepanjang garis pantai. Praktik 'reklamasi sampah' ini terus terjadi sampai saat ini. Polusi air



laut di Teluk Lampung karena limbah diduga telah membunuh habitat dan ekosistem laut. Hasil tangkapan ikan oleh nelayan juga semakin menurun, dan banyak sampah plastik yang tersangkut pada jaring nelayan. Data Dinas Lingkungan Provinsi Lampung pada tahun 2019 menyebutkan bahwa 80 persen sampah di pesisir pantai Bandar Lampung datang dari darat. Tidak hanya dari masyarakat pesisir, limbah ini dari Koala, Way Lunik, dan Kuripan. Limbah ini menumpuk di Teluk Lampung tidak hanya dari hulu Bandar Lampung tapi juga dari luar kawasan Bandar Lampung.

Kondisi lingkungan perumahan seperti kekumuhan, kepadatan yang tinggi, lokasi yang tidak memadai serta kualitas dan keselamatan bangunannya mengakibatkan menurunnya kualitas permukiman yang disertai dengan meningkatnya pencemaran lingkungan dan menipisnya sumber daya alam. Oleh karena itu, upaya untuk mewujudkan *clean land, clean water dan clean air* di Kota Bandar Lampung perlu terus dilakukan karena kualitas lingkungan yang buruk akan menimbulkan dampak serius bagi kehidupan masyarakat. Selain itu, berkurangnya ruang terbuka hijau, dampak perubahan iklim serta upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan adanya keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan hidup menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin adanya keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia, tanpa mengurangi peluang generasi yang akan datang untuk menikmati kondisi yang sama.

13. Bencana Alam

Kota Bandar Lampung secara topografis dan geografis adalah daerah yang berpotensi mengalami bencana. Saat ini wilayah Kota Bandar Lampung memiliki beberapa kawasan yang diidentifikasi sebagai kawasan rawan bencana, seperti gempa bumi, tanah longsor dan banjir.



Berdasarkan data BNPB, Indeks Resiko Bencana Kota Bandar Lampung Tahun 2020 menunjukkan angka 182 dengan kategori Tinggi.

Dalam menghadapi ancaman bencana perlu dilakukan upaya mitigasi struktural dan non struktural. Salah satu upaya mitigasi non struktural adalah dengan regulasi dan kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dengan pembentukan Kelurahan siaga bencana. Upaya mitigasi struktural adalah dengan pemenuhan sarana prasarana penanggulangan bencana seperti peringatan dini, dan peralatan penanganan bencana. Namun demikian kelurahan siaga bencana yang telah terbentuk belum seluruhnya memenuhi kriteria utama, hal ini mengakibatkan kejadian bencana masih menimbulkan resiko yang tinggi. Selain itu adaptasi terhadap perubahan iklim di masyarakat juga perlu untuk disosialisasikan.



BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Visi dan misi dalam RPJMD adalah adopsi pendekatan politis dalam perencanaan pembangunan yang merupakan visi dan misi dari kepala daerah terpilih. Perumusan visi dan misi kepala daerah terpilih dalam RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran lima tahun keempat dari Visi dan Misi RPJPD Tahun 2005-2025 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007.

RPJPD Tahun 2005-2025 memiliki visi :

"BANDAR LAMPUNG PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA SUMATERA BAGIAN SELATAN 2025 "

Visi RPJPD tersebut menggambarkan kondisi Kota Bandar Lampung sampai tahun 2025 akan berkembang pesat dan akan menjadi pusat perdagangan barang dan jasa Sumatera Bagian Selatan, yang akan mendorong pertumbuhan industri kecil dan menengah yang kuat, mandiri, dan berkesinambungan. Perkembangan pusat perdagangan dan jasa Sumatera Bagian Selatan ditunjang oleh potensi letak geografis Kota Bandar Lampung sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera yang jaraknya sangat dekat dengan Jakarta dengan perhubungan transportasi yang sangat menunjang baik darat, laut maupun udara.

Misi RPJPD Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Dilandasi Keimanan Dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi.
3. Menyelenggarakan Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, dan Bertanggung Jawab.
4. Meningkatkan Supremasi Hukum, Keamanan dan Ketertiban Serta Kesadaran Politik Dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara.
5. Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan yang Berkualitas Sesuai dengan Tata Ruang.
6. Meningkatkan Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Secara Adil dan Berkelanjutan.

Tahap Pembangunan ke-4 RPJPD (2021-2025) diarahkan untuk mewujudkan masyarakat kota yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Prioritas pembangunan atau sasaran pokok dalam Tahap Pembangunan ke-4 RPJPD (2021-2025) adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagian besar anak usia dini telah mendapatkan pendidikan, pelaksanaan Wajib Belajar telah menjangkau seluruh anak usia sekolah, seluruh masyarakat Bandar Lampung telah Bebas Buta Aksara.
- 2) Sebagian Guru Sekolah Dasar berpendidikan Sarjana.
- 3) Pengembangan pembangunan sarana dan prasarana seperti : Ruang Belajar, Laboratorium, Perpustakaan, ditingkat pendidikan menengah telah lengkap dan merata.
- 4) Pengembangan Kurikulum Sekolah Dasar dan Menengah berbasis keunggulan daerah, dan peningkatan pemanfaatan teknologi, metode dan media pembelajaran.

- 5) Peningkatan sikap kewirausahaan melalui pendidikan keterampilan hidup (Life Skill) terutama bagi yang mencari kerja.
- 6) Sebagian SMP, SMA/SMK negeri dan swasta sudah memperoleh Standar Nasional, Pondok Pesantren menjadi lembaga pendidikan yang kompetitif, lulusan SD, SMP dan SMA/SMK sederajat nilainya semakin meningkat dan merata.
- 7) Meningkatnya kualitas kesehatan penduduk dengan penurunan angka kekurangan gizi, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas menjadi lengkap dan berstandar internasional.
- 8) Peningkatan kualitas SDM bidang kesehatan (dokter spesialis, dokter umum, dan paramedis), dan implementasi Perda pengaturan kerangka regulasi dan sistem pembiayaan dalam pelayanan kesehatan masyarakat miskin.
- 9) Tujuh puluh lima persen (75 persen) masyarakat menjadi peserta Keluarga Berencana Mandiri.
- 10) Pengendalian laju pertumbuhan penduduk, yang didukung oleh peningkatan peserta Keluarga Berencana (KB) aktif, penurunan jumlah keluarga miskin dan tingkat pengangguran.
- 11) Pengendalian tingkat urbanisasi, yang didukung oleh sistem administrasi kependudukan yang berbasis teknologi informasi.
- 12) Penurunan angka kemiskinan, pengangguran, dan peningkatan kemitraan antara pengusaha dengan buruh, peningkatan UMR menjadi Rp 2.000.000
- 13) Peningkatan kesetaraan gender di berbagai instansi dan lembaga, membuka kesempatan yang luas bagi perempuan untuk mengembangkan kemampuan diri, serta adanya upaya untuk membatasi ruang-gerak kekerasan terhadap kaum perempuan, yang membutuhkan perlindungan, baik berupa hukum maupun fasilitas.
- 14) Peningkatan pembinaan olah raga secara terpadu dengan melibatkan *stakeholders*, peningkatan sarana dan prasarana olahraga untuk mencapai prestasi nasional, perkembangan bidang keolahragaan

sesuai dengan potensi lokal yang ditunjang oleh peningkatan kesejahteraan olahragawan.

- 15) Pengembangan pemberdayaan seni dan budaya, serta kerajinan Lampung sebagai kekuatan wisata budaya, yang didukung oleh sarana dan prasarana pengembangan kebudayaan Lampung.
- 16) Peningkatan kualitas kepedulian dan kesadaran pemuda terhadap pembangunan dan lingkungannya, pergaulan bebas dan narkoba, dan peningkatan penguasaan IPTEKS dan IMTAQ.
- 17) Kebebasan mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya, pada sekolah-sekolah umum yang membawa misi keagamaan. Peningkatan fungsi sarana ibadah bagi masing-masing umat beragama dan peningkatan kualitas kerukunan umat beragama di berbagai wilayah perkotaan.
- 18) Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu (Way Halim, Antasari dan Yos Sudarso).
- 19) Pengembangan kawasan pesisir Bandar Lampung, untuk menunjang kegiatan perdagangan, wisata bahari, dan industri perikanan.
- 20) Pengembangan kawasan wisata alam Batuputuk dan sekitarnya.
- 21) Pengembangan kualitas pelayanan pelabuhan laut internasional Panjang.
- 22) Pengembangan sistem informasi perdagangan dan jasa.
- 23) Peningkatan volume penanaman modal PMDN dan PMDA di wilayah Kota Bandar Lampung.
- 24) Pengembangan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi.
- 25) Pengembangan kemitraan antara pengusaha dengan buruh yang ditandai dengan peningkatan UMR menjadi Rp 2.000.000,- serta adanya jaminan hak-hak tenaga kerja.
- 26) Pengembangan agribisnis berbasis ikan dan produk pertanian lainnya.
- 27) Pengembangan IPTEK dibidang produksi, telekomunikasi, dan jasa, peningkatan fungsi Balitbangda, peningkatan temuan dan hasil karya masyarakat yang mendapat hak patent dan royalty, dan peningkatan penerapan Standar Mutu (SNI, ISO).

- 28) Pengembangan fungsi Badan Litbang Kota Bandar Lampung.
- 29) Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM), terlaksananya pembangunan Pelabuhan Srengsem dan pengembangan Pelabuhan Panjang, Terlaksananya proses pembangunan Ring Road Kota Bandar Lampung, Pembangunan jalan layang pada titik-titik kemacetan yang tidak mungkin untuk pelebaran jalan.
- 30) Pengembangan sistem drainase terpadu.
- 31) Pengembangan sistem penyediaan air minum, penanganan banjir, mitigasi bencana, penanganan tsunami, pengelolaan sampah secara komprehensif.
- 32) Pengembangan perumahan bagi warga.
- 33) Peningkatan kinerja pelaku politik wakil rakyat yang tangguh, keberpihakan terhadap kepentingan rakyat, budaya politik yang beretika tinggi, komunikasi politik yang lancar diantara pelaku politik maupun pemerintah dalam mengambil keputusan sesuai dengan harapan publik.
- 34) Produk-produk hukum seperti perda-perda telah sesuai dengan kebutuhan dan sinkron dengan Perundang-undangan yang berlaku.
- 35) Pelayanan dan bantuan hukum kepada masyarakat telah dilaksanakan secara sederhana, murah, dan cepat, dan penegakan hukum dan HAM secara tegas, lugas, dan profesional serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
- 36) Peningkatan kualitas SDM Aparatur yang ditandai oleh semakin meningkatnya produktifitas kerja, implementasi hasil Kajian Kebutuhan Aparatur, peningkatan kesejahteraan Aparatur rata-rata 15% per tahun, Kualitas Pelayanan Birokrasi, kebutuhan struktur organisasi pemerintah, perencanaan yang terpadu antar dinas/instansi lembaga serta unit-unit pelayan teknis.
- 37) Pengembangan Sarana dan fasilitas untuk menunjang kinerja aparat kamtibmas.
- 38) Pengembangan kepariwisataan secara terpadu, melalui peningkatan pemandu wisata yang profesional, kerjasama kepariwisataan dengan

pihak lain, pembangunan sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan, dan peningkatan kegiatan promosi kepariwisataan.

- 39) Pengembangan kawasan wisata alam, wisata budaya dan wisata agro di wilayah Batuputuk dan sekitarnya, dan pengembangan kawasan Hutan Kota Way Halim.
- 40) Pengembangan pengelolaan sumber pencemaran lingkungan hidup, seperti penambangan bukit, penimbunan pantai, limbah industri dan rumah tangga, dengan penegakkan regulasi dan pelaksanaan perda penanggulangan terhadap kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan hidup.

Selanjutnya untuk menjalankan RPJPD pada lima tahun keempat, rumusan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 didasarkan pada permasalahan dan isu-isu strategis daerah. Penekanan pada lima tahun keempat ini adalah untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif daerah dan kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung.

Bertitik tolak pada RPJPD dan pencapaian RPJMD (2016-2021) serta RPJMN dan RPJMD Provinsi Lampung, maka dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan tantangan daerah dalam isu-isu strategis, maka dirumuskan visi misi jangka menengah lima tahun Kota Bandar Lampung tahun 2021-2026 sebagai berikut:

5.1. VISI

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi adalah suatu kondisi ideal yang diharapkan terwujud di masa mendatang, maka Visi RPJMD Kota Bandar Lampung mencerminkan kondisi Kota Bandar Lampung yang ingin dicapai dalam masa jabatan Kepala Daerah selama 5 (lima) tahun.

Visi RPJMD Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari kesesuaian terhadap sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan RPJPD tahap ke 4 (empat). Visi pembangunan Kota Bandar Lampung untuk periode RPJMD Tahun 2021-2026 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

**“BANDAR LAMPUNG SEHAT, CERDAS, BERIMAN, BERBUDAYA,
NYAMAN, UNGGUL BERDAYA SAING BERBASIS EKONOMI UNTUK
KEMAKMURAN RAKYAT”**

Pernyataan visi Kota Bandar Lampung tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- BANDAR LAMPUNG** : meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Bandar Lampung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1682 hingga sekarang.
- SEHAT** : Kota Bandar Lampung sebagai kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah.
- CERDAS** : adalah sikap dan kondisi masyarakat kota cerdas/pintar yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat/ lembaga dalam melakukan kegiatannya ataupun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya.

BERIMAN	: adalah sikap dan kondisi masyarakat yang bertaqwa, dan beramal shaleh serta mewujudkan masyarakat yang taat hukum, bermoral, dan berakhlak mulia.
BERBUDAYA	: kondisi kota yang mengutamakan kearifan/budaya lokal dalam berbagai sektor.
NYAMAN	: kondisi Kota Bandar Lampung dengan lingkungan hidup yang baik mendukung kehidupan masyarakat kota yang nyaman dengan dukungan keamanan kota terpadu melibatkan TNI, Polri, Linmas dan Partisipasi Masyarakat.
UNGGUL	: menjadi yang terbaik dan terdepan dengan mempertahankan pencapaian sebelumnya serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung.
BERDAYA SAING	: kondisi Kota yang memiliki kemampuan untuk menciptakan nilai tambah pertumbuhan ekonomi untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung.
EKONOMI UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT	: Ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran.

5.2. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Secara teknokratis, misi dapat dirumuskan menjadi alasan mengapa organisasi ada. Suatu alasan menjelaskan jati diri yang sesungguhnya dari Pemerintah Daerah. Disini, misi juga dapat didefinisikan sebagai komitmen terbaik terhadap stakeholder. Ada banyak stakeholder pembangunan daerah, utamanya adalah masyarakat sebagai objek (tujuan) sekaligus subjek (pelaku) pembangunan. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Oleh karena itu, pernyataan misi sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas dan mudah dipahami tanpa mengurangi maksud yang ingin dijelaskan.

Dengan memperhatikan sasaran pokok pembangunan jangka menengah daerah tahap ke 4 didalam RPJPD, dalam rangka mewujudkan Visi Kepala Daerah yang telah ditetapkan diatas maka misi pembangunan Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan masyarakat.**
- 2. Meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan masyarakat.**
- 3. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.**
- 4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.**
- 5. Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya dan mengembangkan budaya daerah untuk membangun masyarakat yang religius.**

- 6. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.**
- 7. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan.**

Penjelasan masing-masing misi tersebut diatas dijabarkan sebagai berikut:

MISI PERTAMA : Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat. Dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan perluasan akses yang mudah, murah, terjangkau yang didukung oleh sarana prasarana dan fasilitas yang memadai serta mutu pelayanan yang terus membaik.

MISI KEDUA : Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Pendidikan Masyarakat. Dimaksudkan untuk membangun sumber daya masyarakat Kota Bandar Lampung yang Cerdas sehingga pada akhirnya akan menjadi SDM yang produktif, kompetitif dan bermanfaat bagi sesama masyarakat.

MISI KETIGA : Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur dalam Skala Mantap Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial. Dimaksudkan untuk menciptakan kenyamanan bagi seluruh warga kota Bandar Lampung melalui layanan Infrastruktur yang berkualitas dan terintegrasi satu sama lain, serta mampu mendukung aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat dengan memperhatikan tata ruang.

MISI KEEMPAT : Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. Dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan

perlindungan sosial masyarakat, dengan terus mengoptimalkan sektor-sektor strategis daerah yang mampu menciptakan kesempatan kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, termasuk mengembangkan koperasi dan UMKM yang berazaskan ekonomi kerakyatan yang kreatif.

MISI KELIMA : Mengembangkan Masyarakat Agamis, Berbudaya, dan Mengembangkan Budaya Daerah untuk membangun masyarakat yang religius. Dimaksudkan untuk membangun masyarakat religius yang dapat menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban didalam bermasyarakat dan bernegara dengan berazaskan kearifan lokal serta mengembangkan budaya daerah dalam taraf nasional dan internasional.

MISI KEENAM : Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi. Dimaksudkan yaitu melanjutkan tata Kelola pemerintahan untuk mewujudkan pembangunan yang mandiri dengan mengembangkan keswadayaan masyarakat dan kemitraan dengan dunia usaha lain, serta memberikan pelayanan birokrasi Pemerintah Kota Bandar Lampung yang prima, dalam rangka menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung oleh kemampuan aparat yang professional dengan sistem berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.

MISI KETUJUH : Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan. Dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan, dengan menitik beratkan pada pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan daya dukung daya tampung serta pengendalian resiko bencana.

5.3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan RPJMD. Hal ini mengingat bilamana visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif kedalam tujuan dan sasaran, maka program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih akan mengalami kesulitan dalam mengoperasionalkannya kedalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini, tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Dari 7 (tujuh) misi yang telah diuraikan sebelumnya, maka ditetapkan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1	Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	1.1 Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	1.1.1 Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk
2	Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Pendidikan Masyarakat		1.1.2 Meningkatnya Mutu dan Pemerataan Pendidikan bagi Seluruh Masyarakat 1.1.3 Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Anak dan Generasi Muda
3	Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial	3.1 Terwujudnya Infrastruktur Perkotaan yang berkualitas	3.1.1 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur jalan dan jembatan 3.1.2 Meningkatnya pengendalian banjir 3.1.3 Meningkatnya akses masyarakat terhadap permukiman layak 3.1.4 Meningkatnya Kualitas Tata Ruang 3.1.5 Menurunnya masalah kemacetan
4	Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat	4.1 Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui ekonomi kerakyatan	4.1.1 Meningkatnya Sektor unggulan daerah 4.1.2 Meningkatnya Investasi dan memperluas kesempatan kerja 4.1.3 Menurunnya kemiskinan 4.1.4 Meningkatnya penanganan PMKS
5	Mengembangkan Masyarakat Agamis, Berbudaya, dan Mengembangkan Budaya Daerah untuk membangun masyarakat yang religius	5.1 Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat dan bernegara yang Aman, Tentram dan Damai Berlandaskan Nilai-Nilai Budaya	5.1.1 Meningkatnya Kemananan dan Ketertiban umum serta Toleransi Antar Umat Beragama 5.1.2 Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya Daerah
6	Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi	6.1 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel, Transparan dan Inovatif	6.1.1 Meningkatnya Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Bandar Lampung 6.1.2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan 6.1.3 Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah 6.1.4 Terciptanya Inovasi Layanan Publik 6.1.5 Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
7	Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan	7.1 Terwujudnya keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan	7.1.1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup 7.1.2 Meningkatnya Pengendalian Resiko Bencana

Uraian lebih lanjut kaitan visi, misi, tujuan, sasaran jangka menengah Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 serta indikator dan target yang akan dicapai disajikan pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Bandar Lampung

VISI : BANDAR LAMPUNG SEHAT, CERDAS, BERIMAN, BERBUDAYA, NYAMAN, UNGGUL BERDAYA SAING BERBASIS EKONOMI UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2020)	TARGET CAPAIAN						KONDISI AKHIR
							2021 (TAHUN 0)	2022 (TAHUN 1)	2023 (TAHUN 3)	2024 (TAHUN 4)	2025 (TAHUN 5)	2026 (TAHUN 6)	
1	Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	1.1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	77,44							79,00-79,48
			1.1.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan dan terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	71,37	71,72	71,72	71,89	72,06	72,23	72,23	72,23
				Prevalensi Stunting pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun)	%	6,60	6,60	6,50	6,40	6,30	6,20	6,20	6,20
				Laju Pertumbuhan penduduk	%	1,109	1,109	1,109	1,109	1,109	1,109	1,109	1,109
2	Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Pendidikan Masyarakat		1.1.2 Meningkatkan Mutu dan Pemerataan pendidikan bagi Seluruh Masyarakat	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,93	10,95	10,96	10,98	10,99	11,00	11,00	11,00
				Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,64	15,37	16,14	16,95	17,80	18,68	18,68	18,68
			1.1.3 Meningkatkan Pengarusutamaan Gender, Anak dan Generasi Muda	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	Angka	93,86	93,87	93,88	93,90	93,93	93,96	93,96	93,96
				Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Tingkat Capaian	Madya	Madya	Madya	Madya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya
			Pemuda Berprestasi	%	2,92	2,92	9,61	9,72	9,79	9,88	9,88	9,88	
3	Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial	3.1 Terwujudnya Infrastruktur perkotaan yang berkualitas		Indeks Infrastruktur	Angka	92,54 (tinggi)							97,74 (tinggi)
			3.1.1 Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur jalan dan jembatan	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	%	84,81	85,31	85,81	86,31	86,81	87,31	87,31	87,31
			3.1.2 Meningkatkan pengendalian banjir	Persentase Daerah Rawan Banjir	%	60,00	55,00	50,00	45,00	40,00	35,00	35,00	35,00
3.1.3 Meningkatkan akses masyarakat terhadap permukiman layak	RTLH yang tertangani pertahun	%	28,81	32,68	23,63	20,25	20,25	18,97	18,97	18,97			
	Persentase Kawasan Kumuh	%	1,500	1,167	0,890	0,650	0,390	0,170	0,170	0,170			

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2020)	TARGET CAPAIAN						KONDISI AKHIR
							2021 (TAHUN 0)	2022 (TAHUN 1)	2023 (TAHUN 3)	2024 (TAHUN 4)	2025 (TAHUN 5)	2026 (TAHUN 6)	
			3.1.4 Meningkatnya Kualitas Tata Ruang	Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW	%	53,24	54,14	54,65	55,15	55,65	56,20	56,20	56,20
			3.1.5 Menurunnya masalah kemacetan	Persentase Titik Kemacetan yang Tersesalkan	%	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	80,00	80,00
4	Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat	4.1 Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui ekonomi kerakyatan		Pertumbuhan Ekonomi	%	-1,85							5,00 - 6,00
				Inflasi	%	1,93							3,0 ± 1
				Rasio Gini	Angka	0,359							0,313
			4.1.1 Meningkatnya Sektor unggulan daerah	Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	20,97	21,10	21,20	21,29	21,34	21,45	21,45	21,45
				Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB	%	13,30	13,65	14,05	14,15	14,30	14,45	14,45	14,45
				Kontribusi Jasa, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	%	15,42	15,33	15,34	15,36	15,38	15,45	15,45	15,45
				Persentase UMKM yang Meningkatkan Labanya	%	26,30	26,30	31,50	34,20	39,49	44,70	44,70	44,70
				Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat	%	8,28	16,96	18,11	19,12	20,34	21,53	21,53	21,53
			4.1.2 Meningkatnya Investasi dan memperluas kesempatan kerja	Pertumbuhan Nilai Investasi (PMDN)	%	14,99	15,49	15,99	16,49	16,99	17,49	17,49	17,49
				Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA)	%	4,05	4,55	5,05	5,55	6,05	6,55	6,55	6,55
				Tingkat Pengangguran Terbuka (IPT)	%	8,78	8,78	8,51	8,10	7,28	7,12	7,12	7,12
			4.1.3 Menurunnya kemiskinan	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	%	91,19	91,29	91,43	91,57	91,71	91,85	91,85	91,85
				Pendapatan Per Kapita Penduduk	Juta Rp	50,66	51,00 – 53,00	54,00 – 56,00	57,00 -59,00	61,00-63,00	65,00 – 67,00	65,00 -67,00	65,00 -67,00
			4.1.4 Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	%	70,00	74,00	77,00	80,00	84,00	88,00	88,00	88,00

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2020)	TARGET CAPAIAN						KONDISI AKHIR
							2021 (TAHUN 0)	2022 (TAHUN 1)	2023 (TAHUN 3)	2024 (TAHUN 4)	2025 (TAHUN 5)	2026 (TAHUN 6)	
5	Mengembangkan Masyarakat Agamis, Berbudaya, dan Mengembangkan Budaya Daerah untuk membangun masyarakat yang religius	5.1 Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat dan bernegara yang Aman, Tenram dan Damai Berlandaskan Nilai-Nilai Budaya		Angka kriminalitas yang tertangani	Angka	1.302							1.724
				Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	15,00							85,00
			5.1.1	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban umum serta Toleransi Antar Umat Beragama	Angka	1.302	1.411	1.531	1.625	1.679	1.724	1.724	1.724
				Persentase Konflik Sosial, Keagamaan dan RAS yang tertangani	%	78,00	78,00	78,50	79,00	79,50	80,00	80,00	80,00
			5.1.2	Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya Daerah	%	15,00	25,00	40,00	55,00	70,00	85,00	85,00	85,00
6	Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi	6.1 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel, Transparan dan Inovatif		Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	Skor	59,98 (CC)							66,05 (B)
			6.1.1	Meningkatnya Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Bandar Lampung	Skor	59,98 (CC)	60,05 (CC)	61,00 (CC)	61,03 (CC)	65,00(B)	66,05 (B)	66,05 (B)	66,05 (B)
				Hasil Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik	Predikat	A-	A-	A-	A	A	A	A	A
			6.1.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Angka	55,14 ¹⁾	55,70	56,20	56,80	57,40	57,80	57,80	57,80
				Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			6.1.3	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	%	25,45	36,34	29,50	29,85	29,75	29,65	29,50	29,50
			6.1.4	Terciptanya Inovasi Layanan Publik	Predikat	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif
			6.1.5	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Skor/ Predikat	3/ST ¹⁾	3/ST	3/ST	3/ST	3/ST	3/ST	3/ST	3/ST

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2020)	TARGET CAPAIAN						KONDISI AKHIR
							2021 (TAHUN 0)	2022 (TAHUN 1)	2023 (TAHUN 3)	2024 (TAHUN 4)	2025 (TAHUN 5)	2026 (TAHUN 6)	
7	Mempertahankan dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Skala Kota yang Sehat, Sejuk, Bersih dan Nyaman bagi Kehidupan Masyarakat dan Ekosistem Lingkungan Perkotaan	7.1 Terwujudnya keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	59,10							62,89
				Indeks Resiko Bencana	Angka	152,816 (Tinggi)							118,396 (Sedang)
			7.1.1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	59,10	60,64	61,43	61,95	62,48	62,89	62,89	62,89
			7.1.2	Meningkatnya Pengendalian Resiko Bencana	Angka	152,816 (Tinggi)	145,932 (Tinggi)	139,048 (Tinggi)	132,164 (Tinggi)	125,280 (Sedang)	118,396 (Sedang)	118,396 (Sedang)	118,396 (Sedang)

Keterangan :



Target Indikator Tujuan Hanya pada Kondisi Awal dan Akhir Periode

5.4. TELAAH KESELARASAN PEMBANGUNAN

Pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran dalam RPJMD Tahun 2021–2026 tidak terlepas dari dokumen perencanaan lainnya, baik dokumen pada level nasional, provinsi, dan kabupaten/kota di sekitar Kota Bandar Lampung. Oleh sebab itu, pada sub bab ini akan ditelaah keterkaitan dokumen perencanaan tersebut dengan keselarasan pembangunan yang tercantum pada RPJMD Tahun 2020–2024.

1. RPJMD Kota Bandar Lampung dengan RPJMN 2020-2024

RPJMD Tahun 2021-2026 mengacu dan mendukung 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan nasional yang dikenal sebagai **NAWA CITA KEDUA** RPJMN Tahun 2020-2024 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020.

VISI RPJMN 2020-2024	VISI RPJMD TAHUN 2021-2026
Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong	Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul Berdaya Saing Berbasis Ekonomi untuk Kemakmuran Rakyat

MISI NO	MISI RPJMN 2020-2024	PRIORITAS NO	NAWA CITA KEDUA (RPJMN 2020-2024)	MISI NO	MISI RPJMD TAHUN 2021-2026
Misi 1	Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.	Prioritas 3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.	Misi 1	Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.
				Misi 2	Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Pendidikan Masyarakat.
Misi 2	Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing.	Prioritas 1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.	Misi 4	Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat.
Misi 3	Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.	Prioritas 2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.	Misi 3	Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial.

MISI NO	MISI RPJMN 2020-2024	PRIORTAS NO	NAWA CITA KEDUA (RPJMN 2020-2024)	MISI NO	MISI RPJMD TAHUN 2021-2026
Misi 4	Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.	Prioritas 6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Misi 7	Mempertahankan dan Meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan.
Misi 5	Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.	Prioritas 4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.	Misi 5	Mengembangkan Masyarakat Agamis, Berbudaya, dan Mengembangkan Budaya Daerah untuk membangun masyarakat yang religius.
Misi 6	Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya.	Prioritas 7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.	Misi 5	Mengembangkan Masyarakat Agamis, Berbudaya, dan Mengembangkan Budaya Daerah untuk membangun masyarakat yang religius.
Misi 7	Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga.			Misi 6	Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.
Misi 8	Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.	Prioritas 4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.	Misi 6	Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.

MISI NO	MISI RPJMN 2020-2024	PRIORTAS NO	NAWA CITA KEDUA (RPJMN 2020-2024)	MISI NO	MISI RPJMD TAHUN 2021-2026
Misi 9	Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.	Proritas 2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.	Misi 3	Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial.

2. RPJMD Kota Bandar Lampung dengan RPJMD Provinsi Lampung

Sebagai satu kesatuan dokumen perencanaan pembangunan dan wilayah RPJMD Tahun 2021-2026 juga turut memperhatikan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019. Hal ini dilaksanakan melalui penyelarasan misi Walikota dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dengan Misi Gubernur dalam RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024. Berdasarkan hasil analisa, perumusan misi dalam kedua dokumen tersebut telah selaras, sebagai berikut:

VISI RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2019-2024	VISI RPJMD TAHUN 2021-2026
Rakyat Lampung Berjaya	Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul Berdaya Saing Berbasis Ekonomi untuk Kemakmuran Rakyat

MISI NO	MISI GUBERNUR LAMPUNG (RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2019-2024)	MISI NO	MISI WALIKOTA BANDAR LAMPUNG (RPJMD TAHUN 2021-2026)
Misi 1	Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai.	Misi 5	Mengembangkan Masyarakat Agamis, Berbudaya dan Mengembangkan Budaya Daerah
Misi 2	Mewujudkan “good governance” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.	Misi 6	Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.

MISI NO	MISI GUBERNUR LAMPUNG (RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2019-2024)	MISI NO	MISI WALIKOTA BANDAR LAMPUNG (RPJMD TAHUN 2021-2026)
Misi 3	Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas.	Misi 1	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
		Misi 2	Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan masyarakat.
Misi 4	Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.	Misi 3	Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial
Misi 5	Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.	Misi 4	Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan Rakyat.
Misi 6	Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.	Misi 7	Mempertahankan dan Meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan.

3. RPJMD dengan RPJPD

Penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan tahap Pembangunan ke-4 (keempat) dari RPJPD yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kota Bandar Lampung Tahun 2005 – 2025.

Sesuai dengan RPJPD Tahun 2005-2025, Tahap Pembangunan ke-4 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat kota yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Korelasi antara Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang dengan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bandar Lampung dapat digambarkan sebagai berikut :

VISI RPJPD TAHUN 2005-2025	VISI RPJMD TAHUN 2021-2026
Bandar Lampung Pusat Perdagangan dan Jasa Sumatera Bagian Selatan 2025	Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul Berdaya Saing Berbasis Ekonomi untuk Kemakmuran Rakyat

MISI NO	MISI RPJPD TAHUN 2005-2025	MISI NO	MISI RPJMD TAHUN 2021-2026
Misi 1	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Dilandasi Keimanan Dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa.	Misi 1	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
		Misi 2	Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan masyarakat.
		Misi 5	Mengembangkan Masyarakat Agamis, Berbudaya dan Mengembangkan Budaya Daerah.
Misi 2	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi.	Misi 4	Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan Rakyat.
Misi 3	Menyelenggarakan Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, dan Bertanggung Jawab.	Misi 6	Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.
Misi 4	Meningkatkan Supremasi Hukum, Keamanan dan Ketertiban Serta Kesadaran Politik Dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara.	Misi 5	Mengembangkan Masyarakat Agamis, Berbudaya dan Mengembangkan Budaya Daerah.
Misi 5	Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan yang Berkualitas Sesuai dengan Tata Ruang.	Misi 3	Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial

MISI NO	MISI RPJPD TAHUN 2005-2025	MISI NO	MISI RPJMD TAHUN 2021-2026
Misi 6	Meningkatkan Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Secara Adil dan Berkelanjutan.	Misi 7	Mempertahankan dan Meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan.

Kesesuaian antara Arah Kebijakan RPJPD Tahun 2005-2025 pada tahapan pembangunan ke-4 dengan Visi dan Misi RPJMD Tahun 2021-2026 dapat digambarkan sebagai berikut:

ARAH KEBIJAKAN RPJPD PADA TAHAPAN PEMBANGUNAN KE-4 TAHUN 2021-2026	NO	VISI DAN MISI RPJMD TAHUN 2021-2026
Mewujudkan masyarakat kota yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.	Visi	Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul Berdaya Saing Berbasis Ekonomi untuk Kemakmuran Rakyat
	Misi 1	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
	Misi 2	Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan masyarakat.
	Misi 3	Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial
	Misi 4	Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan Rakyat.
	Misi 5	Mengembangkan Masyarakat Agamis, Berbudaya dan Mengembangkan Budaya Daerah.
	Misi 6	Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.
	Misi 7	Mempertahankan dan Meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan.

Kesesuaian antara Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2005-2025 pada tahapan pembangunan ke-4 dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 dapat digambarkan sebagai berikut :

SASARAN POKOK RPJPD PADA TAHAPAN PEMBANGUNAN KE-4 TAHUN 2021-2026	TUJUAN RPJMD TAHUN 2021-2026	SASARAN RPJMD TAHUN 2021-2026
Meningkatnya kualitas kesehatan penduduk dengan penurunan angka kekurangan gizi, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas menjadi lengkap dan berstandar internasional.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan terkendalinya laju pertumbuhan penduduk
Peningkatan kualitas SDM bidang kesehatan (dokter spesialis, dokter umum, dan paramedis), dan implementasi Perda pengaturan kerangka regulasi dan sistem pembiayaan dalam pelayanan kesehatan masyarakat miskin.		Meningkatnya Mutu dan Pemerataan pendidikan bagi Seluruh Masyarakat
Tujuh puluh lima persen (75 persen) masyarakat menjadi peserta Keluarga Berencana Mandiri.		Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Anak dan Generasi Muda
Pengendalian laju pertumbuhan penduduk, yang didukung oleh peningkatan peserta Keluarga Berencana (KB) aktif, penurunan jumlah keluarga miskin dan tingkat pengangguran.		
Sebagian besar anak usia dini telah mendapatkan pendidikan, pelaksanaan Wajib Belajar telah menjangkau seluruh anak usia sekolah, seluruh masyarakat Bandar Lampung telah Bebas Buta Aksara.		
Sebagian Guru Sekolah Dasar berpendidikan Sarjana.		
Pengembangan pembangunan sarana dan prasarana seperti : Ruang Belajar, Laboratorium, Perpustakaan, ditingkat pendidikan menengah telah lengkap dan merata.		
Pengembangan Kurikulum Sekolah Dasar dan Menengah berbasis keunggulan daerah, dan peningkatan pemanfaatan teknologi, metode dan media pembelajaran.		

SASARAN POKOK RPJPD PADA TAHAPAN PEMBANGUNAN KE-4 TAHUN 2021-2026	TUJUAN RPJMD TAHUN 2021-2026	SASARAN RPJMD TAHUN 2021-2026
Peningkatan sikap kewirausahaan melalui pendidikan keterampilan hidup (Life Skill) terutama bagi yang mencari kerja.		
Sebagian SMP, SMA/SMK negeri dan swasta sudah memperoleh Standar Nasional, Pondok Pesantren menjadi lembaga pendidikan yang kompetitif, lulusan SD, SMP dan SMA/SMK sederajat nilainya semakin meningkat dan merata.		
Peningkatan kesetaraan gender di berbagai instansi dan lembaga, membuka kesempatan yang luas bagi perempuan untuk mengembangkan kemampuan diri, serta adanya upaya untuk membatasi ruang-gerak kekerasan terhadap kaum perempuan, yang membutuhkan perlindungan, baik berupa hukum maupun fasilitasi.		
Peningkatan pembinaan olah raga secara terpadu dengan melibatkan stakeholders, peningkatan sarana dan prasarana olahraga untuk mencapai prestasi nasional, perkembangan bidang keolahragaan sesuai dengan potensi lokal yang ditunjang oleh peningkatan kesejahteraan olahragawan.		
Peningkatan kualitas kepedulian dan kesadaran pemuda terhadap pembangunan dan lingkungannya, pergaulan bebas dan narkoba, dan peningkatan penguasaan IPTEKS dan IMTAQ.		
Kebebasan mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya, pada sekolah-sekolah umum yang membawa misi keagamaan. Peningkatan fungsi sarana ibadah bagi masing-masing umat beragama dan peningkatan kualitas kerukunan umat beragama di berbagai wilayah perkotaan.		
Pengembangan sistem drainase terpadu.	Terwujudnya Infrastruktur perkotaan yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur jalan dan jembatan
Pengembangan perumahan bagi warga.		Meningkatnya pengendalian banjir

SASARAN POKOK RPJPD PADA TAHAPAN PEMBANGUNAN KE-4 TAHUN 2021-2026	TUJUAN RPJMD TAHUN 2021-2026	SASARAN RPJMD TAHUN 2021-2026
Pengembangan sistem penyediaan air minum, penanganan banjir, mitigasi bencana, penanganan tsunami, pengelolaan sampah secara komprehensif.		Meningkatnya akses masyarakat terhadap permukiman layak
		Meningkatnya Kualitas Tata Ruang
Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM), terlaksananya pembangunan Pelabuhan Srengsem dan pengembangan Pelabuhan Panjang, Terlaksananya proses pembangunan Ring Road Kota Bandar Lampung, Pembangunan jalan layang pada titik-titik kemacetan yang tidak mungkin untuk pelebaran jalan.		Menurunnya masalah kemacetan
Pengembangan kualitas pelayanan pelabuhan laut internasional Panjang.		
Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu (Way Halim, Antasari dan Yos Sudarso).	Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui ekonomi kerakyatan	Meningkatnya Sektor unggulan daerah
Pengembangan kawasan pesisir Bandar Lampung, untuk menunjang kegiatan perdagangan, wisata bahari, dan industri perikanan.		Meningkatnya Investasi dan memperluas kesempatan kerja
Pengembangan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi		Menurunnya kemiskinan
Pengembangan sistem informasi perdagangan dan jasa		Meningkatnya penanganan PMKS
Peningkatan volume penanaman modal PMDN dan PMDA di wilayah Kota Bandar Lampung.		
Pengembangan kemitraan antara pengusaha dengan buruh yang ditandai dengan peningkatan UMR menjadi Rp 2.000.000,- serta adanya jaminan hak-hak tenaga kerja.		
Pengembangan agribisnis berbasis ikan dan produk pertanian lainnya		
Penurunan angka kemiskinan, pengangguran, dan peningkatan kemitraan antara pengusaha dengan buruh, peningkatan UMR menjadi Rp 2.000.000		
Pengembangan kawasan wisata alam Batuputuk dan sekitarnya.		

SASARAN POKOK RPJPD PADA TAHAPAN PEMBANGUNAN KE-4 TAHUN 2021-2026	TUJUAN RPJMD TAHUN 2021-2026	SASARAN RPJMD TAHUN 2021-2026
Pengembangan kepariwisataan secara terpadu, melalui peningkatan pemandu wisata yang profesional, kerjasama kepariwisataan dengan pihak lain, pembangunan sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan, dan peningkatan kegiatan promosi kepariwisataan.		
Pengembangan kawasan wisata alam, wisata budaya dan wisata agro di wilayah Batuputuk dan sekitarnya, dan pengembangan kawasan Hutan Kota Way Halim.		
Pengembangan Sarana dan fasilitas untuk menunjang kinerja aparat kamtibmas.	Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat dan bernegara yang Aman, Tenram dan Damai Berlandaskan Nilai-Nilai Budaya	Meningkatnya Kemananan dan Ketertiban umum serta Toleransi Antar Umat Beragama
Pengembangan pemberdayaan seni dan budaya, serta kerajinan Lampung sebagai kekuatan wisata budaya, yang didukung oleh sarana dan prasarana pengembangan kebudayaan Lampung.		Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya Daerah
Peningkatan kualitas SDM Aparatur yang ditandai oleh semakin meningkatnya produktifitas kerja, implementasi hasil Kajian Kebutuhan Aparatur, peningkatan kesejahteraan Aparatur rata-rata 15% per tahun, Kualitas Pelayanan Birokrasi, kebutuhan struktur organisasi pemerintah, perencanaan yang terpadu antar dinas/instansi lembaga serta unit-unit pelayan teknis.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel, Transparan dan Inovatif	Meningkatnya Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Bandar Lampung
Pengendalian tingkat urbanisasi, yang didukung oleh sistem administrasi kependudukan yang berbasis teknologi informasi.		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
Pengembangan IPTEK dibidang produksi, telekomunikasi, dan jasa, peningkatan fungsi Balitbangda, peningkatan temuan dan hasil karya masyarakat yang mendapat hak patent dan royalty, dan peningkatan penerapan Standar Mutu (SNI, ISO).		Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah
Pengembangan fungsi Badan Litbang Kota Bandar Lampung.		Terciptanya Inovasi Layanan Publik
		Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

SASARAN POKOK RPJPD PADA TAHAPAN PEMBANGUNAN KE-4 TAHUN 2021-2026	TUJUAN RPJMD TAHUN 2021-2026	SASARAN RPJMD TAHUN 2021-2026
Peningkatan kinerja pelaku politik wakil rakyat yang tangguh, keberpihakan terhadap kepentingan rakyat, budaya politik yang beretika tinggi, komunikasi politik yang lancar diantara pelaku politik maupun pemerintah dalam mengambil keputusan sesuai dengan harapan publik.		
Produk-produk hukum seperti perda-perda telah sesuai dengan kebutuhan dan sinkron dengan Perundang-undangan yang berlaku.		
Pelayanan dan bantuan hukum kepada masyarakat telah dilaksanakan secara sederhana, murah, dan cepat, dan penegakan hukum dan HAM secara tegas, lugas, dan profesional serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.		
Pengembangan pengelolaan sumber pencemaran lingkungan hidup, seperti penambangan bukit, penimbunan pantai, limbah industri dan rumah tangga, dengan penegakkan regulasi dan pelaksanaan perda penanggulangan terhadap kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan hidup.	Terwujudnya keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
Pengembangan sistem penyediaan air minum, penanganan banjir, mitigasi bencana, penanganan tsunami, pengelolaan sampah secara komprehensif.		Meningkatnya Pengendalian Resiko Bencana

4. RPJMD Kota Bandar Lampung dengan Perencanaan Lainnya

Berbagai dokumen perencanaan yang berkaitan dengan RPJMD Tahun 2021–2026 juga perlu ditelaah keselarasannya, baik dokumen pada level nasional, Kota Bandar Lampung, dan kabupaten/kota di sekitar Kota Bandar Lampung, yaitu:

(1) *Sustainable Development Goal's (SDGs)*

Tujuan, target dan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) menjadi panduan pemerintah Kota Bandar Lampung dalam merumuskan pembangunan dan menjawab tantangan serta ancaman dalam jangka panjang dan menengah yang diselaraskan dengan visi dan misi daerah. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB/SDGs dibagi ke dalam dua rencana besar, yaitu: (a) Fokus/sasaran khusus SDGs di daerah; dan (b) Mengarusutamakan SDGs ke dalam seluruh kebijakan dan program pemerintah daerah.

Konsistensi dalam pencapaian tujuan dari SDGs adalah untuk menerapkan seluruh prinsip dari tujuan pembangunan berkelanjutan dalam setiap dokumen perencanaan pembangunan di Kota Bandar Lampung. Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 dibuat bertujuan untuk memandu pemerintah daerah dalam merumuskan skenario pencapaian 17 (tujuh belas) TPB, yang menjadi masukan dalam penyusunan RPJMD, yang diharapkan dapat mewujudkan pembangunan daerah yang mensejahterakan, dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan serta keberlangsungan lingkungan.

Berikut tabel yang menggambarkan kesesuaian antara misi RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021 – 2026 dengan Tujuan Global SDGs 2030 :

Tabel 5.2 Kesesuaian Misi antara RPJMD Tahun 2021 – 2026 dengan Tujuan Global SDGs 2030

RPJMD TAHUN 2021-2026		TUJUAN GLOBAL SDGS 2030	
Misi 1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Tujuan 3	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia
Misi 2	Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Pendidikan Masyarakat	Tujuan 4	Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua
		Tujuan 5	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan

RPJMD TAHUN 2021-2026		TUJUAN GLOBAL SDGS 2030	
Misi 3	Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial	Tujuan 6	Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua
		Tujuan 9	Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi
		Tujuan 11	Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan
Misi 4	Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat.	Tujuan 1	Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun
		Tujuan 2	Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan
		Tujuan 7	Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua
		Tujuan 8	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua
		Tujuan 9	Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi
		Tujuan 10	Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara
		Tujuan 12	Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
		Tujuan 14	Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan
Misi 5	Mengembangkan Masyarakat Agamis, Berbudaya dan Mengembangkan Budaya Daerah	Tujuan 16	Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan
		Tujuan 17	Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan

RPJMD TAHUN 2021-2026		TUJUAN GLOBAL SDGS 2030	
Misi 6	Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi	Tujuan 16	Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan
		Tujuan 17	Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan
Misi 7	Mempertahankan dan Meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan.	Tujuan 6	Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua
		Tujuan 11	Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan
		Tujuan 12	Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
		Tujuan 13	Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya
		Tujuan 15	Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan pengurangan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati

Pada tahun 2020 Pemerintah melalui Bappenas mengeluarkan metadata (metadata II) untuk dijadikan pedoman untuk menilai indikator-indikator capaian SDGs di Indonesia berdasarkan 4 pilar dalam SDGs, yakni pilar sosial, pilar ekonomi, pilar lingkungan hidup, serta pilar hukum dan tatakelola, dimana sebelumnya Tahun 2017 Bappenas telah mengeluarkan ringkasan metadata SDGs (metadata I).

Selanjutnya berdasarkan metadata II tersebut Kota Bandar Lampung telah mencoba memetakan Indikator SDGs yang bisa diintegrasikan kedalam Indikator RPJMD. Pemetaan dilakukan dengan memperhatikan kondisi wilayah serta kewenangannya, sehingga tidak semua indikator SDGs dapat terintegrasi didalam RPJMD setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Berikut disajikan Integrasi Indikator SDGs dengan Indikator RPJMD Tahun 2021-2026 :

Tabel 5.3 Integrasi Indikator SDGs/TPB Dengan Indikator Dalam RPJMD Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN SDGs	INDIKATOR SDGs	INDIKATOR DALAM RPJMD	PILAR
1	Tujuan 1 Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun	Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional. (1.2.2.*).	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan;	S O S I A L
		Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar (1.4.1.*)		
		Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan (1.3.1.*)	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	
		Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah (1.a.2*)	Persentase PMKS yang tertangani	
		Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (1.3.1.(b))	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	
		Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan (1.4.2*)	Persentase luas lahan bersertifikat	
			Persentase penerbitan Izin lokasi	
		Proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan risiko bencana yang selaras dengan strategi nasional pengurangan risiko bencana (1.5.4.*)	Cakupan pelayanan bencana daerah	
			Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	

NO	TUJUAN SDGs	INDIKATOR SDGs	INDIKATOR DALAM RPJMD	PILAR
			Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	S O S I A L
			Indeks Risiko Bencana	
2	Tujuan 2 Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan	Indikator anomali harga pangan (2.c.1*)	Laju Inflasi	
		Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan. 2.4.1.(a)	Penguatan cadangan pangan pemerintah	
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/ balita (2.2.1.*)	Prevalensi Stunting pada Anak Balita (Bawah Dua Tahun)	
		Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH). 2.2.2.(a)	Skor Pola Pangan Harapan	
			Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	
		Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan. (2.1.2.*)	Persentase daerah rawan pangan	
3	Tujuan 3 Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup (3.2.1*)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	
		Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup. (3.2.2)		
		Angka Kematian Ibu (AKI). 3.1.1*	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	
		Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk (3.3.2*).	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	
		Cakupan pelayanan kesehatan esensial. (3.8.1*)	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	
		Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan. (3.1.2*)	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
		Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional (3.b.1*)	Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	

NO	TUJUAN SDGs	INDIKATOR SDGs	INDIKATOR DALAM RPJMD	PILAR
		Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan (3.c.1*)	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	S O S I A L
		Unmet Need Pelayanan Kesehatan (3.8.1(a))	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	
		Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern (3.7.1*)	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	
			Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	
			Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	
			Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	
		Total Fertility Rate (TFR). 3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR)	
4	Tujuan 4 Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat (4.1.2*)	Angka rata-rata lama sekolah	
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar	
		Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas. (4.5.1*)	Angka harapan lama sekolah	
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	
			Angka Partisipasi Murni (APM) SD	
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	
		Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan (4.c.1*)	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	
		Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin (4.2.2*)	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini	

NO	TUJUAN SDGs	INDIKATOR SDGs	INDIKATOR DALAM RPJMD	PILAR
5	Tujuan 5 Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan	Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin (5.1.1*)	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	S O S I A L
			IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	
		Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial (5.5.2.*)	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta.	
		Proporsi perempuan umur 20 - 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun (5.3.1.*)	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	
6	Tujuan 6 Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun (6.2.1.*)	Persentase rumah tinggal bersanitasi	L I N G K U N G A N
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	
		Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman (6.1.1.*)	Persentase penduduk berakses air minum	
			Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	
		Kualitas air permukaan sebagai air baku (6.3.2.(a)).	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	
7	Tujuan 7 Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua			E K O N O M I
8	Tujuan 8 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua	Laju pertumbuhan PDB per kapita (8.1.1.*)	Pendapatan per Kapita	
		PDRB per kapita. (8.1.1.(a))		
		Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDRB riil per orang bekerja per tahun (8.2.1.*)	Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB	
			Kontribusi Jasa, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	
			Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB	

NO	TUJUAN SDGs	INDIKATOR SDGs	INDIKATOR DALAM RPJMD	PILAR
		Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET) 8.6.1*	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas.	E K O N O M I
		Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin 8.3.1.*	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	
			Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	
			Rasio daya serap tenaga kerja	
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	
		Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3 (8.8.1.(a))	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (kesehatan dan keselamatan kerja)	
		Upah rata-rata per jam pekerja 8.5.1.*	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	
		Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit (8.10.1.(a))	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	
			Persentase BPR/LKM aktif	
		Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan (8.3.1.(a))	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	
			Persentase UMKM yang Meningkatkan Labanya	
		Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (8.5.2*)	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	
		Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan (8.4.1.(a))	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	
			Inflasi Pangan bergejolak	
		Jumlah wisatawan mancanegara 8.9.1.(a)	Persentase kunjungan wisata	
		Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (8.9.1.(b))		
		Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDRB (8.9.1.*)	Kontribusi PAD sektor pariwisata	



NO	TUJUAN SDGs	INDIKATOR SDGs	INDIKATOR DALAM RPJMD	PILAR
9	Tujuan 9 Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi	Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur (9.2.1.(a))	Pertumbuhan Industri	E K O N O M I
10	Tujuan 10 Mengurangi kesenjangan intra- dan antarnegara	Rasio Gini (10.1.1*)	Rasio Gini	
11	Tujuan 11 Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau (11.1.1.(a))	RTLH yang tertangani pertahun	L I N G K U N G A N
		Proporsi penduduk yang tinggal di daerah dengan RTRW yang sudah dilengkapi KLHS (11.a.1.(a))	Persentase Kawasan Kumuh	
			Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	
			Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTR	
		Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (dengan Purchase Power Parity, PPP) (11.4.1.(a))	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	
			Karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	
			Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dilindungi	
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. (11.1.1.(a))	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	
		Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. (11.5.1*)	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/ kota yang memperoleh rumah layak huni	
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau (11.1.1.a)		
Proporsi penduduk yang tinggal di daerah dengan RTRW yang sudah dilengkapi KLHS. (11.a.1.(1))	KLHS untuk K/R/P tingkat kab/kota			

NO	TUJUAN SDGs	INDIKATOR SDGs	INDIKATOR DALAM RPJMD	PILAR
		Indeks Kualitas Udara 11.6.2.(b)	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	L I N G K U N G A N
		Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya (11.6.1.(a))	Timbulan sampah yang ditangani	
			Persentase cakupan area pelayanan	
			Persentase jumlah sampah yang tertangani	
		Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi public (11.2.1.(a))	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Memenuhi Standar dalam Kondisi Baik	
		Persentase penduduk terlayani transportasi umum. (11.2.1.(b))	Persentase Pelayanan Angkutan Darat	
		Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir (11.7.2.(a))	Angka kriminalitas yang tertangani	
12	Tujuan 12 Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang 12.5.1.(a)	Timbulan sampah yang ditangani	
			Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	
		Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan (12.1.1.*)	Produksi perikanan tangkap	
			Produksi perikanan budidaya	
			Angka konsumsi ikan	
			Produktivitas padi	
			Produktivitas jagung	
			Produksi Jagung	
			Produksi Telur	
13	Tujuan 13 Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya	Potensi Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) 13.2.2.(a).	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	
		Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak langsung bencana per 100.000 orang. 13.1.1.*	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat.	
			Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	

NO	TUJUAN SDGs	INDIKATOR SDGs	INDIKATOR DALAM RPJMD	PILAR
14	Tujuan 14 Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan	Proporsi tangkapan jenis ikan laut yang berada dalam batasan biologis yang aman (14.4.1.*)	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	L I N G K U N G A N
15	Tujuan 15 Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurungan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan (15.3.1*) Kerangka kerja legislasi, administratif dan kebijakan untuk memastikan pembagian manfaat yang adil dan merata. 15.6.1*	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	
			RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	
			RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	
			RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	
			Penjabaran Konsistensi Program RPJMD dalam RKPD	
			Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	
16	Tujuan 16 Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks RB $\geq$ B (16.6.1.(c))	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	H U K U M
		Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik (16.6.2.(a))	Hasil Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik	
		Persentase instansi pemerintah dengan SAKIP $\geq$ B (16.6.1.(b))	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	
		Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) 16.7.1.(b)	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	
		Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi (16.3.1.(a))	Rasio KDRT yang tertangani	
			Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan	

NO	TUJUAN SDGs	INDIKATOR SDGs	INDIKATOR DALAM RPJMD	PILAR
			Cakupan Anak korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan	H U K U M
			Persentase Konflik Sosial, Keagamaan dan RAS yang tertangani	
		Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah (16.9.1.(a))	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	
		Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun (16.9.1.(b))		
		Persentase instansi pemerintah yang mendapat opini WTP (16.6.1.(a))	Opini BPK terhadap laporan keuangan	
		Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui (16.6.1.*)	Persentase Kesesuaian Data Rincian Total BMD dengan Aktiva Tetap di Neraca Pemerintah Daerah	
17	Tujuan 17 Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register). 17.19.2.(b)	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	
		Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)		
	Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020. (17.19.2.(a))	Pemanfaatan data kependudukan		
	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar 17.19.1.(b)	Persentase Informasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang Terpublikasi		
		Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) 17.17.1	Jumlah/nilai investasi PMDN	

(2) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung merupakan perwujudan dan upaya untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kota Bandar Lampung. Kebijakan penataan ruang wilayah kota sebagaimana yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2041 meliputi:

- a. Pengembangan pusat kegiatan pelayanan perkotaan sebagai satu kesatuan sistem secara terpadu, berhirarki, dan saling berhubungan untuk mendukung penetapan Bandar Lampung dan sekitarnya sebagai pusat kegiatan Nasional;
- b. Peningkatan fungsi Kota sebagai pusat perdagangan dan jasa skala regional;
- c. Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan perkotaan; dan
- d. Pengembangan kegiatan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Adapun strategi penataan ruang Kota Bandar Lampung dalam kurun waktu 20 tahun mendatang adalah sebagai berikut :

- a. Strategi pengembangan pusat kegiatan pelayanan perkotaan sebagai satu kesatuan sistem secara terpadu, berhirarki, dan terintegrasi untuk mendukung penetapan Bandar Lampung dan sekitarnya sebagai pusat kegiatan Nasional, melalui:
 1. meningkatkan fungsi pusat kegiatan yang ada di Kota;
 2. mendorong berfungsinya pusat kegiatan baru di Kota;
 3. mengendalikan pusat kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi dan perannya;
 4. mengembangkan aksesibilitas jaringan internal kota yang menghubungkan antar pusat kegiatan dan antar pusat kegiatan dengan masing-masing wilayah pelayanannya, dan jaringan eksternal yang menghubungkan pusat kegiatan dengan pusat kegiatan

- regional, melalui pemeliharaan dan peningkatan jaringan jalan yang ada maupun pembangunan jalan baru; dan
5. melengkapi prasarana dan sarana lingkungan serta fasilitas pelayanan umum di setiap hirarki pusat kegiatan pelayanan.
- b. Strategi peningkatan fungsi Kota sebagai pusat perdagangan dan jasa, melalui:
1. mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa yang berorientasi pasar regional untuk melayani penduduk Kota dan wilayah di sekitarnya; dan
 2. menyediakan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan ekonomi.
- c. strategi pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan perkotaan, melalui:
1. meningkatkan keterpaduan inter dan intra moda transportasi darat dan transportasi laut; dan
 2. meningkatkan sistem jaringan prasarana perkotaan melalui peningkatan kapasitas, perluasan jaringan distribusi dan peningkatan kualitas pelayanan secara terpadu;
- d. strategi pengembangan kegiatan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, melalui:
1. mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara kompak dan vertikal pada permukiman pada kawasan pusat Kota; dan
 2. pengembangan kawasan budidaya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Indikasi program utama pemanfaatan ruang sebagaimana diatur dalam Ranperda RTRW Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2041, meliputi :

- a. perwujudan struktur ruang wilayah kota;
- b. perwujudan pola ruang wilayah kota; dan
- c. perwujudan kawasan-kawasan strategis kota.

Rencana Indikasi Program Perwujudan Struktur Ruang, Pola Ruang, dan Program Perwujudan Kawasan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.4 Rencana Indikasi Program Perwujudan Struktur Ruang, Pola Ruang, dan Program Perwujudan Kawasan Dalam RTRW Kota Bandar Lampung Untuk Tahun 2021-2026

NO	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSNA	TAHUN PELAKSANAAN						Indikasi Program RPJMD Tahun 2021-2026
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
A	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG											
I	Pusat Kegiatan Wilayah Kota											
1	Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi	PPK Tanjung Karang, PPK Rajabasa dan PPK Panjang	3 paket	- APBN - APBD Kota Bandar Lampung.	- Kementerian Agraria dan Tata Ruang - Dinas Perumahan dan Permukiman kota Bandar Lampung							Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
		SPPK Tanjung Karang Timur, SPPK Kedaton, SPPK Sukarame, SPPK Panjang, SPPK Teluk Betung Timur, dan SPPK Kerniling	6 paket									
		Pusat lingkungan meliputi Enggal, Kedamaian, Way Halim, Langkapura, Labuan Ratu, Tanjung Senang, Sukabumi, Bumiwaras, Teluk Betung Utara, Teluk Betung Barat, Tanjung Karang Barat.	11 paket									
	Penataan pusat-pusat kegiatan perkotaan	1. Pusat pelayanan kota meliputi Tanjung Karang, Rajabasa dan Panjang. 2. Sub pusat pelayanan kota meliputi Tanjung Karang Timur, Kedaton, Sukarame, Panjang, Teluk Betung Timur, Kemiling. 3. Pusat lingkungan meliputi Enggal, Kedamaian, Way Halim, Langkapura, Labuan Ratu, Tanjung Senang, Sukabumi, Bumiwaras, Teluk Betung Utara, Teluk Betung Barat, Tanjung Karang Barat.		APBD Kota Bandar Lampung	Dinas Perumahan Permukiman Kota Bandar Lampung							Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
II	Sistem Jaringan Prasarana											
1	Sistem Jaringan Transportasi Darat											
-	Sistem jaringan Jalan											
	Peningkatan jaringan jalan arteri primer	a. Sp. Tj. Karang - Sp. Tiga Teluk Ambon (Jln. Soekarno Hatta); b. Jalan Simpang Tanjungkarang – Tanjungkarang/Jalan Zainal Abidin Pagar Alam dan Jalan Teuku Umar;		APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakvat.							

NO	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSNA	TAHUN PELAKSANAAN						Indikasi Program RPJMD Tahun 2021-2026
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		c. Sp. Tiga Teluk Ambon - Km.10 (Panjang); d. Km.10 (Panjang) - Bts. Kota (Sukamaju); e. Jalan Malahayati; f. Jalan Tengiri; g. Sp. Teluk Betung-Sp. Pelabuhan Panjang; dan h. Sp. Pelabuhan Panjang-Km. 10.										
	Peningkatan jalan kolektor primer satu (JKP-1) nasional	1. Jalan Teluk Ambon; 2. Jalan Imam Bonjol; 3. Jalan Kartini; 4. Jalan Monginsidi; dan 5. Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami;		APBN	Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat.							
	Pembangunan Jalan Tol	a. Rencana Ruas exit toll Lematang - Pelabuhan Panjang; dan b. Rencana Ruas Pelabuhan Panjang - Padang Cermin - Sp. Kota Agung.		- APBN dan/atau sumber lain yang sah	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - BUMN							
	Pembangunan Flyover Pelabuhan Panjang			- APBN - APBD Provinsi Lampung, dan/atau sumber lain yang sah	- Pemerintah, - Pemerintah Provinsi Lampung - BUMN							
	peningkatan jaringan jalan kolektor primer dua (JKP-2)	4. Jalan Laksamana R.E. Martadinata; 5. Jalan Tengiri; dan 6. Jalan Mayor Jenderal Ryacudu.		APBD Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov Lampung.							
	pembangunan jalan strategis provinsi	Jalan lingkaran Barat Bandar Lampung		- APBD Provinsi Lampung - APBD Kota Bandar Lampung	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov Lampung - Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung							Program Penyelenggaraan Jalan

NO	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN						Indikasi Program RPJMD Tahun 2021-2026
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Jalan Lingkar Utara Bandar Lampung		- APBD Provinsi Lampung - APBD Kota Bandar Lampung	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov Lampung - Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung							Program Penyelenggaraan Jalan
	Peningkatan jaringan jalan arteri sekunder	a. Jalan Gatot Subroto; b. Jalan Sultan Hasanudin; c. Jalan Raden Intan; d. Jalan Jenderal Sudirman; e. Jalan Pangeran Diponegoro; f. Jalan Kota Raja; dan g. Jalan Jenderal Ahmad Yani.		APBD Kota Bandar Lampung	Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung							Program Penyelenggaraan Jalan
	Peningkatan jaringan jalan kolektor sekunder	seluruh jalan kolektor sekunder di Kota Bandar Lampung		APBD Kota Bandar Lampung	Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung							Program Penyelenggaraan Jalan
	Peningkatan jaringan jalan lokal sekunder	seluruh jalan kolektor sekunder di Kota Bandar Lampung		APBD Kota Bandar Lampung	Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung							Program Pengembangan Permukiman
-	Pengembangan terminal penumpang											
	peningkatan kualitas terminal tipe A	Terminal Rajabasa di Kecamatan Rajabasa		- APBN - APBD Provinsi, Lampung dan/atau sumber lain yang sah	- Kementerian Perhubungan - Dinas Perhubungan Provinsi Lampung							
	Pengembangan Terminal tipe C	1. Terminal Kemiling di Kecamatan Kemiling; 2. Terminal Panjang di Kecamatan Panjang; 3. Terminal Sukaraja di Kecamatan Bumi Waras;		APBD Kota Bandar Lampung	Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung							Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

NO	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN						Indikasi Program RPJMD Tahun 2021-2026
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		4. Terminal Pasar Bawah di Kecamatan Enggal; 5. Rencana Terminal Lempasing di Kecamatan Teluk Betung Timur; 6. Rencana Terminal Lapangan Tembak di Kecamatan Sukarame; dan 7. Rencana Terminal Sutami di Kecamatan Sukabumi.										
-	Pengembangan jaringan Kereta Api											
	Pengembangan jaringan jalur kereta api nasional berupa jaringan jalur kereta api umum antar kota	1. Rencana jalur kereta api ganda (double track) Tanjung Karang-Kertapati; 2. Rencana Pembangunan Shortcut Tegineneng – Tarahan; dan 3. Reaktivasi jalur kereta api menuju Pelabuhan Panjang.		- APBN dan/atau sumber lain yang sah	- Kementerian Perhubungan - PT. KAI							
	Pengembangan jaringan jalur kereta api Provinsi Lampung berupa jaringan jalur kereta api umum perkotaan	Rencana jalur kereta api Tanjung Karang - Pringsewu.		- APBN - BUMN dan/atau sumber lain yang sah	- Kementerian Perhubungan - PT. KAI							
	Pengembangan stasiun kereta api berupa revitalisasi stasiun eksisting	a. Stasiun Labuhanratu di Kecamatan Labuhan Ratu; b. Stasiun Tanjung Karang di Kecamatan Enggal; c. Stasiun Garuntang/Teluk Betung di Kecamatan Bumi Waras; d. Stasiun Km. 3 di Kecamatan Panjang; e. Stasiun Sukamenanti di Kecamatan Panjang; f. Stasiun Tarahan/Panjang di Kecamatan Panjang; dan g. Stasiun Pidada di Kecamatan Panjang.		- APBN - BUMN dan/atau sumber lain yang sah	- Kementerian Perhubungan, - PT. KAI							
	Pembangunan stasiun baru berupa pembangunan sarana dan prasarana stasiun	Stasiun Sukamenanti		APBN, Swasta dan/atau sumber lain yang sah	- Pemerintah - Masyarakat							

NO	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN						Indikasi Program RPJMD Tahun 2021-2026
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Pengembangan pelabuhan penyeberangan	Pelabuhan penyeberangan Kelas II Teluk Betung di Kecamatan Teluk Betung Timur		- APBN - APBD Provinsi Lampung dan/atau sumber lain yang sah	- Kementerian Perhubungan - Dinas Perhubungan Provinsi Lampung							
2	Sistem Jaringan Transportasi Laut											
	Pengembangan pelabuhan laut utama	pelabuhan utama Panjang di Kecamatan Panjang		- APBN - APBD Provinsi Lampung dan/atau sumber lain yang sah	- Kementerian Perhubungan - Dinas Perhubungan Provinsi Lampung							
	Penentuan proporsi green space dan penyediaan <i>green space</i> untuk setiap bangunan yang dibangun pada pelabuhan utama											
	Pengembangan pelabuhan laut pengumpan regional	Pelabuhan Teluk Betung di Kecamatan Teluk Betung Timur		- APBN - Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dan/atau sumber lain yang sah	- Kementerian Perhubungan - Dinas Perhubungan Provinsi Lampung							
3	Sistem Jaringan energi											
I	Pengembangan jaringan infrastruktur gas bumi Pengembangan infrastruktur minyak dan gas bumi berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBG) di Kecamatan Sukabumi	Kota Bandar Lampung		APBN dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral							

NO	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN						Indikasi Program RPJMD Tahun 2021-2026
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Jaringan minyak dan gas bumi berupa jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen melewati Kecamatan Sukabumi, Kecamatan Bumi Waras dan Kecamatan Panjang											
II	Pengembangan Jaringan ketenagalistrikan											
	pengembangan infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung	PLTD Teluk Betung berada di Kecamatan Teluk Betung Selatan		- APBN - BUMN dan/atau sumber lain yang sah	- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral - PT. PLN							
	pengembangan a) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 275 Kv	jaringan Gumiwang - Lampung-I melewati Kecamatan Sukabumi, Kecamatan Sukarame, Kecamatan Tanjung Senang, Kecamatan Labuhan Ratu, dan Kecamatan Rajabasa		- APBN - BUMN dan/atau sumber lain yang sah	- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral - PT. PLN							
	pengembangan jaringan transmisi listrik berupa saluran udara tegangan tinggi (SUT) 150 Kv	jaringan transmisi GIS Rajabasa/Kedaton-Inc. 2 Pi (Natar-Sukarame), Langkapura - Inc. 2 (New Tarahan - Teluk Betung), Sukarame - Jatiagung, Sukarame - Inc. 2 Pi (Sutami - Natar) Teluk Betung - New Tarahan (Teluk Betung - Garuntang New Tarahan) melewati Kecamatan Kemiling, Kecamatan Teluk Betung Barat dan Kecamatan Teluk Betung Selatan		- APBN - BUMN dan/atau sumber lain yang sah	- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral - PT. PLN							
	Pengembangan saluran transmisi lainnya berupa rencana Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT)	Garuntang - Inc. 2 Pi (New Tarahan-Teluk Betung) melewati Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kecamatan Bumi Waras, dan Kecamatan Panjang		- APBN - BUMN dan/atau sumber lain yang sah	- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral - PT. PLN							

NO	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN						Indikasi Program RPJMD Tahun 2021-2026
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Pengembangan gardu induk	a. GI Teluk Betung di Kecamatan Teluk Betung Selatan; b. GI Langkapura di Kecamatan Kemiling; c. GI Sukarame di Kecamatan Sukarame; d. GI Tarahan di Kecamatan Panjang; e. GI Rajabasa/Kedaton di Kecamatan Rajabasa;		- APBN - BUMN dan/atau sumber lain yang sah	- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral - PT. PLN							
	Pembangunan gardu induk	GI GIS Garuntang di Kecamatan Bumi Waras		- APBN - BUMN dan/atau sumber lain yang sah	- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral - PT. PLN							
4	Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi											
	Penyediaan jaringan serat optik dan kabel telepon fixed line	di seluruh kecamatan		- APBN - BUMN dan/atau sumber lain yang sah	- Kementerian Komunikasi dan Informasi - Swasta							
	Pengembangan jaringan bergerak teresterial	di seluruh kecamatan		- APBN - BUMN dan/atau sumber lain yang sah	- Kementerian Komunikasi dan Informasi - Swasta							
	Pengembangan jaringan bergerak seluler	di seluruh kecamatan		- APBN - BUMN dan/atau sumber lain yang sah	- Kementerian Komunikasi dan Informasi - Swasta							
	Pengembangan jaringan bergerak satelit	di seluruh kecamatan		- APBN - BUMN dan/atau sumber lain yang sah	- Kementerian Komunikasi dan Informasi - Swasta							
5	Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air											
	konservasi SDA, pendayagunaan SDA, dan	WS Seputih-Sekampung		APBN	Kementerian Pekerjaan Umum							

NO	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN						Indikasi Program RPJMD Tahun 2021-2026
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	pengendalian daya rusak air				Perumahan Rakyat							
	Konservasi cekungan air tanah	CAT Metro-Kotabumi		APBN	Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat							
	Pengembangan jaringan irigasi di Daerah Irigasi (DI)	D.I Way Kandis		- APBN - APBD Provinsi Lampung - APBD Kota Bandar Lampung - Swasta dan/atau sumber lain yang sah	- Pemerintah Provinsi Lampung - Pemerintah Kota Bandar Lampung - Masyarakat							Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
	Pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya rusak air	Sungai Way Kemiling, Sungai Way Pemanggilan, Sungai Way Langkapura, Sungai Way Kedaton, Sungai Way Balau, Sungai Way Durian Payung, Sungai Way Simpung, Sungai Way Awi Dan Cabangnya, Sungai Way Penengahan, Sungai Way Kuala, Sungai Way Galih, Sungai Way Kupang, Sungai Way Lunik, Sungai Way Kunyit, Sungai Way Kuripan, Sungai Way Halim, Sungai Way Sukamaju, Sungai Way Galihlunik, Sungai Way Garuntang, Sungai Way Jembab, Sungai Way Kandis, Sungai Way Madu, Sungai Way Papangan, Sungai Way Kateguhan, Sungai Way Simpang Kanan, Sungai Way Simpang Kiri, Sungai Way Betung, dan Sungai Way Kedamaian		- APBD Provinsi Lampung - APBD Kota Bandar Lampung	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov Lampung - Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung							Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
	Pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya rusak air	Mata air way laga di Kecamatan Sukabumi, mata air Kali Balau di Kecamatan Betung Selatan, mata air Tirtosari di Kecamatan Betung Utara, mata air Rasuna Said di Kecamatan Betung Utara, mata air Engaharap di Kecamatan Kemiling, mata air Batu		- APBD Provinsi - APBD Kota	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov Lampung,							Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

NO	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN						Indikasi Program RPJMD Tahun 2021-2026
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Putih di Kecamatan Kemiling, dan mata air Tanjung Aman di Kecamatan Kemiling			- Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung							
	peningkatan kualitas jaringan air baku untuk air bersih	mata Air Egaharap di Kecamatan Kemiling, Mata Air Tanjung Aman di Kecamatan Kemiling, Mata Air Batu Putih di Kecamatan Kemiling, dan Sungai Way Kuripan di Kecamatan Teluk Betung Barat		APBD Kota Bandar Lampung	Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung							Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
	pengendalian pemanfaatan air tanah	di seluruh kecamatan		APBD Kota Bandar Lampung	Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung							Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
6	Infrastruktur Perkotaan											
	Pengembangan sistem pengelolaan air minum (SPAM) regional	SPAM Regional Bandar Lampung		- APBN - APBD Provinsi Lampung - APBD Kota Bandar Lampung dan/atau sumber lain yang sah	- Pemerintah Provinsi Lampung - Pemerintah Kota Bandar Masyarakat							Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
	Pengembangan unit produksi	Kecamatan Rajabasa		- APBD Kota Bandar Lampung - Swasta - BUMD	- Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung - Swasta - PDAM							Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
	Pengembangan jaringan produksi yang berasal dari Sungai Way Sekampung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran yang											

NO	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN						Indikasi Program RPJMD Tahun 2021-2026
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	melewati Kecamatan Rajabasa											
	Pengembangan unit air baku	a) mata Air Egaharap di Kecamatan Kemiling, Mata Air Tanjung Aman di Kecamatan Kemiling, Mata Air Batu Putih di Kecamatan Kemiling, dan Sungai Way Kuripan di Kecamatan Teluk Betung Selatan; dan b) air tanah yang tersebar di Kecamatan Kemiling, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kecamatan Teluk Betung Selatan dan Kecamatan Sukabumi.		- APBD Kota Bandar Lampung - Swasta - BUMD	- Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung - Swasta - PDAM							Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
	Pengembangan unit produksi yang meliputi: SPAM Kota	Kecamatan Teluk Betung Selatan		- APBD Kota Bandar Lampung - Swasta - BUMD	- Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung - Swasta - PDAM							Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
	Pengembangan unit distribusi	Seluruh kecamatan		- APBD Kota Bandar Lampung - Swasta - BUMD	- Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung - Swasta - PDAM							Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
	Perbaikan dan peremajaan sarana prasarana perpipaan untuk mengurangi kebocoran teknis dan non teknis serta pembuatan sistem pengontrolan otomatis yang dapat mendeteksi kebocoran	Way Kuripan		- APBD Kota Bandar Lampung - Swasta - BUMD	- Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung - Swasta - PDAM							Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

NO	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN						Indikasi Program RPJMD Tahun 2021-2026
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Pengembangan instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Kecamatan Enggal, Kecamatan Sukarama, Kecamatan Rajabasa, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kecamatan Bumi Waras dan Kecamatan Teluk Betung Selatan		- APBD Provinsi Lampung - APBD Kota Bandar Lampung dan/atau sumber lain yang sah	- Pemerintah Provinsi Lampung - Pemerintah Kota Bandar Lampung - Masyarakat							Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
	Pengembangan sistem pembuangan air limbah domestik berupa sistem Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kecamatan Teluk Betung Timur		- APBD Provinsi Lampung - APBD Kota Bandar Lampung dan/atau sumber lain yang sah	- Pemerintah Provinsi Lampung - Pemerintah Kota Bandar Lampung - Masyarakat							Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
	pengembangan sistem pembuangan air limbah rumah tangga individual	di seluruh kecamatan		- APBD Provinsi Lampung - APBD Kota Bandar Lampung dan/atau sumber lain yang sah	- Pemerintah Provinsi Lampung - Pemerintah Kota Bandar Lampung - Masyarakat							Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
	pengembangan sistem pengelolaan limbah B3	Kecamatan Panjang, Kecamatan Sukabumi, Kecamatan Bumi Waras, Kecamatan Enggal, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kecamatan Kedamaian, Kecamatan Way Halim, Kecamatan Kedaton, Kecamatan Rajabasa, Kecamatan Teluk Betung Utara dan Kecamatan Labuhan Ratu		APBD Kota Bandar Lampung	Dinas Lingkungan Hidup kota Bandar Lampung							Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	pengembangan tempat pembuangan sementara (TPS)	di seluruh kecamatan		APBD Kota Bandar Lampung	Dinas Lingkungan Hidup kota Bandar Lampung							Program Pengelolaan Persampahan

NO	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN						Indikasi Program RPJMD Tahun 2021-2026
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	pengembangan tempat pembuangan akhir (TPA)	TPA Bakung di Kecamatan Teluk Betung Timur		APBD Kota Bandar Lampung	Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung							Program Pengelolaan Persampahan
	Peningkatan sistem jaringan evakuasi bencana berupa penyediaan jalur evakuasi bencana	Jalur evakuasi bencana meliputi jalur penyelamatan ditetapkan di jalan Sp. Tj. Karang – Sp. Tiga Teluk Ambon, Sp. Tiga Teluk Ambon - Km.10 (Panjang), Jalan Selat Malaka 3, Sp. Teluk Betung - Sp. Pelabuhan Panjang, Jalan Laksamana R.E. Martadinata, Jalan Gatot Soebroto, Km.10 (Panjang) – Bts. Kota (Sukamaju), Jalan Sultan Agung, Jalan Endro Suratmin, Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Pangeran Antasari, Jalan Pagar alam, Jalan Pangeran Tirtayasa, Jalan Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro, Jalan Kapten Abdul Haq, Jalan Pramuka, Jalan Teuku Cik Ditiro, Jalan Cempaka, Jalan Dokter Setia Budi, Jalan Kartini, Jalan Jendral Suprpto, Jalan Jendral Ahmad Yani, Jalan Pangeran Diponegoro, Jalan Monginsidi, Jalan Pangeran Emier Moh. Noer, Jalan Cut Nyak Dien, Jalan Gajah Mada, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Ir. Juanda, Jalan Dokter Susilo, Jalan Cut Mutia, Jalan Dokter Warsito, Jalan Sultan Hasanudin, Jalan WR Supratman, Jalan Ikan Hiu, Jalan Tenggiri, Jalan Sinar Mulya, Jalan Umbul Kunci, Jalan Imam Bonjol, Jalan Tamin, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Putri Balau, Jalan Ki Maja dan seluruh jalan yang mengarah ke lapangan terbuka lainnya		APBD Kota Bandar Lampung	- Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung - BPBD Kota Bandar Lampung							Program Penanggulangan Bencana

NO	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN						Indikasi Program RPJMD Tahun 2021-2026
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Penyediaan ruang evakuasi bencana	di seluruh kecamatan		APBD Kota Bandar Lampung	- Dinas Lingkungan Hidup - Dinas Perumahan dan Permukiman - BPBD Kota Bandar Lampung							Program Penanggulangan Bencana
	Pemasangan rambu-rambu (<i>signage</i>) jalur evakuasi dan papan informasi bencana	di seluruh kecamatan		APBD Kota Bandar Lampung	- Dinas Lingkungan Hidup - Dinas Perumahan dan Permukiman - BPBD Kota Bandar Lampung							Program Penanggulangan Bencana
	Peningkatan kualitas jaringan drainase primer	1. Sungai Way Kuripan, Sungai Way Kupang, Sungai Way Kunit, dan Sungai Way Bakung pada sistem I zona Teluk Betung; 2. Sungai Way Kuala pada sistem II zona Tanjung Karang; 3. Sungai Way Lunik, Sungai Way Pidada, Sungai Way Galih Panjang, dan Sungai Way srengsem pada sistem III zona Panjang; dan 4. Sungai Way Kandis pada sistem IV zona Kandis.		APBN	Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat							
	pengembangan jaringan drainase sekunder	sebagian jalan arteri primer, jalan arteri sekunder, jalan kolektor primer, dan jalan kolektor sekunder yang berada di Kota Bandar Lampung.		- APBD Provinsi Lampung - APBD Kota Bandar Lampung	- Dinas PU dan Penataan Ruang Prov Lampung - Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung							Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

NO	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN						Indikasi Program RPJMD Tahun 2021-2026
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	pengembangan jaringan drainase tersier	sebagian ruas jalan kolektor primer, dan jalan kolektor sekunder yang berada di Kota Bandar Lampung		- APBD Provinsi Lampung - APBD Kota Bandar Lampung	- Dinas PU dan Penataan Ruang Prov Lampung - Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung							Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
	pengembangan sistem jaringan pejalan kaki	a. Jalan-jalan utama yang memiliki aktivitas tinggi, meliputi: 1. kawasan perdagangan dan jasa tersebar di Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kecamatan Kemiling, Kecamatan Rajabasa, Kecamatan Langkapura, Kecamatan Labuhan Ratu, Kecamatan Sukarama, Kecamatan Kedamaian, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kecamatan Way Halim, Kecamatan Bumi Waras, Kecamatan Kedaton dan Kecamatan Enggal; 2. kawasan transportasi tersebar di Kecamatan Enggal, dan Kecamatan Rajabasa; dan 3. kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang tersebar di Kecamatan Langkapura, Kecamatan Rajabasa, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kecamatan Kedaton, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kecamatan Labuhan Ratu, Kecamatan Way Halim, Kecamatan Sukarama, dan Kecamatan Enggal. b. kawasan pariwisata beradad di Kecamatan Teluk Betung Timur		APBD Kota Bandar Lampung	Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung							Program Penyelenggaraan Jalan

NO	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSNA	TAHUN PELAKSANAAN						Indikasi Program RPJMD Tahun 2021-2026
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
B	PERWUJUDAN POLA RUANG											
1	Perwujudan Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya											
	Rehabilitasi dan Pemantapan Kawasan Hutan Lindung	Kecamatan Panjang	144 Ha	- APBN - APBD Provinsi Lampung	- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Dinas Kehutanan Provinsi Lampung							
	pengadaan, pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana perlindungan dan pengawasan hutan	Kecamatan Panjang	1 paket	- APBN - APBD Provinsi Lampung	- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Dinas Kehutanan Provinsi Lampung							
	pemeliharaan fungsi hidrologis tanah di kawasan hutan lindung	Kecamatan Panjang	144 Ha	- APBN - APBD Provinsi Lampung	- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Dinas Kehutanan Provinsi Lampung							
2	Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat											
	Penataan dan pemeliharaan kawasan sempadan sungai	di seluruh kecamatan	312 Ha	- APBN - APBD Provinsi Lampung - APBD Kota Bandar Lampung	- Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang provinsi Lampung - Dinas PU dan Perkim kota							- Program Pengembangan Permukiman - Program Kawasan Permukiman

NO	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN						Indikasi Program RPJMD Tahun 2021-2026
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
					Bandar Lampung							
	Penataan dan pemeliharaan kawasan sempadan pantai	a. Kecamatan Teluk Betung Timur; b. Kecamatan Teluk Betung Selatan; dan c. Kecamatan Bumi Waras.		- APBN - APBD Provinsi Lampung - APBD Kota Bandar Lampung	- Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang provinsi Lampung - Dinas PU dan Dinas Perkim kota Bandar Lampung							- Program Pengembangan Permukiman - Program Kawasan Permukiman
	Pengembangan RTH	Kota Bandar Lampung	5 paket	- APBN - APBD Provinsi Lampung - APBD Kota Bandar Lampung	- Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang provinsi Lampung - Dinas Perkim kota Bandar Lampung							Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
3	Perwujudan Kawasan Konservasi											
	pemeliharaan dan pembatasan kegiatan pembangunan fisik di kawasan pelestarian alam	Taman hutan raya Wan Abdul Rahman berada di Kecamatan Teluk Betung Timur, Teluk Betung Barat dan Kecamatan Kemiling	296 Ha	APBD Provinsi Lampung	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung							

NO	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSNA	TAHUN PELAKSANAAN						Indikasi Program RPJMD Tahun 2021-2026
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	pengembangan Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, berupa taman pesisir	Kecamatan Teluk Betung Timur	3 paket	- APBN - APBD Provinsi Lampung	- Kementerian Kelautan dan Perikanan - Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Lampung							
4	Perwujudan Kawasan Geologi											
I	Penataan dan pemeliharaan kawasan sempadan mata air	Kecamatan Kemiling	2.917 Ha	APBD Kota Bandar Lampung	- Dinas Lingkungan Hidup - Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung							- Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) - Program Kawasan Permukiman
II	Pemeliharaan dan Pemantapan Kawasan imbuhan air tanah	a. Kecamatan Teluk Betung Timur; b. Kecamatan Sukabumi; c. Kecamatan Kedamaian; d. Kecamatan Tanjung Karang Barat; e. Kecamatan Panjang; f. Kecamatan Teluk Betung Barat; dan g. Kecamatan Kemiling		APBD Provinsi Lampung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung							
5	Perwujudan Kawasan Cagar Budaya											
	Pemeliharaan dan perlindungan kawasan cagar budaya	a. Situs Keratuan Dibalau di Kecamatan Kedamaian; dan b. Kawasan Permukiman Tradisional di Kecamatan Teluk Betung Barat dan Kecamatan Kedamaian	31 Ha	APBD Kota Bandar Lampung	Dinas pendidikan dan kebudayaan kota Bandar Lampung							Program Pembinaan Sejarah
	Pengembangan pusat studi dan kajian kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan	a. Situs Keratuan Dibalau di Kecamatan Kedamaian; dan b. Kawasan Permukiman Tradisional di Kecamatan Teluk Betung Barat dan Kecamatan Kedamaian	4 paket	APBD Kota Bandar Lampung	Dinas Pendidikan dan kebudayaan kota Bandar Lampung							Program Pembinaan Sejarah
	Pengadaan prasarana dan sarana pengembangan	a. Situs Keratuan Dibalau di Kecamatan Kedamaian; dan b. Kawasan Permukiman Tradisional di Kecamatan Teluk Betung Barat dan Kecamatan Kedamaian	2 paket	APBD Kota Bandar Lampung	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Bandar Lampung							Program Pembinaan Sejarah

NO	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSNA	TAHUN PELAKSANAAN						Indikasi Program RPJMD Tahun 2021-2026
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	kawasan cagar budaya											
6	Perwujudan Kawasan Ekosistem Mangrove											
	Pemeliharaan dan pembatasan pembangunan di Kawasan ekosistem mangrove	Kecamatan Teluk Betung Timur dan Kecamatan Teluk Betung Selatan.	38 Ha	- APBD Provinsi Lampung	- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung							
	Pemantapan dan pelestarian hutan bakau	Kecamatan Teluk Betung Timur dan Kecamatan Teluk Betung Selatan.	38 Ha	- APBD Provinsi Lampung	- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung							
7	Perwujudan Ruang Terbuka Hijau											
	Mempertahankan, mengembangkan, dan merevitalisasi RTH Privat sebesar 10 %	di seluruh kecamatan	1.341,23 Ha	APBD Kota Bandar Lampung	- Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung - Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung							- Program Penyelenggaraan Penataan Ruang - Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
	Mempertahankan, mengembangkan, dan merevitalisasi pengembangan RTH Publik sebesar 4 %	di seluruh kecamatan	4 % dari luas kawasan perkotaan	APBD Kota Bandar Lampung	- Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung - Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung							- Program Penyelenggaraan Penataan Ruang - Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

NO	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN						Indikasi Program RPJMD Tahun 2021-2026
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Penataan taman kota	a. Kecamatan Bumi Waras; b. Kecamatan Enggal; c. Kecamatan Kedamaian; d. Kecamatan Kedaton; e. Kecamatan Kemiling; f. Kecamatan Labuhan Ratu; g. Kecamatan Panjang; h. Kecamatan Rajabasa; i. Kecamatan Sukabumi; j. Kecamatan Sukarame; k. Kecamatan Tanjung Karang Barat; l. Kecamatan Tanjung Karang Pusat; m. Kecamatan Teluk Betung Barat; n. Kecamatan Teluk Betung Selatan; o. Kecamatan Teluk Betung Timur; p. Kecamatan Teluk Betung Utara; dan q. Kecamatan Way Halim.	438 Ha	APBD Kota Bandar Lampung	Dinas Lingkungan Hidup kota Bandar Lampung							Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
	Penataan taman kecamatan	a. Kecamatan Kedaton; b. Kecamatan Kemiling; c. Kecamatan Labuhan Ratu; d. Kecamatan Rajabasa; e. Kecamatan Sukabumi; f. Kecamatan Sukarame; g. Kecamatan Tanjung Karang Timur; h. Kecamatan Tanjung Senang; i. Kecamatan Teluk Betung Barat; j. Kecamatan Teluk Betung Utara; dan k. Kecamatan Way Halim.		APBD Kota Bandar Lampung	Dinas Lingkungan Hidup kota Bandar Lampung							Dinas Lingkungan Hidup kota Bandar Lampung
8	Perwujudan Kawasan Pertanian											
	inventarisasi dan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)	Kecamatan Rajabasa	205 Ha	APBD Kota Bandar Lampung	Dinas Petanian Kota Bandar Lampung							Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
	peningkatan produksi hasil pertanian tanaman pangan	Kecamatan Rajabasa	239 Ha	APBD Kota Bandar Lampung	Dinas Petanian Kota Bandar Lampung							Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

NO	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN						Indikasi Program RPJMD Tahun 2021-2026
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertanian tanaman pangan	Kecamatan Rajabasa	2 paket	APBD Kota Bandar Lampung	Dinas Petanian Kota Bandar Lampung							- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian - Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
9	Perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi											
	Inventarisasi daerah potensial untuk usaha pertambangan	Kecamatan Suka Bumi.	1 paket	- APBN - APBD Provinsi Lampung	- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral - Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung							
	Rehabilitasi dan Penghijauan lahan-lahan pasca tambang	Kecamatan Suka Bumi.	186 Ha	- APBN - APBD Provinsi Lampung	- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral - Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung							
	Pengawasan dan pengendalian kegiatan penambangan yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan	Kecamatan Suka Bumi.	186 Ha	- APBN - APBD Provinsi Lampung	- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral - Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung							
10	Perwujudan Kawasan Perikanan											
	Pengembangan sentra budidaya perikanan laut	Kecamatan Teluk Betung Timur	6 Ha	- APBD Provinsi Lampung - APBD Kota Bandar Lampung	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Kota							Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

NO	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN						Indikasi Program RPJMD Tahun 2021-2026
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan	pelabuhan pendaratan ikan Lempasing di Kecamatan Teluk Betung Barat.	1 paket	- APBN - APBD Provinsi Lampung - APBD Kota Bandar Lampung	- Kementerian Kelautan dan Perikanan - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi - Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung.							Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
	Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produk Perikanan	Kecamatan Teluk Betung Timur	6 Ha	- APBD Provinsi Lampung - APBD Kota Bandar Lampung	- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung							Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
11	Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri											
	Pengembangan Industri Bandar Lampung	a. Kecamatan Sukabumi; b. Kecamatan Bumi Waras; c. Kecamatan Kedamaian; d. Kecamatan Sukarame; e. Kecamatan Panjang; f. Kecamatan Kedaton; g. Kecamatan Tanjung Karang Barat; dan h. Kecamatan Teluk Betung Timur.	1.374 Ha	- APBN - APBD Provinsi Lampung - APBD Kota Bandar Lampung	- Kementerian Perindustrian - Dinas Perindustrian Provinsi Lampung - Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung							Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
	Peningkatan dan pengembangan infrastruktur pendukung kawasan industri	Kecamatan Suka Bumi, Kecamatan Bumi Waras, Kecamatan Kedamaian, Kecamatan Sukarame, Kecamatan Panjang, Kecamatan Kedaton dan Kecamatan Tanjung Karang Barat.	7 paket	APBD Provinsi, APBD Kota	Dinas Perindustrian Provinsi, Kota.							Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
12	Perwujudan Kawasan Pariwisata											
	Penyusunan profil kawasan pariwisata	a. Kecamatan Teluk Betung Timur; b. Kecamatan Tanjung Karang Barat; c. Kecamatan Teluk Betung Barat; dan d. Kecamatan Kemiling.	1 paket	APBD Kota Bandar Lampung	Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung							Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

NO	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN						Indikasi Program RPJMD Tahun 2021-2026
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Penataan dan pemantapan kawasan wisata	a. Kecamatan Teluk Betung Timur; b. Kecamatan Tanjung Karang Barat; c. Kecamatan Teluk Betung Barat; dan d. Kecamatan Kemiling.	172 Ha	APBD Kota Bandar Lampung	Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung							Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
	Pengembangan prasarana dan sarana pendukung pariwisata	a. Kecamatan Teluk Betung Timur; b. Kecamatan Tanjung Karang Barat; c. Kecamatan Teluk Betung Barat; dan d. Kecamatan Kemiling.	6 paket	APBD Kota Bandar Lampung	Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung							Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
13	Perwujudan Kawasan Permukiman											
	Penataan Kawasan Perumahan	di seluruh kecamatan	12.134 Ha	APBD Kota	Dinas PU, Dinas Perkim Kota Bandar Lampung							- Program Pengembangan Perumahan - Program Kawasan Permukiman
	Pengendalian kawasan perumahan di kawasan lindung	di seluruh kecamatan		APBD Kota Bandar Lampung	Dinas PU, Dinas Perkim Kota Bandar Lampung							- Program Pengembangan Perumahan - Program Kawasan Permukiman
	Penataan kawasan perdagangan dan jasa	di seluruh kecamatan		APBD Kota Bandar Lampung	Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung							Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
	pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skala regional	Tanjung Karang Pusat		APBD Kota Bandar Lampung	Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung							Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
	penataan kawasan perkantoran	di seluruh kecamatan		APBD Kota Bandar Lampung	Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung							Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
	fasilitas umum dan fasilitas sosial	di seluruh kecamatan		APBD Kota Bandar Lampung	- Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung - Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung							- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

NO	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN						Indikasi Program RPJMD Tahun 2021-2026
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Pengembangan kawasan transportasi	Kecamatan Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kecamatan Enggal, Kecamatan Way Halim, Kecamatan Rajabasa dan Kecamatan Panjang		- APBD Provinsi Lampung - APBD Kota Bandar Lampung	- Dinas Perhubungan Provinsi Lampung - Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung							Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
	Pengembangan kawasan evakuasi	di seluruh kecamatan		APBD Kota Bandar Lampung	BPBD Kota Bandar Lampung							Program Penanggulangan Bencana
	Pemasangan rambu-rambu (signage) jalur evakuasi dan papan informasi bencana sebagai: - Informasi petunjuk, dan larangan kepada masyarakat tentang risiko bencana di dalam kawasan rawan bencana; - Peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap risiko bencana di dalam kawasan rawan bencana.	di seluruh kecamatan		APBD Kota Bandar Lampung	BPBD Kota Bandar Lampung							Program Penanggulangan Bencana

NO	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN						Indikasi Program RPJMD Tahun 2021-2026
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Kawasan infrastruktur perkotaan	Kelurahan Bakung Kecamatan Teluk Betung Barat dan Kelurahan Keteguhan Kecamatan Teluk Betung Timur		APBD Kota Bandar Lampung	- Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung - Dinas Perkim Kota Bandar Lampung - Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung							- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase - Program Penyelenggaraan Jalan - Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya; - Program Penyelenggaraan Penataan Ruang - Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; - Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
	Pengembangan kawasan ruang terbuka non hijau	di seluruh kecamatan		APBD Kota Bandar Lampung	- Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung - Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung							- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase; - Program Penyelenggaraan Jalan - Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya; - Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
	Pengembangan sarana dan prasarana kawasan permukiman	di seluruh kecamatan	11 paket	APBD Kota Bandar Lampung	Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung							Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
14	Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan											
	Peningkatan dan pengembangan infrastruktur pendukung kawasan pertahanan dan keamanan	Kecamatan Enggal, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kecamatan Kedaton, Kecamatan Langkapura, Kecamatan Way Halim, Kecamatan Kedamaian, Kecamatan Sukarame, dan Kecamatan Kemiling	8 paket	APBN	Kementerian Pertahanan dan Keamanan							

NO	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSNA	TAHUN PELAKSANAAN						Indikasi Program RPJMD Tahun 2021-2026
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
C.	PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS KOTA											
1	Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi	Kawasan Perkotaan Bandar Lampung	1 paket	APBD Provinsi Lampung	Pemerintah Provinsi Lampung							
2	Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis dari Sudut kepentingan Pertumbuhan Ekonomi	Kawasan Perkotaan Bandar Lampung dan Sekitarnya	1 paket	APBD Provinsi Lampung	Pemerintah Provinsi Lampung							
3	Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten											
-	Penyusunan Rencana Rinci Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi	1. Kawasan perdagangan dan jasa skala regional di Tanjung Karang Pusat;	1 paket	APBD Kota Bandar Lampung	Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung							Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
		2. Kawasan perdagangan dan jasa skala kota di Teluk Betung Selatan;	1 paket	APBD Kota Bandar Lampung	Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung							Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
		3. kawasan minapolitan di Lempasing dan Pulau Pasaran	1 paket	APBD Kota Bandar Lampung	Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung							Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
-	Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis dari Sudut kepentingan sosial dan budaya	1. Kawasan kota lama Masjid Anwar dan sekitarnya berada di Kecamatan Teluk Betung Selatan	1 paket	APBD Kota Bandar Lampung	Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung							Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
		2. Kawasan situs kelurahan Negeri Olok Gading berada di Kecamatan Teluk Betung Barat	1 paket	APBD Kota Bandar Lampung	Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung							Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

NO	INDIKASI PROGRAM	LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN PELAKSANAAN						Indikasi Program RPJMD Tahun 2021-2026
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		3. Kawasan situs keratuan dibalau berada di Kecamatan Kedamaian	1 paket	APBD Kota Bandar Lampung	Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung							Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
		4. Kawasan publik terpadu Way Halim berada di Kecamatan Way Halim	1 paket	APBD Kota Bandar Lampung	Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung							Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
-	Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis dari Sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan	1. Kawasan Batu Putu berada di Kecamatan Kemiling, Kecamatan Teluk Betung Barat dan Kecamatan Tanjung Karang Barat	1 paket	APBD Kota Bandar Lampung	Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung							Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
		2. Kawasan Hutan Monyet berada di Kecamatan Teluk Betung Utara	1 paket	APBD Kota	Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung							Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Keterangan :



Tahun Pelaksanaan



Bukan Kewenangan Daerah

Keselarasan antara Rumusan kebijakan umum dan program pembangunan dalam RPJMD dengan materi Ranperda RTRW Tahun 2021-2041 disajikan sebagai berikut :

Tabel 5.5 Keselarasan antara RTRW dan RPJMD

NO	TELAAH MATERI RTRW	KESELARASAN DENGAN RPJMD		PENYEBAB KETIDAK-SELARASAN/ KETERANGAN	TINDAK LANJUT TERHADAP DOKUMEN RPJMD
		YA	TIDAK		
	Rumusan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota berpedoman pada RTRW kabupaten/kota yang meliputi:				
1.	Indikasi program pemanfaatan Pola Ruang, pada:				
	a. Kawasan Peruntukan Lindung:				
	1. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	√			
	2. Kawasan perlindungan setempat	√			
	3. Kawasan konservasi	√			
	4. Kawasan lindung geologi	√			
	5. Kawasan cagar budaya	√			
	6. Kawasan ekosistem mangrove	√			
	7. Ruang terbuka hijau (RTH) kota				
	b. Kawasan Peruntukan Budi Daya:				
	1. Kawasan Pertanian	√			
	2. Kawasan Pertambangan dan Energi	√			
	3. Kawasan Perikanan	√			
	4. Kawasan Peruntukan Industri	√			
	5. Kawasan Pariwisata	√			
	6. Kawasan permukiman	√			
	7. Kawasan Pertahanan dan Keamanan	√			
2.	Indikasi program pemanfaatan Struktur Ruang, pada :				
	1. Sistem perkotaan	√			
	2. Sistem jaringan transportasi	√			
	3. Sistem jaringan energi	√			
	4. Sistem jaringan telekomunikasi	√			
	5. Sistem jaringan sumber daya air	√			
	6. Infrastruktur perkotaan				

(3) RPJMD wilayah sekitar Kota Bandar Lampung, yakni:

Keselarasan Misi RPJMD Kota Bandar Lampung dengan :

- RPJMD Kota Metro Tahun 2021-2026
- RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026
- RPJMD Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026

Mengingat Kota Metro, Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran merupakan daerah yang juga melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) serentak pada Tahun 2020 dan saat ini juga sedang Menyusun RPJMD, maka bentuk keselarasan RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Kabupaten/Kota sekitar tersebut dapat disajikan dengan uraian sebagai berikut:

RPJMD KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021-2026		RPJMD KOTA METRO TAHUN 2021-2026		RPJMD KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2021-2026		RPJMD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2021-2026	
Misi 1	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.	Misi 2	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, anak dan ibu melalui jaringan masyarakat peduli anak dan ibu dengan mempermudah pelayanan dan pemanfaatan sistem informasi terkini.	Misi 3	Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, unggul, berkarakter dan berdaya saing.	Misi 2	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan serta kesejahteraan sosial.
Misi 2	Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan masyarakat.	Misi 3	Meningkatkan derajat pendidikan seluas-luasnya mencakup masyarakat secara keseluruhan yang terintegrasi dengan sistem informasi dan teknologi.	Misi 3	Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, unggul, berkarakter dan berdaya saing.	Misi 2	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan serta kesejahteraan sosial.
Misi 3	Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.	Misi 4	Membangun kesejahteraan yang setara disetiap lini masyarakat dengan meningkatkan sektor pasar, pariwisata yang terarah serta berwawasan kelestarian lingkungan dengan memperhatikan kaidah-kaidah kota berkelanjutan.	Misi 2	Menyediakan sarana dan infrastruktur secara berkelanjutan dan berkualitas yang berkeadilan dan merata.	Misi 3	Membangun infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pusat-pusat perekonomian yang berkelanjutan
Misi 4	Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.	Misi 4	Membangun kesejahteraan yang setara disetiap lini masyarakat dengan meningkatkan sektor pasar, pariwisata yang terarah serta berwawasan kelestarian lingkungan dengan memperhatikan	Misi 4	Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat perekonomian daerah.	Misi 4	Mengembangkan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan potensi unggulan daerah.

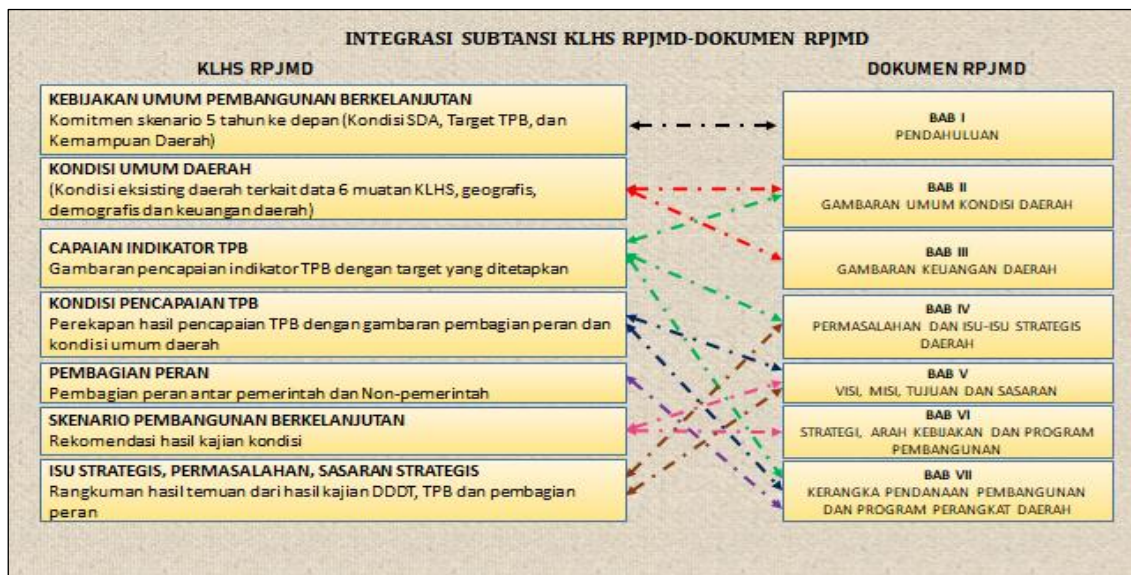
RPJMD KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021-2026		RPJMD KOTA METRO TAHUN 2021-2026		RPJMD KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2021-2026		RPJMD KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2021-2026	
			kaidah-kaidah kota berkelanjutan				
		Misi 6	Meningkatkan daya ungkit ekonomi masyarakat yang berdaya saing maju, mandiri dan berkelanjutan.				
Misi 5	Mengembangkan Masyarakat Agamis, Berbudaya dan Mengembangkan Budaya Daerah untuk membangun masyarakat yang religius.	Misi 5	Membangun lingkungan yang berlandaskan nilai-nilai budaya yang terkonsep dan berkelanjutan.	Misi 3	Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, unggul, berkarakter dan berdaya saing.	Misi 1	Meningkatkan penerapan nilai-nilai agama, budaya dan keluarga dalam kehidupan bermasyarakat.
Misi 6	Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.	Misi 1	Terciptanya pemerintahan bersih yang responsive terhadap permasalahan maupun kebutuhan masyarakat secara fleksibel, efisien dan berkelanjutan.	Misi 1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan layanan publik yang berkualitas, akuntabel, dan berkinerja tinggi.	Misi 5	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, transparan, efektif dan akuntabel.
Misi 7	Mempertahankan dan Meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan.	Misi 5	Membangun lingkungan yang berlandaskan nilai-nilai budaya yang terkonsep dan berkelanjutan.	Misi 5	Mewujudkan desa mandiri sebagai titik berat pembangunan berbasis kemasyarakatan dan potensi lokal yang berlandaskan pemberdayaan masyarakat, kemitraan, gotong royong dan Bhineka Tunggal Ika.	Misi 3	Membangun infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pusat-pusat perekonomian yang berkelanjutan.

(4) Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menjadi dokumen yang terintegrasi ke dalam RPJMD. KLHS yang bertujuan untuk memastikan bahwa aspek pembangunan berkelanjutan telah terintegrasi dalam Kebijakan, Rencana, dan Program dalam RPJMD, menggunakan pendekatan capaian TPB daerah yang dibandingkan dengan target TPB nasional. Dengan pendekatan tersebut maka diharapkan pencapaian TPB yang belum mencapai target dapat dilakukan percepatan melalui upaya kebijakan dalam RPJMD.

Integrasi substansi KLHS kedalam RPJMD dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 5.1 Integrasi Subtansi KLHS-RPJMD



Kesesuaian RPJMD dan KLHS dapat diukur melalui bagaimana substansi KLHS dapat diintegrasikan kedalam RPJMD. Integrasi muatan KLHS terhadap RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 secara rinci disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5.6 Integrasi KLHS dalam RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026

NO	OUTLINE RPJMD	INTEGRASI		KONSEP INTEGRASI KLHS DALAM RPJMD	KET
		YA	TIDAK		
BAB I	Pendahuluan				
1.1	Latar Belakang	√		1) Memasukkan skenario pembangunan daerah yang berbasis berkelanjutan berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih, serta hasil KLHS yang menggunakan analisis pembangunan berkelanjutan.	
		√		2) Memasukkan kebijakan umum pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari fokus pembangunan daerah.	
1.2	Dasar Hukum Penyusunan	√		Memasukan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	
1.3	Hubungan antar dokumen	√		Menggambarkan hubungan antara RPJMD dengan KLHS	
1.4	Maksud dan Tujuan		√		
1.5	Sistematika Penulisan		√		
BAB II	Gambaran Umum Kondisi Daerah				
2.1	Aspek Geografi dan Demografi	√		1) Memasukkan data kelemahan, kekuatan, potensi, dan peluang dari kondisi geografis dan demografis; kondisi ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan; aspek-aspek layanan umum kepada masyarakat; dan aspek-aspek yang mendukung peningkatan daya saing daerah yang dimiliki saat ini dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. 2) Memastikan penggunaan data tentang kondisi geografis dan demografis eksisting; data tentang kondisi kesejahteraan masyarakat eksisting; data eksisting tentang kondisi pelayanan umum terhadap masyarakat; data eksisting tentang kondisi eksisting daya saing daerah, usaha pemanfaatan dan pemeliharaannya dalam mencapai target pembangunan di akhir tahun dokumen perencanaan.	
	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	√			
	Aspek Pelayanan Umum	√			
	Aspek Daya Saing Daerah	√			

NO	OUTLINE RPJMD	INTEGRASI		KONSEP INTEGRASI KLHS DALAM RPJMD	KET
		YA	TIDAK		
				3) Memasukkan hasil capaian indikator TPB di Kota Bandar Lampung	
BAB III	Gambaran Keuangan Daerah				
3.1	Kinerja Keuangan Masa Lalu		√		
3.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu		√		
3.3	Kerangka Pendanaan		√		
BAB IV	Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah				
4.1	Permasalahan Pembangunan	√		Menyajikan permasalahan atas capaian pembangunan berkelanjutan di bidang kemiskinan; ketahanan pangan; kesehatan dan kesejahteraan masyarakat; pendidikan; kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; ketersediaan air bersih dan pengelolaan sanitasi; pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja; kesenjangan intra dan antar daerah; permukiman; pola produksi dan konsumsi; perubahan iklim; sumber daya kelautan; ekosistem daratan, hutan, degradasi lahan, dan keanekaragaman hayati; kedamaian masyarakat, kesamaan akses pada keadilan, dan pembangunan kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif; penguatan sarana pelaksanaan dan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.	

NO	OUTLINE RPJMD	INTEGRASI		KONSEP INTEGRASI KLHS DALAM RPJMD	KET
		YA	TIDAK		
4.2	Isu Strategis	√		1) Menjelaskan isu-isu krusial dan strategis terkait dengan tantangan dan peluang serta penyelesaian dan pengembangan pembangunan berkelanjutan di bidang kemiskinan; ketahanan pangan; kesehatan dan kesejahteraan masyarakat; pendidikan inklusif; kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; ketersediaan air bersih dan pengelolaan sanitasi; energi; pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja; pembangunan infrastruktur, peningkatan industri dan inovasi; kesenjangan intra dan antar daerah; permukiman; pola produksi dan konsumsi; perubahan iklim; sumber daya kelautan; ekosistem daratan, hutan, degradasi lahan, dan keanekaragaman hayati; kedamaian masyarakat, kesamaan akses pada keadilan, dan pembangunan kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif; penguatan sarana pelaksanaan dan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.	
				2) Memasukkan isu utama hasil kajian pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari isu strategis dalam pembangunan di daerah.	
BAB V	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran				
5.1	Visi	√		Disesuaikan dengan visi kepala daerah. Memastikan asas pembangunan berkelanjutan dapat disesuaikan dengan salah satu visi kepala daerah terpilih, jika dari semua visinya belum ada yang menyebutkan pembangunan berkelanjutan.	
5.2	Misi	√		Disesuaikan dengan visi kepala daerah dan penjabaran misinya oleh tim penyusun RPJMD. Memastikan RPJMD sudah mencakup program sebagai penjabaran misi yang mendukung asas pembangunan berkelanjutan.	
5.3	Tujuan dan Sasaran	√		Memastikan RPJMD sudah mencakup pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai	

NO	OUTLINE RPJMD	INTEGRASI		KONSEP INTEGRASI KLHS DALAM RPJMD	KET
		YA	TIDAK		
				bagian dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah.	
BAB VI	Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah				
5.1	Strategi	√		Menjelaskan strategi yang akan diterapkan dan dikembangkan oleh Pemda dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Penjelasan mengenai strategi disesuaikan dengan kekuatan sumber daya (potensi) yang dimiliki oleh daerah dalam menjawab permasalahan pembangunan yang ada, disesuaikan dengan target pencapaian yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.	
5.2	Arah Kebijakan Pembangunan	√		Menjelaskan serangkaian arah kebijakan (rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan masalah pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi) yang akan dibuat oleh Pemda dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Penjelasan mengenai arah kebijakan setidaknya sudah mereview hasil kebijakan yang lama, melihat dan menganalisis permasalahan yang tersisa, kemudian mendiagnosa kebijakan yang paling akurat dan tepat yang sesuai dengan kekuatan sumber daya (potensi) yang dimiliki oleh daerah dalam menjawab permasalahan pembangunan yang ada, disesuaikan juga dengan arah kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.	
5.3	Program Pembangunan Daerah	√		Merumuskan program pembangunan berkelanjutan di bidang kemiskinan; ketahanan pangan; kesehatan dan kesejahteraan masyarakat; pendidikan inklusif; kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; ketersediaan air bersih dan pengelolaan sanitasi; pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja; pembangunan infrastruktur, peningkatan industri dan inovasi; kesenjangan intra dan antar daerah; permukiman; pola produksi dan konsumsi; perubahan iklim; sumber daya kelautan; ekosistem daratan, degradasi lahan, dan keanekaragaman hayati;	

NO	OUTLINE RPJMD	INTEGRASI		KONSEP INTEGRASI KLHS DALAM RPJMD	KET
		YA	TIDAK		
				kedamaian masyarakat, kesamaan akses pada keadilan, dan pembangunan kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif; penguatan sarana pelaksanaan dan kemitraan untuk pembangunan berkelanjutan. program pembangunan daerah yang disusun, diklasifikasikan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi dari masing-masing misi dengan menyertakan target pencapaian selama satu periode RPJMD. Program yang disusun termasuk dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.	
5.4	Telaah Keselarasan Pembangunan	√		1) Menyajikan telaah keselarasan RPJMD dengan KLHS 2) Menyajikan integrasi Indikator TPB dengan Indikator RPJMD 3) Memasukkan hasil rekomendasi kajian terkait integrasi KLHS terhadap RPJMD	
BAB VII	Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah				
	Program Perangkat Daerah	√		Mengintegrasikan program pembangunan berkelanjutan di bidang kemiskinan; ketahanan pangan; kesehatan dan kesejahteraan masyarakat; pendidikan; kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; ketersediaan air bersih dan pengelolaan sanitasi; pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja; pembangunan infrastruktur, peningkatan industri dan inovasi; kesenjangan intra dan antar daerah; permukiman; pola produksi dan konsumsi; perubahan iklim; sumber daya kelautan; ekosistem daratan, degradasi lahan, dan keanekaragaman hayati; kedamaian masyarakat, kesamaan akses pada keadilan, dan pembangunan kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif; penguatan sarana pelaksanaan dan kemitraan untuk pembangunan berkelanjutan. Program pembangunan daerah yang disusun, diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan daerah dengan rincian target dan pagu indikatif pada tiap tahunnya.	

NO	OUTLINE RPJMD	INTEGRASI		KONSEP INTEGRASI KLHS DALAM RPJMD	KET
		YA	TIDAK		
BAB VIII	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		√		
BAB IX	Penutup		√		

Berdasarkan hasil analisis *cross cutting* yang kemudian dilakukan perankingan dalam dokumen KLHS, Kota Bandar Lampung memiliki 5 (lima) TPB prioritas dari 17 (tujuh belas) TPB, yaitu :

1. Tujuan 11 : Kota dan permukiman yang berkelanjutan
2. Tujuan 3 : Kehidupan sehat dan sejahtera
3. Tujuan 6 : Air bersih dan sanitasi layak
4. Tujuan 8 : Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
5. Tujuan 1 : Tanpa kemiskinan

Dari 5 (lima) TPB prioritas yang telah dihasilkan selanjutnya akan disajikan rekomendasi KLHS yang perlu untuk diintegrasikan kedalam RPJMD Tahun 2021-2026.

Tabel 5.7 Rekomendasi Integrasi KLHS kedalam RPJMD Tahun 2021-2026

TPB	OUTCOME	ARAHAN KEBIJAKAN DALAM KLHS	ARAHAN PROGRAM DALAM KLHS	REKOMENDASI KLHS	INTEGRASI DALAM RPJMD			
					KONDISI DAERAH (2020)	ISU STRATEGIS	MISI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
TPB 11 : Kota dan permukiman yang berkelanjutan	Kota yang Berkelanjutan	- Meningkatkan Kualitas Hunian masyarakat - Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar - Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Persampahan - Interpretasi dokumen perencanaan dalam pembangunan - Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban	- Program Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota - Program Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota - Program Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota - Program Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi	- Melakukan peningkatan Rasio rumah layak huni yang sesuai - Meningkatkan rasio perumahan yang terlayani pengelolaan sampahnya - Penetapan Wilayah Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara - Pengendalian emisi gas buang dengan melakukan sosialisasi penggunaan energi terbarukan - Pengawasan emisi gas buang - Mendorong penggunaan bahan bakar ramah lingkungan - Mendorong penggunaan transportasi masal dengan peningkatan	- RTLH yang tertangani 28,31%. - Kawasan Kumuh 1,500% - Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW 53,24% - Rumah tinggal bersanitasi 60,00% - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana 100,00% - KLHS untuk K/R/P tingkat kab/kota (Dokumen ada) - Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara adalah 83,00 - Timbulan Sampah yang Ditangani 76,84% - Cakupan area pelayanan 98,00% - Jumlah Sampah yang Tertangani 80,00%	- Kawasan kumuh, permukiman liar, dan rumah layak huni - Penataan Ruang - Masalah Lingkungan Hidup - Masalah Transportasi dan Kemacetan - Trantibum dan Linmas.	- Misi 3 - Misi 7 - Misi 5	- Program Kawasan Permukiman - Program Pengembangan Permukiman - Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya - Program Penyelenggaraan Penataan Ruang - Program Penataan Bangunan Gedung - Program Pengelolaan Persampahan - Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)"

TPB	OUTCOME	ARAHAN KEBIJAKAN DALAM KLHS	ARAHAN PROGRAM DALAM KLHS	REKOMENDASI KLHS	INTEGRASI DALAM RPJMD			
					KONDISI DAERAH (2020)	ISU STRATEGIS	MISI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
		-	Bangunan Gedung - Program Pengembangan Perumahan	kualitas dan kapasitas transportasi umum perkotaan - Peningkatan penghijauan guna mereduksi emisi gas buang - Meningkatkan infrastruktur publik - Penyusunan dan pengintegrasian dokumen tata ruang dengan KLHS	- Pelayanan Angkutan Darat 0,0826% - Angka Kriminalitas yang Tertangani sebesar 1.302			
	Kota Yang Berketahanan	- Menyusun Kajian Kebencanaan yang sesuai dengan Rencana Strategis Nasional - Penerapan strategi penanggulangan bencana sesuai dengan Rencana Strategis Nasional - Pemenuhan Kebutuhan masyarakat korban bencana	- Program Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi - Program Kabupaten/Kota - Program Penyusunan Kajian Risiko Bencana - Program Penyusunan Kajian Adaptasi dan Mitigasi Bencana	- Meningkatkan infrastruktur rawan bencana di Kawasan Rawan Bencana - Meningkatkan Mitigasi sosial dan mitigasi wilayah - Melakukan sosialisasi terkait penanganan pertama terhadap adanya bencana alam	- Pelayanan Bencana Daerah 100,00% - Kelurahan Siaga Bencana 2 kelurahan	Bencana Alam		- Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup - Program Penanggulangan Bencana - Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

TPB	OUTCOME	ARAHAN KEBIJAKAN DALAM KLHS	ARAHAN PROGRAM DALAM KLHS	REKOMENDASI KLHS	INTEGRASI DALAM RPJMD			
					KONDISI DAERAH (2020)	ISU STRATEGIS	MISI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
TPB 3 : Kehidupan sehat dan sejahtera	Masyarakat yang Sehat	- Meningkatkan pelayanan keseharan - Meningkatkan Kapasitas sumber daya manusia pada tenaga kesehatan - Meningkatkan kualitas pelayanan Puskesmas - Meningkatkan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman - Memberdayakan Masyarakat Bidang Kesehatan - Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir - Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Balita - Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar - Meningkatkan Pelayanan	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan - Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Program - Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	- Peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan; - Peningkatan jangkauan ketersediaan obat di Kota Bandarlampung; - Sosialisasi hidup sehat; - Pemberian nutrisi dan vitamin (jika diperlukan) - Dukungan anggaran dalam meningkatkan program SJSN; - Pemutakhiran database penerima bantuan; - Dukungan anggaran jaminan kesehatan sosial (JKN/KIS) dari Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Pusat - Sosialisasi Mengenai Bahaya Merokok	- Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup sebesar 2 - Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup ada 10 kasus - Tingkat <i>Prevalensi Tuberculosis</i> per 100.000 Penduduk ada 212 kasus - Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk dengan perbandingan 1 : 8,969 - SDM Kesehatan dengan Kompetensi sesuai Standar 71,00% - Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar 59,00% - Total Fertility Rate (TFR) 2,37% - Pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun 0,30% - Sasaran pasangan usia subur menjadi	- Kesehatan (fokus pada Penanganan Pandemi Covid-19 Beserta Dampak Sosial dan Pemulihan Ekonomi Daerah) - Pembangunan Sumber Daya manusia - Masalah Kemiskinan dan PMKS	- Misi 1 - Misi 4	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan - Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) - Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

TPB	OUTCOME	ARAHAN KEBIJAKAN DALAM KLHS	ARAHAN PROGRAM DALAM KLHS	REKOMENDASI KLHS	INTEGRASI DALAM RPJMD			
					KONDISI DAERAH (2020)	ISU STRATEGIS	MISI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
		Kesehatan Pada Usia Produktif - Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut - Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi - Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus - Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Penderita Gangguan Jiwa Berat - Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Penderita Orang Terduga Tuberkulosis - Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Penderita Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV			peserta KB aktif 72,79% - Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) 11,50% - Angka prevalensi kontrasepsi modern/ modern Contraceptive (mCPR) 57,01% - Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi 72,79% - Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang Ber-KB 87,00%			

TPB	OUTCOME	ARAHAN KEBIJAKAN DALAM KLHS	ARAHAN PROGRAM DALAM KLHS	REKOMENDASI KLHS	INTEGRASI DALAM RPJMD			
					KONDISI DAERAH (2020)	ISU STRATEGIS	MISI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
	Masyarakat yang Sejahtera	- Melakukan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) - Meningkatkan Kualitas Kampung dan Kampung Eks Transmigrasi - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	- Program Pemberdayaan Sosial - Program Rehabilitasi Sosial - Program Perlindungan dan Jaminan Sosial - Program Perencanaan Tenaga Kerja - Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja - Program Penempatan Tenaga Kerja	- Peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan; - Peningkatan jangkauan ketersediaan obat di Kota Bandarlampung; - Sosialisasi hidup sehat; - Pemberian nutrisi dan vitamin (jika diperlukan) - Dukungan anggaran dalam meningkatkan program SJSN; - Pemutakhiran database penerima bantuan; - Dukungan anggaran jaminan kesehatan sosial (JKN/KIS) dari Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Pusat; - Sosialisasi Mengenai Bahaya Merokok	- PMKS yang tertangani 70,00% - PMKS yang memperoleh bantuan sosial 70,00% - Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial 18,00%			- Program Rehabilitasi Sosial - Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

TPB	OUTCOME	ARAHAN KEBIJAKAN DALAM KLHS	ARAHAN PROGRAM DALAM KLHS	REKOMENDASI KLHS	INTEGRASI DALAM RPJMD			
					KONDISI DAERAH (2020)	ISU STRATEGIS	MISI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
TPB 6 : Air bersih dan sanitasi layak	Peningkatan Akses Air Bersih	- Meningkatkan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Perairan - Meningkatkan Akses Air Bersih ke seluruh kawasan - Pengembangan SPAM - Pengendalian tepian sungai guna mengurangi beban pencemaran	- Program Perencanaan Lingkungan Hidup - Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup - Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) - Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) - Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA); - Program Pengelolaan dan Pengembangan	- Penataan Kawasan Tepian Sungai guna mendukung program pengijauan tepian sungai; - Pembangunan ipal domestik terpadu perkotaan; - Pembinaan pelaku usaha untuk tidak membuang limbah ke sungai; - Pengawasan perizinan pembuangan limbah bagi pelaku industri; - Penentuan daya tampung beban pencemaran Kota Bandar Lampung	- Rumah tinggal bersanitasi 60,00% - Penduduk berakses air minum 44,82% - Rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan 61,80% - Pengukuran Indeks Kualitas air 54,00	- Masalah Lingkungan Hidup	- Misi 3 - Misi 7	- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

TPB	OUTCOME	ARAHAN KEBIJAKAN DALAM KLHS	ARAHAN PROGRAM DALAM KLHS	REKOMENDASI KLHS	INTEGRASI DALAM RPJMD			
					KONDISI DAERAH (2020)	ISU STRATEGIS	MISI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
			Sistem Penyediaan Air Minum - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase					
	Akses Sanitasi yang Layak Bagi Masyarakat	- Sosialisasi dan edukasi perilaku hidup bersih sehat bagi masyarakat dengan pelibatan kelompok masyarakat; - Pengembangan sarana prasarana sanitasi dan pengelolaan air limbah domestik/ rumah tangga	- Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; - Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat; - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	- Sosialisasi Sanitasi total berbasis masyarakat - Perbaikan dan penyediaan; infrastruktur sanitasi pada kawasan peri urban; - Pembangunan IPAL Komunal Perkotaan	- Dokumen RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kota yang Terintegrasi (Rencana pada Tahun 2022) - Indeks Kualitas Air 82 - Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 60,00%	Terbatasnya penggunaan sarana dan prasarana dasar belum optimalnya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan		- Program Perencanaan Lingkungan Hidup - Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup - Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

TPB	OUTCOME	ARAHAN KEBIJAKAN DALAM KLHS	ARAHAN PROGRAM DALAM KLHS	REKOMENDASI KLHS	INTEGRASI DALAM RPJMD			
					KONDISI DAERAH (2020)	ISU STRATEGIS	MISI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
TPB 8: Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi	Perokonomian Daerah yang Mandiri	- Meningkatkan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; - Meningkatkan sektor Transportasi dan Pergudangan; - Meningkatkan sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; - Meningkatkan Sektor Informasi dan Komunikasi; - Meningkatkan Sektor Real Estate; - Meningkatkan Sektor Jasa Perusahaan; - Meningkatkan Sektor Pendidikan; - Meningkatkan Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; - Meningkatkan Sektor Jasa Lainnya seperti pariwisata; - Meningkatkan Kapasitas	- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri; - Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota; - Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional; - Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan; - Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan; - Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; - Program Pengembangan Ekspor; - Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri - Program Peningkatan Daya	- Meningkatkan indikator ekonomi daerah sehingga dapat meningkatkan laju pertumbuhan PDB per kapita - Pemberian bantuan dalam bentuk pelatihan, pembuatan sarana penunjang maupun pemberian bantuan finansial - Pengembangan Destinasi Wisata - Pengembangan Pemasaran Wisata - Pengembangan Kemitraan dan Ekonomi Kreatif - Promosi dan Sosialisasi Protokol Kesehatan di Bidang Pariwisata	- Inflasi 1,93% - Rasio Gini 0,359 - Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB 20,97% - Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB 13,30 % - Kontribusi Jasa, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB 15,42% - UMKM yang Meningkat Labanya 26,30% - Pertumbuhan Industri 2,38% - Kenaikan Harga Barang Pokok dan Bahan Penting 25,00% - Kunjungan wisata 100,00% - PAD Sektor Pariwisata 23,37% - Lama kunjungan Wisata 1,50 hari - Rata-rata Belanja Wisatawan	- Penanganan Pandemi Covid-19 Beserta Dampak Sosial dan Pemulihan Ekonomi Daerah - Peningkatan Ekonomi Daerah dan Perluasan Kesempatan Kerja	Misi 4	- Program Pengendalian Izin Usaha Industri - Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan - Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting - Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata - Program Pemasaran Pariwisata - Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

TPB	OUTCOME	ARAHAN KEBIJAKAN DALAM KLHS	ARAHAN PROGRAM DALAM KLHS	REKOMENDASI KLHS	INTEGRASI DALAM RPJMD			
					KONDISI DAERAH (2020)	ISU STRATEGIS	MISI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
		- Kelembagaan Koperasi; - Meningkatnya Usaha Mikro; - Meningkatnya Kualitas Penanaman Modal; - Berkembangnya Ekonomi Kreatif; - Meningkatnya Ketaatan Terhadap Penataan Ruang	- Tarik Destinasi Pariwisata; - Program Pemasaran Pariwisata; - Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual; - Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; - Program Penyelenggaraan Penataan Ruang; - Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal; - Program Promosi Penanaman Modal; - Program Pelayanan Penanaman Modal - Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;	-	- Nusantara Rp1.300.000/kunjungan - Rata-rata Belanja Wisatawan Mancanegara Rp 9.800.000 /kunjungan - UKM Non BPR LKM Aktif 36,39% - BPR/LKM Aktif 100% - Usaha Mikro dan Kecil 63,10%	-		- Program Pemasaran Pariwisata - Program Pengembangan UMKM

TPB	OUTCOME	ARAHAN KEBIJAKAN DALAM KLHS	ARAHAN PROGRAM DALAM KLHS	REKOMENDASI KLHS	INTEGRASI DALAM RPJMD			
					KONDISI DAERAH (2020)	ISU STRATEGIS	MISI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
		-	- Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal; - Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam; - Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi; - Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM); - Program Pengembangan UMKM					
	Penyerapan Tenaga Kerja	- Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja - Menyelenggarakan lapangan usaha baru - Mendorong Ekonomi Kreatif Daerah Pengembangan UMKM	- Program Perencanaan Tenaga Kerja - Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja - Program Penempatan Tenaga Kerja;	- Pelatihan dan pengembangan Potensi Tenaga Kerja - Pengembangan Sumber daya manusia - Peningkatan Soft skill dan hard skill masyarakat - Pengembangan UMKM	- Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga terhadap Total Kesempatan Kerja 25,13% - Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan 2,84% - Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 67,79%			- Program Penempatan Tenaga Kerja - Program Hubungan Industrial - Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

TPB	OUTCOME	ARAHAN KEBIJAKAN DALAM KLHS	ARAHAN PROGRAM DALAM KLHS	REKOMENDASI KLHS	INTEGRASI DALAM RPJMD			
					KONDISI DAERAH (2020)	ISU STRATEGIS	MISI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
			- Program Hubungan Industrial	- Pengembangan sektor ekonomi kreatif; - Pengembangan Ekonomi berbasis lokal	- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 8,78% - Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak/PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan 50,00% - Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas 91,21%			- Program Penempatan Tenaga Kerja
TPB 1: Tanpa Kemiskinan	Menurun nya Tingkat Kemiskinan	- Optimalisasi Program - Perlindungan Sosial - Pemberdayaan Masyarakat Miskin - Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan dan Pembekalan - Pengembangan UMKM - Penyerapan tenaga kerja	- Program Pemberdayaan Sosial - Program Perlindungan dan Jaminan Sosial - Program Penanganan Bencana - Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam; - Program Pengawasan dan	- Mengendalikan ketersediaan, distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya; - Mengadakan Pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat; - Meningkatkan infrastruktur jalan guna memperlancar distribusi barang-	- Tingkat kemiskinan di Kota Bandar Lampung berada pada angka 8% dimana hal ini menandakan Kota Bandar Lampung belum memenuhi target nasional yaitu masyarakat yang berada pada garis kemiskinan sebesar 7% - Penduduk diatas garis kemiskinan 91,19%	- Penanganan Pandemi Covid-19 Beserta Dampak Sosial dan Pemulihan Ekonomi Daerah - Pengembangan Sumber Daya manusia - Kawasan kumuh Permukim Liar dan RTLH - Masalah Penataan Ruang	- Misi 1 - Misi 3 - Misi 4 - Misi 7	- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial - Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat - Program Penanganan Kerawanan Pangan

TPB	OUTCOME	ARAHAN KEBIJAKAN DALAM KLHS	ARAHAN PROGRAM DALAM KLHS	REKOMENDASI KLHS	INTEGRASI DALAM RPJMD			
					KONDISI DAERAH (2020)	ISU STRATEGIS	MISI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
		- Peningkatan kualitas dan kapasitas tenaga kerja	Pemeriksaan Koperasi; - Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian; - Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM); - Program Pengembangan UMKM; - Program Pengembangan Permukiman Program Penataan Bangunan Gedung; - Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya Pengembangan Jasa Konstruksi; - Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Program Perencanaan Tenaga Kerja; - Program Pelatihan Kerja dan	barang usaha pertanian, mikro kecil dan menengah; - Pengembangan UMKM; - Pengembangan sektor ekonomi kreatif; - Pengembangan Ekonomi berbasis lokal.	- Pendapatan Per Kapita Penduduk Rp50,60 (juta) - Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial 18,00% - Persentase PMKS yang tertangani 70,00% - Ketersediaan Pangan Utama 95,00% - Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) Skor 85,50 - Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah 24,08% - Daerah Rawan Pangan 8,70% - Prevalensi Stunting pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun) 6,60% - Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga terhadap	- Peningkatan Ekonomi Daerah dan Perluasan Kesempatan Kerja - Masalah Kemiskinan dan PMKS - Trantibum dan Linmas - Bencana Alam		- Program Penempatan Tenaga Kerja - Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja - Program Penanggula ngan Bencana - Program Pengemba ngan UMKM - Program Kawasan Permukiman - Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya - Program Penyelengga raan Penataan Ruang"

TPB	OUTCOME	ARAHAN KEBIJAKAN DALAM KLHS	ARAHAN PROGRAM DALAM KLHS	REKOMENDASI KLHS	INTEGRASI DALAM RPJMD			
					KONDISI DAERAH (2020)	ISU STRATEGIS	MISI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
			Produktivitas Tenaga Kerja; - Program Penempatan Tenaga Kerja Program Hubungan Industrial; - Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan; - Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat; - Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota; - Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional; - Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan; - Program Peningkatan		Total Kesempatan Kerja 25,13% - Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan 2,84% - Usaha Mikro dan Kecil 63,10% - Pelayanan Bencana Daerah 100,00% - RTLH Yang Tertangani 28,81%			

TPB	OUTCOME	ARAHAN KEBIJAKAN DALAM KLHS	ARAHAN PROGRAM DALAM KLHS	REKOMENDASI KLHS	INTEGRASI DALAM RPJMD			
					KONDISI DAERAH (2020)	ISU STRATEGIS	MISI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
			Sarana Distribusi Perdagangan; - Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; - Program Pengembangan Ekspor; - Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen; - Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri - Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik; - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; - Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					

(5) Keselarasan Target Indikator Makro beserta Program Prioritas antara RPJMD Kota Bandar Lampung dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Lampung

Dalam rangka pencapaian target sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional maka pemerintah menerbitkan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 050/3499/SJ dan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Penyelarasan RPJMD dan RPJMN Tahun 2020-2024 dilaksanakan melalui :

- a. Penyelarasan Target Indikator Makro RPJMD dan RPJMN
- b. Penyelarasan Program Prioritas RPJMD dan RPJMN.

Penyelarasan ini selanjutnya menjadi salah satu pedoman pada saat penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun rencana.

Hasil penyelarasan Target Indikator Makro serta Program Prioritas Nasional disajikan dalam Tabel 5.8 dan Tabel 5.9 berikut ini :

Tabel 5.8 Hasil Penyelarasan Target Indikator Makro RPJMD Tahun 2021-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR PEMBANGUNAN	RPJMN TAHUN 2020-2024					INDIKATOR PEMBANGUNAN	RPJMD PROVINSI					INDIKATOR PEMBANGUNAN	RPJMD KOTA BANDAR LAMPUNG				
		TARGET						TARGET						CAPAIAN 2020	TARGET			
		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,50	5,90	6,20	6,50	7,00	Pertumbuhan PDRB	5,4-5,7	5,5-5,8	5,6-5,9	5,7-6,0	5,8-6,1	Pertumbuhan Ekonomi	-1,85	2,50 - 4,00	4,50 - 5,50	4,70 - 5,70	4,80 - 5,80
2	Tingkat Kemiskinan (%)	11,56	11,27	10,35	9,68	9,20	Menurunnya kemiskinan	11,1	10,62	10,14	9,66	9,18	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan (Tingkat Kemiskinan)	91,19 (8,81)	91,29 (8,71)	91,43 (8,57)	91,57 (8,43)	91,71 (8,29)
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,80	3,60	3,40	3,00	2,70	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,85	3,76	3,66	3,57	3,48	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	8,78	8,78	8,51	8,10	7,28
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)*					75,54	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,23	70,86	71,49	72,11	72,72	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	77,44	77,45-77,64	77,65-77,99	78,00-78,49	78,50-78,99
5	Rasio Gini*					0,360-0,374	Rasio Gini		0,310-0,334	0,308-0,324	0,302-0,319	0,293-0,314	Rasio Gini	0,359	0,332	0,327	0,323	0,318
6	Penurunan Emisi GRK (%)*					27,3	Penurunan Emisi GRK (%)	-	6,74	6,915	7,066	7,29	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00

Tabel 5.9 Hasil Penyelarasan Program Prioritas Tahun 2021-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024

No	RPJMN TAHUN 2020 - 2024								RPJMD PROVINSI						RPJMD KABUPATEN/KOTA							
	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	PN	MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS																				
	PP	Peningkatan kuantitas/ ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Produktivitas air (water productivity) (US\$/m³)	4.00	4.40	4.70	5.10	5.40	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase pembangunan, Rehabilitasi, dan Pengembalian Fungsi Irigasi dan Infrastruktur Sumber Daya Air lainnya yang ditingkatkan dalam Kondisi Baik	100	100	100	100	100	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kota (%)	42,880	34,304	25,728	17,152	8,576
																Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Sumur Bor untuk Peningkatan Produksi Pertanian	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
																	Persentase Pembangunan, Rrehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	PP	Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	Skor pola pangan harapan (2.2.2(c))	90,40	91,60	92,80	94,00	95,20	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Terlaksananya pemberdayaan, pengembangan, pembinaan lumbung pangan, sumber daya pangan dan pemantauan ketersediaan/ akses pangan						Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (skor)	85,50	86,00	86,20	86,50	86,75

No	RPJMN TAHUN 2020 - 2024								RPJMD PROVINSI						RPJMD KABUPATEN/KOTA							
	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Angka kecukupan energi (AKE) (2.1.2(a) (kkal/hari)	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Terlaksananya pemberdayaan, pengembangan, pembinaan lumbung pangan, sumber daya pangan dan pemantauan ketersediaan/ akses pangan						Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersedian Energi per kapita (kkal/kap/ hari)	2.490,00	2.500,00	2.510,00	2.520,00	2.530,00
			Angka kecukupan protein (AKP) (gram/ kapita/hari)	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00								Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersedian Protein per kapita (gr/kap/ hari)	72,10	72,14	72,16	72,18	72,20
			Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (prevelence of under-nourishment/PoU)	6,20	5,80	5,50	5,20	5,00	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan daerah rawan pangan						Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan pangan utama (%)	95,00	98,00	100,00	102,00	105,00
																Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rawan Pangan	8,70	8,00	7,00	6,00	5,00
			Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat (Food Insecutiry Experience Scale/FIES)	5,2	4,8	4,5	4,2	4,0	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan daerah rawan pangan						Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rawan Pangan	8,70	8,00	7,00	6,00	5,00

No	RPJMN TAHUN 2020 - 2024								RPJMD PROVINSI						RPJMD KABUPATEN/KOTA								
	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	PP	Peningkatan pegelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Konservasi kawasan kelautan (14.5.1*) (Juta ha)	23,4	24,2	25,1	26,0	26,9	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Pemanfaatan ruang (%)													
			Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (14.4.1*) (%)	<64	<67	<72	<76	≤80															
	PP	Penguatan kewirausaha an, usaha Mikro, Kecil menengah (UMKM), dan Koperasi	Rasio Kewirausa haan nasional (persen)	3,60	3,70	3,80	3,90	4,00								Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru Berskala Mikro (%)	12,80	15,00	18,40	21,00	23,60	
			Kontribusi UMKM terhadap PDB (persen)	61,00	62,00	63,00	64,00	65,00	Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)	Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru Yang Berskala Kecil (Rasio)		00:50	00:50	00:50	00:50	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru Berskala Mikro (%)	12,80	15,00	18,40	21,00	23,60	
																Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Kontribusi PAD sektor pariwisata (%)	23,37	23,40	23,45	23,50	25,55	
										Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Kecil Yang diberikan Pendampingan Kelembagaan dan Usaha (Persen)		04:19	06:07	08:22	0,479	Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	63,10	64,50	65,50	66,50	67,30
																		Pertumbuhan Produktivitas UMKM (%)	2,70	2,70	3,40	4,70	5,40

No	RPJMN TAHUN 2020 - 2024								RPJMD PROVINSI						RPJMD KABUPATEN/KOTA								
	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			Kontribusi Koperasi terhadap PDB (persen)	5,10	5,20	5,30	5,40	5,50	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi Yang Mengikuti Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota Dalam 1 (satu)		26:55:00	26:55:00	26:55:00	26:55:00	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pertumbuhan Jumlah Anggota Koperasi (%)	-18,50	0,22	0,29	0,36	0,43	
										Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi Yang Dinilai Kesehatannya Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota Dalam 1 (satu) Daerah		57:14:00	64:29:00	71:43:00	78:57:00	Meningkatnya Sektor Unggulan Daerah (Indikator Sasaran RPJMD)	Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat	8,28	16,96	18,11	19,12	20,34
																	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	-8,10	3,34	3,99	4,66	4,87
																	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif (%)	n/a		2,35	2,36	2,37
		Produk/ Usaha Ekonomi Kreatif yang Distandarisasi	Jumlah produk/ usaha ekoomi kreatif yang Distrandari asi (produk/ usaha)	250	330	330	230	200															

No	RPJMN TAHUN 2020 - 2024								RPJMD PROVINSI						RPJMD KABUPATEN/KOTA								
	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		Pengembangan Produk Pangan, Barang Dari Kayu dan Furnitur Untuk Industri Besar dan Sedang	Jumlah IKM yang menjadi pemasok Industri Besar dan Sedang (IKM (Kumulatif))	15	15	15	15	15								Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Cakupan bina kelompok pengrajin (%)	50,00	9,09	13,64	18,18	22,73	
				Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	IKM yang Terinformasi dalam SINAS (IKM)	6,00	7,00	8,00								9,00	10,00						
		Pengembangan Produk Kimia, Sandang, Kerajinan, dan Industri Aneka Untuk Industri Besar dan Sedang	Jumlah IKM yang menjadi pemasok Industri Besar dan Sedang (IKM (Kumulatif))	20	60	90	125	165									Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Cakupan bina kelompok pengrajin (%)	50,00	9,09	13,64	18,18	22,73
				Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	IKM yang Terinformasi dalam SINAS (IKM)	6,00	7,00	8,00									9,00	10,00					
		Pengembangan Produk Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut Untuk Industri Besar dan Sedang	Jumlah IKM yang menjadi pemasok Industri Besar dan Sedang (IKM (Kumulatif))	20	40	60	80	100									Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Cakupan bina kelompok pengrajin (%)	50,00	9,09	13,64	18,18	22,73
				Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	IKM yang Terinformasi dalam SINAS (IKM)	6,00	7,00	8,00									9,00	10,00					
		Pembangunan/ Revitalisasi sentra IKM	Jumlah provinsi yang dibangun/ direvitalisasi sentra IKM nya (provinsi)	34	34	34	34	34									Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Cakupan bina kelompok pengrajin (%)	50,00	9,09	13,64	18,18	22,73

No	RPJMN TAHUN 2020 - 2024								RPJMD PROVINSI						RPJMD KABUPATEN/KOTA							
	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2	PN	MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN																				
	PP	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Pertumbuhan PDB pertanian (Persen)	3,7	3,7	3,9	4,1	4,1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.	Terlaksananya peredaran sarana pertanian		100	100	100	100	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas Padi	kw/ha	57,70	58,50	58,75	58,95
																	Produktivitas Jagung	kw/ha	48,13	48,50	48,87	49,15
									Produksi Daging	Ton/Tahun	4.986,40	5.180,24	5.283,35	5.389,52								
									Produksi Telur	Ton/Tahun	124,41	126,90	129,43	132,03								
								Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Ketersediaan Mutu Benih/Bibit Ternak Dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, Serta Pakan Kewenangan Provinsi		100	100	100		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Sumur Bor untuk Peningkatan Produksi Pertanian	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
								Terlaksananya pengembangan prasarana dan sarana tanaman pangan dan hortikultura berbasis kawasan		100	100	100	100	Persentase Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00		

No	RPJMN TAHUN 2020 - 2024								RPJMD PROVINSI						RPJMD KABUPATEN/KOTA													
	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target										
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
									Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten / Kota Dalam1 (Satu) Daerah Provinsi		100	100	100		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Angka Kejadian Penyakit	8,20	7,50	6,80	6,10	5,40						
									Program Pengendalian Dan Penanggulang an Bencana Pertanian	Terlaksananya pengendalian organisme pengganggu tanaman						Program Pengendalian dan Penanggulang an Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian dan Penanggulan n Bencana Pertanian	100,00		100,00	100,00	100,00						
										Persentase Pengendalian dan Penanggulang an Bencana Pertanian Provinsi																		
									Program Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya pengembangan ketenagaan penyuluhan						Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan Bina Kelompok Petani (%)	60,00		70,00	75,00	80,00						
										Persentase Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian																		
									Kontribusi PDB kemaritiman (Persen)	6,5	6,9	7,2	7,5	7,8	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (ton)		151.869,90	159.463,40	167.441,57	184.185,72	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman	0,030	0,030	0,031	0,032	0,032

No	RPJMN TAHUN 2020 - 2024								RPJMD PROVINSI						RPJMD KABUPATEN/KOTA										
	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
																	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	33,00	33,00	34,00	36,00	38,00			
																	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	58,48	58,48	58,48	58,47	58,47			
																	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	3.232,02	3.057,12	3.118,26	3.180,62	3.244,23			
									Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)		161.588,70	169.668,14	187.442,89	206.995,13	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	131,40	132,58	135,23	137,93	140,69			
									Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Volume Ekspor Perikanan (kg)		18.361.350	19.279.418	20.725.374	22.797.911	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi lkan (kg/kap/ th)	41,22	34,87	36,54	37,93	40,22			
			Pertumbuh an PDB Industri Pengolahan (9.2.1(a)) (persen)	5,00	5,50	6,50	7,50	8,10	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase rata – rata capaian indikator kinerja sub kegiatan dalam mendukung tujuan RPIP									Meningkatnya Sektor unggulan daerah (Indikator Sasaran RPJMD)	Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)	20,97	21,10	21,20	21,29	21,34
																			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pertumbuhan Industri (%)	2,38	2,43	2,52	2,62	2,71
																			Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Jumlah penerbitan rekomendasi IUI besar					

No	RPJMN TAHUN 2020 - 2024								RPJMD PROVINSI						RPJMD KABUPATEN/KOTA													
	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target										
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
				4,80	5,00	5,20	5,30	5,50									Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi Terkait (%)											
									Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah pengelolaan data dan informasi industri						Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	IKM yang Terinformasi dalam SINAS (IKM)	6	7	8	9	10						
			Kontribusi PDB pariwisata (8.9.1*)												Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang difasilitasi pengembangannya		80	85	90	95	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	PAD sektor pariwisata (%)	23,37	23,40	23,45	23,50	25,55
			Program Pemasaran Pariwisata						Persentase kualitas pemasaran pariwisata yang ditingkatkan		80	85	90	95	Program Pemasaran Pariwisata	Rata-rata Belanja Wisatawan Nusantara (rupiah/kunjungan)	1.300.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00							
																Rata-rata Belanja Wisatawan Mancanegara (rupiah/kunjungan)	9.800.000,00	9.950.000,00	10.100.000,00	10.250.000,00	10.400.000,00							
																Program pengembangan ekonomi kreatif dan kebudayaan lokal	Persentase peningkatan penyelenggaraan event ekonomi kreatif											

No	RPJMN TAHUN 2020 - 2024								RPJMD PROVINSI						RPJMD KABUPATEN/KOTA									
	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target						
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
																	Lama kunjungan Wisata (hari)	1,50	1,50	1,60	1,70	1,80		
			Pertumbuh an Investasi (PMTB) (persen)	5,60	6,20	6,90	7,80	8,40									Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah/Nilai Investasi PMA (\$)	630.598.514		649.658.354,09	659.403.229,40	669.294.277,84	
																		Jumlah/Nilai Investasi PMDN (Rp)	2.210.331,00		2.277.138,25	2.311.295,33	2.345.964,76	
																		Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (org/perusahaan)	7,85		8,85	9,35	9,85	
																		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (%)	14,99	16,49	18,47	20,21	21,95
																		Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Promosi Penanaman Modal (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
																		Program Pelayanan Penanaman Modal	IKM Bidang Perizinan (angka)	84,37	85,50	85,60	86,30	86,70
			Penyediaan lapangan kerja per tahun (Juta orang)	2,7-3,0	2,7-3,0	2,7-3,0	2,7-3,0	2,7-3,0	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Kenaikan Tenaga Kerja yang Mendapat Layanan Penempatan	55	60	65	75	80	Program Pengembangan Iklim Penanaman Moda	Rasio daya serap tenaga kerja (org/perusaha an)	7,85	8,35	8,85	9,35	9,85		
																Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga terhadap Total Kesempatan Kerja (%)	25,13	27,50	29,25	30,75	31,25		

No	RPJMN TAHUN 2020 - 2024								RPJMD PROVINSI						RPJMD KABUPATEN/KOTA							
	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																Program Penempatan Tenaga Kerja	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas (%)	91,21	91,21	92,57	93,02	93,97
			Laju pertumbuh an PDB per tenaga kerja (8.2.1*) (Persen)	3,0-3,3	3,1-3,5	3,2-3,7	3,2-4,0	3,5-4,5	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi yang Bersertifikasi	60	65	70	75	100	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga terhadap Total Kesempatan Kerja (%)	25,13	27,50	29,25	30,75	31,25
																Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan berbasis Kompetensi (%)	20,00	20,00	50,00	75,00	75,00	
																Program Penempatan Tenaga Kerja	Rasio penduduk yang bekerja (%)	91,20	91,20	93,12	92,55	94,81
																	Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas (%)	91,21	91,21	92,57	93,02	93,97
																	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	2,84	2,84	3,41	3,52	4,79
																	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	67,79	70,00	72,35	74,90	76,62

No	RPJMN TAHUN 2020 - 2024								RPJMD PROVINSI						RPJMD KABUPATEN/KOTA							
	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Kontribusi tenaga kerja industri (9.2.2*) Persen)	14,2	14,6	15,0	15,3	15,7	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi yang Bersertifikasi	60	65	70	75	100	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga terhadap Total Kesempatan Kerja (%)	25,13	27,50	29,25	30,75	31,25
																	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan berbasis Kompetensi (%)	20,00	20,00	50,00	75,00	75,00
																Program Penempatan Tenaga Kerja	Rasio penduduk yang bekerja (%)	91,20	91,20	93,12	92,55	94,81
																	Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas (%)	91,21	91,21	92,57	93,02	93,97
																	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	2,84	2,84	3,41	3,52	4,79
																	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	67,79	70,00	72,35	74,90	76,62

No	RPJMN TAHUN 2020 - 2024								RPJMD PROVINSI						RPJMD KABUPATEN/KOTA							
	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Jumlah tenaga kerja industri (Juta orang)	19,7	20,3	20,9	21,4	22,0								Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga terhadap Total Kesempatan Kerja (%)	25,13	27,50	29,25	30,75	31,25
																Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan berbasis Kompetensi (%)	20,00	20,00	50,00	75,00	75,00	
																Program Hubungan Industrial	Persentase Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun (5)	55,73	55,73	55,21	54,68	52,32
																Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (%)	39,58	39,58	42,00	49,02	52,63	
																Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak/PP/ PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BRJS Ketenagakerjaan (%)	50,00	50,00	62,00	75,00	79,00	

No	RPJMN TAHUN 2020 - 2024								RPJMD PROVINSI						RPJMD KABUPATEN/KOTA							
	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Jumlah tenaga kerja pariwisata (8.9.2*) (Juta orang)	13,0	13,5	14,0	14,5	15,0	Program Pengembangan Kemitraan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM pariwisata						Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif (%)	n/a		2,35	2,36	2,37
															Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Penyelenggaraan Event Ekonomi Kreatif (%)	37,50	50,00	50,00	75,00	75,00	
			Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif (juta orang)	19,00	20,00	20,00	21,00	21,00	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase kualitas pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang ditingkatkan		80	85	90	95	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Penyelenggaraan Event Ekonomi Kreatif (%)	37,50	50,00	50,00	75,00	75,00
																Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Periindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif (%)	n/a		2,35	2,36	2,37
		Pelaku Ekraf yang mendapat fasilitas Konsultasi HKI (orang)	Jumlah Pelaku Ekraf yang mendapat fasilitas Konsultasi HKI (orang)	4.650	4.850	5.250	4.650	4.450								Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Penyelenggaraan Event Ekonomi Kreatif (%)	37,50	50,00	50,00	75,00	75,00

No	RPJMN TAHUN 2020 - 2024								RPJMD PROVINSI						RPJMD KABUPATEN/KOTA							
	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Produk/jasa Ekraf yang didaftarkan HKI (Produk/Jasa)	Jumlah produk/ jasa Ekraf yang didaftarkan (produk/ jasa)	2.500	2.650	2.950	2.400	2.300								Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Penyelengaraan Event Ekonomi Kreatif (%)	37,50	50,00	50,00	75,00	75,00
		Pelaku/Usaha Kreatif yang difasilitasi Komersialisasi HKI (orang/usaha)	Jumlah Pelaku/usa ha Kreatif yang difasilitasi Komersialis asi HKI (orang/ usaha)	200	220	245	195	165								Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Penyelenggara an Event Ekonomi Kreatif (%)	37,50	50,00	50,00	75,00	75,00
		Kabupaten/ Kota yang dikembangkan	Jumlah Kab/Kota kreatif yang dikembang kan (kab/kota)	4	5	5	3	3								Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Penyelengaraan Event Ekonomi Kreatif (%)	37,50	50,00	50,00	75,00	75,00
		Ruang kreatif yang direvitalisasi dan sarana kreatif yang difasilitasi (khususnya di lokasi pengembangan klaster ekonomi kreatif)	Jumlah ruang kreatif yang direvitalisasi dan saranakreatif yang difasilitasi (unit)	30	32	34	31	27								Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Penyelengaraan Event Ekonomi Kreatif (%)	37,50	50,00	50,00	75,00	75,00

No	RPJMN TAHUN 2020 - 2024								RPJMD PROVINSI						RPJMD KABUPATEN/KOTA							
	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Fasilitasi promosi penanaman modal daerah di dalam dan luar negeri	Jumlah minat investasi dalam kegiatan promosi penanaman modal daerah di dalam dan LN (minat investasi)	350	450	500	500	500								Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Promosi Penanaman Modal (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Perkuatan peta potensi dan peluang investasi daerah	Jumlah pemetaan potensi dan Peluang Investasi (peta potensi daerah)	15	15	15	15	15									Program Pelayanan Penanaman Modal	IKM Bidang Perizinan (angka)	84,37	85,50	85,60	86,30	86,70
														Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Penyajian Data Penanaman Modal (%)	80,00		83,00	84,00	85,00		
	Fasilitasi rencana penanaman modal didaerah	Jumlah Workshop penyusunan rencana umum penanaman modal (RUPM) kepada provinsi dan Kabupaten/ Kota (kegiatan)	4	4	4	5	5								Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Promosi Penanaman Modal (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Pelaksanaan integrasi Sistem Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Inventarisasi, Sinkronisasi dan Koordinasi Integrasi Sistem Perizinan Berusaha terintegrasi	100	150	200	250	300									Program Pelayanan Penanaman Modal	IKM Bidang Perizinan (angka)	84,37	85,50	85,60	86,30	86,70
															Program Pengelolaan Sistem Informasi	IKM yang Terinformasi dalam SINAS (IKM)	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	

No	RPJMN TAHUN 2020 - 2024								RPJMD PROVINSI						RPJMD KABUPATEN/KOTA							
	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Secara elektronik di Pusat dan Daerah (KL/D)													Industri Nasional						
		Implementasi perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Implementasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (KL/D)	100	150	200	250	300								Program Pelayanan Penanaman Modal	IKM Bidang Perizinan (angka)	84,37	85,50	85,60	86,30	86,70
															Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	IKM yang Terinformasi dalam SINAS (IKM)	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	
	PP	Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN)	Pertumbuh an ekspor barang dan jasa (persen)	3,90	4,20	4,80	5,50	6,20	Program Pengembangan Ekspor	Pelaku usaha yang menjadi eksportir						Program Pengembangan Ekspor	Cakupan Promosi Perdagangan dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	20,00	20,00	20,00	60,00	80,00
			Neraca perdagangan barang (USD miliar)	0,3	1	3	7,5	15	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase UKM/PKM binaan yang dipromosikan						Program Pengembangan Ekspor	Cakupan Promosi Perdagangan dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	20,00	20,00	20,00	60,00	80,00
																Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Keikutsertaan pada Kegiatan Promosi Produk Asli Daerah (%)	n/a				65,00
				Nilai devisa pariwisata (8.9.1(c)) (USD miliar) (USD miliar)	21	23	25	27,5	30	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase kualitas pengembangan ekonomi kreatif yang ditingkatkan		80	85	90	95	Program Pemasaran Pariwisata	Rata-rata Belanja Wisatawan Mancanegara (rupiah/ kunjungan)	9.800.000,00	9.950.000,0	10.100.000,00	10.250.000,0

No	RPJMN TAHUN 2020 - 2024								RPJMD PROVINSI						RPJMD KABUPATEN/KOTA							
	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
									Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase kualitas pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang ditingkatkan		80	85	90	95	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Penyelenggaraan Event Ekonomi Kreatif (%)	37,50	50,00	50,00	75,00	75,00
		Industri alat kesehatan yang memproduksi alat kesehatan di dalam negeri	Jumlah alat kesehatan yang diproduksi di dalam negeri (alat kesehatan)	7	7	7	7	7								Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Sarana Pelayanan Kefarmasian sesuai dengan Standar (%)	92,00	92,00	93,00	94,00	95,00
																Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pertumbuhan Industri (%)	2,38	2,43	2,52	2,62	2,71
		Kontrak katalog Lokal/ Sektoral	Jumlah Kontrak katalog Lokal/ Sektoral (Kontrak katalog Lokal/ Sektoral)	20	30	4	50	60								Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase OPD yang mengikuti Pembinaan Pengadaan Barang (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	PP	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	Kontribusi sektor jasa keuangan/ PDB (persen)	4,20	4,30	4,30	4,40	4,40	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi Yang Dinilai Keselamatannya Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota Dalam 1 (satu) Daerah		57:14:00	64:29:00	71:43:00	78:57:00	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase koperasi aktif (%)	26,35	45,23	45,90	46,50	47,21

No	RPJMN TAHUN 2020 - 2024								RPJMD PROVINSI						RPJMD KABUPATEN/KOTA							
	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Biaya logistik terhadap PDB (Persen)	23,2	22,2	21,1	20,1	18,0	Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)	Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru Yang Berskala Kecil (Rasio)		14:15	14:15	21:23	35:38:00							
			Peringkat Travel and Tourism Competitive ness Index (TTCI) (Peringkat)	NA	34-39	NA	29-34	NA	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase kualitas pemasaran pariwisata yang ditingkatkan		80	85	90	95	Program Pemasaran Pariwisata	Lama kunjungan Wisata (hari)	1,50	1,50	1,60	1,70	1,80
									Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase kualitas pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang ditingkatkan		80	85	90	95	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Penyelenggaraan Event Ekonomi Kreatif (persen)	37,50	50,00	50,00	75,00	75,00
3	PN	MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING																				
			PP	Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial (%)	78,70	-	-	-	98,00	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial						Program Pemberdayaan Sosial	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sosial (%)	70,00	75,00	78,00
	Program Rehabilitasi Sosial	Presentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya															Program Rehabilitasi Sosial (SPM)	Persentase PMKS yang tertangani	70,00	74,00	77,00	80,00

No	RPJMN TAHUN 2020 - 2024								RPJMD PROVINSI						RPJMD KABUPATEN/KOTA							
	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
									Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Presentase Data Penerima Manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkan kemampuan fungsi sosialnya						Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	18,00	20,00	21,00	22,00	23,00
			Angka kelahiran total (Total fertility rate/TFR)	2,26	2,24	2,21	2,19	2,10	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Aktepor KB Aktif		74,5	75	75,5	100	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Total Fertility Rate (TFR) (%)	2,37	2,28	2,25	2,24	2,22
			Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperole h bantuan sosial pemerintah (%)	65,20	-	-	-	80,00	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial						Program Pemberdayaan Sosial	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sosial (%)	70,00	75,00	78,00	81,00	84,00
									Program Rehabilitasi Sosial	Presentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkan kemampuan fungsi sosialnya						Program Rehabilitasi Sosial (SPM)	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	70,00	74,00	77,00	80,00	84,00

No	RPJMN TAHUN 2020 - 2024								RPJMD PROVINSI						RPJMD KABUPATEN/KOTA							
	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
									Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Presentase Data Penerima Manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkan kemampuan fungsi sosialnya						Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (%)	18,00	20,00	21,00	22,00	23,00
	PP	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial	78,70	-	-	-	98,00	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Presentase Data Penerima Manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkan kemampuan fungsi sosialnya						Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (%)	18,00	20,00	21,00	22,00	23,00
									Program Rehabilitasi Sosial	Presentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkan kemampuan fungsi sosialnya						Program Rehabilitasi Sosial (SPM)	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	70,00	74,00	77,00	80,00	84,00

No	RPJMN TAHUN 2020 - 2024								RPJMD PROVINSI						RPJMD KABUPATEN/KOTA							
	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah	65,20	-	-	-	80,00	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Presentase Data Penerima Manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya						Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (%)	18,00	20,00	21,00	22,00	23,00
									Program Rehabilitasi Sosial	Presentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya						Program Rehabilitasi Sosial (SPM)	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	70,00	74,00	77,00	80,00	84,00
		Penyelenggaraan Bantuan Tunai Bersyarat bagi Keluarga Miskin	Keluarga Miskin dan Rentan yang memperoleh bantuan Tunai Bersyarat (KPM)	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000								Program Rehabilitasi Sosial (SPM)	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	70,00	74,00	77,00	80,00	84,00
PP	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	230,00	217,00	205,00	194,00	183,00	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	FKTP Terakreditasi	50	65	70	75	85	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (SPM)	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup (kasus)	10	10	10	10	10	

No	RPJMN TAHUN 2020 - 2024								RPJMD PROVINSI						RPJMD KABUPATEN/KOTA							
	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Angka kematian bayi (AKB) (per 1000 kelahiran hidup)	20,60	19,50	18,60	17,60	16,00	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	FKTP Terakreditasi	50	65	70	75	85	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (SPM)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup (Angka)	2	2	2	2	2
			Angka kematian neonatal (per 1.000 kelahiran hidup)	12,9	12,2	11,6	11	10	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	FKTP Terakreditasi	50	65	70	75	85	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (SPM)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup (Angka)	2	2	2	2	2
			Angka Prevalensi Kontrasepsi modern/modern Contraceptive prevalence Rate (mCPR)	61,80	62,20	62,50	62,90	63,40	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Akseptor KB Aktif		74,5	75	75,5	100	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR) (%)	57,01	59,92	61,99	63,59	64,90
			Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	8,60	8,30	8,00	7,70	7,40	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Akseptor KB Aktif		74,5	75	75,5	100	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need) (%)	11,50	20,01	19,06	19,01	18,08
			Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/ Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19) (kelahiran hidup per 1000 perempuan)	25,0	24,0	21,0	20,0	18,0	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Akseptor KB Aktif		74,5	75	75,5	100	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun (%)	0,30	0,29	0,28	0,27	0,26

No	RPJMN TAHUN 2020 - 2024								RPJMD PROVINSI						RPJMD KABUPATEN/KOTA							
	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (persen)	24,10	21,10	18,40	16,00	14,00	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Prevelansi Wasting	09:27	0,3604	0,2993	05:43	04:51	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (SPM)	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun)	6,60	6,60	6,50	6,40	6,30
			Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (persen)	8,1	7,8	7,5	7,3	7,0	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Prevelansi Wasting	09:27	0,3604	0,2993	05:43	04:51	Program Pemberdayaa n Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat ber PHBS (%)	70,00	70,00	75,00	73,00	75,00
			Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	0,21	0,21	0,19	0,19	0,18	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penemuan Kasus (CDR) TBC	58	65	70	75	80	Program Pemberdayaa n Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat ber PHBS (%)	70,00	70,00	75,00	73,00	75,00
			insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	272,00	252,00	231,00	211,00	190,00	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penemuan Kasus (CDR) TBC	58	65	70	75	80	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (SPM)	Tingkat Prevalensi Tuberculosis per 100.000 Penduduk (kasus)	212,00	364,00	393,00	386,00	384,00
			Jumlah kabupaten/ kot a yang mencapai eliminasi malaria	325,0	345,0	365,0	385,0	405,0	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penemuan Kasus (CDR) TBC	58	65	70	75	80	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat ber PHBS (%)	70,00	70,00	75,00	73,00	75,00

No	RPJMN TAHUN 2020 - 2024								RPJMD PROVINSI						RPJMD KABUPATEN/KOTA							
	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Insidensi hepatitis B (persen)	1,68	1,54	1,39	1,24	1,09	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penemuan Kasus (CDR) TBC	58	65	70	75	80	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat ber PHBS (%)	70,00	70,00	75,00	73,00	75,00
			Insidensi hepatitis B (persen) 1,68 1,54 1,39 1,24 1,09 Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	9,1	9,0	8,9	8,8	8,7	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penemuan Kasus (CDR) TBC	58	65	70	75	80	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (SPM)	Tingkat Prevalensi Tuberculosis per 100.000 Penduduk (kasus)	212,00	364,00	393,00	386,00	384,00
			Prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun (persen)	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Prevelansi Wasting	09:27	0,3604	0,2993	05:43	04:51	Program Pemberdayaa n Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat ber PHBS (%)	70,00	70,00	75,00	73,00	75,00
			Persentase tekanan darah tinggi	34,1	34,1	34,1	34,1	34,1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Terlaksananya Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100	100	100	100	100	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat ber PHBS (%)	70,00	70,00	75,00	73,00	75,00
			Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi	65,00	70,00	80,00	90,00	100,00	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Prevelansi Wasting	09:27	0,3604	0,2993	05:43	04:51	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%)	59,00	59,00	60,00	60,00	60,00

No	RPJMN TAHUN 2020 - 2024								RPJMD PROVINSI							RPJMD KABUPATEN/KOTA						
	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Persentase rumah sakit terakreditasi	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Terlaksananya Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100	100	100	100	100	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%)	59,00	59,00	60,00	60,00	60,00
																Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Sarana Pelayanan Kefarmasian sesuai dengan Standar	92,00	92,00	93,00	94,00	95,00
		Penyediaan Vaksin Imunisasi Dasar legkap	Persentase Kab/Kota dengan ketersediaan vaksin imunisasi dasar lengkap	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00								Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Sarana Pelayanan Kefarmasian sesuai dengan Standar	92,00	92,00	93,00	94,00	95,00
		Penyediaan obat dan perbekalanke sehatan program kesehatan ibudan anak	Persentase kabupaten/ kota dengan ketersediaan obat kesehatan dan perbekalan kesehatan program ibu dan anak	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00								Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Sarana Pelayanan Kefarmasian sesuai dengan Standar	92,00	92,00	93,00	94,00	95,00
		Pelaksanaan surveilans dan intervensi gizi berkualitas di kabupaten/ kota	Persentase kabupaten/ kota yang melaksana kan surveilans gizi	51,00	70,00	90,00	100,00	100,00								Program Pemberdayaan Masyarakat ber PHBS Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat ber PHBS (%)	70,00	70,00	75,00	73,00	75,00

No	RPJMN TAHUN 2020 - 2024								RPJMD PROVINSI						RPJMD KABUPATEN/KOTA							
	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		SPALD-S skala individu	Jumlah rumah tangga yang memiliki tangki septik sesuai standar (rumah tangga)	2.940. 304	2.940. 304	2.940. 304	2.940. 304	2.940. 304								Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat ber PHBS (%)	70,00	70,00	75,00	73,00	75,00
		Penguatan intervensi stunting melalui Therapeutic Feeding Centepenyedi aan obat, makanan tambahan dan alat antropometri	Jumlah kabupaten/ kota yang mendapat kan dukungan penguatan intervensi stunting	260,00	360,00	460,00	514,00	514,00								Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (SPM)	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun) (%)	6,60	6,60	6,50	6,40	6,30
		Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan program pencegahan dan pengendalian TB	Persentase kabupaten/ kota dengan ketersediaan obat program tuberkulosis	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00								Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (SPM)	Tingkat Prevalensi Tuberculosis per 100.000 Penduduk (kasus)	212,00	364,00	393,00	386,00	384,00
		Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga(PIS- PK)	Jumlah kabupaten /kota yang telah melaksana kan PIS-PK dengan 100% intervensi keluarga	105,00	200,00	300,00	400,00	514,00								Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat ber PHBS	70,00	70,00	75,00	73,00	75,00

No	RPJMN TAHUN 2020 - 2024								RPJMD PROVINSI							RPJMD KABUPATEN/KOTA							
	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		Penggunaan obat sesuai FORNAS dirumah sakit	Persentase rumah sakit dengan penggunaan obat sesuai FORNAS	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00								Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%)	59,00	59,00	60,00	60,00	60,00	
																Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Sarana Pelayanan Kefarmasian sesuai dengan Standar	92,00	92,00	93,00	94,00	95,00	
		Pelaksanaan manajemenpe ngelolaan obat dan vaksin sesuai standar di instalasi farmasi kabupaten/ kota	Jumlah instalasi farmasi kabupaten /kotayang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar	164,00	264,00	364,00	464,00	514,00									Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Sarana Pelayanan Kefarmasian sesuai dengan Standar	92,00	92,00	93,00	94,00	95,00
																	Penerapan aplikasi logistik obat danBahan Medis Habis Pakai (BMHP) diinstalasi farmasi provinsi dan kab /kota	Jumlah instalasi farmasi provinsi dan kabupaten/ kota yang menerapkan aplikasi logistik obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)	68,00	136,00	204,00	272,00	340,00

No	RPJMN TAHUN 2020 - 2024								RPJMD PROVINSI						RPJMD KABUPATEN/KOTA							
	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	PP	Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	Nilai rata-rata hasil PISA: a. Membaca b. Matematika c. Sains	NA NA NA	399,1 388,7 400,4	NA NA NA	NA NA NA	399,7 392,3 406,2	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan	100	100	100	100	100	Program Pengelolaan Pendidikan (SPM)	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun Dalam Pendidikan Usia Dini (%)	95,72	96,72	97,72	98,72	99,72
																	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-15 Tahun Dalam Pendidikan Dasar (%)	97,96	98,21	98,46	98,71	98,96
																	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun Dalam Pendidikan Kesetaraan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			Proporsi Anak di Atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test PISA (Persen): a. Membaca b. Matematika c. Sains	NA NA NA	34,4 46,6 49	NA NA NA	NA NA NA	35,6 47,4 51	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan	100	100	100	100	100	Program Pengelolaan Pendidikan (SPM)	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun Dalam Pendidikan Usia Dini (%)	95,72	96,72	97,72	98,72	99,72
																	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-15 Tahun Dalam Pendidikan Dasar (%)	97,96	98,21	98,46	98,71	98,96
																	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun Dalam Pendidikan Kesetaraan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	RPJMN TAHUN 2020 - 2024								RPJMD PROVINSI						RPJMD KABUPATEN/KOTA							
	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (Tahun)	8,75	8,85	8,95	9,06	9,16	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang Berakreditasi minimal B	5	5				Program Pengelolaan Pendidikan (SPM)	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun Dalam Pendidikan Kesetaraan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			Harapan Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun Keatas (Tahun)	13,41	13,60	13,79	13,97	14,16	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang Berakreditasi minimal B	5	5										
	PP	Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan Dan Pemuda	Indeks Perlindungan an Anak (IPA)	66,34	68,10	69,87	71,66	73,49	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Persentase Kab/Kota Yang Telah Melaksanakan Pemenuhan Hak-Hak Anak	100	100	100	100	100	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Indeks Perlindungan Anak (IPA) (%)	62,50	64,10	66,20	68,40	71,70
			Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%)	Laki-laki: 61,7; Perempuan: 62 (Baseline 2018)	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Kasus Kekerasan yang Mendapatkan Pelayanan/ Pendampingan	100	100	100	100	100	Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat kan Penanga nan Pengaduan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
																	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapat kan layanan komprehensif	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
																	Indeks Pembangu nan Gender (IPG)	91,21	91,28	91,28	91,33	91,39

No	RPJMN TAHUN 2020 - 2024								RPJMD PROVINSI						RPJMD KABUPATEN/KOTA							
	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73,24	73,50	73,74	73,97	74,18	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Kab/Kota yang Melaksanakan PUG	100	100	100	100	100	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	IDG (Indeks Pemberdayaan Gender) (Angka)	71,88		72,50	73,00	73,50
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	52,51	53,13	53,76	54,38	55,00	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Kab/Kota Peserta Pelatihan Peningkatan Kualitas Keluarga	100	100	100	100	100	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	55,31	55,31	55,56	55,81	56,06
			Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir	Menu run dari 9,4 (Baseline 2016)	Menu run	Menu run	Menu run	Menu run	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Pelayanan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	100	100	100	100	100	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	55,33	56,50	56,50	58,17	57,67	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase peran serta pemuda berprestasi						Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Presentase Organisasi Pemuda yang Aktif (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Peningkatan kapasitas dan peran forum anak	Jumlah daerah yang difasilitasi dalam pemenuhan hak partisipasi anak	34,00	17,00	17,00	17,00	17,00								Program Pengelolaan Pendidikan (SPM)	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini (%)	95,72	96,72	97,72	98,72	99,72
																	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam	97,96	98,21	98,46	98,71	98,96

No	RPJMN TAHUN 2020 - 2024								RPJMD PROVINSI						RPJMD KABUPATEN/KOTA								
	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
																	Pendidikan dasar (5)						
		peningkatan hak sipil dan akses informasi layak anak	Jumlah daerah yang difasilitasi dalam peningkatan hak sipil dan akses informasi layak anak	34,00	17,00	17,00	17,00	17,00									Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kota Layak Anak (Tingkat Capaian)	Madya	Madya	Madya	Madya	Nindya
		Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA sesuai standar	Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00								Program Pengelolaan Pendidikan (SPM)	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	49,36	54,30	59,73	65,70	72,27	
																	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	108,14	112,34	116,83	121,51	126,37	
																	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	91,32	99,33	99,43	99,53	99,63	
																	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	96,37	100,22	104,23	108,40	112,74	
																	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	80,17	82,17	84,23	86,33	88,49	
																	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini (%)	95,72	96,72	97,72	98,72	99,72	

No	RPJMN TAHUN 2020 - 2024								RPJMD PROVINSI						RPJMD KABUPATEN/KOTA								
	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
																	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar (%)	97,96	98,21	98,46	98,71	98,96	
																	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun Dalam Pendidikan Kesetaraan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		koordinasi penanganan kasus kekerasan dan eksploitasi pada anak	Jumlah Provinsi yang difasilitasi dalam peneyelenggaran penangangan kekerasan dan eksploitasi pada anak	0,00	12,00	14,00	14,00	16,00									Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat kan Penanganan Pengaduan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Fasilitasi pelaksanaan Jambore Pemuda Indonesia	Jumlah keikutserta an dalam Jambore Pemuda Indonesia	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00									Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	RPJMN TAHUN 2020 - 2024								RPJMD PROVINSI						RPJMD KABUPATEN/KOTA							
	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	PP	Pengentasan Kemiskinan	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki asset produktif (layanan keuangan, modal, lahan, pelatihan)	27,90	-	-	-	40,00	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Presentase Data Penerima Manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya						Program Pemberdayaan Sosial	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sosial (%)	70,00	75,00	78,00	81,00	84,00
			Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanaan usaha	25,6				50	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Presentase Data Penerima Manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya						Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (%)	18,00	20,00	21,00	22,00	23,00
			Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dan dilepaskan untuk TORA (Ha)	630.000	1.600.000	1.850.000	1.350.000	1.100.000	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan							Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (%)	60,00	60,00	61,00	61,00	63,00
			Bidang tanah yang didistribusi	750.000																		
			Bidang tanah yang dilegalisasi	6.286.087				56.286.087	Bidang tanah yang dilegalisasi													

No	RPJMN TAHUN 2020 - 2024								RPJMD PROVINSI						RPJMD KABUPATEN/KOTA							
	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Penanganan Konflik Pertanahan (%)	50,00	50,00	60,00	65,00	60,00
																Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Luas Lahan Bersertifikat (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	PP	Peningkatan Produktivitas Dan Daya Saing	Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas	44,80	46,60	48,40	50,20	52,10	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Kenaikan Tenaga Kerja yang Mendapat Layanan Penempatan	55	60	65	75	80	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	20,00	20,00	50,00	75,00	80,00
			Proporsi pekerja berkeahlian menengah dan tinggi (%)	43,0	45,0	47,0	48,0	50,0	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi yang Bersertifikasi	60	65	70	75	100	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan berbasis Kompetensi (%)	20,00	20,00	50,00	75,00	75,00
		Revitalisasi SMK yang Mendukung Industri 4.0	Jumlah SMK yang mendukung industri 4.0 yang terrevitalisasi	-	15,00	15,00	16,00	16,00								Program Pengelolaan Pendidikan (SPM)	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun Dalam Pendidikan Kesetaraan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Fasilitasi tenaga keolahragaan olimpiq dalam pengembangan tenaga keolahragaan	Jumlah tenaga keolahragaan olimpiqyang difasilitasi dalam pengembangan tenaga keolahragaan	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00								Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan Pembinaan Olahraga (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
																Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Peningkatan Pelatih yang Bersertifikasi (%)	12,96	12,96	50,00	87,03	100,00

No	RPJMN TAHUN 2020 - 2024								RPJMD PROVINSI						RPJMD KABUPATEN/KOTA								
	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
																Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Sarana dan Prasarana Olahraga yang Terpelihara (%)	33,33	33,33	50,00	66,67	83,33	
																Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Peningkatan Prestasi Olahraga (jumlah)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
		Siswa Yang Mendapatkan Pendidikan Karakter Bangsa	Jumlah Siswa SMP Yang Mendapat kan Pendidikan Karakter Bangsa	39,423	39,423	39,423	39,423	39,423									Setiap jenjang Pendidikan						
		Sekolah yang Mendapatkan Pendidikan Karakter Bangsa	Jumlah Sekolah Dasar yang Mendapatk an Pendidikan Karakter Bangsa	540	540	540	540	540									Setiap jenjang Pendidikan						
		Siswa yang Mendapatkan Pendidikan Karakter Bangsa	Jumlah Siswa Pendidikan Khusus yang Mendapat kan Pendidikan Karakter Bangsa	816	850	850	850	850									Setiap jenjang Pendidikan						
		Siswa Yang Mendapatkan Pendidikan Karakter Bangsa	Jumlah Siswa SMA Yang Mendapatk an Pendidikan Karakter Bangsa	5.612	5.612	5.612	5.612	5.612									Setiap jenjang Pendidikan						

No	RPJMN TAHUN 2020 - 2024								RPJMD PROVINSI						RPJMD KABUPATEN/KOTA							
	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Peningkatan Kapasitas Personal dan Sosial Sebagai Agen Perubahan	Anak Remaja Mengikuti Peningkatan Kapasitas Personal dan Sosial Sebagai Agen Perubahan	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000								Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
		Guru/Dosen/ Pengawas PAI yang bermutu	Jumlah Guru/Dosen /Pengawas PAI yang bermutu	200	210	220	230	240								Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kualifikasi Guru S1/DIV (%)	83,16	84,84	85,90	86,97	88,06
		Guru PAI yang meningkatkompetensinya	Jumlah Guru PAI yang meningkat kompetensinya	3.950	4.000	4.500	5.000	5.500								Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kualifikasi Guru S1/DIV (%)	83,16	84,84	85,90	86,97	88,06
		Guru Pendidikan Agama Katolik yang Meningkatkan Kompetensinya	Jumlah Guru Pendidikan Agama Katolik yang Meningkatkan Kompetensinya	4.369	4.369	4.369	4.369	4.369								Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kualifikasi Guru S1/DIV (%)	83,16	84,84	85,90	86,97	88,06
		Pengawas Pendidikan Agama Katolik yang Meningkatkan Kompetensinya	Jumlah Pengawas Pendidikan Agama Katolik yang Meningkatkan Kompetensinya	120	120	120	120	120								Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kualifikasi Guru S1/DIV (%)	83,16	84,84	85,90	86,97	88,06
		Peningkatan Kompetensi Guru	Jumlah Guru yang Meningkatkan Kompetensinya	5.712	5.712	5.712	5.712	5.712									Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kualifikasi Guru S1/DIV (%)	83,16	84,84	85,90	86,97

No	RPJMN TAHUN 2020 - 2024								RPJMD PROVINSI						RPJMD KABUPATEN/KOTA							
	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Tenaga Pendidik dan Kependidikan Agama dan Keagamaan Buddha yang ditingkatkan kompetensinya	Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan Agama dan Keagamaan Buddha yang ditingkatkan kompetensinya	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900								Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kualifikasi Guru S1/DIV (%)	83,16	84,84	85,90	86,97	88,06
		Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi dan Pembinaan	Jumlah Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi dan Pembinaan	1.245	8.000	9.000	10.000	11.000								Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kualifikasi Guru S1/DIV (%)	83,16	84,84	85,90	86,97	88,06
		Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat lingkungan keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja, dan komunitas	Indeks Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup Indonesia (%)	76,00	71,00	66,00	61,00	56,00								Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (%)	60,00	60,00	61,00	61,00	63,00
																	Predikat Sekolah yang Berwawasan Lingkungan (sekolah)	0,00	-	3,00	3,00	3,00

No	RPJMN TAHUN 2020 - 2024								RPJMD PROVINSI						RPJMD KABUPATEN/KOTA								
	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
																	Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kabupaten /Kota (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat lingkungan keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja, dan komunitas	Persentase jumlah Kabupaten/ Kota yang memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00									Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (%)	60,00	60,00	61,00	61,00	63,00
																	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Predikat Sekolah yang Berwawasan Lingkungan (sekolah)	0,00	-	3,00	3,00	3,00

No	RPJMN TAHUN 2020 - 2024								RPJMD PROVINSI						RPJMD KABUPATEN/KOTA							
	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kabupaten/ Kota (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang perilaku hidup bersih dan sehat	Jumlah TPS 3R yang berfungsi dengan baik	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00								Program Pengelolaan Persampahan	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	3,16	5,00	10,00	15,00	18,00
		Peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana yangmenunja ng perilaku hidup bersih dan sehat	Persentase pengurangan sampah nasional	7,00	12,00	17,00	22,00	27,00								Program Pengelolaan Persampahan	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	3,16	5,00	10,00	15,00	18,00

No	RPJMN TAHUN 2020 - 2024								RPJMD PROVINSI						RPJMD KABUPATEN/KOTA							
	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Peningkatan peran serta masyarakat dalam menunjang perilaku hidup bersih dan sehat	Jumlah partisipasi semua pihak dalam aksi publik, edukasi, dan pendampingan terkait hidup bersih dan sehat	16,00	20,00	24,00	30,00	34,00								Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat ber PHBS (%)	70,00	70,00	75,00	73,00	75,00
		Peningkatan dan penyempumaan peraturan terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat	Jumlah peraturan perundangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah terkait perilaku hidup bersih dan sehat	9,00	14,00	19,00	24,00	29,00								Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat ber PHBS (%)	70,00	70,00	75,00	73,00	75,00
4	PN	REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN																				
	PP	Revolusi Mental Dan Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa Dan Membentuk Mentalitas Bangsa Yang Maju, Modern, Dan Berkarakter							Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Prosentase pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat	15	25	30	30	100							

No	RPJMN TAHUN 2020 - 2024								RPJMD PROVINSI						RPJMD KABUPATEN/KOTA							
	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Penguatan Gerakan Indonesia Bersatu dalam kebhinekaan	Jumlah provinsi melaksanakan kampanye Gerakan Indonesia Bersatu dalam kebhinekaan	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00								Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan (%)	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
		Penguatan pusat-pusat perubahan di tingkat daerah	Jumlah kabupaten/ kota yang melaksanakan dan menguatkan program program GNRM	15	20	25	30	34								Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
		Kebijakan Teknis dan Program Strategis Perencanaan dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	Jumlah dokumen kebijakan teknis dan program strategis perencanaan dan program pendidikan dan pelatihan yang diselesaikan	3	3	3	3	3								Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
		Kebijakan Teknis dan Program Strategis Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	Jumlah dokumen kebijakan teknis dan program strategis penyusunan standardisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan yang diselesaikan	3	3	3	3	3	3								Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan	70,00	70,00	70,00	70,00

No	RPJMN TAHUN 2020 - 2024								RPJMD PROVINSI						RPJMD KABUPATEN/KOTA							
	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila	Jumlah dokumen kebijakan teknis dan program strategis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang diselesaikan	1	1	1	1	1								Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
		Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan	Terselenggaranya Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00								Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang dibina (%)	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
																Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase SDM yang Mempunyai Kemampuan Deteksi Dini, Cegah Dini dan Tangkal Dini terhadap Kerawanan Konflik Sosial	56,00	60,00	60,00	60,00	60,00
		Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan	Terselenggaranya Training of Trainer (ToT) Nilai-Nilai Kebangsaan	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00								Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang dibina (%)	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
																Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi	Persentase SDM yang Mempunyai Kemampuan Deteksi Dini, Cegah Dini dan Tangkal Dini terhadap	56,00	60,00	60,00	60,00	60,00

No	RPJMN TAHUN 2020 - 2024								RPJMD PROVINSI						RPJMD KABUPATEN/KOTA							
	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																Penanganan Konflik Sosial	Kerawanan Konflik Sosial					
		Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan	Terselengga ranya Sosialisasi/ Dialog Wawasan Kebangsaan	190,00	400,00	400,00	400,00	400,00								Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang dibina (%)	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
																Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase SDM yang Mempunyai Kemampuan Deteksi Dini, Cegah Dini dan Tangkal Dini terhadap Kerawanan Konflik Sosial	56,00	60,00	60,00	60,00	60,00
		Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) yang berkinerja tinggi	Jumlah Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) yang berkinerja tinggi	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00								Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang dibina (%)	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
		Penguatan sinergi antar lembaga yang berfungsi melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewargaan, wawasankeban gsaan, dan bela negara	Jumlah dokumen kebijakan teknis dan program strategis kerja sama dengan lembaga tinggi negara, kementerian/ lembaga, pemerintah an daerah, organisasi sosial politik, dan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00								Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00

No	RPJMN TAHUN 2020 - 2024								RPJMD PROVINSI						RPJMD KABUPATEN/KOTA							
	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			komponen masyarakat lain yang diselesaikan																			
		Penguatan sinergi antar lembaga yang berfungsi melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewargan, wawasan kebangsaan, dan bela negara	Jumlah dokumen kebijakan Teknis dan Program Strategis Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan	1	1	1	1	1								Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
		Peningkatan peran dan fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) hingga ke daerah dan desa	Jumlah dokumen kebijakan teknis dan program strategis peta jalan pembinaan ideologi Pancasila dan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila yang diselesaikan	3	3	3	3	3								Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
		Pembenahan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila	Jumlah dokumen rekomendasi atas regulasi yang bertentangan dengan nilai Pancasila yang diselesaikan	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00								Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00

No	RPJMN TAHUN 2020 - 2024								RPJMD PROVINSI						RPJMD KABUPATEN/KOTA							
	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Pembenahan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila	Persentase penyelesaian rekomendasi atas regulasi yang bertentangan dengannilai Pancasila	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00								Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Produk Hukum dan Informasi Hukum Daerah yang Berkualitas (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Analisis dan Sinkronisasi Hukum Nasional	Jumlah dokumen analisis dan sinkronisasi hukum tingkat pusat dan daerah yang diselesaikan	1	1	1	1	1								Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Produk Hukum dan Informasi Hukum Daerah yang Berkualitas (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Evaluasi dan penanganan ormas, organisasi dan perusahaan asing serta media yang tidak bertentangan dengan Ideologi negara/ Pancasila	Jumlah evaluasi dan penanganan ormasorganisasi dan perusahaan asing serta media yang tidak bertentangan dengan Ideologi negara/ Pancasila	1	1	1	1	1								Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00

No	RPJMN TAHUN 2020 - 2024								RPJMD PROVINSI						RPJMD KABUPATEN/KOTA								
	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	PP	Meningkatkan Pemajuan Dan Pelestarian Kebudayaan Untuk Memperkuat Karakter Dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, Dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia																					
		Penguatan integrasi Kebudayaan pada proses pembelajaran	Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan Kebudayaan mendapatkan proses pembelajaran	30,50	31,00	33,00	35,00	37,00	Program Pengembangan Kebudayaan								Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Kesenian yang dilestarikan (jumlah)	3,00	4,00	4,00	5,00	5,00
		Peningkatan kualitas layananmuseum dan galeri	Persentase museum yang terstandarisasi dan memperoleh layanan pembinaan	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00									Program Pembinaan Sejarah	Jumlah Sejarah yang Dilakukan Pembinaan	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		Peningkatan kualitas layanan museum dan galeri	Presentase koleksi museum yang dipamerkan (terhadap total koleksi)	45,00	49,00	52,00	53,00	57,00									Program Pengembangan Kebudayaan	Karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi (jumlah)	52,00	62,00	74,00	83,00	92,00

No	RPJMN TAHUN 2020 - 2024								RPJMD PROVINSI						RPJMD KABUPATEN/KOTA							
	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	Jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	254.650	280.110	308.145	338.945	372.835								Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Koleksi Naskah kuno dan Nasional yang teridentifikasi (jumlah)	1,00	3,00	5,00	7,00	9,00
		Pemanfaatan arsip sebagai memorkolektif dan jati diri bangsa	Jumlah arsip yang dimanfaatk an sebagaime mori kolektif dan jati diri bangsa	10.120	10.120	10.120	10.120	10.120								Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Koleksi Naskah kuno dan Nasional yang teridentifikasi (jumlah)	1	3	5	7	9
		Pemanfaatan arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	122.851	293.730	323.823	356.845	392.970								Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Koleksi Naskah kuno dan Nasional yang teridentifikasi (jumlah)	1	3	5	7	9
		Pemanfaatan arsip terjaga dan arsipstatis sebagai warisan budaya	Jumlah manuskrip yang diinventaris asi, dikaji dan dimanfaatk an	347	347	347	347	347								Program Pengelolaan Arsip	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku (%)	14,80	16,60	18,50	20,30	22,20
		Peningkatan pemanfaatan produk seni	Jumlah produksi film, musik dan media baru yang didukung	30	35	40	45	50								Program Pengembangan Kebudayaan	Karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi (jumlah)	52,00	62,00	74,00	83,00	92,00

No	RPJMN TAHUN 2020 - 2024								RPJMD PROVINSI						RPJMD KABUPATEN/KOTA							
	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Peningkatan pemanfaatan produk seni	Persentase inisiatif pemanfaatan ekonomi atas Objek Pemajuan Kebudayaan yang didukung	45,00	47,00	49,00	50,00	51,00								Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Kesenian yang dilestarikan (jumlah)	3	4	4	5	5
		Peningkatan pemanfaatan produkseni	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikaji dan dipetakan	20	23	25	27	29								Program Pengembangan Kebudayaan	Karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi (jumlah)	52	62	74	83	92
		Inventarisasi kekayaan budaya komunal dan kekayaan intelektual bidang budaya	Persentase kekayaan budaya komunal dan kekayaan intelektual bidang budaya yang diinventarisasi	48,00	52,00	55,00	56,00	57,00								Program Pengembangan Kebudayaan	Karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi (jumlah)	52	62	74	83	92
	PP	Memperkuat Moderasi Beragama Untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan Dan Harmoni Sosial	Indeks kerukunan umat beragama						Program kesejahteraan rakyat	Persentase bantuan bidang kesejahteraan sosial & keagamaan yang tersalurkan		96,67	97	98	100	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Konflik Sosial, Keagamaan dan RAS yang tertangani	78,00	78,00	78,50	79,00	79,50
																Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kegiatan Keagamaan dan Kemasyarakatan yang Terfasilitasi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	RPJMN TAHUN 2020 - 2024								RPJMD PROVINSI						RPJMD KABUPATEN/KOTA							
	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Ormas dan Lembaga Keagamaan	Jumlah Ormas dan Lembaga Keagamaan	100	100	100	100	100								Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang dibina (%)	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	PP	Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi Dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, Dan Berkarakter																				
		Pembinaan dan pengembangan perpustakaan	Jumlah perpustakaan yang dibina dan dikembangkan	900	900	900	900	900	Program Pembinaan Perpustakaan							Program Pembinaan Perpustakaan	Rasio Pengunjung Perpustakaan per Tahun	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06
5	PN	MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK Mendukung PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PELAYANAN DASAR																				
	PP	Peningkatan kualitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Produktivitas air (water productivity) (US\$/m2)	4,0	4,4	4,7	5,1	5,4	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pengembalian Fungsi Irigasi dan Infrastruktur Sumber Daya Air lainnya yang ditingkatkan		100%	100%	100%	100%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPM)	Persentase Penduduk Berakses Air Minum (%)	44,82	45,32	45,82	46,32	46,82

No	RPJMN TAHUN 2020 - 2024								RPJMD PROVINSI						RPJMD KABUPATEN/KOTA							
	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
										dalam Kondisi Baik												
									Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum								Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak Perkotaan (%)	61,80	62,30	62,80	63,30	63,80
	PP	Infrastruktur Pelayanan Dasar	Persentase rumah tangga yang Menempati hunian dengan kecukupan luas lantai per kapita (%)	92,84	93,44	94	94,63	95	Program Pengembangan Permukiman							Program Pengembangan Perumahan (SPM)	Persentase Rusunawa yang Terpelihara (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding) (%)	82,35	83,5	84,8	86	87	Program Pengembangan Permukiman							Program Pengembangan Perumahan (SPM)	Persentase Rusunawa yang Terpelihara (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			Persentase rumah tangga yang memiliki sertifikat hak atas tanah untuk perumahan (%)	55,46	56,85	58,23	59,62	60	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang							Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Luas Lahan Bersertifikat (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	RPJMN TAHUN 2020 - 2024								RPJMD PROVINSI						RPJMD KABUPATEN/KOTA								
	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah) layak dan aman (%)	78,1% akses layak (termasuk 9,65% akses aman	79,43 % akses layak (termasuk 11% akses aman	82,07 % akses layak (termasuk 13% akses aman	86,03 % akses layak (termasuk 14% akses aman	90% akses layak (termasuk 15% akses aman)	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah							Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi (%)	60,00	60,50	61,00	61,50	62,00	
			Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (%)	5,95	4,46	2,98	1,49	0	Program Pengembangan Permukiman														
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik (%)	72.92% penanganan; 3.70% pengurangan	73.70% penanganan; 5.51% pengurangan	75.28% penanganan; 9.13% pengurangan	77.64% penanganan; 14.57% pengurangan	80% penanganan; 20% pengurangan	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional							Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	80,00	89,00	95,00	100,00	100,00	
																	Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi melalui 3R	13,00	18,00	20,00	21,00	23,00	
						Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak (%)	91.8% (JP: 23.6%, BJP: 68.2%)	93.8% (JP: 25.4% BJP: 68.4%)	95.9% (JP: 27.1% BJP: 68.7%)	97.9% (JP: 28.9%, BJP: 69.0%)	100% (JP: 30.4%, BJP: 69.5%)	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum							Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPM)	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak Perkotaan (%)	61,80	62,30	62,80

No	RPJMN TAHUN 2020 - 2024								RPJMD PROVINSI						RPJMD KABUPATEN/KOTA							
	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman (%)	7,30	8,40	10,00	12,20	15,00	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum							Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPM)	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	44,82	45,32	45,82	46,32	46,82
			Volume tampungan air per kapita (m3/kapita)	52,50189621	55,18146289	57,05999842	58,10498273	58,49863205	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum													
			Jumlah Daerah Irigasi yang dimodernisasi	1	2	3	2	1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pengembalian Fungsi Irigasi dan Infrastruktur Sumber Daya Air lainnya yang ditingkatkan dalam Kondisi Baik		100%	100%	100%	100%	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Pembangunan, Rrehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian (%)	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
			Provinsi dengan penurunan risiko bencana di wilayah risiko bencana	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	Program Penanggulang an Bencana	Persentase Peningkatan Penanggulang an Bencana yang Mencakup Pra Bencana Tanggap Darurat dan Pasca Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	Program Penanggulang an Bencana (SPM)	Cakupan Pelayanan Bencana Daerah	100,00		100,00	100,00	100,00
																Kelurahan Siaga Bencana	2		6	8	10	

No	RPJMN TAHUN 2020 - 2024								RPJMD PROVINSI						RPJMD KABUPATEN/KOTA								
	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			Penyediaan air baku untuk kebutuhan air minum, industri, dan Kawasan unggulan (m3/detik)	4,27	11,4325	11,4325	11,4325	11,4325	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pengembalian Fungsi Irigasi dan infrastruktur Sumber Daya Air lainnya yang ditingkatkan dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%	100%	100%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPM)	Persentase Penduduk Berakses Air Minum (%)	44,82	45,32	45,82	46,32	46,82	
																			Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak Perkotaan (%)	61,80	62,30	62,80	63,30
			Rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan (terhadap informasi dasar 2010) (persen)	53,00	55,00	57,00	60,00	65,00								Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10 ribu Keberangka tan	220,00	200,00	195,00	190,00	185,00	
		Peningkatan tata kelola kelembagaan Pemda dalam dokumen Perencanaan Daerah untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak aman (APBD)	Jumlah kab/kota yang mengintegrasikan kebijakan nasional air minum dan sanitasi dalam dokumen perencanaan daerah (kab/kota)	0	514	514	514	514									Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPM)	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak Perkotaan (%)	61,80	62,30	62,80	63,30	63,80
																	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah (SPM)	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi (%)	60,00	60,50	61,00	61,50	62,00
		Penyediaan air baku di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal)	Tambahan debit air baku di daerah 3T (m3/detik)	0.5	4.2	4.1	5.1	3.7									Penyediaan Air Minum (SPM)	Persentase Penduduk Berakses Air Minum (%)	44,82	45,32	45,82	46,32	46,82

No	RPJMN TAHUN 2020 - 2024								RPJMD PROVINSI						RPJMD KABUPATEN/KOTA							
	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Penyediaan air baku di kawasan perkotaan	Tambahan debit air baku di kawasan perkotaan (m3/detik)	1.1	2.0	2.3	2.3	2.1								Penyediaan Air Minum (SPM)	Persentase Penduduk Berakses Air Minum (%)	44,82	45,32	45,82	46,32	46,82
		Penanganan perlintasan sebidang KA dengan jalan, Pemasangan, dan Penyediaan Fasilitas Keselamatan Perkeretaapian	Lokasi yang ditangani dan disediakan fasilitas keselamatan jalan (provinsi)	1,00	10,00	10,00	10,00	10,00									Program Pengelolaan Perkeretaapian	Tingkat Kecelakaan di Pintu Perlintasan Sebidang Kereta Api Yang dijaga	1,00	1,00	1,00	1,00
	PP	Infrastruktur Ekonomi	Panjang jalan tol, baru yang beroperasi dalam 5 tahun (2500 km)						Program Penyelenggara an Jalan	Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap												
			Jumlah Pelabuhan Utama (Hub) yang memenuhi standar (7 Pelabuhan)							Program Pengelolaan Pelayaran			100%	100%	100%	100%						
			Panjang Jaringan KA yang beroperasi (7.635 km)							Program Pengelolaan Perkeretaapian	Persentase pengelolaan perkeretaapian		100%	100%	100%	100%						

No	RPJMN TAHUN 2020 - 2024								RPJMD PROVINSI						RPJMD KABUPATEN/KOTA							
	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	PP	Infrastruktur Perkotaan	Jumlah layanan angkutan umum masal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (Kota)													Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Pelayanan Angkutan Darat	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09
	PP	Transformasi Digital	Persentase pertumbuhan sektor TIK (rata-rata)	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80								Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang Terpublikasi	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
			Persentase pengguna internet(Persentase)	72,60	74,20	79,20	80,70	82,30							Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Presentase aplikasi IT dan aplikasi E - government yang mendukung smart city dan layanan publik yang berfungsi baik	80,00	80,00	85,00	85,00	90,00	
			Persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalebar (4G) Existing Q2 2019 : 97,59%	97,50	98,00	98,50	99,00	1.000,00								Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Infrastruktur IT yang Berfungsi Baik	90,00	90,00	95,00	95,00	95,00

No	RPJMN TAHUN 2020 - 2024								RPJMD PROVINSI						RPJMD KABUPATEN/KOTA							
	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	PP	Energi dan Tenaga Kelistrikan	Rasio Elektrifikasi (persen)	100	100	100	100	100	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Persentase Peningkatan Pengelolaan Energi Terbarukan		100%	100%	100%	100%							
			Pemenuhan kebutuhan (konsumsi listrik)	1142	1203	1268	1336	1408	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Persentase Peningkatan Pengelolaan Energi Terbarukan		100%	100%	100%	100%							
6	PN	MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA, DAN PERUBAHAN IKLIM																				
	PP	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara (IKU)	84,10	84,20	84,30	84,40	84,50	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Capaian Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	100	100	100	100	100	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara (indeks)	81,00	81,10	81,20	81,30	81,40
Indeks Kualitas Air (IKA)			55,10	55,20	55,30	55,40	55,50	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 Regional	100	100	100	100	100	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Hasil pengukuran Indeks Kualitas air (indeks)	54,00	57,00	58,00	58,30	58,60	

No	RPJMN TAHUN 2020 - 2024								RPJMD PROVINSI						RPJMD KABUPATEN/KOTA							
	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKTL)	61,60	62,50	63,50	64,50	65,50								Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan (indeks)	27,37	29,06	30,75	32,44	34,13
			Kecepatan Penyampaian Informasi Peringatan Dini Bencana Kepada Masyarakat (menit)	5,0	4,5	4,0	3,5	3,0	Program Penanggulang an Bencana	Persentase Peningkatan Penanggulang an Bencana yang Mencakup Pra Bencana Tanggap Darurat dan Pasca Bencana	100	100	100	100	100	Program Penanggulang an Bencana (SPM)	Cakupan Pelayanan Bencana Daerah (%)	100,00		100,00	100,00	100,00
																	Kelurahan Siaga Bencana (angka)	2		6	8	10
		Pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya	Jumlah pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhan nya (pelaku usaha)	35	40	45	50	55								Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Compliance (Persentase Kepatuhan) Pelaku Usaha Bidang Kelautan dan Perikanan (%)	1,50	1,50	2,50	4,00	5,00
		Inventarisasi dan verifikasi kawasan dengan nilai keanekaraga man tinggi partisipatif	Luas kawasan hutan yang diinventarisa si dan diverifikasi dengan nilai keanekaraga man tinggi secara partisipatif (juta ha)	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00								Program Pengelolaan Keanekaraga man Hayati (Kehati)	Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragam an Hayati (dokumen)	-	-	Ada	-	-
																	Master Plan Ruang Terbuka Hijau (dokumen)	-	-	Ada	-	-
																	Peningkatan presentase Ruang Terbuka Hijau ((%)	4,40	4,40	4,40	4,60	4,70

No	RPJMN TAHUN 2020 - 2024								RPJMD PROVINSI						RPJMD KABUPATEN/KOTA							
	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Luas kawasan yang diverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	Jumlah luas kawasan yang diverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL (juta ha)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00								Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (dokumen)	-	-	Ada	-	-
																	Master Plan Ruang Terbuka Hijau (dokumen)	-	-	Ada	-	-
																	Peningkatan presentase Ruang Terbuka Hijau (%)	4,40	4,40	4,40	4,60	4,70
	PP	Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Iklim	Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat (menit)	5,00	4,50	4,00	3,50	3,00	Program Penanggulangan an Bencana	Persentase Peningkatan Penanggulangan an Bencana yang Mencakup Pra Bencana Tanggap Darurat dan Pasca Bencana	100	100	100	100	100	Program Pencegahan, Penanggulangan an, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (SPM)	Tingkat Waktu Tanggap (<i>Response Time Rate</i>) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (%)	73,00		76,00	78,00	80,00
		Peningkatan kapasitas masyarakat untuk ketahanan bencana geologi	Jumlah kabupaten /wilayah yang terlayani sosialisasi mitigasi bencana geologi (wilayah)	11	29	29	29	29								Program Penanggulangan an Bencana (SPM)	Cakupan Pelayanan Bencana Daerah (%)	100,00		100,00	100,00	100,00
																	Kelurahan Siaga Bencana (angka)	2		6	8	10
	PP	Pembangunan Rendah Karbon	Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi (persen)	11,80	12,50	12,80	12,80	13,20								Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00

No	RPJMN TAHUN 2020 - 2024								RPJMD PROVINSI						RPJMD KABUPATEN/KOTA							
	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor lahan (persen)	45,80	50,70	53,10	57,20	58,30														
			Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor limbah (persen)	8,50	9,00	9,30	9,40	9,40														
			Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor IPPU (persen)	2,00	2,30	2,50	2,60	2,90														
			Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor pesisir dan kelautan (persen)	6,50	6,60	6,80	7,00	7,30														
7	PN	MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK																				
	PP	Konsolidasi Demokrasi																				

No	RPJMN TAHUN 2020 - 2024								RPJMD PROVINSI						RPJMD KABUPATEN/KOTA							
	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Penguatan Demokrasi di Daerah	Jumlah provinsi yang mendapatk an penguatan demokrasi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi								Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu (%)	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
		Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Jumlah KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	549 Saker Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)	549 Saker Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)	549 Saker Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)	549 Saker Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)	549 Saker Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)								Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu (%)	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
		Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Jumlah KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang melakukan kegiatan pendidikan pemilih kepada masyarakat umum	549 Saker Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)	549 Saker Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)	549 Saker Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)	549 Saker Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)	549 Saker Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)								Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu (%)	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00

No	RPJMN TAHUN 2020 - 2024								RPJMD PROVINSI						RPJMD KABUPATEN/KOTA							
	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Jumlah KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang melakukan kegiatan pendidikan pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	549 Sakter Nasional/ Provinsi/ Kabupat en/Kota)	549 Sakter Nasional/ Provinsi/ Kabupa ten/Kota)	549 Sakter Nasional/ Provinsi/ Kabupa ten/Kota)	549 Sakter Nasional/ Provinsi/ Kabupa ten/Kota)	549 Sakter Nasional/ Provinsi/ Kabupa ten/Kota)								Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu (%)	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
		Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/ bencana	Jumlah KPU Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang melakukan kegiatan pendidikan pemilih kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/ bencana	549 Sakter Nasional/ Provinsi/ Kabupat en/Kota)	549 Sakter Nasional/ Provinsi/ Kabupa ten/Kota)	549 Sakter Nasional/ Provinsi/ Kabupa ten/Kota)	549 Sakter Nasional/ Provinsi/ Kabupa ten/Kota)	549 Sakter Nasional/ Provinsi/ Kabupa ten/Kota)								Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu (%)	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
		Pendidikan Politik Masyarakat di Daerah	Jumlah masyarakat yang mendapatk an pendidikan politik	3000 Orang	5000 Orang	6000 Orang	8000 Orang	10000 Orang									Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu (%)	70,00	70,00	70,00	70,00

No	RPJMN TAHUN 2020 - 2024								RPJMD PROVINSI						RPJMD KABUPATEN/KOTA							
	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah pengurus ormas yang memperoleh penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan pendidikan politik	400 Orang	1800 Orang	3000 Orang	3300 Orang	4200 Orang								Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang dibina (%)	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
		Diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional	Persentase (%) Mitra Strategis (Kelompok Informasi Masyarakat/ KIM, Media Tradisional, Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat/ Bako Humas, Petugas Informasi Publik /PIP, dan lain-lain) yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00								Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang Terpublikasi (%)	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00

No	RPJMN TAHUN 2020 - 2024								RPJMD PROVINSI						RPJMD KABUPATEN/KOTA							
	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Kecamatan di wilayah 3T yang menerima Layanan Informasi Publik	Jumlah Kecamatan di wilayah 3T yang menerima Layanan Informasi Publik Melalui Petugas Informasi Publik	500,00	550,00	600,00	650,00	700,00								Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang Terpublikasi (%)	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
		Pemanfaatan informasi publik program dan kebijakan pemerintah oleh masyarakat melalui berbagai media (cetak, elektronik, internet, luar ruang, tatap muka)	Persentase (%) tingkat kepuasan masyarakat di wilayah 3T yang mendapat akses informasi publik	65,00	68,00	70,00	73,00	75,00								Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang Terpublikasi (%)	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
	PP	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Persentase Instansi Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) dengan Indeks RB Baik Keatas*	70,00	75,00	80,00	85,00	85,00														

No	RPJMN TAHUN 2020 - 2024								RPJMD PROVINSI						RPJMD KABUPATEN/KOTA							
	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Persentase Instansi Pemerintah Daerah (Kabupaten /Kota) dengan Indeks RB Baik Keatas*	30,00	35,00	45,00	55,00	70,00														
		Pemetaan kompetensi ASN melaluiAsses ment Center	Jumlah ASN (JPT dan JA) yangterpeta kan kompetensi nya melaluiasse sment center	2000 Orang	100 % Jumlah JPT dan JA terpeta kan Kompeten sinya	-	-	-							Program Kepegawaian Daerah	Jumlah Jabatan Administra tor pada Instansi (jabatan)	207,00	207,00	207,00	207,00	207,00	
																Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	
		Kebijakan penataan jabatan fungsional	Jumlah kebijakan	1 Kebija kan	-	-	-	-								Program Kepegawaian Daerah	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah (jabatan)	4741,00	3485,00	3485,00	3485,00	3485,00
		Evaluasi Sistem Diklat Kepemimpinan ASN	Jumlah Rekomenda si	1 Reko men dasi	-	-	-	-								Program Kepegawaian Daerah	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (%)	39,50	51,60	63,80	75,90	82,05

No	RPJMN TAHUN 2020 - 2024								RPJMD PROVINSI						RPJMD KABUPATEN/KOTA							
	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Kebijakan Smart Office	Jumlah Kebijakan	1 kebijakan	-	-	-	-								Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Presentase aplikasi IT dan aplikasi e-government yang mendukung smart city dan layanan publik yang berfungsi baik (%)	80,00	80,00	85,00	85,00	90,00
		Integrasi data dan informasi pelayanan publik sektor strategis dalam SIPP (Sistem Informasi Pelayanan Publik)	Jumlah sektor pelayanan publik strategis yang data dan informasinya masuk ke dalam SIPP	-	2 Sektor Pelayanan (dasar dan perizinan)	-	-	-								Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Presentase aplikasi IT dan aplikasi e-government yang mendukung smart city dan layanan publik yang berfungsi baik (%)	80,00	80,00	85,00	85,00	90,00
		Pengembangan Jejaring Inovasi Daerah	Fasilitasi dan pendampingan daerah dalam penerapan replikasi inovasi daerah	34 Provisni	34 Provisni	34 Provisni	34 Provisni	34 Provisni								Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapatan Inovasi Daerah	42,86	62,96	92,59	92,59	92,59
		Pengembangan SPSE Terpusat	Jumlah LPSE yang menggunakan aplikasi terpusat	10 LPSE	150 LPSE	300 LPSE	450 LPSE	600 LPSE								Program Perekonomian dan Pembangunan	Tingkat Kepuasan Pengguna terhadap Pelayanan PBJ	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00
		Monitoring UKPBJ yang MencapaiMaturitas Level 3	Jumlah UKPBJ yang mencapai maturitasLevel 3	100 UKPBJ	350 UKPBJ	350 UKPBJ	350 UKPBJ	350 UKPBJ														

No	RPJMN TAHUN 2020 - 2024								RPJMD PROVINSI						RPJMD KABUPATEN/KOTA							
	Kode (PN/ PP)	Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran	Persentase integrasi sistem perencanaan dan pengangga ran pemerintah daerah	50,00	75,00	100,00	-	-								Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai metode atau pendekatan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan dan khususnya sasaran RPJMD sebagai upaya mewujudkan efektifitas dan efisiensi pembangunan daerah. Hal ini dalam rangka menjamin proses pembangunan yang terukur dan proporsional. Melalui pendekatan yang komprehensif tersebut, strategi juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan manajemen kinerja birokrasi secara menyeluruh sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi setiap program pembangunan.

Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah disusun dari serangkaian proses perencanaan strategis, yang dirumuskan dengan mempertimbangan isu-isu strategis pembangunan daerah yang harus dihadapi selama 5 (lima) tahun kedepan.

6.1 STRATEGI

Strategi merupakan serangkaian upaya yang berisikan gambaran proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis pembangunan. Strategi memperhatikan faktor internal dan eksternal di lingkungan Pemerintah Daerah. Untuk itu strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam

perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah berupaya menciptakan nilai tambah bagi stakeholder pembangunan daerah untuk meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Hal ini penting mengingat peran dan fungsi pemerintah yang semakin bergeser kearah fasilitator, regulator, dan pembinaan seluruh stakeholder pembangunan daerah.

Secara konseptual, suatu strategi secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis. Perumusan strategi membutuhkan kesatuan tujuan untuk mendapatkan kesatuan tindak. Satu strategi juga dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Beberapa sasaran bersifat *inherent* dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran.

Strategi dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 disajikan pada Tabel 6.1 sebagai berikut :

Tabel 6.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kota Bandar Lampung

VISI : BANDAR LAMPUNG SEHAT, CERDAS, BERIMAN, BERBUDAYA, NYAMAN, UNGGUL BERDAYA SAING BERBASIS EKONOMI UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT

Tujuan		Sasaran		Strategi	
MISI 1 : Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat					
MISI 2 : Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Pendidikan Masyarakat					
1.1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	1.1.1	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk	1.1.1.1	Mengoptimalkan Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Secara Komprehensif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan
				1.1.1.2	Melakukan Advokasi, Sosialisasi, Edukasi, dan Fasilitasi Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
		1.1.2	Meningkatnya Mutu dan Pemerataan pendidikan bagi Seluruh Masyarakat	1.1.2.1	Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk Semua, Berdaya Saing dan Non Diskrimatif
				1.1.2.2	Meningkatkan Minat Baca Masyarakat yang Didukung Ketersediaan Perpustakaan yang Memadai
		1.1.3	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, anak dan Generasi Muda	1.1.3.1	Meningkatkan kualitas SDM perempuan serta aksesibilitas pelayanan anak dalam rangka mendukung tumbuh kembang yang berkualitas
				1.1.3.2	Meningkatkan Pembangunan Pemuda yang Berkarakter dan Meningkatkan Prestasi Olahraga secara Partisipatif dengan Menciptakan Kecerdasan Emosional dan Intelektual
MISI 3 : Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur dalam Skala Mantap untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial					
3.1	Terwujudnya Infrastruktur perkotaan yang berkualitas	3.1.1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur jalan dan jembatan	3.1.1.1	Meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan beserta kelengkapannya
		3.1.2	Meningkatnya pengendalian banjir	3.1.2.1	Optimalisasi pengendalian banjir dengan mengurangi titik-titik banjir dan luas genangan

Tujuan	Sasaran	Strategi
	3.1.3 Meningkatkan akses masyarakat terhadap permukiman layak	3.1.3.1 Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Permukiman yang Berkualitas, Layak, Sehat serta Terjangkau
	3.1.4 Meningkatkan Kualitas Tata Ruang	3.1.4.1 Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang dan pertanahan melalui Pengawasan secara Berkelanjutan untuk Menjamin Kesesuaian Pemanfaatan Lahan dengan Rencana Tata Ruang
	3.1.5 Menurunnya masalah kemacetan	3.1.5.1 Meningkatkan sarana prasarana serta layanan perhubungan yang terpelihara dan dapat menjamin keamanan, keselamatan, kenyamanan dan waktu tempuh
MISI 4 : Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat		
4.1 Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui ekonomi kerakyatan	4.1.1 Meningkatnya Sektor unggulan daerah	4.1.1.1 Meningkatkan kinerja sektor industri dengan didukung oleh penguatan dan pengembangan IKM/IRT
		4.1.1.2 Mengembangkan perdagangan baik formal maupun informal dengan tetap memprioritaskan perlindungan konsumen
		4.1.1.3 Mengembangkan Industri/Jasa kepariwisataan secara terpadu
		4.1.1.4 Mengembangkan Koperasi dan UMKM sebagai perwujudan ekonomi kerakyatan disertai peningkatan kualitas dan perluasan peluang usaha untuk mendorong tumbuh kembangnya wira usaha baru
	4.1.2 Meningkatnya Investasi dan memperluas kesempatan kerja	4.1.2.1 Penguatan iklim investasi dengan didukung promosi, sumberdaya, sarana dan prasarana serta teknologi informasi
		4.1.2.2 Mengembangkan skema investasi dan kerjasama dalam bentuk kemitraan yang mampu menciptakan kesempatan kerja
		4.1.2.3 Meningkatkan kapasitas tenaga kerja, pengembangan kesempatan kerja dan perlindungan ketenagakerjaan
	4.1.3 Menurunnya kemiskinan	4.1.3.1 Mengoptimalkan penanggulangan kemiskinan melalui pelaksanaan program- program unggulan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat
	4.1.4 Meningkatnya penanganan PMKS	4.1.4.1 Meningkatkan perlindungan sosial dan pemberdayaan PMKS

Tujuan		Sasaran	Strategi
MISI 5 : Mengembangkan Masyarakat Agamis, Berbudaya, dan Mengembangkan Budaya Daerah untuk membangun masyarakat yang religius			
5.1 Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat dan bernegara yang Aman, Tenram dan Damai Berlandaskan Nilai-Nilai Budaya	5.1.1	Meningkatnya Kemananan dan Ketertiban umum serta Toleransi Antar Umat Beragama	5.1.1.1 Mengendalikan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat serta Penegakan Peraturan Daerah
			5.1.1.2 Meningkatkan toleransi beragama dan wawasan kebangsaan
	5.1.2	Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya Daerah	5.1.2.1 Meningkatkan Perlindungan dan Pelestarian Benda, Situs, Kawasan Cagar Budaya serta Seni Budaya Daerah
MISI 6 : Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi			
6.1 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel, Transparan dan Inovatif	6.1.1	Meningkatnya Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Bandar Lampung	6.1.1.1 Meningkatkan Pencapaian Delapan Area Perubahan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
	6.1.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	6.1.2.1 Meningkatkan kualitas perencanaan, akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah
	6.1.3	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	6.1.3.1 Peningkatan Pelayanan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah
	6.1.4	Terciptanya Inovasi Layanan Publik	6.1.4.1 Meningkatkan akses masyarakat dalam informasi dan layanan publik melalui penciptaan inovasi di segala bidang
	6.1.5	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	6.1.5.1 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Secara Transparan dan Demokratis
MISI 7 : Mempertahankan dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Skala Kota yang Sehat, Sejuk, Bersih dan Nyaman bagi Kehidupan Masyarakat dan Ekosistem Lingkungan Perkotaan			
7.1 Terwujudnya keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan	7.1.1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	7.1.1.1 Meningkatkan Upaya Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup melalui Pembangunan yang Berkelanjutan, Berwawasan Lingkungan serta Peduli terhadap Perubahan Iklim
	7.1.2	Meningkatnya Pengendalian Resiko Bencana	7.1.2.1 Menyediakan Rencana Aksi Pencegahan dan Mitigasi Bencana Daerah serta Peningkatan Kepedulian Masyarakat dalam Menghadapi Bencana

6.2 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Arah kebijakan juga dimaksudkan untuk memberikan jawaban atas permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan. Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun negatif pada masa periode pemerintahan perlu dipersiapkan baik terkait permasalahan maupun isu strategis daerah. Arah kebijakan pembangunan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Bandar Lampung

VISI : BANDAR LAMPUNG SEHAT, CERDAS, BERIMAN, BERBUDAYA, NYAMAN, UNGGUL BERDAYA SAING BERBASIS EKONOMI UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA BANDAR LAMPUNG					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Baik di Rumah Sakit maupun Fasilitas Kesehatan Lainnya melalui Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam Penyelenggaraan Kesehatan untuk Masyarakat					
Pengembangan Profesionalitas SDM Kesehatan Baik Medis, Paramedis maupun Non Medis melalui Peningkatan Kualifikasi					
Meningkatkan Ketersediaan, Pemerataan dan Keterjangkauan Obat, Vaksin dan Alat Kesehatan di Puskesmas/Pustu dan Jaringannya					

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA BANDAR LAMPUNG					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Bentuk Kegiatan dengan Pendekatan Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif yang Dilaksanakan secara Terpadu, Menyeluruh dan Berkesinambungan termasuk Pencegahan Kasus Baru Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular dan Kejadian Luar Biasa/Wabah					
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan dan Laboratorium yang Memadai					
Mengendalikan Usia Perkawinan Pertama Penduduk					
Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang Merata di Setiap Wilayah dan Kelompok Masyarakat dengan Menjamin Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat dan Obat Kontrasepsi dengan Fokus pada Penurunan Unmet Need dan Resiko Drop Out KB					
Meningkatkan Jumlah dan Penguatan Kapasitas Tenaga Lapangan KB dan Tenaga Kesehatan Pelayanan KB, serta Penguatan Lembaga di Tingkat Masyarakat untuk Mendukung Penggerakan dan Penyuluhan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera serta Reproduksi Bagi Remaja					
Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Tenaga Pendidik dengan Mendorong Pelaksanaan Kurikulum Secara Baik, Meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis IT, Termasuk Menyediakan Bahan Ajar dengan Muatan Lokal dan Menanamkan Karakter Sejak Dini Melalui <i>Multigrade</i> dan/atau <i>Multisubject Teaching</i>					
Pengembangan Anak Usia Dini yang Menjamin Terpenuhinya Kebutuhan Esensial Anak Usia Dini Secara Utuh dan Terintegrasi Antar lembaga Layanan Terkait dengan Mendorong Komitmen Seluruh Lapisan Masyarakat di Dalam Mengembangkan PAUD					
Menjamin Keterbukaan dan Kemudahan bagi Seluruh Masyarakat Kota (tanpa diskriminasi) untuk Memperoleh Pelayanan Pendidikan Dasar yang Bermutu Hingga Terpenuhinya Wajib Belajar 12 Tahun					
Menyediakan Bantuan untuk Anak dari Keluarga Kurang Mampu Kota Bandar Lampung untuk Dapat Mengikuti Pendidikan Dasar					
Meningkatkan sarana dan prasarana melalui rehabilitasi gedung, laboratorium, perpustakaan, dan infrastruktur IT sekolah dan madrasah					
Meningkatkan Peran dan Fungsi Pendidikan Non Formal dalam Peningkatan Mutu Pendidikan dengan Mendorong Akreditasi Lembaga Pendidikan Non Formal					
Mendorong Gerakan Budaya Membaca/Literasi Masyarakat					
Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Disetiap Tingkatan					
Mendorong Pemahaman Pemangku Kepentingan, Perencana dan Pelaksana Pembangunan terhadap Konsep Kesetaraan Gender dengan Fokus Penguatan Partisipasi Perempuan dalam Segala Lini					
Meningkatkan Kualitas dan Peran Perempuan Sebagai Leader di Berbagai Bidang					

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA BANDAR LAMPUNG					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan kualitas hidup dan Kemandirian perempuan melalui pemberian pelatihan keterampilan					
Menciptakan lingkungan fisik dan sosial yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta kehidupan yang ramah anak					
Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Anak dan Perempuan dari Berbagai Tindak Kekerasan dan Perlakuan Salah Lainnya					
Meningkatkan penanganan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan					
Meningkatkan Peranserta Pemuda dalam Pembangunan Sosial, Politik, Ekonomi, Budaya dan Agama					
Melakukan Penguatan dan Pengembangan Pola Pembinaan Olahraga Berjenjang dan Berkelanjutan					
Meningkatkan Akses dan Partisipasi Masyarakat secara Lebih Luas dan Merata untuk Meningkatkan Kebugaran Jasmani dan prestasi olahraga melalui Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga bagi Masyarakat Umum					
Meningkatkan Sistem Jaringan Transportasi Jalan dan Jembatan Terutama untuk Mengurai Kemacetan dengan Membangun dan Meningkatkan Jalan Kota, Jalan Lingkungan dan Jalan-jalan Alternatif					
Meningkatkan Kualitas Jalan dan Jembatan Melalui Pemantauan Kondisi Jalan dan Jembatan secara Berkala, serta Penanganan Pemeliharaan Secara Responsif					
Penguatan Base Line Data Pembangunan Jalan dan Jembatan					
Meningkatkan Utilitas Penerangan di Kawasan Jalan Umum					
Membangun Infrastruktur Gedung Pemerintahan					
Mengurangi Luas Genangan dan Mengendalikan Banjir Melalui normalisasi sungai					
Pembangunan, Peningkatan dan Pengelolaan Sistem Drainase secara terpadu					
Meningkatkan Penanganan Daerah/Kawasan Rawan Longsor					
Meningkatkan Kualitas Permukiman yang Bermartabat melalui penanganan RTLH dengan Pelibatan Masyarakat dan Swasta, Pembagian Proporsi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat					
Mengurangi Kawasan Kumuh melalui Pembangunan Sarana Infrastruktur Dasar Permukiman dan Lingkungan Sehat Permukiman					
Penataan wilayah pesisir yang sehat dan nyaman					
Mengoptimalkan ketersediaan sumber air bersih dan air minum layak					

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA BANDAR LAMPUNG					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum untuk menunjang Hunian					
Pemenuhan Ketersediaan Perencanaan Tata Ruang yang Efektif, Spesifik dan Harmonis					
Meningkatkan Pengawasan Izin Mendirikan Bangunan sesuai Peruntukannya					
Meningkatkan pengawasan kesesuaian Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah terhadap RTRW					
Meningkatkan peran lintas sektor dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang dan Pertanahan untuk menyelaraskan pembangunan yang berkelanjutan					
Meningkatkan pengawasaan pengelolaan Pertanahan					
Meningkatkan Layanan terhadap Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan					
Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan termasuk ketersediaan rambu-rambu lalu lintas dan penyediaan marka jalan					
Mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalan raya dengan meningkatkan pelayanan angkutan umum yang memadai					
Menurunkan angka kecelakaan lalu lintas dengan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan					
Evaluasi dan penataan kawasan parkir					
Meningkatkan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor					
Penguatan Kelembagaan dan Inventarisasi Data Perhubungan					
Mengembangkan Sektor Industri dengan Menumbuh kembangkan Industri Kecil Menengah (IKM) dan Industri Rumah Tangga (IRT) yang Produktif, Berdaya Saing, Tahan Krisis, dan Padat Karya serta Optimalisasi Peran Sektor Industri dalam Penyerapan Tenaga Kerja Lokal					
Meningkatkan Aksesibilitas IKM/IRT terhadap Pembiayaan Tanpa Bunga maupun dengan Bunga Rendah/Terjangkau Baik dengan Lembaga Keuangan Bank maupun Non Bank					
Mengembangkan IKM/IRT Berbasis Potensi Daerah					
Menyiapkan kapasitas IKM/IRT dalam memasuki era Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital					
Stabilisasi harga komoditas, ketersediaan dan menghindari kelangkaan barang diantaranya melalui penyediaan sarana perdagangan yang representatif					

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA BANDAR LAMPUNG					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Keamanan Perdagangan dan Perluasan Jaringan Pemasaran Produk Unggulan Daerah melalui Event Promosi, termasuk penerapan digitalisasi dalam aktivitas perdagangan (e-commerce)					
Meningkatkan kesadaran penggunaan produksi lokal					
Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perdagangan melalui Pengelolaan Pasar Tradisional dan Pasar Rakyat serta Pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima					
Meningkatkan Cakupan Pengawasan Kemetrolgian					
Meningkatkan Kualitas Jasa Transportasi, Perdagangan, Keuangan dan Jasa Lainnya					
Mendorong Keterpaduan Program dalam Masterplan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif					
Mendorong Peningkatan Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara dengan Meningkatkan Promosi Pariwisata Kota Bandar Lampung baik melalui Event-event Lokal, Nasional dan Internasional maupun promosi melalui media digital					
Meningkatkan SDM pemandu wisata yang sopan, ramah, menguasai bahasa, dan objek-objek wisata					
Meningkatkan Kemitraan dengan Pelaku Usaha Kepariwisata untuk menumbuhkan kembangkan usaha-usaha kepariwisataan					
Mendorong Penguatan Kelembagaan dan Meningkatkan Daya Saing UMKM dan Koperasi sehingga Mampu Tumbuh Menjadi Usaha yang Berkelanjutan dengan Skala yang Lebih Besar					
Meningkatkan Fasilitas/pendampingan dalam mengembangkan produk dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM untuk meningkatkan volume usaha					
Meningkatkan aksesibilitas koperasi dan UMKM terhadap pembiayaan tanpa bunga maupun dengan bunga rendah/terjangkau baik dengan lembaga keuangan Bank maupun Non Bank					
Meningkatkan Iklim Usaha Mikro Kecil dan Koperasi yang Kondusif pada Era Perdagangan Bebas/Globalisasi					
Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UMKM dalam era Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital yang kompetitif					
Optimalisasi Promosi Investasi untuk Publikasi Potensi Disertai Kemitraan Investasi					
Meningkatkan layanan investasi yang sederhana, mudah, cepat, tepat dan transparan baik secara offline maupun online					

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA BANDAR LAMPUNG					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan informasi investasi baik offline maupun online					
Meningkatkan kerjasama daerah					
Mendorong investor/pelaku usaha, lembaga donor, dan lembaga pemerintah untuk mengutamakan penggunaan tenaga kerja lokal					
Mendorong Arah Investasi yang Padat Karya yang Menjadikan Masyarakat Partisipatif dalam Pembangunan					
Meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja lokal melalui Pembinaan dan Pelatihan serta mengembangkan tempat-tempat atau Balai Latihan Kerja					
Meningkatkan Perlindungan dan Pengawasan Sistem Ketenagakerjaan					
Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Informasi Lapangan Pekerjaan, Pelatihan Kerja dan Penyaluran Tenaga Kerja					
Meningkatkan koordinasi dan integrasi program penanggulangan kemiskinan daerah					
Meningkatkan peran serta/partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial dengan fokus pada peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berada di lingkungan masyarakat					
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dengan mendorong peran dan partisipasi Lembaga dan Organisasi Masyarakat di Kelurahan dan Kecamatan dalam Pelaksanaan Pembangunan di segala bidang , terutama dalam menumbuh kembangkan Semangat Gotong Royong dalam masyarakat					
Meningkatkan ketahanan pangan sebagai wujud kedaulatan pangan melalui penganeekaragaman, ketersediaan dan keamanan pangan					
Meningkatkan Produktivitas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Holtikultura Rakyat					
Meningkatkan Aksesibilitas Petani terhadap Teknologi, Sumber-sumber Pembiayaan, serta Informasi Pasar dan Akses Pasar termasuk Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran					
Meningkatkan Produktifitas Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat					
Menyalurkan Bibit dan Sarana Prasarana Produksi Pertanian dan Perikanan Skala Kecil pada Masyarakat					
Meningkatkan Produktivitas, Optimalisasi Kapasitas dan Kontinuitas Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya untuk Kesejahteraan nelayan dan Masyarakat					
Meningkatkan Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan					
Meningkatkan aksesibilitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi					

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA BANDAR LAMPUNG					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
Penguatan Skema Perlindungan dan Bantuan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)					
Meningkatkan Kemandirian Penyandang Disabilitas melalui Pemberdayaan Penyandang Disabilitas					
Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pemakaman Baik Milik Pemerintah Maupun Pemakaman Milik Masyarakat/Umum					
Menyediakan Buffer Stock Logistik dan Pemenuhan Dasar Korban Bencana					
Meningkatkan Sinergitas, Toleransi, dan Peranserta <i>Stakeholders</i> bersama Sumber Daya Linmas (Perlindungan Masyarakat) dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban Umum					
Meningkatkan Pembinaan dan Fasilitasi SDM Perlindungan Masyarakat dalam Penegakan Peraturan Daerah Khususnya Terkait dengan K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)					
Meningkatkan Peranserta Masyarakat dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan					
Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama dan Perilaku Keagamaan di Masyarakat					
Memperkuat Iklim Kondusif bagi Berkembangnya Demokrasi yang Beradab, Memelihara Perdamaian dan Meningkatkan Rasa Persatuan dan Kesatuan					
Meningkatkan Pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan, politik, demokrasi dan toleransi umat beragama					
Meningkatkan Deteksi Dini, Cegah Dini dan Tangkal Dini terhadap Kerawanan Konflik Sosial, Agama dan RAS					
Melestarikan dan Mengembangkan Kesenian, Sejarah, Tradisi dan Nilai-nilai Budaya Lokal Melalui Aktivitas Seni dan Promosi					
Meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan festival seni dan budaya untuk pelestarian dan aktualisasi adat budaya					
Menghidupkan sanggar-sanggar seni dengan meningkatkan peran seniman dan budayawan					
Meningkatkan Pemeliharaan, Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Benda, Situs, Kawasan Cagar Budaya Daerah					
Mendorong Perubahan Mental Aparatur untuk Menciptakan Budaya Kerja dan Profesionalitas Sumber Daya Aparatur					
Memperkuat Sistem Pengawasan Internal Pemerintah					

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA BANDAR LAMPUNG					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
Menerapkan Sistem Akuntabilitas yang Dapat Mendorong Birokrasi Lebih Berkinerja dan Mampu Mempertanggungjawabkan Kinerjanya					
Menerapkan Sistem Kelembagaan/Organisasi yang Mendorong Efisiensi, Efektivitas dan Percepatan Proses Pelayanan dan Pengambilan Keputusan dalam Birokrasi					
Menerapkan Sistem Tatalaksana/Tatakerja Birokrat dengan Proses yang Singkat dan Jelas dalam Rangka Mendorong Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan					
Mengelola SDM yang Mampu Menghasilkan Aparatur yang Profesional					
Memperkuat Sistem Peraturan Perundang-undangan yang Lebih Efektif dan Menyentuh Kebutuhan Masyarakat					
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat dengan Mengoptimalkan Pelayanan Satu Pintu, Termasuk Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan					
Meningkatkan konsistensi perencanaan dan penganggaran daerah					
Memanfaatkan Hasil Penelitian dan Kajian dalam Perencanaan Pembangunan Daerah					
Meningkatkan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah					
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah					
Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Belanja Daerah					
Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah serta Kepatuhan terhadap Pelaporan Keuangan					
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah					
Menyediakan Layanan Pajak dan Retribusi yang Mudah, Cepat dan Akurat berbasis IT					
Mengoptimalkan penagihan pajak dan retribusi daerah					
Meningkatkan Koordinasi, Konsultasi dan Evaluasi dalam pengelolaan dana transfer					
Mendorong Kinerja BUMD dan Perusahaan Daerah					
Mengembangkan e-Government dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik					
Memperkuat dan Memperluas Jangkauan Teknologi Komunikasi dan Informatika					
Menciptakan Inovasi Layanan di Segala Bidang					

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA BANDAR LAMPUNG					
2021	2022	2023	2024	2025	2026
Mengembangkan Penelitian untuk Inovasi Daerah					
Memanfaatkan Teknologi Informasi untuk Memberikan Informasi dan Pelayanan Publik					
Meningkatkan Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Secara Komprehensif					
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah dengan menjamin ketersediaan sarana prasarana pendukung kinerja Perangkat Daerah					
Meningkatkan Penyelenggaraan Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan					
Meningkatkan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Daerah					
Mendorong Pencapaian Kota yang Berketahanan Iklim dan Berkelanjutan					
Memperkuat Sistem Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam yang Menyeluruh					
Pengelolaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau secara Terpadu dengan Penataan Taman-Taman dan Kawasan Hijau Kota yang Ramah Lingkungan					
Pengendalian Pencemaran, Perusakan Lingkungan dan Penguatan Pengolahan Limbah/Persampahan secara Terpadu					
Meningkatkan Layanan Persampahan termasuk Pemeliharaan dan Pembaruan Infrastruktur Persampahan					
Mendorong Pengembangan Energi Alternatif dalam Upaya Meningkatkan Kemandirian Energi Daerah					
Membangun Sarana dan Prasarana Peringatan Dini yang Terintegrasi Satu Sama Lain, serta Pembangunan Infrastruktur Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana					
Meningkatkan Koordinasi Penanggulangan Bencana antara Masyarakat, Pemerintah dan Stakeholder					
Meningkatkan Ketangguhan Masyarakat dalam Mengurangi dan Menanggulangi Risiko Bencana					
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana					

Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6.3 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kota Bandar Lampung

VISI : BANDAR LAMPUNG SEHAT, CERDAS, BERIMAN, BERBUDAYA, NYAMAN, UNGGUL BERDAYA SAING BERBASIS EKONOMI UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN						
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	1.1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	1.1.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan dan Terkendali nya Laju Pertumbuhan Penduduk	1.1.1.1 Mengoptimalkan Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Secara Komprehensif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan	1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Baik di Rumah Sakit maupun Fasilitas Kesehatan Lainnya melalui Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam Penyelenggaraan Kesehatan untuk Masyarakat					
					2	Pengembangan Profesionalitas SDM Kesehatan Baik Medis, Paramedis maupun Non Medis melalui Peningkatan Kualifikasi					
					3	Meningkatkan Ketersediaan, Pemerataan dan Keterjangkauan Obat, Vaksin dan Alat Kesehatan di Puskesmas/Pustu dan Jaringannya					
					4	Meningkatkan Bentuk Kegiatan dengan Pendekatan Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif yang Dilaksanakan secara Terpadu, Menyeluruh dan Berkesinambungan termasuk Pencegahan Kasus Baru Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular dan Kejadian Luar Biasa/Wabah					
					5	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan dan Laboratorium yang Memadai					
				1.1.1.2 Melakukan Advokasi, Sosialisasi, Edukasi, dan Fasilitasi Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1	Mengendalikan Usia Perkawinan Pertama Penduduk					
					2	Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang Merata di Setiap Wilayah dan Kelompok Masyarakat dengan Menjamin Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat dan Obat Kontrasepsi dengan Fokus pada Penurunan Unmet Need dan Resiko Drop Out KB					
					3	Meningkatkan Jumlah dan Penguatan Kapasitas Tenaga Lapangan KB dan Tenaga Kesehatan Pelayanan KB, serta Penguatan Lembaga di Tingkat Masyarakat untuk Mendukung Penggerakan dan Penyuluhan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera serta Reproduksi Bagi Remaja					

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN						
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Pendidikan Masyarakat		1.1.2 Meningkatkan Mutu dan Pemerataan pendidikan bagi Seluruh Masyarakat	1.1.2.1 Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk Semua, Berdaya Saing dan Non Diskrimatif	1	Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Tenaga Pendidik dengan Mendorong Pelaksanakan Kurikulum Secara Baik, Meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis IT, Termasuk Menyediakan Bahan Ajar dengan Muatan Lokal dan Menanamkan Karakter Sejak Dini Melalui <i>Multigrade</i> dan/atau <i>Multisubject Teaching</i>					
					2	Pengembangan Anak Usia Dini yang Menjamin Terpenuhinya Kebutuhan Esensial Anak Usia Dini Secara Utuh dan Terintegrasi Antar lembaga Layanan Terkait dengan Mendorong Komitmen Seluruh Lapisan Masyarakat di Dalam Mengembangkan PAUD					
					3	Menjamin Keterbukaan dan Kemudahan bagi Seluruh Masyarakat Kota (tanpa diskriminasi) untuk Memperoleh Pelayanan Pendidikan Dasar yang Bermutu Hingga Terpenuhinya Wajib Belajar 12 Tahun					
					4	Menyediakan Bantuan untuk Anak dari Keluarga Kurang Mampu Kota Bandar Lampung untuk Dapat Mengikuti Pendidikan Dasar					
					5	Meningkatkan sarana dan prasarana melalui rehabilitasi gedung, laboratorium, perpustakaan, dan infrastruktur IT sekolah dan madrasah					
					6	Meningkatkan Peran dan Fungsi Pendidikan Non Formal dalam Peningkatan Mutu Pendidikan dengan Mendorong Akreditasi Lembaga Pendidikan Non Formal					
				1.1.2.2 Meningkatkan Minat Baca Masyarakat yang Didukung Ketersediaan Perpustakaan yang Memadai	1	Mendorong Gerakan Budaya Membaca/Literasi Masyarakat					
					2	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Disetiap Tingkatan					

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN						
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
			1.1.3 Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, anak dan Generasi Muda	1.1.3.1 Meningkatkan kualitas SDM perempuan serta aksesibilitas pelayanan anak dalam rangka mendukung tumbuh kembang yang berkualitas	1	Mendorong Pemahaman Pemangku Kepentingan, Perencana dan Pelaksana Pembangunan terhadap Konsep Kesetaraan Gender dengan Fokus Penguatan Partisipasi Perempuan dalam Segala Lini					
					2	Meningkatkan Kualitas dan Peran Perempuan Sebagai Leader di Berbagai Bidang					
					3	Meningkatkan kualitas hidup dan Kemandirian perempuan melalui pemberian pelatihan keterampilan					
					4	Menciptakan lingkungan fisik dan sosial yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta kehidupan yang ramah anak					
					5	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Anak dan Perempuan dari Berbagai Tindak Kekerasan dan Perlakuan Salah Lainnya					
					6	Meningkatkan penanganan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan					
				1.1.3.2 Meningkatkan Pembangunan Pemuda yang Berkarakter dan Meningkatkan Prestasi Olahraga secara Partisipatif dengan Menciptakan Kecerdasan Emosional dan Intelektual	1	Meningkatkan Peranserta Pemuda dalam Pembangunan Sosial, Politik, Ekonomi, Budaya dan Agama					
					2	Melakukan Penguatan dan Pengembangan Pola Pembinaan Olahraga Berjenjang dan Berkelanjutan					
					3	Meningkatkan Akses dan Partisipasi Masyarakat secara Lebih Luas dan Merata untuk Meningkatkan Kebugaran Jasmani dan prestasi olahraga melalui Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga bagi Masyarakat Umum					
3	Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur dalam Skala Mantap untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial	3.1 Terwujudnya Infrastruktur perkotaan yang berkualitas	3.1.1 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur jalan dan jembatan	3.1.1.1 Meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan beserta kelengkapannya	1	Meningkatkan Sistem Jaringan Transportasi Jalan dan Jembatan Terutama untuk Mengurai Kemacetan dengan Membangun dan Meningkatkan Jalan Kota, Jalan Lingkungan dan Jalan-jalan Alternatif					
					2	Meningkatkan Kualitas Jalan dan Jembatan Melalui Pemantauan Kondisi Jalan dan Jembatan secara Berkala, serta Penanganan Pemeliharaan Secara Responsif					

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN								
						2021	2022	2023	2024	2025	2026		
					3	Penguatan Base Line Data Pembangunan Jalan dan Jembatan							
					4	Meningkatkan Utilitas Penerangan di Kawasan Jalan Umum							
					5	Membangun Infrastruktur Gedung Pemerintahan							
			3.1.2	Meningkat nya pengendalian banjir	3.1.2.1	Optimalisasi pengendalian banjir dengan mengurangi titik-titik banjir dan luas genangan	1	Mengurangi Luas Genangan dan Mengendalikan Banjir Melalui normalisasi sungai					
							2	Pembangunan, Peningkatan dan Pengelolaan Sistem Drainase secara terpadu					
							3	Meningkatkan Penanganan Daerah/Kawasan Rawan Longsor					
			3.1.3	Meningkat nya akses masyarakat terhadap permukiman layak	3.1.3.1	Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Permukiman yang Berkualitas, Layak, Sehat serta Terjangkau	1	Meningkatkan Kualitas Permukiman yang Bermartabat melalui penanganan RTLH dengan Pelibatan Masyarakat dan Swasta, Pembagian Proporsi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat					
							2	Mengurangi Kawasan Kumuh melalui Pembangunan Sarana Infrastruktur Dasar Permukiman dan Lingkungan Sehat Permukiman					
							3	Penataan wilayah pesisir yang sehat dan nyaman					
							4	Mengoptimalkan ketersediaan sumber air bersih dan air minum layak					
							5	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum untuk menunjang Hunian					
			3.1.4	Meningkatnya Kualitas Tata Ruang	3.1.4.1	Meningkatkan pengendalianpemanfaatan ruang dan pertanahan melalui Pengawasan secara Berkelanjutan untuk Menjamin Kesesuaian Pemanfaatan Lahan dengan Rencana Tata Ruang	1	Pemenuhan Ketersediaan Perencanaan Tata Ruang yang Efektif, Spesifik dan Harmonis					
							2	Meningkatkan Pengawasan Izin Mendirikan Bangunan sesuai Peruntukannya					
							3	Meningkatkan pengawasan kesesuaian Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah terhadap RTRW					
							4	Meningkatkan peran lintas sektor dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang dan Pertanahan untuk menyelaraskan pembangunan yang berkelanjutan					

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN						
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
			3.1.5 Menurunnya masalah kemacetan	3.1.5.1 Meningkatkan sarana prasarana serta layanan perhubungan yang terpelihara dan dapat menjamin keamanan, keselamatan, kenyamanan dan waktu tempuh	5	Meningkatkan pengawasaan pengelolaan Pertanahan					
					6	Meningkatkan Layanan terhadap Penyelesaikan Konflik-Konflik Pertanahan					
					1	Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan termasuk ketersediaan rambu-rambu lalu lintas dan penyediaan marka jalan					
					2	Mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalan raya dengan meningkatkan pelayanan angkutan umum yang memadai					
					3	Menurunkan angka kecelakaan lalu lintas dengan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan					
					4	Evaluasi dan penataan kawasan parkir					
					5	Meningkatkan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor					
					6	Penguatan Kelembagaan dan Inventarisasi Data Perhubungan					
4	Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat	4.1 Meningkat nya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui ekonomi kerakyatan	4.1.1 Meningkat nya Sektor unggulan daerah	4.1.1.1 Meningkatkan kinerja sektor industri dengan didukung oleh penguatan dan pengembangan IKM/IRT	1	Mengembangkan Sektor Industri dengan Menumbuhkan kembangkan Industri Kecil Menengah (IKM) dan Industri Rumah Tangga (IRT) yang Produktif, Berdaya Saing, Tahan Krisis, dan Padat Karya serta Optimalisasi Peran Sektor Industri dalam Penyerapan Tenaga Kerja Lokal					
					2	Menigkatkan Aksesibilitas IKM/IRT terhadap Pembiayaan Tanpa Bunga maupun dengan Bunga Rendah/Terjangkau Baik dengan Lembaga Keuangan Bank maupun Non Bank					
					3	Mengembangkan IKM/IRT Berbasis Potensi Daerah					
					4	Menyiapkan kapasitas IKM/IRT dalam memasuki era Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital					
				4.1.1.2 Mengembangkan perdagangan baik formal maupun informal dengan tetap memprioritaskan perlindungan konsumen	1	Stabilisasi harga komoditas, ketersediaan dan menghindari kelangkaan barang diantaranya melalui penyediaan sarana perdagangan yang representatif					
					2	Meningkatkan Keamanan Perdagangan dan Perluasan Jaringan Pemasaran Produk Unggulan Daerah melalui Event Promosi, termasuk penerapan digitalisasi dalam aktivitas perdagangan (e-commerce)					

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN						
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
					3	Meningkatkan kesadaran penggunaan produksi lokal					
					4	Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perdagangan melalui Pengelolaan Pasar Tradisional dan Pasar Rakyat serta Pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima					
					5	Meningkatkan Cakupan Pengawasan Kemetrolagian					
				4.1.1.3 Mengembangkan Industri/Jasa kepariwisataan secara terpadu	1	Meningkatkan Kualitas Jasa Transportasi, Perdagangan, Keuangan dan Jasa Lainnya					
					2	Mendorong Keterpaduan Program dalam Masterplan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif					
					3	Mendorong Peningkatan Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara dengan Meningkatkan Promosi Pariwisata Kota Bandar Lampung baik melalui Event-event Lokal, Nasional dan Internasional maupun promosi melalui media digital					
					4	Meningkatkan SDM pemandu wisata yang sopan, ramah, menguasai bahasa, dan objek-objek wisata					
					5	Meningkatkan Kemitraan dengan Pelaku Usaha Kepariwisata untuk menumbuh kembangkan usaha-usaha kepariwisataan					
				4.1.1.4 Mengembangkan Koperasi dan UMKM sebagai perwujudan ekonomi kerakyatan disertai peningkatan kualitas dan perluasan peluang usaha untuk mendorong tumbuh kembangnya wira usaha baru	1	Mendorong Penguatan Kelembagaan dan Meningkatkan Daya Saing UMKM dan Koperasi sehingga Mampu Tumbuh Menjadi Usaha yang Berkelanjutan dengan Skala yang Lebih Besar					
					2	Meningkatkan Fasilitasi/pendampingan dalam mengembangkan produk dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM untuk meningkatka volume usaha					
					3	Menigkatkan aksesibilitas koperasi dan UMKM terhadap pembiayaan tanpa bunga maupun dengan bunga rendah/terjangkau baik dengan lembaga keuangan Bank maupun Non Bank					
					4	Meningkatkan Iklim Usaha Mikro Kecil dan Koperasi yang Kondusif pada Era Perdagangan Bebas/Globalisasi					

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN							
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
					5	Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UMKM dalam era Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital yang kompetitif						
			4.1.2 Meningkatkan nya Investasi dan memperluas kesempatan kerja	4.1.2.1 Penguatan iklim investasi dengan didukung promosi, sumberdaya, sarana dan prasarana serta teknologi informasi	1	Optimalisasi Promosi Investasi untuk Publikasi Potensi Disertai Kemitraan Investasi						
					2	Meningkatkan layanan investasi yang sederhana, mudah, cepat, tepat dan transparan baik secara offline maupun online						
					4.1.2.2 Mengembangkan skema investasi dan kerjasama dalam bentuk kemitraan yang mampu menciptakan kesempatan kerja	1	Meningkatkan informasi investasi baik offline maupun online					
			4.1.2.3 Meningkatkan kapasitas tenaga kerja, pengembangan kesempatan kerja dan perlindungan ketenagakerjaan	2		Menigkatkan kerjasama daerah						
				4.1.2.3 Meningkatkan kapasitas tenaga kerja, pengembangan kesempatan kerja dan perlindungan ketenagakerjaan		3	Mendorong investor/pelaku usaha, lembaga donor, dan lembaga pemerintah untuk mengutamakan penggunaan tenaga kerja lokal					
					4.1.2.3 Meningkatkan kapasitas tenaga kerja, pengembangan kesempatan kerja dan perlindungan ketenagakerjaan	1	Mendorong Arah Investasi yang Padat Karya yang Menjadikan Masyarakat Partisipatif dalam Pembangunan					
						4.1.2.3 Meningkatkan kapasitas tenaga kerja, pengembangan kesempatan kerja dan perlindungan ketenagakerjaan	2	Meningkatkan kopetensi dan daya saing tenaga kerja lokal melalui Pembinaan dan Pelatihan serta mengembangkan tempat-tempat atau Balai Latihan Kerja				
			4.1.2.3 Meningkatkan kapasitas tenaga kerja, pengembangan kesempatan kerja dan perlindungan ketenagakerjaan				3	Meningkatkan Perlindungan dan Pengawasan Sistem Ketenagakerjaan				
				4.1.2.3 Meningkatkan kapasitas tenaga kerja, pengembangan kesempatan kerja dan perlindungan ketenagakerjaan			4	Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Informasi Lapangan Pekerjaan, Pelatihan Kerja dan Penyaluran Tenaga Kerja				
4.1.3 Menurunnya kemiskinan	4.1.3.1 Mengoptimalkan penanggulangan kemiskinan melalui pelaksanaan program-program unggulan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat	1			Meningkatkan koordinasi dan integrasi program penanggulangan kemiskinan daerah							
		2			Meningkatkan peran serta/partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial dengan fokus pada peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berada di lingkungan masyarakat							

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN								
						2021	2022	2023	2024	2025	2026		
					3	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dengan mendorong peran dan partisipasi Lembaga dan Organisasi Masyarakat di Kelurahan dan Kecamatan dalam Pelaksanaan Pembangunan di segala bidang , terutama dalam menumbuh kembangkan Semangat Gotong Royong dalam masyarakat							
					4	Meningkatkan ketahanan pangan sebagai wujud kedaulatan pangan melalui penganekaragaman, ketersediaan dan keamanan pangan							
					5	Meningkatan Produktivitas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Holtikultura Rakyat							
					6	Meningkatkan Aksesibilitas Petani terhadap Teknologi, Sumber-sumber Pembiayaan, serta Informasi Pasar dan Akses Pasar termasuk Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran							
					7	Meningkatkan Produktifitas Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat							
					8	Menyalurkan Bibit dan Sarana Prasarana Produksi Pertanian dan Perikanan Skala Kecil pada Masyarakat							
					9	Meningkatkan Produktivitas, Optimalisasi Kapasitas dan Kontinuitas Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya untuk Kesejahteraan nelayan dan Masyarakat							
					10	Meningkatkan Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan							
			4.1.4	Meningkat nya penanganan PMKS	4.1.4.1	Meningkatkan perlindungan sosial dan pemberdayaan PMKS	1	Meningkatkan aksesibilitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi					
							2	Penguatan Skema Perlindungan dan Bantuan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)					
							3	Meningkatkan Kemandirian Penyandang Disabilitas melalui Pemberdayaan Penyandang Disabilitas					
							4	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pemakaman Baik Milik Pemerintah Maupun Pemakaman Milik Masyarakat /Umum					

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN						
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
					5	Menyediakan Buffer Stock Logistik dan Pemenuhan Dasar Korban Bencana					
5	Mengembangkan Masyarakat Agamis, Berbudaya, dan Mengembangkan Budaya Daerah untuk membangun masyarakat yang religius	5.1 Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat dan bernegara yang Aman, Tentram dan Damai Berlandaskan Nilai-Nilai Budaya	5.1.1 Meningkatkan Keamananan dan Ketertiban umum serta Toleransi Antar Umat Beragama	5.1.1.1 Mengendalikan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat serta Penegakan Peraturan Daerah	1	Meningkatkan Sinergitas, Toleransi, dan Peranserta <i>Stakeholders</i> bersama Sumber Daya Linmas (Perlindungan Masyarakat) dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban Umum					
					2	Meningkatkan Pembinaan dan Fasilitasi SDM Perlindungan Masayarakat dalam Penegakan Peraturan Daerah Khususnya Terkait dengan K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)					
					3	Meningkatkan Peranserta Masyarakat dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan					
				5.1.1.2 Meningkatkan toleransi beragama dan wawasan kebangsaan	1	Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama dan Perilaku Keagamaan di Masyarakat					
					2	Memperkuat Iklim Kondusif bagi Berkembangnya Demokrasi yang Beradab, Memelihara Perdamaian dan Meningkatkan Rasa Persatuan dan Kesatuan					
					3	Meningkatkan Pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan, politik, demokrasi dan toleransi umat beragama					
					4	Meningkatkan Deteksi Dini, Cegah Dini dan Tangkal Dini terhadap Kerawanan Konflik Sosial, Agama dan RAS					
				5.1.2 Meningkatkan Pelestarian Seni dan Budaya Daerah	5.1.2.1 Meningkatkan Perlindungan dan Pelestarian Benda, Situs, Kawasan Cagar Budaya serta Seni Budaya Daerah	1	Melestarikan dan Mengembangkan Kesenian, Sejarah, Tradisi dan Nilai-nilai Budaya Lokal Melalui Aktivitas Seni dan Promosi				
			2			Meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan festival seni dan budaya untuk pelestarian dan aktualisai adat budaya					
			3			Menghidupkan sanggar-sanggar seni dengan meningkatkan peran seniman dan budayawan					
4	Meningkatkan Pemeliharaan, Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Benda, Situs, Kawasan Cagar Budaya Daerah										

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN						
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
6	Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi	6.1 Terwujud nya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel, Transparan dan Inovatif	6.1.1 Meningkatkan Penerapan Kebijakan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Bandar Lampung	6.1.1.1 Meningkatkan Pencapaian Delapan Area Perubahan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	1	Mendorong Perubahan Mental Aparatur untuk Menciptakan Budaya Kerja dan Profesionalitas Sumber Daya Aparatur					
					2	Memperkuat Sistem Pengawasan Internal Pemerintah					
					3	Menerapkan Sistem Akuntabilitas yang Dapat Mendorong Birokrasi Lebih Berkinerja dan Mampu Mempertanggungjawabkan Kinerjanya					
					4	Menerapkan Sistem Kelembagaan/Organisasi yang Mendorong Efisiensi, Efektivitas dan Percepatan Proses Pelayanan dan Pengambilan Keputusan dalam Birokrasi					
					5	Menerapkan Sistem Tatalaksana/Tatakerja Birokrat dengan Proses yang Singkat dan Jelas dalam Rangka Mendorong Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan					
					6	Mengelola SDM yang Mampu Menghasilkan Aparatur yang Profesional					
					7	Memperkuat Sistem Peraturan Perundang-undangan yang Lebih Efektif dan Menyentuh Kebutuhan Masyarakat					
					8	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat dengan Mengoptimalkan Pelayanan Satu Pintu, Termasuk Pelayanan Administrasi di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan					
		6.1.2 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	6.1.2.1 Meningkatkan kualitas perencanaan, akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	1	Meningkatkan konsistensi perencanaan dan penganggaran daerah						
				2	Memanfaatkan Hasil Penelitian dan Kajian dalam Perencanaan Pembangunan Daerah						
				3	Meningkatkan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah						
				4	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah						
				5	Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Belanja Daerah						
				6	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah serta Kepatuhan terhadap Pelaporan Keuangan						

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN						
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
			6.1.3 Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah	6.1.3.1 Peningkatan Pelayanan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah					
					2	Menyediakan Layanan Pajak dan Retribusi yang Mudah, Cepat dan Akurat berbasis IT					
					3	Mengoptimalkan penagihan pajak dan retribusi daerah					
					4	Meningkatkan Koordinasi, Konsultasi dan Evaluasi dalam pengelolaan dana transfer					
					5	Mendorong Kinerja BUMD dan Perusahaan Daerah					
			6.1.4 Terciptanya Inovasi Layanan Publik	6.1.4.1 Meningkatkan akses masyarakat dalam informasi dan layanan publik melalui penciptaan inovasi di segala bidang	1	Mengembangkan e-Government dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik					
					2	Memperkuat dan Memperluas Jangkauan Teknologi Komunikasi dan Informatika					
					3	Menciptakan Inovasi Layanan di Segala Bidang					
					4	Mengembangkan Penelitian untuk Inovasi Daerah					
					5	Memanfaatkan Teknologi Informasi untuk Memberikan Informasi dan Pelayanan Publik					
			6.1.5 Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	6.1.5.1 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Secara Transparan dan Demokratis	1	Meningkatkan Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Secara Komprehensif					
					2	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah dengan menjamin ketersediaan sarana prasarana pendukung kinerja Perangkat Daerah					
					3	Meningkatkan Penyelenggaraan Pelayanan Pembangunan dan Pemerintahan di Kecamatan					
					4	Meningkatkan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Daerah					

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN						
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
7	Mempertahan kan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan	7.1 Terwujud nya keseimba ngan lingkungan dan pembangu nan berkelanju tan	7.1.1 Meningkatkan nya Kualitas Lingkungan Hidup	7.1.1.1 Meningkatkan Upaya Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup melalui Pembangunan yang Berkelanjutan, Berwawasan Lingkungan serta Peduli terhadap Perubahan Iklim	1	Mendorong Pencapaian Kota yang Berketahanan Iklim dan Berkelanjutan					
					2	Memperkuat Sistem Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam yang Menyeluruh					
					3	Pengelolaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau secara Terpadu dengan Penataan Taman-Taman dan Kawasan Hijau Kota yang Ramah Lingkungan					
					4	Pengendalian Pencemaran, Perusakan Lingkungan dan Penguatan Pengolahan Limbah/Persampahan secara Terpadu					
					5	Meningkatkan Layanan Persampahan termasuk Pemeliharaan dan Pembaharuan Infrastruktur Persampahan					
					6	Mendorong Pengembangan Energi Alternatif dalam Upaya Meningkatkan Kemandirian Energi Daerah					
			7.1.2 Meningkatkan nya Pengendalian Resiko Bencana	7.1.2.1 Menyediakan Rencana Aksi Pencegahan dan Mitigasi Bencana Daerah serta Peningkatan Kepedulian Masyarakat dalam Menghadapi Bencana	1	Membangun Sarana dan Prasarana Peringatan Dini yang Terintegrasi Satu Sama Lain, serta Pembangunan Infrastruktur Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana					
					2	Meningkatkan Koordinasi Penanggulangan Bencana antara Masyarakat, Pemerintah dan Stakeholder					
					3	Meningkatkan Ketangguhan Masyarakat dalam Mengurangi dan Menanggulangi Risiko Bencana					
					4	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana					

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan diatas, maka selanjutnya dirumuskan fokus dan kebijakan tahunan pembangunan yang akan memberi arah yang jelas bagi Kota Bandar Lampung dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan RPJMD setiap tahun. Dalam merumuskan fokus dan kebijakan tahunan daerah pada periode pembangunan Tahun 2021-2026 mempertimbangkan kondisi pandemi yang sedang dialami sampai saat ini.

Sejak Pemerintah Indonesia mengonfirmasi kasus pertama *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* pada 2 Maret 2020, banyak strategi dan kebijakan dibuat dalam rangka mencegah transmisi dan kematian signifikan akibat penyakit ini. Pandemi *Covid-19* merupakan salah satu kondisi *force majeure* yang mengancam keselamatan masyarakat Indonesia sehingga perlu direspon dengan cepat oleh seluruh stakeholder diantaranya adalah Pemerintah Daerah.

Wabah *Corona* memaksa semua negara untuk merevisi perencanaan pembangunan, tak terkecuali Indonesia. Target disesuaikan secara realistis, asumsi diubah sesuai keadaan sekarang, dan prioritas program jangka pendek dialihkan sebagian besar untuk mengatasi pandemi *Covid-19*. Sementara kebijakan pembangunan padat modal seperti infrastruktur dilakukan moratorium dan akan dikaji untuk dilaksanakan kembali setelah periode tanggap darurat *Covid-19* dinyatakan berakhir.

Kondisi pandemi ini tentu saja menyulitkan pemerintah untuk memberlakukan pembatasan sepenuhnya kegiatan masyarakat, sementara roda perekonomian harus tetap berjalan. Hal tersebut mengedukasi masyarakat untuk memasuki kehidupan normal baru (*new normal*) serta membiasakan hidup berdampingan dengan *Covid-19* dengan tetap patuh dan disiplin dengan Protokol kesehatan. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam penanganan Pandemi *Covid-19* beserta dampaknya yang telah dan masih akan dilakukan yaitu :

1. Penguatan kesehatan dan pemenuhan layanan dasar masyarakat, melalui :
 - a. Peningkatan upaya promotif dan preventif serta penguatan infrastruktur kesehatan, tenaga medis dan laboratorium;
 - b. Terus mensosialisasikan protokol kesehatan 5 M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas) dan 3 T (*testing, tracing, dan treatment*);
 - c. Meningkatkan fungsi dan koordinasi Satgas *Covid-19* Kota Bandar Lampung sampai ke tingkat kelurahan;
 - d. Melaksanakan vaksinasi *Covid-19* termasuk memantau pelaksanaannya di masyarakat;
2. Pemulihan ekonomi masyarakat dengan mengaktifkan kembali roda perekonomian secara berangsur melalui :
 - a. Mengaktifkan kembali UMKM dan IKM Kota Bandar Lampung dengan memberikan akses permodalan tanpa bunga;
 - b. Memperkuat ketahanan pangan daerah;
 - c. Memberikan pelatihan kepada tenaga kerja dan masyarakat agar lebih terampil dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang mandiri;
3. Jaringan pengaman sosial masyarakat, melalui perluasan program bantuan sosial dan hibah individu/masyarakat terdampak atau memiliki resiko sosial, termasuk perluasan basis data.

Pandemi *Covid-19* masih belum dapat diprediksi kapan akan berakhir, sehingga kedepan seluruh *stakeholder* dan Pemerintah Daerah masih perlu merespon dengan cepat penanganan pandemi ini termasuk juga penanganan dampak sosial ekonomi akibat dari adanya *Covid-19*. Kita berharap tentunya krisis *Covid-19* ini segera berakhir, namun kita juga harus bersiap-siap jika skenario masih berlanjut. Jika pada Tahun 2021 krisis ini selesai, maka di tahun-tahun selanjutnya kita harus fokus pada

pemulihan, terutama pemulihan ekonomi dan pemulihan sektor-sektor yang dapat memajukan kesejahteraan rakyat. Ada dua agenda penting dalam Perencanaan pembangunan daerah Tahun 2021-2026, yaitu pemulihan ekonomi pasca pandemi *Covid-19* dan mendukung pencapaian visi misi dalam RPJMD Tahun 2021-2026.

Merujuk pada strategi dan arah kebijakan Tahun 2021-2026, berikut fokus dan arah kebijakan tahunan daerah:

Tabel 6.4 Fokus dan Arah Kebijakan Tahunan Kota Bandar Lampung

TAHUN 2021 (TAHUN 0)	TAHUN 2022 (TAHUN 1)	TAHUN 2023 (TAHUN 2)	TAHUN 2024 (TAHUN 3)	TAHUN 2025 (TAHUN 4)	TAHUN 2026 (TAHUN 5)
Penanganan pandemi <i>Covid-19</i> melalui pemenuhan infrastruktur, sarana dan prasarana Kesehatan serta pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat	Pemulihan Ekonomi Daerah Melalui Peningkatan Sektor-sektor Strategis untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan	Akselerasi Pertumbuhan dan Pemerataan ekonomi daerah melalui pembangunan disegala bidang	Memacu Pembangunan infrastruktur dan SDM yang berdaya saing untuk Meningkatkan kesejahteraan, kenyamanan serta mengurangi kesenjangan	Menguatkan Pembangunan Manusia, Kemandirian Ekonomi dan infrastruktur perkotaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan	Memperkokoh perekonomian daerah yang berdaya saing untuk kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan

6.3 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Rumusan program menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan indikator kinerja sasaran berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Rangkaian Program dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 disajikan pada Tabel 6.5.

TABEL 6.5 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kota Bandar Lampung

VISI: BANDAR LAMPUNG SEHAT, CERDAS, BERIMAN, BERBUDAYA, NYAMAN, UNGGUL BERDAYA SAING BERBASIS EKONOMI UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT

KODE			MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		SUMBER DATA/ PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG	PROGRAM									2021 (TAHUN 0)		2022 (TAHUN 1)		2023 (TAHUN 2)		2024 (TAHUN 3)		2025 (TAHUN 4)		2026 (TAHUN 5)			TARGET KINERJA	RUPIAH
											TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
			1. Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	1.1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	77,44												79,00-79,48		BPS		
				1.1.1 Meningkatkan Derajat Kesehatan dan Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk			Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	71,37	71,72		71,72		71,89		72,06		72,23		72,23		72,23		BPS, Dinas Kesehatan	
							Prevalensi Stunting pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun)	Persen	6,60	6,60		6,50		6,40		6,30		6,20		6,20		6,20		Dinas Kesehatan	
							Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,109	1,109		1,109		1,109		1,109		1,109		1,109		1,109		BPS	
				1.1.1.1 Mengoptimalkan Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Secara Komprehensif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (SPM)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup	Angka	2	2	175.396.652.000,00	2	184.166.484.600,00	2	193.374.808.830,00	2	203.043.549.271,50	2	213.195.726.735,08	2	223.855.513.071,83	2	1.193.032.734.508,40		Dinas Kesehatan	
						Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Kasus	10	10		10		10		10		10		10		10		10		
						Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun)	Persen	6,60	6,60		6,50		6,40		6,30		6,20		6,20		6,20		6,20		
						Tingkat Prevalensi Tuberculosis per 100.000 Penduduk	Kasus	212	364		393		386		384		379		379		379		379		
						Cakupan Pelayanan BLUD	Persen	100,00	100,00	55436080088,00	100,00	57439315592,40	100,00	60311281372,02	100,00	63326845440,62	100,00	66493187712,65	100,00	69817847098,28	100,00	73284557303,98		RSUD A. Dadi Tjokrodipo	
						Rasio Daya Tampung Rumah Sakit terhadap Jumlah Penduduk	Perbandingan	1:8969	1:7288		1:1689		1:6407		1:6042		1:5773		1:5526		1:5526		1:5526		
1	02	03			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM Kesehatan dengan Kompetensi sesuai Standar	Persen	71,00	71,00	221.250.000,00	73,00	232.312.500,00	75,00	243.928.125,00	80,00	256.124.531,25	83,00	268.930.757,81	83,00	282.377.295,70	83,00	1.504.923.209,77		Dinas Kesehatan	
						Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan sesuai Standar	Persen	59,00	59,00		60,00		60,00		60,00		62,00		62,00		62,00		62,00		
						Persentase Ketersediaan dan Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu	Persen	100,00			100,00	8.000.000.000,00	100,00	8.400.000.000,00	100,00	8.820.000.000,00	100,00	9.261.000.000,00	100,00	9.724.050.000,00	100,00	10.205.050.000,00		RSUD A. Dadi Tjokrodipo	
1	02	04			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Sarana Pelayanan Kefarmasian sesuai dengan Standar	Persen	92,00	92,00	329.540.000,00	93,00	446.017.000,00	94,00	468.317.850,00	95,00	491.733.742,50	96,00	516.320.429,63	96,00	495.585.826,11	96,00	2.747.514.848,23		Dinas Kesehatan	
1	02	05			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat ber PHBS	Persen	70,00	70,00	846.593.000,00	75,00	1.297.922.650,00	73,00	1.362.818.782,50	75,00	1.430.959.221,63	80,00	1.502.507.582,71	80,00	1.577.632.661,84	80,00	8.018.433.898,67		Dinas Kesehatan	

KODE			MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PROGRAM PEMBAKORAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN																KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		SUMBER DATA/ PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
URUSAN	BIDANG	URUSAN									PROGRAM	2021 (TAHUN 0)		2022 (TAHUN 1)		2023 (TAHUN 2)		2024 (TAHUN 3)		2025 (TAHUN 4)		2026 (TAHUN 5)		TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA		RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH
												TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH									
2	23	02				1.1.2.2 Meningkatkan Minat Baca Masyarakat yang Didukung Ketersediaan Perpustakaan yang Memadai	Program Pembinaan Perpustakaan	Rasio Pengunjung Perpustakaan per Tahun	Angka	0,02	0,03	216.000.000,00	0,04	226.800.000,00	0,05	232.140.000,00	0,06	250.047.000,00	0,07	262.549.350,00	0,07	275.676.817,50	0,08	1.463.213.167,50	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan							
2	23	03					Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Koleksi Naskah Kuno dan Nasional yang Teridentifikasi	Jumlah	n/a		3	24.430.000,00	5	25.000.000,00	7	25.000.000,00	9	25.000.000,00	9	25.000.000,00	9	124.430.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan								
						1.1.3 Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, anak dan Generasi Muda		IPG (Indeks Pembangunan Gender)	Angka	93,86	93,87		93,88		93,90		93,93		93,96		93,96		93,96	BPS, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
								Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Tingkat Capaian	Madya	Madya		Madya		Madya		Nindya		Nindya		Nindya		Nindya	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
								Persentase Pemuda Berprestasi	Persen	2,92	2,92		9,61		9,72		9,79		9,88		9,88		9,88	Dinas Kepemudaan dan Olahraga								
2	08	02				1.1.3.1 Meningkatkan kualitas SDM perempuan serta aksesibilitas pelayanan anak dalam rangka mendukung tumbuh kembang yang berkualitas	Program Pengarus Utamaan Gender dan	IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	Angka	71,88	0,00		72,50	800.000.000,00	73,00	840.000.000,00	73,50	882.000.000,00	74,00	926.100.000,00	74,00	972.405.000,00	74,00	4.420.505.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan							
								Persentase ARG pada belanja Langsung APBD	Lembaga	17	0		34		64		93		122		122		122									
								Persentase Jumlah Perempuan yang Mendapatkan Keterampilan	Persen	55,63	0,00		71,88		81,25		90,63		100,00		100,00		100,00									
2	08	03					Program Perlindungan Perempuan	Cekupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan	Persen	100,00	100,00	1.685.170.000,00	100,00	628.013.300,00	100,00	659.413.965,00	100,00	692.384.663,25	100,00	727.003.896,41	100,00	763.354.091,23	100,00	5.155.339.915,90	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
								Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00									
2	08	04					Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase OPO/Lembaga Pemerintah yang Mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender	Persen	9,44	18,88	375.000.000,00	35,55	420.675.000,00	51,67	441.708.750,00	67,78	463.794.187,50	83,88	486.983.896,88	83,88	511.333.091,72	83,88	2.699.494.926,09	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
2	08	05					Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	Persen	2,54	2,54	65.000.000,00	2,79	138.731.200,00	3,04	145.667.760,00	3,29	152.951.148,00	3,54	160.598.705,40	3,54	168.628.640,67	3,54	831.577.454,67	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
								Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta	Persen	62,97	62,97		62,97		63,17		63,37		63,57		63,57		63,57									
								Rasio KDRT yang Tertangani	Persen	0,53	0,53		0,78		1,03		1,28		1,53		1,53		1,53									
								Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	55,31	55,31		55,56		55,81		56,06		56,31		56,31		56,31									

KODE			MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		SUMBER DATA/ PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
URUSAN	BIDANG	URUSAN									PROGRAM	2021 (TAHUN 0)		2022 (TAHUN 1)		2023 (TAHUN 2)		2024 (TAHUN 3)		2025 (TAHUN 4)				2026 (TAHUN 5)		
												TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH					
2	08	06				Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kota Bandar Lampung menjadi Kota Layak Anak	Tingkat Capaian	Madya	Madya	235.000.000,00	Madya	235.000.000,00	Madya	246.750.000,00	Nindya	259.087.500,00	Nindya	272.041.875,00	Nindya	285.643.968,75	Nindya	1.533.523.343,75	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
							Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Persen	62,50	64,10		66,20		68,40		71,70		71,70		71,70		71,70		71,70		
2	08	07				Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan	Persen	100,00	100,00	687.000.000,00	100,00	1.082.109.000,00	100,00	1.136.214.450,00	100,00	1.193.025.172,50	100,00	1.252.676.431,13	100,00	1.315.310.252,68	100,00	6.666.335.306,31	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
							Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
2	19	02				1.1.3.2 Meningkatkan pembangunan pemuda yang berkarakter dan meningkatkan prestasi olahraga secara partisipatif dengan menciptakan kecerdasan emosional dan intelektual	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Presentase Organisasi Pemuda yang Aktif	Persen	100,00	100,00	330.000.000,00	100,00	957.500.000,00	100,00	1.020.125.000,00	100,00	1.084.131.250,00	100,00	1.149.587.062,00	100,00	1.216.566.915,00	100,00	5.757.910.227,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
							Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	Persen	3,54	3,54		3,66		3,77		3,88		3,99		3,99		3,99		3,99		
2	19	03					Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan Pembinaan Olahraga	Persen	100,00	100,00	748.367.625,00	100,00	5.840.786.006,00	100,00	5.514.575.306,00	100,00	5.803.054.071,00	100,00	6.576.703.525,00	100,00	6.941.041.801,00	100,00	31.424.528.334,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
							Peningkatan Pelatih yang Bersertifikasi	Persen	12,96	12,96		50,00		87,03		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
							Sarana dan Prasarana Olahraga yang Terpelihara	Persen	33,33	33,33		50,00		66,67		83,33		100,00		100,00		100,00		100,00		
							Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah	10	10		10		10		10		10		10		10		10		
2	19	04					Program Pengembangan Kapasitas Kepemudaan	Persentase Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Persen	100,00			100,00	1.030.000.000,00	100,00	1.081.500.000,00	100,00	1.135.575.000,00	100,00	1.192.353.000,00	100,00	1.251.971.000,00	100,00	5.691.399.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
			3 Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur dalam skala makro untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial	3.1 Terwujudnya Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas				Indeks Infrastruktur	Angka	92,54 (tinggi)													97,74 (tinggi)		Dinas Pekerjaan Umum	
						3.1.1 Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan		Proporsi Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	Persen	84,81	85,31		85,31		86,31		86,81		87,31		87,31		87,31		87,31	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	07				3.1.1.1 Meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan berserta kelengkapannya	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Panjang Jalan Lingkungan dalam Kondisi Mantab	Persen	85,09	85,59	27.526.000.000,00	86,09	28.902.300.000,00	86,59	30.347.415.000,00	87,09	31.864.785.750,00	87,59	33.458.025.037,50	87,59	35.130.926.289,38	87,59	187.229.452.076,88	Dinas Pekerjaan Umum	
							Rasio Jumlah Lampu PJU terhadap Panjang Jalan Kota	Angka	20,20	20,70		21,20		21,70		22,20		22,70		22,70		22,70		22,70		
1	03	10					Program Penyelenggaraan Jalan	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	Persen	84,81	85,31	64.487.726.000,00	85,81	67.712.112.300,00	86,31	71.097.717.915,00	86,81	74.652.603.810,75	87,31	78.385.234.001,29	87,31	82.304.495.701,35	87,31	438.639.889.728,39	Dinas Pekerjaan Umum	
							Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk	Angka	1,46	1,46		1,46		1,46		1,46		1,46		1,46		1,46		1,46		

KODE			MISI	TUJUAN	SARASAN	STRATEGI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		SUMBER DATA/ PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG	URUSAN PROGRAM									2021 (TAHUN 0)		2022 (TAHUN 1)		2023 (TAHUN 2)		2024 (TAHUN 3)		2025 (TAHUN 4)					2026 (TAHUN 5)	
											TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH		TARGET KINERJA	RUPIAH
					3.1.4 Meningkatkan Kualitas Tata Ruang			Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTKW	Persen	53,24	54,14		54,65		55,15		55,65		56,20		56,20		56,20		Dinas Perumahan dan Permukiman
1	03	08			3.1.4.1 Meningkatkan Pengendalian Pemanfaatan Bangunan Ruang dan Pertanahan nelalui Pengawasan se cara Berke lanjutan untuk Mejamin Kesesuaian Pemanfaatan Lahan dengan Rencana Tata Ruang	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase SLF yang Diterbitkan	Persen	100,00	100,00	110.000.000,00	100,00	600.000.000,00	100,00	630.000.000,00	100,00	661.500.000,00	100,00	694.575.000,00	100,00	729.303.750,00	100,00	3.425.378.750,00	Dinas Perumahan dan Permukiman	
							Persentase KRR yang Terbit	Persen	80,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
							Persentase Pemenuhan Gedung Kantor Pemerintah	Persen	75,00	76,00	189.862.000.000,00	77,00	199.355.100.000,00	78,00	209.322.855.000,00	79,00	219.788.997.750,00	80,00	230.778.447.637,50	80,00	242.317.370.019,38	80,00	1.291.424.770.406,87	Dinas Pekerjaan Umum,	
1	03	09				Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda	Persen	70,00	100,00	170.000.000,00	100,00	262.250.000,00	100,00	275.362.500,00	100,00	289.130.625,00	100,00	303.587.156,25	100,00	318.766.514,06	100,00	1.619.096.795,31	Dinas Perumahan dan Permukiman	
1	03	12			Program Penyelenggara an Penataan Ruang	Persentase Ketaatan terhadap RTKW	Persen	53,24	54,14	75.000.000,00	54,65	1.018.750.000,00	55,15	1.070.187.500,00	55,65	1.124.196.875,00	56,20	1.180.906.718,75	56,20	1.240.452.055,19	56,20	5.709.493.148,94	Dinas Perumahan dan Permukiman		
						Luasan RTH Publik sebesar 20Persen dari Luas Wilayah Kota atau Kawasan Perkotaan	Persen	4,40	4,40		4,40		4,60		4,70		4,80		4,90		4,90				
2	10	02			Program Pengelolaan lain Lokasi	Persentase Penerbitan lain Lokasi	Persen	100,00	100,00	30.000.000,00	100,00	31.500.000,00	100,00	33.075.000,00	100,00	34.728.750,00	100,00	36.465.187,50	100,00	38.288.446,88	100,00	204.057.384,38	Dinas Perumahan dan Permukiman		
3	32	04			Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Cakupan Masyarakat di Wilayah Kumuh yang Mendapatkan Pemahaman Transmigrasi Dibandingkan Total Wilayah Kumuh	Persen	12,00	12,00	37.970.800,00	12,00	39.869.340,00	12,00	41.862.807,00	12,00	43.955.947,35	12,00	46.153.744,72	12,00	48.461.431,95	12,00	258.274.071,02	Dinas Tenaga Kerja		
					3.1.5 Menurunkan Masalah Kemacetan			Persentase Titik Kemacetan yang Tercapaian	Persen	30,00	40,00		50,00		60,00		70,00		80,00		80,00		80,00		Dinas Perhubungan
2	15	02			3.1.5.1 Meningkatkan sarana prasana serta layanan perhubungan yang terpelihara dan dapat menjamin keamanan, keselamatan, kenyamanan dan waktu tempuh	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Pelayanan Angkutan Darat	Persen	0,0826	0,0850	3.942.725.608,00	0,0875	3.964.626.608,00	0,0900	4.162.857.938,40	0,0925	4.371.000.835,32	0,0950	4.589.550.877,09	0,0950	4.819.028.420,94	0,0950	25.849.790.287,75	Dinas Perhubungan	
							Persentase Sarana dan Prasarana yang Memenuhi Standar dalam Kondisi Baik	Persen	96,00	96,00		96,00		97,00		97,00		98,00		98,00		98,00			
							Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10 ribu Keberangkatan	Kejadian	220	200		195		190		185		180		180		180			
2	15	05			Program Pengelolaan Perkeretaapian	Tingkat Kecelakaan di Pitu Perlintasan Sebidang Kereta Api Yang dijaga	Kejadian	1	1	285.200.000,00	1	285.200.000,00	1	299.460.000,00	1	314.433.000,00	1	330.154.650,00	1	346.662.382,50	1	1.861.110.032,50	Dinas Perhubungan		

KODE			MISI	TUJUAN	SARASAN	STRATEGI	PROGRAM PEMBAKORAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		SUMBER DATA/ PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB					
URUSAN	BIDANG	URUSAN PROGRAM									2021 (TAHUN 0)		2022 (TAHUN 1)		2023 (TAHUN 2)		2024 (TAHUN 3)		2025 (TAHUN 4)		2026 (TAHUN 5)			TARGET KINERJA	RUPIAH			
											TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH						
			4 Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat	4.1 Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi melalui Ekonomi Kerakyatan				Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-1,85												5,00 - 6,00			BPS			
									Inflasi	Persen	1,93													3,0 ± 1			BPS	
									Rasio Gini	Angka	0,359													0,313			BPS	
						4.1.1 Meningkatkan Sektor Unggulan Daerah			Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persen	20,97	21,10		21,20		21,29		21,34		21,45		21,45		21,45			BPS	
										Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB	Persen	13,30	13,65		14,05		14,15		14,30		14,45		14,45		14,45			BPS
										Kontribusi Jasa, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	Persen	15,42	15,33		15,34		15,36		15,38		15,45		15,45		15,45			BPS
										Persentase UMKM yang Meningkatkan Labanya	Persen	26,30	26,30		31,50		34,20		39,49		44,70		44,70		44,70			Dinas Koperasi UKM
										Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat	Persen	8,28	16,96		18,11		19,12		20,34		21,53		21,53		21,53			Dinas Koperasi UKM
3	31	02				4.1.1.1 Meningkatkan kinerja sektor industri dengan didukung oleh penguatan dan pengembangan IKM/IRT	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pertumbuhan Industri	Persen	2,38	2,43	5.570.225.000,00	2,52	7.369.465.850,00	2,62	7.729.539.142,50	2,71	8.116.436.044,63	2,77	8.522.677.824,36	2,77	8.949.231.750,07	2,77	46.257.575.611,56			Dinas Perindustrian	
									Cakupan IKM yang mendapatkan pembinaan dibandingkan dengan seluruh IKM (incremental)	Persen	12,44	8,51		12,45		12,55		12,75		12,91		12,91		12,91				
									Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	Persen	50,00	9,09		13,64		18,18		22,73		27,27		27,27		27,27		27,27		
3	31	03					Program Pengendalian Iain Usaha Industri	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Iain Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi Terkait	Persen	53,85			60,00	155.000.000,00	62,50	162.750.000,00	64,71	170.887.500,00	66,67	179.431.875,00	66,67	188.403.468,75	66,67	856.472.843,75			Dinas Perindustrian	
3	31	04						Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	IKM yang Terinformasi dalam SINAS	IKM	6	7	358.120.000,00	8	225.000.000,00	9	236.250.000,00	10	248.062.500,00	11	260.465.625,00	11	273.488.906,25	11	1.601.387.031,25			Dinas Perindustrian
3	30	03				4.1.1.2 Mengembangkan Perdagangan Sarana Baik Formal maupun Informal dengan Tetap Memprioritaskan Perlindungan Konsumen	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Jumlah Pasar Yang Ditata	Persen	40,00							20,00	350.000.000	20,00	367.500.000	20,00	385.875.000	100,00	1.103.375.000,00			Dinas Perdagangan	
3	30	04							Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Kenaikan Harga Barang Pokok dan Bahan Penting	Persen	25,00	20,00	394.550.000,00	19,00	414.277.500,00	18,00	434.991.375,00	17,00	456.740.943,75	16,00	479.577.990,94	16,00	503.556.890,48	16,00	2.683.694.700,17		
3	30	05			Program Promosi Perdagangan dan Mini Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan			Cakupan Promosi Perdagangan dan Mini Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Persen	20,00	20,00	549.850.000,00	20,00	577.342.500,00	60,00	606.209.625,00	80,00	636.520.106,25	100,00	668.346.111,56	100,00	701.763.417,14	100,00	3.740.031.759,95			Dinas Perdagangan	

KODE				STRATEGI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		SUMBER DATA/ PERANGKAT DAERAH PEMANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM						2021 (TAHUN 0)		2022 (TAHUN 1)		2023 (TAHUN 2)		2024 (TAHUN 3)		2025 (TAHUN 4)					2026 (TAHUN 5)	
									TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH					
3		30	06		Program Standarindasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Jumlah UTPP Yang Ditera/Tera Ulang	Persen	69,54	86,00	130.000.000,00	86,10	136.500.000,00	86,30	143.325.000,00	86,80	150.491.250,00	87,00	158.015.812,50	87,00	165.916.603,13	87,30	884.248.665,63	Dinas Perdagangan
						Persentase Jumlah UTPP Yang Diawasi	Persen	10,57	86,00		86,00		86,50		86,80		87,00		87,00		87,50		
3		30	07		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Keikutsertaan pada Kegiatan Promosi Produk Asli Daerah	Persen	n/a						65,00	150.000.000,00	70,00	157.500.000,00	70,00	165.375.000,00	70,00	472.875.000,00	Dinas Perdagangan	
3		26	02		4.1.1.3 Mengembangkan Industri/Jasa Kerpariwisataan secara Terpadu	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persen	100,00	100,00	80.000.000,00	100,00	84.000.000,00	100,00	88.200.000,00	100,00	92.610.000,00	100,00	97.340.500,00	100,00	102.102.525,00	100,00	544.153.025,00	Dinas Pariwisata
						PAD Sektor Pariwisata	Persen	23,37	23,40		23,45		23,50		25,55		25,60		25,60		25,60		
3		26	03		Program Pemasaran Pariwisata	Lama kunjungan Wisata	Hari	1,50	1,50	100.000.000,00	1,60	105.000.000,00	1,70	110.250.000,00	1,80	115.762.500,00	1,90	121.550.625,00	1,90	127.628.156,25	1,90	680.191.281,25	Dinas Pariwisata
						Persentase Rata- rata Belanja Wisatawan Nusantara	Rupiah/ Kunjungan	1.300.000,00	1.400.000,00		1.500.000,00		1.600.000,00		1.700.000,00		1.800.000,00		1.800.000,00		1.800.000,00		
						Persentase Rata- rata Belanja Wisatawan Mancanegara	Rupiah/ Kunjungan	9.800.000,00	9.950.000,00		10.100.000,00		10.250.000,00		10.400.000,00		10.550.000,00		10.550.000,00		10.550.000,00		
3		26	04		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	Persen	n/a			2,35	100.000.000,00	2,36	105.000.000,00	2,37	110.250.000,00	2,38	115.762.500,00	2,38	121.550.625,00	2,38	552.563.125,00	Dinas Pariwisata
3		26	05		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Penyenggaraan Event Ekonomi Kreatif	Persen	37,50	50,00	1.675.000.000,00	50,00	1.758.750.000,00	75,00	1.846.687.500,00	75,00	1.939.021.875,00	100,00	2.035.972.968,75	100,00	2.137.771.617,19	100,00	11.393.203.960,94	Dinas Pariwisata
2		17	03		4.1.1.4 Mengembangkan Koperasi dan UMKM sebagai perwujudan ekonomi kerakyatan diertai peningkatan kualitas dan perluasan peluang usaha untuk mendorong tumbuh lambungnya wira usaha baru	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persen	27,09			31,02	100.000.000,00	33,09	100.000.000,00	35,11	115.762.500,00	35,89	123.000.000,00	35,89	123.000.000,00	35,89	561.762.500,00	Dinas Koperasi UKM
2		17	04			Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persen	26,35	45,23	90.000.000,00	45,90	90.000.000,00	46,50	90.000.000,00	47,21	90.000.000,00	47,85	90.000.000,00	47,85	90.000.000,00	47,85	540.000.000,00	Dinas Koperasi UKM
2		17	05			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persen	-18,50	0,22	75.000.000,00	0,29	484.819.200,00	0,36	505.310.160,00	0,43	531.825.668,00	0,50	564.416.951,40	0,50	588.137.798,97	0,50	2.749.509.778,37	Dinas Koperasi UKM
2		17	06			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persen	-8,10	3,34	55.000.000,00	3,99	1.234.500.000,00	4,66	1.293.725.000,00	4,87	1.363.911.250,00	5,38	1.435.206.000,00	5,38	1.504.766.000,00	5,38	6.887.108.250,00	Dinas Koperasi UKM
						Persentase fasilitasi penerbitan Sertifikat Nomor untuk Koperasi (NUK)	Persen	18,32	20,60		22,83		25,00		27,12		29,54		29,54		29,54		
2		17	07		Program Pemberdayaan Usaha Meneengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rasio Pertumbuhan Wirasaha Baru Berakala Mikro	Persen	12,80	15,00	250.000.000,00	18,40	315.000.000,00	21,00	375.000.000,00	23,60	433.951.625,00	26,80	444.000.000,00	26,80	435.000.000,00	26,80	2.252.951.625,00	Dinas Koperasi UKM
						Persentase UKM Non BPR LKM Aktif	Persen	36,89	37,50		38,00		38,50		40,50		42,75		42,75		42,75		
						Persentase BPR/LKM Aktif	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		

KODE		MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		SUMBER DATA/ PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
URUSAN KEMENTERIAN	URUSAN DAERAH									2021 (TAHUN 0)		2022 (TAHUN 1)		2023 (TAHUN 2)		2024 (TAHUN 3)		2025 (TAHUN 4)		2026 (TAHUN 5)					
										TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH		
2	17	08				Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Persen	63,10	64,50	1.049.304.000,00	65,50	660.000.000,00	66,50	660.000.000,00	67,30	720.000.000,00	68,50	750.000.000,00	68,50	825.550.040,33	68,50	4.664.854.040,33	Dinas Koperasi UKM	
							Pertumbuhan Produktivitas UMKM	Persen	2,70	2,70		3,40		4,70		5,40		8,20		8,20		8,20			
				4.1.2 Meningkatkan Investasi dan memperluas kesempatan			Pertumbuhan Nilai Investasi (PMDN)	Persen	14,99	15,49		15,99		16,49		16,99		17,49		17,49		17,49		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
							Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA)	Persen	4,05	4,55		5,05		5,55		6,05		6,55		6,55		6,55		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
							Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	8,78	8,78		8,51		8,10		7,28		7,12		7,12		7,12		BPS, Dinas Tenaga Kerja	
2	18	02				4.1.2.1 Penguatan iklim investasi dengan didukung promosi, sumber daya, sarana dan prasarana serta teknologi informasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah/milial Investasi PMA	Dolar (\$)	630.598.514		649.658.354,09	100.000.000,00	659.403.229,40	110.000.000,00	669.294.277,84	115.000.000,00	679.294.277,84	125.000.000,00	689.294.277,84	130.000.000,00	689.294.277,84	580.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
							Jumlah/milial Investasi PMDN	Juta Rupiah (Rp)	2.210.331,00			2.277.138,25		2.311.295,33		2.345.964,76		2.744.544,17		2.445.964,76		2.445.964,76			
							Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Orang/ Perusahaan	7,85			8,85		9,35		9,85		10,35		10,35		10,35			
2	18	03				Program Promosi Penanaman Modal	Persentase promosi penanaman modal	Persen	100,00	100,00	129.350.000,00	100,00	130.000.000,00	100,00	135.000.000,00	100,00	140.000.000,00	100,00	150.000.000,00	100,00	150.000.000,00	100,00	834.350.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
2	18	04				Program Pelayanan Penanaman Modal	BKM Bidang Perizinan	Angka	84,37	85,50	640.000.000,00	85,60	650.000.000,00	86,30	660.000.000,00	86,70	670.000.000,00	87,20	680.000.000,00	87,20	700.000.000,00	87,20	4.000.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
2	18	05				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kenaikan/Pemurunan Nilai Realisasi PMDN	Persen	14,99	16,49	326.122.000,00	18,47	342.428.100,00	20,21	359.549.505,00	21,95	377.526.980,25	23,69	396.403.329,26	23,69	416.223.495,73	23,69	2.218.253.410,24	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
2	18	06				Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Penyajian Data Penanaman Modal	Persen	80,00			83,00	100.000.000,00	84,00	125.000.000,00	85,00	135.000.000,00	85,00	135.000.000,00	85,00	140.000.000,00	85,00	635.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
4	01	02				4.1.2.2 Mengembangkan skema investasi dan kerjasama dalam bentuk kemitraan yang mampu menciptakan kesempatan kerja	Program Pemertintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kerjasama antar Wilayah dan Stakeholder yang Terlaksana dengan Baik	Persen	55,00	60,00	354.643.900,00	65,00	372.376.095,00	70,00	390.994.899,75	75,00	410.544.644,74	80,00	431.071.876,97	85,00	452.625.470,82	100,00	2.412.256.887,28	Sekretariat Daerah (Bagian Kerjasama)
2	07	02					Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Informasi Data Ketenagakerjaan yang Disusun Berbasis Sistem Informasi	Persen	50,00	50,00	99.800.000,00	100,00	104.790.000,00	100,00	110.029.500,00	100,00	115.530.975,00	100,00	121.307.523,75	100,00	127.372.899,94	100,00	678.830.898,69	Dinas Tenaga Kerja

KODE		MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		SUMBER DATA/ PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG									URUSAN	PROGRAM															
												2021 (TAHUN 0)		2022 (TAHUN 1)		2023 (TAHUN 2)		2024 (TAHUN 3)		2025 (TAHUN 4)		2026 (TAHUN 5)				
												TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH			
2		07	03			Program Hubungan Industrial	Persentase Sengedja Pengusaha- Pekerja per Tahun	Persen	55,73	55,73	389.016.530,00	55,21	408.467.377,50	54,68	428.890.746,38	52,32	450.335.283,69	51,55	472.852.047,88	51,55	496.494.650,27	51,55	2.646.056.655,72	Dinas Tenaga Kerja		
							Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PJB)	Persen	39,58	39,58		42,00		49,02		52,63		53,92		53,92		53,92		53,92		
							Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak/PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	Persen	50,00	50,00		62,00		75,00		79,00		82,00		82,00		82,00		82,00		
2		07	03			4.1.2.3 Meningkatkan Kapasitas Tenaga Kerja, Pengembangan Kesempatan Kerja dan Perlindungan Ketenagakerjaan	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga terhadap Total Kesempatan Kerja	Persen	25,13	27,50	186.238.500,00	29,25	195.550.425,00	30,75	205.327.946,25	31,25	215.594.343,56	31,75	226.374.060,74	31,75	237.692.763,78	31,75	1.266.778.039,33	Dinas Tenaga Kerja	
							Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan berbasis Kompetensi	Persen	20,00	20,00		50,00		75,00		75,00		80,00		80,00		80,00		80,00		
2		07	04				Program Penempatan Tenaga Kerja	Rasio penduduk yang bekerja	Persen	91,20	91,20	225.000.000,00	93,12	236.250.000,00	92,55	248.062.500,00	94,81	260.465.625,00	95,70	273.488.906,25	95,70	287.163.351,56	95,70	1.530.430.382,81	Dinas Tenaga Kerja	
							Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas	Persen	91,21	91,21		92,57		93,02		93,97		94,42		94,42		94,42		94,42		
							Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Persen	2,84	2,84		3,41		3,52		4,79		4,79		4,79		4,79		4,79		
							Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	67,79	70,00		72,35		74,90		76,62		78,26		79,86		79,86		79,86		
						4.1.3 Menurunnya Kemiskinan																				
							Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	Persen	91,19	91,29		91,43		91,57		91,71		91,85		91,85		91,85		91,85	BPS	
							Pendapatan Per Kapita Penduduk	Juta Rp	50,66	51,00 - 53,00		54,00 - 56,00		57,00 - 59,00		61,00-63,00		65,00 - 67,00		65,00 - 67,00		65,00 - 67,00		65,00 - 67,00	BPS	
1		06	02			4.1.3.1 Mengoptimalkan Peningkatan Kemiskinan melalui Pelaksanaan Program-Program Unggulan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat	Program Pemberdayaan Sosial	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sosial	Persen	70,00	75,00	725.719.000,00	78,00	9.299.504.950,00	81,00	9.722.480.197,50	84,00	10.208.603.457,38	87,00	10.719.032.980,24	87,00	11.254.984.779,26	87,00	51.890.325.364,37	Dinas Sosial	
2		13	03				Program Peningkatan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pembinaan POKJANAL POSYANDU	Kelurahan	704 Poyandu Aktif yang Terdata	126	100.000.000,00											126	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	
2		13	04				Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Ketersediaan Data Kelurahan yang Akurat dan Dilauti Perkembangan Kelurahan dalam Aplikasi PRODESKEL dan EPODESKEL Milik Kemendagri	Persen	50,00	50,00	475.000.000,00	50,00	498.750.000,00	75,00	523.687.500,00	75,00	549.871.875,00	100,00	577.365.468,75	100,00	606.233.742,19	100,00	3.230.908.585,94	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	

URUSAN BIDANG URUSAN PROGRAM	KODE	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		SUMBER DATA/ PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
										2021 (TAHUN 0)		2022 (TAHUN 1)		2023 (TAHUN 2)		2024 (TAHUN 3)		2025 (TAHUN 4)					2026 (TAHUN 5)	
										TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH			
2	13	03				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Persen	71,43	95,00	550.000.000,00	95	835.000.000,00	95	876.750.000,00	95	920.586.750,00	95	966.616.437,50	95	1.014.946.859,38	95	5.163.900.046,88	Dinas Pemberdayaan Masyarakat
						Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	Persen	85,00	95,00		95,00		95,00		95,00		95,00		95,00		95,00			
7	01	03				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Organisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan	Persen	80,00	80,00	21.565.106.943,00	80,00	22.643.362.290,15	80,00	23.775.530.404,66	85,00	24.964.306.924,89	85,00	26.212.522.271,13	90,00	27.523.148.384,69	90,00	146.683.977.218,52	Kecamatan
2	09	03				Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan Pangan Utama (kkal/kap hari)	Persen	95,00	98,00	400.796.000,00	100,00	525.835.800,00	102,00	552.127.590,00	105,00	579.733.969,50	110,00	608.720.667,98	110,00	639.156.701,37	110,00	3.306.370.728,85	Dinas Pangan
						Ketersediaan Energi per kapita		2.490,00	2.500,00		2.510,00		2.520,00		2.530,00		2.540,00		2.540,00		2.540,00			
						Ketersediaan Protein per Kapita		72,10	72,14		72,16		72,18		72,20		72,22		72,22		72,22		72,22	
						Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah	Persen	24,08	24,08		30,00		40,00		50,00		60,00		60,00		60,00		60,00	
						Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	skor	85,50	86,00		86,20		86,50		86,75		87,00		87,00		87,00		87,00	
2	09	04				Program Peningkatan Keragaman Pangan	Persentase Daerah Rawan Pangan	Persen	8,70	8,00	49.000.000,00	7,00	51.450.000,00	6,00	54.022.500,00	5,00	56.723.625,00	5,00	59.599.806,25	5,00	62.537.796,56	5,00	333.293.727,81	Dinas Pangan
2	09	05				Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pengawasan dan Pemantauan Keamanan Pangan	Persen	85,00	85,50	141.225.000,00	86,00	148.286.250,00	87,00	155.700.562,50	87,50	163.485.590,63	88,00	171.659.870,16	88,00	180.242.863,66	88,00	960.600.136,95	Dinas Pangan
3	27	02				Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas Padi	kg/ha	57,70	58,00	692.083.000,00	58,50	1.122.687.150,00	58,75	1.195.000.000,00	58,95	300.000.000,00	59,10	300.000.000,00	59,10	300.000.000,00	59,10	3.909.770.150,00	Dinas Pertanian
						Produktivitas Jagung	kg/ha	48,13	48,30		48,50		48,87		49,15		49,30		49,30		49,30			
						Produksi Daging	Ton/Tahun	4.986,40	5.078,67		5.180,24		5.283,35		5.389,52		5.497,32		5.497,32		5.497,32		5.497,32	
						Produksi Telur	Ton/Tahun	124,41	124,12		126,90		129,43		132,03		134,67		134,67		134,67		134,67	
3	27	03				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Sumur Bor untuk Peningkatan Produksi Pertanian	Jumlah	20,00	20,00	1.950.000.000,00	20,00	3.550.000.000,00	20,00	3.100.000.000,00	20,00	3.310.000.000,00	20,00	3.475.500.000,00	20,00	3.232.843.062,00	20,00	18.618.343.062,00	Dinas Pertanian
						Persentase Penggunaan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian	Persen	80,00	80,00		80,00		80,00		80,00		80,00		80,00		80,00		80,00	
3	27	04				Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Angka Kejadian Penyakit	Persen	8,20	7,50	229.965.928,00	6,80	241.464.224,40	6,10	253.537.435,62	5,40	270.000.000,00	4,70	280.000.000,00	4,70	290.000.000,00	4,70	1.564.967.588,02	Dinas Pertanian
3	27	05				Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persen	100,00			100,00	50.000.000,00	100,00	50.000.000,00	100,00	50.000.000,00	100,00	50.000.000,00	100,00	50.000.000,00	100,00	250.000.000,00	Dinas Pertanian

KODE			MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		SUMBER DATA/ PERANGKAT DAERAH PEMANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG	URUSAN PROGRAM									2021 (TAHUN 0)		2022 (TAHUN 1)		2023 (TAHUN 2)		2024 (TAHUN 3)		2025 (TAHUN 4)					2026 (TAHUN 5)	
											TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH		TARGET KINERJA	RUPIAH
3	27	07					Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan Bina Kelompok Petani	Persen	60,00			70,00	300.000.000,00	75,00	300.000.000,00	80,00	200.000.000,00	85,00	200.000.000,00	85,00	400.000.000,00	85,00	1.400.000.000,00	Dinas Pertanian
3	25	03					Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Binaan Biologis yang Aman	Persen	0,030	0,030	520.000.000,00	0,031	450.250.000,00	0,032	452.025.000,00	0,032	474.626.250,00	0,033	498.357.562,51	0,033	523.275.440,62	0,033	2.918.534.253,13	Dinas Kelautan dan Perikanan
							Cakupan Bina Kelompok Nelayan		Persen	33,00	33,00		34,00		36,00		38,00		40,00		40,00		40,00		
							Produksi Perikanan Kelompok Nelayan		Persen	58,48	58,48		58,48		58,47		58,47		58,48		58,48		58,48		
							Produksi Perikanan Tangkap		Ton	3232,02	3057,12		3118,26		3180,62		3244,23		3309,11		3309,11		3309,11		
3	25	04					Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	131,40	132,58	130.000.000,00	135,23	152.750.000,00	137,93	143.325.000,00	140,69	150.491.250,00	143,50	158.015.812,50	143,50	165.916.603,13	143,50	900.498.665,63	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	05					Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Compliance (Persentase Kepatuhan) Pelaku Usaha Bidang Kelautan dan Perikanan	Persen	1,50	1,50	60.450.000,00	2,50	45.000.000,00	4,00	66.646.125,00	5,00	69.978.431,25	9,00	73.477.352,81	9,00	77.151.220,45	9,00	392.703.129,52	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	06					Program Pengalihan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kap/Th	41,22	34,87	165.000.000,00	36,54	271.222.500,00	37,93	303.187.500,00	40,22	318.346.875,00	43,14	334.264.218,75	43,14	350.977.429,69	43,14	1.742.998.523,44	Dinas Kelautan dan Perikanan
							4.1.4 Meningkatkan Penanganan PMKS																		
								Persentase PMKS yang Tertangani	Persen	70,00	74,00		77,00		80,00		84,00		88,00		88,00		88,00		Dinas Sosial
1	06	04					4.1.4.1 Meningkatkan perlindungan sosial dan pemberdayaan PMKS	Program Rehabilitasi Sosial (SPM)	Persen	70,00	74,00	280.000.000,00	77,00	324.900.000,00	80,00	341.145.000,00	84,00	358.202.000,00	88,00	376.111.750,00	88,00	394.917.837,50	88,00	2.075.276.587,50	Dinas Sosial
								Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKISMS) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
1	06	05					Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	18,00	20,00	3.913.355.842,00	21,00	4.109.023.634,10	22,00	4.314.474.815,81	23,00	4.530.198.556,60	24,00	4.756.708.484,43	24,00	4.994.543.908,65	24,00	26.618.305.241,57	Dinas Sosial
1	06	06					Program Penanganan Bencana (SPM)	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	Persen	100,00	100,00	5.050.000.000,00	100,00	5.302.500.000,00	100,00	5.567.625.000,00	100,00	5.846.006.250,00	100,00	6.138.306.562,50	100,00	6.445.221.890,63	100,00	34.349.659.703,13	Dinas Sosial
								Persentase Korban Bencana yang Diintervensi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		

URUSAN BIDANG URUSAN PROGRAM	KODE	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		SUMBER DATA/ DAERAH PENANGGUNG JAWAB					
										2021 (TAHUN 0)		2022 (TAHUN 1)		2023 (TAHUN 2)		2024 (TAHUN 3)		2025 (TAHUN 4)					2026 (TAHUN 5)				
										TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH						
		5 Mengembangkan kan Masyarakat Agamis, Berbudaya, dan Mengembang kan Budaya Daerah untuk membangun masyarakat yang religius	5.1 Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat dan bernegara				Angka Kriminalitas yang Tertangani	Angka	1.302													1.724		Badan Keastian Bangsa dan Politik			
							Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Persen	15,00														85,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
					5.1.1 Meningkatkan Kemamanan dan Ketertiban umum serta Toleransi Antar Umat Beragama				Angka Kriminalitas yang Tertangani	Angka	1.302	1.411		1.531		1.625		1.679		1.724		1.724		1.724		Badan Ke satuan Bangsa dan Politik	
								Persentase Konflik Sosial, Keagamaan dan Ras yang Tertangani	Persen	78,00	78,00		78,50		79,00		79,50		80,00		80,00		80,00		80,00		Badan Ke satuan Bangsa dan Politik
1	05			02		5.1.1.1 Mengendalikan Keamanan, Ketertiraman dan Ketertiban Masyarakat serta Penegakan Peraturan Daerah	Program Peningkatan Ketertiran dan Ketertiban Umum (SPM)	Persentase Pengakuan Perda	Persen	100,00	100,00	1.463.445.169,00	100,00	1.536.617.427,45	100,00	1.613.448.298,82	100,00	1.694.120.713,76	100,00	1.778.826.749,45	100,00	1.867.768.086,92	100,00	9.954.226.445,41		Satuan Polisi Pamong Praja	
					Tingkat Penyelesaian Penyeenggaraan K3			Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
7	01			04			Program Koordinasi Ketertiran dan Ketertiban Umum	Presentase Linmas (Perlindungan Masyrakati) dan Masyrakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persen	100,00	100,00	44.611.435.972,00	100,00	47.305.507.770,60	100,00	49.679.108.159,13	100,00	52.168.313.567,09	100,00	54.780.479.245,44	100,00	57.521.753.207,71	100,00	306.066.597.921,97		Kecamatan	
8	01			02			5.1.1.2 Meningkatkan toleransi beragama dan wawasan kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persen	70,00	70,00	400.000.000,00	70,00	420.000.000,00	70,00	441.000.000,00	70,00	463.050.000,00	70,00	486.202.500,00	70,00	510.512.625,00	70,00	2.720.765.125,00		Badan Ke satuan Bangsa dan Politik
8	01			03					Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lemaba Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	Persen	70,00	70,00	25.000.000,00	70,00	2.185.000.000,00	70,00	2.288.000.000,00	70,00	112.771.150.000,00	70,00	2.484.707.000,00	70,00	2.603.942.000,00	70,00	122.357.799.000,00	
8	01	04		Program Pemberdayaan dan Penguasaan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang dilina			Persen		50,00	50,00	150.000.000,00	50,00	466.500.000,00	50,00	489.825.000,00	50,00	514.311.750,00	50,00	540.027.937,50	50,00	567.030.234,38	50,00	2.727.694.921,88		Badan Ke satuan Bangsa dan Politik	
8	01	05			Program Pembiayaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya			Persentase Penanganan Konflik Keagamaan dan Ras	Persen	100,00	100,00	422.300.000,00	100,00	550.000.000,00	100,00	550.000.000,00	100,00	600.000.000,00	100,00	500.000.000,00	100,00	500.000.000,00	100,00	3.122.300.000,00		Badan Ke satuan Bangsa dan Politik	

KODE			MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		SUMBER DATA/ PERANGKAT DAERAH PEMANGGUNG JAWAB			
URUSAN	BIDANG	URUSAN PROGRAM									2021 (TAHUN 0)		2022 (TAHUN 1)		2023 (TAHUN 2)		2024 (TAHUN 3)		2025 (TAHUN 4)					2026 (TAHUN 5)		
											TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH						
4	02	01					Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Pencapaian dan Anggaran Setoran DPRD yang Terintegrasi dengan Program- Program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Persentase data dan informasi perekonomian daerah yang digunakan untuk analisa kebijakan Anggaran	Dokumen	Ada	Ada	60.766.420.616,00	Ada	63.927.011.545,92	Ada	67.254.190.915,27	Ada	70.756.887.268,54	Ada	74.444.517.516,00	Ada	78.327.014.287,70	Ada	415.476.042.149,44	Sekretariat DPRD	
4	02	02					Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Rencana Tahunan (RKPD) yang Terintegrasi dengan Program- Program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran	Dokumen	Ada	Ada	39.005.623.800,00	Ada	40.955.904.990,00	Ada	43.003.700.239,50	Ada	45.153.885.251,48	Ada	47.411.579.514,05	Ada	49.782.158.489,75	Ada	265.312.852.284,78	Sekretariat DPRD	
5	03	02					Program Kepegawaian Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Persen	8,32	10,50	3.497.836.725,00	13,90	3.672.728.561,25	16,60	3.856.364.989,31	18,30	4.049.183.238,78	21,04	4.251.642.400,72	21,04	4.464.224.520,75	21,04	23.791.980.435,81	Badan Kepegawaian Daerah	
							Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	Persen	39,30	51,60		63,80		75,90		82,05		93,91		93,91			93,91			
							Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah	Jabatan	39	39		39		39		39		39		39		39		234		
							Jumlah Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah	Jabatan	207	207		207		207		207		207		207		207		1.242		
							Jumlah Jabatan Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah	Jabatan	4.741	3.485		3.485		3.485		3.485		3.485		3.485		3.485		3.485		
5	04	02					Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase CASN yang Lolos Pelatihan Dasar Formasi Umum	Persen	100,00	100,00	2.100.000.000,00	100,00	2.205.000.000,00	100,00	2.315.250.000,00	100,00	2.431.012.500,00	100,00	2.552.563.125,00	100,00	2.680.191.281,25	100,00	14.284.016.906,25	Badan Kepegawaian Daerah	
6	01	02					Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan OPD	Persen	80,00	80,00	3.570.731.750,00	80,00	3.749.268.337,50	85,00	3.936.731.754,38	85,00	4.133.568.342,09	90,00	4.340.246.759,20	90,00	4.557.259.097,16	90,00	24.287.806.040,33	Inspektorat	
							Persentase Tindak Lanjut Temuan	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
							Persentase Penanganan Kasus Pengaduan	Persen	85,00	85,00		85,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		

URUSAN	BIDANG	URUSAN PROGRAM	KODE	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		SUMBER DATA / PERANGKAT DAERAH PEMANGGUNG JAWAB			
												2021 (TAHUN 0)		2022 (TAHUN 1)		2023 (TAHUN 2)		2024 (TAHUN 3)		2025 (TAHUN 4)		2026 (TAHUN 5)			TARGET KINERJA	RUPIAH	
												TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH				
6	01	03						Program Perumusan Kelajakan, Pendampingan dan Asistensi APF	Persentase Pendampingan dan Asistensi APF	Persen	75,00	75,00	507.500.000,00	75,00	2.100.000.000,00	80,00	2.205.000.000,00	80,00	2.315.250.000,00	85,00	2.431.012.500,00	85,00	2.552.563.125,00	85,00	12.111.325.625,00	Inspektorat	
7	01	02						Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan	Persen	100,00	100,00	66.020.640.468,00	100,00	69.321.672.491,40	100,00	72.787.756.115,97	100,00	76.427.143.921,77	100,00	80.248.501.117,86	100,00	84.260.926.173,75	100,00	449.066.640.288,75	Kecamatan	
2	12	02						Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persen	95,00	97,00	1.862.146.000,00	99,00	1.955.253.300,00	100,00	2.053.015.965,00	100,00	2.155.666.763,25	100,00	2.263.450.101,41	100,00	2.376.622.606,48	100,00	12.666.154.736,15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
								Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah		Sudah		Sudah		Sudah		Sudah		Sudah		Sudah		Sudah		
								IKM Pelayanan	Persen	83,36	84,27		85,11		85,96		86,62		87,69		87,69		87,69		87,69		
2	12	03						Program Pencatatan Sipil	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	Persen	96,07	97,00	262.490.000,00	98,00	275.614.500,00	99,00	289.395.225,00	100,00	303.864.986,25	100,00	319.058.235,56	100,00	335.011.147,34	100,00	1.785.434.094,15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
								Cakupan Penerbitan Akta Nikah	Persen	40,00	45,00		50,00		55,00		60,00		65,00		65,00		65,00		65,00		
2	12	04						Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Database Kependudukan yang Valid dan Update	Persen	93,00	94,00	511.652.000,00	95,00	537.234.600,00	96,00	564.096.330,00	97,00	592.301.146,50	98,00	621.916.203,83	98,00	653.012.014,02	98,00	3.480.212.294,34	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	05						Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Ketersediaan Profil Kependudukan dalam Website	Persen	50,00			65,00	105.000.000,00	75,00	110.250.000,00	85,00	115.762.500,00	95,00	121.550.625,00	95,00	127.628.156,25	95,00	580.191.281,25	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
								6.1.2 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Angka	55,14*	55,70		56,20		56,80		57,40		57,80		57,80		57,80		Menpan, Sekretariat Daerah	
									Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WDP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		BPK, BPKAD	
2	30	02						6.1.2.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Data dan Informasi Statistik Daerah yang Tersusun dengan Baik	Ada/Tidak	Ada	Ada	347.500.000,00	Ada	364.875.000,00	Ada	383.118.750,00	Ada	402.274.087,50	Ada	422.388.421,88	Ada	443.507.842,97	Ada	2.363.664.702,34	Dinas Komunikasi dan Informatika
5	01	02						Program Perencanaan, Pengendalian dan Binauasi Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100,00	100,00	2.325.000.000,00	100,00	1.910.000.000,00	100,00	1.990.000.000,00	100,00	2.440.000.000,00	100,00	2.820.000.000,00	100,00	2.180.000.000,00	100,00	13.665.000.000,00	Bappeda	
								Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTKW	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
									Persentase Indikator Sasaran RPJMD yang tercapai target tahunannya	Dokumen	83,33	84,79		86,27		87,78		89,32		90,70		90,70		90,70		90,70	

KODE			MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PROGRAM PEMBAKORAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		SUMBER DATA/ PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUTAN	BIDANG	URUTAN PROGRAM									2021 (TAHUN 0)		2022 (TAHUN 1)		2023 (TAHUN 2)		2024 (TAHUN 3)		2025 (TAHUN 4)		2026 (TAHUN 5)						
											TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH					
5		01	03				Program Koordinasi dan Sinkronisasi Program RPJMD kedalam RKPD Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	87,43	88,30	1.287.000.000,00	89,19	1.530.000.000,00	90,08	1.730.000.000,00	90,98	1.795.000.000,00	91,89	1.695.000.000,00	91,89	1.910.000.000,00	91,89	9.947.000.000,00	Bappeda		
								Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00						
								Persentase Indikator Program OPD yang Tercapai Targetnya	Persen	84,68	85,95		87,24		88,55		89,88		90,78		90,78						
5		02	02				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK atas LKPD	Predikat	WTP	WDP	139.446.275.607,00	WTP	80.469.847.563,50	WTP	84.493.339.941,68	WTP	88.718.000.338,76	WTP	93.153.895.535,70	WTP	97.811.595.583,48	WTP	584.092.954.590,11	BPKAD		
								Persentase ketepatan waktu penyusunan RAPMD dan RAPMD-P	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00						
								Persentase Ketepatan waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah secara ketentuan	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00						
5		02	03				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase kesesuaian data rincian total BMD dengan akta utap di neraca Pemerintah Daerah	Persen	100,00	100,00	1.882.005.000,00	100,00	1.976.105.250,00	100,00	2.074.910.512,50	100,00	2.178.056.038,13	100,00	2.287.588.840,03	100,00	2.401.968.282,03	100,00	12.801.233.922,69	BPKAD		
								Persentase penilaian dan penghapusan BMD sesuai dengan usulan OPD	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00						
							6.1.3 Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan	Persen	25,45	36,34		29,50		29,85		29,75		29,65		29,50					BPPRD	
							6.1.3.1 Peningkatan Pelayanan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persen	76,14	68,57	6.890.000.000,00	65,02	7.234.500.000,00	65,02	7.596.225.000,00	65,02	7.976.036.250,00	65,02	8.374.838.062,50	65,02	8.793.579.965,63	65,02	46.865.179.278,13	BPPRD		
4		01	03				Program Perencanaan dan Pembangunan	Persentase Data, Informasi dan Rekomendasi Kebijakan Bidang Perencanaan yang Ditindaklanjuti dan Digunakan untuk Analisa Kebijakan	Persen	67,00	70,00	354.865.000,00	80,00	372.608.250,00	90,00	391.238.662,50	100,00	410.800.595,63	100,00	431.340.625,41	100,00	452.907.656,68	100,00	2.413.760.790,21	Sekretariat Daerah (Bagan Perrekonomin)		
								BUMD dengan Kategori Sehat dan Baik	Angka	4	5		5		5		5		5		5						

KODE			MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PROGRAM PEMBANUNGAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		SUMBER DATA/ PERANGKAT DAERAH PEMANGGUNG JAWAB		
URUSAN	BIDANG	PROGRAM									2021 (TAHUN 0)		2022 (TAHUN 1)		2023 (TAHUN 2)		2024 (TAHUN 3)		2025 (TAHUN 4)		2026 (TAHUN 5)			TARGET KINERJA	RUPIAH
											TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH			
					6.1.4 Terciptanya Inovasi Layanan Publik			Indeks Inovasi Pemerintah Daerah	Predikat	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif		Sangat Inovatif		Sangat Inovatif		Sangat Inovatif		Sangat Inovatif		Sangat Inovatif		BAPPEDA		
					6.1.4.1 Meningkatkan akses masyarakat dalam informasi dan layanan publik melalui penciptaan inovasi di segala bidang	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang Terpubikasi	Persen	95,00	95,00	2.568.763.412,00	95,00	2.697.201.582,60	95,00	2.832.061.661,73	95,00	2.973.664.744,82	95,00	3.122.347.982,06	95,00	3.278.465.381,16	95,00	17.472.504.764,36	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	02				Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase aplikasi IT dan aplikasi E-governance yang mendukung smart city dan layanan publik yang berfungsi baik	Persen	80,00	80,00	2.280.400.000,00	85,00	2.394.420.000,00	85,00	2.514.141.000,00	90,00	2.639.848.050,00	100,00	2.771.840.452,50	100,00	2.910.432.475,13	100,00	15.511.081.977,63	Dinas Komunikasi dan Informatika	
							Persentase Infrastruktur IT yang Berfungsi Baik	Persen	90,00	90,00		95,00		95,00		95,00		95,00		95,00		95,00			
2	21	02					Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase pengamanan informasi daerah yang terselenggara baik	Persen	80,00	95,00	1.267.742.512,00	95,00	1.331.129.637,60	95,00	1.397.686.119,48	95,00	1.467.570.425,45	95,00	1.540.948.946,73	95,00	1.617.996.394,06	95,00	8.623.074.035,32	Dinas Komunikasi dan Informatika
5	05	02					Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbitan Daerah	Persen	100,00	100,00	1.205.000.000,00	100,00	1.750.000.000,00	100,00	1.825.000.000,00	100,00	1.090.000.000,00	100,00	1.565.000.000,00	100,00	1.695.000.000,00	100,00	9.130.000.000,00	BAPPEDA
							Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	Persen	42,86	62,96		92,59		92,59		92,59		92,59		92,59		92,59			
					6.1.5 Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah			Hasil Binahasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Skor/Predikat	3/ST*)	3/ST		3/ST		3/ST		3/ST		3/ST		3/ST		Kemendagri, Sekretariat Daerah		
xx	xx	01			6.1.5.1 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Secara Transparan dan Demokratis	Program Pemenuhan Kebutuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	98,00	98,00	1.108.726.430.665,91	98,00	1.190.740.581.688,13	98,00	1.263.697.725.952,19	98,00	1.340.966.590.567,63	98,00	1.423.016.567.964,35	98,00	1.510.961.787.612,37	98,00	7.838.109.684.450,59	Seluruh OPD	
4	01	01				Program Administrasi Umum	Tingkat Layanan Administrasi Umum	Persen	100,00	100,00	37.167.954.786,00	100,00	56.330.352.525,30	100,00	59.146.870.151,57	100,00	62.104.213.659,14	100,00	65.209.424.342,10	100,00	68.469.895.559,21	100,00	348.428.711.023,31	Sekretariat Daerah (Bagian Umum dan Perlingkapan)	
							Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Sekretariat Daerah Tepat Waktu	Persen	100,00	100,00	26.999.483.781,88	100,00	33.387.590.448,52	100,00	35.675.971.879,61	100,00	38.122.102.515,87	100,00	40.736.902.926,89	100,00	43.532.052.028,44	100,00	218.454.103.581,21	Sekretariat Daerah (Bagian Perencanaan dan Pelaporan)	
7	01	05				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan	Persen	100,00			100,00	1.050.000.000,00	100,00	1.102.500.000,00	100,00	1.157.625.000,00	100,00	1.215.506.250,00	100,00	1.276.281.562,50	100,00	5.801.912.812,50	Kecamatan	

URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN																KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		SUMBER DATA / PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
												2021 (TAHUN 0)		2022 (TAHUN 1)		2023 (TAHUN 2)		2024 (TAHUN 3)		2025 (TAHUN 4)		2026 (TAHUN 5)								
												TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH					
2	11	06						Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	60,00	60,00	110.000.000,00	61,00	115.500.000,00	61,00	121.275.000,00	63,00	127.338.750,00	64,00	133.705.687,50	64,00	140.390.971,88	64,00	748.210.409,38	Dinas Lingkungan Hidup				
2	11	09						Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Predikat Sekolah yang Berwawasan Lingkungan	sekolah	0			3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	15	500.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup				
2	11	10						Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota	Persen	100,00	100,00	70.000.000,00	100,00	73.500.000,00	100,00	77.175.000,00	100,00	81.033.750,00	100,00	85.085.437,50	100,00	89.339.709,38	100,00	476.133.896,88	Dinas Lingkungan Hidup				
2	11	11						Program Pengelolaan Persampahan	Timbulan Sampah yang Ditangani	Persen	76,84	84,00	4.644.974.500,00	85,00	4.877.223.225,00	85,00	5.121.084.386,25	82,00	5.377.138.605,56	80,00	5.645.995.535,84	80,00	5.928.295.312,63	80,00	31.594.711.565,29	Dinas Lingkungan Hidup				
									Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	Persen	3,16	5,00		10,00		15,00		18,00		20,00		20,00								
									Persentase cakupan area pelayanan	Persen	98,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00								
									Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	Persen	80,00	89,00		95,00		100,00		100,00		100,00		100,00								
							7.1.2	Meningkatnya Pengendalian Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	Angka	152,816 (Tinggi)	145,932 (Tinggi)		139,048 (Tinggi)		132,164 (Tinggi)		125,28 (Sedang)		118,396 (Sedang)		118,396 (Sedang)		118,396 (Sedang)		BNPB, BPBD				
1	05	03					7.1.2.1	Menyediakan Rencana Aksi Pencegahan dan Mitigasi Bencana Daerah serta Peningkatan Kepedulian Masyarakat dalam Menghadapi Bencana	Program Penanggulangan Bencana Daerah (SPM)	Persen	100,00			100,00	1.200.000.000,00	100,00	4.050.000.000,00	100,00	3.020.000.000,00	100,00	1.050.000.000,00	100,00	3.500.000.000,00	100,00	12.820.000.000,00	BPBD				
									Kelurahan Siaga Bencana	Angka	2			6		8		10		12		12								
1	05	04						Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (SPM)	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMB)	Persen	73,00			76,00	210.000.000,00	78,00	220.500.000,00	80,00	231.525.000,00	82,00	243.101.250,00	82,00	255.256.312,50	82,00	1.160.382.562,50	BPBD				

Keterangan
 Tidak Dilaksanakan pada Tahun Tersebut



BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Program Perangkat Daerah merupakan program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Kerangka pendanaan pembangunan daerah merupakan kapasitas kemampuan riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah selama 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa hubungan urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah secara eksplisit dituangkan dalam program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah serta target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

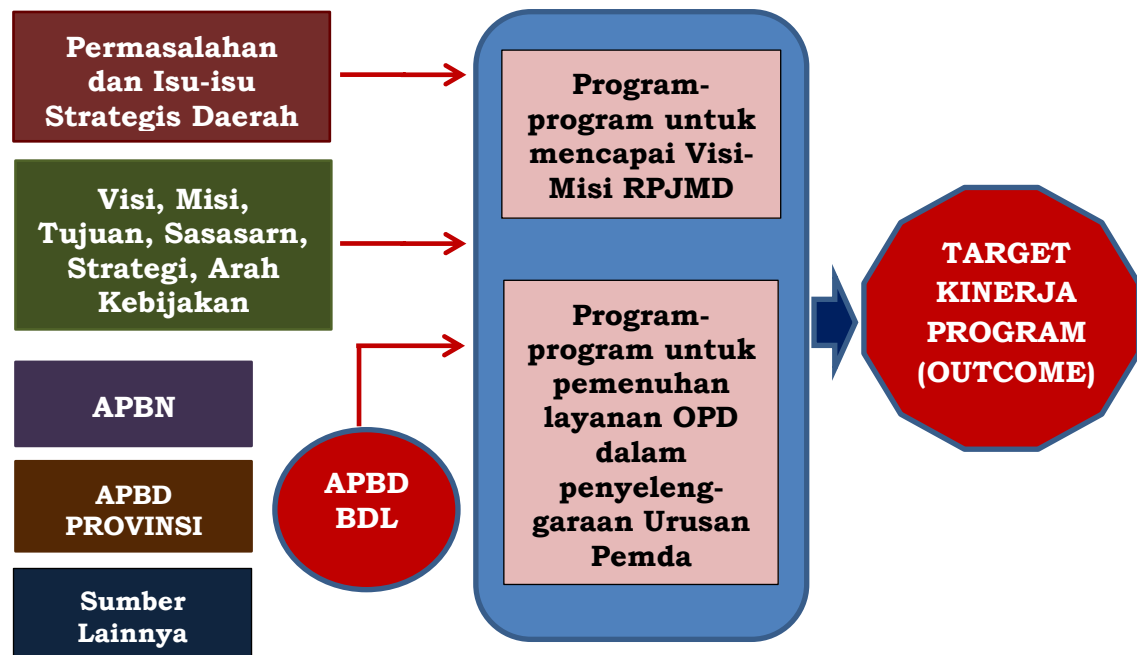
Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional, program prioritas dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu program prioritas untuk perencanaan strategis dan program prioritas untuk perencanaan operasional. Suatu urusan menjadi strategis tergantung tujuan dan sasaran pembangunan dan bagaimana strategi pencapaiannya. Suatu urusan pemerintahan daerah dapat menjadi strategis di satu tahun/periode atau sebaliknya, menjadi operasional di

periode berikutnya. Dalam hal suatu urusan atau program/kegiatan didalamnya menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Yang demikian karena suatu urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena pengaruhnya yang sangat luas dan urgent untuk diselenggarakannya sangat tinggi. Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala perangkat daerah.

Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kota Bandar Lampung berisi program-program, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Renstra perangkat daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Pencapaian target kinerja program (*outcome*) di masing-masing urusan wajib/pilihan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD Pemerintah Kota Bandar Lampung, APBD Provinsi dan APBN maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. kebijakan, program dan kegiatan pemerintah daerah yang didanai APBD dalam pencapaian sasarannya, melibatkan peran serta masyarakat baik dalam bentuk dana, material maupun SDM dan teknologi.

Gambar 7.1. Indikasi Rencana Program Prioritas RPJMD



Kerangka pendanaan pembangunan daerah Tahun 2021-2026 tertuang dalam tabel 7.1. Sementara perumusan indikasi rencana program prioritas daerah beserta kebutuhan pendanaan yang dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program, kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif dari setiap rancangan Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 7.2.

Kerangka pendanaan Tahun 2021-2026 beserta pagu indikatif program prioritas diproyeksikan berdasarkan kondisi eksisting beserta asumsi-asumsi yang menjadi dasar pertimbangan dalam penentuan proyeksi 5 (lima) tahun kedepan. Sementara indikasi program mengacu pada kodefikasi, nomenklatur dan kewenangan masing-masing perangkat daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Apabila didalam pelaksanaannya terbit peraturan perundang-undangan yang berpengaruh terhadap asumsi-asumsi pada RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 maka penyesuaian akan dilakukan didalam dokumen perencanaan tahunan daerah yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021 – 2026 Kota Bandar Lampung

URAIAN	TAHUN					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
KAPASITAS RIIL KEUANGAN	2.409.649.186.646,79	2.590.457.018.340,23	2.735.757.668.629,81	2.995.724.299.641,21	3.044.097.669.969,58	3.215.498.102.539,44
BELANJA	2.409.649.186.646,79	2.590.457.018.340,23	2.735.757.668.629,81	2.995.724.299.641,21	3.044.097.669.969,58	3.215.498.102.539,44
Belanja Operasi	2.080.815.352.927,14	2.193.322.110.320,87	2.317.994.782.363,19	2.560.321.622.590,00	2.590.300.732.176,21	2.738.863.708.308,24
- Belanja Pegawai	966.954.617.594,79	1.044.000.555.045,88	1.111.508.719.975,85	1.183.463.862.754,76	1.260.163.342.147,22	1.341.924.635.547,14
- Belanja Barang dan Jasa	1.013.589.133.595,35	1.078.011.215.274,99	1.131.601.880.387,34	1.188.224.138.085,24	1.247.585.378.028,98	1.310.239.317.854,85
- Belanja Bunga	18.500.000.000,00	19.425.000.000,00	20.396.250.000,00	21.416.062.500,00	22.486.865.625,00	23.611.208.906,25
- Belanja Hibah	70.431.601.737,00	44.057.340.000,00	46.260.207.000,00	158.573.198.250,00	50.984.818.375,00	53.551.952.000,00
- Belanja Bantuan Sosial	11.340.000.000,00	7.828.000.000,00	8.227.725.000,00	8.644.361.000,00	9.080.328.000,00	9.536.594.000,00
Belanja Modal	298.833.833.719,65	365.634.908.019,36	384.687.886.266,62	400.673.927.051,20	417.331.750.293,38	438.345.947.356,20
Belanja Tidak Terduga	30.000.000.000,00	31.500.000.000,00	33.075.000.000,00	34.728.750.000,00	36.465.187.500,00	38.288.446.875,00
Belanja Transfer	0	0	0	0	0	0

Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Bandar Lampung

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM					2021 (TAHUN 0)		2022 (TAHUN 1)		2023 (TAHUN 2)		2024 (TAHUN 3)		2025 (TAHUN 4)		2026 (TAHUN 5)						
							TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH			
							TOTAL KESUTUHAN ANGGARAN PEMBIAYAAN PROGRAM PEMBANGUNAN		2.409.649.186.646,79		2.590.457.018.340,23		2.735.757.668.629,81		2.995.724.299.641,21		3.044.097.669.969,58		3.215.498.102.539,44		16.991.183.945.767,10		
							NON URUSAN		1.108.726.430.665,91		1.190.740.581.688,13		1.263.697.725.952,19		1.340.966.590.567,63		1.423.016.567.964,35		1.510.961.787.612,37		7.838.109.684.450,59		
xx	xx	01	Program Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	98,00	98,00	1.108.726.430.665,91	98,00	1.190.740.581.688,13	98,00	1.263.697.725.952,19	98,00	1.340.966.590.567,63	98,00	1.423.016.567.964,35	98,00	1.510.961.787.612,37	98,00	7.838.109.684.450,59	Seluruh OPD		
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					754.427.652.724,00		833.714.366.860,20		878.190.585.203,21		920.868.111.963,37		964.791.016.886,54		1.015.382.018.062,12		5.367.373.751.699,44			
1	01		PENDIDIKAN					187.080.775.625,00		196.846.814.406,25		206.689.155.126,56		217.023.611.882,89		227.874.792.402,04		239.268.532.628,39		1.274.783.682.071,13			
1	01	02	Program Pengelolaan Pendidikan (SPM)	APK PAUD	Angka	49,36	54,30	171.141.775.625,00	59,73	180.110.864.406,25	65,70	189.116.407.626,56	72,27	198.572.227.007,89	79,49	208.500.838.283,29	79,49	218.925.880.803,70	79,49	1.166.367.993.752,69	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
			APK SD	Angka	108,14	112,34	116,83		121,51		126,37		131,42		131,42								
			APM SD	Angka	91,32	99,33	99,43		99,53		99,63		99,73		99,73								
			APK SMP	Angka	96,37	100,22	104,23		108,40		112,74		117,25		117,25								
			APM SMP	Angka	80,17	82,17	84,23		86,33		88,49		90,70		90,70								
			Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun Dalam Pendidikan Usia Dini	Persen	95,72	96,72	97,72		98,72		99,72		100,00		100,00								
			Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-15 Tahun Dalam Pendidikan Dasar	Persen	97,96	98,21	98,46		98,71		98,96		99,21		99,46								
			Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun Dalam Pendidikan Kesetaraan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00												
1	01	04	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kualifikasi Guru S1/DIV	Persen	83,16	84,84	15.939.000.000,00	85,90	16.735.950.000,00	86,97	17.572.747.500,00	88,06	18.451.384.875,00	89,16	19.373.954.118,75	89,16	20.342.651.824,69	89,16	108.415.688.318,44	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1	02		KESEHATAN					232.230.115.088,00		251.582.052.342,40		264.161.154.959,52		277.369.212.207,50		291.237.673.217,87		305.753.005.953,76		1.622.333.213.769,05			
1	02	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (SPM)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup	Angka	2	2	175.396.652.000,00	2	184.166.484.600,00	2	193.374.808.830,00	2	203.043.549.271,50	2	213.195.726.735,08	2	223.855.513.071,83	2	1.193.032.734.508,40	Dinas Kesehatan		
			Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Kasus	10	10	10		10		10		10										
			Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun)	Persen	6,60	6,60	6,50		6,40		6,30		6,20		6,20								
			Tingkat Prevalensi Tuberculosis per 100.000 Penduduk	Kasus	212	364	393		386		384		379		379								
			Cakupan Pelayanan BLUD	Persen	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00								
			Rasio Daya Tampung Rumah Sakit terhadap Jumlah Penduduk	Perbandingan	1:8969	1:7288		1:1689		1:6407		1:6042		1:5773		1:5526		1:5526		RSUD A. Dadi Tiokrodipo			

KODE		CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN																			
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2020)	2021 (TAHUN 0)		2022 (TAHUN 1)		2023 (TAHUN 2)		2024 (TAHUN 3)		2025 (TAHUN 4)		2026 (TAHUN 5)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	
1	02	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM Kesehatan dengan Kompetensi sesuai Standar	Persen	71,00	71,00	221.250.000,00	73,00	232.312.500,00	75,00	243.928.125,00	80,00	256.124.531,25	83,00	268.930.757,81	83,00	282.377.295,70	83,00	1.504.923.209,77	Dinas Kesehatan
				Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Persen	59,00	59,00		60,00		60,00	60,00		62,00		62,00	62,00		62,00		
				Persentase Ketersediaan dan Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu	Persen	100,00			100,00	8.000.000.000,00	100,00	8.400.000.000,00	100,00	8.820.000.000,00	100,00	9.261.000.000,00	100,00	9.724.050.000,00	100,00	44.205.050.000,00	RSUD A. Dadi Tjokrodipo
1	02	04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Sarana Pelayanan Kefarmasian sesuai dengan Standar	Persen	92,00	92,00	329.540.000,00	93,00	446.017.000,00	94,00	468.317.850,00	95,00	491.733.742,50	96,00	516.320.429,63	96,00	495.585.826,11	96,00	2.747.514.848,23	Dinas Kesehatan
1	02	05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat ber PHBS	Persen	70,00	70,00	846.593.000,00	75,00	1.297.922.650,00	73,00	1.362.818.782,50	75,00	1.430.959.221,63	80,00	1.502.507.582,71	80,00	1.577.632.661,84	80,00	8.018.433.898,67	Dinas Kesehatan
1	03		PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					320.999.340.000,00		338.557.557.000,00		355.485.934.850,00		373.260.731.592,50		391.924.268.172,13		411.520.981.581,23		2.191.748.813.195,86	
1	03	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kota	Persen	42,880	34,304	8.200.000.000,00	25,728	8.610.000.000,00	17,152	9.040.500.000,00	8,576	9.492.525.000,00	0,00	9.967.151.250,00	0,00	10.465.508.812,50	0,00	55.775.685.062,50	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPM)	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	Persen	44,82	45,32	2.971.501.000,00	45,82	3.120.076.050,00	46,32	3.276.079.852,50	46,82	3.439.883.845,13	46,82	3.611.878.037,38	46,82	3.792.471.939,25	46,82	20.211.890.724,26	Dinas Pekerjaan Umum
				Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak Perkotaan	Persen	61,80	62,30		62,80		63,30	63,80		64,30		64,30		64,30		64,30	
1	03	05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah (SPM)	Persentase Rumah Tinggal Bersantiasi	Persen	60,00	60,50	3.247.113.000,00	61,00	3.409.468.650,00	61,50	3.579.942.082,50	62,00	3.758.939.186,63	62,50	3.946.886.145,96	62,50	4.144.230.453,25	62,50	22.086.579.518,34	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persen	65,47	66,47	23.850.000.000,00	67,47	25.042.500.000,00	68,47	26.294.625.000,00	69,47	27.609.356.250,00	70,47	28.989.824.062,50	70,47	30.439.315.265,63	70,47	162.225.620.578,13	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	07	Program Pengembangan Permukiman	Persentase Panjang Jalan Lingkungan dalam Kondisi Mantap	Persen	85,09	85,59	27.526.000.000,00	86,09	28.902.300.000,00	86,59	30.347.415.000,00	87,09	31.864.785.750,00	87,59	33.458.025.037,50	87,59	35.130.926.289,38	87,59	187.229.452.076,88	Dinas Pekerjaan Umum
				Rasio Jumlah Lampu PJU terhadap Panjang Jalan Kota	Angka	20,20	20,70		21,20		21,70	22,20		22,70		22,70		22,70		22,70	
1	03	08	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase SLF yang Diterbitkan	Persen	100,00	100,00	110.000.000,00	100,00	600.000.000,00	100,00	630.000.000,00	100,00	661.500.000,00	100,00	694.575.000,00	100,00	729.303.750,00	100,00	3.425.378.750,00	Dinas Perumahan dan Permukiman
				Persentase KRK yang Terbit	Persen	80,00	100,00		100,00		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
				Persentase Pemenuhan Gedung Kantor Pemerintah	Persen	75,00	76,00	189.862.000.000,00	77,00	199.355.100.000,00	78,00	209.322.855.000,00	79,00	219.788.997.750,00	80,00	230.778.447.637,50	80,00	242.317.370.019,38	80,00	1.291.424.770.406,87	Dinas Penerjaan Umum
1	03	09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Peyelesaian Pelanggaran Perda	Persen	70,00	100,00	170.000.000,00	100,00	262.250.000,00	100,00	275.362.500,00	100,00	289.130.625,00	100,00	303.587.156,25	100,00	318.766.514,06	100,00	1.619.096.795,31	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	03	10	Program Penyelenggaraan Jalan	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	Persen	84,81	85,31	64.487.726.000,00	85,81	67.712.112.300,00	86,31	71.097.717.915,00	86,81	74.652.603.810,75	87,31	78.385.234.001,29	87,31	82.304.495.701,35	87,31	438.639.889.728,39	Dinas Pekerjaan Umum
				Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk	Angka	1,46	1,46		1,46		1,46	1,46		1,46		1,46		1,46		1,46	

URUSAN	KODE	BIDANG URUSAN	PROGRAM	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								2021 (TAHUN 0)		2022 (TAHUN 1)		2023 (TAHUN 2)		2024 (TAHUN 3)		2025 (TAHUN 4)		2026 (TAHUN 5)				
								TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	
1	03	11		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio Tenaga Operator/ Teknisi/Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	Angka	35,00	40,00	500.000.000,00	45,00	525.000.000,00	50,00	551.250.000,00	55,00	578.812.500,00	60,00	607.753.125,00	60,00	638.140.781,25	60,00	3.400.956.406,25	Dinas Pekerjaan Umum
					Rasio Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya tanpa Kecelakaan Konstruksi	Angka	15,00	20,00		25,00		35,00		45,00		55,00		55,00		55,00		
1	03	12		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	Persen	53,24	54,14	75.000.000,00	54,65	1.018.750.000,00	55,15	1.070.187.500,00	55,65	1.124.196.875,00	56,20	1.180.906.718,75	56,20	1.240.452.055,19	56,20	5.709.493.148,94	Dinas Perumahan dan Permukiman
					Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota atau Kawasan Perkotaan	Persen	4,40	4,40		4,40		4,60		4,70		4,80		4,90		4,90		
1	04			PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					2.684.902.000,00		24.785.397.100,00		26.024.666.955,00		27.325.900.302,75		28.692.195.317,89		30.126.805.083,28		139.639.866.758,92	
1	04	02		Program Pengembangan Perumahan (SPM)	Persentase Rusunawa yang Terpelihara	Persen	100,00	100,00	260.000.000,00	100,00	273.000.000,00	100,00	286.650.000,00	100,00	300.982.500,00	100,00	316.031.625,00	100,00	331.833.206,25	100,00	1.768.497.331,25	Dinas Pekerjaan Umum
					Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	Persen	100,00			100,00	50.000.000,00	100,00	52.500.000,00	100,00	55.125.000,00	100,00	57.881.250,00	100,00	60.775.312,00	100,00	276.281.562,00	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	04	03		Program Kawasan Permukiman	Persentase RT/LH Yang Tertangani	Persen	28,81	32,68	2.424.902.000,00	23,63	24.362.397.100,00	43,89	25.580.516.955,00	64,14	26.859.542.802,75	83,11	28.202.519.942,89	83,11	29.612.645.940,03	83,11	137.042.524.740,67	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	04	05		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	Persen	100,00			100,00	100.000.000,00	100,00	105.000.000,00	100,00	110.250.000,00	100,00	115.762.500,00	100,00	121.550.625,00	100,00	552.563.125,00	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	05			KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					1.463.445.169,00		2.946.617.427,45		5.883.948.298,82		4.945.645.713,76		3.071.927.999,45		5.623.024.399,42		23.934.609.007,91	
1	05	02		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (SPM)	Persentase Penegakan Perda	Persen	100,00	100,00	1.463.445.169,00	100,00	1.536.617.427,45	100,00	1.613.448.298,82	100,00	1.694.120.713,76	100,00	1.778.826.749,45	100,00	1.867.768.086,92	100,00	9.954.226.445,41	Satuan Polisi Pamong Praja
					Tingkat Penyelesaian Penyelenggaraan K3	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
1	05	03		Program Penanggulangan Bencana (SPM)	Cakupan Pelayanan Bencana Daerah	Persen	100,00			100,00	1.200.000.000,00	100,00	4.050.000.000,00	100,00	3.020.000.000,00	100,00	1.050.000.000,00	100,00	3.500.000.000,00	100,00	12.820.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Kelurahan Siaga Bencana	Angka	2			6		8		10		12		12		12		
1	05	04		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (SPM)	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMMK)	Persen	73,00			76,00	210.000.000,00	78,00	220.500.000,00	80,00	231.525.000,00	82,00	243.101.250,00	82,00	255.256.312,50	82,00	1.160.382.562,50	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	06			SOSIAL					9.969.074.842,00		18.995.928.584,10		19.945.725.013,31		20.943.010.263,97		21.990.159.777,17		23.089.668.416,03		114.933.566.896,57	
1	06	02		Program Pemberdayaan Sosial	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sosial	Persen	70,00	75,00	725.719.000,00	78,00	9.259.504.950,00	81,00	9.722.480.197,50	84,00	10.208.603.457,38	87,00	10.719.032.980,24	87,00	11.254.984.779,26	87,00	51.890.325.364,37	Dinas Sosial
1	06	04		Program Rehabilitasi Sosial (SPM)	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	70,00	74,00	280.000.000,00	77,00	324.900.000,00	80,00	341.145.000,00	84,00	358.202.000,00	88,00	376.111.750,00	88,00	394.917.837,50	88,00	2.075.276.587,50	Dinas Sosial
					Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
1	06	05		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	18,00	20,00	3.913.355.842,00	21,00	4.109.023.634,10	22,00	4.314.474.815,81	23,00	4.530.198.556,60	24,00	4.756.708.484,43	24,00	4.994.543.908,65	24,00	26.618.305.241,57	Dinas Sosial

URUSAN	BIDANG URUSAN	URUSAN PROGRAM	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							2021 (TAHUN 0)		2022 (TAHUN 1)		2023 (TAHUN 2)		2024 (TAHUN 3)		2025 (TAHUN 4)		2026 (TAHUN 5)				
							TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	
1	06	06	Program Penanganan Bencana (SPM)	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	Persen	100,00	100,00	5.050.000.000,00	100,00	5.302.500.000,00	100,00	5.567.625.000,00	100,00	5.846.006.250,00	100,00	6.138.306.562,50	100,00	6.445.221.890,63	100,00	34.349.659.703,13	Dinas Sosial
				Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					59.923.663.759,00		72.018.084.166,30		75.003.488.374,32		78.891.924.167,73		83.277.132.182,32		87.446.377.234,17		456.560.669.883,83	
2	07		TENAGA KERJA					900.055.050,00		945.057.802,50		992.310.692,63		1.041.926.227,26		1.094.022.538,62		1.148.723.665,55		6.122.095.976,55	
2	07	02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Informasi Data Ketenagakerjaan yang Disusun Berbasis Sistem Informasi	Persen	50,00	50,00	99.800.000,00	100,00	104.790.000,00	100,00	110.029.500,00	100,00	115.530.975,00	100,00	121.307.523,75	100,00	127.372.899,94	100,00	678.830.898,69	Dinas Tenaga Kerja
2	07	03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga terhadap Total Kesempatan Kerja	Persen	25,13	27,50	186.238.500,00	29,25	195.550.425,00	30,75	205.327.946,25	31,25	215.594.343,56	31,75	226.374.060,74	31,75	237.692.763,78	31,75	1.266.778.039,33	Dinas Tenaga Kerja
				Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan berbasis Kompetensi	Persen	20,00	20,00		50,00		75,00		75,00		80,00		80,00		80,00		
2	07	04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rasio penduduk yang bekerja	Persen	91,20	91,20	225.000.000,00	93,12	236.250.000,00	92,55	248.062.500,00	94,81	260.465.625,00	95,70	273.488.906,25	95,70	287.163.351,56	95,70	1.530.430.382,81	Dinas Tenaga Kerja
				Rasio Kesempatan Kerja terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas	Persen	91,21	91,21		92,57		93,02		93,97		94,42		94,42		94,42		
				Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Persen	2,84	2,84		3,41		3,52		4,79		4,79		4,79		4,79		
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	67,79	70,00		72,35		74,90		76,62		78,26		79,86		79,86		
2	07	05	Program Hubungan Industrial	Persentase Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun	Persen	55,73	55,73	389.016.550,00	55,21	408.467.377,50	54,68	428.890.746,38	52,32	450.335.283,69	51,55	472.852.047,88	51,55	496.494.650,27	51,55	2.646.056.655,72	Dinas Tenaga Kerja
				Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Persen	39,58	39,58		42,00		49,02		52,63		53,92		53,92		53,92		
				Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak/PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	Persen	50,00	50,00		62,00		75,00		79,00		82,00		82,00		82,00		
2	08		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					3.047.170.000,00		3.304.528.500,00		3.469.754.925,00		3.643.242.671,25		3.825.404.804,81		4.016.675.045,05		21.306.775.946,12	
2	08	02	Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	Angka	71,88			72,50	800.000.000,00	73,00	840.000.000,00	73,50	882.000.000,00	74,00	926.100.000,00	74,00	972.405.000,00	74,00	4.420.505.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Persentase ARG pada belanja Langsung APBD	Lembaga	17			34		64		93		122		122		122		
				Persentase Jumlah Perempuan yang Mendapatkan Keterampilan	Persen	55,63			71,88		81,25		90,63		100,00		100,00		100,00		

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							2021 (TAHUN 0)		2022 (TAHUN 1)		2023 (TAHUN 2)		2024 (TAHUN 3)		2025 (TAHUN 4)		2026 (TAHUN 5)				
							TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH			
2	08	03	Program Perlindungan Perempuan	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengadilan	Persen	100,00	100,00	1.685.170.000,00	100,00	628.013.300,00	100,00	659.413.965,00	100,00	692.384.663,25	100,00	727.003.896,41	100,00	763.354.091,23	100,00	5.155.339.915,90	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
2	08	04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Presentase OPD/Lembaga Pemerintah yang Mengimplementasikan Anggaran Responsif Gender	Persen	9,44	18,88	375.000.000,00	35,55	420.675.000,00	51,67	441.708.750,00	67,78	463.794.187,50	83,88	486.983.896,88	83,88	511.333.091,72	83,88	2.699.494.926,09	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	Persen	2,54	2,54	65.000.000,00	2,79	138.731.200,00	3,04	145.667.760,00	3,29	152.951.148,00	3,54	160.598.705,40	3,54	168.628.640,67	3,54	831.577.454,07	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta	Persen	62,97	62,97		62,97		63,17		63,37		63,57		63,57		63,57		
				Rasio KDRT yang Tertangani	Persen	0,53	0,53		0,78		1,03		1,28		1,53		1,53		1,53		
				Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	55,31	55,31		55,56		55,81		56,06		56,31		56,31		56,31		
2	08	06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kota Bandar Lampung menjadi Kota Layak Anak	Tingkat Capaian	Madya	Madya	235.000.000,00	Madya	235.000.000,00	Madya	246.750.000,00	Nindya	259.087.500,00	Nindya	272.041.875,00	Nindya	285.643.968,75	Nindya	1.533.523.343,75	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Persen	62,50	64,10		66,20		68,40		71,70		71,70		71,70		71,70		
2	08	07	Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengadilan	Persen	100,00	100,00	687.000.000,00	100,00	1.082.109.000,00	100,00	1.136.214.450,00	100,00	1.193.025.172,50	100,00	1.252.676.431,13	100,00	1.315.310.252,68	100,00	6.666.335.306,31	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Persentase Anak memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
2	09		PANGAN					591.021.000,00		725.572.050,00		761.850.652,50		799.943.185,13		839.940.344,38		881.937.361,60		4.600.264.593,61	
2	09	03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan Pangan Utama	Persen	95,00	98,00	400.796.000,00	100,00	525.835.800,00	102,00	552.127.590,00	105,00	579.733.969,50	110,00	608.720.667,98	110,00	639.156.701,37	110,00	3.306.370.728,85	Dinas Pangan
				Ketersediaan Energi per kapita	(kkal/kap hari)	2.490,00	2.500,00		2.510,00		2.520,00		2.530,00		2.540,00		2.540,00		2.540,00		
				Ketersediaan Protein per Kapita	(gr/kap/hari)	72,10	72,14		72,16		72,18		72,20		72,22		72,22		72,22		
				Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah	Persen	24,08	24,08		30,00		40,00		50,00		60,00		60,00		60,00		
				Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	skor	85,50	86,00		86,20		86,50		86,75		87,00		87,00		87,00		
2	09	04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rawan Pangan	Persen	8,70	8,00	49.000.000,00	7,00	51.450.000,00	6,00	54.022.500,00	5,00	56.723.625,00	5,00	59.559.806,25	5,00	62.537.796,56	5,00	333.293.727,81	Dinas Pangan
2	09	05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	Persen	85,00	85,50	141.225.000,00	86,00	148.286.250,00	87,00	155.700.562,50	87,50	163.485.590,63	88,00	171.659.870,16	88,00	180.242.863,66	88,00	960.600.136,95	Dinas Pangan
2	10		PERTANAHAN					30.000.000,00		31.500.000,00		33.075.000,00		34.728.750,00		36.465.187,50		38.288.446,88		204.057.384,38	
2	10	02	Program Pengelolaan Izin Lokasi	Persentase Penerbitan Izin Lokasi	Persen	100,00	100,00	30.000.000,00	100,00	31.500.000,00	100,00	33.075.000,00	100,00	34.728.750,00	100,00	36.465.187,50	100,00	38.288.446,88	100,00	204.057.384,38	Dinas Perumahan dan Permukiman

URUSAN	KODE	BIDANG URUSAN	PROGRAM	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								2021 (TAHUN 0)		2022 (TAHUN 1)		2023 (TAHUN 2)		2024 (TAHUN 3)		2025 (TAHUN 4)		2026 (TAHUN 5)				
								TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	
2	11			LINGKUNGAN HIDUP					5.874.974.500,00		6.218.723.225,00		6.527.159.386,25		6.901.017.355,56		7.243.568.223,34		7.603.246.634,51		40.368.689.324,67	
2	11	02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen				200.000.000,00	Ada	210.000.000,00		220.500.000,00		331.525.000,00		348.101.250,00		365.506.312,50	Ada	1.675.632.562,50	Dinas Lingkungan Hidup
				RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kab/Kota yang Terintegrasi	Dokumen					Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		
				KLHS untuk K/R/P tingkat kab/kota	Dokumen		Ada					Ada								Ada		
2	11	03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Hasil pengukuran Indeks Kualitas air	indeks	54,00	57,00		400.000.000,00	58,00	420.000.000,00	58,30	441.000.000,00	58,60	413.050.000,00	58,60	433.702.500,00	58,60	455.387.625,00	58,60	2.563.140.125,00	Dinas Lingkungan Hidup
				Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	indeks	81,00	81,10			81,20		81,30		81,40		81,50		81,50		81,50		
				Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	indeks	27,37	29,06			30,75		32,44		34,13		35,82		35,82		35,82		
				Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	4,00	5,00			6,00		7,00		8,00		9,00		10,00		10,00		
2	11	04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Dokumen	Tidak Ada			450.000.000,00	Ada	422.500.000,00		446.125.000,00		470.931.250,00		496.977.812,50		524.326.703,13	Ada	2.810.860.765,63	Dinas Lingkungan Hidup
				Master Plan Ruang Terbuka Hijau	Dokumen	Tidak Ada				Ada									Ada			
				Peningkatan presentase Ruang Terbuka Hijau	Persen	4,40	4,40			4,40		4,60		4,70		4,80		4,90		4,90		
2	11	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	60,00	60,00		110.000.000,00	61,00	115.500.000,00	61,00	121.275.000,00	63,00	127.338.750,00	64,00	133.705.687,50	64,00	140.390.971,88	64,00	748.210.409,38	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Predikat Sekolah yang Berwawasan Lingkungan	sekolah	0				3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	15	500.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	10	Program Penanganan Pengaduan Masyarakat	Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100,00	100,00		70.000.000,00	100,00	73.500.000,00	100,00	77.175.000,00	100,00	81.033.750,00	100,00	85.085.437,50	100,00	89.339.709,38	100,00	476.133.896,88	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	Program Pengelolaan Persampahan	Timbulan Sampah yang Ditangani	Persen	76,84	84,00		4.644.974.500,00	85,00	4.877.223.225,00	85,00	5.121.084.386,25	82,00	5.377.138.605,56	80,00	5.645.995.535,84	80,00	5.928.295.312,63	80,00	31.594.711.565,29	Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi melalui 3R	Persen	3,16	5,00			10,00		15,00		18,00		20,00		20,00		20,00		
				Persentase Cakupan Area Pelayanan	Persen	98,00	100,00			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
				Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	Persen	80,00	89,00			95,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		

URUSAN	KODE	BIDANG URUSAN	URUSAN PROGRAM	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								2021 (TAHUN 0)		2022 (TAHUN 1)		2023 (TAHUN 2)		2024 (TAHUN 3)		2025 (TAHUN 4)		2026 (TAHUN 5)				
								TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	
2	12			ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					2.636.288.000,00		2.873.102.400,00		3.016.757.520,00		3.167.595.396,00		3.325.975.165,80		3.492.273.924,09		18.511.992.405,89	
2	12	02	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persen	95,00	97,00	1.862.146.000,00	99,00	1.955.253.300,00	100,00	2.053.015.965,00	100,00	2.155.666.763,25	100,00	2.263.450.101,41	100,00	2.376.622.606,48	100,00	12.666.154.736,15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah		Sudah		Sudah		Sudah		Sudah		Sudah		Sudah				
			IKM Pelayanan	Persen	83,36	84,27		85,11		85,96		86,62		87,69		87,69		87,69				
2	12	03	Program Pencatatan Sipil	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	Persen	96,07	97,00	262.490.000,00	98,00	275.614.500,00	99,00	289.395.225,00	100,00	303.864.986,25	100,00	319.058.235,56	100,00	335.011.147,34	100,00	1.785.434.094,15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			Cakupan Penerbitan Akta Nikah	Persen	40,00	45,00		50,00		55,00		60,00		65,00		65,00		65,00				
2	12	04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Database Kependudukan yang Valid dan Update	Persen	93,00	94,00	511.652.000,00	95,00	537.234.600,00	96,00	564.096.330,00	97,00	592.301.146,50	98,00	621.916.203,83	98,00	653.012.014,02	98,00	3.480.212.294,34	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Ketersediaan Profil Kependudukan dalam Website	Persen	50,00			65,00	105.000.000,00	75,00	110.250.000,00	85,00	115.762.500,00	95,00	121.550.625,00	95,00	127.628.156,25	95,00	580.191.281,25	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	13			PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				1.125.000.000,00		1.333.750.000,00		1.400.437.500,00		1.470.458.625,00		1.543.981.906,25		1.621.180.601,56		8.494.808.632,81		
2	13	03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Pembinaan POKJANAL POSYANDU	Kelurahan	704 Posyandu Aktif yang Terdata	126	100.000.000,00										126	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat		
2	13	04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Ketersediaan Data Kelurahan yang Akurat dan Evaluasi Perkembangan Kelurahan dalam Aplikasi PRODESKEL dan EPDESKEL Milik Kemendagri	Persen	50,00	50,00	475.000.000,00	50,00	498.750.000,00	75,00	523.687.500,00	75,00	549.871.875,00	100,00	577.365.468,75	100,00	606.233.742,19	100,00	3.230.908.585,94	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	
2	13	05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Persen	71,43	95,00	550.000.000,00	95,00	835.000.000,00	95,00	876.750.000,00	95,00	920.586.750,00	95,00	966.616.437,50	95,00	1.014.946.859,38	95,00	5.163.900.046,88	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	
				Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	Persen	85,00	95,00		95,00		95,00		95,00		95,00		95,00		95,00			
2	14			PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				29.829.930.052,00		31.321.426.554,60		32.887.497.882,33		34.531.872.776,45		36.258.466.415,27		38.071.389.736,03		202.900.583.416,68		
2	14	02	Program Pengendalian Penduduk	Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa/Kelurahan Setiap Tahun	Persen	100,00	100,00	594.000.000,00	100,00	623.700.000,00	100,00	654.885.000,00	100,00	687.629.250,00	100,00	722.010.712,50	100,00	758.111.248,13	100,00	4.040.336.210,63	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

URUSAN	KODE	BIDANG URUSAN	PROGRAM	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								2021 (TAHUN 0)		2022 (TAHUN 1)		2023 (TAHUN 2)		2024 (TAHUN 3)		2025 (TAHUN 4)		2026 (TAHUN 5)			
								TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH		
2	14	03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Total Fertility Rate (TFR)	Persen	2,37	2,28	20.038.978.000,00	2,25	21.040.926.900,00	2,24	22.092.973.245,00	2,22	23.197.621.907,25	2,21	24.357.503.002,61	2,21	25.575.378.152,74	2,21	136.303.381.207,61	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Cakupan pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun	Persen	0,30	0,29		0,28		0,27		0,26		0,25		0,25		0,25			
			Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Aktif	Persen	72,79	66,17		67,45		67,50		67,55		67,60		67,60		67,60			
			Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	Persen	11,50	20,01		19,06		19,01		18,08		18,05		18,05		18,05			
			Angka prevalensi kontrasepsi modern / modern Contraceptive (mCPR)	Persen	57,01	59,92		61,99		63,59		64,90		66,01		66,01		66,01			
			Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	Persen	72,79	66,17		66,80		66,95		67,15		67,20		67,20		67,20			
2	14	04	Program Pembentayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang Ber-KB	Persen	87,00	89,00	9.196.952.052,00	90,00	9.656.799.654,60	92,00	10.139.639.637,33	94,00	10.646.621.619,20	95,00	11.178.952.700,16	95,00	11.737.900.335,16	95,00	62.556.865.998,45	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	15		PERHUBUNGAN					4.227.925.608,00		4.249.826.608,00		4.462.317.938,40		4.685.433.835,32		4.919.705.527,09		5.165.690.803,44		27.710.900.320,25	
2	15	02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Pelayanan Angkutan Darat	Persen	0,0826	0,0850	3.942.725.608,00	0,0875	3.964.626.608,00	0,0900	4.162.857.938,40	0,0925	4.371.000.835,32	0,0950	4.589.550.877,09	0,0950	4.819.028.420,94	0,0950	25.849.790.287,75	Dinas Perhubungan
			Persentase Sarana dan Prasarana yang Memenuhi Standar dalam Kondisi Baik	Persen	96,00	96,00		96,00		97,00		97,00		98,00		98,00		98,00			
			Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10 ribu Keberangkatan	Kejadian	220	200		195		190		185		180		180		180			
2	15	05	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Tingkat Kecelakaan di Pintu Perlintasan Sebidang Kereta Api Yang dijaga	Kejadian	1	1	285.200.000,00	1	285.200.000,00	1	299.460.000,00	1	314.433.000,00	1	330.154.650,00	1	346.662.382,50	1	1.861.110.032,50	Dinas Perhubungan
2	16		KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					4.849.163.412,00		5.091.621.582,60		5.346.202.661,73		5.613.512.794,82		5.894.188.434,56		6.188.897.856,29		32.983.586.741,99	
2	16	02	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang Terpublikasi	Persen	95,00	95,00	2.568.763.412,00	95,00	2.697.201.582,60	95,00	2.832.061.661,73	95,00	2.973.664.744,82	95,00	3.122.347.982,06	95,00	3.278.465.381,16	95,00	17.472.504.764,36	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase aplikasi IT dan aplikasi e-government yang mendukung smart city dan layanan publik yang berfungsi baik	Persen	80,00	80,00	2.280.400.000,00	85,00	2.394.420.000,00	85,00	2.514.141.000,00	90,00	2.639.848.050,00	100,00	2.771.840.452,50	100,00	2.910.432.475,13	100,00	15.511.081.977,63	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Persentase Infrastruktur IT yang Berfungsi Baik	Persen	90,00	90,00		95,00		95,00		95,00		95,00		95,00		95,00			
2	17		KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH					1.519.304.000,00		2.884.319.200,00		3.024.035.160,00		3.255.451.043,00		3.406.622.951,40		3.566.453.839,30		17.656.186.193,70	
2	17	03	Program Pengawasan dan Pemerikaan Koperasi	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang Dilakukan untuk Koperasi	Persen	27,09			31,02	100.000.000,00	33,09	100.000.000,00	35,11	115.762.500,00	35,89	123.000.000,00	35,89	123.000.000,00	35,89	561.762.500,00	Dinas Koperasi UKM
2	17	04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase koperasi aktif	Persen	26,35	45,23	90.000.000,00	45,90	90.000.000,00	46,50	90.000.000,00	47,21	90.000.000,00	47,85	90.000.000,00	47,85	90.000.000,00	47,85	540.000.000,00	Dinas Koperasi UKM
2	17	05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pertumbuhan Jumlah Anggota Koperasi	Persen	-18,50	0,22	75.000.000,00	0,29	484.819.200,00	0,36	505.310.160,00	0,43	531.825.668,00	0,50	564.416.951,40	0,50	588.137.798,97	0,50	2.749.509.778,37	Dinas Koperasi UKM

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							2021 (TAHUN 0)		2022 (TAHUN 1)		2023 (TAHUN 2)		2024 (TAHUN 3)		2025 (TAHUN 4)		2026 (TAHUN 5)				
							TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH			
2	17	06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Persen	-8,10	3,34	55.000.000,00	3,99	1.234.500.000,00	4,66	1.293.725.000,00	4,87	1.363.911.250,00	5,38	1.435.206.000,00	5,38	1.504.766.000,00	5,38	6.887.108.250,00	Dinas Koperasi UKM
			Persentase fasilitasi penerbitan Sertifikat Nomor induk Koperasi (NIK)	Persen	18,32	20,60		22,83		25,00		27,12		29,54		29,54		29,54			
2	17	07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rasio Pertumbuhan Wirasaha Baru Berskala Mikro	Persen	12,80	15,00	250.000.000,00	18,40	315.000.000,00	21,00	375.000.000,00	23,60	433.951.625,00	26,80	444.000.000,00	26,80	435.000.000,00	26,80	2.252.951.625,00	Dinas Koperasi UKM
				Persentase UKM Non BPR LKM Aktif	Persen	36,89	37,50		38,00		38,50		40,50		42,75		42,75		42,75		
				Persentase BPR/LKM Aktif	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
2	17	08	Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Persen	63,10	64,50	1.049.304.000,00	65,50	660.000.000,00	66,50	660.000.000,00	67,30	720.000.000,00	68,50	750.000.000,00	68,50	825.550.040,33	68,50	4.664.854.040,33	Dinas Koperasi UKM
				Pertumbuhan Produktivitas UMKM	Persen	2,70	2,70		3,40		4,70		5,40		8,20		8,20		8,20		
2	18		PENANAMAN MODAL					1.095.472.000,00		1.322.428.100,00		1.389.549.505,00		1.437.526.980,25		1.486.403.329,26		1.536.223.495,73		8.267.603.410,24	
2	18	02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah/Nilai Investasi PMA	Dolar (\$)	630.598.514			649.658.354,09	100.000.000,00	659.403.229,40	110.000.000,00	669.294.277,84	115.000.000,00	679.294.277,84	125.000.000,00	689.294.277,84	130.000.000,00	689.294.277,84	580.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
				Jumlah/Nilai Investasi PMDN	Juta Rupiah (Rp)	2.210.331,00			2.277.138,25		2.311.295,33		2.345.964,76		2.744.544,17		2.445.964,76		2.445.964,76		
				Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Orang/ Perusahaan	7,85			8,85		9,35		9,85		10,35		10,35		10,35		
2	18	03	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Promosi Penanaman Modal	Persen	100,00	100,00	129.350.000,00	100,00	130.000.000,00	100,00	135.000.000,00	100,00	140.000.000,00	100,00	150.000.000,00	100,00	150.000.000,00	100,00	834.350.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	04	Program Pelayanan Penanaman Modal	IKM Bidang Perizinan	Angka	84,37	85,50	640.000.000,00	85,60	650.000.000,00	86,30	660.000.000,00	86,70	670.000.000,00	87,20	680.000.000,00	87,20	700.000.000,00	87,20	4.000.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN	Persen	14,99	16,49	326.122.000,00	18,47	342.428.100,00	20,21	359.549.505,00	21,95	377.526.980,25	23,69	396.403.329,26	23,69	416.223.495,73	23,69	2.218.253.410,24	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Penyajian Data Penanaman Modal	Persen	80,00			83,00	100.000.000,00	84,00	125.000.000,00	85,00	135.000.000,00	85,00	135.000.000,00	85,00	140.000.000,00	85,00	635.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	19		KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					1.078.367.625,00		7.828.286.006,00		7.616.200.306,00		8.022.760.321,00		8.918.643.587,00		9.409.579.716,00		42.873.837.561,00	
2	19	02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	Persen	100,00	100,00	330.000.000,00	100,00	957.500.000,00	100,00	1.020.125.000,00	100,00	1.084.131.250,00	100,00	1.149.587.062,00	100,00	1.216.566.915,00	100,00	5.757.910.227,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
				Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	Persen	3,54	3,54		3,66		3,77		3,88		3,99		3,99		3,99		
2	19	03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan Pembinaan Olahraga	Persen	100,00	100,00	748.367.625,00	100,00	5.840.786.006,00	100,00	5.514.575.306,00	100,00	5.803.054.071,00	100,00	6.576.703.525,00	100,00	6.941.041.801,00	100,00	31.424.528.334,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
				Peningkatan Pelatih yang Bersertifikasi	Persen	12,96	12,96		50,00		87,03		100,00		100,00		100,00		100,00		
				Sarana dan Prasarana Olahraga yang Terpelihara	Persen	33,33	33,33		50,00		66,67		83,33		100,00		100,00		100,00		
				Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah	10,00	10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		
2	19	04	Program Pengembangan Kapasitas Kepemukaan	Persentase Pembinaan Organisasi Kepemukaan	Persen	100,00			100,00	1.030.000.000,00	100,00	1.081.500.000,00	100,00	1.135.575.000,00	100,00	1.192.353.000,00	100,00	1.251.971.000,00	100,00	5.691.399.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

URUSAN	KODE	BIDANG URUSAN	PROGRAM	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
								2021 (TAHUN 0)		2022 (TAHUN 1)		2023 (TAHUN 2)		2024 (TAHUN 3)		2025 (TAHUN 4)					2026 (TAHUN 5)	
								TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH				TARGET KINERJA	RUPIAH
2	20			STATISTIK					347.500.000,00		364.875.000,00		383.118.750,00		402.274.687,50		422.388.421,88		443.507.842,97	2.363.664.702,34		
2	20	02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Data dan Informasi Statistik Daerah yang Tersusun dengan Baik	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	347.500.000,00	Ada	364.875.000,00	Ada	383.118.750,00	Ada	402.274.687,50	Ada	422.388.421,88	Ada	443.507.842,97	2.363.664.702,34	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	21			PERSANDIAN					1.267.742.512,00		1.331.129.637,60		1.397.686.119,48		1.467.570.425,45		1.540.948.946,73		1.617.996.394,06	8.623.074.035,32		
2	21	02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Penguasaan Informasi	Persentase Penguasaan Informasi Daerah yang Terselenggara Baik	Persen	80,00	85,00	85,00	1.267.742.512,00	95,00	1.331.129.637,60	95,00	1.397.686.119,48	95,00	1.467.570.425,45	95,00	1.540.948.946,73	95,00	1.617.996.394,06	8.623.074.035,32	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	22			KEBUDAYAAN					1.170.000.000,00		1.736.500.000,00		1.823.325.000,00		1.914.489.250,00		1.993.180.562,50		2.110.724.740,63	10.748.219.553,13		
2	22	02	Program Pengembangan Kebudayaan	Karya budaya yang dilestarikan dan inventarisasi	Jumlah	52	62	62	970.000.000,00	74	913.500.000,00	83	959.175.000,00	92	1.007.133.750,00	100	1.057.490.437,50	100	1.110.364.959,38	6.017.664.146,88	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2	22	03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Kesenian yang dilestarikan	Jumlah	3	4	4	100.000.000,00	4	723.000.000,00	5	759.150.000,00	5	797.105.500,00	5	819.927.625,00	5	878.809.156,25	4.077.992.281,25	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2	22	04	Program Pembinaan Sejarah	Jumlah Sejarah yang Dilakukan Pembinaan	Kegiatan	0	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	105.000.000,00	1	110.250.000,00	1	115.762.500,00	1	121.550.625,00	652.563.125,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2	23			PERPUSTAKAAN					216.000.000,00		251.230.000,00		257.140.000,00		275.047.000,00		287.549.350,00		300.676.817,50	1.587.643.167,50		
2	23	02	Program Pembinaan Perpustakaan	Rasio Pengunjung Perpustakaan per Tahun	Angka	0,02	0,03	0,04	216.000.000,00	0,05	226.800.000,00	0,06	232.140.000,00	0,07	250.047.000,00	0,07	262.549.350,00	0,07	275.676.817,50	1.463.213.167,50	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2	23	03	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Koleksi Naskah Kuno dan Nasional yang Teridentifikasi	Jumlah	0		3	24.430.000,00	5	25.000.000,00	7	25.000.000,00	9	25.000.000,00	9	25.000.000,00	33	124.430.000,00		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2	24			KEARSIPAN					117.750.000,00		204.207.500,00		215.069.375,00		227.072.843,75		239.676.485,94		232.910.312,98	1.236.686.517,67		
2	24	02	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baik	Persen	14,80	16,60	18,50	68.000.000,00	20,30	151.970.000,00	22,20	160.220.000,00	24,00	169.481.000,00	24,00	179.205.050,00	24,00	169.415.305,25	898.291.355,25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2	24	03	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Arsip yang Teridentifikasi untuk Dimusnahkan	Jumlah	0	100	130	49.750.000,00	150	52.237.500,00	180	54.849.375,00	200	57.591.843,75	200	60.471.435,94	200	63.495.007,73	338.395.162,42	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					12.643.214.728,00		17.148.579.064,40		17.368.786.510,12		17.724.181.473,23		18.579.810.524,40		19.261.289.147,10	102.725.861.447,25		
3	25			KELAUTAN DAN PERIKANAN					875.450.000,00		919.222.500,00		965.183.625,00		1.013.442.806,25		1.064.114.946,57		1.117.320.693,89	5.954.734.571,71		
3	25	03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman	Persen	0,030	0,030	0,031	520.000.000,00	0,032	450.250.000,00	0,032	452.025.000,00	0,032	474.626.250,00	0,033	498.357.562,51	0,033	523.275.440,62	2.918.534.253,13	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Cakupan Bina Kelompok Nelayan	Persen	33,00	33,00	34,00		36,00		38,00		40,00		40,00		40,00	40,00			
				Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	Persen	58,48	58,48	58,48		58,47		58,47		58,48		58,48		58,48	58,48			
				Produksi Perikanan Tangkap	Ton	3.232,02	3.057,12	3.118,26		3.180,62		3.244,23		3.309,11		3.309,11		3.309,11	3.309,11			
3	25	04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	131,40	132,58	135,23	130.000.000,00	137,93	152.750.000,00	140,69	143.325.000,00	140,69	150.491.250,00	143,50	158.015.812,50	143,50	165.916.603,13	900.498.665,63	Dinas Kelautan dan Perikanan	

KODE			BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM					2021 (TAHUN 0)		2022 (TAHUN 1)		2023 (TAHUN 2)		2024 (TAHUN 3)		2025 (TAHUN 4)		2026 (TAHUN 5)					
							TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH		
3	25	05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Compliance (Persentase Kepatuhan) Pelaku Usaha Bidang Kelautan dan Perikanan	Persen	1,50	1,50	60.450.000,00	2,50	45.000.000,00	4,00	66.646.125,00	5,00	69.978.431,25	9,00	73.477.352,81	9,00	77.151.220,45	9,00	392.703.129,52	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	25	06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kap/Th	41,22	34,87	165.000.000,00	36,54	271.222.500,00	37,93	303.187.500,00	40,22	318.346.875,00	43,14	334.264.218,75	43,14	350.977.429,69	43,14	1.742.998.523,44	Dinas Kelautan dan Perikanan	
3	26	PARIWISATA							1.855.000.000,00		2.047.750.000,00		2.150.137.500,00		2.257.644.375,00		2.370.526.593,75		2.489.052.923,44		13.170.111.392,19	
3	26	02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Kunjungan wisata	Persen	100,00	100,00	80.000.000,00	100,00	84.000.000,00	100,00	88.200.000,00	100,00	92.610.000,00	100,00	97.240.500,00	100,00	102.102.525,00	100,00	544.153.025,00	Dinas Pariwisata	
			PAD Sektor Pariwisata	Persen	23,37	23,40		23,45		23,50		25,55		25,60		25,60		25,60				
3	26	03	Program Pemasaran Pariwisata	Lama kunjungan Wisata	Hari	1,50	1,50	100.000.000,00	1,60	105.000.000,00	1,70	110.250.000,00	1,80	115.762.500,00	1,90	121.550.625,00	1,90	127.628.156,25	1,90	680.191.281,25	Dinas Pariwisata	
			Rata-rata Belanja Wisatawan Nusantara	Rupiah/ Kunjungan		1.300.000,00	1.400.000,00		1.500.000,00		1.600.000,00		1.700.000,00		1.800.000,00		1.800.000,00		1.800.000,00			
			Rata-rata Belanja Wisatawan Mancanegara	Rupiah/ Kunjungan		9.800.000,00	9.950.000,00		10.100.000,00		10.250.000,00		10.400.000,00		10.550.000,00		10.550.000,00		10.550.000,00			
3	26	04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	Persen	n/a			2,35	100.000.000,00	2,36	105.000.000,00	2,37	110.250.000,00	2,38	115.762.500,00	2,38	121.550.625,00	2,38	552.563.125,00	Dinas Pariwisata	
3	26	05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Penyelenggaraan Event Ekonomi Kreatif	Persen	37,50	50,00	1.675.000.000,00	50,00	1.758.750.000,00	75,00	1.846.687.500,00	75,00	1.939.021.875,00	100,00	2.035.972.968,75	100,00	2.137.771.617,19	100,00	11.393.203.960,94	Dinas Pariwisata	
3	27	PERTANIAN							2.872.048.928,00		5.264.151.374,40		4.898.537.435,62		4.130.000.000,00		4.305.500.000,00		4.272.843.062,00		25.743.080.800,02	
3	27	02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas Padi	kw/ha	57,70	58,00	692.083.000,00	58,50	1.122.687.150,00	58,75	1.195.000.000,00	58,95	300.000.000,00	59,10	300.000.000,00	59,10	300.000.000,00	59,10	3.909.770.150,00	Dinas Pertanian	
				Produktivitas Jagung	kw/ha	48,13	48,30		48,50		48,87		49,15		49,30		49,30		49,30			
				Produksi Daging	Ton/Tahun	4.986,40	5.078,67		5.180,24		5.283,35		5.389,52		5.497,32		5.497,32		5.497,32			
				Produksi Telur	Ton/Tahun	124,41	124,12		126,90		129,43		132,03		134,67		134,67		134,67			
3	27	03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Sumur Bor untuk Peningkatan Produksi Pertanian	Jumlah	20,00	20,00	1.950.000.000,00	20,00	3.550.000.000,00	20,00	3.100.000.000,00	20,00	3.310.000.000,00	20,00	3.475.500.000,00	20,00	3.232.843.062,00	20,00	18.618.343.062,00	Dinas Pertanian	
				Persentase Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian	Persen	80,00	80,00		80,00		80,00		80,00		80,00		80,00		80,00			
3	27	04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Angka Kejadian Penyakit	Persen	8,20	7,50	229.965.928,00	6,80	241.464.224,40	6,10	253.537.435,62	5,40	270.000.000,00	4,70	280.000.000,00	4,70	290.000.000,00	4,70	1.564.967.588,02	Dinas Pertanian	
3	27	05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persen	100,00			100,00	50.000.000,00	100,00	50.000.000,00	100,00	50.000.000,00	100,00	50.000.000,00	100,00	50.000.000,00	100,00	250.000.000,00	Dinas Pertanian	
3	27	07	Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan Bina Kelompok Petani	Persen	60,00			70,00	300.000.000,00	75,00	300.000.000,00	80,00	200.000.000,00	85,00	200.000.000,00	85,00	400.000.000,00	85,00	1.400.000.000,00	Dinas Pertanian	

KODE		BIDANG URUSAN	URUSAN	PROGRAM	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
									2021 (TAHUN 0)		2022 (TAHUN 1)		2023 (TAHUN 2)		2024 (TAHUN 3)		2025 (TAHUN 4)		2026 (TAHUN 5)				
									TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH			
3	30				PERDAGANGAN					1.074.400.000,00		1.128.120.000,00		1.184.526.000,00		1.743.752.300,00		1.830.939.915,00		1.922.486.910,75		8.884.225.125,75	
3	30	03			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Jumlah Pasar Yang Ditata	Persen	40,00						20,00	350.000.000,00	20,00	367.500.000,00	20,00	385.875.000,00	100,00	1.103.375.000,00	Dinas Perdagangan	
3	30	04			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Kenaikan Harga Barang Pokok dan Bahan Penting	Persen	25,00	20,00	394.550.000,00	19,00	414.277.500,00	18,00	434.991.375,00	17,00	456.740.943,75	16,00	479.577.990,94	16,00	503.556.890,48	16,00	2.683.694.700,17	Dinas Perdagangan
3	30	05			Program Pengembangan Ekspor	Cakupan Promosi Perdagangan dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Persen	20,00	20,00	549.850.000,00	20,00	577.342.500,00	60,00	606.209.625,00	80,00	636.520.106,25	100,00	668.346.111,56	100,00	701.763.417,14	100,00	3.740.031.759,95	Dinas Perdagangan
3	30	06			Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Jumlah UTPP Yang Ditata/Tera Ulang	Persen	69,54	86,00	130.000.000,00	86,10	136.500.000,00	86,50	143.325.000,00	86,80	150.491.250,00	87,00	158.015.812,50	87,00	165.916.603,13	87,30	884.248.665,63	Dinas Perdagangan
						Persentase Jumlah UTPP Yang Diawasi	Persen	10,57	86,00		86,00		86,50		86,80		87,00		87,00		87,50		
3	30	07			Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Keikutsertaan pada Kegiatan Promosi Produk Asli Daerah	Persen	n/a						65,00	150.000.000,00	70,00	157.500.000,00	70,00	165.375.000,00	70,00	472.875.000,00	Dinas Perdagangan	
3	31				PERINDUSTRIAN					5.928.345.000,00		7.749.465.850,00		8.128.539.142,50		8.535.386.044,63		8.962.875.324,36		9.411.124.125,07		48.715.435.486,56	
3	31	02			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pertumbuhan Industri	Persen	2,38	2,43	5.570.225.000,00	2,52	7.369.465.850,00	2,62	7.729.539.142,50	2,71	8.116.436.044,63	2,77	8.522.677.824,36	2,77	8.949.231.750,07	2,77	46.257.575.611,56	Dinas Perindustrian
						Cakupan IKM yang mendapatkan Pembinaan dibandingkan dengan seluruh IKM (incremental)	Persen	12,44	8,51		12,45		12,55		12,75		12,91		12,91				
						Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	Persen	50,00	9,09		13,64		18,18		22,73		27,27		27,27				
3	31	03			Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi Terkait	Persen	53,85			60,00	155.000.000,00	62,50	162.750.000,00	64,71	170.887.500,00	66,67	179.431.875,00	66,67	188.403.468,75	66,67	856.472.843,75	Dinas Perindustrian
3	31	04			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	IKM yang Terinformasi dalam SINAS	IKM	6	7	358.120.000,00	8	225.000.000,00	9	236.250.000,00	10	248.062.500,00	11	260.465.625,00	11	273.488.906,25	11	1.601.387.031,25	Dinas Perindustrian
3	32				TRANSMIGRASI					37.970.800,00		39.869.340,00		41.862.807,00		43.955.947,35		46.153.744,72		48.461.431,95		258.274.071,02	
3	32	04			Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Cakupan Masyarakat di Wilayah Kumuh yang Mendapatkan Pemahaman Transmigrasi Dibandingkan Total Wilayah Kumuh	Persen	12,00	12,00	37.970.800,00	12,00	39.869.340,00	12,00	41.862.807,00	12,00	43.955.947,35	12,00	46.153.744,72	12,00	48.461.431,95	12,00	258.274.071,02	Dinas Tenaga Kerja

URUSAN	KODE	BIDANG URUSAN	PROGRAM	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								2021 (TAHUN 0)		2022 (TAHUN 1)		2023 (TAHUN 2)		2024 (TAHUN 3)		2025 (TAHUN 4)		2026 (TAHUN 5)					
								TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH		
4				UNSUR PENDUKUNG					176.849.392.304,88		224.014.264.296,79		235.964.808.212,36		248.565.364.472,75		261.852.113.765,65		275.863.294.605,04		1.423.109.237.657,46		
4	01			SEKRETARIAT DAERAH					77.077.347.888,88		119.131.347.760,87		125.706.917.057,58		132.654.591.952,73		139.996.016.735,60		147.754.121.827,58		742.320.343.223,25		
4	01	01	Program Administrasi Umum	Tingkat Layanan Administrasi Umum	Persen	100,00	100,00	37.167.954.786,00	100,00	56.330.352.525,30	100,00	59.146.870.151,57	100,00	62.104.213.659,14	100,00	65.209.424.342,10	100,00	68.469.895.559,21	100,00	348.428.711.023,31	Sekretariat Daerah (Bagian Umum dan Perengkapan)		
		Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Sekretariat Daerah Tepat Waktu		Persen	100,00	100,00	26.999.483.781,88	100,00	33.387.590.448,52	100,00	35.675.971.879,61	100,00	38.122.102.515,87	100,00	40.736.902.926,89	100,00	43.532.052.028,44	100,00	218.454.103.581,21	Sekreariat Daerah (Bagian Perencanaan dan Pelaporan)			
		Persentase OPD yang Mengumpulkan Laporan Kinerja (LAKIP) secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan		Persen	100,00	100,00	509.520.150,00	100,00	534.996.157,50	100,00	561.745.965,38	100,00	589.833.263,64	100,00	619.324.926,83	100,00	650.291.173,17	100,00	3.465.711.636,51	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)			
		Persentase Perangkat Daerah yang Berkinerja Baik		Persen	80,00	90,00		90,00		95,00		100,00		80,00		80,00		80,00					
		Persentase peningkatan kualitas pelayanan terhadap KDIH/WKDH		Persen	80,00	90,00	3.329.131.871,00	90,00	3.495.588.464,55	95,00	3.670.367.887,78	100,00	3.853.886.282,17	80,00	4.046.580.596,27	80,00	4.248.909.626,09	80,00	22.644.464.727,86	Sekretariat Daerah (Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan)			
		Persentase kebijakan pemerintah daerah yang terpublikasi		Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00					
4	01	02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kerjasama antar Wilayah dan Stakeholder yang Terlaksana dengan Baik	Persen	55,00	60,00	354.643.900,00	65,00	372.376.095,00	70,00	390.994.899,75	75,00	410.544.644,74	80,00	431.071.876,97	85,00	452.625.470,82	85,00	2.412.256.887,28	Sekretariat Daerah (Bagian Kerjasama)		
		Persentase Kegiatan Keagamaan dan Kemasyarakatan yang Terfasilitasi		Persen	100,00	100,00	3.768.491.250,00	100,00	19.814.915.812,50	100,00	20.805.661.603,13	100,00	21.845.941.683,28	100,00	22.938.238.667,45	100,00	24.085.150.900,82	100,00	113.258.399.917,17	Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat)			
		Persentase Peningkatan Penyusunan Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah		Persen	100,00	100,00	1.163.852.850,00	100,00	1.222.045.492,50	100,00	1.283.147.767,13	100,00	1.347.305.155,48	100,00	1.414.670.413,26	100,00	1.485.403.933,92	100,00	7.916.425.612,28	Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan)			
		Persentase Peningkatan Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan		Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00					
		Persentase Penanganan Konflik Pertanahan		Persen	50,00	50,00		60,00		65,00		60,00		70,00		70,00		70,00					
		Persentase Luas Lahan Bersertifikat		Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00					
		Persentase Kebijakan Daerah yang Telah Disahkan, Diputuskan dan Didokumentasikan		Persen	100,00	100,00	539.150.000,00	100,00	566.107.500,00	100,00	594.412.875,00	100,00	624.133.518,75	100,00	655.340.194,69	100,00	688.107.204,42	100,00	3.667.251.292,86	Sekretariat Daernh (Bagian Hukum)			
		Persentase Produk Hukum dan Informasi Hukum Daerah yang Berkualitas		Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00					
		Persentase Pemassalahan Hukum yang Ditangani dapat Diselesaikan		Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00					

URUSAN	BIDANG	URUSAN PROGRAM	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
								2021 (TAHUN 0)		2022 (TAHUN 1)		2023 (TAHUN 2)		2024 (TAHUN 3)		2025 (TAHUN 4)					2026 (TAHUN 5)
								TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH		TARGET KINERJA
4	01	03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Data, Informasi dan Rekomendasi Kebijakan Bidang Perekonomian yang Ditindaklanjuti dan Digunakan untuk Analisa Kebijakan	Persen	67,00	70,00	354.865.000,00	80,00	372.608.250,00	90,00	391.238.662,50	100,00	410.800.595,63	100,00	431.340.625,41	100,00	452.907.656,68	100,00	2.413.760.790,21	Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian)
			BUMD dengan Kategori Sehat dan Baik	Angka	4	5		5		5		5		5		5		5			
			Persentase OPD yang mengikuti Pembinaan Pengadaan Barang	Persen	100,00	100,00	1.639.160.000,00	100,00	1.721.118.000,00	100,00	1.807.173.900,00	100,00	1.897.532.595,00	100,00	1.992.409.224,75	100,00	2.092.029.685,99	100,00	11.149.423.405,74	Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Pembangunan)	
			Persentase OPD yang melaporkan kegiatan secara online melalui TEPPRA tepat waktu	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
			Tingkat partisipasi OPD, Swasta dan LSM dalam pelaksanaan evaluasi program Pembangunan	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
			Persentase Paket Pengadaan yang Dilakukan dengan Metode Kompetitif	Persen	100,00	100,00	1.251.094.300,00	100,00	1.313.649.015,00	100,00	1.379.331.465,75	100,00	1.448.298.039,04	100,00	1.520.712.940,99	100,00	1.596.748.588,04	100,00	8.509.834.348,82	Sekretariat Daerah (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)	
			Tingkat Kepuasan Pengguna terhadap Pelayanan PBLJ	Persen	80,00	85,00		90,00		95,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
4	02		SEKRETARIAT DPRD					99.772.044.416,00		104.882.916.535,92		110.257.891.154,77		115.910.772.520,02		121.856.097.030,04		128.109.172.777,46		680.788.894.434,21	
4	02	01	Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Perencanaan dan Anggaran Setuan DPRD yang Terintegrasi dengan Program-Program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran	Dokumen	Ada	Ada	60.766.420.616,00	Ada	63.927.011.545,92	Ada	67.254.190.915,27	Ada	70.756.887.268,54	Ada	74.444.517.516,00	Ada	78.327.014.287,70	Ada	415.476.042.149,44	Sekretariat DPRD
4	02	02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Rencana Tahunan (RKPD) yang Terintegrasi dengan Program-Program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran	Dokumen	Ada	Ada	39.005.623.800,00	Ada	40.955.904.990,00	Ada	43.003.700.239,50	Ada	45.153.885.251,48	Ada	47.411.579.514,05	Ada	49.782.158.489,75	Ada	265.312.852.284,78	Sekretariat DPRD
5			UNSUR PENUNJANG					158.633.117.332,00		100.748.181.374,75		105.881.090.443,49		110.677.888.365,66		116.700.527.983,95		121.936.559.633,14		714.577.365.132,99	
5	01		PERENCANAAN					3.612.000.000,00		3.440.000.000,00		3.720.000.000,00		4.235.000.000,00		4.515.000.000,00		4.090.000.000,00		23.612.000.000,00	
5	01	02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100,00	100,00	2.325.000.000,00	100,00	1.910.000.000,00	100,00	1.990.000.000,00	100,00	2.440.000.000,00	100,00	2.820.000.000,00	100,00	2.180.000.000,00	100,00	13.665.000.000,00	Bappeda
			Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
			Persentase Indikator Sasaran RPJMD yang tercapai target tahunannya	Dokumen	83,33	84,79		86,27		87,78		89,32		90,70		90,70		90,70			

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							2021 (TAHUN 0)		2022 (TAHUN 1)		2023 (TAHUN 2)		2024 (TAHUN 3)		2025 (TAHUN 4)		2026 (TAHUN 5)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
							TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	
5	01	03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPd	Persen	87,43	88,30	1.287.000.000,00	89,19	1.530.000.000,00	90,08	1.730.000.000,00	90,98	1.795.000.000,00	91,89	1.695.000.000,00	91,89	1.910.000.000,00	91,89	9.947.000.000,00	Bappeda
				Penjabaran Konsistensi Program RKPd kedalam APBD	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
				Persentase Indikator Program OPD yang Tercapai Targetnya	Persen	84,68	85,95		87,24		88,55		89,88		90,78		90,78		90,78		
5	02		KEUANGAN					148.218.280.607,00		89.680.452.813,50		94.164.475.454,18		98.872.692.626,88		103.816.322.458,23		109.007.143.831,14		643.759.367.790,93	
5	02	02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK atas LKPD	Predikat	WTP	WDP	139.446.275.607,00	WTP	80.469.847.563,50	WTP	84.493.339.941,68	WTP	88.718.000.338,76	WTP	93.153.895.555,70	WTP	97.811.595.583,48	WTP	584.092.954.590,11	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
				Persentase ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan RAPBD-P	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
				Persentase Ketepatan waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah secara ketentuan	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
5	02	03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Kesesuaian Data Rincian Total BMD dengan Aktiva Tetap di Neraca Pemerintah Daerah	Persen	100,00	100,00	1.882.005.000,00	100,00	1.976.105.250,00	100,00	2.074.910.512,50	100,00	2.178.656.038,13	100,00	2.287.588.840,03	100,00	2.401.968.282,03	100,00	12.801.233.922,69	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
				Persentase Penilaian dan Penghapusan BMD sesuai dengan Usulan OPD	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
5	02	04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pajak Daerah terhadap PAD	Persen	76,14	68,57	6.890.000.000,00	65,02	7.234.500.000,00	65,02	7.596.225.000,00	65,02	7.976.036.250,00	65,02	8.374.838.062,50	65,02	8.793.579.965,63	65,02	46.865.179.278,13	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5	03		KEPEGAWAIAN					3.497.836.725,00		3.672.728.561,25		3.856.364.989,31		4.049.183.238,78		4.251.642.400,72		4.464.224.520,75		23.791.980.435,81	
5	03	02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Persen	8,32	10,50	3.497.836.725,00	13,90	3.672.728.561,25	16,60	3.856.364.989,31	18,30	4.049.183.238,78	21,04	4.251.642.400,72	21,04	4.464.224.520,75	21,04	23.791.980.435,81	Badan Kepegawaian Daerah
				Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	Persen	39,50	51,60		63,80		75,90		82,05		93,91		93,91		93,91		
				Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah	Jabatan	39,00	39,00		39,00		39,00		39,00		39,00		39,00		234,00		
				Jumlah Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah	Jabatan	207,00	207,00		207,00		207,00		207,00		207,00		207,00		1.242,00		
				Jumlah Jabatan Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah	Jabatan	4.741	3.485		3.485		3.485		3.485		3.485		3.485		3.485		
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					2.100.000.000,00		2.205.000.000,00		2.315.250.000,00		2.431.012.500,00		2.552.563.125,00		2.680.191.281,25		14.284.016.906,25	
5	04	02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase CASN yang Lulus Pelatihan Dasar Formasi Umum	Persen	100,00	100,00	2.100.000.000,00	100,00	2.205.000.000,00	100,00	2.315.250.000,00	100,00	2.431.012.500,00	100,00	2.552.563.125,00	100,00	2.680.191.281,25	100,00	14.284.016.906,25	Badan Kepegawaian Daerah

URUSAN	KODE	BIDANG URUSAN	PROGRAM	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
								2021 (TAHUN 0)		2022 (TAHUN 1)		2023 (TAHUN 2)		2024 (TAHUN 3)		2025 (TAHUN 4)		2026 (TAHUN 5)				
								TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH			
5	05			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					1.205.000.000,00		1.750.000.000,00		1.825.000.000,00		1.090.000.000,00		1.565.000.000,00		1.695.000.000,00		9.130.000.000,00	
5	05	02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Persen	100,00	100,00	1.205.000.000,00	100,00	1.750.000.000,00	100,00	1.825.000.000,00	100,00	1.090.000.000,00	100,00	1.565.000.000,00	100,00	1.695.000.000,00	100,00	9.130.000.000,00	Bappeda	
				Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	Persen	42,86	62,96		92,59		92,59		92,59		92,59		92,59		92,59			
6				UNSUR PENGAWASAN					4.078.231.750,00		5.849.268.337,50		6.141.731.754,38		6.448.818.342,09		6.771.259.259,20		7.109.822.222,16		36.399.131.665,33	
6	01			INSPEKTORAT					4.078.231.750,00		5.849.268.337,50		6.141.731.754,38		6.448.818.342,09		6.771.259.259,20		7.109.822.222,16		36.399.131.665,33	
6	01	02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan OPD	Persen	80,00	80,00	3.570.731.750,00	80,00	3.749.268.337,50	85,00	3.936.731.754,38	85,00	4.133.568.342,09	90,00	4.340.246.759,20	90,00	4.557.259.097,16	90,00	24.287.806.040,33	Inspektorat	
				Persentase Tindak Lanjut Temuan	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
				Persentase Penanganan Kasus Pengaduan	Persen	85,00	85,00		85,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00			
6	01	03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pendampingan dan Asistensi APIP	Persen	75,00	75,00	507.500.000,00	75,00	2.100.000.000,00	80,00	2.205.000.000,00	80,00	2.315.250.000,00	85,00	2.431.012.500,00	85,00	2.552.563.125,00	85,00	12.111.325.625,00	Inspektorat	
7				UNSUR KEWILAYAHAN					132.197.183.383,00		141.370.542.552,15		148.447.394.679,76		155.875.014.413,75		163.672.515.134,43		171.858.390.891,15		913.421.041.054,24	
7	01			KECAMATAN					132.197.183.383,00		141.370.542.552,15		148.447.394.679,76		155.875.014.413,75		163.672.515.134,43		171.858.390.891,15		913.421.041.054,24	
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan	Persen	100,00	100,00	66.020.640.468,00	100,00	69.321.672.491,40	100,00	72.787.756.115,97	100,00	76.427.143.921,77	100,00	80.248.501.117,86	100,00	84.260.926.173,75	100,00	449.066.640.288,75	Kecamatan	
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Organisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan	Persen	80,00	80,00	21.565.106.943,00	80,00	22.643.362.290,15	80,00	23.775.530.404,66	85,00	24.964.306.924,89	85,00	26.212.522.271,13	90,00	27.523.148.384,69	90,00	146.683.977.218,52	Kecamatan	
7	01	04	Program Koordinasi Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Persentase Linmas (Perlindungan Masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persen	100,00	100,00	44.611.435.972,00	100,00	47.305.507.770,60	100,00	49.679.108.159,13	100,00	52.168.313.567,09	100,00	54.780.479.245,44	100,00	57.521.753.207,71	100,00	306.066.597.921,97	Kecamatan	
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta pelayanan pembangunan dan pemerintahan di kecamatan	Persen	100,00			100,00	1.050.000.000,00	100,00	1.102.500.000,00	100,00	1.157.625.000,00	100,00	1.215.506.250,00	100,00	1.276.281.562,50	100,00	5.801.912.812,50	Kecamatan	
7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas, Rekomendasi, Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Persen	85,00			90,00	1.050.000.000,00	95,00	1.102.500.000,00	100,00	1.157.625.000,00	100,00	1.215.506.250,00	100,00	1.276.281.562,50	100,00	5.801.912.812,50	Kecamatan	

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2020)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
								2021 (TAHUN 0)		2022 (TAHUN 1)		2023 (TAHUN 2)		2024 (TAHUN 3)		2025 (TAHUN 4)		2026 (TAHUN 5)			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	
								TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH	TARGET KINERJA	RUPIAH		TARGET KINERJA	RUPIAH
8				UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					2.170.300.000,00		4.853.150.000,00		5.062.057.500,00		115.706.405.875,00		5.436.726.268,75		5.678.563.132,19		138.907.202.775,94	
8	01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					2.170.300.000,00		4.853.150.000,00		5.062.057.500,00		115.706.405.875,00		5.436.726.268,75		5.678.563.132,19		138.907.202.775,94	
8	01	02		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persen	70,00	70,00	400.000.000,00	70,00	420.000.000,00	70,00	441.000.000,00	70,00	463.050.000,00	70,00	486.202.500,00	70,00	510.512.625,00	70,00	2.720.765.125,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	03		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	Persen	70,00	70,00	25.000.000,00	70,00	2.185.000.000,00	70,00	2.288.000.000,00	70,00	112.771.150.000,00	70,00	2.484.707.000,00	70,00	2.603.942.000,00	70,00	122.357.799.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	04		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang dibina	Persen	50,00	50,00	150.000.000,00	50,00	466.500.000,00	50,00	489.825.000,00	50,00	514.311.750,00	50,00	540.027.937,50	50,00	567.030.234,38	50,00	2.727.694.921,88	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	05		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Penanganan Konflik Keagamaan dan Ras	Persen	100,00	100,00	422.300.000,00	100,00	550.000.000,00	100,00	550.000.000,00	100,00	600.000.000,00	100,00	500.000.000,00	100,00	500.000.000,00	100,00	3.122.300.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial yang terselesaikan	Persen	78,00	80,00	1.173.000.000,00	80,00	1.231.650.000,00	80,00	1.293.232.500,00	80,00	1.357.894.125,00	80,00	1.425.788.831,25	80,00	1.497.078.272,81	80,00	7.978.643.729,06	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					Persentase SDM yang mempunyai kemampuan Deteksi Dini, Cegah Dini dan Tangkal Dini terhadap Kerawanan Konflik Sosial	Persen	56,00	60,00		60,00		60,00		60,00		60,00		60,00		60,00		
				TOTAL KEBUTUHAN ANGGARAN PEMBIAYAAN PROGRAM PEMBANGUNAN					2.409.649.186.646,79		2.590.457.018.340,23		2.735.757.668.629,81		2.995.724.299.641,21		3.044.097.669.969,58		3.215.498.102.539,44		16.991.183.945.767,10	

Keterangan
 Tidak Dilaksanakan pada Tahun Tersebut



BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan sasaran kinerja daerah disusun berdasarkan tujuan pembangunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi pembangunan. Penetapan sasaran kinerja daerah berdasarkan kerangka pendekatan strategis perencanaan dengan melakukan analisis faktor eksternal dan faktor internal. Sasaran kinerja daerah dalam RPJMD Tahun 2021-2026 pada proses pengukurannya diterjemahkan kedalam Indikator Kinerja Utama sebagai bagian dari akuntabilitas kinerja pembangunan dengan penjabaran kinerja jangka menengah kedalam kinerja tahunan.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*). Suatu indikator

kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2021-2026 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Ukuran keberhasilan atau pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Bandar Lampung disajikan pada Tabel 8.1 dan Indikator kinerja daerah dituangkan dalam Tabel 8.2 berikut ini.

Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Bandar Lampung

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2020)	TARGET CAPAIAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				2021 (TAHUN 0)	2022 (TAHUN 1)	2023 (TAHUN 2)	2024 (TAHUN 3)	2025 (TAHUN 4)	2026 (TAHUN 5)	
1	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	71,37	71,72	71,72	71,89	72,06	72,23	72,23	72,23
2	Prevalensi Stunting pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun)	Persen	6,6	6,60	6,50	6,40	6,30	6,20	6,20	6,20
3	Laju Pertumbuhan penduduk	Persen	1,109	1,109	1,109	1,109	1,109	1,109	1,109	1,109
4	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,93	10,945	10,96	10,975	10,99	11	11	11
5	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,64	15,37	16,14	16,95	17,80	18,68	18,68	18,68
6	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	Angka	93,86	93,87	93,88	93,90	93,93	93,96	93,96	93,96
7	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Tingkat Capaian	Madya	Madya	Madya	Madya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya
8	Persentase Pemuda Berprestasi	Persen	2,92	2,92	9,61	9,72	9,79	9,88	9,88	9,88
9	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	Persen	84,81	85,31	85,81	86,31	86,81	87,31	87,31	87,31
10	Persentase Daerah Rawan Banjir	Persen	60,00	55,00	50,00	45,00	40,00	35,00	35,00	35,00
11	RTLH yang tertangani pertahun	Persen	28,81	32,68	23,63	20,25	20,25	18,97	18,97	18,97
12	Persentase Kawasan Kumuh	Persen	1,500	1,167	0,890	0,650	0,390	0,170	0,170	0,170
13	Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW	Persen	53,24	54,14	54,65	55,15	55,65	56,20	56,20	56,20
14	Persentase Titik Kemacetan yang terselesaikan	Persen	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	80,00	80,00
15	Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persen	20,97	21,10	21,20	21,29	21,34	21,45	21,45	21,45
16	Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB	Persen	13,30	13,65	14,05	14,15	14,30	14,45	14,45	14,45

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2020)	TARGET CAPAIAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				2021 (TAHUN 0)	2022 (TAHUN 1)	2023 (TAHUN 2)	2024 (TAHUN 3)	2025 (TAHUN 4)	2026 (TAHUN 5)	
17	Kontribusi Jasa, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	Persen	15,42	15,33	15,34	15,36	15,38	15,45	15,45	15,45
18	Persentase UMKM yang Meningkatkan Labanya	Persen	26,30	26,30	31,50	34,20	39,49	44,70	44,70	44,70
19	Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat	Persen	8,28	16,96	18,11	19,12	20,34	21,53	21,53	21,53
20	Pertumbuhan Nilai Investasi (PMDN)	Persen	14,99	15,49	15,99	16,49	16,99	17,49	17,49	17,49
21	Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA)	Persen	4,05	4,55	5,05	5,55	6,05	6,55	6,55	6,55
22	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	8,78	8,78	8,51	8,10	7,28	7,12	7,12	7,12
23	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	Persen	91,19	91,29	91,43	91,57	91,71	91,85	91,85	91,85
24	Pendapatan Per Kapita Penduduk	Juta Rp	50,66	51,00 - 53,00	54 ,00- 56,00	57,00 -59,00	61,00-63,00	65,00 - 67,00	65,00 -67,00	65,00 -67,00
25	Persentase PMKS yang tertangani	Persen	70,00	74,00	77,00	80,00	84,00	88,00	88,00	88,00
26	Angka kriminalitas yang tertangani	Angka	1.302	1.411	1.531	1.625	1.679	1.724	1.724	1.724
27	Persentase Konflik Sosial, Keagamaan dan RAS yang tertangani	Persen	78,00	78,00	78,50	79,00	79,50	80,00	80,00	80,00
28	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	Persen	15,00	25,00	40,00	55,00	70,00	85,00	85,00	85,00
29	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	Skor	59,98 (CC)	60,05 (CC)	61,00 (CC)	61,03 (CC)	65,00 (B)	66,05 (B)	66,05 (B)	66,05 (B)
30	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	59,10	60,64	61,43	61,95	62,48	62,89	62,89	62,89
31	Indeks Resiko Bencana	Angka	152,816 (Tinggi)	145,932 (Tinggi)	139,048 (Tinggi)	132,164 (Tinggi)	125,28 (Sedang)	118,396 (Sedang)	118,396 (Sedang)	118,396 (Sedang)

Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Bandar Lampung

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2020)	TARGET CAPAIAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2021 (TAHUN 0)	2022 (TAHUN 1)	2023 (TAHUN 2)	2024 (TAHUN 3)	2025 (TAHUN 4)	2026 (TAHUN 5)	
I ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
I.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi									
1. Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-1,85	1,50 - 3,00	4,50 - 5,50	4,70 - 5,70	4,80 - 5,80	5,00 - 6,00	5,00 - 6,00	5,00 - 6,00
2. Laju Inflasi	Persen	1,93	2,0 ± 1	3,0 ± 1	3,0 ± 1	3,0 ± 1	3,0 ± 1	3,0 ± 1	3,0 ± 1
3. Pendapatan per Kapita	Juta Rp	50,66	51,00 - 53,00	54 ,00- 56,00	57,00 -59,00	61,00-63,00	65,00 - 67,00	65,00 -67,00	65,00 -67,00
4. Rasio Gini	Angka	0,359	0,332	0,327	0,323	0,318	0,313	0,313	0,313
5. Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB	Persen	13,30	13,65	14,05	14,15	14,30	14,45	14,45	14,45
6. Kontribusi Jasa, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	Persen	15,42	15,33	15,34	15,36	15,38	15,45	15,45	15,45
7. Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB	Persen	20,97	21,10	21,20	21,29	21,34	21,45	21,45	21,45
8. Pertumbuhan Industri	Persen	2,38	2,43	2,52	2,62	2,71	2,77	2,77	2,77
9. Rasio penduduk yang bekerja	Persen	91,2	91,2	93,12	92,55	94,81	95,7	95,7	95,7
10. Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	Persen	91,21	91,21	92,57	93,02	93,97	94,42	94,42	94,42
11. Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	Persen	25,13	27,5	29,25	30,75	31,25	31,75	31,75	31,75
12. Penguatan cadangan pangan pemerintah	Persen	24,08	24,08	30,00	40,00	50,00	60,00	60,00	60,00
13. Persentase daerah rawan pangan	Persen	8,70	8,00	7,00	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00
I.2 Fokus Kesejahteraan Sosial									
1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	77,44	77,45-77,64	77,65-77,99	78,00-78,49	78,50-78,99	79,00-79,48	79,00-79,48	79,00-79,48
2. Persentase Penduduk diatas garis kemiskinan	Persen	91,19	91,29	91,43	91,57	91,71	91,85	91,85	91,85
3. Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	10,93	10,95	10,96	10,98	10,99	11,00	11,00	11,00

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2020)	TARGET CAPAIAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2021 (TAHUN 0)	2022 (TAHUN 1)	2023 (TAHUN 2)	2024 (TAHUN 3)	2025 (TAHUN 4)	2026 (TAHUN 5)	
4. Angka harapan lama sekolah	Tahun	14,64	15,37	16,14	16,95	17,80	18,68	18,68	18,68
5. Angka harapan Hidup (AHH)	Tahun	71,37	71,72	71,72	71,89	72,06	72,23	72,23	72,23
6. Prevalensi Stunting pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun)	Persen	6,60	6,60	6,50	6,40	6,30	6,20	6,20	6,20
7. RTLH yang tertangani pertahun	Persen	28,81	32,68	23,63	20,25	20,25	18,97	18,97	18,97
8. Persentase Kawasan Kumuh	Persen	1,500	1,167	0,890	0,650	0,390	0,170	0,170	0,170
9. IPG (Indeks Pembangunan Gender)	Angka	93,86	93,87	93,88	93,90	93,93	93,96	93,96	93,96
10. IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	Angka	71,88	72,00	72,50	73,00	73,50	74,00	74,00	74,00
11. Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Tingkat capain	Madya	Madya	Madya	Madya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya
12. Laju pertumbuhan penduduk	Persen	1,109	1,109	1,109	1,109	1,109	1,109	1,109	1,109
I.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga									
1. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Persen	15,00	25,00	40,00	55,00	70,00	85,00	85,00	85,00
2. Persentase Pemuda Berprestasi	Persen	2,92	2,92	9,61	9,72	9,79	9,88	9,88	9,88
3. Cakupan pembinaan olahraga	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I.4 Fokus Reformasi Birokrasi									
1. Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	Skor	59,98 (CC)	60,05 (CC)	61,00 (CC)	61,03 (CC)	65,00 (B)	66,05 (B)	66,05 (B)	66,05 (B)
2. Hasil Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik	Predikat	A-	A-	A-	A	A	A	A	A
3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Angka	55,14	55,70	56,20	56,80	57,40	57,80	57,80	57,80
4. Indeks Inovasi Pemerintah daerah	Predikat	sangat inovatif	sangat inovatif	sangat inovatif	sangat inovatif	sangat inovatif	sangat inovatif	sangat inovatif	sangat inovatif
5. Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Skor/ Predikat	3/ST*)	3/ST	3/ST	3/ST	3/ST	3/ST	3/ST	3/ST

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2020)	TARGET CAPAIAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
					2021 (TAHUN 0)	2022 (TAHUN 1)	2023 (TAHUN 2)	2024 (TAHUN 3)	2025 (TAHUN 4)	2026 (TAHUN 5)	
II ASPEK PELAYANAN UMUM											
II.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib											
II.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar											
1. Pendidikan											
1.	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Angka	49,36	54,30	59,73	65,70	72,27	79,49	79,49	79,49	
2.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	Angka	108,14	112,34	116,83	121,51	126,37	131,42	131,42	131,42	
3.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	Angka	91,32	99,33	99,43	99,53	99,63	99,73	99,73	99,73	
4.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	Angka	96,37	100,22	104,23	108,40	112,74	117,25	117,25	117,25	
5.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	Angka	80,17	82,17	84,23	86,33	88,49	90,70	90,70	90,70	
6.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	83,79	84,84	85,90	86,97	88,06	89,16	89,16	89,16	
7.	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini	Persen	95,72	96,72	97,72	98,72	99,72	100,00	100,00	100,00	
8.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar	Persen	97,96	98,21	98,46	98,71	98,96	99,21	99,46	99,46	
2. Kesehatan											
1.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Angka	2	2	2	2	2	2	2	2	
2.	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	Kasus	10	10	10	10	10	10	10	10	
3.	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Kasus	212,00	364,00	393,00	386,00	384,00	379,00	379,00	379,00	
4.	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Rasio	1.:8969	1.:7288	1.:1689	1.:6407	1.:6042	1.:5773	1.:5526	1.:5526	
5.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persen	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
6.	Pelayanan Kesehatan Balita	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
7.	Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	Persen	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2020)	TARGET CAPAIAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2021 (TAHUN 0)	2022 (TAHUN 1)	2023 (TAHUN 2)	2024 (TAHUN 3)	2025 (TAHUN 4)	2026 (TAHUN 5)	
8. Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Persen	59,00	59,00	60,00	60,00	60,00	62,00	62,00	62,00
9. Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan	Persen	49,00	49,00	55,00	40,00	40,00	42,00	42,00	42,00
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	88,00	88,50	89,00	89,50	90,00	90,50	90,50	90,50
2. Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Angka	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
3. Persentase rumah tinggal bersanitasi	Persen	60,00	60,50	61,00	61,50	62,00	62,50	62,50	62,50
4. Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persen	65,47	66,47	68,47	68,47	70,47	70,47	70,47	70,47
5. Persentase penduduk berakses air minum	Persen	44,82	45,32	45,82	46,32	46,82	46,82	46,82	46,82
6. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	Persen	61,80	62,30	62,80	63,30	63,80	64,30	64,30	64,30
7. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	Persen	60,00	60,50	61,00	61,50	62,00	62,50	62,50	62,50
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman									
1. Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Persentase Rusunawa yang Terpelihara	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3. Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat									
1. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2020)	TARGET CAPAIAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2021 (TAHUN 0)	2022 (TAHUN 1)	2023 (TAHUN 2)	2024 (TAHUN 3)	2025 (TAHUN 4)	2026 (TAHUN 5)	
2. Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3. Persentase Perda dan Perkada yang di tegakkan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4. Cakupan pelayanan bencana daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	73,00	74,00	76,00	78,00	80,00	82,00	82,00	82,00
6. Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6. Sosial									
1. Persentase PMKS yang tertangani	Persen	70,00	74,00	77,00	80,00	84,00	88,00	88,00	88,00
2. Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4. Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5. Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	18,00	20,00	21,00	22,00	23,00	24,00	24,00	24,00
6. Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00	35,00	35,00
II.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
1. Tenaga Kerja									
1. Persentase sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Persen	55,73	55,73	55,21	54,68	52,32	51,55	51,55	51,55
2. Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Persen	39,58	39,58	42,00	49,02	52,63	53,92	53,92	53,92

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2020)	TARGET CAPAIAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2021 (TAHUN 0)	2022 (TAHUN 1)	2023 (TAHUN 2)	2024 (TAHUN 3)	2025 (TAHUN 4)	2026 (TAHUN 5)	
3. Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Persen	2,84	2,84	3,41	3,52	4,79	4,79	4,79	4,79
4. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persen	20,00	20,00	50,00	75,00	80,00	80,00	80,00	80,00
5. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenaga kerjaan)	Persen	24,00	34,00	44,00	54,00	64,00	74,00	74,00	74,00
2. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	2,54	2,54	2,79	3,04	3,29	3,54	3,54	3,54
2. Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	Persen	62,97	62,97	62,97	63,17	63,37	63,57	63,57	63,57
3. Rasio KDRT yang tertangani	Persen	0,53	0,53	0,78	1,03	1,28	1,53	1,53	1,53
4. Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	55,31	55,31	55,56	55,81	56,06	56,31	56,31	56,31
5. Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6. Cakupan Anak korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7. Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Persen	62,50	64,10	66,20	68,40	71,70	71,70	71,70	71,70
3. Pangan									
1. Skor Pola Pangan Harapan	Skor	85,50	86,00	86,20	86,50	86,75	87,00	87,00	87,00
2. Ketersediaan pangan utama	Persen	95,00	98,00	100,00	102,00	105,00	110,00	110,00	110,00
3. Ketersediaan Energi per kapita	(kkal/kap/hari)	2.490,00	2.500,00	2.510,00	2.520,00	2.530,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00
4. Ketersediaan Protein per kapita	(gr/kap/hari)	72,10	72,14	72,16	72,18	72,20	72,22	72,22	72,22
5. Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	Persen	85,00	85,50	86,00	87,00	87,50	88,00	88,00	88,00

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2020)	TARGET CAPAIAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2021 (TAHUN 0)	2022 (TAHUN 1)	2023 (TAHUN 2)	2024 (TAHUN 3)	2025 (TAHUN 4)	2026 (TAHUN 5)	
4. Pertanahan									
1. Persentase luas lahan bersertifikat	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Persentase penerbitan Izin lokasi	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5. Lingkungan Hidup									
1. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	9,00	9,00
2. RPPLH Kabupaten/Kota	dokumen			ada					ada
3. RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kab/Kota yang Terintegrasi	dokumen		ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
4. KLHS untuk K/R/P tingkat kab/kota	dokumen		ada			ada			ada
5. Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	indeks	54,00	57,00	58,00	58,30	58,60	58,60	58,60	58,60
6. Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	indeks	81,00	81,10	81,20	81,30	81,40	81,50	81,50	81,50
7. Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	indeks	27,37	29,06	30,75	32,44	34,13	35,82	35,82	35,82
8. Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Persen	60,00	60,00	61,00	61,00	63,00	64,00	64,00	64,00
9. Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	Persen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
10. Timbulan sampah yang ditangani	Persen	76,84	84,00	84,00	85,00	82,00	80,00	80,00	80,00
11. Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	Persen	3,16	5,00	10,00	15,00	18,00	20,00	20,00	20,00
12. Persentase cakupan area pelayanan	Persen	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13. Persentase jumlah sampah yang tertangani	Persen	80,00	89,00	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2020)	TARGET CAPAIAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2021 (TAHUN 0)	2022 (TAHUN 1)	2023 (TAHUN 2)	2024 (TAHUN 3)	2025 (TAHUN 4)	2026 (TAHUN 5)	
14. Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	60,00	60,00	61,00	62,00	63,00	64,00	64,00	64,00
6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil									
1. Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	Persen	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00	65,00	65,00
2. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah
3. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persen	95,00	97,00	99,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4. Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	Persen	96,07	97,00	98,00	99,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5. Pemanfaatan data kependudukan	Persen	93,00	94,00	95,00	96,00	97,00	98,00	98,00	98,00
6. IKM Pelayanan	Persen	83,36	84,27	85,11	85,96	86,62	87,69	87,69	87,69
7. Pemberdayaan Masyarakat Desa									
1. Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Persen	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
2. Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	Persen	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
1. Total Fertility Rate (TFR)	Persen	2,37	2,28	2,25	2,24	2,22	2,21	2,21	2,21
2. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	Persen	0,30	0,29	0,28	0,27	0,26	0,25	0,25	0,25
3. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	11,50	20,01	19,06	19,01	18,08	18,05	18,05	18,05
4. Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	Persen	57,01	59,92	61,99	63,59	64,90	66,01	66,01	66,01

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2020)	TARGET CAPAIAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2021 (TAHUN 0)	2022 (TAHUN 1)	2023 (TAHUN 2)	2024 (TAHUN 3)	2025 (TAHUN 4)	2026 (TAHUN 5)	
5. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	34,68	26,86	27,68	28,32	28,84	29,29	29,29	29,29
6. Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persen	72,79	66,17	66,80	66,95	67,15	67,20	67,20	67,20
7. Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Persen	87,00	89,00	90,00	92,00	94,00	95,00	95,00	95,00
9. Perhubungan									
1. Persentase Sarana dan Prasarana yang Memenuhi Standar dalam Kondisi Baik	Persen	96,00	96,00	96,00	97,00	97,00	98,00	98,00	98,00
2. Persentase Pelayanan Angkutan Darat	Persen	0,0826	0,0850	0,0875	0,0090	0,0925	0,0950	0,0950	0,0950
3. Menurunnya Tingkat Kecelakaan	Kejadian	220,00	200,00	195,00	190,00	185,00	180,00	180,00	180,00
10. Komunikasi dan Informatika									
1. Persentase Informasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang Terpublikasi	Persen	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
2. Presentase aplikasi IT dan aplikasi E -government yang mendukung smart city dan layanan publik yang berfungsi baik	Persen	80,00	80,00	85,00	85,00	90,00	100,00	100,00	100,00
3. Persentase Infrastruktur IT yang Berfungsi Baik	Persen	90,00	90,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
11 Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah									
1. Meningkatnya Koperasi Berkualitas	Persen	1,26	1,51	1,98	2,45	2,9	3,34	3,34	3,34
2. Persentase UKM non BPR/LKM aktif	Persen	36,89	37,50	38,00	38,50	40,50	42,75	42,75	42,75
3. Persentase BPR/LKM aktif	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4. Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Persen	63,10	64,50	65,50	66,50	67,30	68,50	68,50	68,50
5. Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru Berskala Mikro	Persen	12,80	15,00	18,40	21,00	23,60	26,80	26,80	26,80

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2020)	TARGET CAPAIAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2021 (TAHUN 0)	2022 (TAHUN 1)	2023 (TAHUN 2)	2024 (TAHUN 3)	2025 (TAHUN 4)	2026 (TAHUN 5)	
12 Penanaman Modal									
1. Jumlah/nilai investasi PMA	Dolar (\$)	630.598.514	640.057.491,71	640.057.491,71	649.658.354,09	649.658.354,09	659.403.229,40	659.403.229,40	669.294.277,84
2. Jumlah/nilai investasi PMDN	Juta Rupiah (Rp)	2.210.331,00	2.243.485,97	2.277.138,25	2.311.295,33	2.345.964,76	2.381.154,23	2.416.871,54	2.453.124,62
3. Rasio daya serap tenaga kerja	Orang/ perusahaan	7,85	8,35	8,85	9,35	9,85	10,35	10,35	10,35
4. Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	Persen	14,99	16,49	18,47	20,21	21,95	23,69	23,69	23,69
13 Kepemudaan dan Olah Raga									
1. Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Persentase wirausaha muda	Persen	3,54	3,54	3,66	3,77	3,88	3,99	3,99	3,99
3. Peningkatan pelatih yang Bersertifikasi	Persen	12,96	50,00	87,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4. Atlet Berprestasi	Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	3,54	3,54	3,66	3,77	3,88	3,99	3,99	3,99
14 Statistik									
1. Data dan Informasi Statistik Daerah yang Tersusun dengan Baik	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
15 Persandian									
1. Presentase Pengamanan Informasi Daerah yang Terselenggara Baik	Persen	80,00	85,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
16 Kebudayaan									
1. Karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Jumlah	52,00	62,00	74,00	83,00	92,00	100,00	100,00	100,00
2. Sanggar seni yang lestari	Jumlah	10	13	18	24	31	39	39	39

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2020)	TARGET CAPAIAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2021 (TAHUN 0)	2022 (TAHUN 1)	2023 (TAHUN 2)	2024 (TAHUN 3)	2025 (TAHUN 4)	2026 (TAHUN 5)	
3. Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dilindungi	Unit	31,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	6,00	31,00
17 Perpustakaan									
1. Rasio Pengunjung Perpustakaan per Tahun	Angka	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,07	0,07
2. Koleksi Naskah kuno dan Nasional yang teridentifikasi	Jumlah	0		3	5	7	9	9	33
18 Kearsipan									
1. Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	14,80	16,60	18,50	20,30	22,20	24,00	24,00	24,00
2. Arsip yang Teridentifikasi untuk Dimusnahkan	Jumlah	-	100,00	130,00	150,00	180,00	200,00	200,00	960,00
3. Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisanbudaya yang dipreservasi	Arsip	20	30	40	50	60	70	70	70
II.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan									
1 Kelautan dan Perikanan									
1. Produksi perikanan tangkap	Ton	3.232,02	3.057,12	3.118,26	3.180,62	3.244,23	3.309,11	3.309,11	3.309,11
2. Produksi Perikanan Budidaya	Ton	131,40	132,58	135,23	137,93	140,69	143,50	143,50	143,50
3. Angka konsumsi ikan	Kg/kap/Th	41,22	34,87	36,54	37,93	40,22	43,14	43,14	43,14
4. Cakupan bina kelompok nelayan	Persen	33,00	33,00	34,00	36,00	38,00	40,00	40,00	40,00
5. Produksi perikanan kelompok nelayan	Persen	58,48	58,48	58,48	58,47	58,47	58,48	58,48	58,48
6. Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	Persen	0,030	0,030	0,031	0,032	0,032	0,033	0,033	0,033
2 Pariwisata									
1. Persentase kunjungan wisata	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Lama kunjungan Wisata	Hari	1,50	1,50	1,60	1,70	1,80	1,90	1,90	1,90

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2020)	TARGET CAPAIAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2021 (TAHUN 0)	2022 (TAHUN 1)	2023 (TAHUN 2)	2024 (TAHUN 3)	2025 (TAHUN 4)	2026 (TAHUN 5)	
3. Kontribusi PAD sektor pariwisata	Persen	23,37	23,40	23,45	23,50	25,55	25,60	25,60	25,60
4. Rata-rata Belanja Wisatawan Domestik	Rupiah/ Kunjungan	1.300.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	16.000.000,00	1.700.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
5. Rata-rata Belanja Wisatawan Mancanegara	Rupiah/ Kunjungan	9.800.000,00	9.950.000,00	10.100.000,00	10.250.000,00	10.400.000,00	10.550.000,00	10.550.000,00	10.550.000,00
3 Pertanian									
1. Produktivitas padi	kw/ha	57,70	58,00	58,50	58,75	58,95	59,10	59,10	49,30
2. Produktivitas jagung	kw/ha	48,13	48,30	48,50	48,87	49,15	49,30	49,30	49,30
3. Produksi Jagung	ton/tahun	49,864,00	50,786,72	5,180,24	5,283,35	5,389,52	5,283,35	5,497,32	5,497,32
4. Produksi Telur	ton/tahun	124,41	124,12	126,90	129,43	132,03	134,67	134,67	134,67
5. Presentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	Persen	78,00	80,00	85,00	86,00	88,00	90,00	90,00	90,00
6. Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	Persen	8,20	7,50	6,80	6,10	5,40	4,70	4,70	4,70
4 Perdagangan									
1. Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	Persen	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
2. Inflasi Pangan bergejolak	Persen	1,93	2,0 ± 1	3,0 ± 1	3,0 ± 1	3,0 ± 1	3,0 ± 1	3,0 ± 1	3,0 ± 1
3. Cakupan Promosi Perdagangan dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Persen	20,00	20,00	20,00	60,00	80,00	100,00	100,00	100,00
4. Persentase Jumlah UTP Yang Ditera/Tera Ulang	Persen	69,54	86,00	86,10	86,50	86,80	87,00	87,00	87,00
5 Perindustrian									
1. Cakupan bina kelompok pengrajin	Persen	50,00	9,09	13,64	18,18	22,73	27,27	27,27	27,27
2. IKM yang Terinformasi dalam SINAS	IKM	6	7	8	9	10	11	11	11

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2020)	TARGET CAPAIAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2021 (TAHUN 0)	2022 (TAHUN 1)	2023 (TAHUN 2)	2024 (TAHUN 3)	2025 (TAHUN 4)	2026 (TAHUN 5)	
6 Transmigrasi									
1. Cakupan Masyarakat di Wilayah Kumuh yang Mendapatkan Pemahaman Transmigrasi Dibandingkan Total Wilayah Kumuh	Persen	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
II.3 Fokus Layanan Unsur Pendukung									
1 Sekretariat Daerah									
1. Tingkat Layanan Administrasi Umum	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Persentase Produk Hukum dan Informasi Hukum Daerah yang Berkualitas	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2 Sekretariat DPRD									
1. Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Rencana Tahunan (RKPD) yang Terintegrasi dengan Program-Program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran	dokumen	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
2. Perencanaan dan Anggaran Setwan DPRD yang Terintegrasi dengan Program-Program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran	dokumen	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
II.4 Fokus Layanan Unsur Penunjang									
1 Perencanaan									
1. RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	dokumen	ada					Ada (Rancangan Akhir RPJPD)	ada	ada
2. RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	dokumen	ada	ada			ada (Teknokratik RPJMD)	ada		ada

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2020)	TARGET CAPAIAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2021 (TAHUN 0)	2022 (TAHUN 1)	2023 (TAHUN 2)	2024 (TAHUN 3)	2025 (TAHUN 4)	2026 (TAHUN 5)	
3. RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	dokumen	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
4. Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	87,43	88,30	89,19	90,08	90,98	91,89	91,89	91,89
5. Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6. Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2 Keuangan									
1. Opini BPK terhadap laporan keuangan	Predikat	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2. Persentase ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan RAPBD-P	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3. Persentase Kesesuaian Data Rincian Total BMD dengan Aktiva Tetap di Neraca Pemerintah Daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Kepegawaian									
1. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persen	8,32	10,50	13,90	16,60	18,30	21,04	21,04	21,04
2. Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persen	39,50	51,60	63,80	75,90	82,05	93,91	93,91	93,91
3. Jumlah Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah	Jabatan	207	207	207	207	207	207	207	207
4. Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Jabatan	4.741	3.485	3.485	3.485	3.485	3.485	3.485	3.485

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2020)	TARGET CAPAIAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2021 (TAHUN 0)	2022 (TAHUN 1)	2023 (TAHUN 2)	2024 (TAHUN 3)	2025 (TAHUN 4)	2026 (TAHUN 5)	
4 Pendidikan dan pelatihan									
1. Persentase CASN yang Lulus Pelatihan Dasar Formasi Umum	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5 Penelitian dan pengembangan									
1. Persentase implementasi rencana kelitbangan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3. Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Persen	42,86	62,96	92,59	92,59	92,59	92,59	92,59	92,59
4. Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	Persen	90,00	90,00	90,00	90,00	95,00	95,00	95,00	95,00
II.5 Fokus Layanan Unsur Pengawas									
1 Inspektorat									
1. Persentase Tindak Lanjut Temuan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Persentase Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan OPD	Persen	80,00	80,00	80,00	85,00	85,00	90,00	90,00	90,00
3. Persentase Pendampingan dan Asistensi APIP	Persen	75,00	75,00	75,00	80,00	80,00	85,00	85,00	85,00
II.6 Fokus Layanan Unsur Kewilayahan									
1 Kecamatan									
1. Presentase koordinasi perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam peningkatan pelayanan masyarakat serta pelayanan administrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Organisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan	Persen	80,00	80,00	80,00	80,00	85,00	85,00	85,00	85,00

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2020)	TARGET CAPAIAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2021 (TAHUN 0)	2022 (TAHUN 1)	2023 (TAHUN 2)	2024 (TAHUN 3)	2025 (TAHUN 4)	2026 (TAHUN 5)	
3. Presentase Linmas (Perlindungan Masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
II.7 Fokus Layanan Unsur Pemerintahan Umum									
1 Kesatuan Bangsa dan Politik									
1. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persen	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
2. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	Persen	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
3. Persentase SDM yang Mempunyai Kemampuan Deteksi Dini, Cegah Dini dan Tangkal Dini terhadap Kerawanan Konflik Sosial	Persen	56,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
III ASPEK DAYA SAING DAERAH									
III.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah									
1. Persentase PAD terhadap pendapatan	Persen	25,45	36,34	29,50	29,85	29,75	29,65	29,50	29,50
2. Opini BPK	Predikat	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3. Pertumbuhan Nilai Investasi (PMDN)	Persen	14,99	15,49	15,99	16,49	16,99	17,49	17,49	17,49
4. Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA)	Persen	4,05	4,55	5,05	5,55	6,05	6,55	6,55	6,55
5. BUMD dengan Kategori Sehat dan Baik	Angka	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
6. Persentase UMKM yang Meningkatkan Labanya	Persen	26,30	26,30	31,50	34,20	39,49	44,70	44,70	44,70
7. Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat	Persen	8,28	16,96	18,11	19,12	20,34	21,53	21,53	21,53
8. Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	85,50	86,00	86,20	86,50	86,75	87,00	87,00	87,00
III.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur									
1. Indeks Infrastruktur	Angka	92,54 (tinggi)	93,93 (tinggi)	94,87 (tinggi)	95,82 (tinggi)	92,54 (tinggi)	96,77 (tinggi)	96,77 (tinggi)	96,77 (tinggi)
2. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	Persen	84,81	85,31	85,81	86,31	86,81	87,31	87,31	87,31

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2020)	TARGET CAPAIAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2021 (TAHUN 0)	2022 (TAHUN 1)	2023 (TAHUN 2)	2024 (TAHUN 3)	2025 (TAHUN 4)	2026 (TAHUN 5)	
3. Persentase daerah rawan banjir	Persen	60,00	55,00	50,00	45,00	40,00	35,00	35,00	35,00
4. Persentase Titik Kemacetan yang Terselesaikan	Persen	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	80,00	80,00
5. Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW	Persen	53,24	54,14	54,65	55,15	55,65	56,20	56,20	56,20
6. Indeks Resiko Bencana	Angka	152,816 (Tinggi)	145,932 (Tinggi)	139,048 (Tinggi)	132,164 (Tinggi)	125,28 (Sedang)	118,396 (Sedang)	118,396 (Sedang)	118,396 (Sedang)
7. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	59,10	60,64	61,43	61,95	62,48	62,89	62,89	62,89
III.3 Fokus Iklim Berinvestasi									
1. Angka kriminalitas yang tertangani	Angka	1.302	1.411	1.531	1.625	1.679	1.724	1.724	1.724
2. Persentase Konflik Sosial, Keagamaan dan RAS yang tertangani	Persen	78,00	78,00	78,50	79,00	79,50	80,00	80,00	80,00
3. Persentase Penegakan PERDA	Persen	78,00	78,00	78,50	79,00	79,50	80,00	80,00	80,00
III.4 Fokus Sumber Daya Manusia									
1. Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	Persen	8,78	8,78	8,51	8,10	7,28	7,12	7,12	7,12
2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	67,79	70,00	72,35	74,90	76,62	78,26	78,26	78,26



Tidak Dilaksanakan pada Tahun Tersebut



BAB IX PENUTUP

Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 yang merupakan perencanaan jangka menengah tahap ke empat dalam RPJPD periode tahun 2005-2025 ini pada dasarnya menjabarkan perencanaan strategis yang erat kaitannya dengan proses menetapkan arah perkembangan Kota Bandar Lampung kedepannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang; bagaimana mencapainya; dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai sesuai visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. Selanjutnya penjabaran RPJMD ini ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen RKPD setiap tahunnya.

9.1 Pedoman Transisi

Untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan serta dalam rangka mengisi kekosongan RKPD setelah berakhirnya RPJMD periode 2016-2026 atau mengantisipasi rencana pelaksanaan Pilkada serentak di tahun 2020, maka dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 ini akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama dibawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode berikutnya. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan pembangunan yang belum dapat ditangani secara tuntas sampai dengan akhir periode RPJMD, serta untuk mencari solusi terhadap permasalahan pembangunan baru yang muncul pada tahun pertama masa

pemerintahan Kepala Daerah yang baru. Untuk target pembangunan yang telah tercapai pada periode sebelumnya, maka Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) perlu merumuskan kembali serta menetapkan besaran target baru yang akan dicapai pada masa transisi dengan menggunakan Peraturan Kepala Daerah. Selanjutnya, dokumen RKPD masa transisi tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen RPJMD periode selanjutnya.

9.2 Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Tahun 2021-2026 diharapkan dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, partisipatif dan penuh tanggung jawab. Dokumen ini menjadi dasar bagi Perangkat Daerah dalam rangka menyusun Renstra Perangkat Daerah dan selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

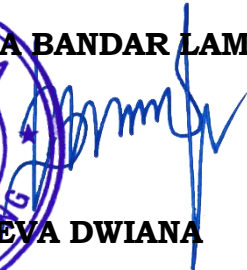
1. Pemerintah Kota Bandar Lampung beserta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban dan bertanggung jawab atas pelaksanaan program-program yang dimuat dalam RPJMD Tahun 2016-2021 dengan sebaik-baiknya baik pada tahun berkenaan maupun pada masa transisi tahun;
2. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung berkewajiban untuk menyusun Renstra yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program pembangunan dalam mencapai visi dan misi daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026;
3. Pemerintah Kota Bandar Lampung wajib menjamin konsistensi antara RPJMD Tahun 2021-2026 dengan RPJMN dan RPJMD Provisi Lampung;
4. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung wajib menjamin konsistensi antara dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 dengan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.
5. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026, Bappeda wajib melakukan penyelarasan antara penjabaran RPJMD Tahun 2021-2026 ke dalam Renstra Perangkat Daerah dan melakukan harmonisasi program dengan RKPD serta melakukan



monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja untuk mengukur pencapaian target atau rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026;

6. Bagi program prioritas Pemerintah Daerah yang mempunyai hubungan dengan prioritas Pemerintah Kota Bandar Lampung maupun prioritas nasional, dimana terdapat kemungkinan bahwa Pemerintah Daerah tidak mampu mengalokasikan anggaran terhadap program tersebut, maka dalam hal pembiayaannya dapat dilakukan melalui berbagai macam skema, antara lain melalui kerjasama dengan Badan Usaha (*Public Private Partnership*), *Corporate Social Responsibility* (CSR), maupun Kerjasama Kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah, baik dalam negeri maupun lembaga-lembaga internasional dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Dalam hal pelaksanaan RPJMD ini, apabila target kinerja yang ditetapkan tidak tercapai ataupun telah tercapai, maka perlu dirumuskan Kembali besaran target kinerja baru dan selanjutnya untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah.

Demikian RPJMD Tahun 2021-2026 disusun untuk menjadi landasan dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Bandar Lampung kedepan.

**WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,**

EVA DWIANA

